BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan pagu dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Sumpur Kudus menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Sijunjung ke dalam rencana program dan kegiatan tahun berjalan beserta dengan penganggarannya. Perubahan Renja Kecamatan Sumpur Kudus memuat berbagai perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Sumpur Kudus, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
2. Keadaan yang menyebabkan turunnya nilai anggaran dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Sumpur Kudus dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Sumpur Kudus tahun 2025 yang mana hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Renja Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung ini adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah triwulan II tahun 2025
c. Perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tidak sesuai dengan target semula.

Berdasarkan hal-hal diatas maka perlu dialukan Perubahan dokumen Renja Kecamatan Sumpur Kudus tahun 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Sumpur Kudus tahun 2025.

1.1 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025 selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Sijunjung, RKPD Provinsi Sumatera Barat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Perubahan Renja Tahun 2025 juga disusun memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih hasil pilkada tahun 2024, sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja triwulan I dan II 2025 serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.1.1 Keterkaitan Renja Kecamatan Sumpur Kudus dengan RKPD Kabupaten Sijunjung dan RKPD Provinsi Sumatera Barat

Keterkaitan Perubahan Renja Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Sijunjung dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah terkait sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan agenda / prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Untuk selanjutnya, Prioritas Perubahan Renja Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025 dalam kesesuaian antara prioritas kabupaten dan provinsi serta nasional Tahun 2025. Memang prioritas kabupaten dan provinsi serta nasional tahun 2025 tidak persis sama dari sisi nomenklatur

dengan prioritas Renja Kecamatan tahun 2025, namun setidaknya secara substansial selaras,

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentuan Daerah Otonom Kaupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perancanganan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025 adalah mewujudkan sebuah dokumen Perubahan Renja yang selaras dengan penganggaran untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah diwilayah kecamatan serta pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif dengan fungsi :

a. Sebagai penjabaran Rancangan Strategis Kecamatan Sumpur Kudus tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menunjang urusan pemerintahan daerah.

b. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan visi, misi pembangunan daerah.

c. Memfasilitasi dan mengkoodinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat nagari/desa dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari/desa diwilayah kecamatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumpur Kudus ini adalah untuk mensinergiskan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran serta untuk :

a. Mensinkronisasikan perancanganan perangkat daerah dengan perancanganan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sumpur Kudus dengan target dan sasaran kinerja pembangunan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD, Renstra Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

b. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perancanganan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Sumpur Kudus.

d. Membuat acuan perancanganan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Sumpur Kudus.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kerja-PD Kantor Camat Sumpur Kudus Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 SistematikaPenulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas da Fungsi PD

2.4 Review Terhadap rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program, kegiatan dan Sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Program, kegiatan dan Sub kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun anggaran yaitu pada Tahun 2024, Perangkat Daerah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan visi dan misi kecamatan yang diselarasaskan dengan visi, misi daerah Kabupaten Sijunjung yaitu " Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani" Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi kinerja dan pelaksanaan anggaran Kecamatan Sumpur Kudus yang akan disajikan dalam capaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Perbandingan Program/ Kegiatan Pada DPA 2024 dengan RKA 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN		DPA 2024	RKA 2025
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**2.169.430.945,00**	**2.188.541.300,00**
	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.781.318.663,00	1.841.202.122,00
	2.	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	9.150.000,00	7.000.000,00
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.431.750,00	168.593.396,00
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.110.000,00	0
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.730.532,00	147.678.782,00
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.690.000,00	24.067.000,00
II	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**107.594.000,00**	**22.670.000,00**
	7.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	107.594.000,00	22.670.000,00
III	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		**37.980.000,00**	**22.380.000,00**
	8.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.980.000,00	22.380.000,00
IV	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**81.417.000,00**	**9.900.000,00**
	9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.417.000,00	9.900.000,00
V	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		63.097.000,00	19.800.000,00
	10.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	63.097.000,00	19.800.000,00

		Pengawasan Pemerintahan Desa		
		JUMLAH	**2.459.518.945,00**	**2.263.291.300,00**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kajian terhadap Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumpur Kudus berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sumpur Kudus dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.
- Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa di Wilayah Kecamatan.
- Indikator kinerja : Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju.

  Jumlah Nagari dengan kategori minimal maju/jumlah nagari x 100, target sebesar 54%. Program pendukung yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan.
- Indikator Kinerja 1 : Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

  (Jumlah pelanggaran trantibum tahun n-1 - jumlah pelanggaran trantibum tahun n)/jumlah pelanggaran trantibum tahun n-1 x 100, target sebesar 30%. Program pendukung yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Indikator kinerja 2 : Persentase Penurunan Potensi Komplik/SARA.

  (Jumlah potensi komplik tahun n-1 - jumlah potensi komplik tahun n)/jumlah potensi komplik tahun n-1 x 100, target sebesar 30%. Program pendukung yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

4. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari/Desa.
- Indikator Kinerja 1 : Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai Standar.

  Jumlah nagari yang difasilitasi pengelolaan keuangan nagari sesuai stsndar/jumlah nagari x 100. Target sebesar 90%. Program pendukung yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Indikator Kinerja 2 : Persentase Administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai Standar.

Jumlah nagari yang difasilitasi Administrasi pemerintahan nagari sesuai standar/jumlah nagari x 100. Target sebesar 90%. Program pendukung yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5. Sasaran 4 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Camat.

- Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakan (IKM).
  Total dari nilai prespsi per unsur/total unsur yang terisi x nilai penimbang. Target sebesar 85. Program pendukung yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

- Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
  Nilai laporan hasil evaluasi akuntabilitas dari Inspektorat Daerah. Target nilai 85. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Sumpur Kudus yang merupakan tolak ukur dari pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sumpur Kudus dengan memperhatikan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, Pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Sumpur Kudus sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Sijunjung yang mana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 Pada Tahun ke 4, sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan Target Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Isu strategis dan permasalahan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Sumpur Kudus dengan tujuan MeningkatkanKualitas Pelayanan Publik,yang diberikan perangkat daerah kepada masyarakat. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Kecamatan Sumpur Kudus sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalm menunjang urusan pemerintahan daerah, pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Sumpur Kudus masih memerlukan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam menghadapi tantangan kedepan sebagai pusat pelayanan di wilayah

kecamatan,koordinasi serta fasilitasi kegiatan pembangunan di nagari dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Kurangnya tenaga jasa administrasi dan tenaga jasa pelayanan serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
2. Profesionalitas kerja pegawai yang belum optimal berdasarkan perjanjian kerja dan integritas.
3. Sumber daya tidak memadai.
4. Gedung Banguna kantor tempat kerja tidak refresentatif untuk mendukung kenyaman kerja.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpur Kudus, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan masyarakat nagaridan mendorong partisipasi kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam pembangunan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, inovatif dan murah.
3. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan nagari dengan peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik diwilayah kecamatan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, fasilitasi terhadap penyelnggaraan pemerintahan di Kecamatan Sumpur Kudus.

2. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara perangkat daerah sebagai stecholder dalam penunjang urusan pemerintah daerah atau instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan peran kecamatan sebagai koordinasi dan fasilitasi sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan kepala daerah.
2. Mengoordinir pemberdayaan masyarakat nagari dengan seluruh pemangku pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
3. Memfasilitasi Pembinaan dan Pengwasan pemerintahan nagari di wilayah kecamatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Kerja Kecamatan Sumpur Kudus berdasarkan RKPD Kabupaten Sijunjung sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sumpur Kudus. Rancangan awal prioritas pembangunan pada Renja-Perangkata Daerah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil

kajian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rentang waktu perancanganan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan.

Sebagai dasar perwujudan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung untuk Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menuju Nagari Madani, dalam mewujudkan Kabupaten Sijunjung Yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani" dengan misi sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1) Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel 2) Meningkatnya birokrasi yang berkinerja 3) Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif
2	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasi pengembangan sektor unggulan daerah	1) Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi
		Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	1) Meningkatnya pendapatan masyarakat 2) Menurunnya penduduk miskin dan pengangguran 3) Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat
3			1) Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi 2) Meingkatnya derajat kesehatan masyarakat 3) Menurunnya prelevansi stunting 4) Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda
		Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlandaskan ABS-SBK	1) Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal
4		Terwujudnya infrastruktur dan prasaran dasar yang berkualitas dan merata	1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan 2) Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana

Secara geografis Kecamatan Sumpur Kudus Secara geografis Kecamatan Sumpur Kudus dengan luas daerah 575,40 KM², posisi koordinat 00-26,49 Lintang Selatan dan 100 - 54,29 Bujur Timur, 365 Meter dari Permukaan Laut dan Luas 575,40 KM2 terletak pada wilayah dataran rendah dan perbukitan bergelombang, terdiri dari 11 Nagari, 55 Jorong, Dengan jumlah penduduk sebanyak 25.904 Jiwa terdiri dari 7366 KK, dan jumlah Laki-laki 13.024 jiwa, Perempuan 12.880 jiwa, Wilayah Kecamatan Sumpu Kudus berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Provinsi Riau

Sebelah Timur berbatasan dengan: Kecamatan Sijunjung

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Koto VII

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Kabupaten Tanah Datar

Dilihat dari kondisi Topografi Kecamatan Sumpur Kudus merupakan dataran rendah dan perbukitan yang dialiri oleh banyak sungai sedang dan kecil terletak pada dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Aliran Sungai Batang Sinamar dan Aliran Sungai Batang Sumpu, Dengan Topografi Kecamatan Sumpur Kudus yang daerahnya dataran rendah, perbukitan bergelombang sangat cocok sebagai daerah pertanian tanaman pangan, perkebunanan dan perikanan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

2. Jumlah Penduduk

3. Tingkat Kemiskinan.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana.

Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi PD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain :

1. Pembangunan Bidang Pendidikan.
2. Pembangunan Bidang Kesehatan.
3. Pembangunan Bidang Ekonomi.
4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana.

Pada Tahun 2025 ada 5 Program 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dalam Rancangan Kerja (Renja) Kecamatan Sumpur Kudus yaitu ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Yang terdiri dari 6 Kegaiatan 16 Sub Kegaiatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
3. Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Baratdan pengaruhnya terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung yang dirancangankan pada Tahun 2023. Dengan keluarnya permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perancanganan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 dilakukan pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perancanganan pembangunan dan keuangan daerah.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarissasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perancanganan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumpur Kudus melaksanakan telaahan terhadap kebijakan nasional terhadap pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Maka dalam penyusunan perancanganan keuangan Tahun 2025 berdasarkan hasil pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah diklasifikasi untuk memudahkan penyusunan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, perlu diambil beberapa strategi untuk lebih mengarahkan hal tersebut diatas antara lain :

1. Adanya strategi teknis dan inovasi pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif.
2. Adanya Strategi Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi yang berkualitas.
3. Adanya Strategi untuk mingkatan indek perkembangan nagari membangun.
4. Adaya Strategi Manajemen Pemerintah yang Profesionalitas untuk mengembangkan sumberdaya ASN.
5. Dan adanya strategi pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran dilakukan dengan melaksanakan beberapa kebijakan melalui program dan kegiatan yaitu :

a. Program penunjung urusan pemerintahan daerah kab/kota :

1) Perancanganan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4) Administrasi umum perangkat daerah

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6) Penyediaan jasa penurang urusan perangkat daerah

7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dari Renstra Kecamatan Sumpur Kudus tahun 2021-2026. Adapun tujuannya sebagai berikut:

" MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN "

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah KecamatanSijunjung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai penganggaran dari APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang ditetapka melalui KUA-PPAS dan di uraikan dalanm RKA Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2025. Adapun sasarannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa di Wilayah Kecamatan.

2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan.
3. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari/Desa.
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Camat.
5. Meningkat Akuntabilitas Kinerja Organisasi

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Kantor Camat Sumpur Kudus untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Kantor Camat Sumpur Kudus untuk Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Target			PAGU INDIKATIF		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang
1	**KECAMATAN SUMPUR KUDUS**					**2,263,291,300**	**2,120,212,472**	**143,078,828**
								0
	UNSUR KEWILAYAHAN					**2,263,291,300**	**2,120,212,472**	**143,078,828**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kecamatan Sumpur Kudus**	**79**	**79**		**2,188,541,300**	**2,089,876,472**	**98,664,828**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**100%**	**100%**		**1,841,202,122**	**1,841,202,122**	**0**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sumpur Kudus	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan		1,841,202,122	1,841,202,122	**0**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**Paket**	**Paket**		**7,000,000**	**0**	**7,000,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Sumpur Kudus	20 Paket	20 Paket		7,000,000	0	**7,000,000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**100%**	**100%**		**168,593,396**	**90,250,959**	**78,342,437**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Paket	1 Paket		586,000	293,000	**293,000**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sumpur Kudus	2 Paket	2 Paket		0	0	**0**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Paket	1 Paket		9,820,700	6,655,400	**3,165,300**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sumpur Kudus	2 Paket	2 Paket		3,197,000	1,352,500	**1,844,500**

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sumpur Kudus	100 Laporan	100 Laporan		154,989,696	81,950,059	**73,039,637**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sumpur Kudus	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Kecamatan Sumpur Kudus	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan Sumpur Kudus	0	0		0	0	**0**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**100%**	**100%**		**147,678,782**	**144,523,391**	**3,155,391**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sumpur Kudus	12 Laporan	12 Laporan		6,310,782	3,155,391	**3,155,391**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sumpur Kudus	12 Laporan	12 Laporan		141,368,000	141,368,000	**0**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**100%**	**100%**		**24,067,000**	**13,900,000**	**10,167,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaran perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan						**5,000,000**	**-5,000,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sumpur Kudus	12 Unit	12 Unit		21,000,000	8,000,000	**13,000,000**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sumpur Kudus	12 Unit	12 Unit		1,460,000	900,000	**560,000**
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumpur Kudus	4 Unit	4 Unit		997,000	0	**997,000**

	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumpur Kudus	4 Unit	4 Unit		610,000	0	**610,000**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**100 %**	**100 %**		**22,670,000**	**10,656,000**	**12,014,000**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**63 Lembaga Masyarakat**	**63 Lembaga Masyarakat**		**22,670,000**	**10,656,000**	**12,014,000**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Kecamatan Sumpur Kudus	63 Lembaga Masyarakat	63 Lembaga Masyarakat		4,905,000	4,905,000	**0**
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Laporan	1 Laporan		17,765,000	5,751,000	**12,014,000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**90 %**	**95%**		**9,900,000**	**4,680,000**	**5,220,000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**90 %**	1 Dokumen		**9,900,000**	**4,680,000**	**5,220,000**
	Pembinaan Kerukunan antar suku danintra suku umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujutkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Dokumen	1 Dokumen		9,900,000	4,680,000	**5,220,000**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**95%**	1 Dokumen		**19,800,000**	**9,360,000**	**10,440,000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaahan Desa	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**95%**	**100%**		**19,800,000**	**9,360,000**	**10,440,000**

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Dokumen	**100%**		9,900,000	4,680,000	**5,220,000**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaya guna aset desa	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Dokumen	1 Laporan		0	0	**0**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Dokumen			9,900,000	4,680,000	**5,220,000**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**100%**			**22,380,000**	**5,640,000**	**16,740,000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kabupaten Sumpur Kudus**	**100%**			**22,380,000**	**5,640,000**	**16,740,000**
	Sinegritas dengan Kepolisiaan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sumpur Kudus	1 Laporan			22,380,000	5,640,000	**16,740,000**

BAB IV

RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai suatu keharusan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atas landasan Peraturan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung agar melaksanakan penginputan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi tersebut dibangun oleh Kemendagri dengan alamat web **https://sipd.kemendagri.go.id**.

Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perangkat Daerah didampingi oleh admin dari Bapppeda Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Admin Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, setiap operator dari masing-masing Perangkat Daerah diberikan Username Perangkat Daerah, yang mana kegiatan ini dimulai pada Bulan Agustus 2024.

Dalam penginputan perubahan Renja ini Perangkat Daerah harus mempedomani RPJMD 2021-2026 dan hasil Pemetaan serta pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019,

BAB VI
PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sumpur Kudus di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai dengan yang direncanakan.

Kecamatan Sumpur Kudus sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumpur Kudus yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sumpur Kudus demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Sumpur Kudus telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kumanis, April 2025
CAMAT SUMPUR KUDUS

FERI YURNALIS,S.STP
NIP. 19930616 201507 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KANTOR CAMAT KAMANG BARU

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

KECAMATAN KAMANG BARU

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas Izin-nya sehingga telah di mudahkan kita sampai pada tahap Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025. Solawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa Salam kepada Kelurga dan Sahabat Beliau.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dilaksanakan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kamang Baru ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 seta mempedomani hasil Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I serta pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2025.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 beserta seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Kamang, September 2025
CAMAT KAMANG BARU

ASRIJAL, SH
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19680607 199103 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kamang Baru Triwulan I 9
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kamang Baru 20
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KAMANG BARU 26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kamang Baru 27
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KAMANG BARU 43
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48
5.1 Indikator Kinerja Utama 48
BAB VI PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Semester Pertama Apbd Dan Pragnosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 10
Tabel 2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung 25
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 31
Tabel 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan Kantor Camat Kamang Baru Perubahahan 2025 Kabupaten Sijunjung 44
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kamang Baru 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan pagu dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Kamang Baru menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Sijunjung ke dalam rencana program dan kegiatan tahun berjalan beserta dengan penganggarannya. Perubahan Renja Kecamatan Kamang Baru memuat berbagai perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Kamang Baru, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuain dengan perkembangan keadaan,meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
2. Keadaan yang menyebabkan turunnya nilai anggaran dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Kamang Baru dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan I pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Kamang Baru tahun 2025 yang mana hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Renja Kecamatan Kamang Baru kabupaten Sijunjung ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai triwulan I tahun 2025
2. Perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tidak sesuai dengan target semula.

Berdasarkan hal-hal diatas maka perlu dialukan Perubahan dokumen Renja Kecamatan Kamang Baru tahun 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Kamang Baru tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja Daerah dan petunjuk teknis bagian dana Alokasi Umum yang di tentukan penggunaannya.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012-2030;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 agar terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya di Kantor Camat Kamang Baru untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 adalah:

a. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.
b. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Kamang Baru sampai dengan triwulan I tahun 2025
c. Sebagai pedoman dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Kecamatan Kamang Baru.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KAMANG BARU TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kamang Baru Triwulan I

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kamang Baru

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KAMANG BARU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kamang Baru

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KAMANG BARU

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 IKU

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KAMANG BARU TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kamang Baru Triwulan I

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kamang Baru Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025 merupakan penjabaran dari urusan kewilayahan yang di dijabarkan dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemeberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kamang Baru triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Semester Pertama Apbd
Dan Pragnosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Angaran	Pronogsis	Ket
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3,460,000.00**	**930,000.00**	**(2,530,000.00)**	**2,530,000.00**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3,460,000.00**	**930,000.00**	**(2,530,000.00)**	**2,530,000.00**	
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**3,460,000.00**	**930,000.00**	**(2,530,000.00)**	**2,530,000.00**	
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**3,460,000.00**	**930,000.00**	**(2,530,000.00)**	**2,530,000.00**	
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**3,460,000.00**	**930,000.00**	**(2,530,000.00)**	**2,530,000.00**	
4.1.02.02.01.0003	**Retribusi Penyewaan Bangunan**	**3,460,000.00**	**930,000.00**	**(2,530,000.00)**	**2,530,000.00**	
5	**BELANJA DAERAH**	1,801,276,246.00	796,923,850.00	1,004,352,396.00		
5.1	**BELANJA OPERASI**	1,801,276,246.00	796,923,850.00	1,004,352,396.00		
5.1.01	**Belanja Pegawai**	1,477,192,006.00	663,945,141.00	813,246,865.00		
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	324,084,240.00	132,978,709.00	191,105,531.00		
5.2	**BELANJA MODAL**	-	-	-		
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	-	-	-		
KECAMATAN KAMANG BARU		**1,801,276,246.00**	**796,923,850.00**	**1,004,352,396.00**		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1,754,160,086.00**	**781,632,550.00**	**972,527,536.00**	**972,527,536.00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2,982,800.00**	**2,005,100.00**	**977,700.00**	**977,700.00**	
7.01.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2,982,800.00**	**2,005,100.00**	**977,700.00**	**977,700.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	2,982,800.00	2,005,100.00	977,700.00	977,700.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,982,800.00	2,005,100.00	977,700.00	977,700.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	1,652,800.00	1,210,100.00	442,700.00	442,700.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,652,800.00	1,210,100.00	442,700.00	442,700.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,437,600.00	995,700.00	441,900.00	441,900.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	154,300.00	153,500.00	800.00	800.00	

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60,900.00	60,900.00	-	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,330,000.00	795,000.00	535,000.00	535,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,330,000.00	795,000.00	535,000.00	535,000.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,330,000.00	795,000.00	535,000.00	535,000.00	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1,493,051,706.00**	**670,692,841.00**	**822,358,865.00**	**822,358,865.00**	
7.01.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**1,490,072,006.00**	**668,420,141.00**	**821,651,865.00**	**821,651,865.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	1,490,072,006.00	668,420,141.00	821,651,865.00	821,651,865.00	
5.1.01	Belanja Pegawai	1,490,072,006.00	668,420,141.00	821,651,865.00	821,651,865.00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,011,444,800.00	456,970,323.00	554,474,477.00	554,474,477.00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	704,702,821.00	325,944,373.00	378,758,448.00	378,758,448.00	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	704,702,821.00	325,944,373.00	378,758,448.00	378,758,448.00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	83,515,802.00	40,921,436.00	42,594,366.00	42,594,366.00	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83,515,802.00	40,921,436.00	42,594,366.00	42,594,366.00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	91,168,000.00	47,360,000.00	43,808,000.00	43,808,000.00	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	91,168,000.00	47,360,000.00	43,808,000.00	43,808,000.00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11,391,030.00	1,625,000.00	9,766,030.00	9,766,030.00	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11,391,030.00	1,625,000.00	9,766,030.00	9,766,030.00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41,527,511.00	19,336,140.00	22,191,371.00	22,191,371.00	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	41,527,511.00	19,336,140.00	22,191,371.00	22,191,371.00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,606,109.00	976,118.00	629,991.00	629,991.00	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,606,109.00	976,118.00	629,991.00	629,991.00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10,549.00	4,115.00	6,434.00	6,434.00	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,549.00	4,115.00	6,434.00	6,434.00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	65,489,068.00	18,447,765.00	47,041,303.00	47,041,303.00	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	65,489,068.00	18,447,765.00	47,041,303.00	47,041,303.00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,798,798.00	588,840.00	1,209,958.00	1,209,958.00	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,798,798.00	588,840.00	1,209,958.00	1,209,958.00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5,196,469.00	1,766,536.00	3,429,933.00	3,429,933.00	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5,196,469.00	1,766,536.00	3,429,933.00	3,429,933.00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5,038,643.00	-	5,038,643.00	5,038,643.00	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5,038,643.00	-	5,038,643.00	5,038,643.00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	465,747,206.00	206,974,818.00	258,772,388.00	258,772,388.00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja					

	ASN	442,732,762.00	198,224,818.00	244,507,944.00	244,507,944.00	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	442,732,762.00	198,224,818.00	244,507,944.00	244,507,944.00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23,014,444.00	8,750,000.00	14,264,444.00	14,264,444.00	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23,014,444.00	8,750,000.00	14,264,444.00	14,264,444.00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12,880,000.00	4,475,000.00	8,405,000.00	8,405,000.00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12,880,000.00	4,475,000.00	8,405,000.00	8,405,000.00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12,880,000.00	4,475,000.00	8,405,000.00	8,405,000.00	
7.01.01.2.02.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**2,979,700.00**	**2,272,700.00**	**707,000.00**	**707,000.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	2,979,700.00	2,272,700.00	707,000.00	707,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,979,700.00	2,272,700.00	707,000.00	707,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	1,599,700.00	1,592,700.00	7,000.00	7,000.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,599,700.00	1,592,700.00	7,000.00	7,000.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,404,000.00	1,397,000.00	7,000.00	7,000.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	195,700.00	195,700.00	-	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,380,000.00	680,000.00	700,000.00	700,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,380,000.00	680,000.00	700,000.00	700,000.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,380,000.00	680,000.00	700,000.00	700,000.00	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	
7.01.01.2.05.0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	-	-	-	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**49,619,580.00**	**22,631,735.00**	**26,987,845.00**	**26,987,845.00**	
7.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	721,200.00	300,000.00	421,200.00	421,200.00	
5.1	BELANJA OPERASI	721,200.00	300,000.00	421,200.00	421,200.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	721,200.00	300,000.00	421,200.00	421,200.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	721,200.00	300,000.00	421,200.00	421,200.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	721,200.00	300,000.00	421,200.00	421,200.00	

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	721,200.00	300,000.00	421,200.00	421,200.00	
7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	8,107,900.00	3,596,100.00	4,511,800.00	4,511,800.00	
5.1	BELANJA OPERASI	8,107,900.00	3,596,100.00	4,511,800.00	4,511,800.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,107,900.00	3,596,100.00	4,511,800.00	4,511,800.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	8,107,900.00	3,596,100.00	4,511,800.00	4,511,800.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8,107,900.00	3,596,100.00	4,511,800.00	4,511,800.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4,668,100.00	1,868,000.00	2,800,100.00	2,800,100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	900,000.00	250,000.00	650,000.00	650,000.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2,539,800.00	1,478,100.00	1,061,700.00	1,061,700.00	
7.01.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	1,745,800.00	428,200.00	1,317,600.00	1,317,600.00	
5.1	BELANJA OPERASI	1,745,800.00	428,200.00	1,317,600.00	1,317,600.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,745,800.00	428,200.00	1,317,600.00	1,317,600.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	1,745,800.00	428,200.00	1,317,600.00	1,317,600.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,745,800.00	428,200.00	1,317,600.00	1,317,600.00	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	690,000.00	-	690,000.00	690,000.00	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	905,800.00	428,200.00	477,600.00	477,600.00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,872,000.00	823,200.00	1,048,800.00	1,048,800.00	
5.1	BELANJA OPERASI	1,872,000.00	823,200.00	1,048,800.00	1,048,800.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,872,000.00	823,200.00	1,048,800.00	1,048,800.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	1,872,000.00	823,200.00	1,048,800.00	1,048,800.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,872,000.00	823,200.00	1,048,800.00	1,048,800.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,872,000.00	823,200.00	1,048,800.00	1,048,800.00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,645,700.00	2,805,000.00	840,700.00	840,700.00	
5.1	BELANJA OPERASI	3,645,700.00	2,805,000.00	840,700.00	840,700.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,645,700.00	2,805,000.00	840,700.00	840,700.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	3,645,700.00	2,805,000.00	840,700.00	840,700.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,645,700.00	2,805,000.00	840,700.00	840,700.00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,645,700.00	2,805,000.00	840,700.00	840,700.00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,526,980.00	14,679,235.00	18,847,745.00	18,847,745.00	

5.1	BELANJA OPERASI	33,526,980.00	14,679,235.00	18,847,745.00	18,847,745.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33,526,980.00	14,679,235.00	18,847,745.00	18,847,745.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	9,419,280.00	6,399,250.00	3,020,030.00	3,020,030.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9,419,280.00	6,399,250.00	3,020,030.00	3,020,030.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,419,280.00	6,399,250.00	3,020,030.00	3,020,030.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24,107,700.00	8,279,985.00	15,827,715.00	15,827,715.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24,107,700.00	8,279,985.00	15,827,715.00	15,827,715.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,257,700.00	4,699,985.00	6,557,715.00	6,557,715.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,850,000.00	3,580,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	
5.2	BELANJA MODAL	-	-	-	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-	-	-	-	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	-	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	-	-	-	-	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	-	-	-	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**164,376,000.00**	**63,574,174.00**	**100,801,826.00**	**100,801,826.00**	
7.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**15,672,000.00**	**3,767,674.00**	**11,904,326.00**	**11,904,326.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	15,672,000.00	3,767,674.00	11,904,326.00	11,904,326.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,672,000.00	3,767,674.00	11,904,326.00	11,904,326.00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15,672,000.00	3,767,674.00	11,904,326.00	11,904,326.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15,672,000.00	3,767,674.00	11,904,326.00	11,904,326.00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7,865,000.00	-	7,865,000.00	7,865,000.00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2,031,000.00	-	2,031,000.00	2,031,000.00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5,776,000.00	3,767,674.00	2,008,326.00	2,008,326.00	
7.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**148,704,000.00**	**59,806,500.00**	**88,897,500.00**	**88,897,500.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	148,704,000.00	59,806,500.00	88,897,500.00	88,897,500.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148,704,000.00	59,806,500.00	88,897,500.00	88,897,500.00	

5.1.02.02	Belanja Jasa	148,704,000.00	59,806,500.00	88,897,500.00	88,897,500.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	147,600,000.00	59,450,000.00	88,150,000.00	88,150,000.00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55,800,000.00	21,200,000.00	34,600,000.00	34,600,000.00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	55,800,000.00	23,250,000.00	32,550,000.00	32,550,000.00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1,104,000.00	356,500.00	747,500.00	747,500.00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	490,656.00	158,441.00	332,215.00	332,215.00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	613,344.00	198,059.00	415,285.00	415,285.00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44,130,000.00**	**22,728,700.00**	**21,401,300.00**	**21,401,300.00**	
7.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**41,250,000.00**	**21,187,100.00**	**20,062,900.00**	**20,062,900.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	41,250,000.00	21,187,100.00	20,062,900.00	20,062,900.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41,250,000.00	21,187,100.00	20,062,900.00	20,062,900.00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41,250,000.00	21,187,100.00	20,062,900.00	20,062,900.00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,250,000.00	21,187,100.00	20,062,900.00	20,062,900.00	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5,250,000.00	2,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	36,000,000.00	18,687,100.00	17,312,900.00	17,312,900.00	
7.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**2,880,000.00**	**1,541,600.00**	**1,338,400.00**	**1,338,400.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	2,880,000.00	1,541,600.00	1,338,400.00	1,338,400.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,880,000.00	1,541,600.00	1,338,400.00	1,338,400.00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2,880,000.00	1,541,600.00	1,338,400.00	1,338,400.00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,880,000.00	1,541,600.00	1,338,400.00	1,338,400.00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	-	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2,880,000.00	1,541,600.00	1,338,400.00	1,338,400.00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5,025,000.00**	**963,600.00**	**4,061,400.00**	**4,061,400.00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan**					

	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**5,025,000.00**	**963,600.00**	**4,061,400.00**	**4,061,400.00**	
7.01.02.2.01.0002	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**	**5,025,000.00**	**963,600.00**	**4,061,400.00**	**4,061,400.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	5,025,000.00	963,600.00	4,061,400.00	4,061,400.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,025,000.00	963,600.00	4,061,400.00	4,061,400.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	3,585,000.00	793,600.00	2,791,400.00	2,791,400.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,585,000.00	793,600.00	2,791,400.00	2,791,400.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,905,500.00	298,600.00	1,606,900.00	1,606,900.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	163,300.00	-	163,300.00	163,300.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	121,800.00	-	121,800.00	121,800.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,394,400.00	495,000.00	899,400.00	899,400.00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-	-	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,440,000.00	170,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,440,000.00	170,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,440,000.00	170,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	-	-	
7:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8,004,900.00**	**1,005,500.00**	**6,999,400.00**	**6,999,400.00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**8,004,900.00**	**1,005,500.00**	**6,999,400.00**	**6,999,400.00**	
7.01.03.2.01.0003	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**8,004,900.00**	**1,005,500.00**	**6,999,400.00**	**6,999,400.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	8,004,900.00	1,005,500.00	6,999,400.00	6,999,400.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,004,900.00	1,005,500.00	6,999,400.00	6,999,400.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	4,764,900.00	670,500.00	4,094,400.00	4,094,400.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4,764,900.00	670,500.00	4,094,400.00	4,094,400.00	

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,430,000.00	670,500.00	1,759,500.00	1,759,500.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	221,100.00	-	221,100.00	221,100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	121,800.00	-	121,800.00	121,800.00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,992,000.00	-	1,992,000.00	1,992,000.00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-	-	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3,240,000.00	335,000.00	2,905,000.00	2,905,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,240,000.00	335,000.00	2,905,000.00	2,905,000.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,240,000.00	335,000.00	2,905,000.00	2,905,000.00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11,380,600.00	-	11,380,600.00	11,380,600.00	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**11,380,600.00**	**-**	**11,380,600.00**	**11,380,600.00**	
7.01.05.2.01.0007	**Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal**	**11,380,600.00**	**-**	**11,380,600.00**	**11,380,600.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	11,380,600.00	-	11,380,600.00	11,380,600.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,380,600.00	-	11,380,600.00	11,380,600.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	6,800,600.00	-	6,800,600.00	6,800,600.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6,800,600.00	-	6,800,600.00	6,800,600.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,822,500.00	-	1,822,500.00	1,822,500.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	62,100.00	-	62,100.00	62,100.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,916,000.00	-	4,916,000.00	4,916,000.00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	-	-	-	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4,580,000.00	-	4,580,000.00	4,580,000.00	

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,580,000.00	-	4,580,000.00	4,580,000.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,580,000.00	-	4,580,000.00	4,580,000.00	
7:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**22,705,660.00**	**13,322,200.00**	**9,383,460.00**	**9,383,460.00**	
07.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**22,705,660.00**	**13,322,200.00**	**9,383,460.00**	**9,383,460.00**	
07.01.06.2.01.0003	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**4,364,800.00**	**636,500.00**	**3,728,300.00**	**3,728,300.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	4,364,800.00	636,500.00	3,728,300.00	3,728,300.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,364,800.00	636,500.00	3,728,300.00	3,728,300.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	2,084,800.00	391,500.00	1,693,300.00	1,693,300.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,084,800.00	391,500.00	1,693,300.00	1,693,300.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,080,000.00	391,500.00	688,500.00	688,500.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	372,000.00	-	372,000.00	372,000.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	121,800.00	-	121,800.00	121,800.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	97,000.00	-	97,000.00	97,000.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	414,000.00	-	414,000.00	414,000.00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,280,000.00	245,000.00	2,035,000.00	2,035,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,280,000.00	245,000.00	2,035,000.00	2,035,000.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,280,000.00	245,000.00	2,035,000.00	2,035,000.00	
07.01.06.2.01.0006	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**	**2,973,760.00**	**-**	**2,973,760.00**	**2,973,760.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	2,973,760.00	-	2,973,760.00	2,973,760.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,973,760.00	-	2,973,760.00	2,973,760.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	2,163,760.00	-	2,163,760.00	2,163,760.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,163,760.00	-	2,163,760.00	2,163,760.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	976,860.00	-	976,860.00	976,860.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	63,600.00	-	63,600.00	63,600.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60,900.00	-	60,900.00	60,900.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,062,400.00	-	1,062,400.00	1,062,400.00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	810,000.00	-	810,000.00	810,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	810,000.00	-	810,000.00	810,000.00	

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	810,000.00	-	810,000.00	810,000.00	
7.01.06.2.01.0009	**Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**	**15,367,100.00**	**12,685,700.00**	**2,681,400.00**	**2,681,400.00**	
5.1	BELANJA OPERASI	15,367,100.00	12,685,700.00	2,681,400.00	2,681,400.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,367,100.00	12,685,700.00	2,681,400.00	2,681,400.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	11,987,100.00	11,080,700.00	906,400.00	906,400.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11,987,100.00	11,080,700.00	906,400.00	906,400.00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,323,000.00	904,200.00	418,800.00	418,800.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	422,400.00	-	422,400.00	422,400.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60,900.00	-	60,900.00	60,900.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,180,800.00	10,176,500.00	4,300.00	4,300.00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	600,000.00	600,000.00	-	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	600,000.00	600,000.00	-	-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600,000.00	600,000.00	-	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,780,000.00	1,005,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,780,000.00	1,005,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,780,000.00	1,005,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	
JUMLAH		**1,801,276,246.00**	**796,923,850.00**	**1,004,352,396.00**	**1,004,352,396.00**	

Kamang, 30 Juni 2025
Camat Kamang Baru

ASRIJAL, SH
NIP. 19680607 199103 1 006

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kamang Baru

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kamang Baru perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut dan paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa pemasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Kamang Baru adalah:
    a. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaraan/pembukuan, teknik komputer dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
    b. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
    c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan nagari
    d. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan
2. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah kinerja pelayanan di Kecamatan Kamang Baru dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
    a. Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju
    b. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
    c. Persentase penurunan potensi konflik
    d. persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar
    e. persentase administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar
    f. Indeks Kepuasan Masyarakat
    g. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
    a. Dampak pembangunan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sijunjung yaitu Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, unggul dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
    b. Dampak terhadap kebijakan Internasional yaitu: capian yang menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ektrem dan pemberdayaan kaum wanita,penurunan tingkat kematian, dan memastikan keberlangsungan

       lingkungan sesuai target yang harus dicapai,dan isu global warning dengan menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem lingkungan dengan baik.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka di terbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pengoordinasian penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan pengoordinasian penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi Kecamatan Kamang Baru, antara lain:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Namun Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan,pengelolaan anggaran/pembukuan.
2. Masih melemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
3. Masih lemahnya koordinasi sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah nagari.
4. Masih melemahnya partipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan dengan mengikuti kegiatan bimteks maupun kegiatan pelatiha-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan yang telah dianggarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025.
3. Koordinasi dengan Instansi terkait yakni Dinas Komunikasi da Informatika terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional :

1. Dampak pembangunan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah kabupaten Sijunjung yaitu meningkatnya capaian dan hasil pertanian dan perkebunan, meningkatnya kualitas pelayanan publik,dan meningkatnya infrastruktur pembangunan di Nagari.
2. Dampak terhadap capaian program nasional yaitu berupaya menggalakkan home industry dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :

1. Tantangan

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional,nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungan dalam perencanaan pembangunan wilayah Rencana Kerja Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025.
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
c. Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
d. Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
e. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
f. Mobilisasi penduduk yang datang cukup tinggi terutaman dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat induvidualis.
g. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
h. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
i. Masih adanya pengaruh pada perekonomian dan pelayanan publik serta sulitnya pemerintah untuk menjalankan program/kegiatan di Kecamatan Kamang Baru akibat wabah.

2. Peluang

a. Adanya aspirasi, aspresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
b. Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/stakeholder kepada Kecamatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kamang Baru tahun 2025 sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan seta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.
c. Ketersedian dana APBN,APBD dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perkonomian penyelenggaran pembangunan infrastruktur wilayah.
d. Karakteristik masyarakat yang terbuka,dinamis dan agamis seta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam.
e. Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Kamang Baru merupakan hasil dari Musrembang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat nagari. Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan musrembang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa.

Tabel 2.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Sijunjung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kamang Baru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Rehap Pagar Kantor Camat Kamang Baru	Kecamatan Kamang Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 M	
2.	Pembangunan Rehap Rumah Dinas Camat Kamang Baru	Kecamatan Kamang Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
3.	Pembangunan Rehap Gedung UDKP Kamang Baru	Kecamatan Tanjung Gadang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
4.	Penigkatan Alat Kerja Kantor Camat Kamang Baru	Kecamatan Kamang Baru	Jumlah Komputer dan Peralatan Kerja yang kurang memadai	6 unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KAMANG BARU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, arah kebijakan dan prioritas pembengunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kamang Baru adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 2025

   Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung berkaitan dengan kebijakan nasional adalah untuk Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

   Dalam hal ini Kecamatan Kamang Baru berkaitan dengan Kabijakan tingkat Provinsi yaitu untuk Pelaksanaan Reformasi birokrasi dalam pemerintahan berdasarkan Program Pembangunan yang ada pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung

   Camat Kamang Baru selaku perpanjangan tangan Bupati Sijunjung tentulah sangat membantu untuk meprioritaskan pembangunan Kabupaten Sijunjung dalam Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah dalam menjalankan program sebagai berikut :

   - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah
   - Program penataan kelembagaan Perangkat Daerah

- Program Penguatan Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
- Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Berdasarkan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan Kabupaten Sijunjung maka Kantor Camat Kamang Baru akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sijunjung secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kamang Baru Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kamang Baru

Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan misi RPJMD yang telah disusun, maka Kecamatan Kamang Baru menyusun tujuan dan sasaran berikut :

1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Kamang Baru, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a) Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Kamang Baru baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Nagari, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Bundo Kanduang, Karang taruna, LPM, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
b) Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyrakat.
c) Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Sijunjung yang sejahtera dan Madani.

d) Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

2. Sasaran Renja Kecamatan Kamang Baru

Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi tujuan yang ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dialokasikan pada tiap tahunnya melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja. Penetapan Sasaran ini diperlukan untuk memberi fokus pada penyusunan kegiatan pada tiap tahunnya untuk kurun waktu 5 tahun. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kamang Baru adalah sebagai berikut :

1 Meningkatkan kwalitas Koordinasi dan Fasilitasi Kecamatan dengan indikator kinerja berdasarkan Persentase Hasil Koordinasi dan Fasilitasi yang ditindak lanjuti.

2 Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja berdasarkan indeks Kepuasan Masyarakat

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Urusan Kewenangan Kantor Camat Kamang Baru pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib Otonomi Daerah, Pememerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Dalam rangka singkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan yang dimiliki oleh Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung, maka rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kamang Baru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
    a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
        - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
    a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        - Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
    a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
        - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
        - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
        - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kecamatan Kamang Baru
Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiran Maju	Ket
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
					UNSUR KEWILAYAHAN										1.630.959.276	2.756.509.293	
					KECAMATAN										1.630.959.276	2.756.509.293	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										1.586.816.876	2.395.658.593	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2.982.800	**25.578.200**	
					Penuyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggara, dan evaluasi perangkat derah		2.982.800	18.080.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Persentase Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7,498,200	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.350.910.736	1.704.113.893	

					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Laporan keuangan dengan Administrasi lengkap dan tepat waktu		1.347.931.036	1.679.287.393	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Persentase Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Persentase Laporan keuangan dengan Administrasi lengkap dan tepat waktu		2.979.700	24,826,500	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	**21,500,000**	

					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Persentase peningkatan SDM ASN		0	13,500,000	
					Bimbingan Teknis, Inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase peningkatan SDM ASN			8,000,000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah										64.291.840	**209,989,000**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		721.200	5,325,000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		8.107.900	24,354,000	

							Penyelenggaraan Pemerintahan										
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		1.745.800	5,362,500	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		0,00	0,00	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		1.872.000	7,562,500	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		3.645.700	32,590,000	

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		48.199.240	134,795,000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	**77.143.500**	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Perencanaan		0	19,547,500	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Perencanaan		0	38.280.000	
					Pengadaaan Mebel	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Perencanaan		0	0	
					Pengadaan sarana dan	Prioritas 7.	Sasaran 4.1.1.	Kab.Sijunjun	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Unit		Persentase		0	19,316,000	

					Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	g, Kamang Baru, Semua Nagari	Perangkat Daerah		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Perencanaan				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										124.501.500	**205,089,000**	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Persentase terpenuhinya jasa layanan kantor		10.123.500	24,695,000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Persentase terpenuhinya jasa layanan kantor		114.378.000	180,394,000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										44.130.000	**152,245,000**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Persentase Aset Daerah dalam kondisi baik		41.250.000	93,260,000	

					Pemeliharaan Mebel	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Persentase Aset Daerah dalam kondisi baik		0	12,375,000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Persentase Aset Daerah dalam kondisi baik		2.880.000	7,560,000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainny yang dipelihara		Persentase Aset Daerah dalam kondisi baik		0	39,050,000	
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										5.025.000	**59,598,500**	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										5.025.000	**50,100,000**	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan		5.025.000	36.600.000	

							Pemerintahan										
					Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait		Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang dikoordinasikan		0	13.500.000	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											0	9.498.500	
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang direncanakan		0	9.498.500	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											8.004.900	65.575.000	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											8.004.900	65.575.000	

					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Laporan Peingkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan yang diKoordinasikan		8.004.900	65.575.000	
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										0	38.795.000	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										0	13.000.000	
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari							0	13.000.000	
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari							0	25.795.000	
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari							0	25.795.000	

					Indonesia												
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											11.380.600	109.380.400	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											11.380.600	109.380.400	
					Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai IKM		Jumlah semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang dilaksanakan		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di Koordinasikan		11.380.600	61.000.000	
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra suku, umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujutkan Stabilitas Keamanan Lokal dan Nasional	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai IKM		Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra suku, umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujutkan Stabilitas Keamanan Lokal dan Nasional yang dilaksanakan		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di Koordinasikan		0	30.835.400	
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Nilai IKM		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di Koordinasikan		0	17.545.000	

					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan											19.731.900	87.501.800	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												19.731.900	87.501.800	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1. persentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar		4.364.800	17.705.300	
					Fesilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang di Fasilitasi		1. persentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar		0	19.910.000	
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Kamang Baru, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1. persentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar		0	20.511.000	
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Prioritas 7. Peningkatan	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya	Kab.Sijunjung, Kamang	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi		1. persentase administrasi		15.367.100	29.375.500	

					Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kinerja dan Pelayanan Daerah	Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Baru, Semua Nagari			Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar				
Jumlah															1.630.959.276	2.756.509.293	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KAMANG BARU

Sebagai suatu keharusan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atas landasan Peraturan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung agar melaksanakan penginputan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi tersebut dibangun oleh Kemendagri dengan alamat web **https://sipd.RI.go.id**.

Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perangkat Daerah didampingi oleh admin dari Bapppeda kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Admin Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, setiap operator dari masing-masing Perangkat Daerah diberikan Username Perangkat Daerah, yang mana kegiatan ini dimulai pada Bulan Agustus 2025.

Dalam penginputan perubahan Renja ini Perangkat Daerah harus mempedomani RPJMD 2021-2026 dan hasil Pemetaan serta pemutahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kamang Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Rencana Program Dan Kegiatan Kantor Camat Kamang Baru Perubahan 2025

Kabupaten Sijunjung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN KAMANG BARU**			**-**	**-**	**-**	**1,991,448,606.00**	**1,630,959,276.00**	**(360,489,330.00)**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**1,867,513,106.00**	**1,586,816,876.00**	**(280,696,230.00)**
7.01.01. 201	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Terhadap Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**6,782,000.00**	**2,982,800.00**	**(3,799,200.00)**
7.01.01. 201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kamang Baru	2 Dok	2 Dok	-	6,782,000.00	2,982,800.00	**(3,799,200.00)**
7.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kamang Baru	2 Dok	2 Dok	-	-	-	**-**
7.01.01. 202	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan TerhadapPelayanan Adininstrasi Keuangan**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**1,496,831,506.00**	**1,350,910,736.00**	**(145,920,770.00)**
7.01.01. 202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kec. Kamang Baru	12 Org	12 Org	-	1,490,072,006.00	1,347,931,036.00	(142,140,970.00)
7.01.01. 202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kamang Baru	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-
7.01.01. 202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasiwulan/semesteran SKPD	Kec. Kamang Baru	16 Dok	16 Dok	-	6,759,500.00	2,979,700.00	(3,779,800.00)
7.01.01. 205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Kepagawaian**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	-	-	**-**
7.01.01. 205.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Kec. Kamang Baru	16 Stel	16 Stel	-	-	-	**-**
7.01.01. 205.11	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yg mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kamang Baru	2 Kegiatan	-	-	-	-	**-**

7.01.01.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**100,313,600.00**	**64,291,840.00**	**(36,021,760.00)**
7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Kamang Baru	1 Paket	1 Paket	-	1,404,000.00	721,200.00	(682,800.00)
7.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Kamang Baru	2 Paket	2 Paket	-	16,983,200.00	8,107,900.00	(8,875,300.00)
7.01.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Kamang Baru	1 Paket	-	-	2,792,200.00	1,745,800.00	(1,046,400.00)
7.01.01.206.05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan pengandaan yang disediakan	Kec. Kamang Baru	2 Paket	2 Paket	-	2,907,400.00	1,872,000.00	(1,035,400.00)
7.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kamang Baru	1 Paket	1 Paket	-	11,224,000.00	3,645,700.00	(7,578,300.00)
7.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Kamang Baru	2 Paket	2 Paket	-	65,002,800.00	48,199,240.00	(16,803,560.00)
7.01.01.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**40,833,000.00**	**-**	**(40,833,000.00)**
7.01.01.207.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disediakan	Kec. Kamang Baru	2 Unit	-	-	-	-	**-**
7.01.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kec. Kamang Baru	1 Paket	-	-	-	-	**-**
7.01.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan parasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Kamang Baru	1 Paket	1 Paket	-	40,833,000.00	-	**(40,833,000.00)**
7.01.01.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**172,183,000.00**	**124,501,500.00**	**(47,681,500.00)**
7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Kamang Baru	1 Paket	1 Paket	-	23,479,000.00	10,123,500.00	**(13,355,500.00)**
7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Kamang Baru	11 Orang	11 Orang	-	148,704,000.00	114,378,000.00	**(34,326,000.00)**
7.01.01.209	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**50,570,000.00**	**44,130,000.00**	**(6,440,000.00)**
7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Kamang Baru	10 Unit	10 Unit	-	47,000,000.00	41,250,000.00	(5,750,000.00)
7.01.01.209.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Kamang Baru	11 Unit	11 Unit	-	3,570,000.00	2,880,000.00	(690,000.00)
7.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Kamang Baru	3 Unit	-	-	-	-	**-**

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELEYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Kec. Kamang Baru**	**75**	**75**	**-**	**11,617,900.00**	**5,025,000.00**	**(6,592,900.00)**
7.01.02. 201	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Kamang Baru**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**-**	**11,617,900.00**	**5,025,000.00**	**(6,592,900.00)**
7.01.02. 201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kamang Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	11,617,900.00	5,025,000.00	(6,592,900.00)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase nagari/desa dengan kategori minimal maju**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**18,107,300.00**	**8,004,900.00**	**(10,102,400.00)**
7.01.03. 201	**Koordinasi Kegaiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Kamang Baru**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**-**	**18,107,300.00**	**8,004,900.00**	**(10,102,400.00)**
7.01.03. 201.01	Peningkatan Partisipasi Mayarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kec. Kamang Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-
7.01.03. 201.02	Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kec. Kamang Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-
7.01.03. 201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kamang Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	18,107,300.00	8,004,900.00	(10,102,400.00)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penurunan Pelanggaran dan ketertiban umum**	**Kec. Kamang Baru**	**30%**	**30%**	**-**	**54,202,000.00**	**11,380,600.00**	**(42,821,400.00)**
7.01.05. 201	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Forkopincam**	**Kec. Kamang Baru**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**-**	**54,202,000.00**	**11,380,600.00**	**(42,821,400.00)**
7.01.05. 201.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kamang Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-
7.01.05. 201.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Kamang Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	54,202,000.00	11,380,600.00	(42,821,400.00)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**;(1) Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**			

		(2) Persentase adimistrasi pemerintahan nagari yang dilaksankan sesuai standar					**40,008,300.00**	**19,731,900.00**	**(20,276,400.00)**
7.01.06.201	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Kamang Baru**	**100%**	**100%**	**-**	**40,008,300.00**	**19,731,900.00**	**(20,276,400.00)**
7.01.06.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kamang Baru	11 Nagari	11 Nagari	-	-	-	-
7.01.06.201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Kamang Baru	11 Nagari	11 Nagari	-	9,771,700.00	4,364,800.00	(5,406,900.00)
7.01.06.201.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan desa	Kec. Kamang Baru	2 Nagari	2 Nagari	-	7,029,400.00	-	(7,029,400.00)
7.01.06.201.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Kamang Baru	11 Nagari	11 Nagari	-	23,207,200.00	15,367,100.00	(7,840,100.00)
7.01.06.201.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dkumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Kamang Baru	11 Nagari	11 Nagari	-	-	-	-
							1,991,448,606.00	**1,630,959,276.00**	**(360,489,330.00)**

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah maka di Kantor Camat Kamang Baru juga perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini adalah capaian indikator Kinerja Utama pada Kantor Camat Kamang Baru pada tahun 2025 ini :

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kamang Baru

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
					Target Awal	Target Perubahan
1	Penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	2.233.403.914	1.826.680.106	1.586.816.875
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai IKM	%	220.248.200	11.617.900	5.025.000
3	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa	%	85.440.550	18.107.300	8.004.900
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai IKM	%	71.570.600	54.202.000	11.380.600
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa	%	40.835.500	40.008.300	19.731.900
	Jumlah			**2.651.498.764**	**1.950.615.606**	**1.630.959.276**

BAB VI
PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kantor Camat Kamang Baru di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Kamang Baru sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung . Untuk itu, Kecamatan Kamang Baru menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kamang Baru yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kamang Baru demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Kamang Baru telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kamang, September 2025
CAMAT KAMANG BARU

ASRIAL, SH
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP.19680607 199103 1 006

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Awal Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonom daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (Kelurahan/desa), kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Negara. Tanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Awal SKPD) dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, Kecamatan Sijunjung telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra). Pemetaan terhadap Nomenklatur Program/Kegiatan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Kecamatan

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan IV Nagari Tahun 2025 berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sijunjung Tahun 2025 adalah untuk Menyelaraskan program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2025, melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan dan sub kegiatan strategis Nasional dan Provinsi sesuai dengan kebutuhan daerah, mengakomodir hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil kegiatan survei program dari Bapppeda yang sudah tertuang dalam E-planning, mengupayakan agar dalam menyusun program/kegiatan dan sub kegiatan mengedepankan asas manfaat dan kepatutan.Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Sijunjung guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan IV Nagari;

1. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan IV Nagari Tahun 2025;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan IV Nagari dengan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan IV Nagari Tahun 2025 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Kecamatan IV Nagari Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN IV NAGARI TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan IV Nagari Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan IV Nagari
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Nagari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan IV Nagari
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN IV NAGARI

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan IV Nagari
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN IV NAGARI

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN IV NAGARI TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan IV Nagari Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan, Camat memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan IV Nagari Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan IV Nagari Tahun 2025 merupakan penjabaran dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah Kepegawaian yang dapat dirinci kedalam Program dan Kegiatan sebagaimana terdapat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 2.1. Perbandingan Program dan Kegiatan pada Renja dan DPA Tahun 2024

a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilkasanakan dengan sasaran adalah Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa di Kecamata IV Nagari dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Keuangan			Fisik		TotalCapaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi %	
1	Persentase Tingkat Perkembangan Nagari/Desa	42.998.150	42.867.700	99,67	100	99,84	99.84

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 100% dan untuk realisasi keuangan telah tercapai 99,67% sehingga terwujudnya pemberdayaan masyarakat nagari/desa.

b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator keberhasilan sasaran adalah meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan pada kantor Camat IV Nagari dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kuangan			Fisik		Total Capaian

		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	Kinerja (%)
1.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	210.972.950	210.867.700	99,95	100	100	100

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 100% dan untuk realisasi keuangan telah tercapai 99,95% sehingga tersedianya jasa pelayanan admnistrasi perkantoran yang baik.

c) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan sasaran meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan nigari/desa keberhasilan sasaran pada kantor Camat IV Nagari dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kuangan			Fisik		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1.	Persentase tingkat perkembangan nagari/desa (IDM)	23.790.950	23.714.800	99.67	12 bln	100	100

d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran adalah meningkatnya Akuntabilitas organisasi pada kantor Camat IV Nagari dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kuangan			Fisik		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	1.866.987.228	1.773.434.116	94,98	14	100	100

Indikator keberhasilan sasaran adalah meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran pada kantor Camat IV Nagari dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kuangan			Fisik		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1.	Tersedianya sapras yang memadai	23.790.950	23.714.800	99,67	12 bln	100	100

e) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Desa

Indikator keberhasilan sasaran adalah meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran pada kantor Camat IV Nagari dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kuangan			Fisik		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1.	Tersedianya sapras yang memadai	-	-	-	-	-	-

f) Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator keberhasilan sasaran adalah meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran pada kantor Camat IV Nagari dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kuangan			Fisik		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1.	Tersedianya sapras yang memadai	23.790.950	23.714.800	99,67	12 bln	100	100

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 100% dan untuk realisasi keuangan telah tercapai 99,67% sehingga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penunjang kegiatan di Kantor Camat IV Nagari..

2. Capaian Renstra Kecamatan IV Nagari Periode 2025-2029

Berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, sejauh ini kecamatan IV Nagari telah melaksanakan tugas pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang bersih dari KKN adil berkeadilan dalam menerapkan program kegiatan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berwibawa dimata hukum dan masyarakat. Dalam rentang waktu tahun pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan telah berjalan dengan baik.

Untuk lebih jelasnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan IV Nagari tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan IV Nagari Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2 disebalah ini.

Tabel 2.

Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Kantor Camat IV Nagari s/d Tahun 2024
Kabupaten Sijunjung

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Camat IV Nagari) Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (Rp)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Kantor Camat IV Nagari Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kantor Camat IV Nagari s/d Tahun 2025	
											Target Renja Kantor Camat IV Nagari Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Renja Kantor Camat IV Nagari Tahun 2024 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1							**WAJIB**									
2	03						**PENUNJANG**									
2	03	10					**KECAMATAN IV NAGARI**							**2.144.749.278**	**1.620.676.942**	
2	03	2	03	10	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**1.866.987.228**	**1.773.434.116**	**1.866.987.228**	**1.773.434.116**	**94,98**	**1.866.987.228**	**1.601.397.542**	**-**

2	03	2	03	10	01	20	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan terhadap Dokumen perencanaan Dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	225.899.600	224.992.105	225.899.600	224.992.105	99,59	225.899.600	2.134.000	-
2	03	2	03	10	01	21	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja perangkat daerah yang disusun	-	-	-			-	-	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	1.346.268.086	1.265.979.850	1.346.268.086	1.265.979.850	94,03	-	1.381.575.731	
							Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	1.346.268.086	1.265.979.850	1.346.268.086	1.265.979.850	94,03	-	1.377.443.931	

							Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yg disusun	-	-	-	-	-	-	216.900	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	3.914.900	
							Adminstrasi kepegawaian perangkaat daerah	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	-	-	-	-		-	-	
							Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diaakan	-	--	--	-	-	-	-	
							Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	-	-	-			-	-	

2	03	2	03	10	02	45	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	225.899.600	224.992.105	225.899.600	224.992.105	99,59	-	55.268.400	-
2	03	2	03	10	05		Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg diadakan	-	-	-	0	0	-	-	-
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg diadakan	30.646.650	30.577.350	30.646.650	30.577.350	99,77	-	2.134.000	-
							Penyediaan Barang dan Cetakan dan pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang dan Cetakan dan pengandaan yg disediakan	8.366.150	8.362.900	8.366.150	8.362.900	99,96	-	740.800	
2	07	2	03	10	27	01	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu yang difasilitasi	18.555.250	18.550.800	18.555.250	18.550.800	99,97	-	2.760.000	-

2	07	2	03	10	27	02	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yg diselenggrakan	168.331.550	167.501.055	168.331.550	167.501.055	99,50		49.633.600	-
2	07	2	03	10	27	03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang-barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan	45.151.090	45.150.000	45.151.090	45.150.000	99,99	-	-	-
							Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-
							Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantr atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-
							Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	166.379.852	154.121.911	166.379.852	154.121.911	92,63	-	143.053.411	-

							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.695.852	21.437.911	33.695.852	21.437.911	63,62		10.369.411	
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	132.695.852	132.684.000	132.695.852	132.684.000	100	-	132.684.000	
							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan umum	83.288.600	83.190.250	83.288.600	83.190.250	99,88	-	10.000.000	
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan		46.800.000	124.800.000	39.000.000	39.000.000		36.000.000	67.392.000	
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	5.248.000	5.248.000	5.248.000	5.248.000	100	-	10.000.000	
							Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan	Jumlah gedung kantor dan bangunan	42.040.600	42.000.000	42.040.600	42.000.000	99,90	-	-	

							bangunan lainnya	lainnya yg dipelihara								
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**							
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangTidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pwmerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan							
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
							Program Pembedayaan masyarakat desa dan kelurahan	**Persentase Tingkat perkembangan Nagari/Desa (IDM)**	**42.998.150**	**42.867.700**	**42.998.150**	**42.867.700**	**99,69**	**-**	**7.835.800**	

							Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaa n desa	42.998.150	42.867.700	42.998.150	42.867.700	99,69	-	7.835.800	
							Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaaan pembangunan didesa	Jumlah kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam frum musyawarah perencanaaan pembangunan didesa	5.879.350	5.839.100	5.879.350	5.839.100	99,31	-	4.172.000	
							Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yg dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	Jumlah kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaa n masyarakat yg dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	27.975.800	27.935.100	27.975.800	27.935.100	99,85	27.975.800	1.349.000	

							Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaa n masyarakat diwilayah kecamatan	9.143.000	9.093.500	9.143.000	9.093.500	99,45	9.143.000	2.314.800	
							Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Persentase Penyelesaian Komplik yang difasilitasi di tingkat Kecamatan**	-	-						
							Koordinasi upaya penyelenggaraa n ketentraman dak ketertiban umum								
							Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**210.972.950**	**210.867.700**	**210.972.950**	**210.867.700**	**99,95**	**-**	**3.590.200**	

							Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		210.972.950	210.867.700	210.972.950	210.867.700	99,95	-	3.590.200	
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	70.617.250	70.583.600	70.617.250	70.583.600	99,95	-	2.617.800	
							Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan	Jumlah kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan	140.355.700	140.284.100	140.355.700	140.284.100	99,94		972.400	

							kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal	merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal							
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tingkat Perkembangan Nagari/Desa (IDM)	23.790.950	23.714.800	23.790.950	23.714.800	99,67		7.853.400	
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.790.950	23.714.800	23.790.950	23.714.800	99,67		7.853.400	

							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	8.098.000	8.063.100	8.098.000	8.063.100	99,56	8.098.000	2.617.800	
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah nigari yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa								
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah nigari yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan desa								
							Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	7.558.000	7.546.200	7.558.000	7.546.200	99,84	7.558.000	2.617.800	

							Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa							
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.134.950	8.105.500	8.134.950	8.105.500	99,63	8.134.950	2.617.800	
									2.144.749.278	**-**	**-**	**-**	**95,62**	**2.050.884.316**	**1.620.676.942**	1.53

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Nagari

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat IV Nagari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 188.45/482/KPTS-BPT-2021 Tahun 2021, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat IV Nagari yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kantor Camat IV Nagari dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kantor Camat IV Nagari sesuai Renstra Tahun 2025-2029 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Sijunjung yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Sijunjung. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat IV Nagari dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat IV Nagari

Kabupaten Sijunjung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kantor Camat IV Nagari				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi perkantoran			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
2	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang mendapat pemeliharaan			3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
3	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang mendapat pemeliharaan			6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	
4	Jumlah AC yang mendapat pemeliharaan			3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
5	Jumlah Mesin Tik yang mendapat pemeliharaan			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
6	Jumlah komputer dan Laptop yang mendapat pemeliharaan			8 unit	8 unit	8 unit	9 unit	8 unit	11 unit	11 unit	11 unit	
7	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat			2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	
8	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

9	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Seksi Pemerintahan dan Kependudukan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
10	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
11	Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kemiskinan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
12	Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
13	Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
14	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari			5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan IV Nagari

Sejalan dengan pelaksanaa Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka di terbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pengoordinasian penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan pengoordinasian penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi Kecamatan IV Nagari, antara lain:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Namun Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Tenaga pelayanan yang kurang terlatih atau tidak memiliki keterampilan memadai
2. Teknologi yang belum optimal dalam mendukung pelayanan (misalnya sistem antrian online tidak tersedia)
3. Keterbatasan akses internet yang menghambat layanan online
4. Masyarakat enggan memberikan masukan atau kritik karena merasa tidak akan ditindaklanjuti

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanana publik dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Mengirim tenaga pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Mengadakan prasarana antrian online bagi masyarakat
3. Menambah kualitas jaringan internet

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya masukan, kritik dan saran bagi perbaikan kualitas layananMeningkatkan kualitas SDM pengelola PATEN dengan cara dukungan penganggaran untuk pelatihan/bimtek

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Camat IV Nagari untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel.Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Kantor Camat IV Nagari merupakan salah satu OPD yang berperan dalam pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Pembangunandapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kantor Camat IV Nagari membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada.Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakalaalokasi anggaran untuk Kantor Camat IV Nagari sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya.Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk melihat Kantor Camat IV Nagari secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada 4 berikut ini:

Tabel 4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025 Kecamatan IV Nagari
Kabupaten Sijunjung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Nilai Evalusai AKIP		**1.701.410.384**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Nilai Evalusai AKIP		**1.601.397.542**	
1	Penunjang Operasional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat IV Nagari	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.386.696.112	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Kantor Camat IV Nagari	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi perkantoran	12 bulan	1.381.575.731	
2	Penunjang Operasional Administrasi Umum Perangkat daerah	Kantor Camat IV Nagari	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	12 bulan	132.543.450	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Kantor Camat IV Nagari	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	12 bulan	55.268.400	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		153.422.822					143.053.411	

			Daerah								
5	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.748.000					21.500.000	
B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Camat IV Nagari	Jumlah srana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan	12 bulan	-	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Camat IV Nagari	Jumlah srana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan	12 bulan	-	
C	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kantor Camat IV Nagari	**Persentase Tingkat Perkembangan Nagari/Desa (IDM)**		**8,250,000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Camat IV Nagari**	**Persentase Tingkat Perkembangan Nagari/Desa (IDM)**		**7.835.800**	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat IV Nagari	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	orang	15.564.100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat IV Nagari		orang	7.835.800	
D	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penyelesaian Komplik yang difasilitasi ditingkat kecamatan**		-	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penyelesaian Komplik yang difasilitasi ditingkat kecamatan**		-	

1		Kantor Camat IV Nagari					Kantor Camat IV Nagari		1 dokumen	-	
2		Kantor Camat IV Nagari					Kantor Camat IV Nagari		12 bulan	-	
E	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kantor Camat IV Nagari**	**Nilai Indewk Kepuasan Masyrakat (IKM)**	**12 bulan**	**50,117,210**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kantor Camat IV Nagari**	**Nilai Indewk Kepuasan Masyrakat (IKM)atan**	**12 bulan**	**3.590.200**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala daerah	Kantor Camat IV Nagari		12 bulan	6.609.050	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala daerah	Kantor Camat IV Nagari		12 bulan	3.590.200	
2		Kantor Camat IV Nagari		12 bulan			Kantor Camat IV Nagari		12 bulan		
F	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinatahn Desa**	**Kantor Camat IV Nagari**	**Persentase Tingkat Perkembangan Nagari/Desa**	**12 bulan**	**17.894.400**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinatahn Desa)**	**Kantor Camat IV Nagari**	**Persentase Tingkat Perkembangan Nagari/Desa**	**12 bulan**	**7.853.400**	
7	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat IV Nagari		5 Nagari	17.894.400	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat IV Nagari		5 Nagari	7.853.400	

						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari					
					1,741.477.934					**1.620.676.942**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Infrastruktur (jalan,air,listrik)	IV Nagari	persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik	79	
2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	IV Nagari	persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik	90	
3	Penguatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan	IV Nagari	persentase lembaga masyarakat nagari/desa yang dibina	100	
4	pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan,	IV Nagari	persentase lembaga masyarakat nagari/desa yang dibina	20	
5				95	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN IV NAGARI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Nagari adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 2025

   Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung berkaitan dengan kebijakan nasional adalah untuk memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

   Dalam hal ini Kecamatan IV Nagari berkaitan dengan Kabijakan tingkat Provinsi yaitu untuk Pelaksanaan Reformasi birokrasi dalam pemerintahann berdasarkan Program Pembangunan yang ada pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung

   Camat IV Nagari selaku perpanjangan tangan Bupati Sijunjung tentulah sangat membantu untuk meprioritaskan pembangunan Kabupaten Sijunjung dalam Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah dalam menjalankan program sebagai berikut :

Berdasarkan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi danpembangunan Kabupaten Sijunjung maka Kantor Camat IV Nagari akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sijunjung secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Camat IV Nagari Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan IV Nagari

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan, baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya, agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, karena setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Urusan Kewenangan Kantor Camat IV Nagari pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib Otonomi Daerah, Pememerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Untuk Tahun 2025 Program dan Kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, sedangkan pada Tahun 2025 dan untuk menindak lanjuti Surat Bapak Bupati Sijunjung Nomor 050/ /Bappeda-2024

perihal Pemetaan (Mapping) Program dan Kegiatan dalam Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019, pelaksanaan tersebut dibina dan didampingi oleh Bapppeda Kabupaten Sijunjung. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai pemutahiran pada Kantor Camat IV Nagari untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN IV NAGARI TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN SIJUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	*3*	*4*					*5*		*6*
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN IV NAGARI**				**1.854.429.500**	**APBD**			**2,597.484.016**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. IV Nagari**	**-**	**1.703.147.654**	**APBD**		**-**	**1.518.775.148**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan	Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi	Kec. IV Nagari	100%	3.500.000,	APBD		12 org/bulan	14.039.469,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan*	Kec. IV Nagari	100%	3.000.000	APBD		16 laporan	14.039.469,00

		Bulanan/Triwulana/SemesteranSKPD							
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kec. IV Nagari	100%	3.500.000,00	APBD		1 laporan	14.039.469,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kec. IV Nagari	100%	1.221.909.284	APBD		100%	1.700.290.816,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjang ASN*	Kec. IV Nagari	75%	-	APBD		75%	22.852.800,00
.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	Kec. IV Nagari	16 Pake	-	APBD		-	17.884.800,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Kec. IV Nagari	2 Org	-	APBD		-	4.968.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi	Kec. IV Nagari	100%	199.370.961,40	APBD		100%	383.704.573,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kec. IV Nagari	100%	23.486.349,00	APBD		100%	49.680.000,00

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kec. IV Nagari	100%	6.751.250,	APBD		100%	6.759.858,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kec. IV Nagari	100%	17.014.500	APBD		100%	13.824.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kec. IV Nagari	100%	152.118.862,40	APBD		-	306.399.115,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangdisediakan*	Kec. IV Nagari	1 Paket	-				4.968.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. IV Nagari	100%	47.697.000,000,	APBD		100%	-
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*	Kec. IV Nagari	100%	-	APBD		100%	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*	Kec. IV Nagari	75%	47.697.000	APBD		100%	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kec. IV Nagari	12 Unit	47.697.000,0				

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kec. IV Nagari	75%	153.422.408,601	APBD		100%	262.499.979,00
7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kec. IV Nagari	12 Laporn	20.738.408,60	APBD		100%	21.544.030,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kec. IV Nagari	12 Laporn	132.684.000,00	APBD		100%	240.955.949,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. IV Nagari	75%	74.248.000,00	APBD		100%	103.430.400,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kec. IV Nagari	1 unit	15.000.000,00	APBD		100%	15.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kec. IV Nagari	7 unit	24.000.000,	APBD		100%	77.500.800,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kec. IV Nagari	4 Unit	5.248.000	APBD		100%	10.929.600,00

7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	Kec. IV Nagari	1 Unit	30.000.000	APBD			-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Kec. IV Nagari**	**100%**	**-**	**APBD**		**100%**	**12.130.030,00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kec. IV Nagari	100%	-	APBD		100%	12.130.030,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kec. IV Nagari	100%	-	APBD		100%	12.130.030,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Perkembangan Desa Menuju Kemandirian (IDM)**	**Kec. IV Nagari**	**75%**	**12.401.050,00**	**APBD**		**100%**	**63.126.842,**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peingkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kec. IV Nagari	75%	12.401.050,00	APBD		100%	63.126.842,
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum*	Kec. IV Nagari	10 lembaga	5.879.350,	APBD		100%	10.371.592,00

	Pembangunan di Desa	*Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*							
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Kec. IV Nagari	1 Dokumen	6.521.700,	APBD		100%	40.455.250,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kec. IV Nagari	100%	9.143.000,00	APBD		100%	-
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan**	**Kec. IV Nagari**	**90%**	**89.680.796,**	**APBD**		**100%**	**132.139.528,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal*	Kec. IV Nagari	90%	89.680.796,00	APBD		100%	132.139.528,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	40 org	100%	12.300.000,00	APBD		100%	40.817.088,00

7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	Kec. IV Nagari	2 Dokumen	77.380.796,	APBD		100%	91.322.440,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik**	**Kec. IV Nagari**	**75%**	**36.900.00**	**APBD**		**100%**	**59.448.633,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*	Kec. IV Nagari	75%	36.900.000,00	APBD		100%	59.448.633,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kec. IV Nagari	2 Dokumen	12.300.000,00	APBD		100%	35.347.519,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	Kec. IV Nagari	2 Dokumen	12.300.000,00	APBD		100%	13.179.214,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Kec. IV Nagari	4 Dokumen	12.300.000,00	APBD		100%	10.921.900,00
					1.854.429.500,00				**2.790.479.030,00**

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN IV NAGARI

Sebagai suatu keharusan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atas landasan Peraturan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung agar melaksanakan penginputan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi tersebut dibangun oleh Kemendagri dengan alamat web ***https://sipd.kemendagri.go.id***.

Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID), Perangkat Daerah didampingi oleh admin dari Bapppeda kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Admin Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, setiap operator dari masing-masing Perangkat Daerah diberikan Username Perangkat Daerah, yang mana kegiatan ini dimulai pada tanggal 13 Februari 2024.

Dalam penginputan Renja ini Perangkat Daerah harus mempedomani RPJMD 2025-2029 dan hasil Pemetaan serta pemutahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka dapat kita lihat Rencana Kerja Kecamatan IV Nagari dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN IV NAGARI TAHUN 2025 KABUPATEN SIJUNJUNG
Renja sipd 2025

NO	**KODE**	**URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**SASARAN**	**TARGET**	**PLATFON ANGGARAN SEMENTARA**
					(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			
	7.01	**KECAMATAN IV NAGARI**			**2.597.484.016**
I	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.369.499.497**
	7.01.01.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1,644.579.479**
	7.01.01.202.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.619.324.586
	7.01.01.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**333.656.151**
	7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	100%	4.320.000,00
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	100%	43.200.000,00
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	100%	5.878.138,00
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	100%	13.824.000,00

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		266.434.013
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**100%**	**226.278.848**
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	100%	16.751.936
	7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	100%	209.526.912
	7.01.01.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**			**-**
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	40.000.000
	7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum	100%	-
	7.01.01.209	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**			**44,850,000**
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	30.000.000
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	3.330.000
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantr atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	60.000.000
II	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.154.750**
	7.01.03.201	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**15.154.750**

	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	3.882.300,00
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	4.247.550,00
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 bulan	7.024.900
III	**7.01.05**	**PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**57.016.850,00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			57.016.850
	7.01.05.201.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	12 bulan	7.016.850,00
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 bulan	50.000.000
IV	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA**			

					20.223.520
	7.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**20.223.520**
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	6.978.360,00
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 bulan	6.218.750,00
	7.01.06.201.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	7.026.410,00
JUMLAH					**1.688.385.172**

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan IV Nagari di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan IV Nagari sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan IV Nagari yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan IV Nagari demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, Kecamatan IV Nagari telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Palangki, Mei 2025

CAMAT IV NAGARI

ATUBOWY DWI FITHA,S.STP,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19891106 200602 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas Izin-nya sehingga telah di mudahkan kita sampai pada tahap Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025. Solawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa Salam kepada Kelurga dan Sahabat Beliau.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dilaksanakan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Gadang ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 seta mempedomani hasil Evaluasi Renja Tahun 2024 dan Efisiensi Anggaran serta pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2025.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025 beserta seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjung Gadang, Februari 2025

CAMAT TANJUNG GADANG

EMIL EVAN S.STP
Pembina k.1/IV.b
NIP. 19811212 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra PD 6

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 12

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **16**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 16

3.3. Program dan Kegiatan 17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **27**

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 31

5.1 Indikator Kinerja Utama 31

BAB VI PENUTUP 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan pagu dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Gadang menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Sijunjung ke dalam rencana program dan kegiatan tahun berjalan beserta dengan penganggarannya. Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Gadang memuat berbagai perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Tanjung Gadang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuain dengan perkembangan keadaan,meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
2. Keadaan yang menyebabkan turunnya nilai anggaran dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Tanjung Gadang dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan I pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tanjung Gadang tahun 2025 yang

mana hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Gadang kabupaten Sijunjung ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai triwulan I1 tahun 2025
2. Perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tidak sesuai dengan target semula.

Berdasarkan hal-hal diatas maka perlu dialukan Perubahan dokumen Renja Kecamatan Tanjung Gadang tahun 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Tanjung Gadang tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025 berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja Daerah dan petunjuk teknis bagian dana Alokasi Umum yang di tentukan penggunaannya.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025 agar terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya di Kantor Camat Tanjung Gadang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2024 adalah:

a. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.
b. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Tanjung Gadang sampai dengan triwulan I1 tahun 2025
c. Sebagai pedoman dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Kecamatan Tanjung Gadang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TANJUNG GADANG TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Gadang Triwulan tahun 2025
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjung Gadang
- 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANJUNG GADANG
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjung Gadang
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANJUNG GADANG

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 5.1 IKU

BAB VI. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TANJUNG GADANG TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Gadang Triwulan I

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari urusan kewilayahan yang di dijabarkan dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemeberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjung Gadang triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjung Gadang

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tanjung Gadang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut dan paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa pemasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tanjung Gadang adalah:

    a. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaraan/pembukuan, teknik komputer dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
    b. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
    c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan nagari
    d. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

2. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah kinerja pelayanan di Kecamatan Tanjung Gadang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

    a. Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju
    b. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
    c. Persentase penurunan potensi konflik
    d. persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar
    e. persentase administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar
    f. Indeks Kepuasan Masyarakat
    g. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

    a. Dampak pembangunan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sijunjung yaitu Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, unggul dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
    b. Dampak terhadap kebijakan internasional yaitu: capian yang menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ektrem dan pemberdayaan kaum wanita,penurunan tingkat kematian, dan memastikan keberlangsungan lingkungan sesuai target yang harus dicapai,dan isu golbal warning dengan menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem lingkungan dengan baik.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka di terbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pengoordinasian penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan,

pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan pengoordinasian penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Gadang, antara lain:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Namun Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan,pengelolaan anggaran/pembukuan.
2. Masih melemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
3. Masih lemahnya koordinasi sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah nagari.
4. Masih melemahnya partipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan dengan mengikuti kegiatan bimteks maupun kegiatan pelatiha-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan yang telah dianggarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025.
3. Koordinasi dengan Instansi terkait yakni Dinas Komunikasi da Informatika terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional :

1. Dampak pembangunan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah kabupaten Sijunjung yaitu meningkatnya capaian dan hasil pertanian dan perkebunan, meningkatnya kualitas pelayanan publik,dan meningkatnya infrastruktur pembangunan di Nagari.
2. Dampak terhadap capaian program nasional yaitu berupaya menggalakkan home industry dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :

1. Tantangan

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional,nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungan dalam perencanaan pembangunan wilayah Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025.
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
c. Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
d. Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
e. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
f. Mobilisasi penduduk yang datang cukup tinggi terutaman dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat induvidualis.
g. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
h. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
i. Masih adanya pengaruh pada perekonomian dan pelayanan publik serta sulitnya pemerintah untuk menjalankan program/kegiatan di Kecamatan Tanjung Gadang akibat wabah.

2. Peluang

a. Adanya aspirasi, aspresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
b. Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/stakeholder kepada Kecamatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Gadang tahun 2025 sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan seta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.
c. Ketersedian dana APBN,APBD dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perkonomian penyelenggaran pembangunan infrastruktur wilayah.
d. Karakteristik masyarakat yang terbuka,dinamid dan agamis seta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam.
e. Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan ektor pertanian dan perkebunan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANJUNG GADANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dar ipada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, arah kebijakan dan prioritas pembengunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Gadang adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 2025

   Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung berkaitan dengan kebijakan nasional adalah untuk Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

   Dalam hal ini Kecamatan Tanjung Gadang berkaitan dengan Kabijakan tingkat Provinsi yaitu untuk Pelaksanaan Reformasi birokrasi dalam pemerintahann berdasarkan Program Pembangunan yang ada pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung

   Camat Tanjung Gadang selaku perpanjangan tangan Bupati Sijunjung tentulah sangat membantu untuk meprioritaskan pembangunan Kabupaten Sijunjung dalam Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah dalam menjalankan program sebagai berikut :
   - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah
   - Program penataan kelembagaan Perangkat Daerah
   - Program Penguatan Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
   - Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
   - Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
   - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
   - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Berdasarkan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan Kabupaten Sijunjung maka Kantor Camat Tanjung Gadang akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sijunjung secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjung Gadang

Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan misi RPJMD yang telah disusun, maka Kecamatan Tanjung Gadang menyusun tujuan dan sasaran berikut :

1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

   Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Tanjung Gadang, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Tanjung Gadang baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Nagari, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Bundo Kanduang, Karang taruna, LPM, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyrakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Sijunjung yang sejahtera dan Madani.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

2. Sasaran Renja Kecamatan Tanjung Gadang

Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi tujuan yang ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dialokasikan pada tiap tahunnya melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja. Penetapan Sasaran ini diperlukan untuk memberi fokus pada penyusunan kegiatan pada tiap tahunnya untuk kurun waktu 5 tahun. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tanjung Gadang adalah sebagai berikut :

1 Meningkatkan kwalitas Koordinasi dan Fasilitasi Kecamatan dengan indikator kinerja berdasarkan Persentase Hasil Koordinasi dan Fasilitasi yang ditindak lanjuti.

2 Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja berdasarkan indeks Kepuasan Masyarakat

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Urusan Kewenangan Kantor Camat Tanjung Gadang pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib Otonomi Daerah, Pememerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Dalam rangka singkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung, maka rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tanjung Gadang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3.3.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kecamatan Tanjung Gadang
Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiran Maju	Ket
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
					UNSUR KEWILAYAHAN												
					KECAMATAN												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										1.794.806.365	2.685.007.493	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0,00	4.283.000	
					Penuyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggara, dan evaluasi perangkat derah		0,00	4.283.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.516.540.222	1.563..450.000	
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Laporan keuangan dengan Administrasi lengkap dan tepat waktu		1.516.540.222	1.556.450.000	

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Persentase Laporan keuangan dengan Administrasi lengkap dan tepat waktu		2.070.000	7.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0,00	15.500.000	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung, Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Persentase peningkatan SDM ASN		0,00	15.500.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah										71.134.043	380.000.000	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		228,400	2.000.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas 7. Peningkatan	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang,	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan		Persentase meningkatnya		21.403.168	55.000.000	

						Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Nagari				Perlengkapan Kantor yang Disediakan		kepuasan yang diberikan layanan organisasi				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		896.100	2.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase meningkatnya kepuasan yang diberikan layanan organisasi		48.606.375	225.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										156.871.800	185.456.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Persentase terpenuhinya jasa layanan kantor		12.391.800	28.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Persentase terpenuhinya jasa layanan kantor		144.480.000	157.456.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16.690.000	65.000.000	

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Persentase Aset Daerah dalam kondisi baik		14.500.000	55.000.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Persentase Aset Daerah dalam kondisi baik		2.190.000	7.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Persentase Aset Daerah dalam kondisi baik			15.000.000	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										11.587.800	45.000.000	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										11.587.800	45.000.000	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan yang diKoordinasikan		7.943.800	13.000.000	

					Peingkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Laporan Peingkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan yang diKoordinasikan		3.644.000	20.000.000	
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										3.900.000	55.000.000	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										3.900.000	55.000.000	
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Untuk Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Nilai IKM		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku. Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang di Koordinasikan		3.900.000	55.000.000	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										18.082.500	230.955.000	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										18.082.500	230.955.000	
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1. persentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai		8.362.500	38.000.000	

														standar			
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1. persentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar		3.900.000	8.000.000	
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1. persentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar		2.880.000	15.000.000	
					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prioritas 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Tata Kelola,Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Sijunjung,Tanjung Gadang, Semua Nagari	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1. persentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar		2.940.000	20.000.000	
Jumlah																1.794.806.365	3.065.007.493	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANJUNG GADANG

Sebagai suatu keharusan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atas landasan Peraturan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung agar melaksanakan penginputan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi tersebut dibangun oleh Kemendagri dengan alamat web **https://sipd.RI.go.id**.

Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID), Perangkat Daerah didampingi oleh admin dari Bapppeda kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Admin Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, setiap operator dari masing-masing Perangkat Daerah diberikan Username Perangkat Daerah, yang mana kegiatan ini dimulai pada Bulan Agustus 2025.

Dalam penginputan perubahan Renja ini Perangkat Daerah harus mempedomani RPJMD 2021-2026 dan hasil Pemetaan serta pemutahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, untuk lebih jelasnya Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tanjung Gadang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Tanjung Gadang Perubahan 2025
Kabupaten Sijunjung

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
1									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertamba/ Berkurang
						Urusan Penunjang								
5						**Unsur Kewilayahan**								-
5	**2**					**Kecamatan**								-
7	**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tercapainya penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**1.913.891.455**	**1.794.806.365**	39.736.600,00
7	**01**	**01**	**2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**4.370.000**	**0,00**	-
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun		2 Dokumen	2 Dokumen		4.370.000	0,00	-
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**1.521.550.222**	**1.516.540.222**	
7	**01**	**01**	**2**	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya		15 ASN	15 ASN		1.514.470.222	1.514.470.222	
7	**01**	**01**	**2**	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun		14 Dokumen	14 Dokumen		7.080.000	2.070.000	-
7	01	01	**2**	05		**Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**0,00**	**0,00**	-
7	01	01	202	05	02	Pengadaaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan					0,00	0,00	-

7	01	01	2	06		**Admininstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**128.140.033**	**71.134.043**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan		1 Paket	1 Paket		456.800	228.400	-
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	2 Paket		24.788.758	21.403.168	
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 Paket	1 Paket		896.100	896.100	-
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					-	-	-
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi		1 Paket	1 Paket		101.998.375	48.606.375	
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan***							
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan							
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**100%**		**169.337.400**	**156.871.800**	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		3 Paket	3 Paket		16.719.400	12.391.800	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia		13 orang	13 orang		152.618.000	144.480.000	
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik***	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**25.870.000**	**16.690.000**	

7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara		10 Unit	10 Unit		21.000.000	14.500.000	-
7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara		24 unit	24 unit				-
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		6 Unit	6 Unit		4.870.000	2.190.000	-
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab		1 Paket	1 Paket				
7	**01**	**03**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Nagari dengan kategori minimal maju**	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**17.288.800**	**11.587.800**	
7	01	03	02	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		**100%**	**100%**		**17.288.800**	**11.587.800**	
7	01	03	02	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		1 Kegiatan	1 Kegiatan		9.158.800	7.943.800	-
7	01	03	02	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan		8.130.000	3.644.000	
7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Menekannya terjadi potensi konflik di wilayah kecamatan**		**100%**	**100%**		**7.800.000**	**3.900.000**	
7	**01**	**05**	**02**	**01**		**Penyelenggaranaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**7.800.000**	**3.900.000**	
7	01	05	02	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	**Tanjung Gadang**	2 Kegiatan	2 Kegiatan		7.800.000	3.900.000	

7	**01**	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa**	**1. Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar 2. Persentase administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar**	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**39.535.000**	**18.082.500**	
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**Tanjung Gadang**	**100%**	**100%**		**39.535.000**	**18.082.500**	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9 Nagari	9 Nagari		18.175.000	8.362.500	
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah nagari yang difasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		9 Nagari	9 Nagari		7.800.000	3.900.000	
7	01	06	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah nagari yang difasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		9 Nagari	9 Nagari		5.760.000	2.880.000	
7	01	06	2	01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		9 Nagari	9 Nagari		7.800.000	2.940.000	
						JUMLAH						**1.913.891.455**	**1.794.806.365**	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah maka di Kecamatan Tanjung Gadang juga perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini adalah capaian indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Tanjung Gadang pada tahun 2025 ini :

Tabel 5.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Gadang

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
					Target Awal	Target Perubahan
1	penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%		1.849.267.655	1.761.236.065
2	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa	%		17.288.800	11.587.800
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai IKM	%		7.800.000	3.900.00
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan status IDM Nagari/ Desa	%		39.535.000	18.082.500
5	Meningkatkan Kualitas Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	persentanse penyelesaian konflik yang difasilitasi	%		0,00	0,00
	Jumlah				**1.913.891.455**	**1.794.806.365**

BAB VI
PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Tanjung Gadang di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Tanjung Gadang sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung . Untuk itu, Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Gadang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tanjung Gadang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Tanjung Gadang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Tanjung Gadang, Februari 2025
CAMAT TANJUNG GADANG

EMIL EVAN, S.STP
Pembina Tk.1/IV.b
NIP.1981212 200012 1 002

KECAMATAN KOTO VII

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas Izin-Nya sehingga telah dimudahkan kita sampai pada tahap Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA PD) Kecamatan Koto VII Tahun 2025, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dilaksanakan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto VII ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. RPJMD tahun 2022-2026 serta mempedomani hasil Evaluasi Renja Tahun 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintahan Kecamatan Koto VII dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD , Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Ucapan Terima Kasih kepada yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjung Ampalu, 2025

CAMAT KOTO VII

VERI SATRIA, SE, MM

NIP. 19671110 199103 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR TABEL..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1. Latar Belakang..... 4

1.2. Landasan Hukum..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN KOTO VII TAHUN 2025..... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I sampai Triwulan II Tahun Berkenan..... 8

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah..... 12

2.3. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 16

Rencana Kerja Perangakat Daerah untuk Tahun Perencanaan dan Perkiraan Maju..... 16

BAB IV PENUTUP..... 21

Daftar Tabel

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kantor Camat Koto VII s/d Tahun 2025..... 9

2.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung..... 15

3.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Perencanaan dan Perkiraan Maju..... 16

Daftar Lampiran

1. Form Saran Perbaikan 1
2. Form Saran Perbaikan 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Perubahan Renja disusun sebagai penyesuian terhadap Renja Awal yang telah di tetapkan, seiring sengan adanya dinamika kebijakan, Perubahan asumsi perencanaan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Koto VII tahun 2025 dilakukan sebagai respon terhadap beberapa faktor penting, antara lain adanya penyesuaian kebijakan nasional dan daerah perubahan prioritas pembangunan, perubahan alokasi anggaran serta masukan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah dituntut untuk adaktif terhadap perubahan tersebut agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu Perubahan Renja tahun 2025 disusun guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Koto VII dapat berjalan lebih optimal serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuain dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
2. Keadaan yang menyebabkan turunnya nilai anggaran dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Koto VII dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan

triwulan II pada tahun 2025 ini yang mana pada saat menyelesaikan Perubahan ini dalam keaadaan belum teralisasinya Triwulan II ,terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Koto VII tahun 2025 yang mana hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Renja Kecamatan Koto VII kabupaten Sijunjung ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah keadaan Mei 2025
2. Perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan ,prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tidak sesuai dengan target semula.

Berdasarkan hal-hal diatas maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Kecamatan Koto VII tahun 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Koto VII tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Koto VII Tahun 2025 adalah untuk Menyelaraskan program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2025, melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan dan sub kegiatan strategis Nasional dan Provinsi sesuai dengan kebutuhan daerah, mengakomodir hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil kegiatan survei program dari Bapppeda yang sudah tertuang dalam

E-planning, mengupayakan agar dalam menyusun program/kegiatan dan sub kegiatan mengedepankan asas manfaat dan kepatutan.

2. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Koto VII Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Koto VII Tahun 2025.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Pulik
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikut.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Perubahan Rencana Kerja (Renja- P) Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN KOTO VII TAHUN 2025

Berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I sampai Triwulan II tahun berkenaan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab penutup ini memberikan kesimpulan dari isi laporan yang sudah dibuat.

BAB II
EVALUASI RENJA KECAMATAN KOTO VII TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I sampai Triwulan II Tahun Berkenan

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan dan subkegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat mengetahui hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja triwulan I sampai Triwulan II dan capaian tahun berjalan yaitu tahun 2025. Review evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Perangkat Daerah Kantor Camat Koto VII sebagaimana kami sajikan pada tabel 2.1 berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra
Kantor Camat Koto VII Kabupaten Sijunjung
Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangka t Daerah Penanggu ng I II III IV Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100 %		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	RP	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100%	4.337.080.205	100%	2.299.085.538	100%	3.797.579.000	25%	538.167.731	50%	1.149.644.182	-	-	-	-	25%	1.149.644.182	100%	3.448.729.720	50%	79 , 52	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	2.674.524.855	100%	1.948.894.100	100%	2.424.568.000	25%	504.777.992	50%	1.062.779.260	-	-	-	-	25%	1.062.779.260	100%	3.011.673.360	50%	112,61	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	15 org	2.584.524.855	15 org	1.932.384.100	15 org	2.349.568.050	25%	501.662.992	50%	1.058.984.260	-	-	-	-	25%	1.058.984.260	100%	2.991.368.360	50%	115,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	18 Dok	90.000.000	18 Dok	16.510.000	18 Dok	75.000.000	25%	3.115.000	50%	3.795.000	-	-	-	-	25%	3.795.000	100%	20.305.000	50%	22 , 56	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	551.454.350	100%	198.770.537	100%	427.607.850	25%	8.726.200	50%	18.251.129	-	-	-	-	25%	18.251.129	100%	217.021.666	50%	39 , 35	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Logistik Kantro yang disediakan	3 Pkt	58.098.600	3 Pkt	24.767.100	3 Pkt	44.691.250	25%	300.000	50%	1.710.800	-	-	-	-	25%	1.710.800	100%	26.477.900	50%	45 , 57	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 pkt	28.754.000	2 pkt	6.603.000	2 pkt	27.916.600	25%	100.500	50%	100.500	-	-	-	-	25%	100.500	100%	6.703.500	50%	23 , 31	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	1 Pkt	40.000.000	1 Pkt	13.521.100	1 Pkt	30.000.000	25%	537.000	50%	537.000	-	-	-	-	25%	537.000	100%	14.058.100	50%	35 , 15	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	2 Pkt	424.601.750	2 Pkt	152.397.337	2 Pkt	325.000.000	25%	7.788.700	50%	15.902.829	-	-	-	-	25%	15.902.829	100%	168.300.166	50%	39 , 64	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan	100%	215.000.000	-	-	100%	185.000.000	-	-	50%	22.795.000	-	-	-	-	25%	22.795.000	100%	22.795.000	50%	10 , 60	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 Pkt	150.000.000	-	-	-	135.000.000	-	-	50%	4.995.000	-	-	-	-	25%	4.995.000	100%	4.995.000	50%	3 , 33	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	65.000.000	-	-	4 Unit	50.000.000	-	-	50%	17.800.000	-	-	-	-	25%	17.800.000	100%	17.800.000	50%	27 , 38	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	177.843.000	100%	60.670.026,00	100%	166.843.000	25%	18.090.539	50%	13.203.288	-	-	-	-	25%	13.203.288	100%	73.873.314	50%	41 , 54	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik, air dan telefon/fax yang dibayarkan	3 Pkt	65.000.000	3 Pkt	27.844.618	3 Pkt	60.000.000	25%	6.096.434	50%	13.203.288	-	-	-	-	25%	13.203.288	100%	41.047.906	50%	63 , 15	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	6 Org	112.843.000	6 Org	32.825.408	6 Org	106.843.000	25%	11.994.105	50%	20.111.105	-	-	-	-	25%	20.111.105	100%	52.936.513	50%	46 , 91	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	195.705.900	100%	76.778.075	100%	173.369.000	25%	6.573.000	50%	12.504.400	-	-	-	-	25%	12.504.400	100%	89.282.475	50%	45 , 62	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16 Unit	135.705.900	16 Unit	65.158.075	15 Unit	123.369.000	25%	4.638.000	50%	8.329.400	-	-	-	-	25%	8.329.400	100%	73.487.475	50%	54 , 15	

		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Pkt	60.000.000	1 Pkt	11.620.000	1 Pkt	50.000.000	25%	1.935.000	50%	4.175.000	-	-	-	-	25%	4.175.000	100%	15.795.000	50%	26 , 33	
	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat nagari/ desa di wilayah kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	100%	175.796.250	100%	87.630.800	100%	139.644.600	25%	9.391.000,00	50%	13.616.625	-	-	-	-	50%	13.616.625	100%	101.247.425	50%	57 , 59	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	100%	175.796.250	100%	63.930.800	100%	139.644.600	25%	5.966.000	50%	8.526.000	-	-	-	-	50%	8.526.000	100%	72.456.800	50%	41 , 22	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Keg	30.153.250	1 Keg	6.351.300,00	1 Keg	27.611.500	25%	5.726.000	50%	7.456.000	-	-	-	-	50%	7.456.000	100%	13.807.300	50%	45 , 79	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Keg	145.643.000	1 Keg	57.579.500	1 Keg	112.033.100	25%	240.000	50%	1.070.000	-	-	-	-	50%	1.070.000	100%	58.649.500	50%	40 , 27	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	persentase fasilitasi kegiatan kesejahteraan keluarga	-	-	0%	23.700.000	-	-	25%	3.425.000	50%	5.090.625	-				50%	5.090.625	50%	5.090.625	-	-	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	0%	23.700.000	-	-	25%	3.425.000	50%	5.090.625	-				50%	5.090.625	50%	5.090.625	-	-	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari/desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan	100%	367.320.600	100%	156.275.084	100%	315.018.750	25%	23.630.595	50%	35.478.059	-	-	-	-	50%	35.478.059	100%	191.753.143	50%	52 , 20	
			sesuai standar 2. persentase administrasi pemerintahan nagari yang	100%		100%		100%		25%		50%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dilaksanakan sesuai standar Jumlah nagari yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Nag	85.000.000	7 Nag	60.348.153	7 Nag	70.000.000	25%	8.115.000	50%	12.795.626	-	-	-	-	50%	12.795.626	100%	73.143.779	50%	86 , 05	
		Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Nagari yang di Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	7 Nag	102.320.600	7 Nag	26.447.335	7 Nag	95.018.750	25%	5.761.579	50%	8.751.579	-	-	-	-	50%	8.751.579	100%	35.198.914	50%	34 , 40	
		Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembangunan Desa Jumlah nagari yang difasilitasi Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Nag	75.000.000	7 Nag	44.979.596	7 Nag	60.000.000	25%	1.567.700	50%	1.567.700	-	-	-	-	50%	1.567.700	100%	46.547.296	50%	62 , 06	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Nag	105.000.000	7 Nag	24.500.000	7 Nag	90.000.000	25%	8.186.316	50%	12.363.154	-	-	-	-	50%	12.363.154	100%	36.863.154	50%	35 , 11	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah kinerja pelayanan di Kecamatan Koto VII dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

a. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaraan/pembukuan,teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
b. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan nagari
d. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah,permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Koto VII perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan.Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut dan paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa pemasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Koto VII adalah

a. Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju.
b. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
c. Persentase penurunan potensi konflik Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar.
d. Persentase administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar.
e. Indeks Kepuasan Masyarakat.
f. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

a. Dampak pembangunan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sijunjung yaitu Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, unggul dan berbudaya menuju masyarakat yang madani.
b. Dampak terhadap kebijakan internasional yaitu: capaian yang menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ektrem dan pemberdayaan kaum wanita,penurunan tingkat kematian, dan memastikan keberlangsungan

lingkungan sesuai target yang harus dicapai,dan isu golbal warning dengan menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem lingkungan dengan baik.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka di terbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pengoordinasian penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan pengoordinasian penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi Kecamatan Koto VII, antara lain:Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sosial dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Namun Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan,pengelolaan anggaran/pembukuan.
2. Masih melemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
3. Masih lemahnya koordinasi sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah nagari.
4. Masih melemahnya partipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan dengan mengikuti kegiatan bimtek maupun kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan yang telah dianggarkan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.
3. Koordinasi dengan Instansi terkait yakni Dinas Komunikasi da Informatika terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional :

1. Dampak pembangunan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah kabupaten Sijunjung yaitu meningkatnya capaian dan hasil pertanian dan perkebunan, meningkatnya kualitas pelayanan publik,dan meningkatnya infrastruktur pembangunan di Nagari.
2. Dampak terhadap capaian program nasional yaitu berupaya menggalakkan home industry dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :

Tantangan

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional,nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungan dalam perencanaan pembangunan wilayah Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto VII Tahun 2025.
b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
c. Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
d. Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
e. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
f. Mobilisasi penduduk yang datang cukup tinggi terutaman dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat induvidualis.
g. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
h. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya

usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

i. Masih adanya pengaruh pada perekonomian dan pelayanan publik serta sulitnya pemerintah untuk menjalankan program/kegiatan di Kecamatan Koto VII akibat wabah.

Peluang

a. Adanya aspirasi,aspresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
b. Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/stakeholder kepada Kecamatan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto VII tahun 2025 sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan seta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.
c. Ketersedian dana APBN,APBD dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perkonomian penyelenggaran pembangunan infrastruktur wilayah.
d. Karakteristik masyarakat yang terbuka,dinamid dan agamis seta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam.
e. Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan ektor pertanian dan perkebunan.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Koto VII merupakan hasil dari Musrembang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat nagari. Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan musrembang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sijunjung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Koto VII

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koto VII	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai suatu keharusan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Kepmendagri Nomor 050 tahun 2021 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atas landasan Peraturan tersebut Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung agar melaksanakan penginputan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi tersebut dibangun oleh Kemendagri dengan alamat web ***https://sipd.kemendagri.go.id***.

Dalam penginputan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah harus mempedomani kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021, maka dapat kita lihat Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto VII Tahun 2025 adalah sebagai berikut : tabel 3.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Perencanaan dan Perkiraan Maju

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KOTO VII

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	lanja ansfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
KECAMATAN KOTO VII																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 2.537.484.379	Rp. 126.693.900			Rp. 2.664.178.279	Rp. 2.333.770.695	Rp. 22.860.000			Rp. 2.356.630.695	Rp. 8.605.000.000,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 2.537.484.379	Rp. 126.693.900			Rp. 2.664.178.279	Rp. 2.333.770.695	Rp. 22.860.000			Rp. 2.356.630.695	Rp. 8.605.000.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 2.363.409.179	Rp. 126.693.900			Rp. 2.490.103.079	Rp. 2.217.604.495	Rp. 22.860.000			Rp. 2.240.464.495	Rp. 7.239.000.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 52.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 52.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.083.833.362				Rp. 2.083.833.362	Rp. 2.071.953.362				Rp. 2.071.953.362	Rp. 4.330.000.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 2.067.933.362				Rp. 2.067.933.362	Rp. 2.067.933.362				Rp. 2.067.933.362	Rp. 4.200.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 15.900.000				Rp. 15.900.000	Rp. 4.020.000				Rp. 4.020.000	Rp. 130.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 96.047.150				Rp. 96.047.150	Rp. 33.818.600				Rp. 33.818.600	Rp. 745.000.000,00

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 75.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 12.319.650				Rp. 12.319.650	Rp. 7.517.000				Rp. 7.517.000	Rp. 110.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 3.201.200				Rp. 3.201.200	Rp. 1.272.200				Rp. 1.272.200	Rp. 60.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 3.253.500				Rp. 3.253.500	Rp. 1.061.000				Rp. 1.061.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 77.272.800				Rp. 77.272.800	Rp. 23.968.400				Rp. 23.968.400	Rp. 455.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 6.900.000	Rp. 126.693.900			Rp. 133.593.900	Rp. 0	Rp. 22.860.000			Rp. 22.860.000	Rp. 1.460.000.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa			Rp. 37.400.000			Rp. 37.400.000		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 620.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 6.900.000	Rp. 7.931.100			Rp. 14.831.100	Rp. 0	Rp. 5.060.000			Rp. 5.060.000	Rp. 320.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa			Rp. 81.362.800			Rp. 81.362.800		Rp. 17.800.000			Rp. 17.800.000	Rp. 520.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 77.268.667				Rp. 77.268.667	Rp. 65.985.333				Rp. 65.985.333	Rp. 280.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 28.566.667				Rp. 28.566.667	Rp. 17.283.333				Rp. 17.283.333	Rp. 120.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 48.702.000				Rp. 48.702.000	Rp. 48.702.000				Rp. 48.702.000	Rp. 160.000.000,00

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 99.360.000				Rp. 99.360.000	Rp. 45.847.200				Rp. 45.847.200	Rp. 372.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 72.150.000				Rp. 72.150.000	Rp. 34.282.000				Rp. 34.282.000	Rp. 220.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 27.210.000				Rp. 27.210.000	Rp. 11.565.200				Rp. 11.565.200	Rp. 152.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 35.610.600				Rp. 35.610.600	Rp. 24.907.200				Rp. 24.907.200	Rp. 497.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 14.175.900				Rp. 14.175.900	Rp. 10.707.200				Rp. 10.707.200	Rp. 277.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 5.726.000				Rp. 5.726.000	Rp. 7.477.200				Rp. 7.477.200	Rp. 122.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 8.449.900				Rp. 8.449.900	Rp. 3.230.000				Rp. 3.230.000	Rp. 155.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp. 21.434.700				Rp. 21.434.700	Rp. 14.200.000				Rp. 14.200.000	Rp. 220.000.000,00
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 21.434.700				Rp. 21.434.700	Rp. 14.200.000				Rp. 14.200.000	Rp. 220.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 247.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 247.000.000,00

7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa												Rp. 122.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 125.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 138.464.600				Rp. 138.464.600	Rp. 91.259.000				Rp. 91.259.000	Rp. 622.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 138.464.600				Rp. 138.464.600	Rp. 91.259.000				Rp. 91.259.000	Rp. 622.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 64.560.500				Rp. 64.560.500	Rp. 39.568.000				Rp. 39.568.000	Rp. 220.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 24.934.700				Rp. 24.934.700	Rp. 18.870.000				Rp. 18.870.000	Rp. 125.000.000,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 10.134.700				Rp. 10.134.700	Rp. 2.481.000				Rp. 2.481.000	Rp. 155.000.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kel/Desa		Rp. 38.834.700				Rp. 38.834.700	Rp. 30.340.000				Rp. 30.340.000	Rp. 122.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 2.537.484.379**	**Rp. 126.693.900**			**Rp. 2.664.178.279**	**Rp. 2.333.770.695**	**Rp. 22.860.000**			**Rp. 2.356.630.695**	**Rp. 8.605.000.000,00**

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Koto VII di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Koto VII sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung menyusun Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan tahun 2025 dan merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Koto VII demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Koto VII telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Tanjung Ampalu, 2025

CAMAT KOTO VII

VERI SATRIA, SE, MM

NIP. 19671110 199103 1 014

1. Form Saran Perbaikan 1:

EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
KECAMATAN KOTO VII

Bab	Muatan Renja	Saran Perbaikan
	JUDUL	Ganti judul cover. Seharusnya Perubahan Renja Tahun 2025
	Kata Pengantar	• Perbaiki semua kalimat renja Perubahan menjadi Perubahan Renja Tahun 2025 • Paragraph kedua kalimat, "Rencana Kerja Awal tahun 2025" perbaiki menjadi Perubahan Renja Tahun 2025
	Daftar Isi	Sudah ada
	Daftar Tabel	Belum ada
I	**PENDAHULUAN**	
1.1	Latar Belakang memuat : ▪ Gambaran umum penyusunan Renja PD ▪ Pengertian ringkas Renja PD dan proses penyusunannya ▪ Hubungan antar dokumen Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, RPJMD, Renja propinsi, kementrian dan lembaga serta dokumen terkait lainnya	Pada latar belakang gambaran yang seharusnya tetang penyusunan renja perubahan PD
1.2	Dasar Hukum ▪ Pastikan memasukkan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru.	Tambahkan dan susunanya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: • Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; • Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

		Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran; • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan; • Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; • Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; • Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045; • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; • Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

		Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031; • Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; • Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
1.3	Maksud dan Tujuan	Sudah Ada
1.4	Sistematika Penulisan	Pada bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah diganti dengan evaluasi Renja Triwulan I sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
II	**EVALUASI RENJA PD**	Judul Bab II seharusnya Evaluasi Renja Kecamatan Koto VII Tahun 2025
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I sampai Triwulan II	2.1 Diganti dengan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I sampai Triwulan II tahun berkenaan Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kantor Camat Koto VII s/d Tahun 2025 diganti Formulir E.81 yang terdapat pada permendagri 86 thn 2017
	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK	Hapus aja
2.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berisi : ▪ Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ▪ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ▪ Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian	Yang point 1 itu letaknya dipoint 2 sedangkan point 2 seharusnya letaknya di point 1

	program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals) ▪ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah ▪ Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	
	Review terhadap RKPD	Tidak perlu ada (hapus aja)
2.3	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Ada
	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Tujuan dan sasaran PD di hapus, sistematika penulisan sesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 361ayat (3)
	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.	
	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	
	Program dan kegiatan untuk pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian SDG’s, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir	
III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	Jadikan ini bab 3
	Rencana kerja perangkat daerah untuk tahun perencanaan dan perkiraan maju	Tabel cetak melalui SIPD saja
IV	**PENUTUP**	
	Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	Sudah Ada
	Penetapan Renja PD	

Muaro Sijunjung, September 2025
Pengampu PD Bid. PPM Bapppeda

Komala Fira Atninggoro, S.STP, MM

2. Form Saran Perbaikan 2:

EVALUASI RANCANGAN RENJA PERUBAHAN 2025
KECAMATAN KOTO VII

Bab	Muatan Renja	Saran Perbaikan
	JUDUL	Ok
	Kata Pengantar	Ok
	Daftar Isi	Ok
	Daftar Tabel	Ok
I	**PENDAHULUAN**	
1.1	Latar Belakang memuat : ▪ Gambaran umum penyusunan Renja PD ▪ Pengertian ringkas Renja PD dan proses penyusunannya ▪ Hubungan antar dokumen Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, RPJMD, Renja propinsi, kementrian dan lembaga serta dokumen terkait lainnya	Ok
1.2	Dasar Hukum ▪ Pastikan memasukkan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru.	Tambahkan landasan hokum di bawah ini : • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
1.3	Maksud dan Tujuan	Ok
1.4	Sistematika Penulisan	Pada bab IV penutup seharusnya dijelaskan seperti bab yang lain
II	**EVALUASI RENJA PD**	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I sampai Triwulan II	Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kantor Camat Koto VII s/d Tahun 2025

		kurang jelas bisa di tampilkan yang lebih jelasnya
2.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berisi : ▪ Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ▪ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ▪ Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals) ▪ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah ▪ Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	Ok
2.4	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Ok
IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	
	Rencana kerja perangkat daerah untuk tahun perencanaan dan perkiraan maju	Ok
V	**PENUTUP**	
	Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	Ok
	Lampiran	belum ada tambhakan lampiran

Muaro Sijunjung, 2025
Pengampu PD Bid. PPM Bapppeda

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025

KECAMATAN LUBUK TAROK
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025, Kondisi Triwulan IV ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk menwujudkan sinergi langka-langka kebijakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan, Demi kelancaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Kantor Camat Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

Lubuk Tarok, September 2025

CAMAT LUBUK TAROK

JULHARYA ADRIKA,S.STP.MAP

Nip. 19850712 200312 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... ii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 4

1.1. Latar Belakang..... 4

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan.....

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lubuk Tarok Triwulan I sampai Triwulan III Tahun 20245..... 20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Perangkat Daerah.... 21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lubuk Tarok..... 23

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 25

BAB IV. 29

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT LUBUK TAROK.....

BAB.V.

PENUTUP.....

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rancangan Anggaran Perubahan Kantor Camat Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung untuk periode Triwulan IV Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,

kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sijunjung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I, II dan III Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomr 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi uandang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Sijunjung tanggal 4 Juli 2022;

22. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.
24. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang RKPD kabupaten Sijunung Tahun 2023

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Rencana Perubahan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Lubuk Tarok untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Tarok.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Lubuk Tarok
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lubuk Tarok
2.3. Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lubuk Tarok
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
2.5. Penambahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3. Program Dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Camat Lubuk Tarok

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Lubuk Tarok

1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Lubuk Tarok Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung 49 Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2023 merupakan penjabaran dari urusan otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah Kepegawaian yang dapat dirinci kedalam Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Program/Kegiatan pada renja dan DPA Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA	DPA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.407.844.200**	**1.524.769.878**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**13.984.000**	**10.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.754.000	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.200.000	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.887.478.500**	**1.251.143.348**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.818.483.800	1.213.518.248
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48.990.000	37.625.100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**10.500.000**	**0**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**272.490.700**	**145.363.850**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.083.000	2.495.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.888.700	15.399.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.240.000	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.018.000	20.296.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.364.000	107.173.150
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**90.375.000**	**0**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**30.000.000**	**0**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.375.000	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**32.290.000**	**63.362.680**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.360.000	16.816.680
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.850.000	46.546.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**114.854.000**	**54.900.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.170.000	48.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.240.000	6.900.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**80.087.000**	**47.518.700**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**60.087.000**	**47.518.700**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.087.000	47.518.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**83.405.000**	**118.675.800**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**59.405.000**	**38.195.750**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.800.000	8.199.950

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.905.000	29.995.800
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**-**	**80.480.050**
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	49.985.200
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	30.494.850
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**19.393.800**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum		
Sinergitas dengan Krpolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		19.393.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**158.568.800**	**205.880.200**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**158.568.800**	**205.880.200**
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	47.483.800	109.990.950
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	88.182.000	95.889.250
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**93.561.900**	**39.727.350**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**93.561.900**	**39.727.350**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.560.000	6.566.800
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	42.418.900	33.160.550
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	23.583.000	0

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk menunjang terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran sehingga fungsi Kantor Camat sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik dengan anggaran sebesar Rp1.641.766.500,00 dan realisasi sebesar Rp 1,641.766.500,00 (78.50%). Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diwilayah kecamatan. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,232.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.213.150,00 (99,68%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,232.00,00 dengan realisasi sebesar Rp6.213.150,00 atau sebesar 99,68%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100% . Ouput dari sub kegiatan ini berupa dokumen Renstra dan dokumen Renja tahun 2025

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah diwilayah kecamatan lubuk tarok. Pada tahun 2025 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.440.743.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.088.856.700,00 atau sebesar 75.68% dan realisasi fisik mencapai 100%. Outputnya dari kegiatan ini administrasi keuangan telah terpenuhi. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.409.062.800.00 dengan realisasi sebesar Rp1.057.194.810,00 atau sebesar 75.03%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya PNS yang tidak menerima gaji dan tunjangan di tahun 2023. Output dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangannya

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp31.680.200,00 dengan realisasi sebesar Rp31.661.950,00 atau sebesar 99,94%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah laporan keuangan baik bulanan, triwulan dan semester telah dihasilkan.

c. Administrasi umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi / melengkapi administrasi kepegawaian perangkat daerah diwilayah kecamatan. Pada tahun 2024 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp102.805.550,00 dengan realisasi Rp102.782.000,00 atau sebesar 99.97%, dan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang terpenuhi administrasi umum perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari b kegiatan antara lain:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.567.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.567.000,00 atau sebesar 100%. sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari

kegiatan ini adalah Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.254,250,00 dengan realisasi sebesar Rp12.241.400,00 atau sebesar 99,89%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

3) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.962.650,00 dengan realisasi Rp11.959.400,00 atau sebesar 99,97%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini Jumlah kunjungan tamu yang terlayani.

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.021.650,00 dengan realisasi sebesar Rp76.014,950,00 atau sebesar 99,99%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penambahan asset tetap. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran pengadaan barang milik daerah adalah sebesar Rp3.335.650,00 dengan realisasi sebesar Rp3.300.000,00 atau sebesar 98,93%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Lainnya disediakan.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan memenuhi jasa penunjang urusan pemerintah daerah di wilayah kecamatan. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp40.589,500,00 dengan realisasi sebesar Rp39.640.549,00 atau sebesar 97,66% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Ouput dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa penunjang untuk pelayanan kantor. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.630.500,00 dengan realisasi sebesar Rp9.693.049,00 atau sebesar 91.18%. sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah rekening jasa yang dibayar

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp29.959.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.947.500,00 atau sebesar 99,96%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitasi Jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas barang milik daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp48.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.057.700,00 atau sebesar 99,99% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Ouput dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Peningkatan kualitas barang milik daerah. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp41.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.97.700,00 atau sebesar 99,99%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas perorangan / jabatan yang dipelihara.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.060.000,00 atau sebesar 100%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah jenis peralatan yang dipelihara.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

   Program ini merupakan program kantor camat Lubuk Tarok yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Progran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public memiliki anggaran sebesar Rp39.090.100,00 dengan realisasi sebesar Rp39.062.300,00 atau sebesar 99,93%. Ouput dari program ini adalah peningkatan kepuasan masyarakat (IKM) Kegiatan program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public adalah :

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

      Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp39.090.100,00 dengan realisasi sebesar Rp39.062.300,00

atau sebesar 99,93% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Ouput dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp39.090.100,00 dengan realisasi sebesar Rp39.062.300,00 atau sebesar 99,93%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelayanan yang dilakukan kantor camat .

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini merupakan program kantor camat Lubuk Tarok yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecaamatan lubuk tarok. Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp32.201.450,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp32.173.425,00 atau sebesar 99,98%. Outp dari program ini adalah Peningkatan Kategori nagari maju. Tahun 2023 Kecamatan Lubuk Tarok mengalami peningkatan kategori maju sebanyak 100% artinya semua kecamatan mengalami peningkatan kategori nagari/desa maju. Program ini terdiri dari kegiatan antara lain:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan yang berada diwilayah kecamatan. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp32.201.450,00 dengan realisasi sebesar Rp32.173.425,00 atau 99,98%. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Persentase peningkatan koordinasi pemberdayaan. Kegiatan ini terdiri dari dari sub kegiatan terdiri dari:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.519.850,00 dengan realisasi sebesar Rp4.509.575,00 atau sebesar 99,77%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah desa yang terfasilitasi dalam mengadakan musrembang.

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp27.681.600,00 dengan realisasi sebesar Rp27.663.850,00 atau sebesar 99,94%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok masyarakat yang terfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Program ini merupakan program kantor camat Lubuk Tarok yang bertujuan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp48.560.850,00 dengan realisasi Rp48.522.825,00 atau sebesar 99,92%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 83,33, Output dari program ini adalah peningkatan nilai IKM, Program ini terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai yang ditugaskan kepala daerah. Pada tahun 2025 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp48.560.850,00 dengan realisaisi sebesar Rp48.522.825,00 atau sebesar 99,92%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah penurunan potensi konflik di wilayah kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp25.083.200,00 dengan realisasi sebesar Rp25.063.400,00 atau sebesar 99,92%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Ouput dari kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

2) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp23.477.650,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 23.459.425,00 atau 99,92%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini kantor Camat Lubuk Tarok bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah nagari. Pada tahun 2023 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp25.336.450,00 dengan realisasi sebesar Rp.25313.052,00 atau 99,91%. Realisasi fisik mencapai 100%. Dari indicator kinerja peningkatan persentase kategori nagari/ desa maju, Program ini terdiri dari:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi, rekomendasi serata koordinasi untuk pembinaan dan pengawasan nagari. Pada tahun 2025 Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp25.336.450,00 dan realisasi sebesar Rp25.313.052,00 atau 99,91 %. Output dari

kegiatan ini adalah Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan antara lain:

1) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

   Pada sub kegiatan ini Kantor Camat Lubuk Tarok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.570.800,00 dengan realisasi sebesar Rp1.568.050,00 atau 99,82%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan sub ini adalah Jumlah dokumen difasilitasi guna mengsingkronisasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2023 untuk Belanja Langsung pada Kantor Camat Lubuk Tarok adalah sebesar Rp1.433.922.511,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp1.786.955.350,00 dengan capaian program sebanyak 80,24%. Jadi sisa anggaran pada Kantor Camat Lubuk Tarok tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp353.032.839,00. Sisa tersebut berasal dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 351.867.990,00dan sisanya sesesar Rp1.164.849,00 dari sub kegiatan lain.

2) Capaian Renstra Kecamatan Lubuk Tarok Periode 2016-2025

Berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, sejauh ini kecamatan Lubuk Tarok telah melaksanakan tugas pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang bersih dari KKN adil berkeadilan dalam menerapkan program kegiatan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berwibawa dimata hukum dan masyarakat.

Dalam rentang waktu tahun pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan telah berjalan dengan baik.

Tabel. 2.1.7

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

KANTOR CAMAT LUBUK TAROK DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KANTOR CAMAT LUBUK TAROK s/d TAHUN 2024

KABUPATEN LUBUK TAROK

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (intermdiate outcome)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7.1.1..	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah**	**175 %**		**87 %**	**87 %**	**100 %**	**88 %**	**175 %**	**100 %**
7.1.1.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja PD**	**200 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**100 %**
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok		2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	4 Dok	100 %
7.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok		3 Dok	5 Dok	167 %	3 Dok	8 Dok	133 %
7.1.1.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi keuangan**	**200 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**100 %**
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org/bl		12 org/bl	12 org/bl	100 %	12 org/bl	24 org/bl	100 %
7.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32 Dok		16 Dok	16 Dok	100 %	16 Dok	32 Dok	100 %
7.1.1.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**200 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200 %**	**100 %**
7.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	100 %

7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis, Inplementasi Peraturan Perundang-undangan		-			-		-		-		-		-			
7.1.1.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**%**	**101**	**%**	**100**	**%**
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket		1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	2	Paket	100	%
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket		3	Unit	3	Unit	100	%	4	Unit	7	Unit	100	%
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket		2	Paket	-	Paket	-	%	2	Paket	2	Paket	50	%
7.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Lap		12	Lap	12	Lap	100	%	12	Lap	24	Lap	100	%
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Lap		300	Lap	600	Lap	200	%	300	Lap	900	Lap	150	%
7.1.1.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah seseuai dengan perencanaan**	**200**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**
7.1.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit			Unit	-	Unit	-	%	1	Unit	1	Unit	100	%
7.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit		1	Unit	-	Unit	-	%	2	Unit	2	Unit	67	%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya		1	Unit		1	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
7.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel		-			-					%	-					%
7.1.1.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**200**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Lap		12	Lap	12	Lap	100	%	12	Lap	24	Lap	100	%
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Lap		12	Lap	12	Lap	100	%	3	Lap	15	Lap	100	%
7.1.1.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**200**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit		11	Unit	11	Unit	100	%	12	Unit	23	Unit	100	%

7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit		16	Unit	11	Unit	69	%	16	Unit	27	Unit	84	%
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		-		-		-		3		3		100	
7.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Unit		-		-		-		-		-			
7.1.2..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**177**	**Nilai**		**88**	**Nilai**	**88**	**Nilai**	**100**	**%**	**89**	**Nilai**	**177**	**Nilai**	**100**	**%**
7.1.2.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**200**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	Lap		24	Lap	24	Lap	100	%	24	Lap	48	Lap	100	%
7.1.3..	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Nagari/ Desa dengan Kategori Minimal Maju**	**49**	**%**		**16**	**%**	**16**	**%**	**100**	**%**	**33**	**%**	**49**	**%**	**100**	**%**
7.1.3.2.01.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa**	**101**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1**	**%**	**101**	**%**	**100**	**%**
7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lbg Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	Lbg		4	Lbg	4	Lbg	100	%	4	Lbg	8	Lbg	100	%
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	Lap		36	Lap	48	Lap	133	%	36	Lap	84	Lap	117	%
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	-			-		-		-		-		-			
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah koordinasi yang dilakukan**	-			-		-		-		-		-			
7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-			-		-		-		-		-			
7.1.5..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penurunan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan.**	**9**	**%**		**5**	**%**	**5**	**%**	**100**	**%**	**4**	**%**	**9**	**%**	**100**	**%**
7.1.5.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**200**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**

7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah org yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat BeragamaRasdan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan LokalRegionaldan Nasional	60	org		30	org	40	org	133	%	30	org	70	org	117	%			
7.1.5.2.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal.	Jumlah Dok Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	72	Dok		36	Dok	36	Dok	100	%	36	Dok	72	Dok	100	%			
7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai Standar, 2. Persentase Adminisrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar**	**% %**			**76 75**	**% %**	**76 75**	**% %**	**%**		**% % 78**		**% %**		**% %**				
7.1.6.2.01.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**% 200**			**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**200**	**%**	**100**	**%**			
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	492	Dok		246	Dok	246	Dok	100	%	246	Dok	492	Dok	100	%			
7 .1.6.2.01.2	F asilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Dok			Dok		Dok	-		-	Dok	-	Dok	-				
7.1.6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-					-		-		-		-		-				
7.1.6.2.01.9	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dok Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	Dok		1	Dok	1	Dok	100	%	1	Dok	2	Dok	100	%			
7.1.6.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	144	Lap		72	Lap	72	Lap	100	%	72	Lap	144	Lap	100	%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lubuk Tarok

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Lubuk Tarok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lubuk Tarok yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kantor Camat Lubuk Tarok dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kantor Camat Lubuk Tarok sesuai Renstra Tahun 2016-2025 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Sijunjung yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2025 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Sijunjung. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Lubuk Tarok dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lubuk Tarok

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi		**87%**	**88%**	**89%**	**90%**	70,45	**71**	**71,5**	**72**	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor camat	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		**88 Nilai**	**89** Nilai	**89 Nilai**	**89 Nilai**	**83,26 Nilai**	**83,5 Nilai**	**84 Nilai**	**84,5 Nilai**	
3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat nagari/desa diwilayah kecamatan	Persentase Nagari/ Desa dengan Kategori Minimal Maju		**16%**	**33%**	**50%**	**67%**	**16%**	**33%**	**50%**	**67%**	
4	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi ketentraman,ketertiban umum dan penyelengaraan pemerintah umum di wilayah kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.		**50%**	**30%**	**20%**	**10%**	**50%**	**30%**	**20%**	**10%**	
		Persentase penurunan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan.		**5%**	**4%**	**3%**	**2%**	**5%**	**4%**	**3%**	**2%**	
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah nagari/desa	Persentase Adminisrasi Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar		**76%**	**77%**	**78%**	**79%**	**80%**	**77%**	**78%**	**79%**	

2.3. Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lubuk Tarok

Kecamatan Lubuk Tarok merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Sijunjung yang terletak di bagian Utara Kabupaten , berada pada bidang Geografis 00^0 34”29’ - 00^0 44”17” LS dan 100^0 52’37 – 1001”1001 00’58” BT dengan ketinggian $\pm$ 187 m dari permukaan laut, Kecamatan Lubuk Tarok merupakan Kecamatan kedua terkecil di Kabupaten Sijunjung setelah Kupitan dengan luas 187,60 KM^2 dengan batar-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Kecamatan Sijunjung

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kabupaten Solok

Sebelah Barat : Berbatas dengan Kecamatan IV Nagari

Sebelah Timur : Berbatas dengan Kecamatan Tanjung Gadang

Kondisi dan Topografi Kecamatan Lubuk Tarok bervariasi ada berukit, bergelombang dan dataran.

Kecamatan Lubuk Tarok memiliki sumber daya alam potensial dialiri oleh sungai batang sukam cocok untuk budi daya ikan.

Disamping itu ada beberapa bagian wilayah Kecamatan Lubuk Tarok yang memiliki kandungan bahan tambang diantaranya; Batu Bara, emas, Minyak, Gas Bumi dan wisata alam. Kekayaan bahan tambang ini baru sebahagian kecil yang dapat dieksploitasi dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang akan mengelolanya. Kekayaan alam pada Sektor Perkebunan dan Kehutanan telah menjadi penyangga perekonomian sebagian masyarakat Kecamatan Lubuk Tarok.

Untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Lubuk Tarok terdiri dari 6 Nagari 24 Jorong dengan luas wilayah 187,60 Km^2. Gambaran dari pelayanan Kecamatan Lubuk Tarok adalah sebagai berikut :

a) Penduduk

   Penduduk Kecamatan Lubuk Tarok keadaan 31 Desember 2020 berjumlah 18.498 Jiwa terdiri dari Laki-Laki 9.197 jiwa dan Perempuan 9.301 jiwa dengan rincian penduduk Per nagari sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk
Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2023

NO	NAGARI	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		L	P	
1	LUBUK TAROK	3.878	3.883	7.761
2	LALAN	1.790	1.789	3.579
3	BULUH KASOK	1.345	1.434	2.779
4	KAMPUNG DALAM	915	982	1.897
5	LATANG	586	614	1.200
6	SILONGO	683	599	1.282
JUMLAH		**9.197**	**9.301**	**18.498**

b) Sosial Budaya

(1) Pendidikan

Tahun 2023 Sekolah Dasar Negeri sebanyak 17 Unit. SLTP 2 Unit (SMPN 12 dan SMPN 30 Sijunjung), Pondok Pesantren 1 unit (Ponpes Darul Fallah), SLTA 1 Unit yaitu SMAN 12 Sijunjung, Taman Kanak-Kanak/TK 14 Unit dan PAUD 20 Unit, Pelaksanaan pendidikan Kecamatan Lubuk Tarok telah berjalan dengan baik.

(2) Kesehatan

Fasilitas Sarana Pelayanan kesehatan di Kecamatan Lubuk Tarok terdapat 1 buah Puskesmas, 3 buah Pustu, 11 buah Puskesri, 21 Posyandu dan 19 buah Posyandu Lansia yang tersebar ditiap-tiap nagari dalam Kecamatan Lubuk Tarok.

(3) Agama dan adat

Secara umum penduduk Kecamatan Lubuk Tarok adalah beragama Islam yang sangat identik dengat adat istiadat masyarakat Minangkabau. Sebagaimana slogan masyarakat Sumatera Barat *Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*. Dari data tahun 2019 di Kecamatan Lubuk Tarok terdapat 13 buah Mesjid, dan 73 TPQ/TPSQ.

Adapun jenis pelayanan yang ada pada kantor Camat Lubuk Tarok sesuai dengan Tupoksi yang ada terdiri dari :

1) Pelayanan Permohonan Proposal Bantuan Bibit & Ternak
2) Pelayanan Permohonan rekomendasi IMB
3) Pelayanan Permohonan rekomendasi SITU
4) Pelayanan Permohonan Rekomendasi Nikah
5) Pelayanan Permohonan Proposal Bantuan Mesjid

6) Pelayanan Permohonan Bea Siswa
7) Pelayanan Permohonan Bantuan Bencana
8) Pelayanan Bantuan Biaya Berobat/Perawatan
9) Pelayanan Permohonan Legalisasi Pensiun
10) Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Penghasilan
11) Pelayanan Permohonan Proposal Kegiataan Pemuda
12) Pelayanan Permohonan Legalisasi pembuatan KK
13) Pelayanan Permohonan Legalisasi Pembuatan KTP
14) Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
15) Pelayanan Permohonan Surat Pindah
16) Pelayanan Permohonan SKCK/Kelakuan Baik
17) Pelayanan Permohonan Izin Keramaian

Terkait dengan topografi wilayah di lubuk tarok tersebut menyebabkan layanan yang bersifat online sangat sulit untuk di kembangkan. Untuk mempermudah peyanan kepada masyarakat pemerintah kecamatan lubuk tarok mengupayakan menyegerakan penyelesaian setiap layanan. Hal tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun hambatan dan masalah yang dihadapi kantor camat lubuk tarok secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai.

   Sarana dan prasarana kantor amat mendukung kelancaran kegiatan kantor. terutama komputer atau lap top. Kekurangan sarana dan prasarana tersebut amat sangat mengganggu kelancaran kegiatan kantor, apalagi pada saat ini pengolahan data menggunakan berbagai aplikasi. Kecanggihan sarana dan prasarana sangatlah diharapkan. ASN pada kantor camat berjumlah 11 orang dan tenaga THL sebanyak 8 orang. Sementara sarana computer PC berjumlah 3 unit yang terletak di kasi PPM , kasi ekbang dan kasi kesra dengan kualitas rendah yang tidak dapat digunakan untuk menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Sedangkan lap top terdapat 6 unit yang tersebar di keuangan 3 unit (laptop PPK, lapotop bendahara dan laptop pengurus barang sekaligus gaji), bagian umum, kasi trantip dan kasi PPM masing-masing 1 unit. Dengan demikian penyampaian laporan sering mengalami keterlambatan.
2. Kekuarngan Sumber Daya Manusia di lingkup kecamatan Lubuk Tarok.

Hal ini didandai dengan adanya jabatan rangkap di kecamatan Lubuk Tarok. Misalnya jabatan bendahara gaji dirangkap pengerjaannya oleh kasi PPM dan pengurus barang yang di duduki oleh tenaga THL. Kantor camat lubuk tarok mempunyai 10 orang ASN yang terdiri dari 1 orang camat, 1 orang sekretaris camat, 5 kepala seksi dan 2 kepala sub bagian, 1 bendahara pengeluaran. Sementara THL terdapat 9 orang dengan menduduk sebagai staf di masing-masing kasi dan kasubag.

3. Mutasi dilingkungan kabupaten sijunjung menyebabkan realisasi renja sedikit terhambat.

   Keterbatasan SDM dilingkup kecamatan lubuk tarok menyebabkan kesulitan dalam menunjuk bendahara pengeluaran pengganti setelah dimutasi jabatan. Pada mutasi jabatan tersebut bendahara lama mendapat promosi jabatan menjadi kasubag Keuangan dan Perencanaan. Terjadi kekosongan ASN untuk di tunjuk menjadi bendahara sehingga diperlukan melakukan konsultasi dan koordinasi ke BKPSDM untuk permintaan staf ASN yang akan di tunjuk menjadi bendahara walaupun pegawai tersebut tidak memiliki ijazah strata 1 dan tidak memiliki sertifikat bendahara sehingga untuk menunjuknya Kecamatan lubuk tarok harus melakukan koordinasi kepada BKAD yang menyebabkan terjadi keterlambatan dalam pengurusan specimen.

4. Monitoring ke Nagari belum maksimal

   Fungsi kecamatan lubuk tarok adalah koordinasi dan fasilitasi. Koordinasi yang dilakukan kecamatan lubuk tarok bisa dalam bentuk monitoring ke nagari-nagari diwilayah kecamatan Lubuk tarok. Monitoring yang kurang maksimal yang dilakukan kecamatan lubuk tarok menyebabkan kecamatan tidak mengetahui apa dan bagaimana kondisi suatu nagari baik kondisi tata pemerintahannya maupun kondisi keuangan Nagari. Sehingga sulit untuk kecamatan memfasilitasi suatu kegiatan dengan pihak-pihak terkait dengan nagari.

5. Tidak singkron usulan Musrenbang Nagari dengan Program dan Kegiatan yang ada OPD terkait.

Untuk meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat, kecamatan Lubuk Tarok harus mampu mengatasi kelemahan, mengurangi ancaman, memanfaatkan peluang dan memperkuat kekuatan. Adapun aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan

Selama ini kelemahan yang dimiliki kecamatan lubuk tarok untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan professional adalah :

a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat sehingga data yang dihasilkan tidak akuntabel dan sulit dapat dipertanggung .
b. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya sehingga informasi dibutuhkan masyarakat agak terhambat (tidak sampai).
c. Rendahnya supermasi hukum diwilayah kecamatan menyebabkan kecamatan lubuk tarok harus berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan konkrit terhadap suatu masalah.

2. Ancaman

   Adapun ancaman yang dihadapi kecamatan lubuk tarok dalam mencapai sasaran adalah terdapanya aturan yang kontradiktif dan kontra produktif sehingga sangat sulit bagi kecamatan untuk menetapkan keputusan.

3. Peluang

   Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kecamatan lubuk tarok untuk mencapai sasaran tersebut adalah penyederhanaan birokrasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan keprofesionalan ASN yang ada di kecamatan Lubuk Tarok.

4. Kekuatan

   Adapun kekuatan yang dapat dipertajam oleh kecamatan lubuk tarok dalam mencapai sasaran tersebut adalah Usia rata-rata ASN kecamatan Lubuk tarok yang masih rata-rata masih usia produktif sehingga mesih besar kemungkinan kecamatan lubuk tarok untuk dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya misalnya mengikuti pelatihan terkait pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan dapat menghambat tercapainya misi dan visi. Dengan adanya misi kepala daerah tentang Meningkatkan kualitas pelayanan public yang efekti, efisien dan responsive berbasis reformasi menyebabkan setiap OPD termasuk kantor Camat Lubuk Tarok di kabupaten sijunjung mempunyai SPM (standar Pelayanan Minimal) untuk melayani masyarakat dan NSPK (Norma,Standar, Prosedur dan Kriteria) yang akhirnya mendukung RPJMN terkait misi Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Selain misi tersebut misi bupati tentang meningkatnya kualitas infrasruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan menyebabkan pembangunan di wilayah kabupaten sijunjung dilaksanakan secara berkelanjutan (SDGs). Dengan terlaksananya SDGs diwilayah kabupaten sijunjung menyebabkan misi kepala Negara tercapai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Camat Lubuk Tarok untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Kantor Camat Lubuk Tarok juga berperan dalam pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Pembangunan dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kantor Camat Lubuk Tarok membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala alokasi anggaran untuk Kantor Camat Lubuk Tarok minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk melihat Kantor Camat Lubuk Tarok secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 visi Pembangunan ekonomi Nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah terwujudnya Perekonomian yang Maju, Mandiri, dan Mampu secara nyata memperluas Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan pada Prinsip-Prinsip Ekonomi yang menunjang Persaingan Sehat dan keadilan serta berperan aktif dalam Perekonomian Global dan Regional dengan Bertumpu pada Potensi Bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud dilakukan melalui melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa yaitu Pancasila dan Trisakti.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Kabupaten Sijunjung maka Kantor Camat Lubuk Tarok akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sijunjung secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lubuk Tarok Tahun 2025

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dengan mempertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat, maka dirumuskan arah tujuan dan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Lubuk Tarok.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Tujuan adalah pernyataan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi dalam penangganan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang capaian kinerjanya terlihat pada hasil akhir (final outcame). Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, relevan dan dapat dicapai serta rasional. Sehingga perkembangannya terlihat pada pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan (long term outcame) tahunan .

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari perumusan capaian strategis yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat dirumuskan melalui metode pohon kinerja atau performance cascading. Sehingga terlihat jelas pembagian peran dan kinerja secara berjenjang yang diukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu; 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah, dan 2) Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan alat ukur dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun pembangunan jangka menengah dipemerintahan Kecamatan Lubuk Tarok dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Lubuk Tarok

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- (%)					
					1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Persentase peningkatan nilai IKM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Evaliasi Akuntabilitas Kinerja	87	8	89	90	91	92
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanaan public di Kec.	IKM terhadap pelayanan kewilayahan	88	89	89	89	90	90
			Meningkatnya kualitas koordinasi Pemberdayaan Masyarakat nigari/desa	PKategori Minimal Maju	16	33	50	67	83	100

			Meningkatnya kualitas Koordinasi fasilitasi ketentraman ketertiban umum dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wil Kecamatan	Perseentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, persentase penurunan potensi konflik	50 5	30 4	20 3	- 2	- 1	- 0
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari/ desa	Persentase administrasi keuangan nagari ysng dilaksanakan sesuai stamdar Persentase administrasi pemerintahan nsagsri yang dilaksanakan sesuai standar	75 76	77 78	79 80	81 82	83 84	85 86

3. Program dan Kegiatan

Urusan Kewenangan Kantor Camat Lubuk Tarok pada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib Otonomi Daerah, Pem.Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Untuk tahun 2025, Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kantor Camat Lubuk Tarok Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7,01	**KECAMATAN LUBUK TAROK**				**1.613.857.870**				**5.320.847.413**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	Kec. Lubuk Tarok		1.493.529.930				4.748.012.351
7.01.01,2,91	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Terhadap Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**	**Kec. Lubuk Tarok**		5.178.037				18.572.740,00
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	5.178.037			2 Dokumen	14.313.540,00
7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 Laporan	-			8 Laporan	4.259.200,00
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan TerhadapPelayanan Adininstrasi Keuangan**	**Kec. Lubuk Tarok**		**1.361.978.543**				**2.485.607.228**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kec. Lubuk Tarok	11 Org	1.343.206.678	APBD		10 org	2.420.401.538
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun			-				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SemesterSKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kec. Lubuk Tarok	30 Laporan	18.771.865	APBD		30 Laporan	65.205.690
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Kepagawaian**	**Kec. Lubuk Tarok**		-				1.409.650.00

									0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kec. Lubuk Tarok	1 Paket	-	APBD		1 Paket	1.397.550.000
	Bimbingan Teknis Imlpementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang-undangan	Kec. Lubuk Tarok	2 Kali	-	APBD		2 Kali	12.100.000
7.01.01.2.05.11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Lubuk Tarok**	**100%**	**37.859.710**				**362.685.117**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kec. Lubuk Tarok	4 Paket	1.249.300	APBD		4 Paket	6.765.473
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kec. Lubuk Tarok	6 Paket	2.904.000	APBD		6 Paket	38.446.866
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Lubuk Tarok	2 Paket	-	APBD		2 Paket	14.960.440
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kec. Lubuk Tarok	12 Laporan	2.502.300	APBD		12 Laporan	21.186.858
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kec. Lubuk Tarok	30 Laporan	31.204.110	APBD		30 Laporan	281.325.480
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Lubuk Tarok**	**100%**	**-**				**269.359.125**
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Lubuk Tarok	2 Unit	-	APBD		2 Unit	80.359.125
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mobiler yang disediakan	Kec. Lubuk Tarok	2 Unit	-			2 Unit	24.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang di sediakan	Kec. Lubuk Tarok	4 Unit	-	APBD		2 Unit	20.000.000
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang diadakan	Kec. Lubuk Tarok		-				-
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Kendaraan Dias Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan	Kec. Lubuk Tarok	3 Unit	-			3 Unit	145.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Lubuk Tarok**	**100%**	**57.863.640**				**50.870.820**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Lubuk Tarok	12 Laporan	13.487.640	APBD		12 Laporan	24.437.160
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Lubuk Tarok	4 Laporan		APBD		4 Laporan	

					44.376.000				26.433.660
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi Umum**	**Kec. Lubuk Tarok**	**100%**	**30.650.000**				**169.840.061**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara	Kec. Lubuk Tarok	11 Unit	28.500.000	APBD		11 Unit	105.375.270
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Lubuk Tarok	Unit	-	APBD		Unit	17.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Lubuk Tarok	10 Unit	2.150.000	APBD		12 Unit	20.296.419
7.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Lubuk Tarok	3 Unit	-	APBD		3 Unit	27.168.372
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELEYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Kec. Lubuk Tarok**	**75**	28.442.200				79.975.797
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Lubuk Tarok**	**1 Kegiatan**					
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Kecamatan	Kec. Lubuk Tarok						
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan		24 Laporan	28.442.200	APBD		24 Laporan	79.975.797
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase nagari/desa dengan kategori minimal maju**	Kec. Lubuk Tarok	**100%**	**43.923.350**				**158.448.150**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegaiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Lubuk Tarok**	**1 kegiatan**	**23.430.700**				**77.968.100**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Mayarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Lubuk Tarok	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.705.200	APBD		5 Lembaga Kemasyarakatan	17.968.100

7.01.03.2.01.02	Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kec. Lubuk Tarok						
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lubuk Tarok	30 Laporan	15.725.500	APBD		72 Laporan	60.000.000
7.01.03.2.0003	**Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Kec. Lubuk Tarok**	**1 kegiatan**	**20.492.650**				**80.480.050**
7.01.03.2.06.006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang memiliki keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kec. Lubuk Tarok	30 Keluarga	4.782.800	APBD		30 Keluarga	49.985.200
7.01.03.2.06.007	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kec. Lubuk Tarok	30 Keluarga	15.709.850	APBD		30 Keluarga	30.494.850
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penurunan Pelanggaran dan ketertiban umum**	Kec. Lubuk Tarok		**32.619.000**				**182.370.242**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Forkopincam**	**Kec. Lubuk Tarok**		**32.619.000**				**182.370.242**
7.01.04.7.03.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Lubuk Tarok	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	10.000.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegaiatan pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Lubuk Tarok	30 Org	-	APBD		30 Org	65.000.000
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan ang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh isntansi vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahany ang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh isntansi vertikal	Kec. Lubuk Tarok	36 Dokumen	32.619.000	APBD		36 Dokumen	117.370.242
7.01.05.2.01.07	Kegiatan Verifikasi dan Penilaian Kabupaten Sehat Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Lubuk Tarok						

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**;(1) Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar (2) Persentase adimistrasi pemerintahan nagari yang dilaksankan sesuai standar**	**Kec. Lubuk Tarok**	**100%**	**-**				19.939.800
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Lubuk Tarok	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	19939800
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**;(1) Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar (2) Persentase adimistrasi pemerintahan nagari yang dilaksankan sesuai standar**	**Kec. Lubuk Tarok**	**100%**	**15.343.390**				132.101.073
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Lubuk Tarok**	**100%**	**15.343.390**				**132.101.073**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Lubuk Tarok						
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Lubuk Tarok	246 Dokumen	-	APBD		246 Dokumen	41.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan desa	Kec. Lubuk Tarok	1 Nagari		APBD			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Lubuk Tarok	1 Dokumen	15.343.390	APBD		1 Dokumen	61.000.000
7.01.06.2.01.10	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Lubuk Tarok	72 Laporan	-	APBD		72 Laporan	30.101.073
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah nagari yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Lubuk Tarok						

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KANTOR CAMAT LUBUK TAROK

Sebagai suatu keharusan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atas landasan Peraturan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung agar melaksanakan penginputan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi tersebut dibangun oleh Kemendagri dengan alamat web ***https://sipd.kemendagri.go.id***.

Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID), Perangkat Daerah didampingi oleh admin dari Bapppeda kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Admin Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, setiap operator dari masing-masing Perangkat Daerah diberikan Username Perangkat Daerah, yang mana kegiatan ini dimulai pada tanggal 13 Februari 2024.

Dalam penginputan Renja ini Perangkat Daerah harus mempedomani RPJMD 2021-2026 dan hasil Pemetaan serta pemutahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka dapat kita lihat Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Tarok dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Rencana Kerja Dan Pendanaan
Kantor Camat Lubuk Tarok

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota					
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Lb Tarok	2 Dokumen	12.000.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat					

Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Lb Tarok	11 Orang/ bulan	1.131.242.334	Dana Tranfer Umum-DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Lb Tarok	30 Laporan	38.6210.100	Dana Tranfer Umum-DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya	Kantor Camat Lubuk Tarok	1 Paket	9.500.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Lb Tarok	4 Paket	2.495.500	Dana Tranfer Umum-DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Lb Tarok	6 Paket	15.399.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Lb Tarok	12 Laporan	15.295.200	Dana Tranfer Umum-DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Lb Tarok	636 Laporan	155.696.354	Dana Tranfer Umum-DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaralatan mesin lainnya	Kantor Camat Lb Tarok	2 unit	20.00.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Dana Tranfer Umum-DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Lb Tarok	12 Laporan	16.816.680	Dana Tranfer Umum-DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Lb Tarok	4 Laporan	46.546.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor Camat Lb Tarok	11 Unit	48.000.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Camat Lb Tarok	12 Unit	6.900.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Lb Tarok	24 Laporan	47.518.700	Dana Tranfer Umum-DAU
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Lb Tarok	12 Laporan	29.995.800	Dana Tranfer Umum-DAU
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah Partisipatif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kantor camat lubuk tarok	100 orang	12.199.950	Dana Tranfer Umum-DAU
Kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan					
Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan dan memiliki SDM yang berkualitas	Kantor camat lubuk tarok	12 kelompok	20.000.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan derajat Kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Kelurga yang memiliki kesadaran menerpkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kantor camat lubuk tarok	100 kk	30.494.850	Dana Tranfer Umum-DAU
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah					
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan antar suku dan intra suku beragama dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local , regional dan nasional	Kantor Camat Lb Tarok	30 orang	21.421.900	Dana Tranfer Umum-DAU
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal.	Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh intansi vertical	Kantor Camat Lb Tarok	36 dokumen	10.000.000	Dana Tranfer Umum-DAU
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset	Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Kantor Camat Lb Tarok	1 dokumen	5.000.000	Dana Tranfer Umum-DAU

	dengan pembangunan desa				
Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan	Kantor Camat Lb Tarok	72 laporan	19.554.950	Dana Tranfer Umum-DAU
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
Sinergitas degan kepolisian Negara RI Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil hunbungan kerjasama dengan intansi vertikal	Kantor camat lubuk tarok	12 laporan	10.939.800	Dana Transfer Umum- DAU
				1.725.637.118	

BAB V
P E N U T U P

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Lubuk Tarok di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Lubuk Tarok sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Tarok yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Lubuk Tarok demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Lubuk Tarok telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Lubuk Tarok, September 2025

CAMAT LUBUK TAROK

JULHARYA ADRIKA,S.STP.MAP

Nip. 19850712 200312 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 1, bahwa Perangkat daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Kecamatan Kupitan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan pagu dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja Perubahan Kecamatan Kupitan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Renja Perubahan Kecamatan Kupitan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Sijunjung ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kupitan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Kecamatan Kupitan memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Kupitan, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.

1.2. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Rencana Perubahan Kerja Kecamatan Kupitan Tahun 2025 agar terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya di Kantor Kupitan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kupitan Tahun 2025 adalah:

a. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025.

b. Sebagai pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Kantor Camat Kupitan.
c. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Kupitan dengan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Kupitan Tahun 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kupitan Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kupitan
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Tahun 2025
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Kupitan
- 3.3 Program Dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Camat Kupitan
Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab V Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kupitan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kupitan

1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kupitan Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan, bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan ekonomi pembangunan, social dan kesejahteraan serta Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Untuk mendukung hal tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kupitan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari urusan otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah Kepegawaian yang dapat dirinci kedalam Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Program/Kegiatan pada DPA awal dan DPA Perubahan Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN		DPA awal Rp	DPA Perubahan Rp
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.969.304.794,00**	**1.670.544.965,,00**
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.537.500,00	6.657.000,00
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.677.923.381,00	1.502.511.530.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	0,00
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.037.373,00	67.412.182,00
	4.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3.000.000,00	0,00
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.446.540,00	77.634.240,00
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.360.000,00	16.420.000,00
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**9.160.000,00**	**3.834.000,00**
	7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	9.160.00,00	3.834.000,00
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		**30.528.600,00**	**23.077.500,00**
	8.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.528.600,00	20.203.500,00
	9.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.000.000,00	2.874.000,00
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**0,00**	**0,00**
	10.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00-	0,00
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**25.320.000,00**	**10.542.000,00**
	11	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.320.000,00	10.542.000,00
	Jumlah		**2.034.313.394,00**	**1.708.093.455,00**

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator keberhasilan sasaran adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	KEUANGAN			FISIK		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi %	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1.903.399.596	1.745.610.207	91,71	12 bln	100	100

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 100% dan untuk realisasi keuangan telah tercapai 91,71% sehingga terwujudnya Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	KEUANGAN			FISIK		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi %	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Kantor Camat Kupitan	**6.858.200**	**6.778.950**	98,84	12 bln	100	100

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 100% dan untuk realisasi keuangan telah tercapai 98,84 % sehingga terwujudnya Meningkatnya kualitas pelayanan pada Kantor Camat Kupitan.

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator keberhasilan sasaran adalah Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan di Kecamatan dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	KEUANGAN			FISIK		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1.	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan di Kecamatan	14.285.100	14.242.600	99,7	12 bln	100	99,99

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 100% dan untuk realisasi keuangan telah tercapai 99,7% sehingga Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan di Kecamatan.

d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator keberhasilan sasaran adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	KEUANGAN			FISIK		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	8.218.200	8.189.000	99,64	12 bln	100	99,64

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 99,99% dan untuk realisasi keuangan telah tercapat 99,29% sehingga Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kupitan .

e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator keberhasilan sasaran adalah Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari/Desa dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	KEUANGAN			FISIK		Total Capaian Kinerja (%)
		Rencana Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi %	
1	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari/Desa	21.614.600	21.538,950	99,65	12 bulan	100	99,65

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan dari target fisik yang telah dilaksanakan telah tercapai 100 dan untuk realisasi keuangan telah tercapat 99,65% sehingga Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari/Desa.

2) Capaian Renstra Kecamatan Kupitan Periode 2021-2026

Berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, sejauh ini kecamatan Kupitan telah melaksanakan tugas pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang bersih dari KKN adil berkeadilan dalam menerapkan program kegiatan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berwibawa dimata hukum dan masyarakat.

Dalam rentang waktu tahun pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan telah berjalan dengan baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kupitan

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Kupitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kupitan yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kantor Camat Kupitan dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta hak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kantor Camat Kupitan sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kupitan yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kupitan Tahun 2021-2026 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Kupitan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Kupitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kupitan
Kabupaten Sijunjung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kantor Camat Kupitan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi perkantoran			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
2	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang mendapat pemeliharaan			2 unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
3	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang mendapat pemeliharaan			8 unit	8 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	
4	Jumlah AC yang mendapat pemeliharaan			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	

5	Jumlah Mesin Tik yang mendapat pemeliharaan			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
6	Jumlah komputer dan Laptop yang mendapat pemeliharaan			11 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	
7	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat			orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	
8	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
9	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Seksi Pemerintahan dan Kependudukan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
10	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

11	Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kemiskinan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
12	Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
13	Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
14	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari			-	3 nagari, 1 Desa	3 nagari, 1 Desa	3 nagari, 1 Desa	-	3 nagari, 1 Desa	3 nagari, 1 Desa	3 nagari, 1 Desa	

2.3. Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kupitan

Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada.

Kedudukan Kecamatan Kupitan, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.

Untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Kupitan yang terdiri dari 3 (tiga) Nagari dan 1 (Satu) Desa, 9 Jorong dan 5 Dusun, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis organisasi yang merupakan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, peluang dan tantangan. Lingkungan Internal Organisasi berkenaan 5 M (Man, Money, Metode, Machine dan Material) dan lingkungan Ekternal menyangkut dengan politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Topografi Kecamatan.

Dilihat dari kondisi diatas adapun gambaran dari pelayanan Kecamatan Kupitan adalah sebagai berikut :

a) Penduduk

Penduduk Kecamatan Kupitan cukup homogen yang penduduknya berasal dari berbagai daerah, suku bangsa dan agama. Mayoritas Penduduk Kecamatan Kupitan mata pencahariannya adalah Petani, dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2023 12.616 jiwa yang terdiri dari laki-laki 6.277 jiwa dan perempuan 6.339 dengan jumlah 3.605 KK. Adanya selisih jumlah penduduk antara Disduk Capil dengan rekapan yang ada di nagari dan Desa dikarenakan secara umum masih banyak masyarakat yang belum memperbarui KK bagi Anggota Keluarga yang lahir, meninggal dan pindah dalam Kabupaten. Dan itu termasuk penyebab berkurangnya jumlah penduduk di Kecamatan Kupitan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022

b) Sosial Budaya

(1) Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Kupitan perlu dibicarakan oleh instansi terkait di tingkat Kabupaten karena beberapa hal sebagai berikut :

(a) Kurangnya disiplin guru tertutama didaerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan, sebagian besar guru tidak tinggal didaerah tersebut sehingga proses belajar mengajar jadi terganggu.

(b) Kurangnya kesadaran orang tua dalam memperhatikan anak.

(c) Penempatan guru belum maksimal, karena masih ada sebagian daerah yang masih kekurangan guru. Dalam hal ini masih ada Sekolah Dasar yang di sekolah sebagian besar hanya diajar oleh Guru dengan Honor Komite,

(2) Kesehatan

Sarana Pelayanan kesehatan di Kecamatan Kupitan terdapat 1 Puskesmas, 4 Pustu, 5 Puskesri, dan 23 Posyandu yang tersebar ditiap-tiap nagari dalam Kecamatan Kupitan.

(3) Agama dan adat

Secara umum penduduk Kecamatan Kupitan adalah beragama Islam yang sangat identik dengat adat istiadat masyarakat minang kabau. Sebagaimana slogan masyarakat Sumatera Barat *Adat Basandi Sarak Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*. Dari data tahun 2020 di Kecamatan Kupitan terdapat 8 buah Mesjid, 32 Surau/Mushallah, 33 TPQ/TPSQ.

Adapun jenis pelayanan yang ada pada kantor Camat Kupitan sesuai dengan Tupoksi yang ada terdiri dari Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

1. Pelayanan Perizinan, meliputi :
   a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha perorangandan tidak berbadan hukum;
   b. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan jalan lingkungan dan konstruksi bangunan 1 (satu) lantai atau tidak bertingkat (tidak termasuk kompleks perumahan, industry dan pabrik serta rumah deret);
   c. Pemberian Izin Tempat Usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum.

2. Pelayanan Non Perizinan, Meliputi :

a. Rekomendasi permohonan izin operasional sekolah swasta;
b. rekomendasi usul rencana pendirian sekolah PAUD, SD, Swasta SMP, SMA/SMK dan lembaga non formal lainnya;
c. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha kepada pelaku usaha yang tidak berbadan hukum klinik dan rumah bersalin;
d. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha kepada pelaku usaha yang tidak berbadan hukum toko dan penjualan obat, jamu, ramuan herbal;
e. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha kepada pelaku usaha yang tidak berbadan hukum toko dan penjualan kaca mata dan optikal;
f. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha kepada pelaku usaha yang tidak berbadan hukum depot isi ulang air minum;
g. rekomendasi pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
h. rekomendasi kelengkapan administrasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
i. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha perorangan dan tidak berbadan hukum gedung atau tempat olahraga;
j. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha perorangan dan tidak berbadan hukum pembuatan batu bata, hollowbricks, paving block serta daropan;
k. rekomendasi izin gangguan usaha kepada pelaku usaha yang berbadan hukum;
l. rekomendasi pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berbadan hukum;
m. rekomendasi pembuatan KK (Kartu Keluarga);
n. rekomendasi perubahan KK (Kartu Keluarga);
o. rekomendasi penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
p. rekomendasi akte kelahiran;
q. rekomendasi surat keterangan pindah dan datang;
r. rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi yang disalurkan ke Nagari berupa pil dan kondom;
s. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha perorangan dan tidak berbadan hukum warung internet dan game online;
t. rekomendasi izin pendirian tower;

u. rekomendasi pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di tingkat kecamatan;
v. rekomendasi pemberhentian Wali Nagari/Kepala Desa;
w. rekomendasi pengangkatan Penjabat Wali Nagari/Kepala Desa;
x. rekomendasi pemberhentian anggota BPN/BPD;
y. rekomendasi tentang pemberian dana pembangunan sarana sosial;
z. rekomendasi surat keterangan tidak mampu;
aa. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha perorangan dan tidak berbadan hukum peternakan ayam, itik dan unggas lainnya;
bb. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha perorangan dan tidak berbadan hukum peternakan dan penggemukan sapi, kerbau, kambing dan domba;
cc. rekomendasi pemberian izin gangguan usaha perorangan dan tidak berbadan hukum pemotongan hewan;
dd. rekomendasi izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu dan budidaya jamur;
ee. rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP);

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Camat Kupitan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Kantor Camat Kupitan merupakan salah satu OPD yang berperan dalam pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kantor Camat Kupitan membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada.Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakalaalokasi anggaran untuk Kantor Camat Kupitan sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya.Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk melihat Kantor Camat Kupitan secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2025 Kecamatan Kupitan

Kabupaten Sijunjung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***				**1.910.380.859**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***				**3.955.000.000**	
1	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**	12 bulan	**15.000.000**	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**	12 bulan	**50.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		15.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun		15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun		35.000.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan Administrasi Keuangan**	12 bulan	**1.565.853.581**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan Administrasi Keuangan**	12 bulan	**2.795.000.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Kupitan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	12 bulan	1.550.853.581	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Kupitan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	12 bulan	2.750.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	13 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	13 Dokumen	25.000.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA**		**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA**		**15.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	1 paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	1 paket	15.000.000	

4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**		**127.837.678**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**		**415.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase sarana dan prasaran apartur dengan kondisi baik	1 paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase sarana dan prasaran apartur dengan kondisi baik	1 paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase Bahan Logistik yang disediakan	1 paket	30.337.678,40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase Bahan Logistik yang disediakan	1 paket	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	12 laporan	97.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	12 laporan	350.000.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Presentase Asset Daerah dalam Kondisi Baik**		**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Presentase Asset Daerah dalam Kondisi Baik**		**300.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	4 Unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	4 Unit	100.000.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase terpenuhinya jasa layanan kantor**		**141.689.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase terpenuhinya jasa layanan kantor**		**180.000.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	21.689.600	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	30.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	150.000.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**		**50.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat Kupitan	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**		**200.000.000**	
	Penyedia jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan lainnya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	10 unit	45.000.000	Penyedia jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan lainnya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	10 unit	75.000.000	
	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya		Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya Yang Dipelihara	10 unit	5.000.000	*Pemeliharaan Mesin dan Peralatan* Lainnya		Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya Yang Dipelihara	10 unit	25.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	6 unit	-	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	6 unit	100.000.000	
B	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***		Nilai IKM		**7.500.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***		Nilai IKM		**25.000.000**	

1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kantor Camat Kupitan**	***Presentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP***		**7.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kantor Camat Kupitan**	***Presentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP***		**25.000.000**	
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	7.500.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	25.000.000	
C	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***				**25.000.000**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***				**90.000.000**	
1	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	**Kantor Camat Kupitan**	***Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Yang dikoordinasikan***		**15.000.000**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	**Kantor Camat Kupitan**	***Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Yang dikoordinasikan***		**65.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangaunan Desa	4 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangaunan Desa	4 lembaga kemasyarakatan	20.000.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	45.000.000	
2	***Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan***	Kantor Camat Kupitan	***Presentase lembaga masyarakat yang dibina***		**10.000.000**	***Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan***	Kantor Camat Kupitan	***Presentase lembaga masyarakat yang dibina***		**25.000.000**	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	10.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	25.000.000	
D	***PROGRAM PPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***				-	***PROGRAM PPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***				**265.000.000**	
1	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang sesuai dengan penugasan Kepala Daerah***	Kantor Camat Kupitan	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang sesuai dengan penugasan Kepala Daerah***	Kantor Camat Kupitan	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kantor Camat Kupitan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	20 orang	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kantor Camat Kupitan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	20 orang	250.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 buah	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 buah	15.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**22.500.000**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***				**90.000.000**	
1	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	Kantor Camat Kupitan	***1. Presentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2.presentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar***			***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	Kantor Camat Kupitan	***1. Presentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2.presentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar***			

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelngelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	7.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelngelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 dokumen	7.500.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 dokumen	7.500.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Camat Kupitan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 dokumen	30.000.000	
					1.965.380.859,40					4.245.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2025

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kantor Camat Kupitan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Seiring dengan diberlakukannnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dikabupaten jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memilika Rencana Kerja (Renja) yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pemebangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Kabupaten Sijunjung maka Kantor Camat Kupitan akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sijunjung secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kupitan Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

a. Tujuan Renja

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Kupitan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Kupitan baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Nagari, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Bundo Kanduang, Karang taruna, LPM, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyrakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Kupitan yang sejahtera dan Madani.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a) Jumlah bulan terpenuhinya operasional Administrasi Perkantoran di Kantor Camat Kupitan
b) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa Perkantoran
c) Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
d) Jumlah bulan terpenuhinya Sumber Daya Aparatur.
e) Jumlah laporan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Kecamatan.
f) Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi dan fasilitasi oleh Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
g) Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi dan fasilitasi oleh Seksi Perekonomian dan Pembangunan
h) Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi dan fasilitasi oleh Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kemiskinan
i) Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi dan fasilitasi oleh Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
j) Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi dan fasilitasi oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Untuk Tahun 2025 Program dan Kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan pada Tahun 2021 dan untuk menindak lanjuti Surat Bapak Bupati Sijunjung Nomor 050/65/Bappeda-2020 perihal Pemetaan (Mapping) Program dan Kegiatan dalam Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai dengan klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021, pelaksanaan tersebut dibina dan didampingi oleh Bapppeda Kabupaten Sijunjung, hasi pemetaan tersebut sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kantor Camat Kupitan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Kupitan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Sijunjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	***KECAMATAN***				**1.990.380.859**				**4.420.000.000**
7.01.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***				**1.935.380.859**				**3.940.000.000**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Persentase Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**			**15.000.000**				**45.000.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kecamatan Kupitan	2 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun	Kecamatan Kupitan	30 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		30 Dokumen	40.000.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan Administrasi Keuangan**			**1.565.853.581**				**2.795.000.000**

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	Kecamatan Kupitan	12 bulan	1.550.853.581	Dana Transfer Umum-DAU		12 bulan	2.750.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kecamatan Kupitan	2 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		14 Dokumen	20.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kecamatan Kupitan	13 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		14 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA**			**10.000.000**				**15.000.000**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Kecamatan Kupitan	1 paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		100%	15.000.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**			**150.337.678**				**405.000.000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasaran apartur dengan kondisi baik	Kecamatan Kupitan	1 paket	-	Dana Transfer Umum-DAU		100%	5.000.000
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik yang disediakan	Kecamatan Kupitan	1 paket	30.337.678	Dana Transfer Umum-DAU		100%	50.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Kecamatan Kupitan	12 laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		100%	350.000.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Asset Daerah dalam Kondisi Baik**			**-**				**300.000.000**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kupitan	4 Unit	-	Dana Transfer Umum-DAU		4 Unit	200.000.000
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Kupitan	4 Unit	-	Dana Transfer Umum-DAU		4 Unit	100.000.000

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa layanan kantor**			**141.689.600**				**180.000.000**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kupitan	36 laporan	21.689.600	Dana Transfer Umum-DAU		36 laporan	30.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kupitan	12 laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		100%	150.000.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**			**52.500.000**				**200.000.000**
7.01.01.2.09.01	Penyedia jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kupitan	10 unit	45.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		10 unit	75.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya Yang Dipelihara	Kecamatan Kupitan	10 unit	7.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 unit	25.000.000
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kupitan	6 unit	-	Dana Transfer Umum-DAU		6 unit	100.000.000
7.01.02	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	Nilai IKM			**7.500.000**				**25.000.000**
7.01.02.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***Presentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP***			**7.500.000**				**25.000.000**

7.01.02.2.02.02	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kupitan	5 laporan	7.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		5 laporan	25.000.000
7.01.03	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***				**25.000.000**				**115.000.000**
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Yang dikoordinasikan***			15.000.000				
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangaunan Desa	Kecamatan Kupitan	4 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 lembaga kemasyarakatan	20.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kupitan	6 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		6 Laporan	45.000.000
7.01.03.2.06	***Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan***	***Presentase lembaga masyarakat yang dibina***			**10.000.000**				**25.000.000**
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kupitan	100 keluarga	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 keluarga	25.000.000

7.01.05	***PROGRAM PPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***				**-**				**250.000.000**
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang sesuai dengan penugasan Kepala Daerah***	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***							
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan Kupitan	20 orang	-	Dana Transfer Umum-DAU		20 orang	250.000.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kupitan	10 buah	-	Dana Transfer Umum-DAU		10 buah	15.000.000
7.01.06	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***				**22.500.000**				**90.000.000**
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***1. Presentase administrasi keuangan nagari/desa sesuai standar 2.presentase administrasi pemerintahan nagari/desa sesuai standar***							
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelngelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kupitan	12 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 dokumen	30.000.000

7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Kupitan	12 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 dokumen	30.000.000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Kupitan	12 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 dokumen	30.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KANTOR CAMAT KUPITAN

Sebagai suatu keharusan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atas landasan Peraturan tersebut Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung agar melaksanakan penginputan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi tersebut dibangun oleh Kemendagri dengan alamat web ***https://sipd.kemendagri.go.id***.

Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID), Perangkat Daerah didampingi oleh admin dari Bapppeda kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Admin Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, setiap operator dari masing-masing Perangkat Daerah diberikan Username Perangkat Daerah, yang mana kegiatan ini dimulai pada tanggal 16 Juli 2020.

Dalam penginputan Renja ini Perangkat Daerah harus mempedomani RPJMD 2021-2026 dan hasil Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-9889 Tahun 2021, maka dapat kita lihat Rencana Kerja Kecamatan Kupitan adalah sebagai berikut :

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Camat Kupitan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Kupitan Tahun 2025
Kabupaten Sijunjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01	***KECAMATAN***				**2.016.954.694**	
7.01.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***				**1.966.314.694**	
7.01.01.2.01	***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Persentase Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**			**13.537.500**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kecamatan Kupitan	2 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang disusun	Kecamatan Kupitan	10 Dokumen	13.537.500	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan Administrasi Keuangan**			**1.677.923.381**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	Kecamatan Kupitan	12 bulan	1.669.023.381	Dana Transfer Umum-DAU

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kecamatan Kupitan	13 Dokumen	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kecamatan Kupitan	13 Dokumen	1.900.000	Dana Transfer Umum-DAU
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA**			**9.000.000**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Kecamatan Kupitan	100%	9.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**			**123.037.273**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasaran apartur dengan kondisi baik	Kecamatan Kupitan	100%	400.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasaran apartur dengan kondisi baik	Kecamatan Kupitan	100%	-	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kecamatan Kupitan	100%	23.556.850	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Kecamatan Kupitan	100%	99.080.423	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**			**108.456.540**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Kecamatan Kupitan	100%	20.466.540	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Kecamatan Kupitan	100%	87.990.000	Dana Transfer Umum-DAU

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum**			**34.360.000**	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kecamatan Kupitan	100%	-	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.09.01	Penyedia jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kecamatan Kupitan	100%	29.500.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mesin dan peralatan lainnya	jumlah Mesin dan peralatan lainnya yang dipelihara	Kecamatan Kupitan	100%	4.860.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.02	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***				**9.160.000**	
7.01.02.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***Jumlah Bulan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***			**9.160.000**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Kupitan	12 bulan	9.160.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.03	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***				**7.000.000**	
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***				
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan Musrenbang	Kecamatan Kupitan	1 dokumen	17.563.200	Dana Transfer Umum-DAU

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Kupitan	12 bulan	5.975.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.03.2.06	***Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan***	***Presentase lembaga masyarakat yang dibina***	Kecamatan Kupitan	13 bulan	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kupitan	14 bulan	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.05	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***				**-**	
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Bulan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***				
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Kupitan	12 bulan	-	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kupitan	12 bulan	-	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.06	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***				**25.320.000**	

7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***				
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kupitan	12 bulan	9.160.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasi		Kecamatan Kupitan	12 bulan	9.160.000	Dana Transfer Umum-DAU
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kecamatan Kupitan	12 bulan	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU

BAB V
P E N U T U P

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kupitan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Kupitan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Kupitan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kupitan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Kupitan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Padang Sibusuk, Agustus 2025

CAMAT KUPITAN

RENCANA KERJA
PERUBAHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIJUNJUNG

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dalam Penyusunan Rencana Kerja PerubahanPerangkat Daerah Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung telah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah.

Rencana Kerja PerubahanTahun 2025 memuat Visi dan Misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahantahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah serta program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun yang akan datang. Implementasi program-program usulan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung mempunyai kredibilitas nilai yang bersifat terstruktur melalui kerangka acuan manajerial aparatur tentang arah pembangunan kedepan.

Arah pembangunan ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Perubahanperiode 1 (satu) tahun ke depan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lebih kongkrit.

Harapan kami, Rencana Kerja Perubahanini dapat di jadikan acuan untuk program, kegiatan dan sub. kegiatan tahun depan. Mudah-mudahan dengan di susunnya Rencana Kerja Perubahanini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi lebih baik di masa mendatang.

Muaro Sijunjung, Mei 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Muhadiris, S.P, M.E
Pembina Tk. I
NIP. 19770122 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	4
	1.3.	Maksud dan Tujuan	5
	1.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		8
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
	2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		34
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
	3.3.	Program dan Kegiatan	37
BAB IV	**RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		47
BAB V	**PENUTUP**		53
LAMPIRAN			

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib Menyusun Rencana Pembangunan Daerah baik yang bersifat jangka Panjang 20 tahunan (RPJPD) jangka menengah 5 tahunan (RPJMD) maupun yang bersifat pendek 1 tahunan yang disebut Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Dengan Memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025, sehingga dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja Perubahan akan memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub. kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub. kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Rencana Kerja Perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rencana Kerja Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perubahan juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten tahun 2001-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2021-2026.

Mengingat begitu pentingnya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten dipandang perlu untuk

menyusunnya sebagai pedoman dan tolak ukur dalam penjabaran rencana serta target kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam program, kegiatan dan sub. Kegiatan serta sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Pelaksanaan program, kegiatan dam sub. Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2025 mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten .

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten , antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub. kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2025 adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program, kegiatan dan sub. kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten .

2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program, kegiatan dan sub. kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Sebagai bahan evaluasi program, kegiatan dan sub. kegiatan tahun mendatang

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tahun 2025 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
b. Tujuan yang dikehendaki.
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja utama tahun 2023 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2025.
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran 2023 mencapai 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.22.403.211.829,00 (64,31%) dari total pagu anggaran Rp.34.834.614.689,00 yang terdiri dari 3 program dengan 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Berikut adalah Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM di tahun 2023 serta rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 menurut indikator program dapat dilihat dalam tabel T-C.29 dan tabel T-C 30 sebagai berikut:

Tabel TC-29

Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1. Indeks Sistem Merit	57	88,75	155,70
		2. Indeks Profesionalitas ASN	60	83,18	138,58
Capaian Sasaran -1					147,14
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	73	77	102,66
Capaian Sasaran -2					102,66

Dari tabel T-C 29 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama. Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah di targetkan. Berikut diuraikan mengenai capaian kinerja sasaran strategis dan indikatornya.

1. Indeks Sistem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nilai Sistem Merit adalah angka komulatif hasil penilaian dari kriteria penilaian sistem merit yang meliputi : Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Pendukung, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem merit di instansi. Pengukuran indeks sistem merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk memastikan jabatan birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang professional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN tanpa membedakan latar belakang politik. Berdasarkan Tabel T-C 29 diatas bahwa pelaksanaan indeks sistem merit pada BKPSDM mencapai target yang telah ditetapkan. Indeks Sistem Merit dengan target kinerja 280 dengan terrealisasi 350 dengan demikian tingkat capaian kinerja sebesar 155,70 %. Indikator Kinerja Utama ini belum tercapai 100% karena ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dari 8 Aspek penilaian Sistem Merit khususnya di aspek Pengembangan Karir di bawah ini yaitu :

a) Belum tersedianya Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
b) Belum tersedianya rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi.
c) Belum terpenuhinya kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan

organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal.

2. Indeks Profesionalitas ASN

   Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Dalam Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN diperlukan pengukuran terhadap Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang bertujuan untuk mengukur statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dapat dilihat dari tabel T-C 29 diatas bahwa pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN BKPSDM telah berjalan dengan sangat baik dengan capaian penilaian yang di atas rata-rata serta realisasi pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan target yg telah dibuat. Apabila pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada suatu instansi tidak memperhatikan dimensi kompetensi, maka akan menghasilkan suatu dimensi kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan serta dapat berpengaruh juga terhadap dimensi kualifikasi dan dimensi disiplin.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.

   Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kemudian agar mengetahui nilai dari SAKIP tersebut dibutuhkanlah suatu tahapan atau proses evaluasinya yang diturunkan dari peraturan presiden tersebut pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang secara khusus bertujuan:

a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d) Memberi saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi dari Tabel T-C 29 diatas pencapaian target indikator kinerja utama pengukuran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) BKPSDM meskipun belum maksimal namun sudah termasuk dalam kategori sangat baik dalam pelaksanaannya guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi bupati dan wakit bupati terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi Belum dapat mencapai nilai SAKIP seperti harapan karena berdasarkan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yaitu :

1) Melengkapi informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
2) Menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam mengumpulkan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;

3) Mendokumentasikan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional serta penyesuaian (refocussing) oraganisasi, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
4) Melengkapi dokumen laporan kinerja dengan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
5) Mendokumentasikan pemanfaatan atas informasi laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan perubahan budaya kinerja organisasi;
6) Mendokumentasikan pembahasan (dialog kinerja) mengenai kepedulian seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja; dan
7) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja.

Tabel T-C 30

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIJUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
S	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03	Kepegawaian									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							
5.03.01.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%							
5.03.01.2.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	- Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	7 Dokumen	233 %
5.03.01.2.01.06	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200 %
5.03.01.2.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%							
5.03.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangannya	750 Orang	459 Orang	949 Orang	975 Orang	103%	1.105 Orang	2.539 Orang	339 %
5.03.01.2.02.05	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	3 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	67 %
5.03.01.2.02.07	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	48 Laporan	- Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	26 Laporan	54 %
5.03.01.2.05	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%							

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.05.02	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	76 Paket	83 Paket	78 Paket	94%	85 Paket	239 Paket	159 %
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	12 Orang	- Orang	3 Orang	- Orang	0%	4 Orang	4 Orang	33 %
5.03.01.2.06	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							
5.03.01.2.06.02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	400 %
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100 %
5.03.01.2.06.05	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	133 %
5.03.01.2.06.06	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	824 Dokumen	410 Dokumen	408 Dokumen	206 Dokumen	50%	425 Dokumen	1.041 Dokumen	126 %
5.03.01.2.06.09	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15 Laporan	10 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	16 Paket	107 %
5.03.01.2.07	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%							
5.03.01.2.07.06	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	5 Unit	22 Unit	20 Unit	91%	32 Unit	57 Unit	190 %
5.03.01.2.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%							
5.03.01.2.08.01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100 %
5.03.01.2.08.02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100 %
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	125 %
5.03.01.2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%							

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	14 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	15 Unit	39 Unit	65 %
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan	50%							
		Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan	75%							
		Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan	70%							
		Persentase ASN yang Meningkat Indeks Profesionalitasnya	5%							
5.03.02.2.01	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	65%							
		Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan ASN	70%							
		Nilai Aspek pengadaan ASN	65%							
		Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	70%							
5.03.02.2.01.02	a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	300 %
5.03.02.2.01.06	b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	703 Dokumen	786 Dokumen	200 Dokumen	272 Dokumen	136%	155 Dokumen	1.213 Dokumen	173 %
5.03.02.2.01.11	e. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen	2 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	30 Dokumen	188 %
5.03.02.2.02	2. Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek promosi dan mutasi ASN	75%							
5.03.02.2.02.01	a. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil	2.000 Dokumen	1.492 Dokumen	500 Dokumen	483 Dokumen	97%	600 Dokumen	2.575 Dokumen	129 %
5.03.02.2.02.02	b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2.250 Dokumen	1.211 Dokumen	650 Dokumen	632 Dokumen	97%	750 Dokumen	2.593 Dokumen	115 %
5.03.02.2.02.03	c. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	950 Dokumen	390 Dokumen	350 Dokumen	194 Dokumen	55%	400 Dokumen	984 Dokumen	104 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03	3. Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan Karier	50%							
		Persentase ASN yang meningkatkan jenjang	4%							
		Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi	5%							
5.03.02.2.03.01	a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	36 Orang	115 Orang	115 Orang	100%	35 Orang	186 Orang	465 %
5.03.02.2.03.04	b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	155 Orang	125 Orang	35 Orang	57 Orang	163%	55 Orang	237 Orang	153 %
5.03.02.2.03.05	c. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi	55 Orang	- Orang	1.300 Orang	1.535 Orang	118%	350 Orang	1.885 Orang	3.427 %
5.03.02.2.04	4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen kinerja ASN	60%							
		Nilai Aspek Penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN	60%							
		Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	90%							
		Persentase penurunan ASN yang melakukan pelanggaran	50%							
5.03.02.2.04.04	a. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450 Orang	253 Orang	100 Orang	244 Orang	244%	150 Orang	647 Orang	144 %
5.03.02.2.04.07	b. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	225 Orang	145 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	345 Orang	153 %
5.03.02.2.04.08	c. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Penyelesaian	21 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	22 Kasus	105 %
5.04	Pendidikan dan Pelatihan									
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat indeks profesionalitasnya	3%							
5.04.02.2.02	1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi manajerial dan fungsional	2%							
5.04.02.2.02.07	a. Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	7 Laporan	3 Orang	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	129 %

Dari tabel TC. 30 dapat dijelaskan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 belum bisa dilakukan evaluasi realisasi program/kegiatan/sub kegiatan karena Tahun 2024 merupakan tahun berjalan Renja yang mana capaian realisasi belum dapat diukur. Dalam hal ini hanya dapat melakukan perbandingan antara target Renstra dan target renja Tahun 2023, yakni antara lain :

1. Target program/kegiatan/sub kegiatan dalam renja yang tidak memenuhi target Renstra dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.
2. Target program/kegiatan/sub kegiatan dalam renja hampir sebagain besar memenuhi target renstra.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan. Sehingga masih dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun pemerataan penempatan pegawai.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan adalah untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2024 untuk diadakan kembali program/kegiatan yang tidak terealisasi di Tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk

menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 17 Tahun 2022, merupakan salah satu fungsi penunjang dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sijunjung melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah Daerah, fungsi penunjang dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan.
2. Penyelenggaraan administrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah.
3. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanaan fungsi penunjang dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah yaitu memberi petunjuk, membina, membimbing, mengkoordinir dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan lembaga teknis.

2. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkup BKPSDM yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan urusan umum, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan Pelayanan urusan perencanaan dan Keuangan dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. **Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pensiun**

Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Pengadaan, Mutasi dan Pensiun.

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang pengadaan, Mutasi dan Pensiun mempunyai fungsi : Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan tugas, pengaturan program dan pelaksanaan serta evaluasi program dan kegiatan yang meliputi Pengadaan, Mutasi dan Pensiun.

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengadaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan Pengadaan.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Mutasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan mutasi.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pensiun mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan administrasi pensiun dan status kepegawaian sesuai urusan yang menjadi kewenangan sub substansi Pensiun.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut: Penyusunan Bahan kebijakan, penyelenggaraan, pengaturan dan evaluasi dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas merencanakan kegiatan serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan kegiatan sub substansi pendidikan dan latihan.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan mempuyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan , mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan serta pelaksanaan administrasi pembinaan aparatur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sub substansi Pembinaan.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

memgumpulkan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan, melakukan konsultasi dan koordinasi serta melaksanakan dan mengontrol kegiatan sub substansi Pengembangan dan pendataan.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

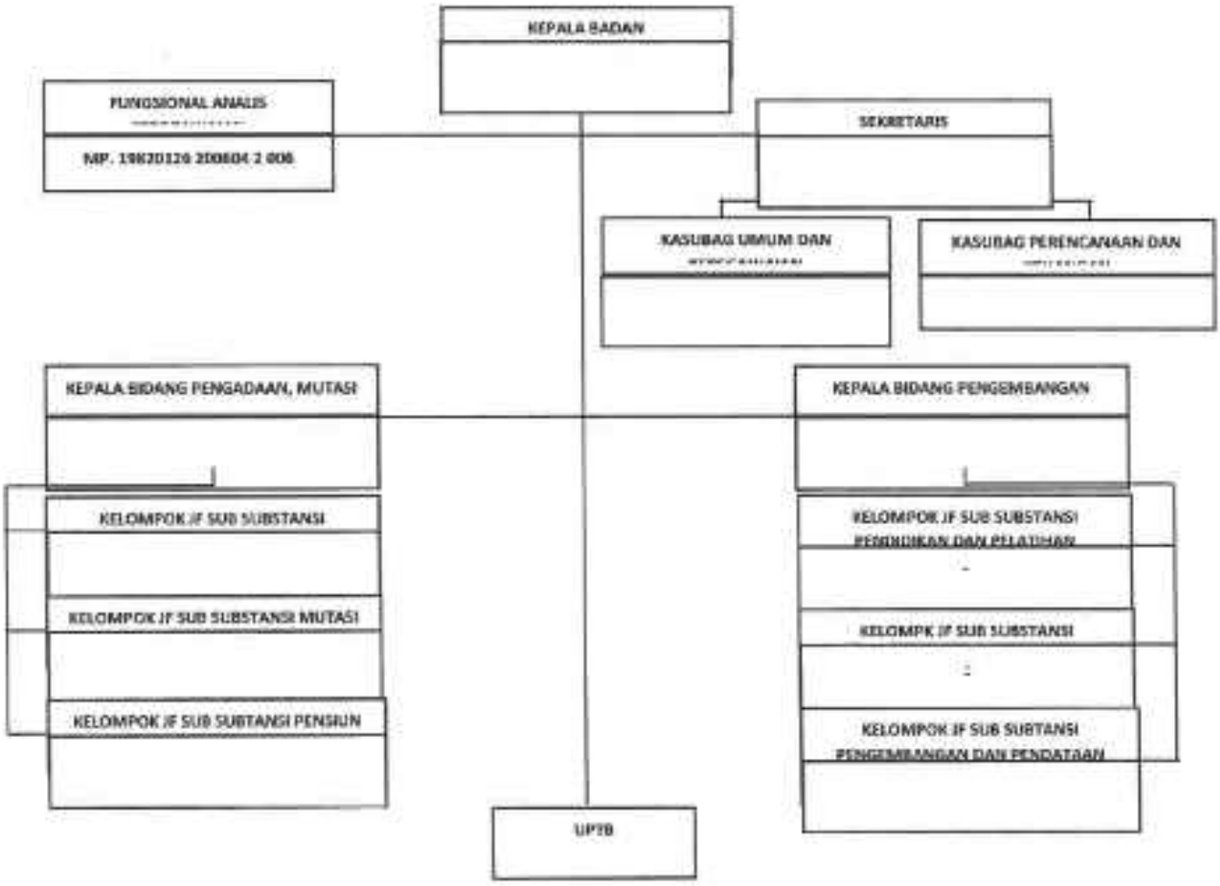

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut di atas maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 adalah sebagaiberikut:

Tabel T-C 31

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIJUNJUNG

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)										
1	Indeks Sistem Merit			N/A	N/A	280	352			350			
2	Indeks Profesionalitas ASN					60				83,18			
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja					73	77,02			77			

2.3. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Ranwal Renja) BKPSDM Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN;
2. Pemenuhan formasi kebutuhan ASN melalui pengadaan CPNS dan PPPK;
3. Peningkatan kompetensi ASN melalui penyelengaraan Diklat/Bimtek/Workshop dan lain-lain;
4. Tuntutan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Pelaksanaan Sistem Merit dan Manajemen Talenta

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD dan kondisi eksisting untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan maka dalam menindaklajuti isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi aparatur harus terus dilanjutkan demi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Sijunjung. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan seperti pemberian bantuan pendidikan dan tugas belajar serta Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan. Diklat penunjang tugas dan fungsi aparatur perlu dianggarkan kembali dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja;

3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
4. Perlunya pengembangan kompetensi jabatan fungsional khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada formasi teknis;
5. Khusus untuk pengembangan kompetensi manajerial perlu dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) bagi pejabat pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi. Khusus untuk pengganggaran pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk diklatpim perlu diprioritaskan karena dapat berdampak terhadap Indeks Profesionalitas ASN dan capaian visi dan misi kepala daerah;
6. Pengadaan fasilitas *Computer Assisted Test* (CAT) perlu diprioritaskan dalam usulan kegiatan tahun 2025 dalam rangka mendukung pengadaan Seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pendukung terlaksananya kegiatan lainnya seperti ujian sertifikasi dan diklat bagi aparatur;
7. Pelaksanaan seleksi terbuka bagi setiap tingkatan jabatan secara transparan, adil, dan bebas intervensi perlu untuk dilakukan guna mewujudkan pejabat yang berkompetensi.

Selain isu-isu penting yang telah diuraikan diatas Agenda kegiatan tahun 2025 yang diupayakan lebih optimal adalah pelaksanaan inovasi daerah, dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan inovatif yang bersifat holistic-tematik, integratif dan spasial untuk diintegrasikan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Sijunjung membuat suatu inovasi terkait manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Aparatur dimana aplikasi ini merupakan Replika Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, ini merupakan Implementasi dari Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik khususnya dalam Manajemen ASN di Kabupaten Sijunjung.

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah, sebagai wujud dalam pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) BKPSDM melaksanakan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui pengintegrasian perspektif gender pada setiap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

2.4. Review penting terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan Tahun 2025, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C 32

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**21.402.500.000**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**21.402.500.000**	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**21.402.500.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**21.402.500.000**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**18.352.500.000**	**KEPEGAWAIAN**				**18.352.500.000**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**17.127.500.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**17.127.500.000**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Presentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat**	**100%**	**25.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Presentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat**	**100%**	**25.000.000**	
5.03.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokume	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokume	15.000.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 Laporan	10.000.000	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjun**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**100%**	**16.474.300.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjun**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**100%**	**16.474.300.000**	
5.03.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangannya	600 Orang	16.446.800.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangannya	600 Orang	16.446.800.000	
5.03.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	7.500.000	
5.03.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	13 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	13 Laporan	20.000.000	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjun**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**70.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjun**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**70.000.000**	
5.03.01.2.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	50.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	20.000.000	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**232.700.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**232.700.000**	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muaro Sijunjung	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	7.500.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muaro Sijunjung	Jumlah logistik kantor yang disediakan	1 Paket	70.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muaro Sijunjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	425 Dokumen	3.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	425 Dokumen	3.200.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	130.000.000	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**75.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**75.000.000**	
5.03.01.2.07.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muaro Sijunjung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muaro Sijunjung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	75.000.000	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100.500.000**	
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	80.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**100%**	**150.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**100%**	**150.000.000**	
5.03.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Muaro Sijunjung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Muaro Sijunjung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.000.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	70.000.000	
5.03.01.2.09.03	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	
5.03.01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muaro Sijunjung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muaro Sijunjung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Pendidikan dan Pelatihan**	**60%**	**1.225.000.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Pendidikan dan Pelatihan**	**60%**	**1.225.000.000**	
			Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Manajemen Kinerja dan Sistem Informasi Kepegawaian	**78%**				**Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Manajemen Kinerja dan Sistem Informasi Kepegawaian**	**78%**		
			Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Kepegawaian	**74%**				**Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Kepegawaian**	**74%**		
			Persentase ASN yang Meningkat Indeks Profesionalitasnya	**5%**				**Persentase ASN yang Meningkat Indeks Profesionalitasnya**	**5%**		
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Muaro Sijunjung**	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN**	**69%**	**260.000.000**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Muaro Sijunjung**	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN**	**69%**	**260.000.000**	
			Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan ASN	**74%**				**Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan ASN**	**74%**		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Nilai Aspek pengadaan ASN	**69%**				**Nilai Aspek pengadaan ASN**	**69%**		
			Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	**74%**				**Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian**	**74%**		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	5 Dokumen	115.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	5 Dokumen	115.000.000	
5.03.02.2.01.03	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15 Dokumen	20.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	15 Dokumen	20.000.000	
5.03.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	155 Dokume	60.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	155 Dokume	60.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi	2 Dokume	30.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Muaro Sijunjung	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	2 Dokume	30.000.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	14 Dokume	35.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	14 Dokume	35.000.000	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Muaro Sijunjung**	**Nilai Aspek promosi dan mutasi ASN**	**79%**	**370.000.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Muaro Sijunjung**	**Nilai Aspek promosi dan mutasi ASN**	**79%**	**370.000.000**	
5.03.02.2.02.0	Pengelolaan Mutasi ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	600 Dokume	150.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	600 Dokume	150.000.000	
5.03.02.2.02.05	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750 Dokume	150.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750 Dokume	150.000.000	
5.03.02.2.02.0	Pengelolaan Promosi ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 Dokume	70.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 Dokume	70.000.000	
5.03.02.2.03	**Pengmbangan Kompetensi ASN**	**Muaro Sijunjung**	**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**84%**	**395.000.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Muaro Sijunjung**	**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**84%**	**395.000.000**	
			Persentase ASN yang meningkatkan jenjang pendidikannya	**4%**				**Persentase ASN yang meningkatkan jenjang pendidikannya**	**4%**		
			Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi	**5%**				**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi**	**5%**		
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	75.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan	55 Orang	70.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan	55 Orang	70.000.000	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	350 Orang	250.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi jabatan	350 Orang	250.000.000	

5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Muaro Sijunjun**	**Nilai Aspek manajemen kinerja ASN**	**64%**	**200.000.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Muaro Sijunjun**	**Nilai Aspek manajemen kinerja ASN**	**64%**	**200.000.000**	
			Nilai Aspek Penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN	**64%**				**Nilai Aspek Penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN**	**64%**		
			Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	**94%**				**Persentase ASN yang memiliki kinerja baik**	**94%**		
			Persentase penurunan ASN yang melakukan pelanggaran	**54%**				**Persentase penurunan ASN yang melakukan pelanggaran**	**54%**		
5.03.02.2.04.04	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	200 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Muaro Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	200 Dokumen	40.000.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	40.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	40.000.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	60.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	60.000.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Penyelesaian	5 Laporan	60.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Muaro Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Penyelesaian	5 Laporan	60.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**3.050.000.000**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**3.050.000.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ASN yang meningkat indeks profesionalitasnya**	**5%**	**3.050.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ASN yang meningkat indeks profesionalitasnya**	**5%**	**3.050.000.000**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi teknis**	**10%**	**450.000.000**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi teknis**	**10%**	**450.000.000**	
5.04.02.2.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	450.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	450.000.000	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi manajerial dan fungsional**	**2%**	**2.600.000.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Muaro Sijunjung**	**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi manajerial dan fungsional**	**2%**	**2.600.000.000**	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Muaro Sijunjung	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	200 Orang	2.600.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Muaro Sijunjung	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	200 Orang	2.600.000.000	
					21.402.500.000					**21.402.500.000**	

2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung merupakan program dan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2025 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung tahun 2025. Untuk lebih jelasnya mengenai Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terhadap Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sijunjung

No	Urusan/Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Sijunjung tahun 2025. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Transformasi Tata Kelola adalah merupakan salah satu dari Lima Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana Transformasi Tata Kelola itu sendiri mempunyai definisi kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Dalam Konsep Rancangan Teknoratik RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) terkait Agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola yaitu :

1. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, trasformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun, serta pemberantasan korupsi
2. Penguatan integritas partai politik

Tabel 3.1
Agenda Pembangunan (Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029)
dan Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Tahun 2025

No.	Agenda Pembangunan (Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029)	Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Sijunjung Tahun 2025
1	Transformasi Tata Kelola "Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil"	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

3.2. Tema Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung dalam RKPD Tahun 2025

Tema Pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 yaitu "Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat di Segala Bidang yang Berkarakter dan Inklusif".

Visi, Misi Kabupaten Sijunjung 2021-2026 adalah

" Terwujudnya Nagari Madani Yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sijunjung 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi dan Sejahtera.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Kuat, Cerdas dan Berakhlak Mulia.
3. Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkwalitas dan Merata.
4. Mewujudkan Pemerintah Yang Bekerja dan Melayani.
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.
6. Melakukan Revitalisasi Adat dan Budaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

3.3. Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 terkait dalam Misi : **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Responsif Berbasis Reformasi Birokrasi"** pada tujuan **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** dengan sasaran yang ke-1 yaitu **Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Profesional.**

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah didasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tahun 2021-2026. Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah : Meningkatkan Profesional ASN dengan Indikator Indeks Profesionalitas ASN sedangkan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN dengan Indikator
   a. Indeks Sistem Merit
   b. Indeks Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Profesional ASN	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	354
			Indeks Profesionalitas ASN	83,22

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	77,05

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung masuk pada kewenangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. P dengan kegiatan :

   1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah.

      1.1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      1.1.2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

      1.2.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.2.3. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan SKPD.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .

1.3.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

1.3.2. Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

1.3.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.3.4. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.3.5. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

1.3.6. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

1.3.7. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.8. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

1.3.9. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD.

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.4.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1.5.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

1.5.3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan.

1.6.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan.

1.6.3. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

1.6.4. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.6.5. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah,

Program Kepegawaian daerah adalah merupakan program melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kabupaten Sijunjung melalui kegiatan :

2.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

2.1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

2.1.2. Sub. Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN.

2.1.3. Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.

2.1.4. Sub. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

2.1.5. Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian.

2.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

2.2.1. Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

2.2.2. Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

2.2.3. Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

2.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

2.3.1. Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

2.3.2. Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

2.3.3. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

2.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.1. Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

2.4.2. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

2.4.3. Sub. Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Reformasi birokrasi pada pemerintahan pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor pemerintahan pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi yang propesional. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kabupaten Sijunjung dengan kegiatan :

3.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

3.2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

3.2.1. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan merupakan startegi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten merencanakan 3 (Tiga) program, 13 kegiatan dan dijabarkan menjadi 38 sub. kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten serta kegiatan lain dilakasanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten . Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 terlampir

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN**						**5.822.054.680**	**49.517.587.757**	**43.695.533.125**
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA						**5.822.054.680**	**49.517.587.757**	**43.695.533.125**
5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.347.533.312**	**49.245.429.721**	**43.897.896.457**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupten/kota**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**3.759.103.424**	**48.314.798.883**	**44.555.695.507**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**25.000.000**	-	**(25.000.000)**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaro Sijunung	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	(15.000.000)
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar	Muaro Sijunung	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	(10.000.000)
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**3.130.127.574**	**48.053.111.533**	**44.922.983.959**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muaro Sijunung	600 Orang	2143 Orang	1543 Orang	3.102.627.574	48.048.180.333	44.945.552.759
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Muaro Sijunung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	7.500.000	4.931.200	(2.568.800)
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan	Muaro Sijunjung	13 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	(20.000.000)
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**60.000.000**	-	**(60.000.000)**
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Muaro Sijunjung	85 Paket	0 Paket	(85) Paket	50.000.000	-	(50.000.000)
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Luar Daerah	3 Orang	0 Orang	(3) Orang	10.000.000	-	(10.000.000)
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**185.200.000**	**42.411.500**	**(142.788.452)**
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1 Paket	0 Paket	12.000.000	3.515.500	(8.484.500)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1 Paket	0 Paket	50.000.000	8.429.350	(41.570.650)
5.03.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1 Paket	0 Paket	10.000.000	2.678.600	(7.321.400)
5.03.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Muaro Sijunjung	408 Dokumen	425 Dokumen	0 Dokumen	3.200.000	1.440.000	(1.760.000)
5.03.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	110.000.000	26.348.050	(83.651.950)
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**125.000.000**	-	**(125.000.000)**
5.03.01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muaro Sijunjung	50 Unit	0 Unit	(50) Unit	125.000.000	-	(125.000.000)
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**125.589.000**	**111.089.000**	**(14.500.000)**
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	2.000.000	2.000.000	-
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	18.000.000	18.000.000	-
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Muaro Sijunjung	2 Laporan	1 Laporan	(1) Laporan	105.589.000	91.089.000	(14.500.000)
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**108.186.850**	**108.186.850**	-
5.03.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Muaro Sijunjung	1 Unit	1 Unit	0 Unit	30.336.850	30.336.850	-
5.03.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muaro Sijunjung	18 Unit	18 Unit	0 Unit	67.500.000	67.500.000	-
5.03.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muaro Sijunjung	10 Unit	10 Unit	0 Unit	10.350.000	10.350.000	-
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Pendidikan dan**	**Muaro Sijunjung**	**55%**	**55%**	**0%**	**1.588.429.888**	**930.630.838**	**(657.799.050)**
		Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Manajemen Kinerja dan Sistem Informasi	**Muaro Sijunjung**	**77%**	**77%**	**0%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Kepegawaian	**Muaro Sijunjung**	**72%**	**72%**	**0%**			
		Persentase ASN yang Meningkat Indeks Profesionalitasnya	**Muaro Sijunjung**	**5%**	**5%**	**0%**			
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN**	**Muaro Sijunjung**	**67%**	**67%**	**0%**	**272.731.125**	**265.913.125**	**(6.818.000)**
		Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan ASN	**Muaro Sijunjung**	**72%**	**72%**	**0%**			
		Nilai Aspek pengadaan ASN	**Muaro Sijunjung**	**67%**	**67%**	**0%**			
		Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	**Muaro Sijunjung**	**72%**	**72%**	**0%**			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Muaro Sijunjung	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	165.230.250	165.230.250	-
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Muaro Sijunjung	155 Dokumen	155 Dokumen	0 Dokumen	48.116.200	41.298.200	(6.818.000)
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Muaro Sijunjung	14 Dokumen	14 Dokumen	0 Dokumen	59.384.675	59.384.675	-
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Nilai Aspek promosi dan mutasi ASN**	**Muaro Sijunjung**	**77%**	**77%**	**0%**	**228.735.850**	**171.235.950**	**(57.499.900)**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	Muaro Sijunjung	600 Dokumen	600 Dokumen	0 Dokumen	107.863.600	82.251.100	(25.612.500)
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Muaro Sijunjung	750 Dokumen	750 Dokumen	0 Dokumen	95.260.900	65.108.500	(30.152.400)
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Muaro Sijunjung	200 Dokumen	200 Dokumen	0 Dokumen	25.611.350	23.876.350	(1.735.000)
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**Muaro Sijunjung**	**52%**	**52%**	**0%**	**886.337.738**	**327.912.838**	**(558.424.900)**
		Persentase ASN yang meningkatkan jenjang pendidikannya	**Muaro Sijunjung**	**4%**	**4%**	**0%**			
		Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi	**Muaro Sijunjung**	**5%**	**5%**	**0%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.03.0	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Muaro Sijunjung	441 Orang	441 Orang	0 Orang	616.930.388	197.950.388	(418.980.000)
5.03.02.2.03.0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Muaro Sijunjung	55 Orang	55 Orang	0 Orang	67.326.400	67.326.400	-
5.03.02.2.03.0	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Muaro Sijunjung	500 Orang	28 Orang	(472) Orang	202.080.950	62.636.050	(139.444.900)
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nilai Aspek manajemen kinerja ASN**	**Muaro Sijunjung**	**62%**	**62%**	**0%**	**200.625.175**	**165.568.925**	**(35.056.250)**
		Nilai Aspek Penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN	**Muaro Sijunjung**	**62%**	**62%**	**0%**			
		Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	**Muaro Sijunjung**	**92%**	**92%**	**0%**			
		Persentase penurunan ASN yang melakukan pelanggaran	**Muaro Sijunjung**	**52%**	**52%**	**0%**			
5.03.02.2.04.0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Muaro Sijunjung	150 Orang	150 Orang	0 Orang	35.551.575	20.978.575	(14.573.000)
5.03.02.2.04.0	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Muaro Sijunjung	75 Orang	75 Orang	0 Orang	87.046.900	85.126.900	(1.920.000)
5.03.02.2.04.0	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Muaro Sijunjung	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	78.026.700	59.463.450	(18.563.250)
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**474.521.368**	**272.158.036**	**(202.363.332)**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**persentase ASN yang meningkat indeks profesionalitasnya**	**Muaro Sijunjung**	**5%**	**5%**	**0%**	**474.521.368**	**272.158.036**	**(202.363.332)**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi teknis**	**Muaro Sijunjung**				-	-	-
5.04.02.2.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Muaro Sijunjung	0	0	0	0	0	-
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Muaro Sijunjung**	**2%**	**2%**	**0%**	**474.521.368**	**272.158.036**	**(202.363.332)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Muaro Sijunjung	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	474.521.368	272.158.036	(202.363.332)
							5.822.054.680	**49.517.587.757**	**43.695.533.125**

Muaro Sijunjung, Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIJUNJUNG

MUHARRIS, S.P, M.E
Pembina Tk.I
NIP. 19700122 200212 1 001

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan perakngkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah serta rencana serta target/sasaran kinerja prioritas tahun berjalan beserta program dan kegiatan indikatifnya, maka Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Rensta Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus didasari pada evaluasi renja tahun lalu dan tahun berjalan agar rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja merupakan optimalisasi pencapaian sasaran renstra perangkat daerah.

Pendanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten murni berasal dari APBD dan tidak ada ketergantungan dengan kementerian dan lembaga (K/L) atau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena program dan kegiatan yang dilaksnakan berkaitan dengan pegawai dan tidak ada keterkaitan dengan pemangku kegiatan atau kelompok masyarakat terkait.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN**						**5.822.054.680**	**49.517.587.757**	**43.695.533.125**
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA						**5.822.054.680**	**49.517.587.757**	**43.695.533.125**
5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.347.533.312**	**49.245.429.721**	**43.897.896.457**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupten/kota**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**3.759.103.424**	**48.314.798.883**	**44.555.695.507**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**25.000.000**	-	**(25.000.000)**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaro Sijunjung	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	(15.000.000)
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar	Muaro Sijunung	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	(10.000.000)
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**3.130.127.574**	**48.053.111.533**	**44.922.983.959**
5.03.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muaro Sijunung	600 Orang	2143 Orang	1543 Orang	3.102.627.574	48.048.180.333	44.945.552.759
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Muaro Sijunung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	7.500.000	4.931.200	(2.568.800)
5.03.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan	Muaro Sijunjung	13 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	(20.000.000)
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**60.000.000**	**-**	**(60.000.000)**
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Muaro Sijunjung	85 Paket	0 Paket	(85) Paket	50.000.000	-	(50.000.000)
5.03.01.2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Luar Daerah	3 Orang	0 Orang	(3) Orang	10.000.000	-	(10.000.000)
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**185.200.000**	**42.411.500**	**(142.788.452)**
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1 Paket	0 Paket	12.000.000	3.515.500	(8.484.500)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1 Paket	0 Paket	50.000.000	8.429.350	(41.570.650)
5.03.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1 Paket	0 Paket	10.000.000	2.678.600	(7.321.400)
5.03.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Muaro Sijunjung	408 Dokumen	425 Dokumen	0 Dokumen	3.200.000	1.440.000	(1.760.000)
5.03.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	110.000.000	26.348.050	(83.651.950)
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**125.000.000**	-	**(125.000.000)**
5.03.01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muaro Sijunjung	50 Unit	0 Unit	(50) Unit	125.000.000	-	(125.000.000)
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**125.589.000**	**111.089.000**	**(14.500.000)**
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	2.000.000	2.000.000	-
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	18.000.000	18.000.000	-
5.03.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Muaro Sijunjung	2 Laporan	1 Laporan	(1) Laporan	105.589.000	91.089.000	(14.500.000)
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**Muaro Sijunjung**	**100%**	**100%**	**0%**	**108.186.850**	**108.186.850**	-
5.03.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Muaro Sijunjung	1 Unit	1 Unit	0 Unit	30.336.850	30.336.850	-
5.03.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muaro Sijunjung	18 Unit	18 Unit	0 Unit	67.500.000	67.500.000	-
5.03.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muaro Sijunjung	10 Unit	10 Unit	0 Unit	10.350.000	10.350.000	-
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Pendidikan dan**	**Muaro Sijunjung**	**55%**	**55%**	**0%**	**1.588.429.888**	**930.630.838**	**(657.799.050)**
		Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Manajemen Kinerja dan Sistem Informasi	**Muaro Sijunjung**	**77%**	**77%**	**0%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Pemenuhan Indikator Merit Sistem Urusan Kepegawaian	**Muaro Sijunjung**	**72%**	**72%**	**0%**			
		Persentase ASN yang Meningkat Indeks Profesionalitasnya	**Muaro Sijunjung**	**5%**	**5%**	**0%**			
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN**	**Muaro Sijunjung**	**67%**	**67%**	**0%**	**272.731.125**	**265.913.125**	**(6.818.000)**
		Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan ASN	**Muaro Sijunjung**	**72%**	**72%**	**0%**			
		Nilai Aspek pengadaan ASN	**Muaro Sijunjung**	**67%**	**67%**	**0%**			
		Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	**Muaro Sijunjung**	**72%**	**72%**	**0%**			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Muaro Sijunjung	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	165.230.250	165.230.250	-
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Muaro Sijunjung	155 Dokumen	155 Dokumen	0 Dokumen	48.116.200	41.298.200	(6.818.000)
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Muaro Sijunjung	14 Dokumen	14 Dokumen	0 Dokumen	59.384.675	59.384.675	-
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Nilai Aspek promosi dan mutasi ASN**	**Muaro Sijunjung**	**77%**	**77%**	**0%**	**228.735.850**	**171.235.950**	**(57.499.900)**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	Muaro Sijunjung	600 Dokumen	600 Dokumen	0 Dokumen	107.863.600	82.251.100	(25.612.500)
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Muaro Sijunjung	750 Dokumen	750 Dokumen	0 Dokumen	95.260.900	65.108.500	(30.152.400)
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Muaro Sijunjung	200 Dokumen	200 Dokumen	0 Dokumen	25.611.350	23.876.350	(1.735.000)
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**Muaro Sijunjung**	**52%**	**52%**	**0%**	**886.337.738**	**327.912.838**	**(558.424.900)**
		Persentase ASN yang meningkatkan jenjang pendidikannya	**Muaro Sijunjung**	**4%**	**4%**	**0%**			
		Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi	**Muaro Sijunjung**	**5%**	**5%**	**0%**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Muaro Sijunjung	441 Orang	441 Orang	0 Orang	616.930.388	197.950.388	(418.980.000)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Muaro Sijunjung	55 Orang	55 Orang	0 Orang	67.326.400	67.326.400	-
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Muaro Sijunjung	500 Orang	28 Orang	(472) Orang	202.080.950	62.636.050	(139.444.900)
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Nilai Aspek manajemen kinerja ASN**	**Muaro Sijunjung**	**62%**	**62%**	**0%**	**200.625.175**	**165.568.925**	**(35.056.250)**
		Nilai Aspek Penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN	**Muaro Sijunjung**	**62%**	**62%**	**0%**			
		Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	**Muaro Sijunjung**	**92%**	**92%**	**0%**			
		Perseentase penurunan ASN yang melakukan pelanggaran	**Muaro Sijunjung**	**52%**	**52%**	**0%**			
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Muaro Sijunjung	150 Orang	150 Orang	0 Orang	35.551.575	20.978.575	(14.573.000)
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Muaro Sijunjung	75 Orang	75 Orang	0 Orang	87.046.900	85.126.900	(1.920.000)
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Muaro Sijunjung	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	78.026.700	59.463.450	(18.563.250)
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**474.521.368**	**272.158.036**	**(202.363.332)**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA**	**persentase ASN yang meningkat indeks profesionalitasnya**	**Muaro Sijunjung**	**5%**	**5%**	**0%**	**474.521.368**	**272.158.036**	**(202.363.332)**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi teknis**	**Muaro Sijunjung**				-	-	-
5.04.02.2.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Muaro Sijunjung	0	0	0	0	0	-
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Muaro Sijunjung**	**2%**	**2%**	**0%**	**474.521.368**	**272.158.036**	**(202.363.332)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Muaro Sijunjung	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	474.521.368	272.158.036	(202.363.332)
							5.822.054.680	**49.517.587.757**	**43.695.533.125**

Muaro Sijunjung, Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIJUNJUNG

MUHADIRIS, S.P, M.E
Pembina Tk.I
NIP. 19770122 200212 1 001

Muaro Sijunjung, Mei 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
1.2 Dasar Hukum.
1.3 Maksud dan Tujuan.
1.3.1. maksud.
1.3.2. tujuan.
1.4 Sistmematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II.
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Pragram dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun angaran 2025 yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilandan berkelanjutan. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan dimaksud terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah atau disebut juga dengan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan -OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan melalui dan/atau fungsi penunjang pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap OPD.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden R.I (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisisensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025. Dimana dengan keluarnya Instruksi Presiden tersebut maka Pemerintah Daerah harus mengikuti Instruksi tersebut dengan melaksanakan penyusunan kembali Rencana Kerja dalam Perubahan Anggaran tahun 2025.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu kewajiban daerah adalah menyusun Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 telah melakukan pembuatan terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan renja Perangkat Daerah. Maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung berkewajiban menyusun Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025. Renja Perubahan

Sekretariat DPRD merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun anggaran. Untuk penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025 berpedoman kepada nomenklatur sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran, sesuai periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung. Renja tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih periode 2024-2029 sehingga Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dibuat mempedomani Visi Bupati Terpilih yaitu" **Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri"**

Untuk menyusukseskan Visi tersebut maka Sekretariat DPRD menyusun Program dan Kegiatan yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan dituangkan kedalam kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Sijunjung dan dijadikan pedoman untuk penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dalam penyelenggaraan hak, kewajiban dan wewenang DPRD. Tugas dari Sekretariat DPRD ini sendiri ialah menyelenggarakan adminsitrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sedangkan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD ialah :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Penyelenggaraan rapat-rapat.
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPropinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah :

- Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden R.I (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisisensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025.
- Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang dilaksanakan.
- Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kegiatan.
- Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.

- Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) OPD.
- Menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai visi,misi dan tujuan organisasi.
- Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparan guna memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder.

Tujuan

Tujuan dari Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung 2025 adalah sebagai berikut :

- Memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan perencanaan yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD.
- Untuk cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
- Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan renja tahunan.
- Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaktif terhadap perubahan lingkungan strategis.

- Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Sijunjung berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, - 401 - dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan selama 4 Bulan dari bulan Januari s/d April 2025 yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana kerja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD tahun berjalan 2025, tertuang dalam program kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2025. Sebagai perbandingan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan secara umum realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun berjalan 2025 sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan.

Pada tahun 2025 Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 34.528.859.111 (Tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 25.353.796.174,89 (Dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dimana untuk belanja operasi disediakan anggaran sebesar Rp. 25.353.796.174,89 (Dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dan terealisasi sebesar Rp. 11.194.509.299,- (Sebelas milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 44.15 %. Belanja Modal di sediakan anggaran sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) yang realisasinya 0 %.

a. Belanja Operasi.

Pada tahun 2025 Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 25.353.796.174,89 (Dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dan terealisasi sebesar Rp. 11.194.509.299,- (Sebelas milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

1. Belanja Pegawai yang di alokasikan untuk gaji, tunjangan ASN gaji dan tunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan anggaran sebesar 15.765.688.248,69 (Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) setelah pergeseran pertama menjadi RP. 14.864.796.605,69,- (Empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah enam puluh sembilan sen) terealisasi sebesar Rp. 5.579.493.749,- (Lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan rupiaj) atau sebesar 37,51 %.
2. Belanja Barang dan jasa di sediakan anggaran sebesar Rp. 19.027.167.562,31,- (Sembilan belas milyar dua puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh satu sen) dan setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 10.826.237.469,20 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupia dua puluh sen) terealisasi sebesar Rp. 5.844.644.390,- (Lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 53,98 %, tertuang dalam 2 Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tertuang ke dalam 16 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan rincian capaian kinerja per sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 20.463.751.326,69,- (Dua puluh milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 17.611.369.824,69 (Tujuh belas milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah enam puluh sembilan sen) terealisasi sebesar Rp. 6.778.221.561,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 38,48 %, dengan 9 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan terdiri dari :

A. Kegiatan Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah disediakan anggaran sebesar Rp. 27.473.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 2,918.100 (Dua juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.047.175,- (Dua juta empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau 70,15 % dengan 2 (satu) sub Kegiatan yaitu :

1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, anggaran awal disediakan sebesar Rp. 25.573.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 2.054.100,- (Dua juta lima puluh empat ribu seratus rupiah), realiasai sebesar Rp. 2.047.175,- (Dua juta empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

. Capaian kinerja selama tahun berjalan s/d bulan April sebesar 99,66%.

c. Output yang di hasilkan adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.

2). Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan aporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

a. Sub Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 25.573.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setelah pergeseran menjadi Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

b. Capaian kinerja selama tahun berjalan s/d bulan April sebesar 100%.

c. Output yang di hasilkan adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kenerja Sekretariat DPRD setiap bulan/triwulan/semesteran.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, disediakan anaggaran sebesar Rp. 3.577.946.145,- (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 3.296.120.802,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu delapan ratus dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.092.457.355,- (Satu milyar sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) atau 33,14 % untuk 2 sub Kegiatan :

1). Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

a. Sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.247.154.102,- (Tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh

empat ribu seratus dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.069.363.055,- (Satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah)

b. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 32,93 %.

c. Output yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD selama satu tahun anggaran.

3). Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.

a. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.000.000,- (Seratus dua belaj juta rupiah) setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 48.968.700,- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.094.300,- (Dua puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

b. Capaian kinerja dan keuangan untuk kegiatan ini sebesar 47,16 %

c. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah terselenggaranya pembuatan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran serta juga menampung kegiatan pelaksanaan laporan akhir tahun anggaran.

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 148.635.000,- (Serataus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 32.467.500,- (Tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 32.379.250.- (Tiga puluh dua juta tiga ratus

tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 99,72 % terdiri dari 2 sub kegiatan :

1). Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribuit Kelengka pannya.

a. Sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.37.650.000,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah perubahan pertama menjadi Rp. 32.467.500 dan terealisasi sebesar Rp. 32.379.250,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

b. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 99,72 %.

c. Output yang dihasilkan terlaksananya penyediaan pakaian dinas pegawai Sekretariat DPRD mulai dari ASN sampai dengan Tenaga Harian Lepas (THL), berupa dasar pakaian dinas harian (kuning keki) sebanyak 54 stel.

2). Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi..

a. Anggaran yang di sediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 110.985.000,- (Seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 337.500 dan telah terealisasi sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

b. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 99,55 %

c. Output yang dihasilkan adalah mengikuti pelatihan sesuai bidang tugas dan fungsi oleh Sekretariat DPRD khusunya mengikuti ASDEKSI Sekwan se Indonesia,

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp. 684.285.690,- (Enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) pada pergeseran pertama menjadi Rp. 211.470.290,- (Dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 125.960.700,- (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau 59,56 % terdiri dari 5 sub kegiatan :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instaliasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor

a. Anggaran yang di sediakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 28.881.600,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 26.168.500,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 25.187.600,- (Dua puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

b. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 96,25%.

c. Output yangh dihasilkan adalah terlaksananya penyediaan alat-alat listrik, seperti kabel, bola lampu dalam rangka kebutuhan penerangan kantor DPRD.

2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

a. Sub Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 58.870.200,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah), pada pergeseran pertama menjadi Rp. 19.195.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi hanya sebesar Rp.19.135.000,- (Sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

b. Capaian kinerka kegiatan ini hanya sebesar 99,68 %.

c. Output kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan perlengkapan / peralatan rumah tangga ketua DPRD.

3.). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor

a. Anggaran yang di sediakan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 257.313.300,- (Dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), pada pergeseran pertama menjadi Rp. 96.628.100,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 42.718.650,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

b. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 44,20 %.

c. Output yangh dihasilkan adalah terlaksananya penyediaan alat-alat tulis kantor, natura rumah dinas ketua DPRD, dan makan minum kantor dll kebutuhan harian Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

4.) Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.

a. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.168.850,- (Sembilan belas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 5.010.000,- (Lima juta sepuluh ribu rupiah), realisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah)

b. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 0%

c.utput yang dihasilkan oleh kegiatan ini merupakan penyediaan barang cetakan seperti kwitansi, SPPD, blanco, map secretariat dan DPRD.

5.). Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

a. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 148.018.240,- (Seratus empat puluh delapan juta delapan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah), pada pergeseran pertama menjadi Rp. 32.349.500,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.282.000,- (Dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

b. Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini sebesar 99,79%

c. Output yang dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya mengikuti dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi oleh Pegawai Sekretariat DPRD baik yang dilaksanakan didalam Provinsi maupun melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), pada pergeseran pertama menjadi Rp. 918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 913.500,- (Sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) atau 99,50 % terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

1). Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

a. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), pada pergeseran pertama menjadi Rp. 918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)

b. Capaian hanya sebesar 99,50 %

c. Output kegiatan ini merupakan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintah Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp. 2.132.275.694,- (Dua milyar serataus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah),pada pergeseran pertama menjadi Rp. 1.690.519.285,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 571.578.076,- (Lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah) atau 33,81 %. Terdiri dari 2 sub kegiatan.

1.). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

a. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 495.354.319,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga rataus sembilan belas ribu rupiah),paga pergeseran pertama menjadi Rp. 259.998.810,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 140.496.692,- (Seratus empat puluh juta empat rataus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

b. capaian untuk sub kegiatan ini sebesar 54,03 %.

c. Output yang dikeluarkan dalam kegiatan ini adalah pembayaran biaya langganan listrik, Air dan telpon, untuk kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD.

3.). Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor.

a. Untuk sub kegiatan ini anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.636.921.375,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga rataus tujuh puluh lima rupiah), pada pergeseran pertama menjadi sebesar Rp. 1.430.520.475,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 431.081.384,- (Empat ratus tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)

b. Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini sebesar 30,13 %

c. Output yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah tersedianya kontrak clerning cervice kantor sekretariat DPRD serta pengadaan alat-alat/bahan-bahan kebersihan penyediaan tenag

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp. 1.090.144.944,- (Satu milyar sembilan puluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah),pada pergeseran pertama menjadi Rp. 595.721.394,- (Lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 374.700.546,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau 62,89 %, terdiiri dari 3 Sub kegiatan :

1). Sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

a. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.423.039.750,- (Empat ratus dua puluh tiga

juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pada pergeseran pertama menjadi Rp. 220.839.750,- (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 167.930.950,- (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

b. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar Rp. 76,04 %.

c. Output kegiatan ini adalah pembayaran biaya pajak kendaraan dinas terdiri dari 4 unit Bus, 9 Unit Minibus dan 19 Unit kendaraan roda dua, serta bantuan BBM dan biaya pemelihraan.

1). Sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

a. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp.177.835.250,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), pada pergeseran pertama menjadi Rp. 82.298.100,- (Delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp.56.788.596,- (Lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

b. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar Rp. 69 %.

c. Output kegiatan ini adalah pembayaran biaya asuransi mobil DInas jabatan Pimpinan dan Sekretaris DPRD dan bantuan BBM bulanan dan opearsional.

2). Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya.

a. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 489.289.944,- (Empat ratus delapan puluh sembilan juta dua rataus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 292.583.544,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 149.981.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta sembilan rataus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 51,26 %.

c. Output kegiatan ini adalah dalam rangka pemeliharaan bangunan gedung kantor, penyediaan tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, alat pendingin, pemeliharaan computer.

H. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, disediakan anggaran sebesar Rp, 12.299.742.103,69- (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus tiga rupiah enam puluh sembilan sen), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 11.617.642.503,69 (Sebelas milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah sembilan sen) dan terealisasi sebesar Rp. 4.510.130.694,- (Empat milyar lima ratus sepuluh juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), atau 38,82 %. Yang terdiri dari 3 sub kegiatan :

1). Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.

a. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.040.072.103,69,-(Dua belas milyar empat puluh juta tujuh puluh dua ribu seratus tiga rupiah enam puluh sembilan sen),

setelah pergeseran pertama menjadi Rp Rp. 11.367.772.103,69 (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga rupiah enam puluh sembilan sen) dan terealisasi sebesar Rp. 4.306.491.854,- (Empat milyar tiga ratus enam juta empat rataus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

b. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 37,88 %.
c. Output kegiatan ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD satu tahun anggaran.

2). Sub kegiatan Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD.

a. Untuk sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 228.670.000,-(Dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 216.870.500,- (Dua ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 203.638.840,- (Dua rataus tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
b. Capaian kinerja ini sebesar 93,89 %
c. Output kegiatan ini adalah penyediaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 150 stel.

3). Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

a. Sub Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 33.000.0000.- (Sebelas juta rupiah),- dan realisasinya Rp. 0.-

b. Capaian kinerja ini 0 %., hal ini diakibatkan tidak adanya permintaan anggota DPRD untuk melaksanakan medical check Up.

c. Output kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi medical cekup Pimpinan dan anggota DPRD, namun pada tahun 2023 tidak ada Pimpinan dan Anggota yang melaksanakannya.

I. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, disediakan anggaran sebesar Rp. 412.248.750,- (Empat ratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 163.254.350,- (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 67.718.285,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau 41,48 %, terdiri dari 2 Sub Kegiatan :

1). Sub kegiatan Fasiliatasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

a. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 112.248.750,- (Serataus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 13.254.350,- (Tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.867.885,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)

b. Capaian kinerja sebesar 97,08 %

c. Oautput yang dihasilkan adalah memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD dengan pemerintah daerah.

2). Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

a. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga rataus juta rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 150.000.000,- (Tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 54.850.400,- (Lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)

b. Capaian kinerja sebesar 36,56 %

c. Oautput yang dihasilkan adalah memfasilitasi kebutuhan rumah tangga ketua DPRD.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Anggaran untuk program ini di sediakan sebesar Rp. 14.065.107.784,31,- (Empat belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh satu sen), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 7.742.426.350,20,- (Tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh sen) terealisasi sebesar Rp. 4.416.287.738,- (Delapan belas milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 57,04 %, dengan 7 Kegitan dan 28 sub Kegiatan terdiri dari :

A. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.314.719.050,- (Satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi 1.033.168.200,- (Satu milyar tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.261.650,- (Tiga puluh sembilan juta

dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 3,80% dengan 3 sub kegiatan :

1). Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

a. Disediakan anggaran sebesar Rp. 1.193.873.600,- (Satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah pergeseran perma menjadi Rp. 1.028.251.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi hanya sebesar Rp39.261.650,- (Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)

b. capaian kinerja kegiatan ini sebesar 3,81 %

c. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya memfasilitasi pelaksanaan proses pembentukan peraturan daerah, baik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah maupun yang di terbitkan melalui inisiatif anggaota DPRD.

2.). Sub kegiatan Penyelengaraan kajian Perundang-undangan.

a. Anggaran yang disedikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.0,- (Nol rupiah),

b. capaian kegiatan ini hanya 0 %.

c. Output direncanakan untuk pelaksanaan kajian terhadap peraturan-peraturan yang telah di keluarkan dan menjadi pertimbangan untuk di laksanakan peninjauan kembali serta menetapkan Rencana Peraturan Daerah yang akan di bahas di dalam tahun anggaran berjalan.

4.). Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan Penjelasan dan/atau naskah akademik.

a. disediakan anggaran sebesar Rp. 117.345.550,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 4.917.200,- (Empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah)

b. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 0 %,

c. Output yang dihasilkan direncanakan terlaksananya pelaksanaan kerjasama dengan pihak akademisi dalam rangka penyusunan draf ranperda inisiatif anggata DPRD.

B. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, disediakan anggaran sebesar Rp. 2.327.321.286,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi 1.468.565.540,20,- (Satu milyar empar ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh sen) dan telah terealisasi sebesar Rp. 26.129.000- (Dua puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau 1,77 %, dengan 5 Sub kegiatan :

1). Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

a. Untuk sub kegiatan ini anggaran disediakan sebesar Rp. 161. 479.500,- (Seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),- setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 20.570.300,- (Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

b. capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 0 %.

c. Output yang dihasilkan adalah direncanakan adanya kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rangka penetapan anggaran untuk tahun selanjutnya.

2.) Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. Untuk kegiatan ini anggaran disediakan sebesar Rp. 161.853.300,- (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 20.570.300,- (Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

b. capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 0 %.

c. Output yang direncanakan adalah adanya kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rangka penetapan anggaran perubahan untuk tahun berjalan

3.) Sub kegiatan Pembahasan APBD.

a. Anggaran yang di sediakan dalam rangka pembahasan APBD sebesaR Rp. 652.148.785,- (Enam ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), stelah pergeseran pertama menjadi Rp. 519.844.750,- (Lima ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 10.810.000,- (Sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

b. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 2,07 %.

c. Output yang direncanakan adalah terlaksananya pembahasan dan penetapan Ranperda APBD tahun 2026 menjadi Perda.

4.) Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan

a. Anggaran yang di sediakan dalam rangka pembahasan APBD sebesaR Rp. 685.439.700,- (Enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 452.103.400,- (Empat

ratus lima puluh dua juta seratus tiga ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah)

b. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 0 %.

c. Output yang direncanakan adalah terlaksananya pembahasan dan penetapan Ranperda APBD Perubahan tahun Angaran 2025 menjadi Perda.

5.) Sub kegiatan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD

a. Anggaran yang di sediakan dalam rangka pembahasan APBD sebesaR Rp. 666.400.000,- (Enam ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 455.476.790,20,- (Empat ratus lima puluh lima juta empat rataaus tujuh puluh enam t=ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen) dan terealisasi sebesar Rp. 15.319.000,- (Lima belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

b. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 3,36 %.

c. Output yang direncanakan adalah terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya (tahun 2024).

C. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, untuk kegiatan ini di sediakan anggaran sebesar Rp. 237.500.300,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 99.338.600,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.504.500,- (Dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 23,66 % yang terdiri dari 3 Sub kegiatan :

1.) Sub pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

a. Untuk sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp.18.005.500,- (Delapan belas juta lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.519.500,- (Delapan juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
b. Capaian kinerja kegiatan ini hanya 47,31%.
c. Output kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam daerah dan pelaksanaan rapat setelah pelaksanaan perjalanan dinas, rendahnya capaian kinerja kegiatan ini dikarenakan tidak adanya jadwal pelaksanaan kunjungan dalam rangka pengawasan di Bidang Pemerintahan dan Hukum oleh Pimpinan dan Anggota Dewan

2.).Sub kegiatan pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK.

a.. Untuk sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 20.757.600,- (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 2.995.800,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)
b. Capaian kinerja kegiatan ini hanya 7 %
c. Output kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam daerah dan pelaksanaan rapat setelah pelaksanaan perjalanan dinas, rendahnya capaian kinerja kegiatan ini dikarenakan tidak adanya jadwal pelaksanaan kunjungan dalam rangka pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK oleh Pimpinan dan Anggota Dewan

3.). Sub kegiatan pengawasan Penggunaan Anggaran.

a.. Untuk sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 116.712.700,- (Seratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 78.337.600,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.775.000,- (Empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

b. Capaian kinerja kegiatan ini hanya 18,86 %.

c. Output kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran serta rapat-rapat dengan OPD terhadap pelaksanaan anggaran 2024.

D. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 2.443.198.370,- (Dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi sebesar Rp. 903.743.860,- (Sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan telah terealiasasi sebesar Rp. 525.370.185,- (Lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 58,13 % yang terdiri dari 5 Sub kegiatan :

1.) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 602.847.400,- (Enam rataus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 0 (Nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah)

b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 0 %.

c. Outputnya adalah direncanakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan, namun kurang tercapainya kegiatan ini dikarenakan pelaksanaan bimbingan teknis untuk Pimpinan DPRD tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya undangan diklat yang mendukung tupoksi Pimpinan Dewan.

2.) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi..

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 203.142.000,- (Dua ratus tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), setelah pergeseran pertama sebesar Rp. 192.622.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan ribu rupiah)
b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 24,91 %.
c. Outputnya adalah terlaksananya penyediaan Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 8 Fraksi yang terdiri dari 1 orang per fraksi , serta penyediaan honor bagi tenaga ahli fraksi selama 12 (dua belas) bula.

3.) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), setelah pergeseran menjadi Rp. 0 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah)
b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 0 %.
c. Outputnya direncakan pelaksanaan rapat – rapat dengan Pemerintrah Daerah, tokoh masyarakat, Tokoh Agama, organisasi kemasyarakatan,

4.) Sub kegiatan penyusunan program kerja DPRD.

d. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 920.808.970,- (Sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), setelah pergeseran menjadi Rp. 331.041.860,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 258.900.185,- (Dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu seratus delapan puluh lima rupiah)

e. Realiasai kegiatan ini sebesar 78,20 %.

f. Output yang dihasilkan adalah tersusunnya program kerja DPRD untuk satu tahun anggaran.

5.) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 706.400.000,- (Tujuh ratus enam juta empat ratus ribu rupiah), setelah pergesran menjadi Rp. 380.080.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 218.470.000,- (Dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 57,48 %.

c. Outputnya adalah terlaksananya penyediaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan kedewanan untuk satu tahun anggaran.

E. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.233.799.850,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), setelah pergeseran pertama

menjadi Rp. 565.525.850,- (Lima ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 361.518.500,- (Tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), atau sebesar 63,92 % yang terdiri dari 3 Sub kegiatan ;

1.) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 288.600.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), setelah pergeseran menjadi Rp. 134.403.000,- (Seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 27.176.400,- (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)

b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 20,22%.

c. Outputnya adalah terlaksananya kunjungan kerja dalam Kabupaten dalam rangka peninjauan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, serta menghadiri undangan dari masyarakat. Kurangnya capaian kinerja kegiatan ini adalah dikarenakan kurangnya undangan dari masyarakat yang akan di hadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD.

2.) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp,153.699.850,- (Seratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), setelah pergeseran menjadi Rp. 42.234.850,- (Empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.645.900,- (Enam juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 15,73%,

c. Outputnya adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pengayaan pengetahuan Pimpinan dan Anggota Dewan serta penyusunan dan pengimputan Pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam Sistim Informasi Pembangunan Daerah yang berasal dari penampungan aspirasi masyarakat guna peningkatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

3.) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 791.500.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pergeseran menjadi Rp. 388.888.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 327.696.200,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah)

b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 84,26 %.

c. Outputnya adalah terlaksananya penyediaan konsumsi bagi peserta reses serta perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD.

F. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 0 (Nol rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) atau sebesar 0 % yang terdiri dari 1 Sub kegiatan ;

1.. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 0 (Nol rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah)

b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 0 %.
c. Outputnya direncanakan Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

G. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 6.473.768.928,31,- (Enam milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen), setelah pergeseran pertama menjadi Rp. 3.672.084.300,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus rupia) dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.440.503.903,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah), atau sebesar 93,69 % yang terdiri dari 2 Sub kegiatan ;

1.. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 5.713.152.650,- (Lima milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), setelah pergeseran menjadi Rp. 3.296.774.300,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga rataus rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.154.905.048,- (Tiga milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima ribu empat puluh delapan rupiah)
b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 95,69 %.
c. Outputnya adalah terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta sekretariat guna mencari masukan dalam rangka peningkatan pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk masa yang akan dating.

2.. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

a. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 760.616.274,31,- (Tujuh ratus enam puluh juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), setelah pergeseran menjadi Rp. 375.310.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 285.598.857,- (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

b. Capaian kinerja untk sub kegiatan ini sebesar 76,09 %.

c. Outputnya adalah terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangka menghadiri undangan. Tidak tercapaianya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya undangan sebagai pendukung pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN BERJALAN SD BULAN APRIL 2025

	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI		KINERJA	
			KEUANGAN		TARGET	CAPAIAN
			(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
	Sekretariat DPRD	**25.353.796.174,89**	**11.194.509.299**	**44,15**	**100 %**	**44,15**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**17.611.369.824**	**6.778.221.561**	**38,48**	**100 %**	**38,48**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.918.100**	**2.047.175**	**70,15**	**100 %**	**70,15**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.054.100	2.047.175	**99,66**	100%	**99,66**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	864.000	0	**0**	4 lap	**0**

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.296.120.802**	**1.092.457.355**	**33,14**	**100 %**	**33,14**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.247.154.102	1.069.363.055	**32,93**	25 Org	**32,93**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	48.966.700	23.094.300	**47,16**	18 Lap	**47,16**
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**32.805.000**	**32.715.250**	**99,72**	**100 %**	**99,72**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.467.500	32.379.250	**99,72**	102 Stel	**99,72**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	337.500	336.000	**99,55**	5 orang	**99,55**
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**211.470.290**	**125.960.700**	**59,56**	**100 %**	**59,56**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.168.500	25.187.600	**96,25**	1 paket	**96,25**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.196.000	19.135.000	**99,68**	1 paket	**99,68**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.628.100	42.718.650	**44,20**	1 paket	**44,20**
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5.010.090	0	**0**	1 paket	**0**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.118.100	15.637.450	**48,68**	1 paket	**48,68**
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	32.349.500	23.282.000	**71,97**	1 paket	**71,97**
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**918.000.**	**913.500**	**99,50**	**100 %**	**99,50**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	918.000.	913.500	99,50	1 paket	99,50
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.690.519.285**	**571.578.076**	**33,81**	**100 %**	**33,81**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.998.810	140.496.692	**54,03**	1 paket	**54,03**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.430.520.475	431.081.384	**30,13**	2 paket	**30,13**
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**595.721.394**	**374.700.546**	**62,89**	**100 %**	**62,89**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	220.839.750	167.930.950	**76,04**	4 unit	**76,04**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.298.100	56.788.596	**69**	27 Unit	**69**

	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	292.583.544	149.981.000	**51,26**	2 Unit	**51,26**
8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**11.617.642.503,69**	**4.510.130.694**	**38,82**	**100 %**	**38,82**
	Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	11.367.772.103	4.306.491.854	**37,88**	30 Orang	**37,88**
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	216.870.500	203.638.840	**93,89**	120 stel	**93,89**
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	33.000.000	0,00	**0**	30 orang	**0**
9	**Layanan Administrasi DPRD**	**163.254.350**	**12.867.865**	**7,88**	**100 %**	**7,88**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	13.254.350	12.867.865	**97,08**	1 paket	**97,08**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	150.000.000	54.850.000	**36,56**	1 paket	**36,56**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	KEUANGAN		TARGET	CAPAIAN
			(RP)	(%)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7
II	**Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**7.742.426.350**	**4.416.287.738**	**57,04**	100 %	**57,04**
1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**1.033.168.200**	**39.261.650**	**3,80**	100%	**3,80**
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	.1.028.251.000	39.261.650	**3,81**	4 bh	**3,81**
	Penyelenggaan kajian Perundang-undangan	0	0	**0**	0	**0**
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4.917.200	0	**0**	1 paket	**0**
2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**1.468.565.540,20**	**26.129.000**	**1,77**	**100 %**	**1,77**
	Pembahasan KUA dan PPAS	20.570.300	0	**0**	2 dok	**0**
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.570.300	0	**0**	2 dok	**0**
	Pembahasan APBD	519.844.750	10.810.000	**2,07**	1 dok	**2,07**
	Pembahasan APBD Perubahan	452.103.400	0	**0**	1 dok	**0**
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	455.476.790,20	15.319.000	**3,36**	1 dok	**3,36**
3	**Pengawasan Penyelenggaraan**	**99.338.600**	**23.504.500**	**23,66**	**100 %**	**23,66**

	Pemerintahan					
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	18.005.500	8.519.500	**47,31**	1 lap	**47,31**
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan.	2.995.600	210.000	**7,01**	1 lap	**7,01**
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	78.337.500	14.775.000	**18,86**	3 kali	**18,86**
4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**903.743.860**	**525.370.185**	**58,13**	**100 %**	**58,13**
	Pendalaman Tugas DPRD	0	0	**0**	0	**0**
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	192.622.000	48.000.000	**24,91**	8 orang	**24,91**
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0	0	**0**	0	**0**
	Penyusunan Program Kerja DPRD	331.041.860	258.900.185	**78,20**	2 dok	**78,20**
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	380.080.000	218.470.000	**57,48**	1 paket	**57,48**
5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**565.525.850**	**361.518.500**	**63,92**	**100 %**	**63,92**
	Kunjungan kerja dalam daerah	134.403.000	27.176.400	**20,22**	12 kali	**20,22**
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	42.234.850	6.545.900	**15,49**	2 dok	**15,49**
	Pelaksanaan Reses	388.888.000	327.696.200	**84,26**	1 kali	**84,26**
6	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	0	0	**0**	0	**0**
7	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**3.672.084.300**	**3.440.503.903**	**93,69**	**100 %**	**93,69**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD	3.296.774.300	3.154.905.046	**95,69**	18 Kali	**95,69**
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	375.310.000	285.596.857	**76,09**	1 Paket	**76,09**

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD. Dalam rangka pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta system pelayanan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
b. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
e. Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan/perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan keputusan DPRD

Isu-isu penting pada tahun 2025

DPRD sebagai salah satu institusi Pemerintah Daerah, pada tahun 2025 ini ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun adalah melaksanakan pembahasan Perda sesuai Prolegda 2025.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, tentunya ada hambatan-hambatan serta peluang-peluang yang menjadi pemicu bagi Sekretariat DPRD didalam meningkatkan kinerja di dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas ke Dewanan, adapun tantangan dan peluang tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang terdiri dari tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah khusunya Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung pada satu tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan , perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha bisa mendapatkan peluang untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung tentu juga menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan TOWS analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan

kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada:

1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik
2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik,ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain peluang dan tantangan, tentu Sekretariat DPRD memiliki kelemahan dan kekuatan yang berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi. Keseluruhan ini menjadi dasar bagi Sekretariat DPRD untuk menganalisa strategi dan kebijakan yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

a. Tantangan (threats)

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, ada beberapa tantangan (treats) yang dihadapi yaitu:

Tantangan (treats)

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan dan peraturan secara nasional yang berdampak langsung pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ;
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia yang dinilai belum memenuhi keseluruhan fungsi organisasi;
3. Perubahan paradigma masyarakat yang menuntut pelayanan yang lebih cepat dan proses pengaduan ke DPRD yang Komprehensif.

4. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya ;
5. Perkembangan teknologi yang sangat pesat namun tidak linier dengan kemampuan SDM untuk memanfaatkannya.
6. Dinamika politik lokal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
7. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
8. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan;

b. **Peluang (opportunities**)

Namun tantangan tersebut tidak perlu menjadi hambatan untuk berusaha berbuat lebih baik dengan tujuan meningkatkan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melihat konteks tantangan tersebut tentu harus disandingkan dengan kemampuan melihat peluang yang ada sebagai bentuk kesempatan dalam meningkatkan kinerja OPD Sekretariat DPRD.

Peluang tersebut yaitu :

1. Masih adanya potensi pengembangan SDM untuk menjadi lebih profesional ;
2. Dilaksanakannya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan kualitas SDM ;
3. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana ;
4. Adanya penghargaan (reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS ;

5. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD, dari media dan dari Asosiasi (ADKASI dan ASDEKSI);
6. Peningkatan Kualitas SDM Anggota Dewan melalui Bimtek, Studi Banding dan Konsultasi.
7. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan;
9. Adanya SDM yang mampu menjembatani fungsi dan tugas eksekutif dan legislatife;
10. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan.
11. Adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kedewanan, sehingga dapat menjadi pelindung bagi Sekretariat di dalam pelaksanaan tugas guna memfasilitasi kegiatan kedewanan.

c. Kelemahan (weaknesess)

Dari analisa atas kondisi yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung diperoleh kelemahan-kelemahan yang dinilai berpengaruh langsung untuk mencapai tujuan organisasi satu tahun kedepan.

Kelemahan tersebut adalah:

1. SDM yang belum memadai dari segi kualitas pemanfaatan sistem informasi teknologi
2. Masih rendahnya pemahaman terhadap tupoksi dari pengelola kegiatan
3. Etos kerja dan kualitas kerja yang masih rendah
4. Belum adanya target kinerja yang jelas dan terpenuhi oleh masing-masing pengelola kegiatan.
5. Konsistensi dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana kerja tidak di laksanakan.
6. Seringnya kegiatan-kegiatan isedentil (mendadak) yang diluar rencana kerja.
7. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.
8. Adanya kepentingan dari beberapa personil yang harus dipenuhi dan diikuti sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.

d. Kekuatan (strength)

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD untuk melaksanakan program-program kegiatan
2. Tersedianya peralatan kerja yang memadai.
3. Dukungan politis yang kuat dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
4. Secara Jumlah, SDM Sekretariat DPRD dinilai sudah mencukupi.
5. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
6. Kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung akan mengupayakan terwujudnya tujuan- tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung. Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD antara lain untuk menilai keserasian ,keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing .

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunaan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis dan Renja.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.

Sebagaimana tabel T-C.31

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Usulan Renja Sekretariat DPRD.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi, adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

Kebijakan :

- Perluasan wawasan aparatur dengan melakukan study banding dan komunikasi dengan forum sekretariat DPRD yang ada
- Mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan
- Mengupayakan perencanaan kerja yang transparan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta pelaporan secara tepat waktu.
- Mengupayakan optimalisasi penyiapan penelitian dan pengawasan terhadap produk hukum

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Tujuan :

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Dengan telah diformulasikannya tujuan strategis ini Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung Yaitu :

1. Terlaksananya Fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan yang diajukan eksekutif dengan agenda yang telah ditentukan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan rencana kerja DPRD.
2. Tersedianya system informasi yang diperlukan oleh DPRD maupun masyarakat.
3. Terfasilitasinya peningkatan kualitas SDM DPRD

4. Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas ketua DPRD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 ini, telah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersikap dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan rencana strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dinas, badan dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung melaksanakan tugas dan kewenangannya yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan masyarakat, untuk membangun pemerintah yang amanah, demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.

Meningkatnya beban tugas pada masa-masa sekarang yang dimiliki DPRD, diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel didalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Sijunjung.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung disusun. Semoga rencana strategis ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIJUNJUNG

MISWITA,MR.MH
NIP : 19760214 200701 2 004

INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN)
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Ir. H. Juanda Nomor 3

(0754) 20953

inspektorat@sijunjung.go.id

Copyright: wordexceltemplates.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung, dan RPD dan Renstra 2021-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung sampai dengan bulan Mei 2025 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, Juni 2025

Inspektur,

WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710705 199803 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
Daftar Tabel			iii
BAB I	Pendahuluan		1
	1.1	Maksud dan Tujuan	1
	1.2	Dasar Pertimbangan Perubahan	3
	1.3	Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	5
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2025		7
	2.1	Evaluasi Kinerja Sasaran	7
	2.2	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	8
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025		19
BAB IV	Penutup		26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 ……	7
Tabel 2.2	Program, Indikator Program, Realisasi 2024 dan Target 2025 …….	8
Tabel 2.3	Tabel Anggaran, Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat s.d Bulan Mei 2025 ……	9
Tabel 2.4	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat ……	14
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ……	20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personal Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih professional;
f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;

g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal;
h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Surat Bupati Sijunjung No : 050/121/Bapppeda/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.
3. Terjadinya efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Salah satu misi pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, serta Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, sesuai dengan prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat menjadi prioritas yang ke 7 yaitu kinerja aparatur dan birokrasi.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung, maka beberapa peraturan baik pusat maupun daerah akan dijadikan sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4124;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
22. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor : 28 tahun 2010, Nomor : 0199/M PPN/04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sumatera Barat.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.4.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi, yang diukur dengan Indikator Sasaran “Nilai Indek IEPK”;
2. Meningkatnya pengendalian dan Pengawasan Internal Daerah, yang diukur dengan Indikator Sasaran “Level Maturias SPIP”;
3. Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah, yang diukur dengan Indikator Sasaran “Nilai SAKIP Pemda”;
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP, yang diukur dengan Indikator Sasaran “Level Kapabilitas APIP”;
5. Meningkatnya Kinerja Manajemen organisasi Urusan Pengwawasan, yang diukur dengan Indikator Sasaran “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat”;

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Inspektorat tahun 2024 :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi (IEPK)	Indeks 3.000	2.742	
	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	
	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Evaluasi	18	13,50	
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evalausi Akuntabilitas Kinerja Internal	BB (70-80)	BB (74,05)	

Terhadap sasaran program Inspektorat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 memiliki 3 Program, yaitu 2 Program yang mengampu pengawasan, dan 1 program penunjang program pengawasan. Adapun program dan sasaran yang dimaksud adalah :

Tabel 2.2

Program, Indikator Program, Realisasi 2024 dan Target 2025

Program Inspektorat	Indikator Program Inspektorat	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70-80 (BB)	74,05 (BB)	70-80 (BB)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal	85%	82,00%	85%	
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai 3	Nilai 2,7	Nilai 3	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penjaminan Kualitas MRI	Level 3	Level 3	Level 3	
	Nilai Penjaminan Kualitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	
	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Evaluasi	18	13,5	18	

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II (sd 30 Mei 2025) sebagai berikut :

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 30 Mei 2025) Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat s.d Bulan Mei 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Ket
1	**INSPEKTORAT**	**6.114.153.651,39**	**2.283.904.325,00**	**37,35%**		
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.856.272.791,39**	**2.206.450.101,00**	**37,68%**		
A.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.861.600,00**	**1.861.600,00**	**100,00%**		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00%	100,00%	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.861.600,00	1.861.600,00	100,00%	100,00%	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0,00%	100,00%	
A.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.438.374.902,00**	**2.068.600.906,00**	**38,04%**		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.430.201.002,00	2.060.427.006,00	37,94%	50,00%	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.756.500,00	3.756.500,00	100,00%	100,00%	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.417.400,00	4.417.400,00	100,00%	40,00%	
A.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**#DIV/0!**		
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0	0	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0,00%	0,00%	
3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		0,00%	0,00%	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Ket
3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00%	0,00%	
A.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**187.674.901,10**	**56.828.104,00**	**30,28%**		
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.388.787,00	10.263.004,00	27,45%	41,67%	
4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.954.281,10	-	0,00%	41,67%	
4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.791.500,00	2.040.000,00	73,08%	41,67%	
4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.930.738,00	4.311.500,00	62,21%	41,67%	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.609.595,00	40.213.600,00	32,80%	41,67%	
A.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**			
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,00%	0,00%	
A.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.131.588,20**	**59.968.546,00**	**42,79%**		
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.031.064,20	31.572.845,00	63,11%	41,67%	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.100.524,00	28.395.701,00	31,52%	41,67%	
A.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**88.229.800,09**	**19.190.945,00**	**21,75%**		
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000,00	4.965.945,00	36,78%	41,67%	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.425.000,00	10.920.000,00	25,15%	41,67%	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.720.800,09	150.000,00	1,94%	41,67%	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	23.584.000,00	3.155.000,00	13,38%	41,67%	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Ket
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**216.281.704,00**	**75.974.224,00**	**35,13%**		
B.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**176.195.204,00**	**56.339.224,00**	**31,98%**		
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8.978.000,00	-	0,00%	0,00%	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30.929.280,00	5.480.650,00	17,72%	20,00%	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	55.621.100,00	25.695.000,00	46,20%	50,00%	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	25.605.000,00	8.230.000,00	32,14%	41,00%	
1.5	Pengawasan Desa	41.057.324,00	16.933.574,00	41,24%	45,00%	
1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	14.004.500,00	-	0,00%	0,00%	
B.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**40.086.500,00**	**19.635.000,00**	**48,98%**		
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	0,00%	0,00%	
2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40.086.500,00	19.635.000,00	48,98%	55,00%	
C	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**41.599.156,00**	**1.480.000,00**	**3,56%**		
C.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**22.497.000,00**	**-**	**0,00%**		
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-	0,00%	0,00%	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	22.497.000,00	-	0,00%	0,00%	
C.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**19.102.156,00**	**1.480.000,00**	**7,75%**		
2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.700.000,00	1.480.000,00	40,00%	30,00%	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Ket
2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.895.556,00	-	0,00%	0,00%	
2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8.506.600,00	-	0,00%	0,00%	

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan. Selain akibat terjadinya defisit anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga menyebabkan pemangkasan anggaran yang besar pada Inspektorat Daerah dari anggaran awal sebesar Rp. 7.170.485.953,- menjadi Rp. 6.114.153.651,- yang mana didalam anggaran tersebut telah terdapat belanja gaji pegawai sebesar Rp. 5.430.201.002,- sehingga anggaran pengawasan yang tersisa hanya sebesar Rp. 683.952.649,-.

Pada Inspektorat sendiri terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.056.332.301,- pada tahun 2025, pada dasarnya seluruh sub kegiatan terdapat pengurangan akibat dari Instruksi Presiden tersebut, akan tetapi ada beberapa target kinerja yang berkurang signifikan diantaranya ialah :

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang awalnya memiliki target 30 orang yang akan ikut diklat menjadi hanya 0 orang, sehingga untuk tahun 2025 tidak ada dianggarkan untuk kegiatan peningkatan kompetensi serta penjenjangan.
2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang awalnya memiliki target 48 orang menjadi 0 orang yang menyebabkan anggaran pada sub kegiatan tersebut menjadi tidak ada.

3. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan juga terjadi pengurangan target kinerja dari yang awalnya memiliki target 48 orang menjadi 0 orang serta anggaran pada sub kegiatan tersebut juga Rp. 0,-

4. Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan juga terjadi pengurangan target kinerja secara signifikan yaitu awalnya memiliki target 1620 dokumen menjadi 29 dokumn.

5. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang awalnya memiliki target kinerja 24 Laporan Hasil Pengawasan menjadi 12 Laporan, dengan nilai pengurangan anggaran sebesar Rp. 262.534.720,-;

Meskipun terjadi pengurangan anggaran dan target kinerja pada Inspektorat, akan tetapi Inspektorat Kabupaten Sijunjung tetap bertekad untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan dengan maksimal.

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2025 sampai dengan 30 Mei 2025 keseluruhan anggaran murni Inspektorat kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.114.153.651,39,-

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 30 Mei 2025 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (INSPEKTORAT) TA. 2025 Tabel 2.4 sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA INSPEKTORAT DAERAH KAB. SIJUNJUNG
TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2025			
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP	3
2		Level Kapabilitas APIP	3
3		Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3
4		Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	18
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	NIlai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	70-80 (BB)

Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Kab. Sijunjung tahun 2025 (30 Mei 2025)

No	Sasaran PD		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Formula Indikator Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja		Target Renja SKPD TW II Tahun		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun		Tingkat Realiasi TW II Tahun		Ket
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah	**I**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		LHE Inspektorat	100%	**5.812.847.791**		**2.824.472.971**		**2.195.840.501**			
		A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			85%	**1.861.600**		**2.500.000**		**2.172.000**			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	50,00%	0,00%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.861.600	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.172.000	50,00%	116,67%	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	50,00%	0,00%	
		B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.438.374.902**		**2.723.274.401**		**2.068.600.906**			
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang/bulan	5.430.201.002	41 Orang/Bulan	2.715.100.501	41 Orang/Bulan	2.060.427.006	100,00%	37,94%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3.756.500	1 Laporan	3.756.500	1 Laporan	3.756.500	100,00%	100,00%	

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/	Formula Indikator Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja		Target Renja SKPD TW II Tahun		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun		Tingkat Realiasi TW II Tahun		Ket
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan	4.417.400	5 Laporan	4.417.400	5 Laporan	4.417.400	38,46%	100,00%	
		C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-		-		-			
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	-							
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0,00%	#DIV/0!	
		3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0 Orang	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	
		4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0 Orang	-	0	-	0	-	0,00%	#DIV/0!	
		D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**187.674.901**		**98.698.570**		**56.828.104**			
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	37.388.787	6 Paket	18.694.394	5 Paket	10.263.004	41,67%	83,33%	
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	17.954.281	6 Paket	8.977.141	5 Paket	-	50,00%	0,00%	
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		29 Dokumen	2.791.500	20 Dokumen	2.791.500	20 Paket	2.040.000	73,08%	68,97%	
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	6.930.738	6 Laporan	6.930.738	5 Laporan	4.311.500	62,21%	62,21%	
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	122.609.595	6 Laporan	61.304.798	5 Laporan	40.213.600	32,80%		

No	Sasaran PD		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Formula Indikator Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja		Target Renja SKPD TW II Tahun		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun		Tingkat Realiasi TW II Tahun		Ket
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-		-		-			
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	
		F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**140.131.588**				**59.968.546**			
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	50.031.064	6 Laporan	35.000.000	5 Laporan	31.572.845	63,11%		
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	90.100.524	6 Laporan	45.050.262	5 Laporan	28.395.701	31,52%	31,52%	
		G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**44.804.800**				**8.270.945**			
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	13.500.000	1	6.750.000	1	4.965.945	100,00%	36,78%	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	43.425.000	14	21.712.500	6	10.920.000	42,86%	25,15%	
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	7.720.800	1	7.720.800	0	150.000	0,00%	1,94%	
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		34 Unit	23.584.000	17 Unit	11.792.000	8 Unit	3.155.000	23,53%	13,38%	
		II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		Jumlah temuan BPK Tingkat Kapabilitas APIP		**216.281.704,00**				**75.974.224,00**			
		A	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**176.195.204,00**				**56.339.224,00**			
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		6 Laporan	8.978.000,00	0	-	0	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran PD		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Formula Indikator Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja		Target Renja SKPD TW II Tahun		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun		Tingkat Realiasi TW II Tahun		Ket
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		12 Laporan	30.929.280,00	4 Laporan	7.000.000,00	4 Laporan	5.480.650,00	100,00%	17,72%	
		3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		76 Laporan	55.621.100,00	34 Laporan	18.540.366,67	34 Laporan	25.695.000,00	44,74%	46,20%	
		4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		41 Laporan	25.605.000,00	34 Laporan	8.535.000,00	34 Laporan	8.230.000,00	82,93%	32,14%	
		5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		75 Laporan	41.057.324,00	65 Laporan	20.528.662	65 Laporan	16.933.574,00	100,00%	41,24%	
		6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Laporan	14.004.500,00	1 Laporan	7.002.250	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	
		B	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**40.086.500**				**19.635.000**			
		1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		0	-	0	-	0	-	0,00%		
		2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		18 Laporan	40.086.500,00	9 Laporan	20.043.250	10 Laporan	19.635.000,00	55,56%	48,98%	
		III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		Nilai Penjaminan Kualitas SPIP Nilai Penjaminan Kualitas MRI Nilai Penjaminan Kualitas IEPK		**41.599.156**				**1.480.000**			
		A	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**22.497.000**				**-**			
		1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		34 Rekomendasi	22.497.000,00	34 Rekomendasi	22.497.000	0	-	0,00%	0,00%	
		B	**Pendampingan dan Asistensi**				**19.102.156**				**1.480.000**			

No	Sasaran PD		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Formula Indikator Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja		Target Renja SKPD TW II Tahun		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun		Tingkat Realiasi TW II Tahun		Ket
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		14 Perangkat Daerah	3.700.000,00	7 PD	1.850.000	7 PD	1.480.000,00	44,12%	40,00%	
		2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 Kegiatan	6.895.556,00	0	-	0	-	0,00%	0,00%	
		3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		6 PD	8.506.600,00	0	-	0	-	0,00%	0,00%	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Bupati sijunjung No : 050/ 121 /Bapppeda tanggal 22 April 2025 Perihal Penyusunan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kabupaten Sijunjung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 terdapat pada table 3.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

INSPEKTORAT DAERAH KAB. SUUNJUNG

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						INSPEKTORAT DAERAH							7.170.485.953,02	6.828.197.748,50	6.114.153.651,39							10.033.823.564,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							7.170.485.953,02	6.828.197.748,50	6.114.153.651,39							10.033.823.564,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							7.170.485.953,02	6.828.197.748,50	6.114.153.651,39							10.033.823.564,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP				100 %	100 %	5.985.630.973,00	6.178.881.058,50	5.856.272.791,39							8.581.071.884,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	-			70-80 (BB) Nilai undefined	70-80 (BB) Nilai undefined	44.934.680,00	20.316.600,00	20.316.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		53.416.454,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.963.000,00	5.445.000,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			13.763.520,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.048.000,00	5.713.200,00	1.861.600,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			20.295.360,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	4 Laporan	17.923.680,00	9.158.400,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			19.357.574,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu	-			2 Dokumen	2 Dokumen	4.880.797.803,00	5.452.429.202,00	5.452.429.202,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		6.784.907.314,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.837.620.803,00	5.430.201.002,00	5.430.201.002,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			6.737.730.633,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.741.000,00	4.060.800,00	3.756.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			18.532.230,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	25.436.000,00	18.167.400,00	4.417.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			28.644.451,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan urusan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu	-			13 Laporan	13 Laporan	159.106.800,00	34.724.700,00	34.724.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		359.399.186,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			57.240.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	0 Orang	130.545.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			268.844.702,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	0 Orang	6.975.000,00	0,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			8.135.640,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	0 Orang	21.586.800,00	10.724.700,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			25.178.844,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	-			90 %	90 %	460.918.894,00	376.374.172,10	376.374.172,10			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		580.978.934,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.991.194,00	24.231.385,00	37.388.787,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			66.018.240,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.470.300,00	32.766.227,10	17.954.281,10	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			28.616.917,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1620 Dokumen	29 Dokumen	12.757.500,00	5.583.000,00	2.791.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			14.880.348,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	42.811.600,00	23.102.460,00	6.930.738,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			52.268.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	330.888.300,00	290.691.100,00	122.609.595,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			419.195.179,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaaan baik	-			80 %	80 %	24.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		197.098.272,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			197.098.272,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	-			90 %	90 %	246.642.796,00	193.905.584,40	193.905.584,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		291.456.295,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	98.313.476,00	88.062.128,40	50.031.064,20	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			100.461.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	148.329.320,00	105.843.456,00	90.100.524,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			190.994.795,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaaan baik	-			90 %	90 %	169.230.000,00	101.130.800,00	101.130.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		313.815.429,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	14 Unit	91.000.000,00	48.250.000,00	43.425.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	10.320.800,00	7.720.800,09	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			116.727.957,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	34 Unit	53.230.000,00	27.560.000,00	23.584.000,00	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			62.087.472,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah temuan BPK Tingkat Kapabilitas APIP				0 4+	0 4+	754.684.420,02	449.978.800,00	216.281.704,00							890.229.139,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal Persentase PD yang menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP PD; Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	-			444 laporan 70-80 (BB) Nilai 80 undefined	444 laporan 70-80 (BB) Nilai 80 undefined	631.158.020,02	367.892.700,00	367.892.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		746.147.946,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	26.014.000,02	18.010.000,00	8.978.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			37.966.320,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				24 Laporan	12 Laporan	293.464.000,00	94.993.200,00	30.929.280,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			343.462.810,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	000	Reviu Laporan Kinerja																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				76 Laporan	76 Laporan	130.340.000,00	106.440.000,00	55.621.100,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			152.028.576,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	000	Reviu Laporan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				41 Laporan	41 Laporan	41.080.420,00	47.140.000,00	25.605.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			48.508.243,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	000	Pengawasan Desa																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				75 Laporan	75 Laporan	117.788.000,00	72.990.000,00	41.057.324,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			137.971.123,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	22.471.600,00	28.319.500,00	14.004.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			26.210.874,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat melalui APH Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat melalui APIP	-			100 %	100 %	123.526.400,00	82.086.100,00	82.086.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		144.081.193,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	000	Penanganan Penyelesaian Kerugian																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	0 Laporan	3.084.000,00	1.545.600,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			3.597.178,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				29 Laporan	18 Laporan	120.442.400,00	80.540.500,00	40.086.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			140.484.015,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penjaminan Kualitas SPIP Nilai Penjaminan Kualitas MRI Nilai Penjaminan Kualitas IEPK				3 Level 3 Indeks 3 I undefined	3 Level 3 Indeks 3 I undefined	430.170.560,00	199.337.890,00	41.599.156,00							562.522.541,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-			2 rekomendasi	2 rekomendasi	127.337.600,00	47.980.000,00	47.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		149.109.777,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	0 Rekomendasi	12.427.600,00	0,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			14.495.553,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	114.910.000,00	47.980.000,00	22.497.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			134.614.224,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Nilai Penjaminan Kualitas IEPK Nilai Penjaminan Kualitas MRI Nilai Penjaminan Kualitas SPIP Jumlah PD yang berpredikat ZI/WBK Nilai PMPRB PD/Pemda	-			3 Indeks 3 Indeks 3 undefined	3 Indeks 3 Indeks 3 undefined	302.832.960,00	151.357.890,00	151.357.890,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	-		413.412.764,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			59.022.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				34 perangkat daerah	14 perangkat daerah	42.009.760,00	7.400.000,00	3.700.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			49.583.384,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	2 Kegiatan	226.818.800,00	126.798.890,00	6.895.556,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			264.561.448,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	34.004.400,00	17.159.000,00	8.506.600,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			40.245.932,00	INSPEKTORAT DAERAH
												J U M L A H	**7.170.485.953,02**	**6.828.197.748,50**	**6.114.153.651,39**							**10.033.823.564,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Mei 2025 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Sijunjung, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan terdapat pengurangan pagu indikatif sebesar (Rp. 1.056.332.301,63,-) atau 14,73% dari anggaran semula murni Rp. 7.170.485.953,02,- menjadi anggaran perubahan Rp. 6.114.153.651,39,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Inspektorat Tahun 2025.

Muaro Sijunjung, Juni 2025
Inspektur,

WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710705 199803 1 011

RENJA-P

Rencana kerja Perubahan

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung. Tulisan sederhana ini berisi perubahan Renja Tahun 2025. Adanya kebutuhan yang dinamis sehingga perlu diakomodir pada Renja perubahan.

Perubahan tersebut meliputi perubahan target sub kegiatan serta pagu anggaran masing-masing sub kegiatan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk kesempurnaannya, saran, pendapat dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya.

Muaro Sijunjung, Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH

DR.ZEFNIHAN, AP, M.Si
NIP.197410251993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Maksud Perubahan Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Perubahan Rencana Kerja 1
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 3

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II 3

2.2 Isu Strategis Terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 9

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 16

3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan.....16

BAB IV PENUTUP 23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja 4

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja 16

Tabel 3.2 Perubahan Belanja Sub Kegiatan 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Perubahan Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki dokumen Renja, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dimana dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, telah terjadi perubahan kebutuhan yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahanterhadap Renja Tahun 2024. Beberapa faktor, baik eksternal maupun internal, menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.

Adapun faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2025 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, perubahan target sub kegiatan, dan pagu anggaran.

1.2 Tujuan Perubahan Rencana Kerja

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupeten Sijunjung dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

2. Menjadi dasar penyesuaian nama kegiatan, perubahan indikator Kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung mencakup adanya perubahan target dan indikator serta pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan serta mematuhi Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efesiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Dalam Renja Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung merencanakan 3 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp.30.798.608.370,- Namun, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung TA 2024, alokasi anggaran Sekda sebesar Rp.31.283.921.489,- Terdapat selisih sebesar Rp.485.313.119,- antara anggaran dalam Renja dengan anggaran di DPA 2025 karena menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II (April) Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Table 2.1

Realisasi belanja sampai triwulan II

NO.	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERGESERAN	REALISASI S/D TW II	SISA PAGU
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH	**31.283.921.489**	**24.676.509.607**	**7.269.423.695**	**17.407.085.912**
1.	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**	**26.414.736.934**	**21.827.719.341**	**6.725.999.766**	**15.101.719.575**
	BAGIAN UMUM	**25.918.404.084**	**21.504.700.031**	**6.647.829.016**	**14.856.871.015**
1.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.210.000**	**6.212.500**	**1.650.000**	**4.562.500**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.890.000	4.890.000	1.650.000	3.240.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.320.000	1.322.500	0	1.322.500
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.847.748.240**	**10.898.675.291**	**3.130.819.357**	**7.767.855.934**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.608.120.890	10.739.063.191	3.083.206.857	7.655.856.334
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.131.250	155.116.000	47.612.500	107.503.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.496.100	4.496.100	0	4.496.100
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.557.308.800**	**1.869.602.300**	**791.949.050**	**1.077.653.250**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	358.699.900	150.666.700	36.879.200	113.787.500

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.498.621.900	1.411.071.900	548.015.168	863.056.732
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699.987.000	307.863.700	207.054.682	100.809.018
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**103.937.500**	**291.060.000**	**99.822.300**	**191.237.700**
	Pengadaan Mebel	3.937.500	191.060.000	0	191.060.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	99.822.300	177.700
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.702.455.238**	**2.187.758.222**	**731.951.417**	**1.455.806.805**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.492.719.150	1.492.719.150	427.988.670	1.064.730.480
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.209.736.088	695.039.072	303.962.747	391.076.325
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.955.934.976**	**1.741.129.476**	**484.505.155**	**1.256.624.321**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	497.465.326	455.565.326	149.273.364	306.291.962
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	569.624.150	515.624.150	151.205.900	364.418.250
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	634.620.500	550.159.000	153.978.891	396.180.109
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	254.225.000	219.781.000	30.047.000	189.734.000
9.	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**753.293.147**	**855.359.649**	**239.862.193**	**615.497.456**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	663.293.147	765.359.649	188.383.143	576.976.506
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90.000.000	90.000.000	51.479.050	38.520.950
10.	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**4.990.516.183**	**3.654.902.593**	**1.167.269.544**	**2.487.633.049**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.997.643.000	1.606.455.268	455.712.488	1.150.742.780
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	951.858.290	713.710.025	238.332.422	475.377.603

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.041.014.893	1.334.737.300	473.224.634	861.512.666
11.	**Penataan Organisasi**	**183.832.850**	**84.881.710**	**25.078.500**	**59.803.210**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41.613.100	32.475.500	7.021.000	25.454.500
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	52.657.300	10.466.750	1.263.000	9.203.750
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44.289.700	23.794.050	9.031.500	14.762.550
	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pekayanan Publik dan Tata Laksana	22.399.250	10.379.410	0	10.379.410
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	22.873.500	7.766.000	7.763.000	3.000
12.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**312.500.000**	**238.137.600**	**53.092.250**	**185.045.350**
	Fasilitasi Keprotokolan	144.000.000	122.286.100	30.443.000	91.843.100
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	68.000.000	51.841.100	8.965.250	42.875.850
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100.500.000	64.010.400	13.684.000	50.326.400
2.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**4.373.080.505**	**2.579.515.827**	**474.220.725**	**2.105.295.102**
1.	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**345.516.245**	**143.624.967**	**18.785.200**	124.839.767
	Penataan Administrasi Pemerintahan	39.853.795	25.168.987	6.462.700	18.706.287
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	147.025.500	32.851.230	590.000	32.261.230
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	158.636.950	85.604.750	11.732.500	73.872.250
2.	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**3.667.894.960**	**2.130.985.600**	**434.770.675**	**1.696.214.925**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.645.000.000	1.448.119.000	116.038.175	1.332.080.825

	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	648.432.060	471.358.600	318.732.500	152.626.100
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	374.462.900	211.508.000	0	211.508.000
3.	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**345.948.500**	**298.118.400**	**20.664.850**	**277.453.550**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	36.770.200	21.767.500	7.947.500	13.820.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum	254.195.200	249.533.500	6.464.350	243.069.150
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	54.983.100	26.817.400	6.253.000	20.564.400
4.	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**13.720.800**	**6.786.860**	**0**	**6.786.860**
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6.845.100	2.661.400	0	2.661.400
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.797.300	1.078.380	0	1.078.380
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5.078.400	3.047.080	0	3.047.080
C.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**496.104.050**	**269.274.439**	**69.203.204**	**200.071.235**
1.	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**88.994.500**	**42.567.810**	**20.408.950**	**22.158.860**
	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	43.715.100	20.177.450	9.076.500	11.100.950
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25.751.450	15.865.650	7.052.200	8.813.450
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	8.208.250	4.192.310	2.651.750	1.540.560
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	11.319.700	2.332.400	1.628.500	703.900

2.	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**92.453.850**	**43.399.139**	**18.307.100**	**25.092.039**
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	15.814.900	13.126.740	4.096.600	9.030.140
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	19.163.110	4.258.399	0	4.258.399
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	57.475.840	26.014.000	14.210.500	11.803.500
3.	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**191.717.800**	**107.367.050**	**24.711.904**	**82.655.146**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	135.767.200	71.121.950	17.325.404	53.796.546
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	10.317.100	7.181.100	3.452.000	3.729.100
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	45.633.500	29.064.000	3.934.500	25.129.500
4.	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**122.937.900**	**75.940.440**	**5.775.250**	**70.165.190**
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	96.948.200	59.096.920	641.500	58.455.420
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8.338.000	4.187.700	1.739.000	2.448.700
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	17.651.700	12.655.820	3.394.750	9.261.070

2.2 Isu Strategis Terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan supporting system kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan orgamsas1, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dikategorikan baik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja pada Tahun 2024.
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan efesiensi belanja Pemerintah Daerah.

Pengertian masalah/hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan / hambatan yang terdapat di Sekretariat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas; dan
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah perlu ditingkatkan;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah belum optimal;
3. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah perlu ditingkatkan
4. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum optimal;
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat masih perlu ditingkatkan;
6. Penataan Administrasi Pemerintahan belum optimal;
7. Pengelolaan Administrasi Kewielayahan perlu ditingkatkan;
8. Penataan Organisasi perlu ditingkatkan;
9. Fasilitasi Bantuan Hukum belum optimal;
10. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian perlu ditingkatkan; dan
11. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam perlu ditingkatkan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya;
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup Administrasi kegiatan dan anggaran;
4. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
5. Belum semua Perangkat Daerah memahami mekanisme kerjasama daerah;
6. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia;

7. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
8. Perlunya sistem pelaporan keuangan dan kinerja yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
9. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung antara lain:

1. Mekanisme dan pola kerja pada setiap Sub Koordinator belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; dan
4. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Sijunjung adalah:

1. Terlalu sering beru bahnya peraturan peru ndang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menye babkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
3. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah; dan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2021-2025, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik;
3. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
5. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah; dan
6. Pelaksanaan efesiensi belanja.

Adapun penjabaran secara umum 6 (enam) isu-isu strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang• undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada Tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga Perangkat Daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, system pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung

penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawa1, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana prasarana, mekanisme/prosedur, Sumber Daya Manusia, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan penzman, transparansi/kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

d. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga Kabupaten terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya

kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat".

Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tu ntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

f. Pelaksanaan efesiensi belanja

Pelaksanaan efisiensi belanja daerah adalah proses optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah daerah agar mencapai hasil yang maksimal dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Ini termasuk mengurangi pemborosan, mengalokasikan anggaran pada program prioritas, dan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi

4. Formulasi Isu-Isu Penting

Formulasi isu-isu penting dalan hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:

a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan otonomi daerah yang bertanggung jawab;
b. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;
c. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang menunjang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 menetapkan visi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 adalah “Kabupetn Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani”. Misi RPJMD yang berkaitan dengan dengan tugas Sekretariat Daerah adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif, Efesien dan Responsif berbasis Reformasi Birokrasi” dalam misi tersebut difokus kedalam peningkatan kualitas Birokrasi dan kualitas Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Sama halnya dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupeten Sijunjung Tahun 2025 menggunakan perumusan strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada pohon masalah yang telah dirumuskan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif, efesien dan responsif berbasis refosmasi birokrasi				
TUJUAN	**SASARAN STRETEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Nilai Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai	80-83
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,7-3,8
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80
Meningkatnya Kinerja Layanan Publik yang berjualitas, inovatif dan berintegritas	Meningkatnya Kualitas UKPP	Persentase UKPP yang mencapai Pelayanan Prima	%	100

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan TW II dan adanya perubahan kebutuhan Perangkat Daerah, maka pada Renja Perubahan 2025 ini dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran beserta indikator dan target sub kegiatan, kegiatan maupun pada program. Rincian perubahan pada sub kegiatan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perubahan Belanja Sub Kegiatan

NO.	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT DAERAH	**31,283,921,489**	**28,876,647,972**	**-2,407,273,517**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENN/KOTA**	**26,414,736,934**	**26,081,026,661**	**-333,710,273**
1.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7,210,000**	**6,212,500**	**-997,500**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,890,000	4,890,000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,320,000	1,322,500	-997,500
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11,847,748,240**	**11,051,523,689**	**-796,224,551**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,608,120,890	10,835,825,758	-772,295,132
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235,131,250	211,201,831	-23,929,419
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,496,100	4,496,100	0
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3,557,308,800**	**2,545,343,800**	**-1,011,965,000**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	358,699,900	226,451,200	-132,248,700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,498,621,900	1,966,802,900	-531,819,000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699,987,000	352,089,700	-347,897,300
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**103,937,500**	**1,768,055,000**	**1,664,117,500**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	0	1,409,800,000	1,409,800,000
	Pengadaan Mebel	3,937,500	241,395,000	237,457,500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000	113,120,000	13,120,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0	3,740,000	3,740,000
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,702,455,238**	**2,653,026,662**	**-49,428,576**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,492,719,150	1,399,014,150	-93,705,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1,209,736,088	1,254,012,512	44,276,424
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,955,934,976**	**1,741,129,476**	**-214,805,500**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	497,465,326	455,565,326	-41,900,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	569,624,150	515,624,150	-54,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	634,620,500	550,159,000	-84,461,500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	254,225,000	219,781,000	-34,444,000
9.	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**753,293,147**	**897,359,649**	**144,066,502**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	663,293,147	767,359,649	104,066,502
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90,000,000	130,000,000	40,000,000
10.	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**4,990,516,183**	**5,145,497,575**	**154,981,392**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,997,643,000	2,711,201,550	713,558,550

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	951,858,290	913,544,325	-38,313,965
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2,041,014,893	1,520,751,700	-520,263,193
11.	**Penataan Organisasi**	**183,832,850**	**74,720,210**	**-109,112,640**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41,613,100	29,391,500	-12,221,600
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	52,657,300	8,798,750	-43,858,550
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44,289,700	20,684,550	-23,605,150
	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pekayanan Publik dan Tata Laksana	22,399,250	8,079,410	-14,319,840
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	22,873,500	7,766,000	-15,107,500
12.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**312,500,000**	**198,158,100**	**-114,341,900**
	Fasilitasi Keprotokolan	144,000,000	96,394,600	-47,605,400
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	68,000,000	47,906,600	-20,093,400
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100,500,000	53,856,900	-46,643,100
2.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**4,373,080,505**	**2,543,144,747**	**-1,829,935,758**
1.	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**345,516,245**	**143,625,567**	**-201,890,678**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	39,853,795	40,998,587	1,144,792
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	147,025,500	17,022,230	-130,003,270
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	158,636,950	85,604,750	-73,032,200
2.	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**3,667,894,960**	**2,108,701,800**	**-1,559,193,160**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,645,000,000	1,514,036,500	-1,130,963,500
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	648,432,060	397,002,000	-251,430,060

	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	374,462,900	197,663,300	-176,799,600
3.	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**345,948,500**	**284,030,100**	**-61,918,400**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	36,770,200	17,833,000	-18,937,200
	Fasilitasi Bantuan Hukum	254,195,200	243,314,200	-10,881,000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	54,983,100	22,882,900	-32,100,200
4.	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**13,720,800**	**6,787,280**	**-6,933,520**
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6,845,100	3,740,200	-3,104,900
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1,797,300	0	-1,797,300
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5,078,400	3,047,080	-2,031,320
C.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**496,104,050**	**252,476,564**	**-243,627,486**
1.	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**88,994,500**	**42,566,835**	**-46,427,665**
	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	43,715,100	20,177,195	-23,537,905
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25,751,450	15,865,490	-9,885,960
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	8,208,250	4,191,750	-4,016,500
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	11,319,700	2,332,400	-8,987,300
2.	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**92,453,850**	**39,464,639**	**-52,989,211**
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	15,814,900	13,126,740	-2,688,160
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	19,163,110	4,258,399	-14,904,711
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	57,475,840	22,079,500	-35,396,340
3.	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**191,717,800**	**95,570,550**	**-96,147,250**

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	135,767,200	63,252,950	-72,514,250
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	10,317,100	7,181,100	-3,136,000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	45,633,500	25,136,500	-20,497,000
4.	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**122,937,900**	**74,874,540**	**-48,063,360**
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	96,948,200	59,096,920	-37,851,280
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8,338,000	4,181,500	-4,156,500
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	17,651,700	11,596,120	-6,055,580

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupeten Sijunjung menjadi acuan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai pengendali dalam pencapaian kinerja. Dengan adanya RENJA ini diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menghasilkan pelayanan yang bersifat cepat, akurat dan transparan.

Perubahan target dan pagu anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan yang dinamis. Dalam pelaksanaannya kritik dan saran yang membangun dibutuhkan sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Muaro Sijunjung, Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH

DR.ZEFNIHAN, AP, M.Si
NIP.197410251993111001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personal Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sijunjung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya yang ada.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Perubahan Rencana Kerja merupakan perubahan rencana dalam satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah langkah yang akan datang tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Pembangunan tahunan di lingkungan Satuan Kerja, merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang

merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan Pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adnya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Daerah

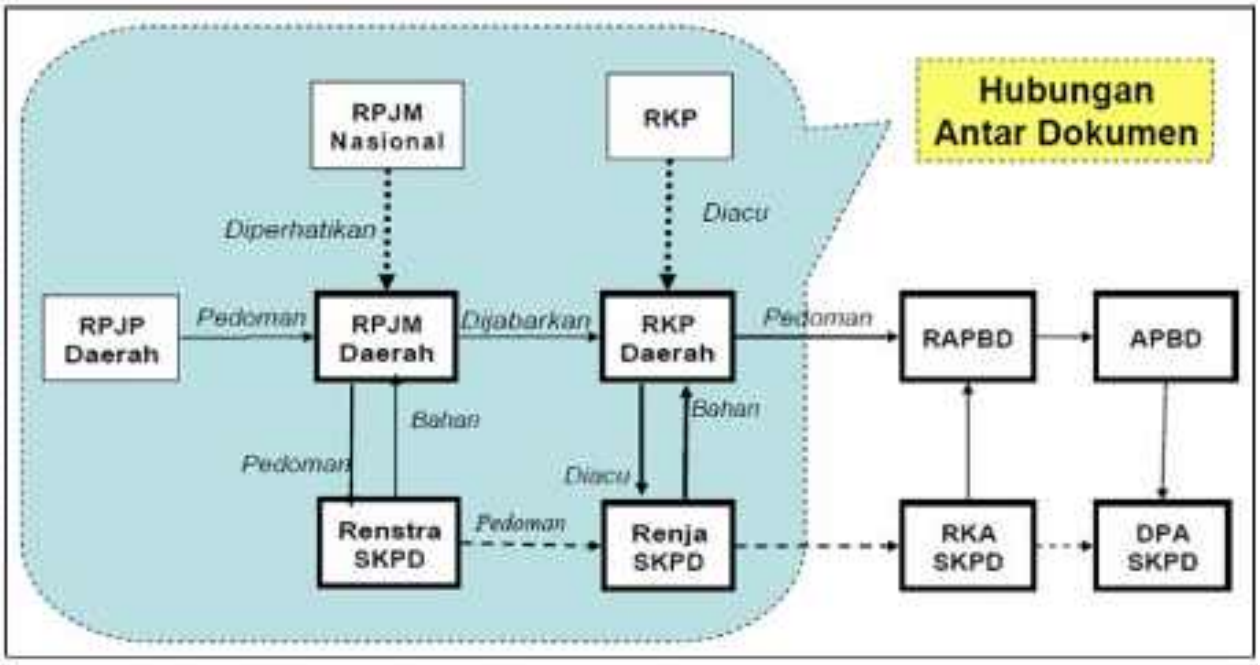

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintahan dalam satu tahun. Adapun bagan alur tahapan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah:

Gambar 1.2

Alur tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

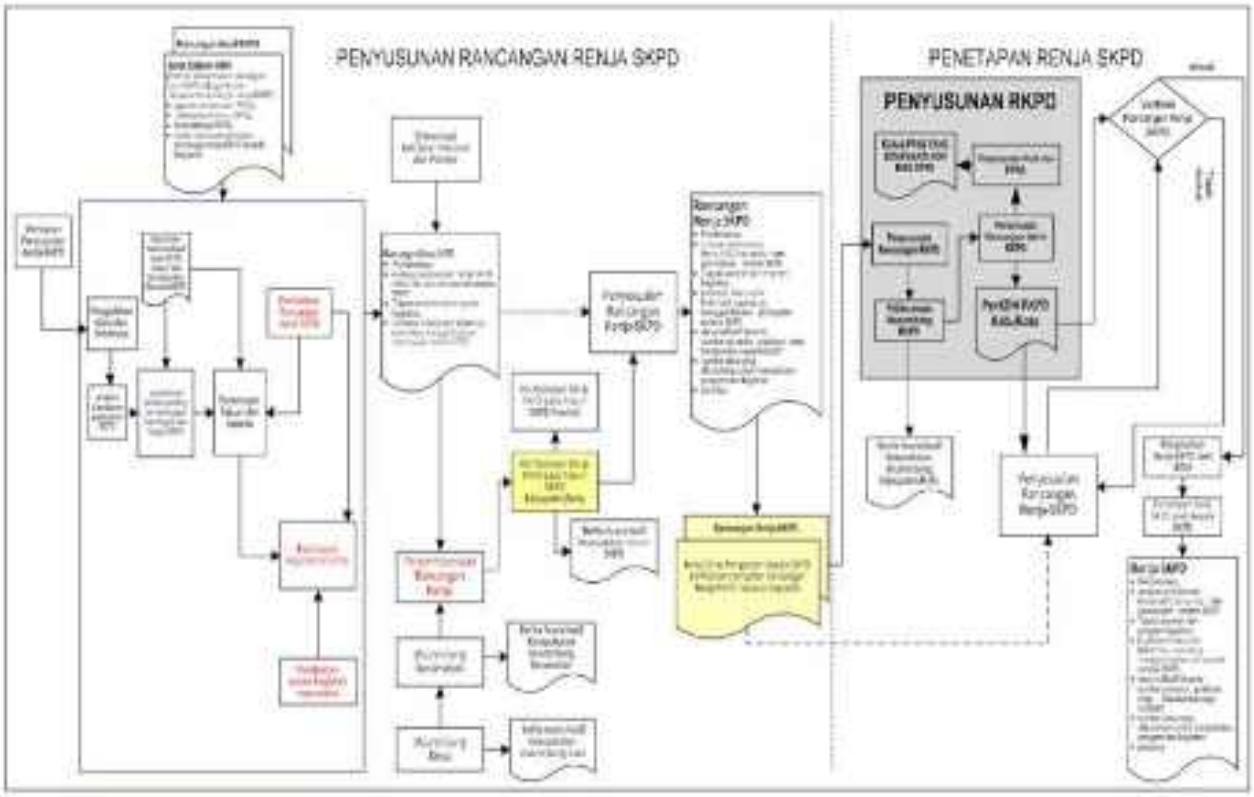

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Neraga republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

7 Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

8 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK.

9 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 15. Agustus 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD

15 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025

16 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

17 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

18 Peraturan Bupati Sijunjung No 32 tahun 2021 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

19 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor ..... tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan. Pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk:

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD.

b. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional

c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.

d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kineerja program dan kegiatan.

e. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih professional.

f. Meningkatkan peran apparat pengawas intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah.

g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN SAMPAI TRIWULAN II 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perubahan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja yang dievaluasi dan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%).

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja TW II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan anggaran sebesar Rp3.557.041.274,00 dengan realisasi sebesar Rp808.611.019,00 atau 22,73%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini terbagi menjadi 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

Dengan anggaran sebesar Rp40.456.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.784.000,00. atau 6,80%. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran sebesar Rp13.634.000,00 dengan realisasi Rp2.070.000,00 atau 20,42%

1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran sebesar Rp26.822.500,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran sebesar Rp2.920.874.290,00 dengan

realisasi Rp712.398.111,00 atau 12,22%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terbagi menjadi 2 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Dengan anggaran sebesar Rp2.915.650.290,00 dengan realisasai sebesar Rp712.398.111,00 atau 24,43%

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Dengan anggaran sebesar Rp5.224.000,00 dengan realisasai sebesar Rp0,00 atau 0,00%

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Anggaran sebesar Rp5.224.000,00 dengan realisasi Rp2.928.000,00 atau 28,02%. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah untuk tahun 2024 terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

1.3.1. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD.
Dengan anggaran sebesar Rp5.224.000,00 dan realisasai sebesar Rp2.928.000,00 atau 56,05%.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dengan Anggaran sebesar Rp520.149.325,00 dan realisasi sebesar Rp199.360.980,00 atau 28,48%. Kegiatan ini terdiri dari 10 Sub Kegiatan antara lain:

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Anggaran sebesar Rp4.993.250,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Anggaran sebesar Rp201.663.550,00 dengan realisasi Rp19.325.250,00 atau 9,58%.

1.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan.
Anggaran sebesar Rp11.526.300,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,0%.

1.4.4. Fasilitas Kunjungan Tamu.
Anggaran sebesar Rp2.224.100,00 dengan realisasi Rp168.000,00 atau 7,55%.

1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Anggaran sebesar Rp60.765.150,00 dengan realisasi Rp10.598.850,00 atau 17,44%.

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Anggaran sebesar Rp195.797.284,00 dan realisasi sebesar Rp50.366.108,00 atau 17,21%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Dengan anggaran sebesar Rp90.528.284,00 dengan realisasi sebesar Rp24.565.108,00 atau 27,14%.

1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan anggaran sebesar Rp105.269.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.801.000,00 atau 24,51%.

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Anggaran sebesar Rp113.516.850,00 dan realisasi sebesar Rp10.042.700,00 atau 14,40%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Dengan anggaran sebesar Rp30.336.850,00 dan realisasi Rp7.596.000,00 atau 25,04%.

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan.

Dengan anggaran sebesar Rp65.000.000,00 dan realisasi Rp2.446.700,00 atau 3,76%.

1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada tahun 2025 Rp18.180.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Dengan anggaran sebesar Rp96.594.350,00 dengan realisasi Rp16.829.000,00 atau 17,42%. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:

2.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Anggaran sebesar Rp96.594.350,00 dengan realisasi sebesar Rp16.829.000,00 atau sebesar 17,42%. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan antara lain:

2.1.1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk.

Anggaran sebesar Rp37.941.600,00 dengan realisasi sebesar Rp6.116.500,00 atau sebesar 16,12%.

2.1.2. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Peristiwa

Kependudukan.

Anggaran sebesar Rp58.652.750,00 dengan realisasi sebesar Rp10.712.500,00 atau sebesar 18,26%.

3. Program Pencatatan Sipil

Dengan anggaran sebesar Rp238.150.200,00 dan realisasi Rp17.815.350,00 atau 7,48%. Program Pencatatan Sipil ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:

3.1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Anggaran sebesar Rp238.150.200,00 dengan realisasi sebesar Rp17.815.350,00 atau 7,48% terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

3.1.1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.

Anggaran sebesar Rp38.150.200,00 dengan realisasi Rp7.048.750,00 atau 18,48%.

3.2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

3.2.1. Bimbingan Tekhnis Terkait Pencatatan Sipil. Anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp200.000.000,00 dengan Realisasi Rp10.766.600 atau 7,05%.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Anggaran sebesar Rp47.716.050,00 dengan realisasi sebesar Rp7.535.000,00 atau 15,79%. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Anggaran sebesar Rp34.404.650,00 dengan realisasi Rp7.535.000,00 atau 10,90%. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

4.1.1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Anggaran sebesar Rp34.404.650,00 dengan realisasi sebesar Rp7.535.000,00 atau 10,90%.

4.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Anggaran sebesar Rp13.311.400,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

4.2.1. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan.

Anggaran sebesar Rp13.311.400,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Dengan anggaran sebesar Rp14.014.800,00 dan realisasi Rp0,00 atau 0,00%. Program ini terdiri 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu:

5.1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Anggaran sebesar Rp14.014.800,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

5.1.1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Anggaran sebesar Rp14.014.800,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung s.d. Triwulan II pada 5 program yang mencakup 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan dapat dijelaskan sesuai dengan format tabel E.81 pada lampiran Permendagri no. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN : s/d Triwulan II TAHUN 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcame) / Kegiatan intermediate outcame) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								I		II		III		IV								
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5 x 100		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Persentase terpenuhinya indikator pelayanan publik Indeks kepatuhan arsip Persentase pencapaian komponen akuntabilitas kinerja	100 %	20.846.796.455		14.823.564.758		3.557.041.274		808.611.019		1.627.657.393		-		-	100	2.436.268.412		23.682.592.326		113,60	

1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen Renstra dan Renja PD**	**85%**	**373.437.200**		**276.384.800**		**40.456.500**		**2.784.000**		**2.784.000**		**-**		**-**	-	**5.568.000**		**281.952.800**		75,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu					100																
		Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu					100																
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18	122.437.200	3	52.454.200	3	13.634.000		2.784.000	1	2.784.000	-				1	5.568.000		58.022.200		47,39	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	18	97.000.000	6	56.886.500				-	1	0					1	-		56.886.500		58,65	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96	57.000.000		24.740.000						0						-					
	3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18	154.000.000	6	167.044.100	3	26.822.500	-	-	6	0					6	-		167.044.100		108,47	
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi keuangan**	**100 %**	**13.072.282.555**	**100**	**9.091.981.596**	**100**	**2.920.874.290**		**712.398.111**		**1.466.677.482**		-		-		**2.179.075.593**		11.271.057.189		86,22	
			Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel					**100**																
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang	12.910.282.555	64	9.060.803.272	22 orang	2.915.650.290	23	712.398.111	23	1.466.677.482					22	2.179.075.593		11.239.878.865		87,06	

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPd	6	162.000.000	3	31.178.324	1	5.224.000		-		0				-	-	-		31.178.324		19,25	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		46.000.000		15.521.000				-		0						-					
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi barang milik daerah**	**100 %**	**213.000.000**		**47.667.450**		**5.224.000**	-	**2.928.000**		**2.928.000**		-		-		**5.856.000**		53.523.450		25,13	
		Persentase kelengkapan administrasi Barang Milik Daerah pada OPD																					
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang Milik Daerah SKPD		145.000.000	1 dokumen	25.259.000				-								-					
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	68.000.000	6	22.408.450	2	5.224.000	-	2.928.000	1	2.928.000				-	1	5.856.000		28.264.450		41,57	

4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**928.250.000**		**257.994.224**		-		-		**0**		-		-		-		257.994.224		27,79	
		Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu																					
	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah paket pakaian dinas besrta atribut kelengkapannya	209	236.250.000	40	21.204.000		-		-	-		-	-		-	-	-					
	1. Sosialisasi Per-UU	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	66	282.000.000	9	172.332.000		-	-	-				-			-	-		172.332.000		61,11	

2.	Bimtek Implementasi Per-UU	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	64	410.000.000	16	64.458.224	2					0					-	-		64.458.224		15,72	
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**3.036.885.000**		**2.859.740.900**		**281.172.350**		**30.092.100**		**49.669.325**		**-**		**-**	**-**	**79.761.425**		2.939.502.325		96,79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi																					
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	68.000.000	18	28.476.900	6	4.993.250	-	-	-	0					-	-		28.476.900		41,88	

2.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	1.590.433.000	18	1.450.964.170	6										-	-		1.450.964.170		91,23	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16	170.000.000	24	223.579.650	8	201.663.550	1	19.325.250		34.307.725					1	53.632.975		277.212.625		163,07	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	147.047.200	6	68.291.600	2	11.526.300		-		0		-			1	-		68.291.600		46,44	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-UU	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4.380	15.540.000	1.825	11.040.000				-		0					-	-		11.040.000		71,04	

	6.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6	127.720.000	3	47.495.725		2.224.100		168.000		168.000					1	336.000		47.831.725		37,45	
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	750.000.000	3	978.743.455	1	60.765.150		10.598.850		15.193.600					1	25.792.450		1.004.535.905		133,94	
	8.	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	42.000	168.144.800	7.100	51.149.400				-		0					-	-		51.149.400		30,42	
6.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**	**925.000.000**		**756.748.855**		-		-		**0**		-		-	-	-		756.748.855		81,81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Persentase BMD pada OPD yang terpenuhi																					
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	91		17	8.800.000		-															
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	23	925.000.000	6	747.948.855	2			-		0	-	-			-	-		747.948.855		80,86	
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantot atau bangunan lainnya yang disediakan	4	290.000.000				-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		-			

7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**1.211.570.000**		**992.544.255**	**100 %**	**195.797.284**		**50.366.108**		**85.069.786**		**-**		**-**	-	**135.435.894**		1.127.980.149		93,10	
		Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi																					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	599.000.000	3	449.003.441	1	90.528.284		24.565.108		41.852.452					4	66.417.560		515.421.001		86,05	
	2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	205.000.000	3	97.484.400		-	-	-		0	-	-			1 laporan	-		97.484.400		47,55	

3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	407.570.000	3	446.056.414	1	105.269.000		25.801.000		43.217.334					-	69.018.334		515.074.748		126,38	
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**	**1.086.371.700**		**540.502.678**		**113.516.850**		**10.042.700**		**20.528.800**		**-**		**-**		**30.571.500**		571.074.178		52,57	
		Persentase aset OPD dalam kondisi baik																					
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	60.673.700	2 Unit		2 Unit	30.336.850		7.596.000		12.336.000					-	19.932.000		19.932.000		32,85	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	789.689.000	17 Unit	424.225.657	17 Unit	65.000.000	17 Unit	2.446.700		5.542.800						7.989.500					

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	113.000.000	5	18.125.000		18.180.000				2.650.000						2.650.000					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	123.009.000	1 Unit	98.152.021						0					1	-		98.152.021		79,79	
2.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**96**	**929.000.000**	85,97	**895.140.508**	90	**96.594.350,0**		**16.829.000,0**		**32.408.500**		-	90 %	-	90%	**49.237.500**		**944.378.008**		101,66	
1.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kepemilikan KK**	**100**	929.000.000	98	**895.140.508**	**14.000**	**96.594.350**	**3.969**	**16.829.000**	**3.318**	**32.408.500**		-		-		**49.237.500**		**944.378.008**		101,66	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio penduduk nusia 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el	**100**		95		**10.000**		4.860		**4.457**												
		Persentase anak 0-17 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	**55**		40		**8.000**		301		**247**												
		Jumlah Penerbitan SKPWNI	**10.000**				**2.500**		523		**561,0**												

1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan da Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	99.000	450.000.000	40.607	334.621.072	16.500	37.941.600	4.492	6.116.500		12.228.500					4.492	18.345.000		352.966.072		78,44	
2.	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	6	479.000.000	3	560.519.436	1	58.652.750	5.161	10.712.500		20.180.000					5.161	30.892.500		591.411.936		123,47	
3.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pencatatan Sipil**	**96**	**715.000.000**	85,97	**361.028.840**	90	**438.150.200,0**	-	**17.815.350,0**		**47.339.600**		-	98 %	-	98%	**65.154.950**		**426.183.790**		59,61	
1.	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 17 tahun	100	**715.000.000**	98	**361.028.840**	100 %	**238.150.200,0**		**17.815.350,0**		**47.339.600**		-		-		**65.154.950**		**426.183.790**		59,61	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian yang peristiwa kematiannya dilaporkan	100		98		100 %																
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	50		25		30%																

		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	5		10																			
	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	48.690	715.000.000	20.977	361.028.840	5110	38.150.200	1.235	7.048.750		11.217.750					1.235	18.266.500		379.295.340		53,05		
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	2	749.000.000	2	205.355.550																		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pencatatan Sipil	**Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**					**100 %**	**200.000.000**		**10.766.600**														
	1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					2	200.000.000		10.766.600		36.121.850					-	46.888.450		46.888.450		#DIV/0!		
																	-							
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)		**Indeks Kepuasan Masyarakat pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan**	**96**	**1.255.000.000**	**85,97**	**649.954.129**	**90**	**47.716.050,0**		**7.535.000,0**		**12.804.000**		**-**		**-**	48,57%	**20.339.000**		**764.088.429**		60,88		
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan**	**100**	**1.136.000.000**	100	**571.623.129**	100	**34.404.650,0**		**7.535.000,0**		**12.804.000**		**-**		**-**		**20.339.000**		**591.962.129**		52,11		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	1.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	6	655.000.000	3	233.051.200			0	-		0		-			-	-		233.051.200		35,58	
	2.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	242.220	481.000.000	121.110	338.571.929		34.404.650		7.535.000		12.804.000					-	20.339.000		358.910.929		74,62	
2.		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100 %**	**119.000.000**		**78.331.000**		**13.311.400**		**-**		**0**		**-**		**-**		**-**		**78.331.000**		65,82	
	1.	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat da dapat dipertanggungjawabkan	600	119.000.000	300	78.331.000	70	13.311.400		-		0		-			-	-		78.331.000		65,82	
5.		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyajian data profil perkembangan penduduk**	**100 %**	**225.000.000**		93.795.300	**100 %**	**14.014.800**		**-**		**0**		**-**		**-**	**100 %**	**-**		**93.795.300**		41,69	
	1.	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase penyajian data profil perkembangan penduduk**	**100 %**	**225.000.000**		**93.795.300**		**14.014.800**		**-**		**0**		**-**		**-**		**-**					
	1.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lainnya yang disusun	300	225.000.000	150	93.795.300	40	14.014.800	-	-		0	-				-	-		93.795.300		41,69	
					23.970.796.455		16.823.483.535		4.153.516.674,0		850.790.369		1.720.209.493						2.570.999.862					

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja OPD pada tahun 2025 Triwulan II pada umumnya masih rendah baik dari segi keuangan maupun capaian target kinerja yakni masih dibawah 50%. Adapun faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 antara lain:

1. Banyak Perangkat alat cetak/rekam dokumen kependudukan yang memasuki masa *end of support* sehingga sudah banyak yang tidak bisa dipakai atau rusak dan tidak optimal dalam penggunaan. Hal ini sangat menghambat kegiatan penerbitan dokumen kependudukan baik di bidang pendaftaran penduduk maupun di bidang pencatatan sipil baik di kantor maupun secara keliling. Pada tahun 2023 telah diajukan anggaran untuk 4 set alat cetak rekam dokumen kependudukan tapi karena terjadi refokusing anggaran maka yang terealisasi hanya 2 set alat cetak rekam yang sebenarnya belum bisa mencukupi kebutuhan saat ini. Sampai tahun 2025 ini masih belum bisa dilakukan penambahan untuk alat cetak dan rekam dokumen kependudukan tersebut.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
3. Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan secara online dalam mendukung aplikasi www.pesona.dukcapil.sijunjung.go.id. Ditambah pada saat ini terjadi efisiensi anggaran secara nasional maka saat ini pun

aplikasi pelayanan *online* tidak bisa jalan karena terjadi juga efisiensi di Dinas Kominfo sebagai pemasok jaringan untuk aplikasi www.pesona.dukcapil.sijunjung.go.id. Kondisi ini sangat menghambat kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil karena anggaran untuk pelayanan jemput bola turun ke nagari-nagari, sekolah dan langsung ke rumah-rumah penduduk manula dan penderia disabilitas sudah sangat terdampak oleh efisiensi anggaran jadi pasokan jaringan ini sebenarnya sangat diharapkan.

4. Pengembangan inovasi pelayanan secara daring belum optimal.
5. Masih terdapat bias antar database kependudukan dengan data pelayanan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan oleh pengguna data.
7. Belum optimalnya Sosialisasi penerapan IKD.
8. Belum optimalnya kepemilikan KIA.

Adapun kebijakan/tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan alat cetak dan rekam yang ada.
2. Terus melakukan sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat terkait kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil baik melalui tatap muka saat pelayanan di kantor maupun melalui media sosial serta penerapan IKD.
3. Terus menciptakan dan meningkatkan Inovasi Pelayanan.
4. Melakukan pemutakhiran data melalui pendataan penduduk
5. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi pengguna data secara inten dan mengajukan izin pemberian hak akses

pemanfaatan database kependudukan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Mengkoordinasikan dengan tim anggaran terkait berjalannya kembali PKS dengan pihak ke-3 terkait jaringan untuk berjalannya kembali www.pesona.dukcapil.sijunjung.go.id. Melalui desk Rencana Kerja Perubahan 2025.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Perubahan Renstra tahun 2021-2026.

TC - 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sijunjung

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80,45	80,50	80,85				81	81,65	85,97				

2	Indeks Pelayanan Publik adminduk (IPP)						4,40	4,50	4,60				4,25	4,50	4,60	Terjadi perubahan indikator kinerja pada tahun 2024
3	Nilai SAKIP			73,00	74,40	75,82	77,00	80,32	82,84	74,5	77,25	79,11		82,84	84,00	

Tabel 2.3

Pencapaian kinerja Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sijunjung

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,50	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,91	98,00	99,92	99,80	100,00	100,00	
2	Rasio Penduduk Usia 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el	94,00	95,00	96,00	98,00	100,00	100,00	94,36	96,00	96,10	97,00	98,00	100,00	
3	Persentase anak 0-17 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	30,61	48,54	49,45	58,18	55,00	60,00	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-17 Tahun	95,65	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,66	97,78	98,24	98,40	100,00	100,00	
5	Persentase Cakupan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	95,65	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	15,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	

7	Persentase cakupan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	-	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	9,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	22,86	62,86	100,00	100,00	30,00	100,00	
9	Persentase Penyajian data profil kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta mencapai tujuan, maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menghasilkan produk berupa dokumen kependudukan seperti: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA). Akta Catatan Sipil (Akta kelahiran, Akta kematian, Akta nikah bagi non muslim, Akta

cerai bagi non muslim), Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPWNI) serta dokumen kependudukan lainnya yang memiliki dampak yang sangat luas, baik dalam aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, kajian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan i su-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran dan akta kematian karena masyarakat butuh dokumen kependudukan apabila ada urusan yang mengharuskan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan pelayanan mandiri terhadap dokumen kependudukannya melalui aplikasi www.pesona.dukcapil.go.id
3. Adanya bias antara Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan data pelayanan
4. Banyaknya akta kelahiran yang telah dimiliki oleh masyarakat tetapi belum tercatat di database kependudukan
5. Belum ada aplikasi yang terintegrasi dengan pengguna data
6. Kurangnya Personil yang pengolahan pelayanan online dalam mendukung *Dukcapil Go Digital* sehingga dokumen yang masuk melalui aplikasi/online lama terselesaikan. Untuk tahun 2025 hanya ada 1 orang operator *online.*
7. Berdasarkan perhitungan sampai akhir tahun 2024 semester II masih ada wajib rekam yang belum melakukan perekaman KTP-el yaitu sebanyak 3.068 wajib KTP atau sebesar 1,74%, dengan pagu indikatitif

yang diberikan untuk tahun 2025 diperkirakan belum dapat menuntaskan sisa yang belum rekam tersebut.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Sijunjung, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sijunjung yakninya misi 1 Kepala Daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online*.

   Salah satu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung menuju *Dukcapil Go Digital* dan Pemerintahan Sijunjung menuju *e-Govermen* maka dikembangkan suatu aplikasi yang bisa melayani masyarakat secara *online* hampir untuk semua dokumen kependudukan kecuali rekam dan cetak KTP-el dan KIA.

Namun pelayan secara *online* ini masih belum optimal baik di masyarakat sebagai pengguna maupun Dinas Dukcapil sendiri sebagai pelaksana. Dari segi Dinas Dukcapil sendiri masih lambatnya pengolahan dokumen *online* karena kekurangan operator. Disamping itu suplay jaringan dari Diskominfo juga terputus semenjak adanya efisiensi anggaran sejak awal tahun 2025 sehingga aplikasi layanan online www.pesona.dukcapil.go.id. tidak bisa lagi beroperasi.

2. Masih Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

   Sumber Daya Aparatur berkualitas manjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satu unsur terwujudnya pelayanan yang membahagiakan masyarakat adalah Sumber Daya Manusia yang terampil dan profesional. Melalui berbagai bimbingan teknis, diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat tanpa mengabaikan kaidah/norma yang harus dipatuhi. Pada setiap tempat perekaman data kependudukan diperlukan minimal 12 orang petugas terampil dan profesional. 4 orang sebagai tenaga administrasi atau petugas registrasi dan 8 orang sebagai operator yang masing-masing bertanggungjawab atas pelayanan SIAK dan perekaman data KTP elektronik. Namun dalam bidang pelayanan pelayanan secara daring

masih kekurangan operator sehingga terkadang terjadi keterlambatan memproses dokumen daring. Begitu juga dalam hal pengolahan dan penyajian data kependudukan masih kekurangan personil yang kompeten.

3. Masih kurangnya pelaporan Pencatatan Akta Kelahiran secara umum.

   Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base kependudukan yang akurat dan penerbitan akta kelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

   Kesadaran masyarakat di Kabupaten Sijunjung dalam memiliki akta kelahiran masih rendah kalau dilihat secara keseluruhan.

   Beranjak dari permasalahan tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Pencatatan Sipil Nasional, bahwa **"Semua anak Indonesia (usia 0-17 tahun) tercatat kelahirannya"**, terutama anak usia 0-5 tahun, kegiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan ditunjang dengan berbagai kegiatan sosialisasi. Pelayanan penerbitan akta kelahiran terutama bagi bayi 0-60 hari, secara langsung dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah persyaratan terpenuhi secara lengkap. Demikian pula pelayanan kepada pemohon yang berusia lebih dari 60 hari atau lebih dari satu tahun, sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan tanpa harus melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu.

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian.

   Sebenarnya akta kematian mempunyai peran yang sama pentingnya dengan akta kelahiran bagi pemerintah yang berguna untuk validasi data kependudukan sehingga pemerintah memiliki data akurat terkait jumlah penduduk dan data penduduk yang akurat akan sangat membantu dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Bagi masyarakat sendiri banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya akta kematian diantaranya dengan terbitnya akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia, bagi ahli waris akan lebih mudah disusun pembagian harta waris, lebih mudah dalam mengurus klaim asuransi, dana taspen, dana pensiun dan lain-lain. Namun pada kenyataannya masyarakat masih enggan mengurus akta kematian.

5. *Belum optimalnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pengguna Data*

   Pada tahun 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan semua OPD di kabupaten Sijunjung. Namun dalam

perkembangannya belum semua OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan maka selama tahun 2020 dilakukan rapat-rapat secara inten dengan OPD dan Instansi terkait yang bertujuan akhir pemberian Hak Akses kepada OPD dan Instansi terkait. Untuk tahun 2021 telah diajukan permohonan izin pemberian hak akses untuk 9 OPD dan Instansi terkait,. Sampai dengan tahun 2022 telah diajukan PKS sebanyak 14 OPD dan pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan PKS dengan 34 OPD yang ada di Kabupaten Sijunjung atau 100% namun belum begitu terlihat pemanfaatannya pada pihak pengguna.

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari

pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.4

Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung

Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat	IPP Adminduk	Nilai	4,4	4,25	96,59

Meningkatkan kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	80	80,17	100,21

Dari 2 Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 1 sasaran belum mencapai target yang ditetapkan namun secara capaian kinerja sudah berada pada kategori sangat baik.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan antara lain:

A. IPP Adminduk (Indeks Pelayanan Publik Adminduk) :
   Penyebab kegagalan capaian indikator sasaran IPP Adminduk yakni 4,25 dari target yang ditetapkan 4,40. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Survey Kepuasan Masyarakat serta penilaian PEKPPP Kemenpan-RB terkait pelayanan publik.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Lambatnya respon dalam pelayanan online disebabkan oleh beberapa hal antara lain Jarkomdat (Jaringan konunikasi data) dengan Pusat (Ditjend Dukcapil) terganggu. Disamping itu kurangnya tenaga operator *online* sehingga respon terhadap layanan *online* dirasa lambat. Terkait kebijakan efisiensi anggaran secara nasional ikut memberikan dampak pada jaringan aplikasi pelayanan online www.pesona.dukcapil.sijunjung.go.id yang tak bisa lagi berjalan karena ikut ter efisiensi.
2. Begitu juga dengan pelayanan tatap muka, pelayanan tatap muka dirasa lama jika terjadi gangguan pada Jarkomdat (Jaringan komunikasi data) dengan Pusat (Ditjend Dukcapil). Dan pelayanan yang bolak balik karena kebanyakan masyarakat tidak membawa dokumen yang lengkap sehingga waktu pengurusan masih ada yang kurang.
3. Kurangnya pelatihan khusus/bimtek terkait pelayanan prima baik bagi tenaga pelayanan *Front Office/ back office* maupun bagi pengelola administrasi kependudukan sehingga kopetensi SDM menjadi salah satu indikator SKM yang mempunyai nilai rendah.
4. Sarana ruang tunggu saat ini memang masih ada kekurangan seperti kurangnya kursi tunggu di dalam

ruangan sehingga saat banyak Masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan mereka ada yang berdiri menunggu karena kurangnya kursi tunggu.

5. Kurangnya publikasi di media social terkait pelayanan administrasi kependudukan.
6. Belum adanya alat peraga dan toilet bagi penderita disabilitas.
7. Antrian masih manual belum memakai mesin antrian.
8. Inovasi yang telah dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung belum pernah mendapatkan penghargaan baik tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.
9. Belum adanya sarana pengarsipan yang memadai untuk menampung arsip pendukung administrasi kependudukan dan pengarsipan belum dilakukan secara digital sehingga proses pencarian arsip Kembali lebih sulit dilakukan.
10. Belum optimalnya penggunaan database kependudukan oleh pengguna data.
11. Belum optimalnya kepemilikan dan pemanfaatan KIA
12. Belum optimalnya aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)

B. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah 80,17 (A). Dibandingkan

dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan 1,06 point dimana Nilai Sakip tahun 2023 adalah sebesar 79,11.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1. Kurangnya jumlah personal dalam mengelola dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
2. Adanya perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari terintegrasi menjadi SIAk terpusat sehingga rekap data capaian kinerja dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama karena personal pengolah data juga kurang sehingga mempengaruhi pelaporan.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Review terhadap RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sijunjung berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupa RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan

Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Terdapat beberapa perubahan terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan perubahan rencana kerja tahun 2025. Penyebab perubahan tersebut antara lain karena adanya kebijakan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Sijunjung. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dengan perubahan Renja dapat dilihat pada Tabel T-C.31

Tabel. 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sijunjung

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.776.503.022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.551.635.832	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sjj	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah nKab/Kota	100	3.334.261.022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.289.356.052	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan dokumen Renstra dan Renja PD	95	74.455.682	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.551.500	
			Persentase dokumen laporan penyelenggaran pemerintah yang disampaikan tepat waktu	100							

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.816.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	0	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	34.455.682	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.735.500	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sjj	**Persentase penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu**	**100**	**2.404.232.815**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.916.130.582**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sjj	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2.378.597.815,25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sjj	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2.915.650.582	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.635.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	0	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		**Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah**	**100**	**5.635.000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				**2.928.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.635.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.928.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang diproses tepat waktu**	**100**	**30.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Sjj	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Sjj	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	

	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sjj	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sjj	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sjj	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sjj	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Sjj**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum**	**100**	**391.747.525**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**126.325.700**	
	Penyediaan Komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sjj	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sjj	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2.494.050	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sjj	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sjj	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sjj	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sjj	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sjj	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	213.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sjj	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	92.726.200	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sjj	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	11.526.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sjj	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.610.400	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokuimen	5.460.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	364 dokumen	0	
	Penyediaan bahan/material	Kab. Sjj	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	Penyediaan bahan/material	Kab. Sjj	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	
	Fasilitas kunjungan tamu	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.237.525	Fasilitas kunjungan tamu	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	664.300	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	140.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.830.750	
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000	7.523.500	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000	0	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjangan urusan pemerintah daerah	**Kab. Sjj**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**	**100**	**50.000.000**	**Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjangan urusan pemerintah daerah**				**0**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Sjj	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sjj	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan sarana dan prasaramna pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Kab. Sjj**	**Persentase terpenuhinya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**237.860.000**	**Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**				**157.173.420**	
	Penyediaan jasa komumikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	130.700.000	Penyediaan jasa komumikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	52.205.420	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkaan kantor	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkaan kantor	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	107.160.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	104.968.000	

	Kegiatan Pemiliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Sjj**	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik**	**85**	**140.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.246.850**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Sjj	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	50.400.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Sjj	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	30.336.850	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Sjj	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	46.600.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Sjj	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	41.250.000	
	Pemeliharaan mebel	Kab. Sjj	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	Pemeliharaan mebel	Kab. Sjj	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	28.330.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.660.000	
	Pemeliharaan aset tak berwujud	Kab. Sjj	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		0	Pemeliharaan aset tak berwujud	Kab. Sjj	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		0	
	Pemeliaraan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliaraan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	

	Pemeliaraan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Pemeliaraan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	
	Pemeliaraan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Pemeliaraan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Sjj	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**90**	**175.000.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**80.553.350**	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		**Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga**	**100**	**175.000.000**	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**80.553.350**	
			Ratio Penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el	**98**							
			Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	**50**							
			Persentase penerbitan SKPWNI	**100**							

	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	14000 KK, 2.500 SKPWNI	80.000.000	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	14000 KK, 2.500 SKPWNI	30.438.600	
	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0	0	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0	0	
	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0	
	Penerbitan dokumen atas hasil laporan peristiwa kependududukan	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	95.000.000	Penerbitan dokumen atas hasil laporan peristiwa kependududukan	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	50.114.750	
	Pengumpulan, analisis dan desiminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan prnduduk	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk		0	Pengumpulan, analisis dan desiminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan prnduduk	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk		0	
	Kegiatan penataan pendaftaran penduduk				**0**	**Kegiatan penataan pendaftaran penduduk**				**0**	

	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0	
	Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				**0**	**Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**				**0**	
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0	
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependududkan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		0	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependududkan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		0	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pencatatan Sipil**	**90**	**84.779.800**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**139.725.480**	

	Kegiatan pelayanan pencatatn sipil		**Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun**	**100**	**84.779.800**	**Kegiatan pelayanan pencatatn sipil**				**30.988.900**	
			Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	**100**							
			Persentase cakupan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang pernikahannya dilaporkan	**100**							
			Persentase cakupan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan.	**100**							
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8.000 Akta Kelahiran	55.454.300	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8.000 Akta Kelahiran	30.988.900	
				100 Akta Kematian					100 Akta Kematian		
				10 Akta Perkawinan					10 Akta Perkawinan		

	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Kab. Sjj	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8.000 Akta Kelahiran 100 Akta Kematian 10 Akta Perkawinan	29.325.500	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Kab. Sjj	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2	0	
	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP- el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		0	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP- el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		0	
	Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil				**0**	**Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil**				**0**	
	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		0	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		0	

	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependududkan dan pencatatan peristiwa penting terhadap pencatatan sipil	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		0	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependududkan dan pencatatan peristiwa penting terhadap pencatatan sipil	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		0	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				**0**	**Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil**				**108.736.580**	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		0	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		108.736.580	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**Indeks Kepuasan Masyarakat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**90**	**164.691.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**38.011.250**	
			Persentase Inovasi Pelayanan yang diciptakan	**100**							
	Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan		**Persentase Pengguna Data yang Memanfaatkan Data Kependudukan**	**100**	**150.000.000**	**Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**				**32.647.550**	

	Pengolahan dan panyajian data kependudukan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	40.370	65.000.000	Pengolahan dan panyajian data kependudukan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	40.370	32.647.550	
	Invetasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 laporan	85.000.000	Invetasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Kab. Sjj	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		0	
	Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		**Persentase Keakuratan Data Administrasi kependudukan**	**100**	**14.691.400**	**Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**				**5.363.700**	
	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0	
	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	100 dokumen	14.691.400	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Kab. Sjj	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	70 dokumen	5.363.700	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		**Persentase Penyajian Data Profil Kependudukan**	100	**17.770.800**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**3.989.700**	
	Kegiatan penyusunan profil kependudukan		**Persentase Penyajian Data Profil Kependudukan**	**100**	**17.770.800**	**Kegiatan penyusunan profil kependudukan**				**3.989.700**	

	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lainnya	Kab. Sjj	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	50 dokumen	17.770.800	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lainnya	Kab. Sjj	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	40 dokumen	3.989.700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan mulai dari tingkat nagari dan tingkat kecamatan. Beberapa masukan terkait program dan kegiatan untuk program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Uraian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sijunjung Nomor 050/121/Bapppeda-2025 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Target			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang
1	2	3	4	5			6		7
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.953.516.674**	**3.551.635.832**	**- 401.880.842**

2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.953.516.674**	**3.551.635.832**	**(401.880.842)**
2.12.01	**PPOGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**-100%**	**3.557.041.274**	**3.289.356.052**	**(267.685.222)**
		Persentase terpenuhinya indikator pelayanan publik	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			
		Nilai indeks profesional ASN Perangkat Daerah			**80**	**80**			
		Indeks kepatuhan arsip			**75**	**75**			
		Persentase pencapaian komponen akuntabilitas kinerja			**80%**	**80%**			

2.12.01.2.01.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen Renstra dan Renja PD**	**Kab. Sjj**	**95%**	**95%**	**0%**	**40.456.500**	**5.551.500**	**(34.905.000)**
		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu			**100%**	**100%**			
		Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu			**100%**	**100%**			
2.12.01.12.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sjj	3	3	0	13.634.000	3.816.000	(9.818.000)
2.12.01.12.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Sjj	2	0	-2	-	-	-

2.12.01.12.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sjj	4	0	-4	-	-	-
2.12.01.12.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sjj	4	4	0	26.822.500	1.735.500	(25.087.000)
2.12.01.2.02.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi keuangan**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**-100%**	**2.920.874.290**	**2.916.130.582**	**(4.743.708)**
		Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			
2.12.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sjj	23	23	0	2.915.650.290	2.915.650.582	292

2.12.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sjj				-		0
2.12.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sjj	2	2	0	5.224.000	480.000	(4.744.000)
2.12.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sjj	12	12	0	-	-	-
2.12.01.2.03.	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi barang milik daerah**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**-100%**	**5.224.000**	**2.928.000**	**(2.296.000)**
		Persentase kelengkapan administrasi Barang Milik Daerah pada OPD	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			

2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sjj	14	14	0	5.224.000	2.928.000	(2.296.000)
2.12.01.2.05.	**Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0%**	**-100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			
2.12.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab/Kota, Propinsi, Pusat	0	0	0	-	-	-
2.12.01.2.06.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tertib administrasi umum perangkar daerah**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**-100%**	**281.172.350**	**126.325.700**	**(154.846.650)**

		Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi			**100%**	**100%**			
2.12.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sjj	6	6	0	4.993.250	2.494.050	(2.499.200)
2.12.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sjj	4	4	0	-	-	-
2.12.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Sjj	14	14	0	201.663.550	92.726.200	(108.937.350)
2.12.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sjj	2	2	0	11.526.300	4.610.400	(6.915.900)
2.12.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sjj	1	1	0	2.224.100	664.300	(1.559.800)

2.12.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sjj	1	1	0	60.765.150	25.830.750	(34.934.400)
2.12.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Sjj	7.000	7.000	0	-		0
2.12.01.2.07.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**-100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase BMD pada OPD yang terpenuhi	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			
2.12.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Sjj	1	4	3	-		-
2.12.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesinlainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sjj	3	2	-1	-	-	-

2.12.01.2.08.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**-100%**	**195.797.284**	**157.173.420**	**(38.623.864)**
		Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			-
2.12.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sjj	48	48	0	90.528.284	52.205.420	(38.322.864)
2.12.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Sjj	60	12	-48	105.269.000	104.968.000	(301.000)
2.12.01.2.09.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**0**	**113.516.850**	**81.246.850**	**(32.270.000)**

		Persentase aset OPD dalam kondisi baik			**85%**	**85%**			
2.12.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Sjj	**2**	**1**	**-**	30.336.850	30.336.850	-
2.12.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sjj	17	18	1	65.000.000	41.250.000	(23.750.000)
2.12.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Sjj	12	12	0	18.180.000	9.660.000	(8.520.000)
2.12.01.2.09.08.	Pemeliharaan aset tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kab. Sjj	0	1		-		0

2.12.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sjj	1	0	-1	-	-	-
2.12.02	**PPOGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan KK**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0**	**-100%**	**96.594.350**	**80.553.350**	**(16.041.000)**
		Persentase Kepemilikan KTP	**Kab. Sjj**	**98%**	**0**	**-98%**			
		Persentase Kepemilikan KIA	**Kab. Sjj**	**50%**	**0**	**-50%**			
		Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pendaftaran penduduk	**Kab. Sjj**		**90%**	**90%**			
2.12.02.2.01.	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Efisiensi waktu pelayanan pendaftaran penduduk**	**Kab. Sjj**	**1 jam%**	**0**	**0**	**96.594.350**	**80.553.350**	**(16.041.000)**
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			

		Rasio Penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el	**Kab. Sjj**		**98%**	**98%**			
		Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	**Kab. Sjj**		**50%**	**50%**			
		Jumlah penerbitan SKPWNI	**Kab. Sjj**		**100%**	**100%**			
2.12.02.2.01.02.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Sjj	14.000 Kartu Keluarga	14.000	-2.000	37.941.600	30.438.600	(7.503.000)
				2.500 Surat Pindah	2.000	-500			0
2.12.02.2.01.03.	Penyelesaian masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang mendapatkan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	0	0	0	-		0

2.12.02.2.01.04.	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Sjj	1	0	-1			0
2.12.02.2.01.07.	Penerbitan Dokumen atas Hasil Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Laporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sjj	10.000 KTP-el	8.000	-2.000	58.652.750	50.114.750	(8.538.000)
				8.000 KIA	6.000	-2.000			0
2.12.02.2.01.08.	Pengumpulan, Analisis dan Deseminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Kab. Sjj	-			-		0
2.12.02.2.02.	**Kegiatan penataan pendaftaran penduduk**	**Persentase terpenuhinya dokumen pendaftaran penduduk**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0%**	**-100%**	-		**0**

2.12.02.2.02.02.	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Sjj	-			-		0
2.12.02.2.03.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0%**	**-100%**	**-**		**0**
2.12.02.2.03.01.	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sjj	0			-		0
2.12.02.2.03.02.	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependududkan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sjj	0			-		0

2.12.03.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun**	**Kab. Sjj**	**100%**	**0%**	**-100%**	**238.150.200**	**139.725.480**	**(98.424.720)**
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian yang peristiwa kematiannya dilaporkan	**Kab. Sjj**	**100%**	**0%**	**-100%**			
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	**Kab. Sjj**	**35%**	**0%**	**-35%**			
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua yang perceraiannya dilaporkan	**Kab. Sjj**	**15%**	**0%**	**-15%**			
		Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pencatatan sipil	**Kab. Sjj**		**90%**	**90%**			

2.12.03.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Efektifitas waktu pelayanan pencatatan sipil**	**Kab. Sjj**	**1 jam**	**0**	**1 jam**	**38.150.200**	**30.988.900**	**(7.161.300)**
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun			**100%**	**100%**			
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian yang peristiwa kematiannya dilaporkan			**100%**	**100%**			
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan			**100%**	**100%**			
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua yang perceraiannya dilaporkan			**100%**	**100%**			

2.12.03.2.01.01.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sjj	8.000 Akta kelahiran	5.000	(3.000)	38.150.200	30.988.900	(7.161.300)
				100 Akta Kematian	100	0			
				10 Akta Perkawinan	10	0			
2.12.03.2.01.02.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kab. Sjj	8.000 Akta kelahiran	2	8.000 Akta kelahiran			-
				100 Akta Kematian		100 Akta Kematian			
				10 Akta Perkawinan		10 Akta Perkawinan			

2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Sjj**	**100%**	**100%**	**0**	**200.000.000**	**108.736.580**	**(91.263.420)**
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sjj	0	12	12	200.000.000	108.736.580	(91.263.420)
2.12.03.2.01.05.	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP- el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Sjj	0			-		0
2.12.03.2.02.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Sjj**				-		

2.12.03.2.02.01.	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	Kab. Sjj	0			-		0
2.12.03.2.02.04.	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependududkan dan pencatatan peristiwa penting terhadap pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sjj	0			-		0
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kinerja**	**Kab. Sjj**	**35%**	**0%**	**-35%**	**47.716.050**	**38.011.250**	**(9.704.800)**

		Indeks Kepuasan Masyarakat pengelolaan data dan pemanfaatan data kependudukan	**Kab. Sjj**		**90%**	**90%**			
2.12.04.2.01	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Keakuratan Data**	**Kab. Sjj**	**91%**	**0%**	-0,91	**34.404.650**	**32.647.550**	**(1.757.100)**
		Persentase pengguna data yang telah memanfaatkan data kependudukan	**Kab. Sjj**	**100%**	**100%**	**0%**			
2.12.04.2.01.01.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Sjj	40.370	30.000	-10370	34.404.650	32.647.550	(1.757.100)
2.12.04.2.03.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Sjj**	**100%**	**100%**		**13.311.400**	**5.363.700**	**(7.947.700)**

2.12.04.2.03.04.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sjj	0	0	0	-	-	-
2.12.04.2.03.08.	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sjj	100	20	-80	13.311.400	5.363.700	(7.947.700)
2.12.05.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Penyajian data profil perkembangan penduduk**	**Kab. Sjj**	**100%**	**100%**		**14.014.800**	**3.989.700**	**(10.025.100)**
2.12.05.2.01	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase Penyajian data profil perkembangan penduduk**	**Kab. Sjj**	**100%**	**100%**		**14.014.800**	**3.989.700**	**(10.025.100)**
2.12.05.2.01.02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lainnya	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lainnya yang disusun	Kab. Sjj	70	14	-56	14.014.800	3.989.700	(10.025.100)

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sampai bulan Maret 2025 Triwulan I yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan sasaran, indikator dan target merupakan sasaran, indikator dan target yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dan bersifat Indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah diupdate oleh instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami pengurangan pagu indikatif sebesar RP401.880.842,00 atau sebesar 10,16% dari anggaran semula 3.953.516.674,00 menjadi anggaran perubahan Rp3.551.635.832,00 Pengurangan ini terjadi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerinyah terkait Inpres No.1 tahun 2025. Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tahun 2025.

Muaro Sijunjung, Oktober 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

FEBRIZAL ANSORI, SH. M.Si
NIP. 19670212 199303 1 003

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Dinas Kesehatan kabupaten Sijunjung
Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung ini, dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022. Dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan yang terangkum dari Dinas Kesehatan, UPTD Rumah Sakit Daerah, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, diperlukan koreksi dan saran dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung di tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung ini dapat berguna bagi kita semua.

Muaro Sijunjung, 01 Agustus 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

Harry Oscar Hidayat, S.STP, M.Si
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19830328 200312 1 001

Lampiran:
Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Kabupaten Sijunjung
Tanggal 4 Juli 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DAN PERANGKAT DAERAH **11**

2.1 Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sampai Triwulan II Tahun 2025 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan 29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 33
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan (RKPD) 45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 149

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN . **126**

3.1 Uraian Dinas Kesehatan 150
3.2 Uraian Laboratorium Dinas Kesehatan (LABKESDA) 157

BAB IV PENUTUP **159**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran:
Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Kabupaten Sijunjung
Tanggal 4 Juli 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DAN PERANGKAT DAERAH **11**

2.1 Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sampai Triwulan II Tahun 2025 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan 29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 33
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan (RKPD) 45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 149

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN . **126**

3.1 Uraian Dinas Kesehatan 150
3.2 Uraian Laboratorium Dinas Kesehatan (LABKESDA) 157

BAB IV PENUTUP **159**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H memandang kesehatan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus merupakan kewajiban semua pihak (individu, masyarakat, dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap warga negara dalam keadaan selalu sehat sehingga mereka dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam rangka pemenuhan hak-hak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada akhir tahun anggaran 2025, disusunlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk

periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi pendukung. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam prosesnya berpedoman pada Renstra dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pengkajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya dilakukan perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja

perubahan bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKP-PD). Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Secara substansi, Renja Perangkat Daerah ini memuat evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Renja Perangkat Daerah ini juga memiliki peran strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis di bidang kesehatan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Oleh karenanya penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini juga mengacu kepada Kebijakan-kebijakan di tingkat Nasional dan juga Provinsi, yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Kesehatan, SPM nasional bidang kesehatan dan juga rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik, partisipatif, bottom-up* dan *top-down.* Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas,

kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kenagarian, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus dan mengungkit capaian IPM, walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan alokasi dana, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Situasi anggaran kesehatan di Kabupaten Sijunjung telah mencapai kondisi ideal yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 36, tentang Kesehatan tahun 2009, yaitu sebesar 10%. Hal ini dibuktikan dengan trend meningkatnya anggaran kesehatan selama kurun waktu lima tahun cukup besar yaitu tahun 2018 sebesar 13,55%, tahun 2019 sebesar 18.35%, tahun 2020 sebesar 19,41%, dan tahun 2021 sebesar 19.5%, pada tahun 2022 sebesar 24,95% dari total anggaran Kabupaten Sijunjung, namun dengan luas wilayah Kabupaten Sijunjung yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang sebarannya kurang merata, yaitu sebanyak 248, 3 ribu jiwa pada tahun 2024 (*Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung)* anggaran tersebut dirasakan belum memadai. Permasalahannya adalah bagaimana kita dapat mengalokasikan anggaran yang tersedia ke dalam program kegiatan yang sesuai kondisi permasalahan yang

ada dan sesuai dengan kebijakan pusat maupun daerah serta proporsional antara program preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2026, termasuk di dalamnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Dinas Kesehatan tahun 2025.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD

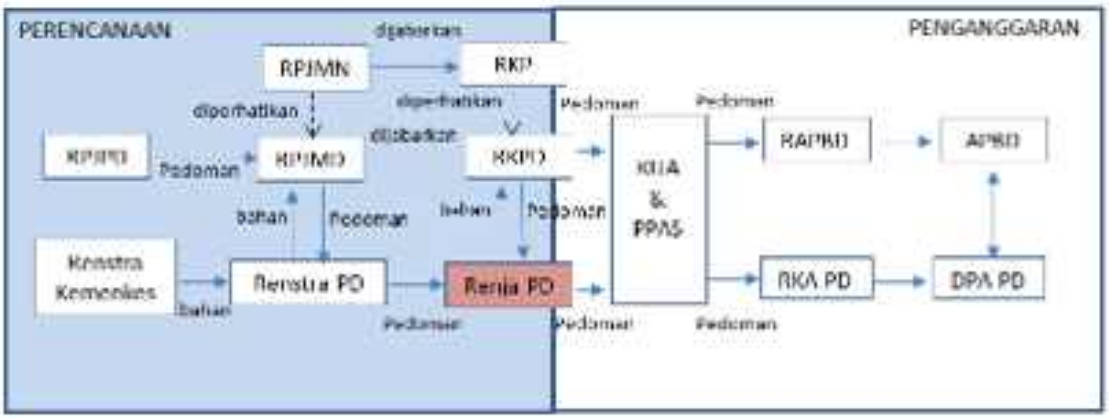

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs;

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 adalah memberikan perbaikan arah sekaligus sebagai memperjelas pedoman bagi Instansi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

2. Tujuan

a. Mendeskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung;
b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;

c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
d. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan
e. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra).
f. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
2.2 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Sampai Triwulan II Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung meliputi realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan dan realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2024 telah dilakukan dengan hasil sebagian tujuan sudah dapat mencapai target yang diharapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kesehatan Keluarga	Angka kematian Ibu	0/00000	75	68,21	109,05
		Angka Kematian Bayi	0/000	7	14,3	0,10
		Persentase Kematian akibat penyakit menular	%	5	0,2	196
		Persentase terkendalinya penyakit tidak menular	%	70	88,9	127
		Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	70	100	142,85
	Meningkatnya tumbuh kembang balita sesuai standar	Prevalensi balita Wasting	%	7,9	6,21	121,39
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	Nilai Sakip	BB 76	77,71	102,25
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	IKM	85	86,5	101,76

Sumber: LKJiP Dinas Kesehatan tahun 2023

Dari 8 indikator sasaran Dinas Kesehatan, sebanyak 7 (tujuh) indikator sudah mencapai target dengan kinerja sangat tinggi, 1 (satu) indikator belum mencapai target dengan indikator kinerja sangat kurang.

Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu ditahun 2024 sebanyak 3 orang, disebabkan oleh sup stroke hameoragig (1 orang), dan Suspek cardiac arrest (1 orang) dan eklamsia (1 orang), jika dibandingkan dengan jumlah kematian pada tahun 2023 dengan jumlah kematian Ibu sama. Kematian ibu di tahun 2024 terjadi di wilayah kerja Puskesmas Sumpur kudus sebanyak 2 (satu) orang, dan Puskesmas Sijunjung sebanyak 1 (satu) orang.

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Masih kentalnya sosial budaya masyarakat, sehingga rujukan terlambat (pengambilan keputusan keluarga, sosial ekonomi).
2. Masih belum optimalnya fungsi dari nagari siaga (program, dan implementasi kegiatan).
3. Masih belum maksimalnya pelayanan ANC yang terstandar (10 T) karena lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ANC.
4. Integrasi dan kolaborasi lintas program belum maksimal.
5. Ketersediaan alat penunjang pemeriksaan belum mencukupi di pustu dan poskesri
6. Kalibrasi alat penunjang pemeriksaan (pemeriksaan HB, Protein urin).
7. Pendeteksian faktor resiko tinggi pada ibu hamil dari bidan kurang optimal, sehingga kurang terpantaunya kondisi ibu hamil resiko tinggi.
8. Masih terjadinya perkawinan dini/muda.

Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 dari 13 puskesmas sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah kematian kematian. Penyebab kematian bayi yang terjadi pada tahun 2024 antara lain disebabkan oleh BBLR, kelainan kongenital, aspexia, sepsis, pneumonia, diare, kelainan saluran cerna dan penyebab lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Masih adanya kehamilan dengan faktor resiko 4T, yaitu terlalu muda (9,6%), terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir masih belum mencukupi untuk pustu, poskesri dan puskesmas.
3. Kompetensi petugas/ bidan dalam penanganan kegawat daruratan bayi baru lahir masih kurang.
4. Integrasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas program belum maksimal.
5. Pendeteksian faktor resiko tinggi pada ibu hamil masih kurang, sehingga kurang terpantaunya kondisi ibu hamil yang layak mendapat perhatian serius.

Penyakit Menular

Jumlah kematian akibat penyakit menular di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 sebanyak 13 (tiga belas) orang, kematian tersebut disebabkan oleh penyakit TBC 8 orang, penyakit HIV/AIDS 2 (dua) orang, tetanus 2 (dua) orang.

Permasalahan yang dihadapi karena:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana (alat TCM dan catrigenya, RDT HIV, sifilis, hepatitis/ triple E, RDT Combo DBD/NS1, Abate, bahan kimia pengendalian vektor) penunjang diagnostik yang masih belum merata.
2. Peran lintas sektor dan lintas program belum maksimal.
3. Pengalokasian anggaran yang kurang tepat.

Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa

Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang masuk di dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan usia produktif dengan target layanan sebanyak 135.425 orang pada tahun 2024, dengan capaian antara lain pelayanan 78,03%, indikator dengan kasus hipertensi sebanyak 46.337 kasus dengan capaian pelayanan sesuai standar

66,84%, Diabetes Mellitus target capaian sebanyak 1.845 orang dengan capaian pelayanan 100%, Gangguan Jiwa Berat sebanyak 522 orang dengan target capaian sudah 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Kurangnya tanggapan puskesmas dalam perbaikan dan pemenuhan dokumen akreditasi.
2. Jadwal akreditasi diundur beberapa bulan karena adanya persyaratan yang tidak dilaksanakan puskesmas.

Prevalensi Wasting

Prevalensi wasting di Tahun 2024 tercapai pada angka 6,21 menurut pengukuran aplikasi EPPBGM sedangkan dari hasil survei SSGI angka stunting yang dirilis pada tahun 2022 sebanyak 30,0%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Persepsi tentang stunting yang belum sama antara lintas program dan lintas sektor.
2. Mutasi petugas yang bertugas dalam penanganan balita gizi buruk.
3. Promosi dan Preventif tidak berjalan dalam mengupayakan peningkatan gizi balita termasuk edukasi Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
4. Kader yang belum mempunyai kompetensi dalam penimbangan dan pengukuran Tinggi Badan.
5. Belum berjalan optimalnya sistem 5 meja di Posyandu.
6. Peran Lintas Sektor dan lintas program belum optimal
7. Sistem Pencatatan dan pelaporan belum terlaksana maksimal
8. Strategi promosi yang belum tepat
9. Ketersediaan alat antropometri untuk mengukur pertumbuhan

anak tidak standar.

Fasilitas Kesehatan dengan Akreditasi Utama

Pada tahun 2024 seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sijunjung sudah dilakukan penilaian re-akreditasi sudah terakreditasi paripurna sebanyak 7 (tujuh) puskesmas dan utama sebanyak 5 (lima) Puskesmas. Untuk capaian target 2024 direncanakan 70% dari 13 puskesmas terakreditasi Utama, dan dari hasil penilaian re-akreditasi yang dilakukan 13 puskesmas mencapai target. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan indikator tersebut antara lain:

1. Kurangnya tanggapan puskesmas dalam perbaikan dan pemenuhan dokumen akreditasi.
2. Jadwal akreditasi diundur beberapa bulan karena adanya persyaratan yang tidak dilaksanakan puskesmas.

Untuk menindak lanjuti terhadap permasalahan diatas adalah:

1. Puskesmas dimonitoring secara kontinyu oleh Tim TPCB Dinas Kesehatan dalam pemenuhan dokumen dan persiapan akreditasi.
2. Pemberian punishment terhadap puskesmas yang lalai dalam pemenuhan persyaratan akreditasi dari Kemenkes RI.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari survei yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 adalah 86,5% dengan kategori A (Sangat Baik).

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut adalah:

1. Belum terpenuhinya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui media online

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan ditahun 2024 adalah 77,71 dari target yang telah ditetapkan sebesar 76 dengan nilai capaian sebesar 102,25% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator akuntabilitas kinerja tersebut adalah:

1. Masih kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Adanya keterbatasan kapasitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.
3. Menumpuknya kegiatan semua pelaporan di awal tahun sehingga penyusunan laporan akuntabilitas kurang maksimal.

Sedangkan realisasi pencapaian Mutu pelayanan dasar Dinas Kesehatan pada Standar Pelayanan minimal (SPM) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

	INDIKATOR SPM	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN S/D TW II TAHUN 2025
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	87,02%	41,56
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	99,42%	48,10
3	Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir	100	97,95%	49.14
4	Pelayanan kesehatan balita	100	98,65%	36.76
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100,39%	30,05
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	85,51%	55,40

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	74,36%	52,14
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	66,84%	95,54
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	100%	56,28
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100%	89,15
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	100 %	50,89
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100%	39,35
	Total	100	92,51%	53,69

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 dan 2025

Dapat dilihat dari Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dengan target sampai dengan bulan Desember 2024 dengan capaian 92,51%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 91,38%. Dari 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target. Dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal, yang sudah mencapai target 10 indikator, sedangkan terendah belum mencapai target adalah Pelayanan Kesehatan usia lanjut (74,36%), dan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 66,84%.

Tabel 2.3
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIJUNJUNG

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Naggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (akhir tahun Pelaksanaan Renja Peranfakat Darah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Ralisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=6+10		12=11/5X100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	**K**	**Rp.**	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**		**135,488,280,060**	**86**	**219,756,792,619**	**15**	**91,488,280,060**	**16**	**21,765,664,628**	**47**	**45,147,985,062**	**63**	**66,913,649,690**	**149.00**	**286,670,442,309**	**2,980.00**	**5,733,408,846,180**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan pengangggaran	100	5,549,080	100	**44,162,457**	38	5,549,080	6	0	28	0	**33.5**	**0**	**133.50**	**44,162,457**	**2,670.00**	**883,249,140**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4,347,600	100	32,928,600	45	4,347,600	6	0	30	0	**36**	**0**	**136.00**	**32,928,600**	**2,720.00**	**658,572,000**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1,201,480	100	6,289,957	30	1,201,480	5	0	25	0	**30**	**0**	**130.00**	**6,289,957**	**2,600.00**	**125,799,140**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu	100	91,064,927,965	100	191,525,276,398	50	91,064,927,965	8	21,662,616,156	50	45,121,803,812	**58**	**66,784,419,968**	**158.00**	**258,309,696,366**	**3,160.00**	**5,166,193,927,320**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650	91,064,927,965	100	191,225,300,793	50	91,064,927,965	24	21,662,616,156	50	45,121,803,812	**74**	**66,784,419,968**	**174.00**	**258,009,720,761**	**3,480.00**	**5,160,194,415,220**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	0	100	33,681,100	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**100.00**	**33,681,100**	**2,000.00**	**673,622,000**	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	0	100	266,294,505	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**100.00**	**266,294,505**	**2,000.00**	**5,325,890,100**	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kepegawaian yang di proses tepat waktu	100	0	100	275,250,250	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**100.00**	**275,250,250**	**2,000.00**	**5,505,005,000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	118	0	0	**98,990,000**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	-	**98,990,000**	-	**1,979,800,000**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	80	66,545,549	100	1,899,052,567	71	66,545,549	15	24,894,900	59	28,818,050	**74.4**	**53,712,950**	**174.40**	**1,952,765,517**	**3,488.00**	**39,055,310,340**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	761,800	100	125,572,540	92	761,800	7	0	85	568,600	**92**	**568,600**	**192.00**	**126,141,140**	**3,840.00**	**2,522,822,800**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10,426,510	100	361,886,769	96	10,426,510	30	7,711,300	85	8,336,300	**115**	**16,047,600**	**215.00**	**377,934,369**	**4,300.00**	**7,558,687,380**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	3,009,780	100	**90,308,180**	60	3,009,780	20	1,283,700	50	1,283,700	**70**	**2,567,400**	**170.00**	**92,875,580**	**3,400.00**	**1,857,511,600**	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	2,249,760	100	159,548,157	55	2,249,760	0	0	37	784,500	**37**	**784,500**	**137.00**	**160,332,657**	**2,740.00**	**3,206,653,140**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	50,097,699	100	1,042,505,679	51	50,097,699	17	15,899,900	40	17,844,950	**57**	**33,744,850**	**157.00**	**1,076,250,529**	**3,140.00**	**21,525,010,580**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	236,183,616	100	615,709,227	55	236,183,616	21	54,913,372	48	95,557,953	**69**	**150,471,325**	**169.00**	**766,180,552**	**3,380.00**	**15,323,611,040**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	81,881,616	100	300,385,743	55	81,881,616	17	22,248,372	50	38,461,953	**67**	**60,710,325**	**167.00**	**361,096,068**	**3,340.00**	**7,221,921,360**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	154,302,000	100	315,323,484	55	154,302,000	25	32,665,000	45	57,096,000	**70**	**89,761,000**	**170.00**	**405,084,484**	**3,400.00**	**8,101,689,680**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100	115,073,850	100	1,155,388,977	65	115,073,850	29	23,240,200	49	46,667,911	**78**	**69,908,111**	**178.00**	**1,225,297,088**	**3,560.00**	**24,505,941,760**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	18,836,850	100	101,860,680	50	18,836,850	10	1,391,500	20	3,243,611	**30**	**4,635,111**	**130.00**	**106,495,791**	**2,600.00**	**2,129,915,820**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	83,376,000	100	659,469,646	45	36,500,000	17	13,638,700	40	32,459,300	**57**	**46,098,000**	**157.00**	**705,567,646**	**3,140.00**	**14,111,352,920**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	12,861,000	100	256,678,470	100	12,861,000	60	8,210,000	86	10,965,000	**146**	**19,175,000**	**246.00**	**275,853,470**	**4,920.00**	**5,517,069,400**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	0	0	137,380,181	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	-	**137,380,181**	-	**2,747,603,620**	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Akreditasi Minimal Utama Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kesehatan Persentase PHBS Prevalensi Balita Wasting**	**100 100 65 75**	**57,047,232,397**	382	171,299,022,003	43.5	42,804,244,598	10	1,533,501,037	34	10,944,758,113	**44**	**12,478,259,150**	**426.00**	**183,777,281,153**	**8,520.00**	**3,675,545,623,060**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Fasyankes	100	38,515,811,192	98	97,042,959,086	30	24,272,823,393	6	57,856,193	15	1,593,959,103	**21**	**1,651,815,296**	**119.00**	**98,694,774,382**	**2,380.00**	**1,973,895,487,640**	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6	6,851,550,996			25	6,851,550,996	6	17,126,650	15	20,101,280	**21**	**37,227,930**	**21.00**	**37,227,930**	**420.00**	**744,558,600**	
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	0	0	751,488,350	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	-	**751,488,350**	-	**15,029,767,000**	
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	3,302,422,900	0	2,661,545,150	20	3,302,422,900	5	2,225,400	10	13,060,400	**15**	**15,285,800**	**15.00**	**2,676,830,950**	**300.00**	**53,536,619,000**	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	936,709,000	100	4,818,074,725	15	936,709,000	5	1,513,250	10	3,006,850	**15**	**4,520,100**	**115.00**	**4,822,594,825**	**2,300.00**	**96,451,896,500**	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	0	100	26,575,047,615	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**100.00**	**26,575,047,615**	**2,000.00**	**531,500,952,300**	

		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13	6,570,452,289	100	22,595,863,392	25	6,570,452,290	5	25,656,285	10	52,712,965	**15**	**78,369,250**	**115.00**	**22,674,232,642**	**2,300.00**	**453,484,652,840**	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	253,280,239	90	265,861,182	15	253,280,239	6	0	10	944,450	**16**	**944,450**	**106.00**	**266,805,632**	**2,120.00**	**5,336,112,640**	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	6,247,610,968	100	2,579,666,900	37	6,247,610,968	5	0	28	1,477,791,450	**33**	**1,477,791,450**	**133.00**	**4,057,458,350**	**2,660.00**	**81,149,167,000**	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	13	110,797,000	100	267,927,224	43	110,797,000	8	11,334,608	25	26,341,708	**33**	**37,676,316**	**133.00**	**305,603,540**	**2,660.00**	**6,112,070,800**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	100	18,328,215,036.00	100	71,491,948,240	50.4	18,328,215,037	10	1,460,892,994	43	9,311,504,510	**53**	**10,772,397,504**	**153.00**	**82,264,345,744**	**3,060.00**	**1,645,286,914,880**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5679	60,504,840.00	100	1,662,417,770	45	60,504,840	15	9,986,350	41	22,034,950	**56**	**32,021,300**	**156.00**	**1,694,439,070**	**3,120.00**	**33,888,781,400**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5421	92,744,780	100	287,056,473	50	92,744,780	25	22,458,500	45	32,830,250	**70**	**55,288,750**	**170.00**	**342,345,223**	**3,400.00**	**6,846,904,460**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4957	247,155,370	100	625,058,311	37	247,155,370	15	10,173,850	32	11,023,850	**47**	**21,197,700**	**147.00**	**646,256,011**	**2,940.00**	**12,925,120,220**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	25371	84,421,230	100	1,195,093,141	45	84,421,230	10	1,860,000	43	31,989,250	**53**	**33,849,250**	**153.00**	**1,228,942,391**	**3,060.00**	**24,578,847,820**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	41694	25,200,500	100	1,197,818,358	35	25,200,500	7	930,000	32	1,394,500	**39**	**2,324,500**	**139.00**	**1,200,142,858**	**2,780.00**	**24,002,857,160**	

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165362	32,975,900	100	622,358,371	60	32,975,900	20	11,651,000	59	13,496,000	**79**	**25,147,000**	**179.00**	**647,505,371**	**3,580.00**	**12,950,107,420**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21225	54,105,719	100	601,726,890	35	54,105,720	10	5,018,600	30	14,551,100	**40**	**19,569,700**	**140.00**	**621,296,590**	**2,800.00**	**12,425,931,800**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44152	101,027,840.00	100	427,567,210	25	101,027,840	10	0	20	0	**30**	**0**	**130.00**	**427,567,210**	**2,600.00**	**8,551,344,200**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450	14,886,115	98	1,191,187,880	40	14,886,115	5	0	30	1,509,250	**35**	**1,509,250**	**133.00**	**1,192,697,130**	**2,660.00**	**23,853,942,600**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	530	20,312,000	90	164,750,670	40	20,312,000	5	200,000	30	3,005,250	**35**	**3,205,250**	**125.00**	**167,955,920**	**2,500.00**	**3,359,118,400**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Standar	2655	43,726,320	100	481,745,143	70	43,726,320	15	10,454,250	55	21,938,500	**70**	**32,392,750**	**170.00**	**514,137,893**	**3,400.00**	**10,282,757,860**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Standar	3558	46,174,000	90	134,233,970	45	46,174,000	17	13,590,000	41	14,055,000	**58**	**27,645,000**	**148.00**	**161,878,970**	**2,960.00**	**3,237,579,400**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	23,314,500.00	90	719,830,404	75	23,314,500	0	0	55	12,230,200	**55**	**12,230,200**	**145.00**	**732,060,604**	**2,900.00**	**14,641,212,080**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	25,258,500	85	1,952,079,402	82	25,258,500	30	13,657,995	76	15,367,195	**106**	**29,025,190**	**191.00**	**1,981,104,592**	**3,820.00**	**39,622,091,840**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52	34,930,450	90	2,098,068,735	60	34,930,450	15	8,554,845	56	16,808,845	**71**	**25,363,690**	**161.00**	**2,123,432,425**	**3,220.00**	**42,468,648,500**	

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24	135,412,500	100	489,358,664	35	135,412,500	10	6,840,000	30	25,515,300	**40**	**32,355,300**	**140.00**	**521,713,964**	**2,800.00**	**10,434,279,280**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	87,779,695	100	1,259,369,333	25	87,779,695	5	0	20	3,206,750	**25**	**3,206,750**	**125.00**	**1,262,576,083**	**2,500.00**	**25,251,521,660**	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	395,118,700	100	2,156,021,539	25	395,118,700	5	12,747,759	15	17,281,759	**20**	**30,029,518**	**120.00**	**2,186,051,057**	**2,400.00**	**43,721,021,140**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	3,540,000	82	74,190,900	35	3,540,000	0	0	33	938,250	**33**	**938,250**	**115.00**	**75,129,150**	**2,300.00**	**1,502,583,000**	

		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	55,650,500	100	202,138,886	50	55,650,500	5	599,500	40	19,027,950	**45**	**19,627,450**	**145.00**	**221,766,336**	**2,900.00**	**4,435,326,720**	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14	430,867,850	85	3,589,774,429	40	430,867,850	5	10,604,000	25	90,832,600	**30**	**101,436,600**	**115.00**	**3,691,211,029**	**2,300.00**	**73,824,220,580**	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	15,769,434,916	100	38,559,914,568	65	15,769,434,916	15	1,263,394,045	60	8,748,417,033	**75**	**10,011,811,078**	**175.00**	**48,571,725,646**	**3,500.00**	**971,434,512,920**	
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	200	35,000,000	100	26,887,610	100	35,000,000	0	0	100	33,988,200	**100**	**33,988,200**	**200.00**	**60,875,810**	**4,000.00**	**1,217,516,200**	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	9,813,000.00	90	42,662,515	60	9,813,000	10	1,621,000	35	3,293,123	**45**	**4,914,123**	**135.00**	**47,576,638**	**2,700.00**	**951,532,760**	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7	86,078,160	95	596,156,607	45	86,078,160	5	5,378,750	32	24,948,050	**37**	**30,326,800**	**132.00**	**626,483,407**	**2,640.00**	**12,529,668,140**	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	0	100	816,548,706	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**100.00**	**816,548,706**	**2,000.00**	**16,330,974,120**	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	181,916,970	100	1,427,158,340	60	181,916,971	25	46,263,300	45	75,273,320	**70**	**121,536,620**	**170.00**	**1,548,694,960**	**3,400.00**	**30,973,899,200**	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13	27,039,000	94	942,678,090	50	27,039,000	10	1,270,000	45	3,276,150	**55**	**4,546,150**	**149.00**	**947,224,240**	**2,980.00**	**18,944,484,800**	

		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12,226,000	85	60,847,761	50	12,226,000	0	0	30	3,275,835	**30**	**3,275,835**	**115.00**	**64,123,596**	**2,300.00**	**1,282,471,920**	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	16,624,000	85	81,626,490	45	16,624,000	0	0	20	1,704,000	**20**	**1,704,000**	**105.00**	**83,330,490**	**2,100.00**	**1,666,609,800**	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	744	9,226,680	85	7,014,600	92	9,226,680	5	0	89	7,545,000	**94**	**7,545,000**	**179.00**	**14,559,600**	**3,580.00**	**291,192,000**	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	744	1,930,000.00	70	8,789,320	82	1,930,000	25	963,250	79	963,250	**104**	**1,926,500**	**174.00**	**10,715,820**	**3,480.00**	**214,316,400**	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	252275	8,219,000	90	25,320,770	60	8,219,000	5	0	55	3,780,000	**60**	**3,780,000**	**150.00**	**29,100,770**	**3,000.00**	**582,015,400**	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2	155,600,000.00	0	58,300,000	30	155,600,000	5	2,676,000	25	36,003,800	**30**	**38,679,800**	**30.00**	**96,979,800**	**600.00**	**1,939,596,000**	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100	87,947,218	89	944,541,335	35	87,947,218	5	3,086,750	25	14,599,750	**30**	**17,686,500**	**119.00**	**962,227,835**	**2,380.00**	**19,244,556,700**	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	87,947,218	89	289,206,605	35	87,947,218	5	3,086,750	25	14,599,750	**30**	**17,686,500**	**119.00**	**306,893,105**	**2,380.00**	**6,137,862,100**	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	100	115,258,950	95	1,819,573,342	58.5	115,258,950	20	11,665,100	53	24,694,750	**73**	**36,359,850**	**168.00**	**1,855,933,192**	**3,360.00**	**37,118,663,840**	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18	8,297,000	90	20,959,785	92	8,297,000	30	4,985,850	85	6,786,500	**115**	**11,772,350**	**205.00**	**32,732,135**	**4,100.00**	**654,642,700**	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16	106,961,950	100	1,798,613,557	25	106,961,950	10	6,679,250	20	17,908,250	**30**	**24,587,500**	**130.00**	**1,823,201,057**	**2,600.00**	**36,464,021,140**	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Akreditasi Minimal Utama**	**100**	**383,484,100**	**88**	**7,500,257,351**	**41.7**	**745,066,200**	**16**	**16,311,750**	**39**	**31,961,850**	**55**	**48,273,600**	**143.00**	**7,548,530,951**	**2,860.00**	**150,970,619,020**	

		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki izin praktek sesuai standar	100	21,902,000	85	76,024,800	41.7	383,484,100	18	8,490,500	39	21,602,350	**57**	**30,092,850**	**142.00**	**106,117,650**	**2,840.00**	**2,122,353,000**	
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	240	6,692,000	89	27,488,200	85	6,692,000	15	1,715,000	50	3,154,150	**65**	**4,869,150**	**154.00**	**32,357,350**	**3,080.00**	**647,147,000**	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	240	15,210,000	80	48,536,600	65	15,210,000	20	6,775,500	60	8,088,700	**80**	**14,864,200**	**160.00**	**63,400,800**	**3,200.00**	**1,268,016,000**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan	100	22,214,000	90	5,048,668,600	35	22,214,000	12	4,662,250	30	4,662,250	**42**	**9,324,500**	**132.00**	**5,057,993,100**	**2,640.00**	**101,159,862,000**	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	22,214,000	90	18,108,200	35	22,214,000	12	4,662,250	30	4,662,250	**42**	**9,324,500**	**132.00**	**27,432,700**	**2,640.00**	**548,654,000**	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensi	100	339,368,100	90	2,375,563,951	15	339,368,100	3	3,159,000	8	5,697,250	**11**	**8,856,250**	**101.00**	**2,384,420,201**	**2,020.00**	**47,688,404,020**	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120	339,368,100	90	2,375,563,951	15	339,368,100	3	3,159,000	8	5,697,250	**11**	**8,856,250**	**101.00**	**2,384,420,201**	**2,020.00**	**47,688,404,020**	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Akreditasi Minimal Utama**	**undefined undefined**	**364,643,040**	**93**	**838,531,983**	**26**	**364,643,040**	**5**	**1,280,000**	**14**	**9,980,000**	**19**	**11,260,000**	**112.00**	**849,791,983**	**2,240.00**	**16,995,839,660**	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Fasyankes	100	71,578,500	80	110,493,539	40	71,578,500	5	0	15	4,895,000	**20**	**4,895,000**	**100.00**	**115,388,539**	**2,000.00**	**2,307,770,780**	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	71,578,500	80	110,493,539	40	71,578,500	5	0	15	4,895,000	**20**	**4,895,000**	**100.00**	**115,388,539**	**2,000.00**	**2,307,770,780**	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	100	115,258,950	95	1,819,573,342	58.5	115,258,950	20	11,665,100	53	24,694,750	**73**	**36,359,850**	**168.00**	**1,855,933,192**	**3,360.00**	**37,118,663,840**	

		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18	8,297,000	90	20,959,785	92	8,297,000	30	4,985,850	85	6,786,500	**115**	**11,772,350**	**205.00**	**32,732,135**	**4,100.00**	**654,642,700**	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16	106,961,950	100	1,798,613,557	25	106,961,950	10	6,679,250	20	17,908,250	**30**	**24,587,500**	**130.00**	**1,823,201,057**	**2,600.00**	**36,464,021,140**	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Akreditasi Minimal Utama**	**100**	**383,484,100**	**88**	**7,500,257,351**	**41.7**	**745,066,200**	**16**	**16,311,750**	**39**	**31,961,850**	**55**	**48,273,600**	**143.00**	**7,548,530,951**	**2,860.00**	**150,970,619,020**	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki izin praktek sesuai standar	100	21,902,000	85	76,024,800	41.7	383,484,100	18	8,490,500	39	21,602,350	**57**	**30,092,850**	**142.00**	**106,117,650**	**2,840.00**	**2,122,353,000**	
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	240	6,692,000	89	27,488,200	85	6,692,000	15	1,715,000	50	3,154,150	**65**	**4,869,150**	**154.00**	**32,357,350**	**3,080.00**	**647,147,000**	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	240	15,210,000	80	48,536,600	65	15,210,000	20	6,775,500	60	8,088,700	**80**	**14,864,200**	**160.00**	**63,400,800**	**3,200.00**	**1,268,016,000**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan	100	22,214,000	90	5,048,668,600	35	22,214,000	12	4,662,250	30	4,662,250	**42**	**9,324,500**	**132.00**	**5,057,993,100**	**2,640.00**	**101,159,862,000**	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	22,214,000	90	18,108,200	35	22,214,000	12	4,662,250	30	4,662,250	**42**	**9,324,500**	**132.00**	**27,432,700**	**2,640.00**	**548,654,000**	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensi	100	339,368,100	90	2,375,563,951	15	339,368,100	3	3,159,000	8	5,697,250	**11**	**8,856,250**	**101.00**	**2,384,420,201**	**2,020.00**	**47,688,404,020**	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120	339,368,100	90	2,375,563,951	15	339,368,100	3	3,159,000	8	5,697,250	**11**	**8,856,250**	**101.00**	**2,384,420,201**	**2,020.00**	**47,688,404,020**	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Akreditasi Minimal Utama**	**undefined undefined**	**364,643,040**	**93**	**838,531,983**	**26**	**364,643,040**	**5**	**1,280,000**	**14**	**9,980,000**	**19**	**11,260,000**	**112.00**	**849,791,983**	**2,240.00**	**16,995,839,660**	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Fasyankes	100	71,578,500	80	110,493,539	40	71,578,500	5	0	15	4,895,000	**20**	**4,895,000**	**100.00**	**115,388,539**	**2,000.00**	**2,307,770,780**	

		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	71,578,500	80	110,493,539	40	71,578,500	5	0	15	4,895,000	**20**	**4,895,000**	**100.00**	**115,388,539**	**2,000.00**	**2,307,770,780**	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	7,000,000	100	345,642,500	20	7,000,000	5	0	10	0	**15**	**0**	**115.00**	**345,642,500**	**2,300.00**	**6,912,850,000**	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PelaksanaanSehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	25,528,000	100	162,676,098	15	25,528,000	5	0	10	260,000	**15**	**260,000**	**115.00**	**162,936,098**	**2,300.00**	**3,258,721,960**	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	26	25,528,000	100	162,676,098	15	25,528,000	5	0	25	260,000	**30**	**260,000**	**130.00**	**162,936,098**	**2,600.00**	**3,258,721,960**	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	546,286,500	100	1,657,204,705	35	546,286,500	0	8,175,000	25	114,535,000	**25**	**122,710,000**	**125.00**	**1,779,914,705**	**2,500.00**	**35,598,294,100**	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	546,286,500	100	1,657,204,705	35	546,286,500	0	8,175,000	25	114,535,000	**25**	**122,710,000**	**125.00**	**1,779,914,705**	**2,500.00**	**35,598,294,100**	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**57,047,232,397.60**	**100**	**356,837,816**	**40**	**222,946,960**	**5**	**0**	**30**	**37,728,243**	**35**	**37,728,243**	**135.00**	**394,566,059**	**2,700.00**	**7,891,321,180**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			38,515,811,192.91	100	356,837,816	40	222,946,960	5	0	30	37,728,243	**35**	**37,728,243**	**135.00**	**394,566,059**	**2,700.00**	**7,891,321,180**	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	-	-	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan

Dari data capaian indikator sasaran/ program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Analisis kinerja pelayanan Bidang Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesehatan
Kabupaten Sijunjung
Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN		
			2022	2023	2024
A	PELAYANAN IBU HAMIL				
1	Cakupan Pelayanan Ibu Sesuai Standar	100%	90	61,63	61,63
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	100%	100	100	100
B	PELAYANAN IBU BERSALIN				
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Fasyankes	100%	99	65,12	65,12
2	Cakupan pelayanan KF 3	100%	99	70,14	70,14
3	Cakupan Pelayanan KB Aktif	100%	99	77,248	77,248
C	PELAYANAN BAYI BARU LAHIR				
1	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	100%	97	100	100
2	Cakupan pelayanan KN Lengkap	100%	97	71,63	71,63
D	PELAYANAN BALITA				
1	Cakupan Pelayanan Anak Balita	100%	90	80,77	80,77
2	Cakupan Imunisasi lengkap pada bayi,	100%	89,40		
3	Cakupan Imunisasi Booster Lengkap	100%	87.70		
4	Cakupan Pemberian Vit A Anak Balita	100%	97,20	99,9	99,9
5	Cakupan Pelayanan Bayi	100%	65,46	73,28	73,28
6	Cakupan D/S Balita	100%	80,50	67,2	67,2
E	PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR				

1	Cakupan penjaringan kesehatan siswa baru SD dan setingkat	100%	97	97	
2	Cakupan penjaringan kesehatan siswa baru SLTP dan setingkat	100%	96.20	96.20	
3	Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	93,40	93,40	
4	Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa SLTP dan setingkat	100%	90,50	90,50	
5	Cakupan Pelaksanaan UKGS	100%	98	98	
6	Cakupan Pelaksanaan Kesehatan Indera	100% (50)	95	95	
7	Cakupan Imunisasi Anak Sekolah	100%	96	96	
F	PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF				
1	Cakupan penjaringan kesehatan siswa baru SLTA dan setingkat	100%	97		
2	Cakupan pemeriksaan berkala kesehatan siswa baru SLTA dan setingkat	100%	97		
3	Cakupan Skrening di Posbindu	100%	97		
4	Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil	100%	97	68,68	68,68
5	Cakupan Skrening di UKK	100%	97		
6	Cakupan Paracite Indek (API) < 1 Per 1000 penduduk	100%	100,00		
7	Visite Rate	3% (100)	79,26		
8	Cakupan Pelaksanaan Gigi dan Mulut	100% (65)	69,77		
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat	100%	60,65		
G	PELAYANAN KESEHATAN USILA				
1	Skrining Lansia sesuai standar	100%	100	84,74	84,74
H	PELAYANAN KESEHATAN HIPERTENSI SESUAI STANDAR				
1	Cakupan Pelayanan Hipertensi sesuai standar	100%	82		
I	PELAYANAN KESEHATAN DIABETES SESUAI STANDAR				
1	Cakupan Pelayanan Diabetes Sesuai Standar	100%	100	100	
J	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT SESUAI STANDAR				

1	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat sesuai Standar	100%	100	100	
K	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TBC				
1	Cakupan Penemuan terduga TB	100%	74	71	75
2	Cakupan Penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100	89,62	100
3	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	100%	95	95,62	96
L	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI				
1	Cakupan Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan konseling dan Screning HIV	100%	100	82	93,6
2	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan konseling dan Screning HIV	100%	72,8	99,8	93,5
3	Cakupan Penderita TB yang mendapat screning dan Konseling HIV	100%	81,7	99,8	94,9
4	Cakupan Kelompok beresiko yang mendapat screning dan konseling HIV	100%	100	99,8	100
A	PROMOSI KESEHATAN TERMASUK UKS				
1	Cakupan Nagari Siaga Aktif	65	75,42	75,78	
2	Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	80	84,2	88,24	
3	Cakupan PHBS	80	73,9	70,45	
4	Cakupan Sekolah Sehat	80	62,46	52,40	
B	KESEHATAN LINGKUNGAN				
1	Cakupan Penduduk yg memiliki akses air bersih	97	87	91,76	
2	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	92	92	97,85	
3	Cakupan TTU yang memenuhi syarat	60	59	61,40	
4	Cakupan TPM yang memenuhi syarat	44	88	47,26	
5	Cakupan rumah sehat	72	79	73,54	
6	Cakupan nagari yang melaksanakan STBM	62	100	100,00	
C	PELAYANAN GIZI BERSIFAT UKM				
1	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100,00	100	100
2	Cakupan Bumil KEK dapat PMT	100	100,00	100	100
3	Cakupan RT konsumsi garam beryodium	98	99,26	98,8	98,8

D	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT				
1	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	90	100	31	31
2	Cakupan Penderita DBD yang Ditangani	100	100	100	100
3	Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100
4	Kasus gigitan HPR yg mendapat tatalaksana kasus	100	100	100	100
E	PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Cakupan pelayanan perkesmas	80	100	100	
F	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER				
1	Cakupan Pelayanan kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer (Yankestradkom)	50	91,54	91,54	

Sumber: Bidang Yankes Tahun 2024

Indikator kinerja bidang Kesehatan tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan Kesehatan yang mencakup 12 indikator. Selain itu terdapat 19 Indikator setingkat *impact* yang merupakan Indikator kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Prevalensi Balita Stunting		√	20	17	15	14	10	7	7,17	6,21	7,6	7,3	
2	Angka Kematian Ibu		√	150	135	100	75	75	50	72,97	68,21	75	50	
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		√	15	13	10	7	5	3	15,0	14,3	3	3	
4	Angka Kematian Neonatal		√	6,1	5	4	3	2	1	6,69	6,69	2	1	
5	Prevalensi balita gizi buruk		√	13,2	11	9	8	5	3	0,3	0,3	5	3	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	√		100	100	100	100	100	100	99,37	87,02	100	100	
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	96,77	97,95	100	100	

8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	81,8	98,65	100	100	
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan anak usia Pendidikan dasar sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	98,99	100,39	100	100	
10	Cakupan Pelayanan orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	74,36	85,31	100	100	
11	Cakupan layanan warga usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	84,74	74,36	100	100	
12	Cakupan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	100	66,84	100	100	
13	Cakupan pelayanan Kesehatan penderita DM sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Cakupan pelayanan Kesehatan penderita TBC sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Cakupan pelayanan Kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular		√	8	7	6	5	4	3	0,2	0,2	4	3	
17	Persentase terkendalinya penyakit tidak menular		√	57	60	65	70	75	80	82	88,9	75	80	

Sumber: RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

Dari 19 indikator pelayanan bidang Kesehatan sebanyak 17 indikator sudah mencapai target, sedangkan 2 indikator hampir mendekati target yang ditetapkan dengan rata-rata pencapaian target 97,86%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi. Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Isu-isu penting yang dirumuskan berkaitan dengan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan dijabarkan dalam Permendagri 59 tahun 2021, dimana pencapaian target SPM 100% menjadi kinerja kepala daerah. Begitu juga halnya dengan kesehatan yang mempunyai SPM bidang kesehatan yang teknis pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menjelaskan cara mencapai target 100 persen serta Sumber daya yang dibutuhkan sampai menghitung kebutuhan dana untuk pencapaian target. Melihat dari Sumber daya yang ada ini cukup menjadi kesulitan bagi Kesehatan dalam pencapaian target 100%. Ini merupakan tantangan serta kerja keras alam pencapain target SPM tersebut. SPM sangat berpengaruh terhadap kinerja kepala Daerah, dimana pencapaian SPM yang tidak sesuai target akan menjadi penilaian kinerja kepala daerah sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021. Selain itu sasaran strategis dari Kepala OPD berhubungan langsung dengan pencapaian SPM, dimana Sasaran Strategis kepala OPD merupakan turunan dari pencapaian misi kepala daerah termasuk ke dalam 73 tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan SPM ini adalah

pencapaian target yang harus 100%, hal ini sangat berat dalam pelaksanaannya, terlebih sejak pandemi covid, pelayanan kesehatan menjadi terhambat, namun tetap harus optimis untuk pencapaian target SPM tersebut. Peningkatan kasus Penyakit Tidak Menular Selain menangani masalah utama kesehatan yaitu: kematian ibu, bayi dan balita, gizi, kesehatan lingkungan, dan penyakit menular namun peningkatan kasus penyakit tidak menular menjadi masalah yang sulit untuk ditangani. Penyakit tidak menular merupakan indikator dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat termasuk untuk melihat umur harapan hidup. Semakin tinggi kasus penyakit tidak menular maka kematian juga semakin tinggi karena penyebab kematian tertinggi terletak pada penyakit tidak menular seperti, Jantung, stroke dan diabetes. Perubahan pola hidup masyarakat menjadi meningkatnya kasus PTM ini. Harus ada upaya yang optimal dalam penanganan serta pencegahan peningkatan kasus Penyakit Menular (PTM) ini. PTM yang sekarang meningkat yaitu Hipertensi, Diabetes, Kanker, Jantung dll. Tahun 2020 dilaporkan setelah ISPA, penyakit Hipertensi menjadi urutan nomor 2 penyakit terbanyak yang mendapat pelayanan di Puskesmas, dengan kode ICD X: I10 Essential (Primary) Hypertension. Hipertensi dalam kehamilan juga menjadi salah satu penyebab kematian ibu hamil dalam 3 tahun terakhir Hambatan dalam pelaksanaan skrining PTM ini adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memeriksakan secara rutin penyakit mereka sehingga tidak terpantaunya kondisi dari pasien PTM.

Posbindu PTM merupakan kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi yang dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Posbindu PTM bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko

PTM. Sasaran Posbindu PTM mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat dengan kasus PTM. Tahun 2022 posbindu PTM yang ada di Kabupaten Sijunjung berjumlah sebanyak 215 Posbindu yang tersebar di 13 Wilayah Puskesmas. Kunjungan sasaran yang masih rendah dan dukungan dari perangkat nagari yang masih kurang serta insentif kader Posbindu yang belum ada dianggarkan oleh nagari.

Status Gizi Masyarakat. Kementerian Kesehatan akan memfokuskan peningkatan gizi masyarakat dan telah tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2020-2024. Dimana penurunan prevalensi wasting dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) Kabupaten Sijunjung adalah 30,1%, berada di atas nasional yaitu 24,4. hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya adalah adanya masalah gizi pada anak akibat covid-19. Upaya penurunan masalah stunting tidak semata tugas sektor Kesehatan karena penyebabnya multisektoral. Harus melalui aksi sektoral dan intervensi spesifik dilakukan oleh Kesehatan, intervensi sensitif dilakukan oleh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan masalah stunting yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses penanganan gizi dan monitoring program. Sedangkan prevalensi balita kurus dan kurus sekali (wasting) di Kabupaten Sijunjung tahun 2021 adalah 8,8% dari target (5%).

Selain status gizi, kesehatan ibu dan anak juga sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Status gizi dan kesehatan ibu pada masa pra-hamil, saat kehamilan, dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis. Apabila dihitung dari sejak hari pertama kehamilan, kelahiran bayi sampai anak usia 2 tahun,

maka periode ini merupakan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) manusia. Periode 1000 HPK merupakan periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, *stroke*, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi.

Beberapa hal yang muncul terkait dengan isu Status Gizi Masyarakat diantaranya yaitu:

Integrasi program penurunan *stunting* melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang acuh dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat. Serta Integrasi program stunting dengan lintas program lainnya seperti ASI eksklusif, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil.

PMT bagi Balita kurus, upaya Pendidikan gizi dalam peningkatan ASI Eksklusif, Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), dan promosi pedoman Gizi Seimbang.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita kurus dan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi seluruh ibu hamil, dan remaja putri.
Penguatan surveilans gizi dalam pemantauan balita kurus/kurus sekali.

Pengendalian Penyakit menular serta Penyehatan Lingkungan Penyakit Menular harus diwaspadai, disaat penyakit menular yang lama belum terasi telah muncul penyakit baru Covid-19 dan menjadi bencana nasional. Data kejadian penyakit menular di Kabupaten Sijunjung, jumlah penderita Tuberkulosis tahun 2021 sebanyak 192 orang dan sebanyak 89,62% mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, penemuan penderita Pneumonia pada balita sebanyak 49,20%, Cakupan penderita DBD sebanyak 87,98%, Cakupan penemuan penderita Diare sebanyak 57,63%, Kasus gigitan Hewan penular Rabies (HPR) yang mendapat tatalaksana kasus sebanyak 96,76%. Sedangkan Kematian akibat Penyakit menular di Kabupaten Sijunjung masih cukup tinggi yang ditandai dengan tidak tercapainya target kematian akibat penyakit menular dari target yang ditetapkan <1%. Adapun kematian akibat penyakit menular disumbangkan dari adanya kematian TBC sebanyak 5 orang, dan kematian akibat HIV/AIDS sebanyak 3 orang.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam upaya menentukan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di samping faktor kualitas pelayanan kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan dilaksanakan program lingkungan sehat. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada lingkungan meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan

kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu berbagai lintas sektor ikut serta berperan (Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat, dll) baik kebijakan dan pembangunan fisik. Keadaan lingkungan tersebut dinilai dari persentase rumah sehat, penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas, penyelenggara air minum yang memenuhi syarat kesehatan, penduduk dengan akses sanitasi yang layak, desa/ jorong yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), Tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengelolaan makan (TPM) sehat serta institusi yang dibina kesehatan lingkungannya. STBM merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan-pemicuan. Penyelenggaraan kegiatan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. STBM terdiri dari 5 pilar diantaranya: stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/ makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Pada tahun 2022 dari 304 jorong yang ada di Kabupaten Sijunjung, seluruhnya telah melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan semua jorong telah melaksanakan stop buang air besar sembarangan (Stop BABS), namun belum ada jorong yang telah menuntaskan 5 pilar STBM tersebut. Sedangkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak di Kabupaten Sijunjung telah mencapai 92,73%, jamban sehat sebanyak 100%, tempat umum (TTU) memenuhi syarat Kesehatan baru sebanyak

55,47%, tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat Kesehatan 53,74%.

Beberapa hal yang muncul terkait dengan isu pengendalian penyakit menular serta Penyehatan Lingkungan diantaranya yaitu:

1. Pola hidup yang tidak sehat yang menyebabkan peningkatan penyakit menular.
2. Kondisi lingkungan yang tidak sehat meningkatkan kejadian penyakit.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat,
4. Perlunya peningkatan Kerjasama nagari dalam mewujudkan STBM.

Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Pada era reformasi dan desentralisasi ini, keterbukaan publik terhadap pelayanan kesehatan sudah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh SKPD penyelenggara pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang muncul terkait dengan isu pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan muncul dalam pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan di tingkat nagari, pemenuhan ambulans dan puskesmas keliling juga pemenuhan sarana kesehatan rujukan di wilayah utara.
2. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan performance, kompetensi dan keterampilan petugas dan peningkatan kualitas pelayanan dengan akreditasi puskesmas.
3. Peningkatan pemerataan dan penyebaran (distribusi) petugas kesehatan ke seluruh nagari khususnya daerah sulit dijangkau

disertai dengan peningkatan pengawasan dan pembinaannya.

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memberikan amanat bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial yang akan melakukan kegiatan diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri 2 yaitu dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dilakukan semenjak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program JKN. JKN diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang ditargetkan mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk.

Pemerintah memberikan Jaminan kesehatan Nasional kepada masyarakat miskin dengan menanggung biaya premi iuran kepesertaannya. Dalam pelaksanaannya program JKN ini ada pembagian tanggung jawab dalam pembayaran premi iuran kepesertaan JKN tersebut, untuk masyarakat miskin yang dulunya mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat otomatis mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk masyarakat yang miskin yang tidak mendapatkan KIS ditampung oleh pemerintah daerah dengan mengikutkan menjadi peserta BPJS dengan premi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2022 masyarakat Kabupaten Sijunjung yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 21.299 orang (8,97%). yang terdiri dari JKSS sebanyak 12.205 orang dan JAMKESDA

9.094 orang dan juga ada kepesertaan PBPU mandiri sebanyak 9000 orang yang datanya tidak tetap tiap bulan nya Peserta penerima bantuan dari jaminan kesehatan yang dibayarkan dengan alokasi APBD Kabupaten Sijunjung sebanyak 21.299 orang (8,97%) dengan jumlah dana 7.386.993.600 Kendala dalam JKN ini adalah belum tercapainya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang masuk dalam keanggotaan JKN disebabkan karena kekurangan anggaran Pemda dengan jumlah penduduk sekitar 240.079 orang dengan jumlah peserta 19.142 orang sekitar 20.42 % lagi.

Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sarana Penyuluhan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat antara lain:

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita

   Posyandu merupakan wadah yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Posyandu balita kegiatannya antara lain yaitu pemantauan pertumbuhan anak melalui penimbangan, pemantauan dan pelayanan imunisasi, serta pemberian makanan tambahan bagi balita yang pertumbuhannya lambat.

   Tahun 2022 jumlah posyandu balita yang ada di Kabupaten Sijunjung berjumlah 320 Posyandu dengan jumlah kader 5 orang per posyandu sebahagian besar merupakan posyandu purnama 234 (73%) dan posyandu mandiri 50 (15%) d dan selebihnya posyandu madya sekitar 36 (11.25%) dengan rasio posyandu 1.2 per 100 balita. Kendala dalam peningkatan strata posyandu adalah masih kurang nya program inovasi serta ketersediaan dana sehat pada kegiatan posyandu.

2. Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak menular (PTM)

   Posbindu PTM merupakan kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi yang

dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Posbindu PTM bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sasaran Posbindu PTM mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat dengan kasus PTM. Tahun 2022 posbindu PTM yang ada di Kabupaten Sijunjung berjumlah sebanyak 215 Posbindu yang tersebar di 13 Wilayah Puskesmas. Kunjungan sasaran yang masih rendah dan dukungan dari perangkat nagari yang masih kurang serta insentif kader Posbindu yang belum ada dianggarkan oleh nagari. Yang merupakan diantara kendala dalam pelaksanaan posbindu.

Masalah dan Hambatan Pelayanan Kesehatan

Masalah dan Hambatan yang masih ditemui dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sijunjung antara lain: Kualitas kesehatan lingkungan rendah yang berdampak kepada timbulnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan.

Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita.

Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin secara sinergi dimana banyak kegiatan lintas sektor yang telah dilaksanakan tetapi belum berkesinambungan dan memberikan hasil yang optimal.

Pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasinya.

Pergeseran perilaku, gaya hidup dan pola konsumsi mempengaruhi kejadian penyakit tidak menular.

Distribusi petugas Kesehatan yang belum merata.

Berbagai hambatan yang ada tentunya akan memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja yang dituangkan dalam indikator-

indikator yang telah ditetapkan. Hambatan lain adalah bahwa pencapaian indikator makro seperti untuk SDGs yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Status Gizi bukan hanya tergantung pada sektor kesehatan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikontribusikan pula dari sektor lain. Oleh karena itu perencanaan program yang komprehensif dengan melibatkan sektor terkait menjadi sangat penting untuk mengungkit keberhasilan pencapaian indikator yang ditetapkan.

Tantangan dan Peluang dalam Pelayanan Kesehatan

Tantangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas.

Regulasi di bidang kesehatan masih kurang.

Adanya beban ganda dalam penanggulangan penyakit oleh karena munculnya penyakit-penyakit baru dan penyakit yang sudah pernah hilang muncul kembali sehingga penanganannya membutuhkan upaya yang lebih keras lagi.

Perubahan gaya hidup, perilaku dan pola makan, mempengaruhi kejadian penyakit tidak menular dan gizi di masyarakat.

Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin dengan optimal dimana banyak kegiatan lintas sektor yang telah dilaksanakan tetapi belum berkembang dan berkesinambungan dengan baik.

Pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasinya.

Sedangkan peluang yang muncul dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, sebagai berikut:

Adanya otonomi daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada Kabupaten dalam pengembangan dan penyusunan

sistem pelayanan kesehatan yang bersifat lokal spesifik.

Adanya pengembangan kawasan, pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar, merupakan peluang dalam peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Adanya kemudahan komunikasi, akan mempercepat dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah-masalah kesehatan yang harus segera ditangani serta meningkatkan koordinasi.

Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung program2 bidang kesehatan dilihat dari prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD maupun RKPD.

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

Mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat;

Melaksanakan percepatan dalam mencapai target SDG's dan SPM Kesehatan yang belum sepenuhnya tercapai;

Meningkatkan Surveilans penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

Meningkatkan promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat;

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005–2025, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya namun pada sub kegiatan ada perubahan nomenklatur adanya sub kegiatan yang tidak muncul

dan adanya penggabungan kegiatan.

Review terhadap RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan kabupaten Sijunjung berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupa RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Masyarakat.

Rincian perbandingan perbandingan RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Rancangan RKPD Perubahan Dinas Kesehatan
Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Catatan Penting
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	20
						DINAS KESEHATAN				101.574.582.742,00	129.990.174.368,20	135.619.466.298,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				101.574.582.742,00	129.990.174.368,20	135.619.466.298,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				101.574.582.742,00	129.990.174.368,20	135.619.466.298,00		
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	68.354.710.072,00	91.671.448.133,20	91.488.280.060,40		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	50.000.000,00	22.930.700,00	22.930.700,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	16.963.000,00	4.347.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.967.700,00	1.201.480,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	67.023.710.072,00	91.078.867.465,00	91.078.867.465,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/bulan	650 Orang/bulan	66.992.710.072,00	91.064.927.965,00	91.064.927.965,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	5.344.500,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	25.000.000,00	8.595.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kepegawaian yang di proses tepat waktu	100 persen	100 persen	60.000.000,00	0,00	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	118 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	80 persen	80 persen	516.000.000,00	143.265.686,20	143.265.686,20		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.000.000,00	1.523.600,00	761.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik	10 Paket	10 Paket	80.000.000,00	25.402.450,00	10.426.510,00	Dana Alokasi	DINAS KESEHATAN

							Kantor yang Disediakan						Umum (DAU)	
	1	0 2	0 1	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	7.524.450,00	3.009.780, 00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	7.529.200,00	2.249.760, 00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	400.000.000,0 0	101.285.986,2 0	50.097.699 ,40	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	280.000.000,0 0	301.881.432,0 0	301.881.43 2,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	155.000.000,0 0	147.579.432,0 0	81.881.616 ,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	154.302.000,00	154.302.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 persen	100 persen	425.000.000,00	124.502.850,00	124.502.850,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	20.336.850,00	18.836.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	89.876.000,00	83.376.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	35.000.000,00	14.290.000,00	12.861.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Akreditasi Minimal Utama Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kesehatan Persentase PHBS Prevalensi Balita Wasting	100 100 65 75 % persen persen persen	100 100 65 75 persen Persen persen persen	30.829.872.670,00	37.134.953.235,00	42.804.244.597,60		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Fasyankes	100 persen	100 persen	16.110.230.670,00	23.387.153.492,00	23.387.153.492,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	6.765.277.490,00	6.851.550.996,00	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	DINAS KESEHATAN

													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	328.087.970,00	3.364.419.750,00	3.302.422.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan	DINAS KESEHATAN

														Kesehatan Dasar	
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	1.541.364.000,00	500.000.000,00	936.709.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	1.220.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	8.170.778.700,00	6.406.279.350,00	6.570.452.289,91	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	100 Unit	150.000.000,00	223.558.010,00	253.280.239,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	4.400.000.000,00	6.016.821.892,00	6.247.610.968,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi	DINAS KESEHATAN

													Hasil Pajak Rokok	
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	13 Paket	13 Paket	100.000.000,0 0	110.797.000,0 0	110.797.00 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	14.424.642.00 0,00	13.456.110.43 5,01	13.456.110 .435,01		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5679 Orang	5679 Orang	695.642.000,0 0	200.000.000,0 0	60.504.840 ,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5421 Orang	5421 Orang	125.000.000,00	118.240.000,00	92.744.780,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4957 Orang	4957 Orang	200.000.000,00	140.000.000,00	247.155.370,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25371 Orang	25371 Orang	140.000.000,00	96.700.000,00	84.421.230,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	41694 Orang	52150 Orang	75.000.000,00	52.500.000,00	25.200.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar						BOKKB-BOK	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165362 Orang	165362 Orang	100.000.000,00	70.000.000,01	32.975.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21225 Orang	21225 Orang	75.000.000,00	81.038.000,00	54.105.719,89	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44152 Orang	44152 Orang	110.000.000,00	101.027.840,00	101.027.840,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								

							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	450 Orang	150.000.000,00	32.052.600,00	14.886.115,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	530 Orang	530 Orang	60.000.000,00	42.000.000,00	20.312.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2655 Orang	2655 Orang	150.000.000,00	90.300.800,00	43.726.320,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3558 Orang	3558 Orang	135.000.000,00	94.500.000,00	46.174.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	49.000.000,00	23.314.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	52.500.000,00	25.258.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52 Dokumen	52 Dokumen	100.000.000,00	70.000.000,00	34.930.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	24 Dokumen	67.000.000,00	203.551.500,00	135.412.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokume n	200.000.000,0 0	174.999.995,0 0	87.779.695 ,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	8 Dokume n	290.000.000,0 0	520.427.500,0 0	395.118.70 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokume n	25.000.000,00	17.500.000,00	3.540.000, 00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokume n	100.000.000,0 0	91.738.000,00	55.650.500 ,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 Dokumen	14 Dokumen	300.000.000,00	467.441.000,00	430.867.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000.000,00	9.964.500.000,00	15.769.434.916,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 paket Paket	12 paket Paket	31.000.000,00	21.700.000,00	9.813.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	7 Dokumen	200.000.000,00	172.200.000,00	86.078.160,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	186.194.000,00	181.916.970,80	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit	75.000.000,00	52.500.000,00	27.039.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	27.300.000,00	12.226.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	16.624.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	744 Orang	744 Orang	6.000.000,00	18.899.200,00	9.226.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	744 Orang	744 Orang	6.000.000,00	4.200.000,00	1.930.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	252275 Orang	252275 Orang	25.000.000,00	17.500.000,00	8.219.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen	0,00	155.600.000,00	155.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %	100 %	200.000.000,0 0	145.276.307,9 9	145.276.30 7,99		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 3	00 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokume n	200.000.000,0 0	145.276.307,9 9	87.947.218 ,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- Dana BOK- BOK Dinas- BOK Kabupate n/Kota	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	95.000.000,00	146.413.000,0 0	146.413.00 0,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 4	00 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18 Unit	18 Unit	25.000.000,00	17.500.000,00	8.297.000, 00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 4	00 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								

							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16 Unit	16 Unit	70.000.000,00	128.913.000,00	106.961.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Akreditasi Minimal Utama	100 persen	100 persen	995.000.000,00	351.500.000,00	383.484.100,00		
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki izin praktek sesuai standar	100 %	100 %	80.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	240 Dokumen	240 Dokumen	20.000.000,00	14.000.000,00	6.692.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	240 Dokumen	240 Dokumen	60.000.000,00	47.000.000,00	15.210.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan	100 %	100 %	15.000.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000,00	45.500.000,00	22.214.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensi	100 %	100 %	900.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	900.000.000,00	245.000.000,00	339.368.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN

4	1	0 2	0 4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Akreditasi Minimal Utama	undefined undefined	undefined undefined	610.000.000,00	399.565.000,00	364.643.040,00		
	1	0 2	0 4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Fasyankes	100 persen	100 persen	520.000.000,00	336.565.000,00	336.565.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 4	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	12 Dokumen	520.000.000,00	336.565.000,00	71.578.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Presentase rekomendasi yang diberikan untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	100 %	100 %	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		DINAS KESEHATAN

							Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
	1	0 2	0 4	2.0 3	00 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokume n	20.000.000,00	14.000.000,00	201.043.04 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diberikan	100 %	100 %	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	16.377.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang diawasi	40 IRT	40 IRT	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								

							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	40 Unit	20.000.000,00	14.000.000,00	75.644.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prevalensi Wasting Cakupan PHBS Rumah Tangga	75 98.00 persen	75 98.00 persen	785.000.000,00	432.708.000,00	578.814.500,00		
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari siaga aktif	98 persen	98 persen	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	575.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00		DINAS KESEHATAN

	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	26 Dokumen	1 Dokumen	575.000.000,00	52.500.000,00	25.528.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	190.000.000,00	366.208.000,00	366.208.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	190.000.000,00	366.208.000,00	546.286.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kamang Baru				0,00	3.902.835.850,00	5.741.082.108,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	3.902.835.850,00	5.741.082.108,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00	3.902.835.850,00	5.741.082.108,00		

6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	3.397.835.850,00	3.397.835.850,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	3.397.835.850,00	3.397.835.850,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	3.397.835.850,00	3.397.835.850,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	505.000.000,00	2.343.246.258,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	12 Dokumen	0,00	505.000.000,00	505.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	12 Dokumen	0,00	505.000.000,00	2.343.246.258,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
						Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)				621.802.915,00	773.838.680,00	831.163.520,00		

	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				621.802.915,00	773.838.680,00	831.163.520,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				621.802.915,00	773.838.680,00	831.163.520,00		
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	450.450.915,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	450.450.915,00	500.000.000,00	500.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	450.450.915,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	171.352.000,00	168.761.680,00	226.086.520,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	171.352.000,00	168.761.680,00	168.761.680,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								

							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	171.352.000,00	168.761.680,00	226.086.520,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	0,00	105.077.000,00	105.077.000,00		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	105.077.000,00	105.077.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	3 Laporan Dokumen	0,00	105.077.000,00	105.077.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

						Puskesmas Sungai Lansek				1.834.057.015,00	1.970.489.015,00	1.870.889.015,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.834.057.015,00	1.970.489.015,00	1.870.889.015,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.834.057.015,00	1.970.489.015,00	1.870.889.015,00		
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	1.238.255.015,00	1.238.255.015,00	1.238.255.015,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	1.238.255.015,00	1.238.255.015,00	1.238.255.015,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Unit Kerja 100 persen	1 Unit Kerja 100 persen	1.238.255.015,00 595.802.000,00	1.238.255.015,00 725.817.000,00	1.238.255.015,00 626.217.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	595.802.000,00	725.817.000,00	725.817.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390 Orang	390 Orang	0,00	52.155.800,00	52.155.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	373 Orang	373 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2867 Orang	2867 Orang	0,00	46.400.000,00	30.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	26 Orang	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	5 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								

							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	246.232.200,00	217.732.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	31.200.000,00	24.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	7.931.900,00	7.931.900,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	116.251.000,00	72.151.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Menular dan Tidak Menular							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokume n	595.802.000,0 0	169.746.100,0 0	169.746.10 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	10 Dokume n	0,00	9.600.000,00	9.600.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	10 Dokume n	0,00	4.000.000,00	4.000.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	5.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	6.417.000,00	6.417.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	0,00	6.417.000,00	6.417.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.417.000,00	6.417.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kamang				2.539.979.466,00	2.704.183.466,00	2.588.283.466,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.539.979.466,00	2.704.183.466,00	2.588.283.466,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.539.979.466,00	2.704.183.466,00	2.588.283.466,00		

14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota	100 persen	100 100 %	1.829.468.466,00	1.829.468.466,00	1.829.468.466,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	1.829.468.466,00	1.829.468.466,00	1.829.468.466,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Unit Kerja 100 persen	1 Unit Kerja 100 persen	1.829.468.466,00 710.511.000,00	1.829.468.466,00 866.586.600,00	1.829.468.466,00 750.686.600,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	710.511.000,00	866.586.600,00	866.586.600,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	537 Orang	537 Orang	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	513 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2720 Orang	2720 Orang	0,00	80.000.000,00	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	60 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 Orang	462 Orang	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								

							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1034 Orang	1034 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	297.672.800,00	266.772.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	33 Dokumen	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.300.200,00	10.300.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan	-	50 Orang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Pelayanan Kesehatan							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	132.115.300,0 0	87.115.300 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokume n	710.511.000,0 0	223.227.400,0 0	223.227.40 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.725.300,00	9.725.300,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.045.600,00	3.045.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
16	1	0 2	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	8.128.400,00	8.128.400,00		
	1	0 2	0 5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	100 persen	100 persen	0,00	8.128.400,00	8.128.400,00		DINAS KESEHATAN

							Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.128.400,00	8.128.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Air Amo				1.221.050.447,00	1.384.744.447,00	1.349.332.187,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.221.050.447,00	1.384.744.447,00	1.349.332.187,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.221.050.447,00	1.384.744.447,00	1.349.332.187,00		
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	undefined undefined	undefined undefined	686.395.447,00	686.395.447,00	686.395.447,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	686.395.447,00	686.395.447,00	686.395.447,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	686.395.447,00	686.395.447,00	686.395.447,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN

							Penunjang Pelayanan							
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	534.655.000,00	685.195.300,00	654.936.740,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	534.655.000,00	685.195.300,00	685.195.300,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	476 Orang	0,00	47.680.000,00	47.680.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	274 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	272 Orang	0,00	40.000.000,00	27.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	120 Orang	0,00	12.000.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 0	89 0	0,00	11.400.000,00	8.900.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	274 Orang	274 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	83 Dokumen	234 Dokume n	0,00	234.855.800,0 0	230.282.64 0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	184 Dokume n	0,00	18.400.000,00	18.400.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	76 Dokumen	76 Dokume n	0,00	7.900.000,00	7.900.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33 Dokumen	33 Dokume n	0,00	3.200.000,00	3.200.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	24 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	17 Dokume n	0,00	107.609.700,0 0	86.109.700 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokume n	534.655.000,0 0	169.000.400,0 0	154.164.40 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14 Orang	14 Orang	0,00	0,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	68 Dokumen	68 Dokumen	0,00	12.600.000,00	6.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	931 Dokumen	931 Dokumen	0,00	8.149.400,00	60.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100 Dokumen	0,00	10.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	13.153.700,00	8.000.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	0,00	13.153.700,00	13.153.700,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80 Dokumen	80 Dokumen	0,00	13.153.700,00	8.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Tanjung Gadang				2.843.062.573,00	3.054.190.573,00	3.054.190.573,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.843.062.573,00	3.054.190.573,00	3.054.190.573,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.843.062.573,00	3.054.190.573,00	3.054.190.573,00		
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	2.090.430.573,00	2.090.430.573,00	2.090.430.573,00		

	1	0 2	0 1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	2.090.430.573, 00	2.090.430.573 ,00	2.090.430. 573,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.1 0	00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.090.430.573, 00	2.090.430.573 ,00	2.090.430. 573,00	Pendapat an dari BLUD	DINAS KESEHATAN
2 1	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	752.632.000,0 0	949.216.600,0 0	949.216.60 0,00		
	1	0 2	0 2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	752.632.000,0 0	949.216.600,0 0	949.216.60 0,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	556 Orang	556 Orang	0,00	34.000.000,00	34.000.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	595 Orang	595 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4366 Orang	4366 Orang	0,00	97.600.000,00	97.600.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	140 Orang	0,00	14.000.000,00	14.000.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	390 Orang	390 Orang	0,00	15.900.000,00	15.900.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	478 Orang	478 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	322.514.500,00	322.514.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	142 Dokumen	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	38 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	141.057.000,00	141.057.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Menular dan Tidak Menular							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokume n	752.632.000,0 0	233.545.100,0 0	233.545.10 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	478 Orang	478 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	36.300.000,00	36.300.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	108 Dokumen	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	14.543.400,00	14.543.400,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	0,00	14.543.400,00	14.543.400,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.543.400,00	14.543.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Sijunjung				3.020.844.687,00	3.288.566.687,00	3.288.566.687,00		

	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.020.844.687,00	3.288.566.687,00	3.288.566.687,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.020.844.687,00	3.288.566.687,00	3.288.566.687,00		
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	2.461.313.687,00	2.461.313.687,00	2.461.313.687,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	2.461.313.687,00	2.461.313.687,00	2.461.313.687,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.461.313.687,00	2.461.313.687,00	2.461.313.687,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	559.531.000,00	818.443.800,00	818.443.800,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	559.531.000,00	818.443.800,00	818.443.800,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	652 Orang	652 Orang	0,00	50.542.500,00	50.542.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4788 Orang	4788 Orang	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	427 Orang	427 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	284.296.600,00	284.296.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	13.542.500,00	13.542.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan	-	0 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Pelayanan Kesehatan							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	115.800.000,0 0	115.800.00 0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokume n	559.531.000,0 0	208.559.900,0 0	208.559.90 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	10 Dokume n	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	10 Dokume n	0,00	12.000.000,00	12.000.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	10 Dokume n	0,00	3.102.300,00	3.102.300, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokume n	0,00	12.000.000,00	12.000.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	8.809.200,00	8.809.200,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	8.809.200,00	8.809.200,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 0	0,00	8.809.200,00	8.809.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Gambok				1.936.650.128,00	2.048.877.128,00	2.048.877.128,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.936.650.128,00	2.048.877.128,00	2.048.877.128,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.936.650.128,00	2.048.877.128,00	2.048.877.128,00		
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 persen	-	1.264.946.128,00	1.264.946.128,00	1.264.946.128,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	100 persen	-	1.264.946.128,00	1.264.946.128,00	1.264.946.128,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	1.264.946.128,00	1.264.946.128,00	1.264.946.128,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN

							Penunjang Pelayanan							
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100 persen	-	671.704.000,00	770.321.200,00	770.321.200,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 persen	-	671.704.000,00	770.321.200,00	770.321.200,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	12 Orang	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	392 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3411 Orang	546 Orang	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	370 Orang	31 Orang	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	257.820.400,00	257.820.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	122.469.400,00	122.469.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	671.704.000,00	196.312.600,00	196.312.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.058.800,00	3.058.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	13.609.800,00	13.609.800,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	13.609.800,00	13.609.800,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	13.609.800,00	13.609.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Lubuk Tarok				1.864.356.885,00	1.928.588.885,00	1.928.588.885,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.864.356.885,00	1.928.588.885,00	1.928.588.885,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.864.356.885,00	1.928.588.885,00	1.928.588.885,00		
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	1.157.060.885,00	1.157.060.886,00	1.157.060.886,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 persen	100 persen	1.157.060.885,00	1.157.060.886,00	1.157.060.886,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.157.060.885,00	1.157.060.886,00	1.157.060.886,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	706.046.000,00	766.622.999,00	766.622.999,00		

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	706.046.000,00	766.622.999,00	766.622.999,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	372 Orang	300 Orang	0,00	58.180.000,00	58.180.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	353 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1650 Orang	1650 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3069 Orang	3069 Orang	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	56 Orang	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	267 Orang	267 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	276.090.000,00	276.090.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	56 Orang	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	109.500.000,00	109.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	706.046.000,00	210.652.999,00	210.652.999,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
3 1	1	0 2	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	1.250.000,00	4.905.000,00	4.905.000,00		

	1	0 2	0 5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	1.250.000,00	4.905.000,00	4.905.000, 00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	2.0 3	00 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokume n	1.250.000,00	4.905.000,00	4.905.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Muaro Bodi				1.747.860.830, 00	1.708.035.830 ,00	1.708.035. 830,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.747.860.830, 00	1.708.035.830 ,00	1.708.035. 830,00		
	1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.747.860.830, 00	1.708.035.830 ,00	1.708.035. 830,00		
3 2	1	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	1.223.759.830, 00	1.223.759.830 ,00	1.223.759. 830,00		
	1	0 2	0 1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	1.223.759.830, 00	1.223.759.830 ,00	1.223.759. 830,00		DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.10	00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.223.759.830,00	1.223.759.830,00	1.223.759.830,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	524.101.000,00	483.876.000,00	483.876.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	524.101.000,00	483.876.000,00	483.876.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	319 Orang	319 Orang	0,00	19.865.000,00	19.865.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303 Orang	303 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1819 Orang	1819 Orang	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1380 Orang	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	20 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 kasus Orang	2 kasus Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	150.474.600,00	150.474.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100% Dokumen	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	73.244.400,00	73.244.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	524.101.000,00	143.458.300,00	143.458.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	60 Orang	0,00	4.900.000,00	4.900.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	100% Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	1.400.000,00	1.400.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	1.233.700,00	1.233.700, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0,00	400.000,00	400.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	400.000,00	400.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Padang Sibusuk				1.374.298.933,00	1.556.752.933,00	1.544.871.233,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.374.298.933,00	1.556.752.933,00	1.544.871.233,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.374.298.933,00	1.556.752.933,00	1.544.871.233,00		
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	958.470.933,00	958.470.933,00	958.470.933,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	958.470.933,00	958.470.933,00	958.470.933,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	958.470.933,00	958.470.933,00	958.470.933,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	415.828.000,00	598.282.000,00	586.400.300,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	415.828.000,00	598.282.000,00	598.282.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	0,00	11.881.700,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	300 Orang	300 Orang	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	0,00	10.500.000,00	10.500.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	14 Orang	0,00	2.100.000,00	2.100.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	146.515.300,0 0	146.515.30 0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	7.000.000,00	7.000.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	5.600.000,00	5.600.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Surveilans Kesehatan							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	89.100.000,00	89.100.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokume n	415.828.000,0 0	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokume n	0,00	167.775.400,0 0	167.775.40 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	700.000,00	700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Pemberian Obat Massal)							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	34.077.100,00	34.077.100 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	42.092.500,00	42.092.500 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Tanjung Ampalu				2.694.254.639, 00	2.976.776.639 ,00	2.975.976. 639,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.694.254.639, 00	2.976.776.639 ,00	2.975.976. 639,00		
	1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.694.254.639, 00	2.976.776.639 ,00	2.975.976. 639,00		
3 7	1	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	2.072.556.639, 00	2.072.556.639 ,00	2.072.556. 639,00		
	1	0 2	0 1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	2.072.556.639, 00	2.072.556.639 ,00	2.072.556. 639,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.1 0	00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.072.556.639,00	2.072.556.639,00	2.072.556.639,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	621.698.000,00	904.220.000,00	903.420.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	621.698.000,00	904.220.000,00	904.220.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	819 Orang	0,00	81.997.300,00	81.197.300,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	540 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	3048 Orang	417 Orang	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	67 Orang	0,00	6.700.000,00	6.700.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	84 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3 Orang	6 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	2779 Dokume n	0,00	277.949.200,0 0	277.949.20 0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	121 Dokumen	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	123 Dokumen	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	331 Dokumen	0,00	33.100.000,00	33.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1145 Dokumen	0,00	114.588.700,00	114.588.700,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	2224 Dokumen	621.698.000,00	222.584.800,00	222.584.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	6 Laporan	0,00	700.000,00	700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	8 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	210 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	387 Dokumen	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Padang Laweh				1.860.757.509,00	1.600.122.401,00	1.600.122.401,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.860.757.509,00	1.600.122.401,00	1.600.122.401,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.860.757.509,00	1.600.122.401,00	1.600.122.401,00		
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	1.233.470.509,00	928.449.401,00	928.449.401,00		

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	1.233.470.509,00	928.449.401,00	928.449.401,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.233.470.509,00	928.449.401,00	928.449.401,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	627.287.000,00	665.465.500,00	665.465.500,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	627.287.000,00	665.465.500,00	665.465.500,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang	294 Orang	0,00	43.210.000,00	43.210.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Sesuai Standar							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1996 Orang	1996 Orang	0,00	32.800.000,00	32.800.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	30 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	190 Orang	190 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	258.540.500,00	258.540.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	30 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	110.797.000,00	110.797.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							Menular dan Tidak Menular							
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokume n	627.287.000,0 0	146.597.000,0 0	146.597.00 0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	25.100.000,00	25.100.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokume n	0,00	5.321.000,00	5.321.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokume n	0,00	4.800.000,00	4.800.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
4 2	1	0 2	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	6.207.500,00	6.207.500, 00		
	1	0 2	0 5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	100 persen	100 persen	0,00	6.207.500,00	6.207.500, 00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	2.0 3	00 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.207.500,00	6.207.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kumanis				1.590.830.934,00	1.691.581.934,00	1.691.581.934,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.590.830.934,00	1.691.581.934,00	1.691.581.934,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.590.830.934,00	1.691.581.934,00	1.691.581.934,00		
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	1.123.276.934,00	1.123.276.934,00	1.123.276.934,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	1.123.276.934,00	1.123.276.934,00	1.123.276.934,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.123.276.934,00	1.123.276.934,00	1.123.276.934,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	467.554.000,00	550.293.000,00	550.293.000,00		

	1	0 2	0 2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	467.554.000,0 0	550.293.000,0 0	550.293.00 0,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	417 Orang	0,00	35.668.000,00	35.668.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37 Orang	37 Orang	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	1500 Orang	0,00	34.400.000,00	34.400.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	80 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	63 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	209 Dokume n	0,00	220.179.500,0 0	220.179.50 0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	35 Dokume n	0,00	3.500.000,00	3.500.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	47 Dokumen	76 Dokume n	0,00	7.600.000,00	7.600.000, 00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	53 Dokumen	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	891 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	884 Dokumen	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen	467.554.000,00	119.905.500,00	119.905.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	48 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100 Dokumen	63 Dokumen	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
4 5	1	0 2	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	18.012.000,00	18.012.000,00		
	1	0 2	0 5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Koa	100 persen	100 persen	0,00	18.012.000,00	18.012.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	2.0 3	00 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	105 Dokumen	0,00	18.012.000,00	18.012.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Sumpur Kudus				1.202.138.934,00	1.193.536.703,00	1.193.536.703,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.202.138.934,00	1.193.536.703,00	1.193.536.703,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.202.138.934,00	1.193.536.703,00	1.193.536.703,00		
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 persen	100 persen	722.718.934,00	722.718.703,00	722.718.703,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	100 persen	100 persen	722.718.934,00	722.718.703,00	722.718.703,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	722.718.934,00	722.718.703,00	722.718.703,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen	100 persen	479.420.000,00	467.273.100,00	467.273.100,00		

	1	0 2	0 2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	479.420.000,0 0	467.273.100,0 0	467.273.10 0,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	274 Orang	0,00	20.000.000,00	20.000.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2010 Orang	2010 Orang	0,00	38.400.000,00	38.400.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	30 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000 ,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang	185 Orang	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	127.174.600,00	127.174.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	30 Orang	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	60.744.400,00	60.744.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	479.420.000,00	126.455.400,00	126.455.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN

							kesehatan sesuai standar							
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	4.127.500,00	4.127.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	1.871.200,00	1.871.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
48	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 persen	100 persen	0,00	3.544.900,00	3.544.900,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	100 persen	100 persen	0,00	3.544.900,00	3.544.900,00		DINAS KESEHATAN

							Kabupaten/Kota							
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	3.544.900,00	3.544.900,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif				43.000.000.000,00	58.242.987.800,00	58.242.987.800,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.000.000.000,00	58.242.987.800,00	58.242.987.800,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				43.000.000.000,00	58.242.987.800,00	58.242.987.800,00		
49	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	43.000.000.000,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN

							yang Disediakan							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 paket	43.000.000.000,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 tahun Unit Kerja	1 tahun Unit Kerja	43.000.000.000,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	0,00	14.242.987.800,00	14.242.987.800,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	1 paket	0,00	14.242.987.800,00	14.242.987.800,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1Paket Unit	1Paket Unit	0,00	10.337.796.674,00	10.337.796.674,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	DINAS KESEHATAN

													Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit								
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1Paket Unit	1Paket Unit	0,00	3.905.191.126,00	3.905.191.126,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	DINAS KESEHATAN
51	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	0,00	0,00	0,00		

	1	0 2	0 3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	1 paket	0,00	0,00	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 3	2.0 2	00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah Kamang Baru				101.574.582.7 42,00	129.990.174.3 68,20	135.619.46 6.298,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				101.574.582.7 42,00	129.990.174.3 68,20	135.619.46 6.298,00		
	1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				101.574.582.7 42,00	129.990.174.3 68,20	135.619.46 6.298,00		
5 2	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	30.829.872.67 0,00	37.134.953.23 5,00	42.804.244 .597,60		
	1	0 2	0 2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	16.110.230.67 0,00	23.387.153.49 2,00	23.387.153 .492,00		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	DINAS KESEHATAN

	J U M L A H	**101.574.582.742,00**	**129.990.174.368,20**	**135.619.466.298,00**		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Bab I diatas telah dibahas bahwa Penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik, partisipatif, bottom-up* dan *top-down* dimana proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sijunjung, demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses Musrenbang baik di tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kabupaten, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan- usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Program dan kegiatan yang bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD baik dari segi penjelasan kesehatauai tersebut maupun pada saat melakukan rekapitulasi program dan kegiatan bersumber masyarakat.

Tabel 2.6
Usulan Program Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sijunjung
Tahun 2025

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		
	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
1	Penambahan ruang rawat Inap Puskesmas Lubuk Tarok	Nagari Lubuk Tarok		1 paket	Usulan Puskesmas
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
	Pembangunan Pustu Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan	Nagari TBA Selatan		1 paket	
	Pembangunan Pustu Tamparungo	Nagari Tamparungo		1 paket	
	Pembangunan Pustu Sumpur Kudus Selatan	Nagari Sumpur Kudus Selatan		1 paket	
	Pembangunan Pustu Lubuk Tarantang	Nagari Lubuk Tarantang		1 paket	
	Pembangunan Pustu Banjar Tengah	Nagari Air Amo		1 paket	
	Pembangunan Pustu Padang Laweh Selatan	Nagari Padang Laweh Selatan		1 paket	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang		

			ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PHBS		
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Rencana kerja dan pendanaan Perubahan Dinas kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. **135.619.466.298,00**,- (Seratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Dinas Kesehatan 5 program, 20 Kegiatan dan 74 Sub kegiatan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 3 program, 5 Kegiatan dan 6 Sub kegiatan
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2 program, 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan
Puskesmas (13 buah) 3 program, 4 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan

3.1 Uraian Dinas Kesehatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD.
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Fasilitasi Kunjungan tamu.

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota.

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Pengembangan Puskesmas

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/ kota.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin.

Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Pengelolaan Kesehatan balita.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia produktif.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB).

Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga.

Pengelolaan Kesehatan lingkungan.

Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan,

Pengelolaan pelayanan Kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya.

Pengelolaan surveilans Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Deteksi dini penyalahgunaan napza difasyankes dan sekolah.

Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke laboratorium rujukan/nasional.

Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat.

Operasional pelayanan rumah sakit.

Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya.

Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota.

Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal).

Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan TBC.

Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan HIV/AIDS (ODHIV).

Pengelolaan Kesehatan malaria.

Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi.

Pengelolaan sistem informasi Kesehatan.

Penerbitan izin RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya.

Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota

Pengendalian perizinan praktek tenaga Kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga Kesehatan.

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota.

Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia Kesehatan.

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optik usaha mikro obat tradisional (UMOT).

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat.

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya kesehatan (UKBM).

Uraian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Rumah Sakit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

3.2 Uraian Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Peningkatan Pelayanan BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Uraian Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Peningkatan Pelayanan BLUD

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Operasional Pelayanan Puskesmas

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV

PENUTUP

1. Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan.
2. Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung yang Sehat, kuat, cerdas dan berakhlak mulia, dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.

Muaro Sijunjung, 01 Agustus 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

Hardy Oscar Hidayat, S.STP, M.Si
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19830328 200312 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, merupakan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, Dokumen ini memuat tentang Evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran perangkat kerja sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Perubahan Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Muaro Sijunjung, 09 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG

JAHERI, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19730311 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1
- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Landasan Hukum 2
- 1.3. Maksud dan Tujuan 4
- 1.4. Sistematika Penulisan 5

II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN 6
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025 6
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMPTS 11
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMPTSP 15
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD 16
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat 17

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 26
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMPTSP 27
- 3.3. Program dan Kegiatan 28

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 31

V. PENUTUP 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2025 yang telah ditetapkan. Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan surat Bupati Sijunjung Nomor 050/121/Bapppeda-2025 tanggal 22 April 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung, antara lain :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.
2. Penyesuaian realokasi anggaran Program /Kegiatan, pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam rangka mencapai target RPJMD 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dilakukan dengan melandaskan pada sejumlah aturan perundangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
3. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat ;
4. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang- undang RI nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
12. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
13. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Naskah Perubahan RENJA merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025. Oleh karena itu maksud disusunnya Perubahan RENJA Tahun 2025 adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
2. Diharapkan mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pengembangan Penanaman Modal yang ditetapkan.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
2. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan, Tahunan serta LKjIP dan masukan bagi penyusunan LPJ Bupati Kabupaten Sijunjung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan II Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan melalui 6 program, 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan urusan penanaman modal adalah sebesar Rp 3.575.496.691,- yang terdiri dari Belanja Modal dan Operasi sebesar Rp. 782.748.395,- dan Belanja Gaji sebesar Rp 2.816.228.296,-.

Tabel 2.1.1
Anggaran dan Realisasi per jenis belanja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal dan Operasional	759.268.395,-	242.835.761,-	31,02
2	Belanja Gaji	2.816.228.296,-	1.489.129.712,-	53,32
	Jumlah 1+2	**3.575.496.691,-**	**1.731.965.473,-**	**48,43**

Evaluasi pelaksanaan Renja Urusan Penanaman Modal dilakukan terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025. Kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP 2021-2026.

Evaluasi urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan

permasalahan yang dihadapi. Realisasi masing-masing program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Anggaran dan Realisasi per Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	**3.575.496.691**	**1.731.965.473**	**48,44**
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.221.571.701**	**1.648.691.550**	**51,18**
	1. Kegiatan : Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12.781.500**	**5.402.100**	**42,26**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.438.000	5.194.000	**41,76**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	233.100	208.100	**89,27**
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.400	0	**0,00**
	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.834.863.546**	**1.499.461.462**	**52,89**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.816.228.296	1.490.849.712	**52,94**
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	17.417.000	7.423.750	**42,62**
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.218.250	1.188.000	**97,52**
	3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**150.018.225**	**48.086.479**	**32,05**
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.508.400	1.535.000	**61,19**
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.215.450	4.408.100	**53,66**
9	Penyediaan bahan logistik kantor	7.483.950	3.763.100	**50,28**

10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.735.600	2.546.400	**32,92**
11	Fasilitasi Kunjungan tamu	2.071.625	1.014.550	**48,97**
12	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	88.947.200	20.377.800	**22,91**
13	Penatausahaan Arsip Dinamis	33.056.000	14.441.529	**43,69**
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**116.610.780**	**61.224.693**	**52,50**
14	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.558.780	36.748.693	**68,61**
15	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	63.052.000	24.476.000	**38,82**
	5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**107.297.650**	**34.516.816**	**32,17**
16	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.336.850	9.099.300	**59,33**
17	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	53.375.000	18.664.516	**34,97**
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.259.000	4.715.000	**33,07**
19	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	24.326.800	2.038.000	**8,38**
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**24.333.100**	**8.827.258**	**36,28**
	6. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**18.078.850**	**7.031.958**	**38,90**
20	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	18.078.850	7.031.958	**38,90**
	7. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**6.254.250**	**1.795.300**	**28,71**
21	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6.254.250	1.795.300	**28,71**
	3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**137.758.450**	**457.200**	**0,33**

	8. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**137.758.450**	**457.200**	**0,33**
22	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	137.758.450	457.200	**0,33**
	4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**134.387.490**	**56.593.233**	**42,11**
	9. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**134.387.490**	**56.593.233**	**42,11**
23	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	97.514.400	44.110.213	**45,23**
24	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	17.341.850	5.394.020	**31,10**
25	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	19.531.240	7.089.000	**36,30**
	5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**54.832.400**	**15.663.682**	**28,57**
	10. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**54.832.400**	**15.663.682**	**28,57**
26	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	18.637.100	7.347.000	**39,42**
27	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	29.335.650	6.633.682	**22,61**
28	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	6.859.650	1.683.000	**24,53**
	6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**2.613.550**	**1.732.550**	**66,29**
	11. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**2.613.550**	**1.732.550**	**66,29**

29	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.613.550	1.732.550	**66,29**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisa kinerja pelayanan OPD adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas PMPTSP adalah :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
3. Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun capaian kinerja pelayanan urusan Penanaman Modal pada Dinas PMPTSP tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sijunjung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Realisasi Investasi PMDN (Rp.)		Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	8.779.875	-	-	-		9.424.823	-		-	
	Realisasi Investasi PMA (US$)			190.000	-	-	-		193.559	-		-	
	Persentase peningkatan Realisasi penanaman modal		Tercapainya realisasi Penanaman Modal	12%	13%	15%			43,30%	27.14%	19.07%		
	jumlah realisasi investasi daerah		Meningkatnya realisasi investasi				2.321.667.800.987	2.877.558.501.634				2.615.962.274.213	
2	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	85	85.5	86	90.5	91	86,71	89.18	90.87	90,52	

3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Organisasi		Meningkatnya tata kelola organisasi	75	72	72.5	79	78.75	70,79	71,87	78.5	78.60	

Realisasi investasi tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu dari Rp 2.003.205.846.043,00 naik menjadi Rp. 2.615.962.274.213 dengan peningkatan Rp.612.756.428.170,- dari nilai target 2.321.667.800.987. Pada Tahun 2024 target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah jumlah realisasi investasi daerah dan pengukuran untuk pencapaiannya dilakukan pada akhir tahun 2024. Berdasarkan hasil capaian ini, target jumlah realisasi investasi daerah di Kabupaten Sijunjung sudah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja Jumlah realisasi Investasi Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 482.293.600,- dengan realisasi sebesar Rp 412.173.034,- atau sebesar 85,46%

Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian kinerja meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan PTSP melalui pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp 218.132.535,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 213.449.747,00 atau sebesar 97,85%.

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan PTSP pada Catur Wulan I dan II Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner elektronik yang dikirimkan kepada pengguna layanan dengan link https://surveidpmptsp.sijunjung.go.id kepada responden (Pelaku Usaha), adapun pertanyaan meliputi 9 unsur sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP tahun 2024 yaitu dengan nilai 90.52 dari target 90,50 atau dengan capaian sebesar 100,02 %.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas PMPTSP, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pelaku usaha yang taat peraturan perundangan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Meningkatnya pelaku usaha yang taat peraturan perundangan diantaranya :

1. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM.
2. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusahan (NIB)
3. Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian LKPM
4. Masih adanya perusahaan yang belum mempunyai hak akses dalam penyampaian LKPM secara online karena belum melakukan migrasi data dari OSS 1.0 dan OSS 1.1 ke OSS RBA.
5. Masih adanya pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek perusahaan di Kabupaten Sijunjung

b. Meningkatnya Kualitas Pengembangan iklim Investasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini :

1. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (masterplan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai

2. Kurangnya sumberdaya ASN yang mempunyai keahlian khusus seperti bidang ilmu pembangunan ekonomi kewilayahan dan ilmu geografi.
3. Belum tersedianya sumber daya manusia untuk pemetaan
4. Potensi investasi yang dimiliki belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh investor (misalnya granit dan batu kapur).
5. Potensi investasi sebagian besar berada di hutan lindung dan cagar alam.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini :

1. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan berusaha karena masih terjadinya keterlambatan dalam proses melengkapi persyaratan/pemenuhan komitmen perizinan dan adanya gangguan pada aplikasi OSS dan siCantik
2. Belum optimalnya pengetahuan petugas perizinan terhadap aplikasi yang digunakan
3. Faktor kesibukan tim teknis pada OPD pemberi rekomendasi sehingga berpengaruh pada kecepatan proses penerbitan izin
4. Masih belum sempurnanya aplikasi OSS RBA dan siCantik Cloud
5. Masih adanya pelaku usaha yang lupa password sehingga tidak bisa melakukan perubahan terhadap KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dalam NIBnya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Telaahan terhadap rancangan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan/ Sub Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan Perubahan RKPD.

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program,kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan/Sub Kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/ Sub Kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/ Sub Kegiatan.

Hasil Reviow terhadap rancangan awal RKPD dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Sijunjung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Pagu Sebelum ditetapkan APBD	Pagu Pergeseran	Berkurang/Bertambah
1	2	2	3	4	5	6	8	9	10
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.437.370.168	3.575.496.691	(861.873.477)
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	4,30	4,30	3.386.018.018	3.268.744.002	(117.274.016)
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	90	90			
		Indeks Kepatuhan Arsip	Indeks Kepatuhan Arsip	Kabupaten Sijunjung	75	75			
		Persentase Pencapaian Komponen Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pencapaian Komponen Akuntabilitas Kinerja	Kabupaten Sijunjung	78%	78%			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kabupaten Sijunjung	100%	100%	46.362.500	14.281.500	(32.081.000)
		Persentase dokumen Laporan Penyelenggarasan Pemerintah yang disampaikan tepat waktu	Persentase dokumen Laporan Penyelenggarasan Pemerintah yang disampaikan tepat waktu	Kabupaten Sijunjung	100%	100%			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	3 Dokumen	35.756.600	13.938.000	(21.818.600)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sijunjung	3 Laporan	3 Laporan	6.107.900	233.100	(5.874.800)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 laporan	1 laporan	4.498.000	110.400	(4.387.600)
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel***	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	***90%***	***2.595.549.717***	***2.834.863.546***	***239.313.829***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Sijunjung	24 orang	24 orang	2.552.174.267	2.816.228.296	264.054.029
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sijunjung	1800 Dokumen	700 Dokumen	26.044.250	17.417.000	(8.627.250)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sijunjung	14 Laporan	12 Laporan	17.331.200	1.218.250	(16.112.950)
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu**	**Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu**	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	***100%***	***33.578.350***	-	**(33.578.350)**

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kabupaten Sijunjung	48 paket	-	20.000.000	0	(20.000.000)
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Sijunjung	44 orang	-	13.578.350	0	(13.578.350)
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan**	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	**90%**	***339.243.450***	**159.320.450**	**(180.923.000)**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 Paket	2 Paket	6.014.750	2.508.400	(3.506.350)
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 paket	3 paket	14.789.100	10.771.050	(4.018.050)
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 paket	3 paket	30.643.400	10.593.450	(10.049.950)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 paket	3 paket	19.047.100	8.732.700	(10.314.400)
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	4 Laporan	6.136.900	3.511.650	(2.625.250)
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Sijunjung	37 laporan	15 laporan	220.483.200	88.947.200	(131.536.000)

	Penatausahaan arsip dinamis	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kabupaten Sijunjung	2 dokumen	2 dokumen	52.129.000	33.256.000	(18.873.000)
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah			***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	***0***	***30.850.000***	**0**	**(30.850.000)**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	3 Unit	***0***	30.850.000	0	(30.850.000)
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi***	**Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi**	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	***90%***	***168.361.492***	***143.980.856***	**(24.380.636)**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Sijunjung	3 Laporan	3 Laporan	102.509.492	80.928.856	(21.580.636)
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sijunjung	12 laporan	12 laporan	65.852.000	6 3.052.000	(2.800.000)
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Aset OPD dalam kondisi baik**	**Persentase Aset OPD dalam kondisi baik**	***Kabupaten Sijunjung***	***85%***	***85%***	***172.072.509***	***117.297.650***	**(54.774.859)**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten Sijunjung	1 unit	1 unit	25.000.000	25.336.850	336.850
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten Sijunjung	13 unit	13 unit	80.947.059	53.375.000	(27.572.059)

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Sijunjung	40 Unit	22 Unit	20.327.250	14.259.000	(6.068.250)
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Sijunjung	1 unit	1 unit	45.798.200	24.326.800	(21.471.400)
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah Realisasi Investasi Baru**	**Jumlah Realisasi Investasi Baru**	**Kabupaten Sijunjung**	**16 Milyar**	**16 Milyar**	**58.441.650**	**51.335.449**	**(7.106.201)**
	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase substansi kebijakan investasi daerah yang tersusun secara berkualitas	Persentase substansi kebijakan investasi daerah yang tersusun secara berkualitas	Kabupaten Sijunjung	11.11%	11.11%	29.600.050	43.933.699	14.333.649
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Rancangan regulasi dan dokumen lainnya dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	1 Rancangan Perbup	29.600.050	43.933.699	14.333.649
	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/kota	**Persentase dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang berkualitas**	**Persentase dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang berkualitas**	**Kabupaten Sijunjung**	**100%**	**100%**	**28.841.600**	**7.401.750**	**(21.439.850)**
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi Kabupaten/Kota	NKRI	1 Dokumen	1 Dokumen	28.841.600	7.401.750	(21.439.850)
	3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah**	**Jumlah LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah**	**Kabupaten Sijunjung**	**3 LOI**	**3 LOI**	**222.607.000**	49.803.800	**(172.803.200)**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kehadiran event promosi dan koordinasi daerah**	**Persentase kehadiran event promosi dan koordinasi daerah**	**Kabupaten Sijunjung**	**100%**	**100%**	**222.607.000**	49.803.800	**(172.803.200)**

	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kab/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	4 Dokumen	1 Dokumen	222.607.000	49.803.800	(172.803.200)
	4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Kabupaten Sijunjung**	**Puas**	**Puas**	**257.476.750**	**137.887.490**	**(119.589.260)**
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	**Kabupaten Sijunjung**	**100%**	100%			
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks kepuasan masyarakat**	**Persentase layanan perizinan tepat waktu**	**Kabupaten Sijunjung**	**85%**	**85%**	**257.476.750**	**137.887.490**	**(119.589.260)**
			Jumlah layanan konsultasi yang dilaksanakan			**140 pelaku usaha**			
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terinterasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Sijunjung	900 Pelaku usaha	650 Pelaku usaha	200.068.650	101.014.400	(99.054.250)
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kabupaten Sijunjung	12 kegiatan usaha	6 Kegiatan Usaha	33.318.550	19.531.240	(13.787.310)

	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Sijunjung	85 Pelaku Usaha	75 pelaku usaha	24.089.550	17.341.850	(6.747.700)
	5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**Kabupaten Sijunjung**	**73,64 %**	**73,64 %**	**502.826.750**	**65.112.400**	**(437.714.350)**
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Triwulan	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Triwulan	Kabupaten Sijunjung	89,47%	89,47%	**502.826.750**	**65.112.400**	**(437.714.350**
		Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Semester	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Semester	Kabupaten Sijunjung	70,90%	70,90%			
	1). Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kabupaten Sijunjung	6 kegiatan usaha	6 Kegiatan Usaha	162.301.883	23.667.100	(138.634.783)

	2). Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berussha berbasis risiko	Kabupaten Sijunjung	219 pelaku usaha	70 Pelaku usaha	195.800.250	34.585.650	(161.214.600)
	3). Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berussha	Kabupaten Sijunjung	110 kegiatan usaha	24 Kegiatan usaha	144.724.617	6.839.650	(137.884.967)
	6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Indeks Kepuasan layanan data dan informasi penanaman modal**	**Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi investasi bagi pengguna layanan data**	Kabupaten Sijunjung	**84**	**84**	**10.000.000**	**2.613.550**	**(7.386.450)**
	Kegiatan : Pengeloaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data perizinan dan investasi daerah yang tersampaikan secara tepat waktu ke opd terkait	Persentase pemenuhan data perizinan dan investasi daerah yang tersampaikan secara tepat waktu ke opd terkait	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	2.613.550	**(7.386.450)**

	1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Kabupaten Sijunjung	3 dokumen	3 Dokumen (Perizinan, Realisasi investasi, Potensi daerah)	10.000.000	2.613.550	(7.386.450)

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas PMPTSP dan juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Pada saat penyusunan rancangan awal RENJA DPMPTSP tahun 2025 pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan belum dilaksanakan sehingga usulan program dan kegiatan yang di usulkan untuk dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sumber dana APBD untuk 2025 belum bisa di tampilkan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	**NIHIL**				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan umum pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2025 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
7. Mengembangkan dan meratakan pembangunan daerah

Adapun arah kebijakan nasional di sektor penanaman modal adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing,
b. Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas PMPTSP tahun 2025 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis, Adapun Tujuan Renja Dinas PMPTSP yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat dan transparan sesuai dengan prosedur dengan mengutamakan kejujuran dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.
b. Membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan serta koordinasi antar unit /lembaga yang terkait

Adapun Sasaran yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi dengan Indikator :
   - Jumlah Realisasi investasi Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dengan indikator :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan
3. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator :
   - Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas PMPTSP Tahun 2025 tetap mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Sijunjung periode 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP untuk tahun 2025 sebanyak 6 program sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dari program tersebut diurai melalui sejumlah kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah dibuat oleh organisasi, dengan kata lain program merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
7. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
8. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
10. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dari Kegiatan tersebut diurai lagi melalui sejumlah Sub kegiatan. Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari Kegiatan yang telah dibuat oleh organisasi, Sub Kegiatan memiliki Dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan dari Sub kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional Instansi yang berdimensi 5 (lima) tahunan. Sub Kegiatan Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan peralatan rumah tangga

9 Penyediaan bahan logistik kantor

10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

11 Fasilitasi Kunjungan tamu

12 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

13 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15 Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor

16 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan

17 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

19 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya

20 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal

21 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

22 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota

23 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

24 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko

25 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

26 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

27 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

28 Pengawasan Penanaman Modal

29 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 diupayakan melalui Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana telah di jelaskan pada Bab sebelumnya. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran organisasi pada Tahun 2025. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam 1 tahun.

DPMPTSP dalam menyusun kerangka pendanaan memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program pada tahun rencana. Sumber dana pendanaan DPMPTSP di peroleh dari sumber APBD Kabupaten Sijunjung.

Perkiraan Pendanaan Tahun 2025 memperhatikan sasaran strategis yang hendak di capai dan besar keluaran masing-masing kegiatan yang di targetkan. Perubahan Rencana kerja dari masing masing Program dan kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH(RKPDP) TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SIJUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Pagu Pergeseran	Sesudah Perubahan	Berkurang/ Bertambah
1	2	2	3	4	5	6	8		9	10
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.149.450.737	3.575.496.691	3.668.008.751	92.512.060
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah**	**Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah**	**Kabupaten Sijunjung**	4,30	4,30	3.519.485.787	3.268.744.002	3.362.359.211	93.615.209
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	**Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**Kabupaten Sijunjung**	90	90				
		Indeks Kepatuhan Arsip	**Indeks Kepatuhan Arsip**	**Kabupaten Sijunjung**	75	75				
		Persentase Pencapaian Komponen Akuntabilitas Kinerja	**Persentase Pencapaian Komponen Akuntabilitas Kinerja**	**Kabupaten Sijunjung**	78%	78%				
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan	Kabupaten Sijunjung	100%	100%	30.357.150	14.281.500	11.172.300	(3.109.200)

			penganggaran							
			Persentase dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang disampaikan tepat waktu	Kabupaten Sijunjung	100%	100%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	3 Dokumen	24.164.500	13.938.000	10.307.700	(3.630.300)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sijunjung	3 Laporan	3 Laporan	4.072.650	233.100	233.100	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 laporan	1 laporan	2.120.000	110.400	631.500	(521.100)
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel***	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	***90%***	**2.849.977.496**	**2.834.863.546**	**2.943.389.721**	**108.526.175**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Sijunjung	24 orang	26 orang	2.816.228.296	2.816.228.296	2.928.688.971	**112.460.675**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sijunjung	1800 Dokumen	700 Dokumen	25.139.400	17.417.000	13.482.500	(3.934.500)

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sijunjung	14 Laporan	12 Laporan	8.609.800	1.218.250	1.218.250	0
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu**	**Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu**	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	***100%***	**19.000.000**	**0**	***0***	**0**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kabupaten Sijunjung	48 paket	-	19.000.000	0	0	0
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Sijunjung	44 orang	-	-	0	0	0
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi***	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	**90%**	**276.730.725**	**158.320.450**	**149.006.150**	**(9.314.300)**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 Paket	2 Paket	5.037.800	2.508.400	3.562.200	1.053.800

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 paket	3 paket	12.837.600	10.771.050	11.441.250	670.200
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 paket	3 paket	13.590.450	10.393.450	10.593.450	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	5 paket	3 paket	15.194.200	8.732.700	8.736.300	(3.600)
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	4 Laporan	6.730.275	3,511.650	3.511.650	0
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Sijunjung	37 laporan	15 laporan	184.091.900	88.947.200	84.622.300	(4.324.900)
	Penatausahaan arsip dinamis	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kabupaten Sijunjung	2 dokumen	2 dokumen	39.248.500	33.256.000	26.539.000	(6.717.000)
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan***	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	***Kabupaten Sijunjung***	**100%**	**100%**	**37.655.650**	**0**	**3.335.650**	**3.335.650**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kabupaten Sijunjung	3 Unit	1 Unit	37.655.650	0	3.335.650	3.335.650

	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi***	Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi	***Kabupaten Sijunjung***	***100%***	***90%***	**156.629.616**	***143.980.856***	**144.385.140**	**404.284**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Sijunjung	3 Laporan	12 Laporan	93.577.616	80.928.856	81.333.140	(404.284)
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sijunjung	12 laporan	12 laporan	63.052.000	63.052.000	63.052.000	0
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Aset OPD dalam kondisi baik***	Persentase Aset OPD dalam kondisi baik	***Kabupaten Sijunjung***	***85%***	***85%***	**149.135.150**	***117.297.650***	**111.070.250**	**(6.227.400)**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten Sijunjung	1 unit	1 unit	25.336.850	25.336.850	25.336.850	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten Sijunjung	13 unit	13 unit	61.789.500	53.375.000	54.860.000	1.485.000

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Sijunjung	40 Unit	22 Unit	16.209.000	14.259.000	15.719.000	1.460.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Sijunjung	1 unit	1 unit	45.799.800	24.326.800	15.154.400	(9.172.400)
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah Rencana Investasi Baru**	**Jumlah Rencana Investasi Baru**	**Kabupaten Sijunjung**	**10 Milyar**	**10 Milyar**	**42.461.500**	**51.335.449**	**47.000.750**	**(4.334.699)**
	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase substansi kebijakan investasi daerah yang tersusun secara berkualitas	Persentase substansi kebijakan investasi daerah yang tersusun secara berkualitas	Kabupaten Sijunjung	11.11%	44,44%	28.963.450	43.933.699	39.599.000	(4.334.699)
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Rancangan regulasi dan dokumen lainnya dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	1 Rancangan Perbup	28.963.450	43.933.699	39.599.000	(4.334.699)
	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/kota	**Persentase dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang berkualitas**	**Persentase dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang berkualitas**	**Kabupaten Sijunjung**	**100%**	**100%**	**13.498.050**	**7.401.750**	**7.401.750**	**0**
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi Kabupaten/Kota	NKRI	1 Dokumen	1 Dokumen	13.498.050	7.401.750	7.401.750	0

	3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah**	**Jumlah LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah**	**Kabupaten Sijunjung**	**3 LOI**	**3 LOI**	**306.652.450**	49.803.800	**50.203.450**	**399.650**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kehadiran event promosi dan koordinasi daerah**	**Persentase kehadiran event promosi dan koordinasi daerah**	**Kabupaten Sijunjung**	**100%**	**100%**	**306.652.450**	49.803.800	**50.203.450**	**399.650**
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kab/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	4 Dokumen	1 Dokumen	306.652.450	49.803.800	50.203.450	399.650
	4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Kabupaten Sijunjung**	**Puas**	**Puas**	**189.306.950**	**137.887.490**	**148.213.390**	**10.325.900**
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	**Kabupaten Sijunjung**	**100%**	100%				
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan perizinan tepat waktu**	**Persentase layanan perizinan tepat waktu**	**Kabupaten Sijunjung**	**85%**	**85%**	**189.306.950**	**137.887.490**	**148.213.390**	**10.325.900**
		Jumlah layanan konsultasi yang dilaksanakan	**Jumlah layanan konsultasi yang dilaksanakan**		**140 pelaku usaha**	**95 pelaku usaha**				

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Sijunjung	900 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha	143.437.550	101.014.400	119.209.300	18.194.900
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kabupaten Sijunjung	12 kegiatan usaha	4 Kegiatan Usaha	24.353.600	19.531.240	15.596.740	(3.934.500)
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Sijunjung	85 Pelaku Usaha	75 pelaku usaha	21.515.800	17.341.850	13.407.350	(3.934.500)
	5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**Kabupaten Sijunjung**	**73,64 %**	**73,64 %**	**82.376.100**	**65.112.400**	**57.618.400**	**(7.494.000)**

	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Triwulan	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Triwulan	Kabupaten Sijunjung	89,47%	89,47%	**82.376.100**	**65.112.400**	**57.618.400**	**(7.494.000)**
		Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Semester	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM Semester	Kabupaten Sijunjung	70,90%	70,90%				
	1). Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		6 kegiatan usaha	6 Kegiatan Usaha	22.535.150	23.667.100	19.732.800	(3.934.300)
	2). Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko		219 pelaku usaha	70 Pelaku usaha	44.613.600	34.585.650	31.025.950	(3.559.700)

	3). Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha		110 kegiatan usaha	24 Kegiatan usaha	15.227.350	6.859.650	6.859.650	0
	6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi investasi bagi pengguna layanan data**	**Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi investasi bagi pengguna layanan data**		**84**	**84**	**9.167.950**	**2.613.550**	**2.613.550**	**0**
	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data perizinan dan investasi daerah yang tersampaikan secara tepat waktu ke opd terkait	Persentase pemenuhan data perizinan dan investasi daerah yang tersampaikan secara tepat waktu ke opd terkait		100%	100%	**9.167.950**	**2.613.550**	**2.613.550**	**0**
	1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan		3 dokumen	5 Dokumen	9.167.950	2.613.550	2.613.550	0

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 telah melalui proses sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini. Perencanaan yang merupakan rencana kerja dari Rencana Strategis Periode 2021-2026. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Penanaman Modal dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan diwujudkan melalui beberapa target.

1. Meningkatnya pelaku usaha yang taat peraturan perundangan
2. Meningkatnya Kualitas Pengembangan iklim Investasi
3. Meningkatnya kualitas promosi daerah
4. Meningkatnya Pengelolaan data investasi daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta Meningkatkan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut diatas tidaklah mudah, namun berdasarkan kinerja OPD selama 5 (lima) tahun terakhir dan dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai, apabila para pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Kerjasama antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi, dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibawah wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu penanganan pembangunan sektor Penanaman Modal dan PTSP mau tidak mau membutuhkan kerjasama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya dilapangan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Adanya Perubahan Renja ini diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,akurat, transparan dan adil.

Muaro Sijunjung, 09 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG

JAHERI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730311 199303 1 004

PEMERINTAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR :050/ 147/KPTS-NAKERTRANS-2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai triwulan II tahun 2025, dan untuk pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan yang lebih optimal, maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan rencana kerja tahun 2025.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.1.15-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung;
12. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 memuat berbagai program baik rutin/penunjang maupun prioritas yang akan dilaksanakan dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun

2025;

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sampai Triwulan II Tahun 2025;
3. Tujuan dan Sasaran;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan;
5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
6. Penutup

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 29 Agustus 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI

DAVID RINALDO, SSTP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19850928 200312 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025.

Penyusunan dokumen perubahan rencana kerja tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki serta memperhatikan perkembangan serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sijunjung, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun berjalan dan perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh Program dan Kegiatan

dapat terlaksana dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini belumlah sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan untuk kedepannya.

Muaro Sijunjung, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kabupaten Sijunjung

DAVID RINALDO, SSTP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19850928 200312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA..... 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II..... 11

2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi... 18

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... 25

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja..... 26

3.3 Program dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 36

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 44

5.1 Indikator Kinerja Utama..... 45

5.2 Indikator Kinerja Hasil..... 47

BAB VI PENUTUP..... 49

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai tahun berjalan.....	13
2.2	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.....	21
3.1	Tujuan dan sasaran	27
4.1	Perubahan Rencanan kerja dan pendanaan tahun	38
5.1	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	46
5.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat perubahan atas kebijakan, program, dan kegiatan dari Tujuan serta Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung tahun 2025 yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, yang merupakan salah satu langkah penyesuaian atas perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja memperhatikan perkembangan serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sijunjung, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sampai pada Triwulan II dan perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh Program dan Kegiatan dapat terlaksana dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Perubahan Rencana Kerja ini sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Sijunjung tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.1.15-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi,

validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung;
10. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah sebagai arah, pedoman dan penyesuaian kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan

secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin konsistensi rencana teknis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dengan arahan strategis visi dan misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
3. Sebagai pedoman acuan keberlanjutan perencanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2025 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan keberlanjutan target kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.

4. Sebagai optimalisasi pelaksanaan pembangunan baik dari aspek penganggaran, maupun kinerja program dan kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum penyusunan Perubahan Renja agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

perangakt daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Peranhkat Daerah.

1.4. Sistem Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam permusuan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan atau kelompok masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan renja perangkat daerah

serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan juga sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Berisikan capaian indikator kinerja utama bidang urusan

5.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Berisikan capaian indikator kinerja kunci hasil

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Triwulan II

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian

sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Adapun hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung sampai Triwulan II pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung
sampai tahun berjalan

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Intermediate outcame) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra pada akhir periode renstra (2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi Tahun		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II							
2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/4*100	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Nakertrans Kab. Sijunjung							**7,868,215,280**		**919,181,907**		**2,105,163,219**		**3,024,345,126**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah**					**3.60**	**3,238,554,280**		**789,460,089**		**811,320,151**		**1,600,780,240**				
	Persentase pencapaian komponen akuntabilitas kinerja					**76**											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran**					**85**	**9,734,850**		**1,560,000**		**0**		**1,560,000**				
	Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu					**100**											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	2,286,750	1	1,560,000	1		2	1,560,000				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3	258,750	3	0	3		3	0				
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah					4	7,189,350	1	0	1		2	0				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**					**100**	**2,810,365,294**		**674,500,590**		**731,923,685**		**1,406,424,275**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					23	2,781,729,294	23	667,456,590	23	727,204,685	23	1,394,661,275				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					14	28,636,000	4	7,044,000	3	4,719,000	3	11,763,000				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**					**100**	**373,750**		**0**		**0**		**0**				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					14	373,750	4	0	3	0	7	0				

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Intermediate outcame) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra pada akhir periode renstra (2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi Tahun		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II							
2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/4*100	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**					**100**	**152,267,350**		**55,620,345**		**32,951,196**		**88,571,541**				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	0		0				0				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	29,135,300	1	6,914,900	1	4,258,200	1	11,173,100				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	16,910,500	1	0	1	5,548,864	1	5,548,864				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	13,281,600	1	1,920,000	1	4,053,102	1	5,973,102				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	5,460,000	3	1,140,000	3	1,950,000	6	3,090,000				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	6,903,900	3	4,219,900	3	1,718,300	6	5,938,200				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	80,576,050	3	41,425,545	3	15,422,730	6	56,848,275				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**					**100**	**103,624,336**		**23,977,654**		**19,384,670**		**43,362,324**				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	38,914,336	3	8,501,470	3	8,542,170	6	17,043,640				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					12	64,710,000	3	15,476,184	3	10,842,500	6	26,318,684				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase aset OPD dalam keadaaan baik**					**85**	**162,188,700**		**33,801,500**		**27,060,600**		**60,862,100**				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1	26,928,700	1	11,651,000	1	6,881,500	1	18,532,500				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					28	115,900,000	28	17,350,500	28	19,529,100	28	36,879,600				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					31	19,360,000	31	4,800,000	31	650,000	31	5,450,000				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	0		0				0				

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Intermediate outcame) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra pada akhir periode renstra (2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi Tahun		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II							
2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/4*100	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja dilatih yang bersertifikat kompetensi**					**35**	**614,853,600**		**45,604,500**		**30,931,691**		**76,536,191**		76,536,191		#DIV/0!
	Tingkat produktivitas tenaga kerja					**6,297,671,186.32**									-		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah pencari kerja yang bersertifikat kompetensi**					**64**	**597,884,500**		**41,462,000**		**27,505,641**		**68,967,641**				
	Nilai indeks pelayanan publik UPTD					**2.6**								0	-		#DIV/0!
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					240	381,606,100	0	33,862,000	0	22,617,641	0	56,479,641	0	56,479,641		#DIV/0!
Pengadaan Sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja					16	216,278,400	0	7,600,000	0	4,888,000	0	12,488,000				
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi**					**2**	**14,852,750**		**4,142,500**		**3,426,050**		**7,568,550**		7,568,550		#DIV/0!
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina					9	14,852,750	9	4,142,500	0	3,426,050	0	7,568,550				
Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil	**Persentase perusahan kecil yang dibina**					**35**	**2,116,350**		**0**		**0**		**0**	0	-		#DIV/0!
Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas					5	2,116,350	0	0			0		0	-		#DIV/0!
														0	-		#DIV/0!
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase penempatan tenaga kerja**					**35**	**76,402,000**		**29,034,068**		**10,013,500**		**39,047,568**	0	39,047,568		#DIV/0!
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kerja dilatih yang menciptakan lapangan kerja**					**32**	**76,402,000**		**29,034,068**		**10,013,500**		**39,047,568**	0	39,047,568		#DIV/0!
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi					20	1,984,500	0	780,000	0		0	780,000	0	780,000		#DIV/0!
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL					100	49,213,000	56	13,145,868	73	7,929,000	129	21,074,868	129	21,074,868		#DIV/0!
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					300	10,927,000	426	10,916,200	0		426	10,916,200				
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi Layanan ULD					2	1,839,500	0	1,082,500	1		1	1,082,500	1	1,082,500		#DIV/0!
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					30	12,438,000	0	3,109,500	0	2,084,500	0	5,194,000	0	5,194,000		#DIV/0!

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Intermediate outcame) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra pada akhir periode renstra (2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi Tahun		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II							
2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/4*100	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan**					**25**	**0**		**0**		**0**		**0**	0	-		#DIV/0!
Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)					450	0	87	0	198		285	0	285	-		#DIV/0!
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PMI yang dilindungi**					**5**	**0**		**0**		**0**		**0**	0	-		#DIV/0!
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya					5 orang	0	0	0			0	0				
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perusahaan yang mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan**					**100**	**3,728,044,050**		**19,995,500**		**1,215,977,060**		**1,235,972,560**		1,235,972,560		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan**					**5**	**43,656,650**		**7,119,000**		**5,406,900**		**12,525,900**				
	Jumlah PKB yang didaftarkan					**1**											
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online					5	4,302,800	1	0	0		1	0	1	-		#DIV/0!
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					1	2,634,700	0	0	1		1	0				
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					1	36,719,150	1	7,119,000	1	5,406,900	1	12,525,900		12,525,900		

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Intermediate outcame) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra pada akhir periode renstra (2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi Tahun		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II							
2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		11=10/4*100	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan yang dibina terkait regulasi ketenagakerjaan**					**100**	**3,684,387,400**		**12,876,500**		**1,210,570,160**		**1,223,446,660**				
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial					**100**									-		
	Jumlah Peringatan Hari Buruh Internasional yang dilaksanakan					**1**											
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah					3	27,154,000	0	5,027,000	2	4,310,150	2	9,337,150				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan					2	2,336,350	1	0	1		2	0	2	-		#DIV/0!
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1	4,639,900	0	0	0			0	0	-		#DIV/0!
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					18,280	3,650,257,150	0	7,849,500	18,280	1,206,260,010	18,280	1,214,109,510	18280	1,214,109,510		#DIV/0!
															-		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							**210,361,350**		**35,087,750**		**36,920,817**		**72,008,567**				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase ketersediaan sarpras dalam kawasan transmigrasi**					**38**	**72,412,850**		**2,473,250**		**12,575,814**		**15,049,064**	0	15,049,064		#DIV/0!
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan sarpras dalam kawasan pembangunan transmigrasi**					**13**	**72,412,850**		**2,473,250**		**12,575,814**		**15,049,064**				
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)					1	2,475,550	1	1,310,750	1	102,828	1	1,413,578		1,413,578		
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan					16	17,093,250	0	1,162,500	16	2,273,548	16	3,436,048				
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan					40	52,844,050	0	0	0	10,199,438	0	10,199,438				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mandiri**					**67**	**137,948,500**		**32,614,500**		**24,345,003**		**56,959,503**	0	56,959,503		#DIV/0!
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**persentase transmigran yang dibina**					**100**	**137,948,500**		**32,614,500**		**24,345,003**		**56,959,503**	0	56,959,503		#DIV/0!
	Jumlah Rakor transmigrasi dan HBT yang dilaksanakan					**1**								0	-		#DIV/0!
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina					202	131,895,750	202	30,396,000	202	23,061,697	202	53,457,697				
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan					1	6,052,750	1	2,218,500	1	1,283,306	1	3,501,806	1	3,501,806		#DIV/0!

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kabupaten Sijunjung mengalami pertumbuhan ekonomi bebasis ketenagakerjaan yang kemudian harus ditransformasikan menjadi peningkatan kapasitas manusia untuk meningkatkan lapangan kerja/usaha. Maka pertumbuhan ekonomi tersebut akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berhubungan langsung dengan masyarakat terutama dalam hal pelatihan bagi calon tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pelayanan kartu pencari kerja (AK1), serta pelayanan dalam urusan transmigrasi, dan lain-lain. Untuk meningkatkan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menghadapi beberapa tantangan diantaranya :

1. Masih banyaknya ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja
2. Perlunya adanya sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
3. Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang masih belum maksimal

4. Masih rendahnya kesadaran perusahaan akan pelaksanaan syarat-syarat kerja atau kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Perlunya pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru
6. Kurangnya kesadaran perusahaan ataupun HRD untuk melaporkan lowongan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.
7. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap masyarakat transmigrasi khususnya pembinaan usaha keterampilan.

Untuk mengatasi tantangan ataupun permasalahan tersebut Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung diharapkan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas dengan berpedoman pada pasar kerja yang ada saat ini.
2. Meningkatkan peningkatan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan
4. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, dan kualitas sdm transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomiannya.
6. Perlunya optimalisasi kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan transmigrasi untuk kedepannya

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dilaksanakan dengan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sijunjung, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menerima berbagai usulan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Sijunjung yang kemudian usulan tersebut diverifikasi berdasarkan program atau kewenangan yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung. Pada perubahan rencana kerja tahun 2025 ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung menerima beberapa usulan dari para pemangku kepentingan yang dapat dilihat pada table berikut ini

Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Sijunjung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan	Nagari Aie amo, Kecamatan Kamang Baru, Kab Sijunjung	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	500 orang	Pokir DPRD
2	Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan	Nagari Padang Sibusuk,	Terlaksananya program	124 orang	Pokir DPRD

		Kecamatan Kupitan, Kab Sijunjung	jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		
3	Pelatihan tata boga	Jorong kamang madani, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2 paket (32 orang)	Pokir DPRD
4	Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan	Nagari Padang Sibusuk,	Terlaksananya program	490 orang	Pokir DPRD

		Kecamatan Kupitan, Kab Sijunjung	jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		
5	Pelatihan tata boga	Nagari Mundam Sati, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2 paket (32 orang)	Pokir DPRD
6	Pelatihan menjahit	Jorong kampung	Jumlah Tenaga Kerja yang	1 paket (16 orang)	Pokir DPRD

		pinang, Nagari Mundam Sati, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung	Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
7	Pelatihan Montir/Mekanik	Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 paket (16 orang)	Pokir DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan. Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, maka dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu (a) penguatan perencanaan tenaga kerja nasional; (b) percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja; (c) percepatan sertifikasi profesi; (d) perluasan kesempatan kerja formal; (e) penguatan wirausaha produktif; (f) penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif; (g) penegakan hukum ketenagakerjaan; (h) peningkatan perlindungan pekerja migran; (i) pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Visi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung adalah **"Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani"**. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung adalah misi kedua yaitu: **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata**, dengan Tujuan: Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan serta Sasaran: Menurunnya pengangguran. Dan strategi yang dipakai yaitu Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, agar arah perencanaan dapat lebih maksimal, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi KabupatenSijunjung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunnya Penganggura n	Tinkat Penganggura n Terbuka	Meningkatny a penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah bekerja	30%	31%	32%	33%	34%	35%
			Menurunnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Persentase pekerja yang di PHK	0,64 %	0,08%	0,25%	0,20%	0,20%	0,20 %
			Meningkatny a hubungan industrial yang harmonis	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak	8,7%	26,08 %	43,48 %	60,87 %	80,43 %	100%
			Meningkatny a kemandirian satuan	Indeks kemandiria n kawasan transmigrasi	30,44	31,79	33,13	34,48	35,00	35,00

			kawasan permukiman transmigrasi							
2	Meningkatnya kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	70	71	72	73	73	74

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya visi dan misi Kabupaten Sijunjung dalam urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan analisis perkembangan serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sampai pada triwulan II dan perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan dan juga analisis kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung pada Rencana Kerja Perubahan ini akan melaksanakan 6 Program. Adapun keseluruhan Program dan Kegiatan yang telah disusun tersebut dengan indikator kinerja serta anggaran yang menyertai pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Tahun 2025 ini.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung :
    a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
    b. Pengentasan atau penurunan tingkat pengangguran

c. Perlindungan Tenaga kerja serta Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Hubungan Industrial
d. Peningkatan kualitas dan produktivitas melalui Balai Latihan Kerja
e. Perluasan kesempatan kerja
f. Peningkatan Penempatan tenaga kerja
g. Pengembangan dan peningkatan pembangunan Kawasan transmigrasi serta peningkatan kemandirian transmigran

2. Rekapitulasi program dan kegiatan, sub kegiatan
    a. Jumlah program pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 yaitu sebanyak 6 (enam) program, yang dimana 1 (satu) program berada pada bagian Sekretariat, sedangkan 3 (tiga) program berada pada bidang tenaga kerja, dan 2 (dua) program berada pada bidang transmigrasi.
    b. Pada Rencana Kerja Perubahan 2025 ini dilakukan perubahan, penambahan atau pergeseran anggaran antar kegiatan maupun Program yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.

Adapun rincian program kegiatan dan sub kegiatan kerja yang dilaksanakan pada perubahan rencana kerja tahun 2025 ini dapat dilihat pada daftar dibawah ini :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Fasilitasi kunjungan tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

b. Pengadaan Sarana pelatihan kerja kabupaten/kota

2) Pembinaan Lemabaga Pelatihan kerja Swasta

a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3) Konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil

a. Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

1) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja

b. Pelayanan antar Kerja

c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

d. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

e. Perluasan Kesempatan Kerja

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

3) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)

IV. Program Hubungan Industrial

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
c. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
d. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

V. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
b. Penyuluhan transmigrasi
c. Pelatihan transmigrasi

VI. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

a. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
b. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pelaksanaan perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025 didasarkan pada pada program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 serta evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung tahun 2025 memfokuskan pada pencapaian target dan indikator kinerja agar tercapai tujuan menurunnya pengangguran terbuka

3. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan atau kewenangan yang berlaku
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam upaya mengoptimalkan singkronisasi dan sinergritas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KAB. SIJUNJUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI							**7.111.170.128,00**	**9.223.826.705,00**	**7.868.215.280,00**	**757.045.152,00**							**11.909.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.983.889.728,00**	**8.825.300.355,00**	**7.657.853.930,00**	**1.673.964.202,00**							**10.674.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.983.889.728,00**	**8.825.300.355,00**	**7.657.853.930,00**	**1.673.964.202,00**							**10.674.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai indeks pelayanan publik perangkat daerah Indeks kepatuhan arsip Persentase pencapaian komponen akuntabilitas kinerja Nilai indeks profesional ASN perangkat daerah**				**3.60 71 76 77 Nilai Nilai % Nilai**	**3.6 71 76 77 Nilai Nilai % Nilai**	**3.552.533.228,00**	**3.530.384.337,00**	**3.238.554.280,00**	**889.466.772,00**							**4.442.000.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran*				100 % 85 %	100 % 85 %	51.850.000,00	26.502.700,00	9.734.850,00	-42.115.150,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		29.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	39.350.000,00	8.410.250,00	2.286.750,00	-37.063.250,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			11.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.500.000,00	3.197.750,00	258.750,00	-4.241.250,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	14.894.700,00	7.189.350,00	-810.650,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu*				100 %	100 %	2.522.270.531,00	2.815.207.294,00	2.810.365.294,00	288.094.763,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		2.937.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.487.270.531,00	2.781.729.294,00	2.781.729.294,00	294.458.763,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			2.900.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	14 Laporan	16.000.000,00	33.478.000,00	28.636.000,00	12.636.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			17.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 %	100 %	6.000.000,00	5.997.000,00	373.750,00	-5.626.250,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	6.000.000,00	5.997.000,00	373.750,00	-5.626.250,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan urusan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu*				100 %	100 %	51.000.000,00	0,00	0,00	-51.000.000,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		65.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	3 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*				100 %	100 %	419.962.697,00	366.804.243,00	152.267.350,00	-267.695.347,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		700.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	73.605.618,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.300.000,00	42.535.600,00	29.135.300,00	-4.164.700,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.400.000,00	34.059.900,00	16.910.500,00	-26.489.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			48.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.400.000,00	24.855.700,00	13.281.600,00	-2.118.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			18.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.700.000,00	17.100.000,00	5.460.000,00	-22.240.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			39.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	10.554.875,00	6.903.900,00	-11.096.100,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	187.962.697,00	164.092.550,00	80.576.050,00	-107.386.647,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			420.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*				100 %	100 %	122.750.000,00	109.704.400,00	103.624.336,00	-19.125.664,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.500.000,00	44.994.400,00	38.914.336,00	-17.585.664,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.250.000,00	64.710.000,00	64.710.000,00	-1.540.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase aset OPD dalam keadaan baik*				85 %	85 %	378.700.000,00	206.168.700,00	162.188.700,00	-216.511.300,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		605.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.438.000,00	29.428.700,00	26.928.700,00	-16.509.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	241.762.000,00	144.900.000,00	115.900.000,00	-125.862.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			310.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	31 Unit	38.500.000,00	22.120.000,00	19.360.000,00	-19.140.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	55.000.000,00	9.720.000,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja dilatih yang bersertifikat kompetensi**				**34 %**	**50 %**	**843.710.400,00**	**1.190.760.418,00**	**614.853.600,00**	**514.289.600,00**							**1.358.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah pencari kerja yang bersertifikat kompetensi* *Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi*				32 Orang	16 orang	830.210.400,00	1.010.243.218,00	597.884.500,00	-232.325.900,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		1.270.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				259 Orang	42 Orang	830.210.400,00	684.616.025,00	381.606.100,00	-448.604.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			1.200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit	1 Unit	0,00	325.627.193,00	216.278.400,00	216.278.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi*				2 Lembaga	1 Lembaga	3.500.000,00	176.000.000,00	14.852.750,00	11.352.750,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				9 Lembaga	9 Lembaga	3.500.000,00	176.000.000,00	14.852.750,00	11.352.750,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase permohonan perizinan yang dikeluarkan rekomendasinya*				100 %	100 %	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				2 Perizinan	2 Perizinan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase perusahaan kecil yang dibina*				35 %	21 %	7.500.000,00	4.517.200,00	2.116.350,00	-5.383.650,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		33.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	5 Perusahaan	7.500.000,00	4.517.200,00	2.116.350,00	-5.383.650,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			33.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja**				**34 %**	**35 %**	**280.237.400,00**	**101.107.550,00**	**76.402.000,00**	**298.762.600,00**							**579.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kerja dilatih yang menciptakan lapangan kerja*				32 %	32 %	212.737.400,00	98.236.150,00	76.402.000,00	-136.335.400,00			-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Kabupaten Sijunjung		354.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				20 Orang	8 Orang	85.000.000,00	4.757.500,00	1.984.500,00	-83.015.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik P- 10. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik			63.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				250 Orang	150 Orang	52.737.400,00	54.427.600,00	49.213.000,00	-3.524.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				300 Orang	300 Orang	15.000.000,00	17.166.800,00	10.927.000,00	-4.073.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			86.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				4 Orang	2 Orang	35.000.000,00	6.995.050,00	1.839.500,00	-33.160.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				200 Orang	10 Orang	25.000.000,00	14.889.200,00	12.438.000,00	-12.562.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan*				25 lowongan	65 lowongan	42.500.000,00	1.456.850,00	0,00	-42.500.000,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		145.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				450 Orang	450 Orang	12.500.000,00	1.456.850,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			115.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PMI yang dilindungi*				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	1.414.550,00	0,00	-25.000.000,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		80.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	1.414.550,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			80.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**				**100 %**	**100 %**	**1.307.408.700,00**	**4.003.048.050,00**	**3.728.044.050,00**	**2.987.591.300,00**							**4.295.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan Jumlah PKB yang didaftarkan*				1 PKB 8 peraturan perusahaan	1 PKB 5 peraturan perusahaan	29.204.100,00	65.628.850,00	43.656.650,00	14.452.550,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				8 Perusahaan	5 Perusahaan	4.643.150,00	10.032.000,00	4.302.800,00	-340.350,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 Perusahaan	3 Perusahaan	3.322.100,00	6.071.750,00	2.634.700,00	-687.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	21.238.850,00	49.525.100,00	36.719.150,00	15.480.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial* *Persentase perusahaan yang dibina terkait regulasi ketenagakerjaan*				100 %	100 %	1.278.204.600,00	3.937.419.200,00	3.684.387.400,00	2.406.182.800,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		4.210.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				4 Perkara	3 Perkara	169.249.500,00	40.738.000,00	27.154.000,00	-142.095.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			170.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				2 Perkara	2 Perkara	5.100.200,00	5.089.850,00	2.336.350,00	-2.763.850,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	9.793.900,00	11.043.400,00	4.639.900,00	-5.154.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				5102 Orang	18280 Orang	1.094.061.000,00	3.880.547.950,00	3.650.257.150,00	2.556.196.150,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			4.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.127.280.400,00**	**398.526.350,00**	**210.361.350,00**	**-916.919.050,00**							**1.235.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1.127.280.400,00**	**398.526.350,00**	**210.361.350,00**	**-916.919.050,00**							**1.235.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase ketersediaan sarpras dalam kawasan transmigrasi**				**36 %**	**33 %**	**311.500.000,00**	**193.395.350,00**	**72.412.850,00**	**-126.500.000,00**							**185.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan sarpras dalam kawasan pembangunan transmigrasi*				13 %	13 %	311.500.000,00	193.395.350,00	72.412.850,00	-239.087.150,00			-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Kabupaten Sijunjung		185.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	1 Dokumen	207.500.000,00	5.429.100,00	2.475.550,00	-205.024.450,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				25 Kepala Keluarga	19 Kepala Keluarga	35.000.000,00	37.959.600,00	17.093.250,00	-17.906.750,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				30 Orang	20 Orang	42.500.000,00	150.006.650,00	52.844.050,00	10.344.050,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			80.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				19 Kepala Keluarga	16 Kepala Keluarga	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mandiri**				**-**	**65 %**	**815.780.400,00**	**205.131.000,00**	**137.948.500,00**	**234.219.600,00**							**1.050.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Jumlah Rakor transmigrasi dan HBT yang dilaksanakan persentase transmigran yang dibina*				100 % 13 %	100 % 1 kali	815.780.400,00	205.131.000,00	137.948.500,00	-677.831.900,00			-	- -	Kabupaten Sijunjung		1.050.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				240 Kepala Keluarga	202 Kepala Keluarga	160.780.400,00	191.489.500,00	131.895.750,00	-28.884.650,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	655.000.000,00	13.641.500,00	6.052.750,00	-648.947.250,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			800.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**7.111.170.128,00**	**9.223.826.705,00**	**7.868.215.280,00**	**757.045.152,00**							**11.909.000.000,00**	

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar setiap program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur secara jelas, transparan, dan akuntabel. Adapun tujuan penetapan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *output* kegiatan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Indikator kinerja pada dasarnya merupakan kompromi antara Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan kemampuan dan kesanggupan staf untuk mencapainya. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja Rencana Kerja, indikator dan target kinerja harus dinyatakan dengan jelas.

5.1. Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator Kinerja Kunci Utama tahun 2024 dan target tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kabupaten Sijunjung

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
					Target Awal	Target Perubahan
1	Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah bekerja	%	18,43	30	40
2	Tenaga Kerja	Persentase pekerja yang di PHK	%	0,73	0,50	0,50
3	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	32,55	37	37
4	Transmigrasi	Indeks kemandirian kawasan transmigrasi	Nilai	46,37	49	49
5	Tenaga Kerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	75,61	77	78

5.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian indikator Kinerja Kunci Hasil tahun 2024 dan target tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kabupaten Sijunjung

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Sat	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
					Target Awal	Target Perubahan
1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	37,20	37,20	37,20
2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	16,37	16,37	16,37
3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	62.875.633,35	62.976.711,86	62.976.711,86
4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	32,55	37	37
5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	18,43	30	40

BAB VI

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan serta untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kabupaten Sijunjung

DAVID RINALDO, SSTP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19850928 200312 1 002

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rencana Kerja

PERUBAHAN TAHUN 2025

Disparporasijunjung_rancak Disparpora Sijunjung Rancak @disparporasijunjung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah yang terus berkembang.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Perubahan ini mencakup penyesuaian program, kegiatan, dan target kinerja agar lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu fokus utama dalam Renja Perubahan ini adalah persiapan intensif menghadapi penilaian UNESCO untuk penetapan Geopark Ranah Minang Silokek sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada tahun 2026. Persiapan penilaian ini tentunya tetap memperhatikan prinsip efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa keberhasilan program-program yang telah ditetapkan tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah berkontribusi, termasuk Pemerintah Kabupaten Sijunjung, lembaga legislatif, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Kami berharap, dokumen ini dapat menjadi acuan yang terarah dan sinergis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Muaro Sijunjung, 15 Juli 2025
Kepala Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga,

AFRINELDI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19720407 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora) 24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan 39
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45
BAB V PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Keuangan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan .8
Tabel 2.2 Capaian Keuangan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 9
Tabel 2.3 Capaian Keuangan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.....9
Tabel 2.4 Capaian Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10
Tabel 2.5 Capaian Keuangan Program Peningatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 11
Tabel 2.6 Capaian Keuangan Program Pemasaran Pariwisata.....12
Tabel 2.7 Capaian Keuangan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....13
Tabel 2.8 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (Triwulan I sd IV) 14
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Kunci Hasil Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 21
Tabel 2.10 Realisasi PAD Tahun 2024 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.....24
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung.....21
Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kab. Sijunjung 24
Tabel 2.13 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 46
Tabel 2.14 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sijunjung Tahun 2025.....53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 57 Tahun 2016, telah menyusun Renja Tahun Anggaran 2025. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi berbagai dinamika dan perkembangan yang memengaruhi perencanaan awal. Perubahan kondisi ini, yang dapat berupa tren baru, isu tak terduga, atau hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian, menjadikan dokumen Renja awal tidak lagi sepenuhnya adaptif. Oleh karena itu, diperlukan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) 2025 sebagai langkah strategis untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, efisien, dan selaras dengan prioritas terkini.

Evaluasi kinerja yang berkelanjutan menunjukkan bahwa Rencana Kerja awal yang telah disusun memerlukan penyesuaian signifikan. Kondisi saat ini bergerak dengan cepat, dan berbagai faktor eksternal maupun internal dapat memengaruhi efektivitas program yang telah direncanakan. Munculnya tren pariwisata baru, pergeseran minat dan kebutuhan pemuda, serta perkembangan regulasi di bidang olahraga adalah beberapa contoh dinamika yang harus direspons. Selain itu, hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya seringkali mengidentifikasi adanya program yang kurang optimal, target yang perlu direvisi, atau alokasi sumber daya yang dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas.

Lebih dari itu, penyusunan Renja Perubahan 2025 ini juga merupakan respons strategis terhadap terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Prioritas Pembangunan Nasional. Inpres ini menetapkan fokus dan arah kebijakan yang harus diakomodasi oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaannya. Oleh karena itu, Renja Perubahan ini menjadi instrumen kritis untuk menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung dengan agenda prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Inpres tersebut. Dokumen perubahan ini menjadi dasar untuk mengoreksi arah kebijakan, mengoptimalkan program yang sudah berjalan, serta mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas yang berkembang, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Penyusunan Renja Perubahan 2025 ini tetap berakar pada visi pembangunan daerah: “Kabupaten Sijunjung Sejahtera Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani”. Visi besar ini diterjemahkan ke dalam beberapa misi, di mana Renja Perubahan ini secara khusus memfokuskan penyesuaian pada tiga misi utama:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif berbasis reformasi birokrasi, dengan penyesuaian strategi pelayanan untuk adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan teknologi.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata, dengan fokus pada optimalisasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang mungkin belum tergarap maksimal dalam rencana awal, atau memerlukan adaptasi terhadap tren pasar terbaru.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), melalui penyesuaian program pengembangan SDM yang lebih relevan dengan tuntutan kompetensi di era digital dan perubahan dinamika kepemudaan dan olahraga.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nacional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
10. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahun Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerjaa Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kepemudaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029
22. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung;
23. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
24. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menyesuaikan dan menyempurnakan rencana kerja sebelumnya. Ini dilakukan

untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan yang berkembang selama periode berjalan.

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, berdasarkan evaluasi dan kebutuhan terkini.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja yang lebih terarah dan efisien bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, guna mencapai target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan prioritas dan kondisi lapangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan perangkat daerah program dan kegiatan masyarakat

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2025. Pencapaian target kinerja masing-masing kegiatan selanjutnya dijumlahkan berdasarkan pengelompokkan program, sehingga diperoleh pencapaian realisasi kinerja program. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tahun 2024, dari 7 program, 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan rata-rata pencapaian target kinerja masing-masing program adalah 95,66%. Pencapaian kinerja program terendah sebesar 93,21% yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Sedangkan program dengan capaian tertinggi yaitu Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 99,88%.

Jumlah anggaran yang dikelola pada Tahun 2024 sebesar Rp9.903.408.150,00 (Sembilan milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). Dalam pelaksanaannya anggaran program dan kegiatan tersebut dapat terealisasi sebesar Rp8.804.586.359,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 95,39%.

Berdasarkan pengukuran Capaian Kinerja (Performance Result) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 pencapaian target kinerja keuangan sudah mencapai 95,39%. Pencapaian kinerja program terendah sebesar 93,21% yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Sedangkan program dengan capaian tertinggi yaitu Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 99,88%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Tahun Anggaran 2024 terdapat 2 (Dua) kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan pada program ini dengan total dana sebesar Rp358.968.866,00 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp346.897.210,00 sisa anggaran sebesar Rp12.071.656,00. Sehingga capaian keuangan sebesar 96,64% sedangkan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Keuangan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Keuangan (%)
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	96,80
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	96,80
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96,46
	- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	96,46
	Jumlah	**96,64**

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Untuk tahun 2024 terdapat 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan pada program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan total dana sebesar Rp2.647.929.576,00 realisasi keuangan sebesar Rp2.468.133.452,00 sisa anggaran sebesar Rp179.796.124,00 dengan capaian keuangan sebesar 93,21% dan capaian kegiatan sebesar 100%, sehingga capaian keuangan kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Keuangan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Keuangan (%)
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	98,18
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	98,18
2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,93
	- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	98,93
3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	99,89
	- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	99,89
4.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	77,70
	- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	95,41
	- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	17,44
	Jumlah	**93,21**

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pada Tahun 2024 terdapat satu kegiatan dan satu sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini dengan total dana sebesar Rp300.000.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp299.635.155,00 dengan capaian keuangan sebesar 99,88% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Keuangan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Keuangan (%)
1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	99,88
	- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	99,88
	Jumlah	**99,88**

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2024 terdapat 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan pada program ini dengan total dana sebesar Rp3.861.613.559,60 dengan total realisasi sebesar Rp3.726.121.567,00 sisa anggaran sebesar Rp135.491.992,60 dengan capaian keuangan sebesar 96,49% dan dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga capaian keuangan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Keuangan (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,62
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	99,80
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99,93
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,15
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,24
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,21
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	99,84
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99,23
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,58
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95,84
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,98
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,04
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,61
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,61

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,94
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,74
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,51
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,88
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,88
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00
	Jumlah	**96,49**

5. Program Peningatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini dengan total dana sebesar Rp1.125.144.226,00 dengan total realisasi sebesar Rp1.080.171.794,00 sisa anggaran sebesar Rp44.972.432,00 dengan capaian keuangan sebesar 96,00% dan capaian kinerja sebesar 100,00% sehingga capaian keuangan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Capaian Keuangan Program Peningatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Keuangan (%)
1.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	97,69
	- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	99,34
	- Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	91,96
2.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95,17
	- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	98,84
	- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	92,79
	- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	81,08
	Jumlah	**96,00**

6. Program Pemasaran Pariwisata

Pada tahun 2024 terdapat 1 (Satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini dengan total dana sebesar Rp1.215.337.342,40 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.168.904.207,00 sisa anggaran sebesar Rp46.433.135,40 dengan capaian keuangan sebesar 96,18% dan capaian kinerja sebesar 100% sehingga capaian keuangan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Keuangan Program Pemasaran Pariwisata

No	Kegiatan/Sub kegiatan	Capaian Keuangan(%)
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	96,18
	- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negri	85,21
	- Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	97,19
	- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	95,45
	Jumlah	**96,18**

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada tahun 2023 terdapat 1 (Satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini dengan total dana sebesar Rp394.414.580,00 realisasi sebesar Rp383.345.974,00 sisa anggaran sebesar Rp11.068.606,00 dengan capaian keuangan sebesar 97,19% dan capaian kinerja sebesar 100%, dan capaian keuangan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Capaian Keuangan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Keuangan(%)
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	97,19
	- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	98,42
	- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	98,81
	- Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	92,28
	Jumlah	**97,19**

Rata-rata capaian keuangan keseluruhan program pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar 96,51%. Capaian ini dapat dikategorikan Berhasil. Evaluasi keuangan Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024
(Triwulan I sd IV)

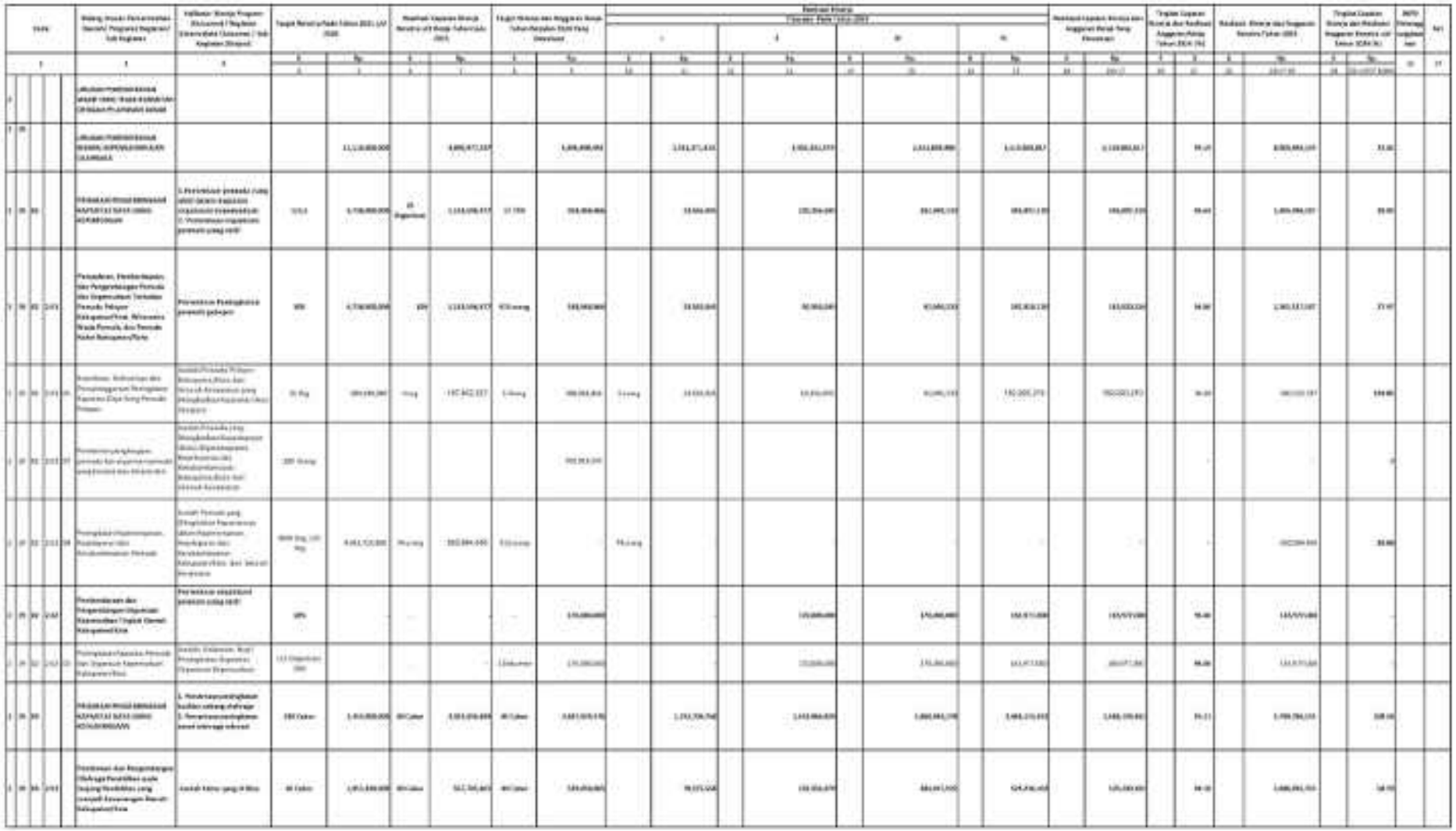

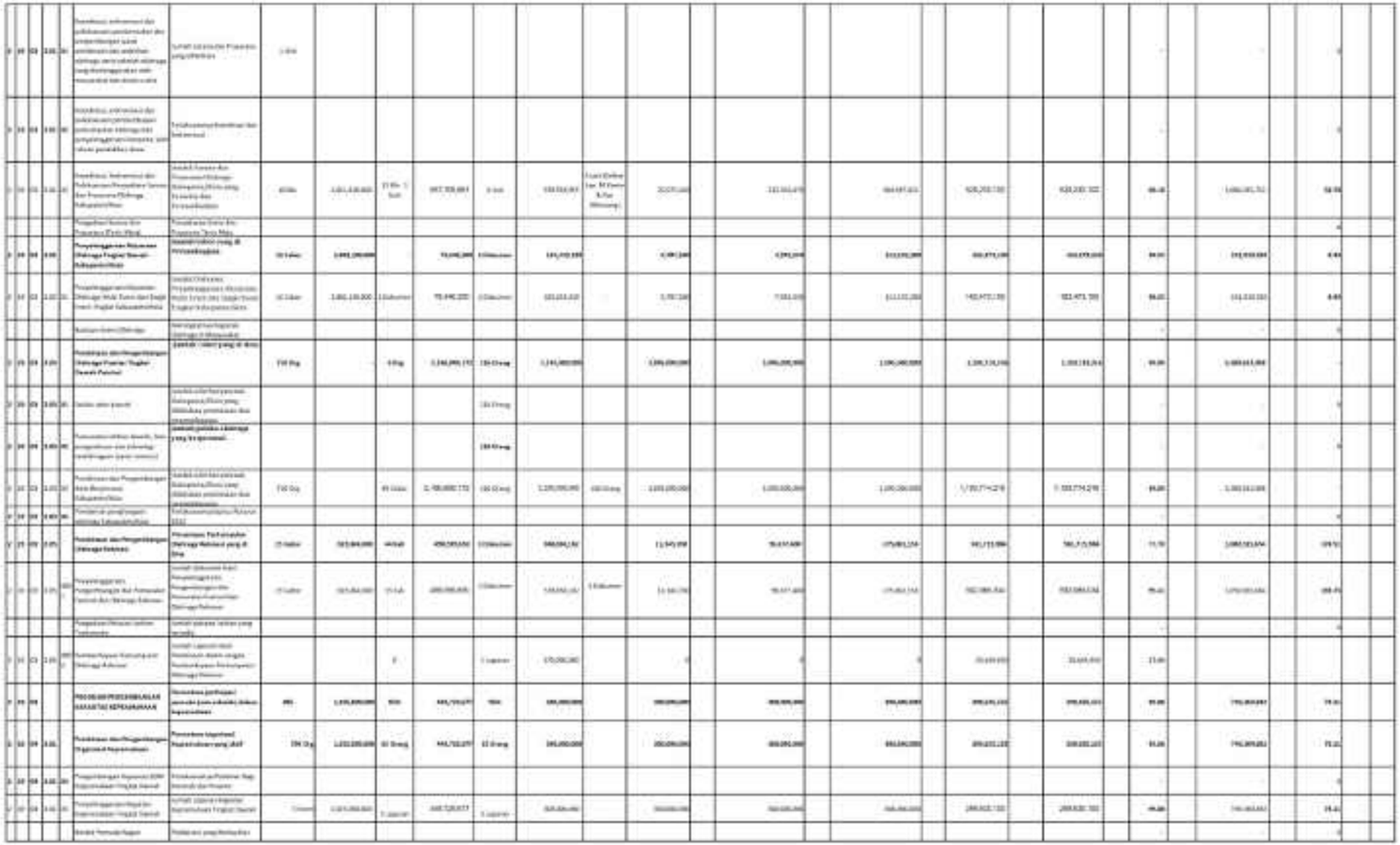

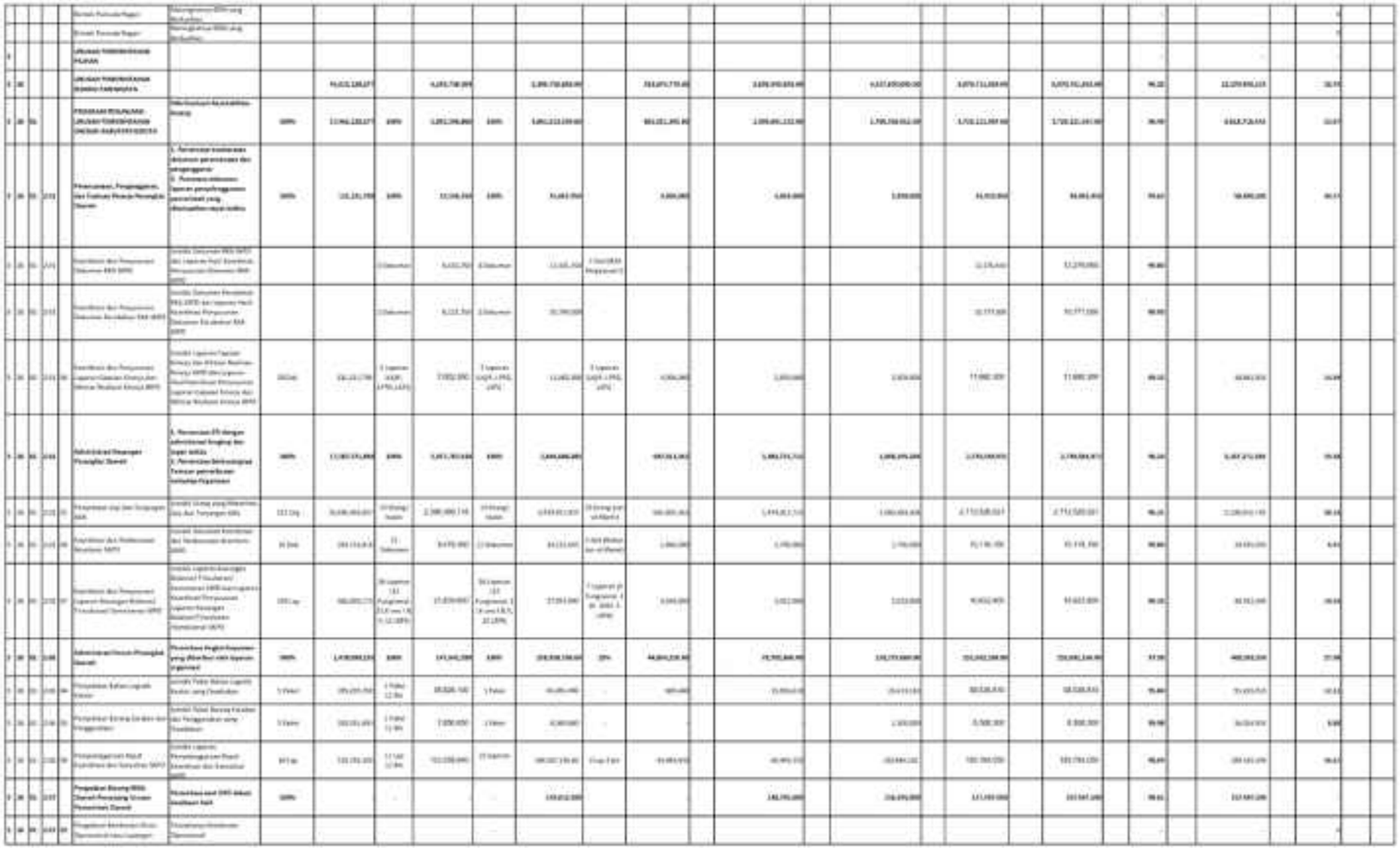

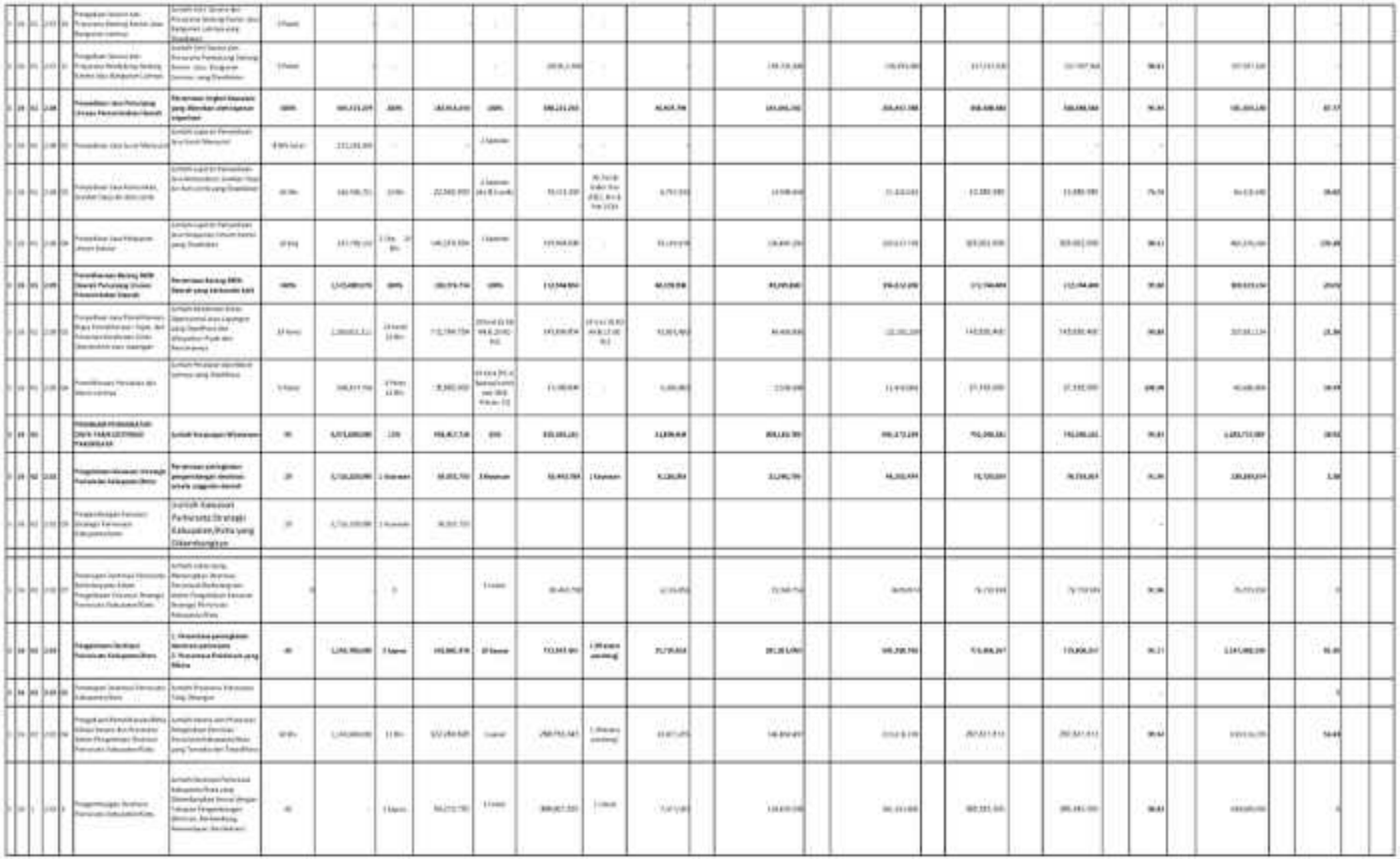

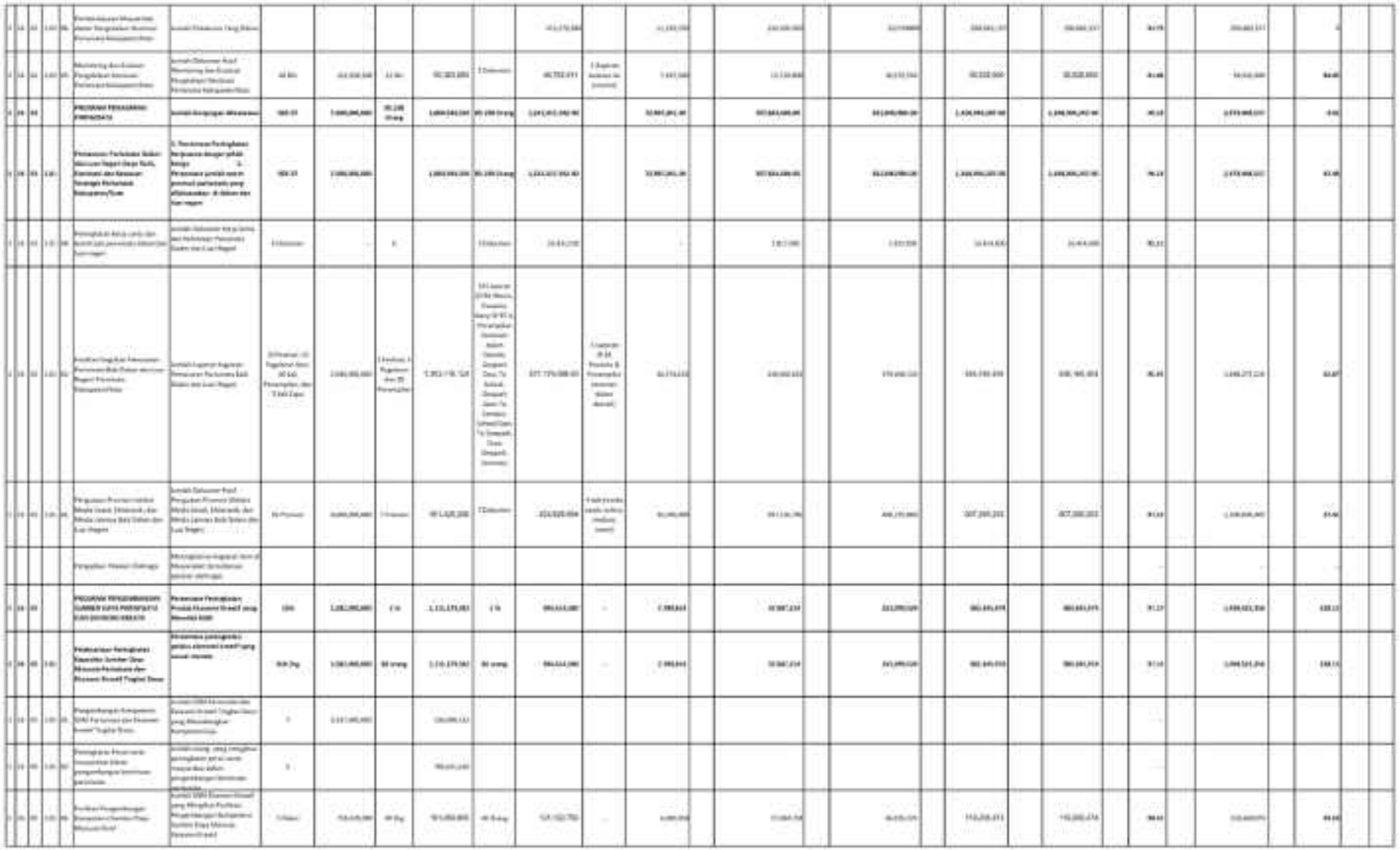

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja dapat mengunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas membatu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknik dinas;
b. Pelaksanaan kebijakan teknik dinas;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung maka Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan yaitu :

1. Urusan Wajib bidang Kepemudaan dan Olahraga yaitu :
    1. Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) Yang Berwirausaha
    2. Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten
    3. Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi, nasional dan internasional :
        1. Emas
        2. Perak
        3. Perunggu
    4. Jumlah pelatih/wasit yang seharusnya memiliki kompetensi (orang)

2. Urusan Pilihan bidang pariwisata yaitu :
    1. Jumlah Wisatawan Per Kebangsaan
    2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten
    3. Tingkat Hunian Akomodasi
    4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku
    5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Pariwasata Pemuda dan Olahraga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Kunci Hasil
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{63-57}{57}$ X 100% = 10,52%	Parpora
2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	$\frac{245.338-241.236}{241.236}$ X 100% = 1,70%	Parpora
3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{19.712}{116.070}$ X 100% = 16,98%	Parpora
4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{106.140.000.000}{12.488.940.000.000}$ X 100% = 0,85%	Sijunjung dalam angka Tahun 2024
5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{2.384.125.318}{106.531.278.734,90}$ X 100% = 2,24%	BKAD Sijunjung
6	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{6.623}{63.885}$ X 100% = 10,37%	Dinas Parpora dan Dinas Capil
7	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{13.325}{63.885}$ X 100% = 20,86%	Parpora
8	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	21 Medali	Parpora

Dari tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 terdapat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 63 orang atau meningkat sebesar 10,52%.

Untuk meningkatkanya kunjungan wisatawan yang datang ke Kabuten Sijunjung, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan berbagai event dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan event. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai event di Kabupaten Sijunjung antara lain;

1. Geopark Ambassador Campaign (Geotourism Edition)
2. Familiarization Trip Jurnalis Lokal dan Nasional di Perkampungan Adat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar
3. Sumarak Festival lansek manih Culture Diversity and Geoproduct UMKM / EKRAF Geopark Ranah Minang Silokek menyambut Urang rantau Pulang Kampuang di Muaro Sijunjung
4. Bakaua Adat, yang dilaksanakan di beberapa Nagari diantaranya Sijunjung, Tanjung Bonai Aur, Tanjung Gadang, dan nagari lainnya.
5. Festival Randai Kreasi Kab. Sijunjung 2024
6. Khatib Ramadhan Nagari Aie Angek
7. TBSS (Taragak Basuo Scooter Sumatera Barat) ke-29 di Kabupaten Sijunjung
8. Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
9. Pentas Seni Anak Nagari Kabupaten Sijunjung (Pesanku) dalam rangka buru wisata di Muaro Sijunjung
10. Festival Geopark “Geopark Silokek Culture Diversity Festival
11. Festival Seni dan Budaya Anak Nagari tanjung Bonai Aur
12. Fun bike dan Criterium Silokek 2024
13. Festival randai “mambangkik Batang Tarandam”
14. Fun mountain bike dan fun tubing di Nagari Taratak Baru dan Taratak
15. Colour Run di Nagari Pematang Panjang

Meningkatnya kesadaran masyarakat melihat potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sijunjung. Indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat ini adalah jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pokdarwis yang ada di Kabupaten Sijunjung terus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas destinasi sehingga dapat meningkatkan minat dan kunjungan dari wisatawan.

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah membangun dan melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata, seperti Penyiapan Lingkungan berupa jalan Guest House di Rest Area Silokek. Pembangunan dan rehab ini bertujuan untuk menarik minat pengunjung ke destinasi wisata khususnya di Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan destinasi wisata, maka dilaksanakan beberapa bimbingan teknis dan pelatihan, antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan Pemandu Geowisata yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Mei 2024 bertempat di hotel Bukik Gadang dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

2. Pelatihan Pemandu Ekowisata yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2024 bertempat di Hotel Bukik Gadang dengan peserta sebanyak 30 orang.
3. Peningkatan Kapasitas Pengelola Objek Wisata Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan di Solok Rajo pada tanggal 12 November 2024 dengan peserta berjumlah 15 orang.
4. Pelatihan dan Serifikasi Kompetensi Geowisata Kab. Sijunjung yang dilaksanakan di Hotel Bukik Gadang pada tanggal 15 s.d 16 Juli 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang

Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung berupaya untuk berkolaborasi dengan lintas sektor. Kolaborasi yang dilakukan ini dikemas dengan berbagai program kegiatan yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sijunjung, seperti :

1. Kolaborasi dengan Komunitas
2. Kolaborasi dengan perguruan tinggi
3. Kolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata
4. Kolaborasi dengan instansi pemerintah dan entitas lainnya.
5. Kerjasama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.384.125.318 atau 2,24%. Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD merupakan akumulasi dari realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, Pajak Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan rincian pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Realisasi PAD Tahun 2024
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Sijunjung

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	195.420.434,00	160.298.395,00
Pajak Restoran	2.173.267.635,00	2.119.377.923,00
Pajak Hiburan	11.050.000,00	1.000.000,00
Pajak Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	10.000.000,00	7.100.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.786.400,00	96.349.000,00
Total	**2.490.524.469,00**	**2.384.125.318,00**

Untuk urusan kepemudaan dan olahraga terdapat 2 (Dua) indikator kinerja kunci hasil. Pertama tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Kedua tingkat

partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri diperoleh dari jumlah pemuda umur 16-30 tahun yang berprofesi wirausahawan dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun pada tahun 2024. Dari data yang diperoleh oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diketahui jumlah pemuda yang berwirausaha adalah 6.623 orang atau 10,37%.

Sementara tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan diperoleh dari formula jumlah pemuda umur 16-30 tahun yang tergabung dalam organisasi dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun pada tahun 2024. Dari data yang diolah dinas Parpora diketahui jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi adalah sebanyak 13.325 orang atau sebesar 20,86% dari jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Sijunjung. Peningkatan prestasi olahraga yang diperoleh dari event olahraga daerah dan nasional sebanyak 21 medali.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sijunjung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2023	Th. 2024	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
1	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) Yang Berwirausaha		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	-	25%	3.299	6.623	11,87%	13,37%	
2	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten		Cakupan Komplikasi Kebidangan Yang Ditangani	2%	20%	2% 11.761	20,86% 13.325	20,50%	20,50%	
3	Jumlah Perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional; 1. Emas 2. Perak 3. Perunggu		Peningkatan Prestasi Olahraga	45	50	101 48 32 21	21 6 9 6	53	53	
	Urusan Pariwisata									
4	Jumlah Wisatawan Per Kebangsaan		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	-	-	57	63	-	-	
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan		Jumlah Wisatawan: 1. Wisatawan Nusantara	1%	1%	15,08%		0,1%	0,1%	

	nusantara yang datang ke Kabupaten		2. Wisatawan Mancanegara		243.706	241.236 57	245.338 -	246.143 -		
6	Tingkat Hunian Akomodasi		Jumlah Kamar: 1. Jumlah Kamar Yang Terjual 2. Jumlah Kamar Yang Tersedia	1%	-	16,81% 20.553 335	 19.712 318	 19.953 236	 19.953 236	
7	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku		Jumlah PDRB Sektor Pariwisata	0,90	-	0,84	0,85	0,90	0,90	
8	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	2,00	-	2,28	2,24	2,25	2,50	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora)

Fokus pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal serta berdasarkan kondisi saat ini dan persiapan Kabupaten Sijunjung menghadapi penilaian UNESCO Global Geopark (UGGp) di tahun 2026. Untuk itu terdapat isu-isu penting pembangunan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga tahun 2025 di Kabupaten Sijunjung antara lain;

1. Pariwisata

Isu-isu ini mencakup aspek tata kelola, infrastruktur, produk wisata, dan konservasi. Fokus utama harus pada integrasi pariwisata dengan tiga pilar geopark: konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

a. Tata Kelola (Governance)

- Penyelarasan Kebijakan Lintas Sektor

  Sebagai upaya untuk mengoptimalkan sinergi antara OPD terkait (Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya) dalam merencanakan dan melaksanakan program pariwisata. Ini dapat percepatan pembangunan infrastruktur dan promosi geopark.

- Penguatan Kelembagaan Pengelola Geopark

  Badan pengelola geopark perlu diperkuat, baik dari sisi kewenangan, anggaran, maupun sumber daya manusia (SDM). Tanpa kelembagaan yang kuat dan otonom, upaya koordinasi dan implementasi program Geopark Ranah Minang Silokek menuju UGGp akan berjalan lambat.

- Partisipasi Publik

  Keterlibatan Masyarakat dan pengelola desa wisata, terutama melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis), dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan destinasi wisata masih perlu ditingkatkan.

b. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana

  Kondisi sarana dan prasarana penunjang pariwisata, seperti toilet umum, pusat informasi, tempat sampah, dan sarana ibadah, masih perlu ditingkatkan ketersediaan, dan pemeliharaannya di beberapa geosite.

- Aksesibilitas yang Belum Optimal

  Akses jalan menuju beberapa geosite penting di Geopark Silokek masih menghadapi tantangan, termasuk kondisi jalan yang rusak atau belum memadai. Hal ini menjadi tantangan untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

- Ketersediaan Transportasi Publik

Belum tersedianya moda transportasi publik yang memadai dari pusat kota ke kawasan geopark, menyulitkan wisatawan untuk berkunjung secara mandiri.

c. Pengembangan Produk dan Pemasaran

- Inovasi Produk Wisata

  Produk wisata yang ditawarkan masih berfokus pada keindahan alam dan geosite. Perlu adanya inovasi untuk mengembangkan produk geowisata, ecowisata, dan wisata budaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

- Peningkatan Pemasaran dan Promosi Digital

  Upaya promosi geopark masih perlu dioptimalkan, terutama dalam memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

- Pengembangan Ekonomi Kreatif

  Potensi ekonomi kreatif dan UMKM yang berkaitan dengan geopark (kuliner, kerajinan tangan dan suvenir) masih belum tergarap maksimal. Ini perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi kreatif langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.

d. Konservasi dan Keberlanjutan

- Penerapan Konsep Konservasi

  Perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku pariwisata tentang pentingnya konservasi geologi, biologi, dan budaya. Hal ini merupakan salah upaya untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan terhadap keunikan dan keaslian geosite.

- Manajemen Risiko Lingkungan

  Perlunya sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk menghadapi potensi bencana alam (banjir dan longsor) di kawasan geopark, yang dapat mengancam keselamatan wisatawan dan keberlanjutan geosite. Risiko bencana ini telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sijunjung dan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Parpora sebagai acuan dalam pengembangan dan pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung.

- Sistem Pengelolaan Sampah

  Masalah sampah, terutama di area geosite yang ramai pengunjung, perlu ditangani secara efektif. Ini dapat meningkatkan estetika dan kelestarian lingkungan geopark.

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kapasitas Pemandu Wisata

  Keterampilan dan pengetahuan pemandu wisata lokal tentang geologi, budaya, dan konsep geopark masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan edukasi yang berkualitas kepada wisatawan.

- Literasi Geopark

  Pemahaman masyarakat luas tentang nilai-nilai geopark (konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan) belum merata. Ini menjadi kendala dalam membangun kesadaran kolektif untuk mendukung Geopark Silokek menuju UGGp. Untuk itu masyarakat, Pokdarwis dan sekolah-sekolah perlu dilibatkan. Sehingga pengetahuan tentang Geopark bisa diterima sejak dibangku sekolah oleh masyarakat, sebagai sebuah potensi dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung.

f. Persiapan Penilaian UGGp 2026

- Penguatan Dokumentasi dan Narasi

  Menyusun dokumen pengajuan yang komprehensif dan akurat, berisi narasi yang kuat tentang nilai-nilai geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya yang terintegrasi. Serta pengisian annex atau lampiran/dokumen pendukung yang menyertai dokumen aplikasi (dossier) utama. Fungsi utama dari annex ini adalah untuk memberikan detail dan bukti yang lebih spesifik dan mendalam untuk mendukung klaim yang ada dalam dokumen utama. Annex ini menjadi kunci bagi tim asesor UNESCO untuk melakukan verifikasi, baik saat penilaian dokumen maupun saat kunjungan lapangan.

- Audit Internal (Self-Assessment)

  Melakukan penilaian mandiri (audit internal) terhadap semua geosite dan program yang telah berjalan, sesuai dengan kriteria UGGp. Ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan sebelum tim asesor UNESCO datang.

- Kampanye dan Promosi Intensif

  Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting status UGGp. Aktiitas promosi ini dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menarik perhatian dan membangun citra positif Geopark Ranah Minang Silokek. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Publikasi Ilmiah dan Profesional. Mendorong publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional tentang geosite-geosite yang ada di GRMS. Publikasi ini sangat penting karena menunjukkan signifikansi ilmiah geopark, yang merupakan salah satu kriteria utama oleh UNESCO.

- Simulasi Penilaian

  Dimulai dengan menyusun rundown kegiatan penilaian dan mengadakan simulasi kunjungan oleh tim asesor. Dimana semua yang terlibat dari pemerintah hingga masyarakat, dapat mempraktikkan peran mereka. Ini memastikan kesiapan teknis

dan mental saat penilaian sesungguhnya berlangsung. Selain itu penyusunan rundown ini sebagai dasar menentukan kebutuhan anggaran untuk penilaian tersebut.

- Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi

  Memperkuat lobi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan dukungan penuh, baik finansial maupun non-finansial, dalam persiapan akhir.

2. Isu Kepemudaan

- Peningkatan Kesadaran dan Peran Pemuda

  Mayoritas pemuda di Sijunjung masih belum sepenuhnya memahami konsep geopark dan pentingnya status UGGp. Mereka cenderung melihatnya hanya sebagai destinasi wisata, bukan sebagai platform untuk konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan.
- Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan

  Pemuda lokal perlu dilatih untuk menjadi pemandu wisata profesional yang menguasai narasi geologi, biologi, dan budaya. Selain itu, mereka harus didorong untuk berinovasi dalam menciptakan produk ekonomi kreatif (misalnya, kerajinan tangan, kuliner) yang berbasis pada potensi geopark.
- Partisipasi dalam Pengelolaan Geopark

  Keterlibatan pemuda dalam forum atau organisasi pengelola geopark masih terbatas. Mereka perlu dilibatkan secara aktif, baik dalam perencanaan program maupun implementasi kegiatan di geosite.

3. Isu Keolahragaan

- Pengembangan Olahraga Berbasis Geopark

  Potensi olahraga alam (*outdoor sports*) di kawasan Geopark Ranah Minang Silokek perlu dimanfaatkan secara optimal. Jenis olahraga seperti arung jeram, panjat tebing, bersepeda gunung, dan geopark run memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan minat khusus.
- Penyelenggaraan Event Olahraga

  Perlu adanya agenda tahunan atau event olahraga skala nasional/internasional yang diselenggarakan di kawasan geopark. Event semacam ini tidak hanya mempromosikan pariwisata, tetapi juga menunjukkan kesiapan geopark dalam menyelenggarakan acara berskala besar sesuai dengan standar UGGp.

- Integrasi Olahraga dan Konservasi

  Aktivitas olahraga yang dilakukan di kawasan geopark harus mengikuti prinsip-prinsip konservasi. Misalnya, jalur bersepeda atau *trail running* harus dirancang agar tidak merusak ekosistem atau warisan geologi. Ini menunjukkan komitmen Sijunjung terhadap pembangunan berkelanjutan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD Perubahan untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung tahun 2025 sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung mengacu kepada 3 misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, effisien dan responsive berbasis reformasi birokrasi
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata
3. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD Perubahan dengan kebutuhan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2025. Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD Perubahan dengan analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2025	Kebutuhan Dana (RP 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**2.996.603.548**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**6.006.608.701**	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Kab Sijunjung	**Tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha**	**10,40%**	**65.593.158**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Kab. Sijunjung**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam Berwirausaha**	**10,40%**	**65.593.158,00**	
1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Kab Sijunjung	**Persentase Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda**	**0,09%**	**208.997.146**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Kab. Sijunjung**	**Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda**	**0,09%**	**208.997.146,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kab Sijunjung	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dan seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	5 orang	65.593.158	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dan Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	65.593.158,00	
2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Sijunjung**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan**	**0%**	**0**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Sijunjung**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	**0%**	**0**	
	Koordinasi, singkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kab Sijunjung	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	0 organisasi	0	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	0 Organisasi	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Kab. Sijunjung	**Jumlah Perolehan Medalli pada Even olahraga provinsi, nasional dan internasional**	**53 Medali**	**2.160.284.856**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Kab. Sijunjung	**Jumlah perolehan medali pada event olahraga provinsi, nasional dan internasional**	53 Medali	**2.160.284.856,00**	
3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Persentase pelatih olahraga yang memiliki kompetensi disatuan-satuan pendidikan**	40%	**500.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Persentase pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan**	40,00%	**500.000.000,00**	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kab. Sijunjung	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	398.091.051	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kab. Sijunjung	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	398.091.051,00	
4	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Persentase penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah**	**4,26%**	**32.502.852**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Persentase penyelenggaraan event Olahraga prestasi tingkat daerah**	**4,26%**	**32.502.852,00**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	23.899.699	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	23.899.699,00	
5	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Kab. Sijunjung	**Persentase atlet yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi**	100%	**2.785.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Kab. Sijunjung	**Persentase atlet yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi**	**100%**	**2.785.000.000,00**	
	Seleksi atlet daerah	Kab. Sijunjung	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	0%	0	Seleksi atlet daerah	Kab. Sijunjung	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	0 Orang	0	
	Pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota	Kab. Sijunjung	Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang dibina dan diberikan pengembangan	116 orang	1.392.500.000	Pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	116 Orang	1.392.500.000,00	
6	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Kab. Sijunjung	**Persentase olahraga rekreasi yang dikembangkan**	**23,53%**	**523.783.841**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Kab. Sijunjung	**Persentase olahraga rekreasi yang dikembangkan**	**23,53%**	**523.783.841,00**	
	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Kab. Sijunjung	Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	4 laporan	135.000.000	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	135.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusilan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kab. Sijunjung	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	42 lembaga	210.794.106	Penyusilan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kab. Sijunjung	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	42 Lembaga	210.794.106,00	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Kab. Sijunjung	**Persentase partisipasi pemuda usia sekolah dalam kepramukaan**	**95,27%**	**200.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Kab. Sijunjung	**Persentase partisipasi pemuda usia sekolah dalam kepramukaan**	**95%**	**200.000.000**	
7	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Kab. Sijunjung	**Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan**	**100%**	**200.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Kab. Sijunjung	Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan	**100 %**	**200.000.000**	
	Penyelenggaraan Kegatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Sijunjung	Jumlah laporan kegatan kepramukaan tingkat daerah	1 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Kegatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Kegatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	200.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Kab. Sijunjung				
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**5.057.413.348**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	Kab. Sijunjung			**5.845.866.503**	
IV	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Sijunjung	**Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**	**79,5%**	**3.177.265.106,40**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Sijunjung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	**80%**	**3.186.517.622**	
8	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persetase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu** **Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran**	**3 dokumen**	**12.170.850**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran** **Persetase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu**	**100%**	**12.170.850,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.764.850	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.764.850,00	
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi** **Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**10%** **25 orang**	**2.924.661.400**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Sijunjung	**- Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi** **Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**10%** **100%**	**2.924.661.400,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bula n	2.911.230.950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	2.911.230.950,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.211.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.211.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	26 Laporan	1.653.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	1.653.000,00	
30	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**85%**	**81.806.824,01**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Sijunjung	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	**85 %**	**81.806.824,01**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.676.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.676.700,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	432.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	432.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.990.106,40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.990.106,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase aset OPD dalam keadaan baik**	**80%**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase aset OPD dalam keadaan baik**	**80 %**	**0**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah sarana pendukung yang tersedia	0 Unit	0	
12	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organinasi**	**80%**	**138.275.900**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Sijunjung	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	80 %	**138.275.900,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.490.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.490.900,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	176.647.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	176.647.000,00	
13	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**80%**	**106.936.850**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Sijunjung	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**80 %**	**106.936.850,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sijunjung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	93.869.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sijunjung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	29 Unit	93.869.800,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.870.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.870.000,00	
V	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kab. Sijunjung	**Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata**	**5,80%**	**827.162.355,60**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kab. Sijunjung	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata	**5,80%**	**827.162.355,60**	
14	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Persentase kawasan strategis yang dikembangkan**	**14,29%**	**385.066.304,40**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Persentase kawasan strategis yang dikembangkan**	**14,29%**	**385.066.304,40**	
	Pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	356.976.755,00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	356.976.755,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Kab Sijunjung	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kot	1 Lokasi	18.338.641,80	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	18.338.641,80	
15	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kab Sijunjung	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)**	**1 Lokasi**	**489.704.397**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola**	**1 Lokasi**	**489.704.397,00**	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Sijunjung	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	7.339.308	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Lokasi	7.339.308,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 Laporan	427.667.124,80	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	427.667.124,80	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Sijunjung	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	17.060.976	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	17.060.520	
VI	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kab Sijunjung	**Persentase Pemasaran Pariwisata**	**100%**	**175.177.083,82**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kab. Sijunjung	**Persentase pemasaran pariwisata**	**100%**	**175.177.083,82**	
16	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kab Sijunjung	**Jumlah Promosi Event Daerah yang terlaksana** **Persentase Peningkatan Kerjasama Pariwisata**	**0%** **4 Promosi**	**239.657.959,05**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kab. Sijunjung	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana**	**4 Promosi**	239.657.959,05	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	53.155.851	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	53.155.851,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Sijunjung	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	122.021.232,82	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	122.021.232,82	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab Sijunjung	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0		Kab. Sijunjung				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kab. Sijunjung	**Persentase SDM Ekraf yang meningkat kapasitasnya** **Persentase Pelaku Ekraf yang Sesuai Standar** **Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata**	**11,76%** **1** **0%**	**55.069.058**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kab. Sijunjung	**Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata** **Persentase SDM Ekraf yang meningkat kapasitasnya** **Persentase pelaku ekraf yang sesuai standar**	**0%** **11,76%** **1 %**	**55.069.058,00**	
17	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Kab. Sijunjung	**Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang bersertifikat** **Persentase SDM ekraf yang mendapatkan sertifikat** **Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi**	**0%** **11,76%** **2 Orang**	**187.458.620**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Kab. Sijunjung	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat** **Persentase SDM Ekraf yang mendapatkan sertifikat** **Persentase SDM padwisata yang tersertifikasi**	**2 Orang** **11,76%** **0%**	**187.458.620,00**	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	Kab. Sijunjung	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2 Orang	29.081.040	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	Kab. Sijunjung	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2 Orang	29.081.040,00	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Kab. Sijunjung	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	2 Orang	25.988.018	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Kab. Sijunjung	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	2 Orang	25.988.018,00	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada dasarnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran sangatlah banyak, namun berbagai keterbatasan yang ada menyebabkan usulan tersebut ditelaah lagi dan ditetapkan prioritas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan tahun yang lalu
2. Masukan dari segenap organisasi mitra
3. Aspirasi masyarakat yang diserap melalui musrenbang
4. Sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemerintah tetangga dan pemerintah tingkat atas
5. Pembahasan dengan DPRD
6. Ketersediaan Anggaran
7. Kemampuan Personil
8. Kemampuan Peralatan

Target yang ingin dicapai adalah mengembangkan segenap potensi yang ada di bidang pariwisata pemuda dan olahraga menjadi lebih baik, sehingga bermanfaat bagi individu/kelompok secara langsung dan daerah. Selain itu kita juga berharap mampu meningkatkan PAD dan PDRB terutama dari sektor pariwisata.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah sebagai berikut: :

1. Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
3. Industri Pariwisata
4. Kelembagaan Kepariwisataan

Tujuan Pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efesien dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Nasional.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara
3. Jumlah penerimaan devisa dan wisatawan mancanegara
4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara.
5. Produk Domestik Bruto di Bidang Pariwisata.

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, Pemerintah Provinsi menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Sumatera Barat. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RIPPARPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi:

1. Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
3. Industri Pariwisata
4. Kelembagaan Kepariwisataan

Misi :

“Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Destinasi Wisata Utama di Wilayah Indonesia Bagian Barat”

Visi :

1. Penyelenggaraan Kebudayaan dan Pariwisata adalah pendekatan adat, budaya, dan agama demi pencerahan masyarakat ;
2. Produk wisata yang berwawasan lingkungan ;
3. Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat
4. Menjadikan kebudayaan dan pariwisata sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi rakyat.
5. Mewujudkan industri kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu andalan penghasil devisa.
6. Pengembangan kualitas dan kuantitas insan kebudayaan dan pariwisata
7. Mewujudkan iklim yang kondusif dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
8. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK), pengembangan penelitian dalam percepatan pembangunan sektor kebudayaan dan Pariwisata.
9. Wewujudkan dukungan lintas sektoral/program dalam pengembangan pembangunan.
10. Mewujudkan efektifitas, efiiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor kebudayaan dan pariwisata.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan wisatawan mancanegara
2. Kunjungan wisatawan nusantara
3. Penerimaan devisa dan wisatawan mancanegara
4. Pengeluaran wisatawan nusantara.
5. Produk Domestik Bruto di bidang pariwisata

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2025. Adapun maksud penyusunan RIPKD Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman pembangunan dan pengelola pariwisata bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, investor swasta dan masyarakat dalam program jangka pendek dan jangka menengah.
2. Menyusun rencana pembangunan bidang kepariwisataan sebagai usaha menyeluruh bagi semua pelaku industri wisata dan elemen pendukungnya.

3. Merencanakan pengembangan atraksi dan kegiatan wisata berwawasan internasional yang dapat membangun citra Kabupaten Sijunjung dengan arah menuju pariwisata budaya dan pariwisata alam.
4. Sebagai arah dan pedoman untuk mengimplementasikan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga potensi dasar yaitu upaya pelestarian lingkungan alam, upaya peningkatan ekonomi dan upaya pembangunan sosial kemasyarakatan.
5. Sebagai arah dan pedoman pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengembangan kepariwisata Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung yang berbasis wisata budaya dan alam yang inovatif dan berwawasan lingkungan;
2. Menetapkan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah;
3. Menetapkan sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

1. Sasaran produk adalah dimilikinya materi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sijunjung jangka lima tahun secara terarah, terukur dan terprogram dan program pembangunan jangka menengah kepariwisataan tahun 2017-2025.
2. Sasaran operasional adalah terciptanya kegiatan pariwisata berdasarkan pengembangan pariwisata saat ini, melalui pentahapan pembangunan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sijunjung 2017-2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2021-2026. Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Sijunjung berupaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri (IDAMAN)
Misi 1 : Mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
Misi 2 : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui pengurtan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1	: Mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif		
Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan		
Sasaran	: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Meningkatkan koordinasi PDRB sektor pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	1 Mengembangkan sektor pariwisata berbasis Ekonomi Hijau (ekowisata) dengan peningkatan partisipasi lokal dalam rantai pariwisata Catt: Merupakan Isu Strategis Daerah (Rancel RPJMD 2025-2029)	1 Meningkatkan kualitas +A (aksesibilitas, Amenitas, atraksi,dan Anciliary) kawasan Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS) 2 Mengoptimalkan kualitas data potensi wisata 3 Mengembangkan Destinasi Ekowisata Berbasis Masyarakat 4 Meningkatkan kualitakan Sumber Daya Manusia pariwisata 5 Meningkatan kualitas dan jangkauan promosi pariwisata berbasis digitalisasi 6 Meningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan destinasi 7 Monitoring dan evaluasi
		2 Mengoptimalkan Daya Tarik Wisata melalui Peningkatan Frekuensi dan Kualitas Festival Catt: Merupakan Progul Bupati/Wakil Bupati 2025-2029	1 Meningkatkan kualitas dan variasi konten festival 2 Mengintegrasikan festival dengan olahraga dan potensi wisata alam 3 Meningkatkan promosi festival melalui media digital, cetak, elektronik dan kerjasama dengan pihak terkait 4 Mengoptimalkan kegiatan pameran dan event pariwisata tingkat nasional dan internasional 5 Monitoring dan evaluasi
	2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	1 Meningkatkan ekonomi kreatif melalui peningkatan inovasi, daya saing dan kemandirian (Ekonomi Kreatif Mainan)	1 Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Ekonomi Kreatif 2 Memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Catt: Merupakan Progul Bupati/Wakil Bupati 2025-2029	3 Memfasilitasi Pemasaran dan Branding Produk Ekonomi Kreatif 4 Mengoptimalkan kualitas data ekonomi kreatif 5 Mengembangkan Produk Unggulan Lokal 6 Monitoring dan evaluasi
Misi 2	: Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif		
Tujuan	: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif		
Sasaran	: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		
Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan daerah	1 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Pemuda	1 Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kepemudaan 2 Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan 3 Meningkatan kualitas Organisasi Kepemudaan 4 Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas Pemuda 5 Menyediakan data kepemudaan 6 Monitoring dan evaluasi
	2. Meningkatnya Prestasi Olahraga	1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet	1 Meningkatkan kualitas kelembagaan organisasi keolahragaan 2 Meningkatkan Kualitas Atlet dan Pelatih 3 Mengembangkan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga 4 Meningkatkan Frekuensi dan Kualitas Kompetisi 5 Mengintegrasikan Aktivitas Keolahragaan dengan Pariwisata 6 Monitoring dan evaluasi

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategi yang akan dicapai, maka program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung tahun 2025 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagai berikut:

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib (Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga) :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan , dengan kegiatan:
   1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
      - Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan:
   1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota
   2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
   3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
      - Seleksi Atlet Daerah
   4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
      - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
      - Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan kegiatan:
   1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan (Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan;
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut;
    1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;
        - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
        - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;
        - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
        - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
        - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan rincian kegiatan sebagai berikut;
    1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;
        - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
        - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
        - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut;
    1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
        - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
        - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
        - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan pariwisata berbasis komunikasi. Dari prioritas pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditetapkanlah beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan fokus pengembangan pembangunan diatas maka direncanakan beberapa event/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Baik event pariwisata maupun olahraga yang berbasis komunikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sijunjung.

Penetapan target capaian kinerja Dinas Parpora disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025. Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini :

Tabel 2.14

Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sijunjung Tahun 2025

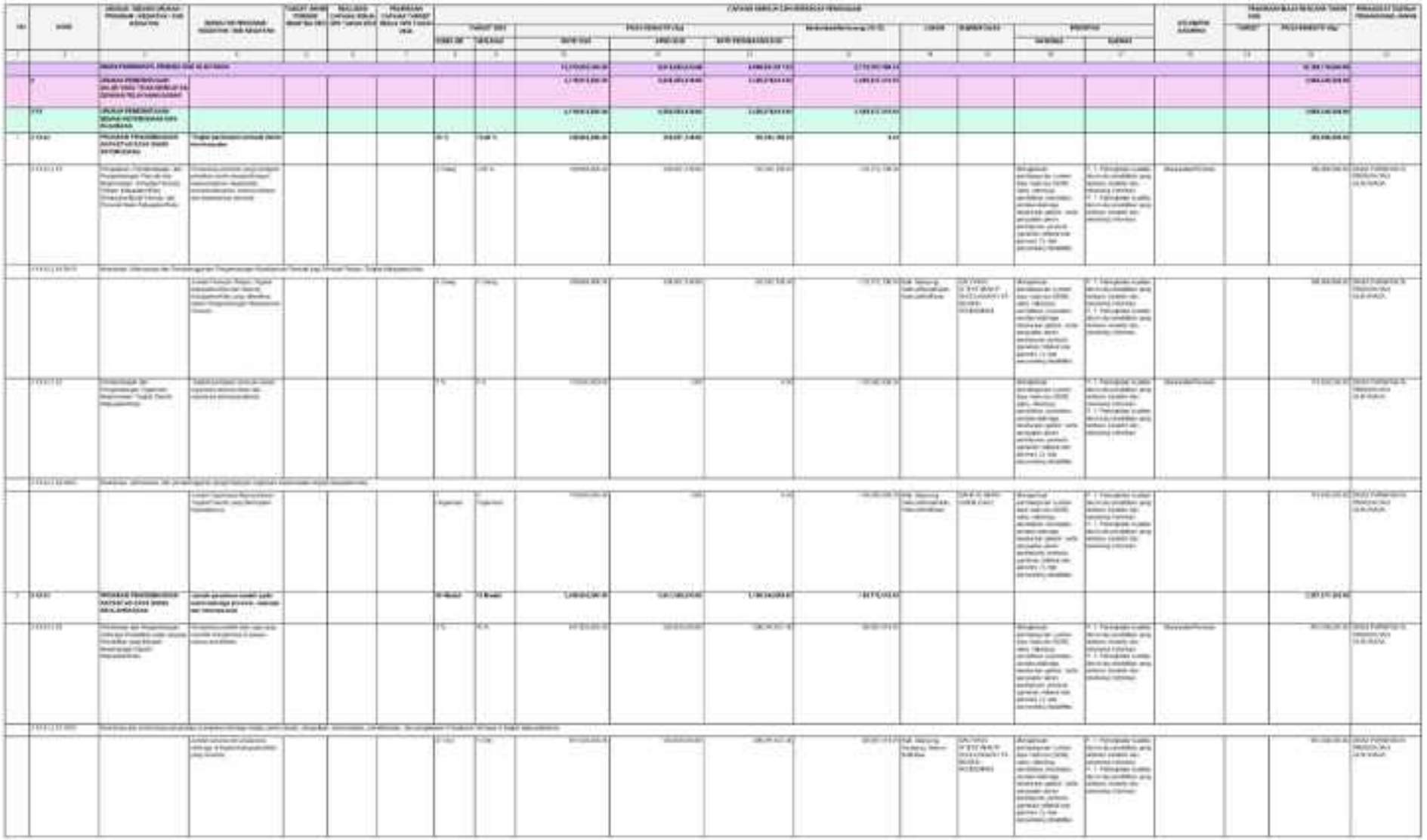

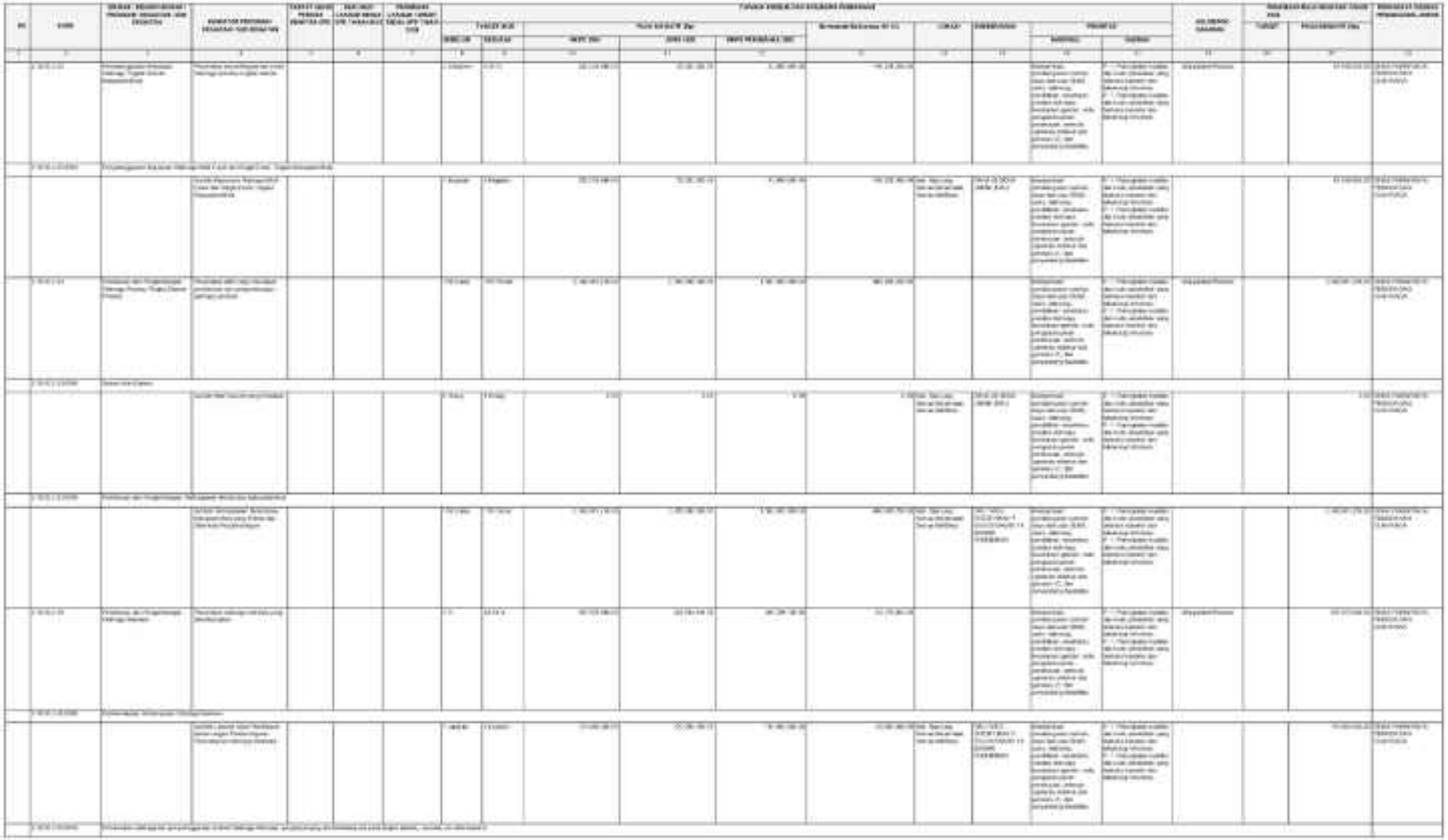

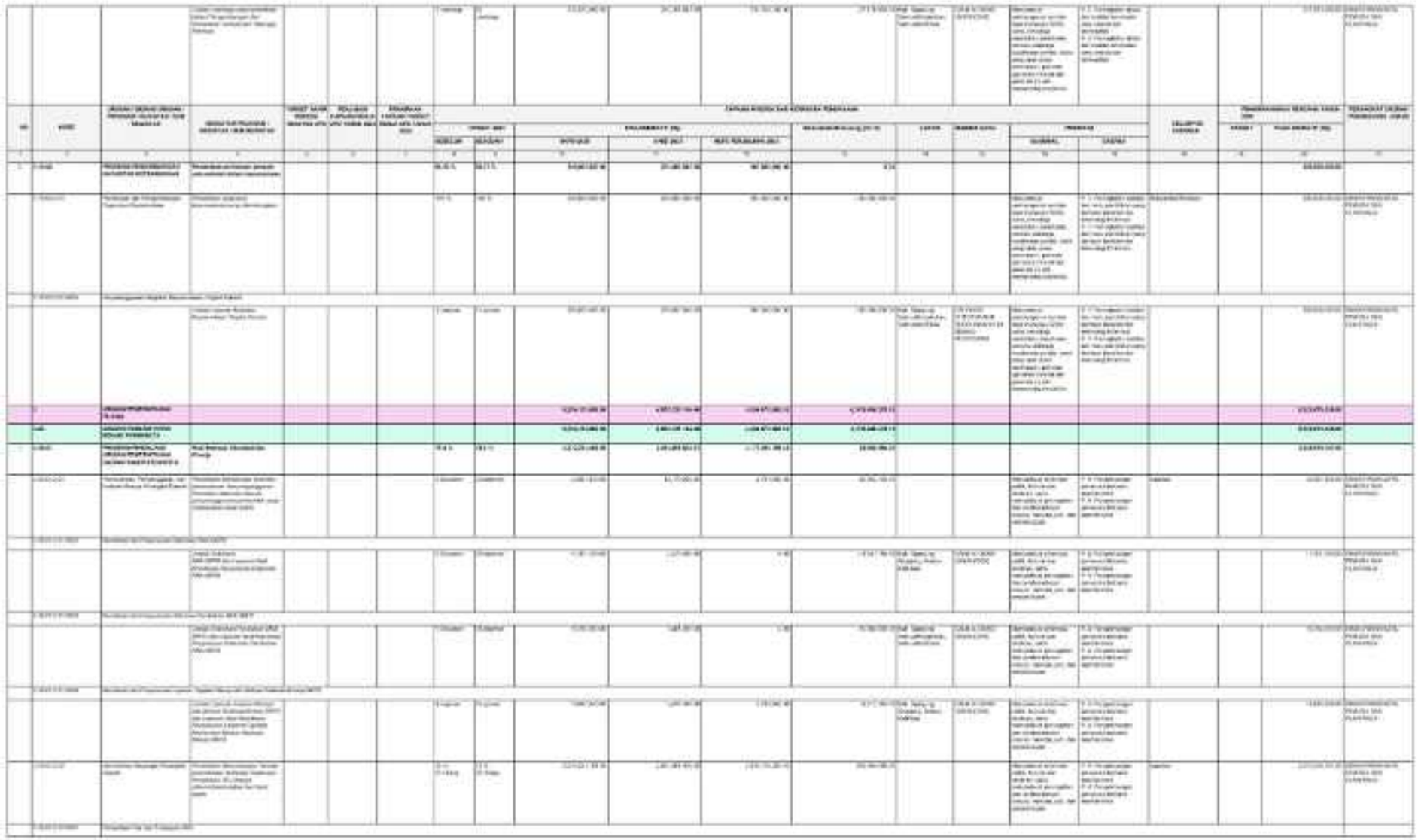

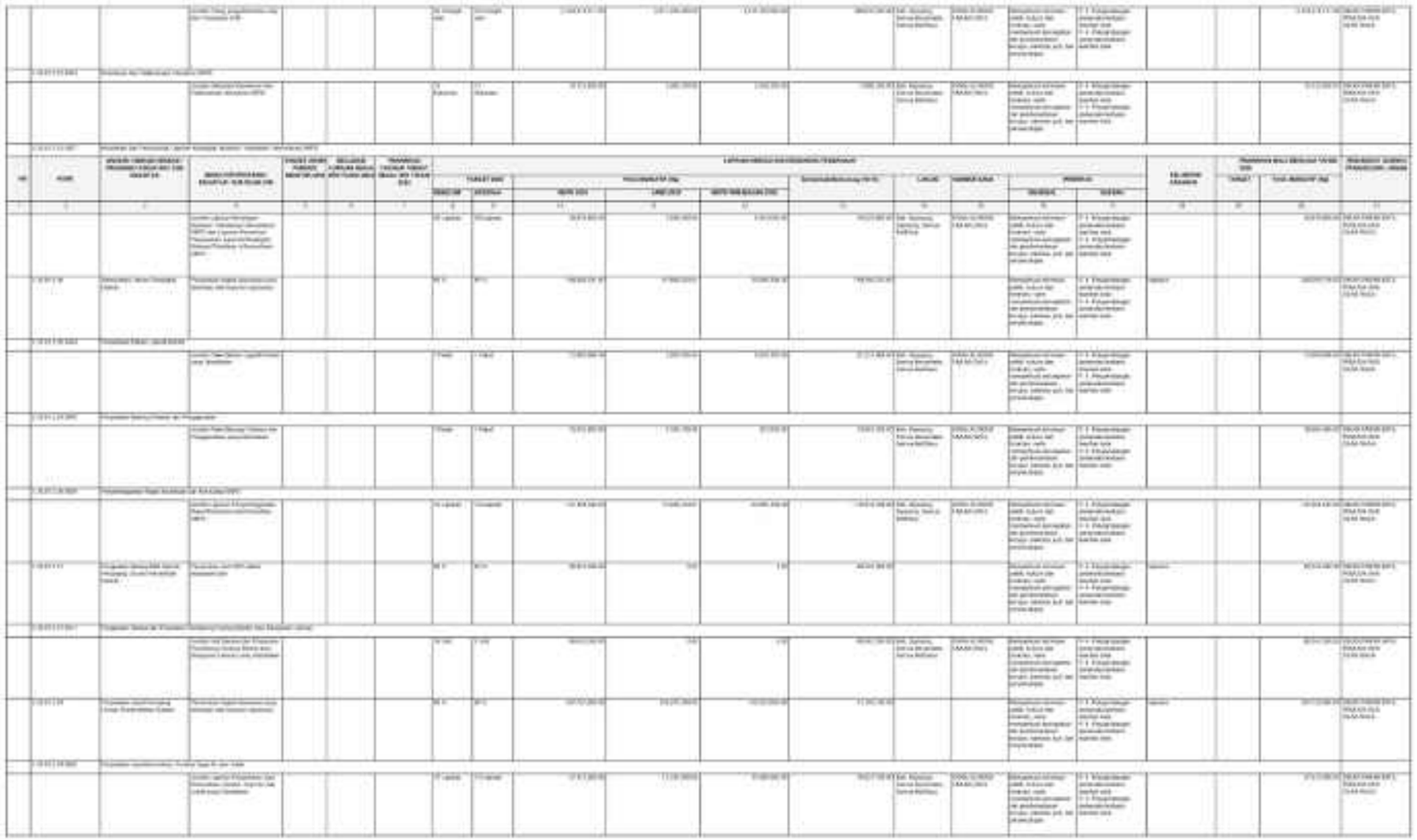

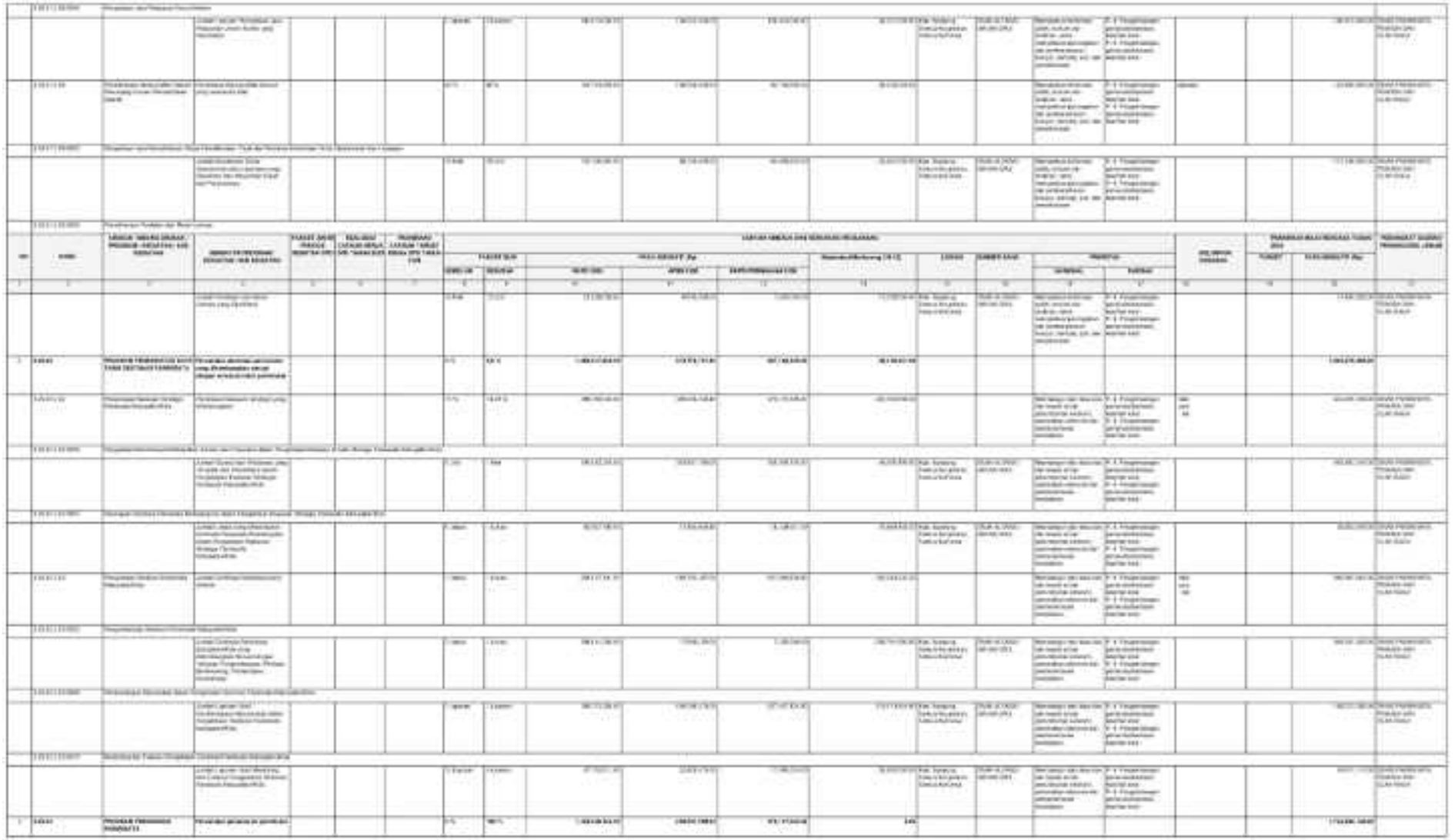

BAB V
PENUTUP

Demikian dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora) ini kami susun sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Perubahan yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Dinas Parpora untuk senantiasa adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika serta tantangan yang berkembang.

Secara khusus, penyesuaian dalam Rencana Kerja ini diarahkan untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu tahun 2025 ini merupakan tahun persiapan penilaian oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific *and Cultural Organization*) untuk menjadikan Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS) sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada tahun 2026. Persiapan ini tentunya juga harus dimaksimalkan ditengah upaya meminimalisasi dan mengefisiensikan anggaran yang diamanatkan oleh Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Sementara upaya pencapaian status UGGp bukanlah sekadar target, melainkan sebuah amanah untuk mengangkat warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya Kabupaten Sijunjung ke panggung dunia. Oleh karena itu, setiap program kepariwisataan, kegiatan kepemudaan, dan pembinaan keolahragaan yang dilaksanakan pada tahun 2025 harus selaras dan berorientasi pada penguatan tiga pilar utama Geopark yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kita akan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan infrastruktur pendukung, serta promosi yang lebih masif dan terarah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sinergi, demi terwujudnya visi pariwisata, pemuda, dan olahraga yang maju dan berdaya saing.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Muaro Sijunjung, 15 Juli 2025
Kepala Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga

AFRINELDI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19720407 199202 1 002

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

yunielviza

KABUPATEN SIJUNJUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN I–1
1.1. Latar Belakang I–1
1.2. Landasan Hukum I–2
1.3. Maksud dan Tujuan I–4
1.4. Sistematika Penulisan I–5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPPEDA TAHUN 2025 ..... II–1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bapppeda Tahun 2025 ..... II–1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapppeda II–7
2.2.1. Tantangan Pelayanan di Bidang Perencanaan di Kabupaten Sijunjung II–7
2.2.2. Peluang pada urusan perencanaan di Kabupaten Sijunjung . II–8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapppeda .. II–9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II–10
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II–29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPPEDA III–1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III–1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapppeda III–2
3.3. Program dan Kegiatan III–5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPPEDA IV–1
BAB V PENUTUP V–1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga Februari 2025 ..... II–1

Tabel II-2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung..... II–2

Tabel II-3. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD II–7

Tabel II-4. Isu Strategis Bapppeda Kabupaten Sijunjung II–9

Tabel II-5. Analisis Kebutuhan Pagu Anggaran Perubahan..... II–11

Tabel II-6. Usulan Program dari Pemangku Kepentingan II–29

Tabel III-1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapppeda Tahun 2021-2026..... III–4

Tabel IV-1. Rumusan Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025..... IV–2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Program/Kegiatan selama 1 tahun periode anggaran disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana peraturan tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antara Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung selama periode 2021-2026 ke dokumen perencanaan yang lebih bersifat operasional seperti RKA dan DPA Perangkat Daerah.

Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan mempunyai kedudukan yang strategis yang mana dokumen ini merupakan penerjemah dari dokumen RPJMD yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan yang ditetapkan. Dokumen perencanaan yang utama sebagai pedoman Pembangunan Daerah adalah RPJMD periode 2021 – 2026 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian RPJMD dalam pelaksanaan yang lebih bersifat sektoral diturunkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk periode yang sama. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Oleh sebab itu Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Program dan Kegiatan harus mendukung Janji Bupati dan Wakil Bupati.

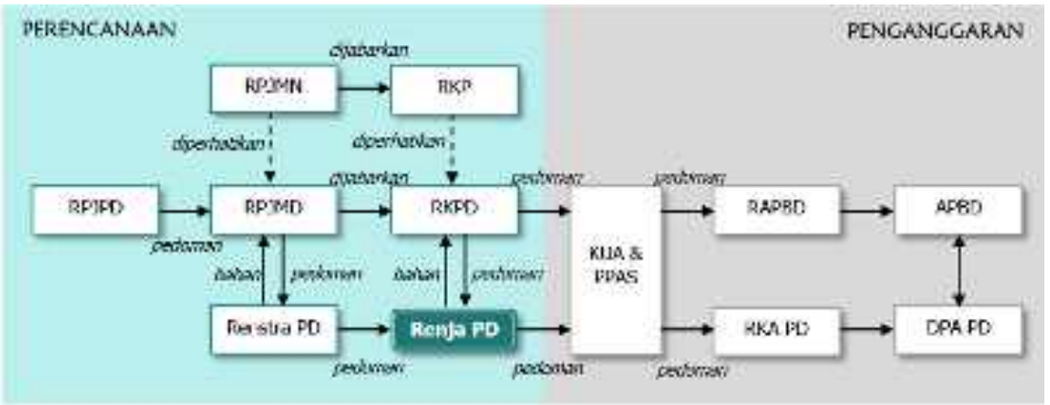

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penganggaran Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Transper ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Bapppeda Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah untuk mempertajam pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD yang bersangkutan di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Bapppeda Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bapppeda Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dan transisi dari Renstra Periode 2021-2026 ke Periode 2025-2029;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapppeda Kabupaten Sijunjung secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bapppeda Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPPEDA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bapppeda Tahun 2025
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapppeda
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapppeda
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPPPEDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapppeda
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPPEDA

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPPEDA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bapppeda Tahun 2025

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sijunjung selama tahun 2025 berjalan dengan baik. Namun dengan kebijakan efisiensi yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdampak terhadap realiasasi anggaran di daerah termasuk pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung. Dengan total anggaran sebesar **Rp6.347.787.581,00** dan realisasi keuangan sejumlah **Rp536.408.346,00** atau sekitar 8,34% dari anggaran yang tersedia maka diperlukan penyesuaian kebijakan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran pada tahun 2025.

Terkait pencapaian realisasi keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga Februari 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Februari 2025	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5
5	**BELANJA DAERAH**	Rp6.434.438.303,00	Rp536.408.346,00	Rp5.898.029.957,00
5,1	**BELANJA OPERASI**	Rp6.388.297.803,00	Rp536.408.346,00	Rp5.851.889.457,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**	Rp3.490.859.118,00	Rp317.335.885,00	Rp3.173.523.233,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	Rp2.897.438.685,00	Rp219.072.461,00	Rp2.678.366.224,00
5,2	**BELANJA MODAL**	Rp46.140.500,00	Rp0,00	Rp46.140.500,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	Rp46.140.500,00	Rp0,00	Rp46.140.500,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Tabel II-2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung

ode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 /n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**	**83**	**75**	**78**	**79,85**	**102,4**	**80**	**234,85**	**282,95**
5	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300	300,00
						Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300	300,00

5	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
						Persentase SPJ Dengan Administrasi Lengkap Susuai Dengan Aturan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
5	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses Tepat Waktu.	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
5	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	90	%	80	%	90	%	80	%	88,889	80	%	240	266,67
5	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik	80	%	80	%	80	%	80	%	100	80	%	240	300,00
5	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	90	%	100	%	90	%	100	%	111,11	100	%	300	333,33
5	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik	80	%	80	%	80	%	80	%	100	80	%	240	300,00
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN**	**Persentase capain IKU**	**100**	**%**	**70**	**%**	**100**	**%**	**70**	**%**	**70**	**70**	**%**	**210**	**210,00**
5	01	02	2.01		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Nilai proses penyusunan dokumen perencanaan	28		28		28		28		100	28		84	300,00

5	01	02	2.02		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data IKU dan IKD yang tersedia	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
5	01	02	2.03		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian IKD Bidang PPM**	**90**	**%**	**72**	**%**	**90**	**%**	**72**	**%**	**80**	**72**	**%**	**216**	**240,00**
						Persentase capaian IKD Bidang PSDAIK	**90**	**%**	**72**	**%**	**90**	**%**	**72**	**%**	**80**	**72**	**%**	**216**	**240,00**
5	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.Persentase PD yang Melaksanakan Forum OPD lingkup PPM.	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
						2.Persentase Keselarasan antara Renstra dengan Renja lingkup PPM	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
5	01	03	2.02		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.Persentase PD yang Melaksanakan Forum OPD lingkup PSDA.	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00

						2.Persentase Keselarasan antara Renstra dengan Renja lingkup PSDA	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
5	01	03	2.03		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.Persentase PD yang Melaksanakan Forum OPD lingkup IK.	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
						2.Persentase Keselarasan antara Renstra dengan Renja lingkup IK	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Litbang terhadap Perencanan Pembangunan**	**85**	**%**	**70**	**%**	**85**	**%**	**70**	**%**	**82,35**	**70**	**%**	**210**	**247,06**
						Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi	**65**	**%**	**85**	**%**	**65**	**%**	**85**	**%**	**130,8**	**85**	**%**	**255**	**392,31**
5	05	02	2.01		Kegiatan penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen Penelitian dan Pengembangan Bid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun sesusai dengan Dokumen Perencanaan	100	%	82	%	100	%	82	%	82	82	%	246	246,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen Penelitian dan Pengembangan Bid Sosial dan Kependudukan yang disusun sesusai dengan Dokumen Perencanaan	100	%	82	%	100	%	82	%	82	82	%	246	246,00
5	05	02	2.03		Kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen Penelitian dan Pengembangan Bid Sosial dan Kependudukan yang disusun sesusai dengan Dokumen Perencanaan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	300,00

5	05	02	2.04		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang diterapkan	65	%	57	%	65	%	57	%	87,692	57	%	171	263,08

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapppeda

IKU Bapppeda terdiri dari Tiga Sasaran Strategis dimana Sasaran Strategis Pertama adalah meningkatnya Meningkatnya kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan. Sasaran ini mendapat capaian yang melebihi target capaian hingga 100,99% atau mendapatkan nilai 89,11% dari 88,23% angka target yang ditetapkan pada awal tahun 2023. Berdasarkan hasil capaian ini, target perencanaan yang berkualitas di Kabupaten Sijunjung sudah tercapai. Kemudian Sasaran Strategis Kedua adalah Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan skor indeks inovasi daerah, akan tetapi indikator ini masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dengan pencapaian secara Indeks Inovasi Daerah terkoreksi dari tahun 2022 dari 53,41 menjadi 53,15 pada tahun 2023. Dengan demikian pencapaian indikator ini tidak memenuhi harapan. Selanjutnya Sasaran Strategis Ketiga adalah meningkatnya kinerja manajemen organisasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan melihat nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Bapppeda tahun 2022. Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Bapppeda adalah 78 dan capaian juga sebesar 79,85 sehingga persentase capaian sebesar 102,37%.

Tabel II-3. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Kualitas perencanaan			85,81%	89,03%	90,21%	91,10%	87,20%	89,11%	90,21%	91,10%	Meningkat
2	Persentase Peningkatan Skor Indeks Inovasi Daerah			NA	1%	1%	1%	NA	0%	1%	1&	Fluktuatif
3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja			75	78	81	83	73,47	79,85	81	83	Meningkat

2.2.1. Tantangan Pelayanan di Bidang Perencanaan di Kabupaten Sijunjung

Bagaimanapun dalam penerapan proses penyusunan perencanaan di daerah ada berbagai tantangan yang tidak dapat dilepaskan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tantangan itu lebih diarahkan kepada usaha yang lebih intens untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh instansi perencanaan untuk mencapai tujuan berdasarkan tugas dan fungsinya ditengah dinamika yang berkembang di Indonesia yaitu

pelaksanaan efisiensi anggaran yang berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung adalah:

1. Sarana dan prasarana kantor perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pelayanan umum pelayanan maupun untuk urusan perencanaan seperti perangkat dan kelengkapan ruang rapat yang representatif, sarana parkir pengunjung dan lain-lain.
2. Ketersediaan personil yang berstatus ASN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di kantor tereduksi oleh jumlah PNS yang pensiun dan sementara diisi oleh PHL.
3. Perlunya menyusun perencanaan yang berkesinambungan dalam menetapkan program dan kegiatan bagi OPD yang selaras dengan dokumen perencanaan yang disusun oleh Bapppeda.

2.2.2. Peluang pada urusan perencanaan di Kabupaten Sijunjung

Walaupun ada sejumlah tantangan yang mesti diselesaikan untuk mencapai penyusunan perencanaan yang lebih dalam dan komprehensif, ada beberapa peluang yang bisa diraih oleh Kabupaten Sijunjung baik dari segi pembangunan maupun dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan ke depan, yaitu:

1. Blueprint/roadmap kelitbangan dan inovasi daerah untuk memberikan dasar hukum dan arah kebijakan yang lebih akurat dalam melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan dan pengembangan inovasi daerah, yang mana hasil dari program/kegiatan tersebut merupakan basis pembuatan dokumen perencanaan dan penetapan kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran.
2. Penyusunan rencana peraturan bupati tentang pemilahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana tersedianya informasi dan data tentang masyarakat miskin yang akan masuk dalam prioritas penanggulangan kemiskinan.
3. Dengan adanya DTKS tersebut maka intervensi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dengan berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial.
4. Arah perencanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung akan lebih terarah dengan ditetapkannya revisi RTRW/RDTR
5. Adanya penyediaan pembiayaan dari pemerintah pusat dalam penyusunan dokumen RDTR.

6. Selain tertatanya pemanfaatan spasial dan pengembangan wilayah yang lebih sesuai dengan peruntukannya, perizinan untuk investasi akan lebih mudah dikeluarkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapppeda

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapppeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung Jangka Menengah, maka dari identifikasi permasalahan di atas, dapat ditetapkan isu strategis Bapppeda Kabupaten Sijunjung yaitu:

Tabel II-4. Isu Strategis Bapppeda Kabupaten Sijunjung

No	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya Manusia	1. Kapasitas, kapabilitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. 2. Minat ASN untuk memilih karier melalui jabatan fungsional perencana 3. Diklat dan pelatihan.
2.	Perencanaan	1. Konsistensi dokumen perencanaan 2. Dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. 3. Koordinasi perencanaan bidang, sektoral dan kewilayahan.
3.	Penelitian, monitoring dan evaluasi	1. Penelitian sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah

		2. Monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah 3. Monitoring dan evaluasi berbasis data dan informasi yang akurat dan akuntabel.
4.	Data, teknologi dan informasi	1. Kualitas data dan informasi perencanaan 2. Pembangunan Sistem informasi perencanaan yang terintegrasi (SIPPD, E-Monev dan SIPKD)

Sumber: Renstra Bapppeda 2021-2026.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Perubahan tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang direncanakan merupakan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas. Sehubungan Inpres 1/2025 adalah Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini menekankan empat poin utama: efisiensi belanja (termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial), fokus pada kinerja dan pelayanan publik, efisiensi transfer ke daerah, serta inovasi dalam pelayanan publik. Berkenaan dengan beberapa poin yang disebutkan bahwa Daerah perlu melaksanakan efisiensi belanja APBD sehingga pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2025, Kabupaten Sijunjung juga melaksanakan Inpres tersebut sehingga pada analisa kebutuhan dana pada Perubahan 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga tidak merencanakan pergeseran atau revisi anggaran yang signifikan.

Tabel II-5. Analisis Kebutuhan Pagu Anggaran Perubahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan / Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**5.305.585.811**	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**5.305.585.811**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	**4.214.864.436**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	**4.214.864.436**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	19.435.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	19.435.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.733.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.733.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	393.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	393.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	353.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	353.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.356.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.356.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3.570.104.707	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3.570.104.707	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.531.284.707	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.531.284.707	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	38.820.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	38.820.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	38.820.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	38.820.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Paket		

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	194.911.275	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	194.911.275	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	7.032.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	7.032.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	10.431.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	10.431.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	21.517.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	21.517.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	17.148.225	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	17.148.225	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	120.141.050	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	120.141.050	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75 Dokumen	17.142.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75 Dokumen	17.142.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dokumen		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	294.105.804	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	294.105.804	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	95.001.804	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	95.001.804	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	199.104.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	199.104.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	136.306.850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	136.306.850	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.336.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.336.850	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	68.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	68.250.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	22.780.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	22.780.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.940.000	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	**161.806.350**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	**161.806.350**	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	134.432.550	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	134.432.550	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	- Dokumen		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	- Dokumen		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.116.700	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.116.700	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Berita Acara		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Berita Acara		
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	22.118.950	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	22.118.950	

	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	8 Usulan	10.850.050	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	8 Usulan	10.850.050	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	83.346.850	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	83.346.850	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5.981.100	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5.981.100	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	5.981.100	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	5.981.100	

	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	- Orang		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	- Orang		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	21.392.700	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	21.392.700	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	21.392.700	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	21.392.700	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**-**	**-**	**217.132.925**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**-**	**-**	**217.132.925**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	117.057.275	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	117.057.275	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	20.354.900	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	20.354.900	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	4.110.900	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	4.110.900	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	3.134.350	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	3.134.350	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	15 Laporan	29.032.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	15 Laporan	29.032.200	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	24.364.650	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	24.364.650	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 Laporan	4.681.725	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 Laporan	4.681.725	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	5.801.400	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	5.801.400	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	25.577.150	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	25.577.150	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	52.737.750	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	52.737.750	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	27.763.700	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	27.763.700	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	948.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	948.000	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1.383.200	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1.383.200	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	7.841.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	7.841.500	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	10.675.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	10.675.100	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	1.566.400	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	1.566.400	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	2.559.850	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	2.559.850	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	47.337.900	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	47.337.900	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	31.640.850	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	31.640.850	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	2.470.150	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	2.470.150	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	5.580.900	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	5.580.900	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	- Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	- Laporan		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.646.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.646.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	**711.782.100**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	**711.782.100**	

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	316.811.250	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	316.811.250	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	316.811.250	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	316.811.250	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	374.233.250	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	374.233.250	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	216.849.300	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	216.849.300	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	157.383.950	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	157.383.950	

	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	20.737.600	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	20.737.600	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	20.737.600	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	20.737.600	
					5.305.585.811					**5.305.585.811**	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan, terutama dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD, dan juga hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari masyarakat tersebut maka Bapppeda mengolah usulan tersebut dan disampaikan dalam pelayanan asistensi perencanaan kepada OPD yang relevant dengan pelaksanaan program/kegiatan yang diusulkan agar ditindaklanjuti. Selain itu usulan yang ditampung juga melalui mekanisme Musrenbang nagari dimana DU-RKP/RKP Nagari ditampung dalam system informasi perencanaan yang disediakan oleh Pusdatin Kemendagri yaitu SIPD untuk kemudiannya ditindaklanjuti oleh OPD pelaksana teknis sesuai dengan petunjuk teknis usulan perencanaan yang diatur oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel II-6. Usulan Program dari Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPPEDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan strategis Indonesia kedepannya dalam hal pelayanan di bidang perencanaan tertuang dalam peraturan menteri Bappenas Nomor 11 tahun 2020. Peraturan yang juga dikenal sebagai Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut merupakan dokumen perencanaan yang ditujukan untuk periode 2020 – 2024. Lebih lanjut renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Dokumen tersebut ditulis secara komprehensif dengan mengacu kepada pendekatan proses perencanaan yang atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom- up)* secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pada dokumen itu tertulis beberapa poin penting yang menarik terkait arah pembangunan di Indonesia.

Dalam penguatan fungsi perencanaan bappenas juga berpotensi sebagai lembaga *think tank* pemerintah yang *reliable* dan *capable* yang menghasilkan analisis dan kajian yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta *(evidence-based planning)* serta menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan. Lebih lanjut kementerian PPN/Bappenas telah diamanatkan oleh Presiden pada Pidato Pelantikan Presiden sebagai *clearing house* perencanaan yaitu untuk memastikan seluruh usulan kementerian/lembaga dalam rangka pembangunan nasional termasuk prioritas nasional untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan nasional. Kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan peningkatan kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunan melalui inisiatif Satu Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah serta menjadi referensi bagi dunia usaha, akademik, dan masyarakat luas.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (evidence based planning).
2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan.
3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Kemudian selain juga selain melaksanakan beberapa kegiatan koordinasi dan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang yang berkaitan dengan perencanaan. Seperti koordinasi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana kegiatannya mengarahkan rencana pembangunan kepada berbagai level pemerintahan dengan mengacu kepada prinsip SDGs tersebut. Selanjutnya kegiatan satu data Indonesia yang mana mendorong kebijakan pembangunan berdasarkan satu data yang terintegrasi di bawah supervisi Bappenas.

Rincian pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Pergeseran Angaran belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdapat dalam SIPD-RI. Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 dapat dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan I – 2025 serta memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Perubahan substansi Renja-PD Tahun 2025 agar mempertimbangkan isu actual penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapppeda

Perencanaan yang baik haruslah memiliki tujuan dan sasaran secara jelas selama periode waktu tertentu yang direncanakan. Tujuan jangka menengah pelayanan Bapppeda merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan

pembangunan yang direncanakan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran jangka menengah Bapppeda ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis pelayanan Bapppeda. Serta Tujuan dan sasaran tersebut telah dipertajam dengan revisi sasaran Berdasarkan penjenjangan kinerja yang Berdasarkan PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021. Dimana dengan pedoman yang lebih jelas dan rinci maka Tujuan dan Sasaran Bapppeda Kabupaten Sijunjung untuk Tahun 2025 lebih tepat sasaran sesuai dengan acuan PermenpanRb tersebut. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bapppeda yang telah disesuiakan terlihat pada Tabel III-1

Tabel III-1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapppeda Tahun 2021-2026

Tujuan / Sasaran	**Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran**	**Target Kinerja Sasaran Tahun ke-**							**Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD**
		Base	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1. Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP	20,21 poin	21-22 poin	21-22 poin	22-23 poin	23-25 poin	26-28 poin	30 poin	30 poin
	2. Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP	14,54 poin	14,54 poin	15-16 poin	17-19 poin	20-22 poin	23-25 poin	25 poin	25 poin
Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	IK: Indek kualitas perencanaan	77,95%	84,82%	85,81 %	89,03 %	90,21 %	91,10 %	91,36%	91,36%
Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Kinerja Manajemen organisasi urusan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	70,85	72	75	78	81	83	85	85
Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	Indeks Inovasi Daerah	1.274	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
		*)Perubahan Standar Penilaian IGA	-	40	45	50	55	60	60
Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya kualitas inovasi daerah	IK: Persentase peningkatan skor indeks inovasi daerah	-	-	-	4%	5%	6%	7%	7%

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bapppeda Kabupaten Sijunjung. Berikut ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Anggaran 2025.

1. Penyesuaian terhadap efisiensi Anggaran tahun 2025 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang mengenai efisiensi belanja negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025;
2. RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupatens Sijunjung;
3. Renstra Bapppeda 2021-2026 serta Ranwal Renstra 2025-2029;
4. Hasil penelahaan evaluasi internal Bapppeda Tahun 2025.

Berikut ini merupakan rekapitulasi dari Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya berdasarkan RKPD Perubahan 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
   c. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja.
   e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

ii. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
   c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

iii. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   g. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.

iv. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

v. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang terdiri dari beberapa kegiatan.

i. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, yang terdiri dari sub-kegiatan:
   a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
   b. Pelaksanaan Konsultasi Publik.
   c. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD.
   d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota.
   e. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.

f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota.

ii. Kegiatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mencakup sub-kegiatan:

a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan.

iii. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari satu sub-kegiatan yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah yang membawahi beberapa kegiatan.

i. Kegiatan Koordinasi bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, yang mencakup sub-kegiatan:

a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan.
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan.
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.
e. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
f. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.
g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia.

h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.

ii. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), yang mencakup sub-kegiatan:

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

iii. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang mencakup sub-kegiatan:

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

i. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bid Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

ii. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bid Sosial dan Kependudukan, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial.
   b. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

iii. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, yang mencakup sub-kegiatan:
   a. Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPPEDA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapppeda Kabupaten Sijunjung 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 serta Renstra Bappeda Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung periode 2021-2026.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Tabel IV-1. Rumusan Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Perubahan 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capain Kinerja 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**5.305.585.811**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**			**5.347.237.867**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85,00%**	**4.214.864.436**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**85,00%**	**4.363.832.707**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**25,50%**	**19.435.800**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**26,00%**	**4.610.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	16.733.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Dokumen	2.352.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	393.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	564.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	353.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	564.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan,	2 Laporan	600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	564.400

			Semua Kel/Desa						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.356.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	564.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100,00%**	**3.570.104.707**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100,00%**	**3.565.063.132**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Orang/bulan	3.531.284.707	Dana Alokasi Umum (DAU)		26 Orang/bulan	3.564.122.432
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	38.820.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 Laporan	940.700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100,00%**	**0**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100,00%**	**0**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Paket		Dana Alokasi Umum (DAU)		- Paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Orang		Dana Alokasi Umum (DAU)		- Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100,00%**	**194.911.275**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100,00%**	**194.911.275**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Paket	7.032.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Paket	7.032.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Paket	10.431.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Paket	10.431.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Paket	21.517.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Paket	21.517.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Paket		Dana Alokasi Umum (DAU)		- Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Dokumen	1.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	17.148.225	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Laporan	17.148.225
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Laporan	120.141.050	Dana Alokasi Umum (DAU)		80 Laporan	120.141.050
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Dokumen	17.142.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		75 Dokumen	17.142.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sijunjung, Semua	- Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		- Dokumen	

			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tingkat pemenuhan BMD organisasi**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**90%**	**0**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**90%**	**37.629.300**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit		Dana Alokasi Umum (DAU)		- Unit	37.629.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan jasa kantor**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**294.105.804**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**335.510.400**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	95.001.804	Dana Alokasi Umum (DAU)		48 Laporan	131.702.800
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	4.703.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	199.104.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	199.104.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya BMD organisasi**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**90%**	**136.306.850**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**90%**	**226.108.600**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.336.850	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	39.909.900

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	68.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		18 Unit	87.421.700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	22.780.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Unit	23.518.300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	19.940.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	75.258.700
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase konsistensi program prioritas RPJMD dengan RKPD**	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100%**	**161.806.350**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**69.023.300**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**134.432.550**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**46.286.700**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Dokumen		Dana Alokasi Umum (DAU)		- Dokumen	8006800
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	18.116.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Berita Acara	8.101.800
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Berita Acara		Dana Alokasi Umum (DAU)		- Berita Acara	1.381.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua	2 Berita Acara	22.118.950	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Berita Acara	8.101.900

			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Usulan	10.850.050	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Usulan	3.681.600
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	83.346.850	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	17.013.600
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data dukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**5.981.100**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**12.148.800**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.981.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	8.005.800
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Orang	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		35 Orang	4.143.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase dokumen laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**21.392.700**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**10.587.800**
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	21.392.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Laporan	10.587.800
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuaian program prioritas pada dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**217.132.925**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**163.937.360**

		Persentase kesesuaian program prioritas pada dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**				**100%**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase dokumen perencanaan sektoral lingkup PPM yang disusun berbasis data dan evaluasi**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**117.057.275**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**86.637.700**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	20.354.900	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Dokumen	10.126.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	4.110.900	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Laporan	1.467.500
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	3.134.350	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Laporan	4.021.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	29.032.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Laporan	12.381.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	24.364.650	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	9.511.300
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	4.681.725	Dana Alokasi Umum (DAU)		18 Laporan	2.482.300
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Sijunjung, Semua	9 Laporan	5.801.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		9 Laporan	3.074.500

	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	25.577.150	Dana Alokasi Umum (DAU)		9 Laporan	43.574.100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase dokumen perencanaan sektoral lingkup Perekomoian dan SDA yang disusun berbasis data dan evaluasi**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**52.737.750**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**52.778.700**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	27.763.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Dokumen	21.576.900
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	948.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Laporan	1.792.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.383.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	1.158.800
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.841.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	6.534.800
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	10.675.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Dokumen	17.961.700
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	1.566.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Laporan	1.078.300

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.559.850	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	2.676.200
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**-**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**-**	**47.337.900**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**-**	**24.520.960**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	31.640.850	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	11.567.900
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	2.470.150	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Laporan	1.587.400
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.580.900	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	1.547.700
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Laporan		Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	3.693.400
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.646.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	6.124.560
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase rekomendasi kelitbangan yang digunakan dalam menyusun arah kebijakan**	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**N/A**	**711.782.100**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**75%**	**750.444.500**
		Persentase kematangan inovasi daerah		**40%**				**50%**	

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase hasil litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang siap untuk didesiminasikan**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**316.811.250**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**316.811.250**
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	316.811.250	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	40.400.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase hasil litbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang siap untuk didesiminasikan**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**374.233.250**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**100%**	**374.233.250**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	216.849.300	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	37.620.000
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	157.383.950	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	49.500.000
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase Usulan Inovasi Perangkat Daerah yang terdaftar pada IGA**	**Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**50%**	**20.737.600**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**65%**	**59.400.000**
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.737.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	59.400.000
					5.305.585.811				**5.347.237.867**

ADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagian masih berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 dengan beberapa penyesuaian target pada masa transisi ke Renstra 2025-2029. Renja ini juga memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan beserta indikator pada perubahan Renja Bapppeda prinsipnya diarahkan untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan ini harus sesuai dengan petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Sijunjung.

Pelaksanaan agenda kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berpedoman kepada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Bapppeda kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai acuan perbaikan untuk pelaksanaan pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Muaro Sijunjung, 2025
KEPALA BAPPPEDA
KABUPATEN SIJUNJUNG

KHAMSIARDI, S.STP, M.Si
NIP 198309082002121001

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2025

BPBD KABUPATEN SIJUNJUNG
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
DAFTAR TABEL……...3

BAB I PENDAHULUAN.....4
1.1 Latar Belakang .....,.....4
1.2 Landasan Hukum.....,,.....5
1.3 Maksud dan Tujuan.....,,.....6
1.4 Sistematika Penulisan……..…7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN 8
2.1 Evaluasi Pelakasanaan Renja Perubahan BPBD Tahun 2026.....8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD.....12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD……...…14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…. 15

BAB IV PENUTUP …….....19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja BPBD Tahun 2025……9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja BPBD Tahun 2025…….……13
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanan Perangkat Daerah…...……16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan (Rencana Kerja Perubahan) adalah dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah yang memuat revisi program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan guna menyesuaikan target pembangunan dengan perkembangan situasi dan asumsi keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Perda tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kedaan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggarannya sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja BPBD Kabupaten Sijunjung tahun 2025 disusun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah. Perubahan Renja PD dilakukan untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program PD lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerag Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung.
14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor38 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
16. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai :

a. Bahan penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025.
b. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.
c. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini adalah untuk :

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
b. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.

c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2025

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERUBAHAN BPBD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaaan Renja Perubahan Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan BPBD Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra BPBD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.

Pagu Indikatif Renja Perubahan Tahun 2025 BPBD Kabupaten Sijunjung yaitu Rp. 3.798.582.251 dimana realisasi sampai triwulan II yaitu Rp. 1.481.195.287,- dengan realisasi keuangan sebesar 46,76%. Capaian kinerja BPBD sampai dengan Triwulan II yaitu 16,28 %. BPBD melaksanakan 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Realisasi capaian program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan BPBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

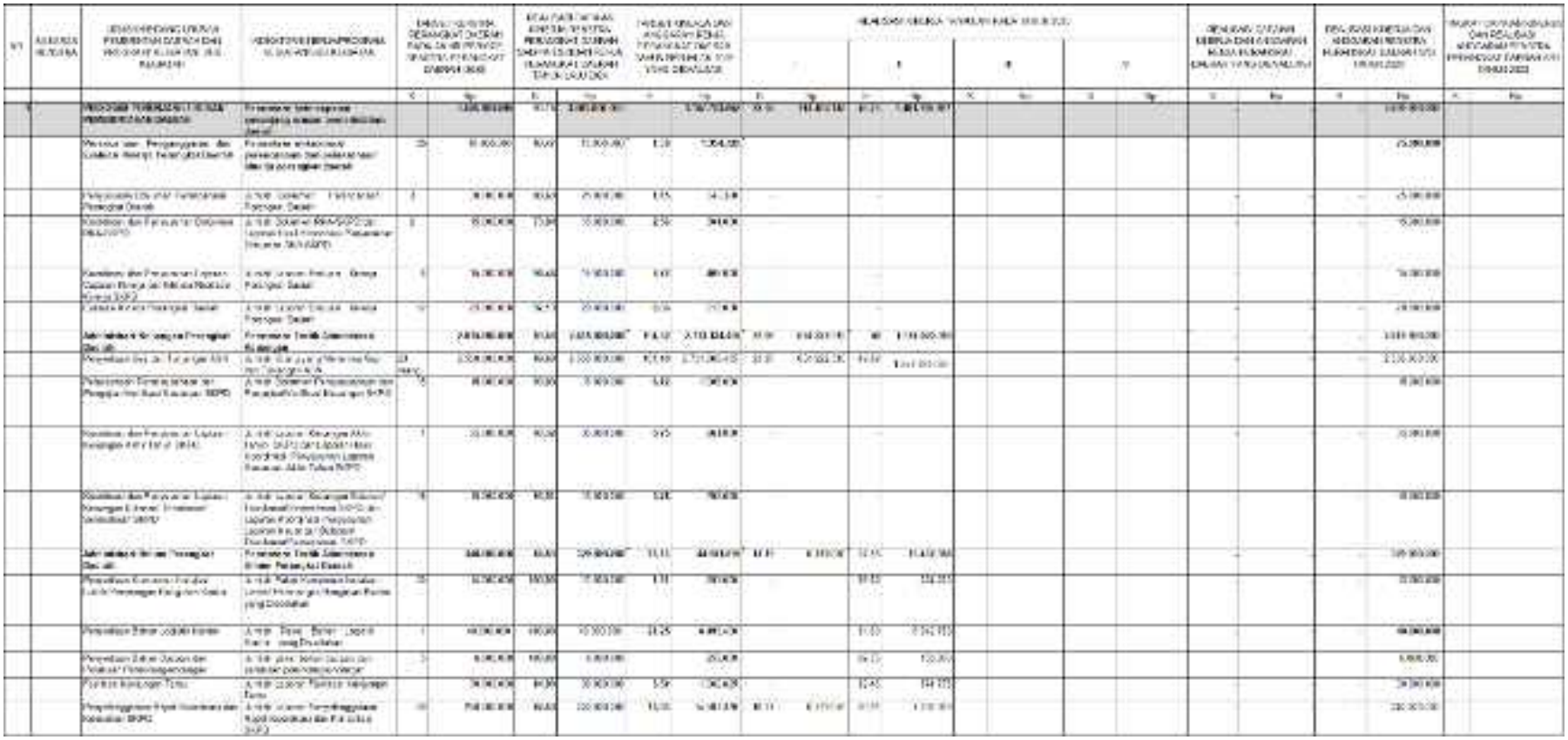

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Analisis kinerja pelayanan adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi sejauh mana BPBD berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Sijunjung yaitu :

1. Indeks Resiko Bencana (IRBI)

   Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran potensi kerugian dan dampak negatif akibat bencana di suatu wilayah. Nilai indeks dihitung dari interaksi tiga komponen utama: tingkat ancaman bahaya, kerentanan masyarakat atau aset, serta kapasitas ketangguhan daerah. Capaian IRBI Kabupaten Sijunjung tahun 2024 yaitu 105,64. Nilai ini menempatkan Kabupaten Sijunjung dalam kelas risiko sedang terhadap potensi bencana alam
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

   Merupakan indikator untuk mengukur jumlah warga yang menerima akses informasi risiko bencana (seperti sosialisasi dan sistem peringatan dini) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Realisasi tahun 2024 yaitu 167.310 jiwa.
3. Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

   Merupakan indikator untuk mengukur jumlah warga di kawasan rawan bencana yang mendapatkan edukasi, sosialisasi, simulasi, atau mitigasi pra-bencana. Realiasasi tahun 2024 yaitu 167.620 jiwa.
4. Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

   Adalah total individu yang berhasil diselamatkan, dievakuasi, atau diberi pertolongan oleh petugas (seperti BPBD atau tim darurat) saat terjadi peristiwa bencana di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Data ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dicatat berdasarkan kejadian nyata. Realisasi tahun 2024 yaitu 3.196 jiwa.

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA BPBD TAHUN 2025

NO	INDIKATOR	IKU	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Resiko Bencana	√				109	107	105	107,2	105,64	103	100	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		√	√		160.000	160.000	160.000	167.310	167.620	170.000	180.000	
3	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		√	√		160.000	160.000	160.000	167.310	167.620	170.000	180.000	
4	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		√	√		0	0	0	0	3.196	3.196	3.196	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sijunjung merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi Pembangunan daerah di bidang Penaggulangan Bencana. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap akses, mutu, pemerataan, dan tata kelola Penanggulangan bencana di Kabupaten Sijunjung.

Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah berdasarkan evaluasi renja sampai triwulan II tahun 2025 yaitu :

1. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
2. Masih kurangnya jumlah desa/nagari tangguh bencana
3. Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana
4. Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
5. Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan perubahannya, perubahan rencana kerja BPBD Kabupaten Sijunjung tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : 2 program
2. Kegiatan : 9 kegiatan
3. Sub Kegiatan : 27 sub kegiatan

Pagu indikatif rencana kerja perubahan BPBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sebesar RP. 3.798.582.251 ,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Titik berat program/kegiatan/sub kegiatan BPBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah untuk pemenuhan SPM urusan kebencanaan. Sampai saat ini SPM urusan kebencanaan masih belum dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.1berikut :

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2025

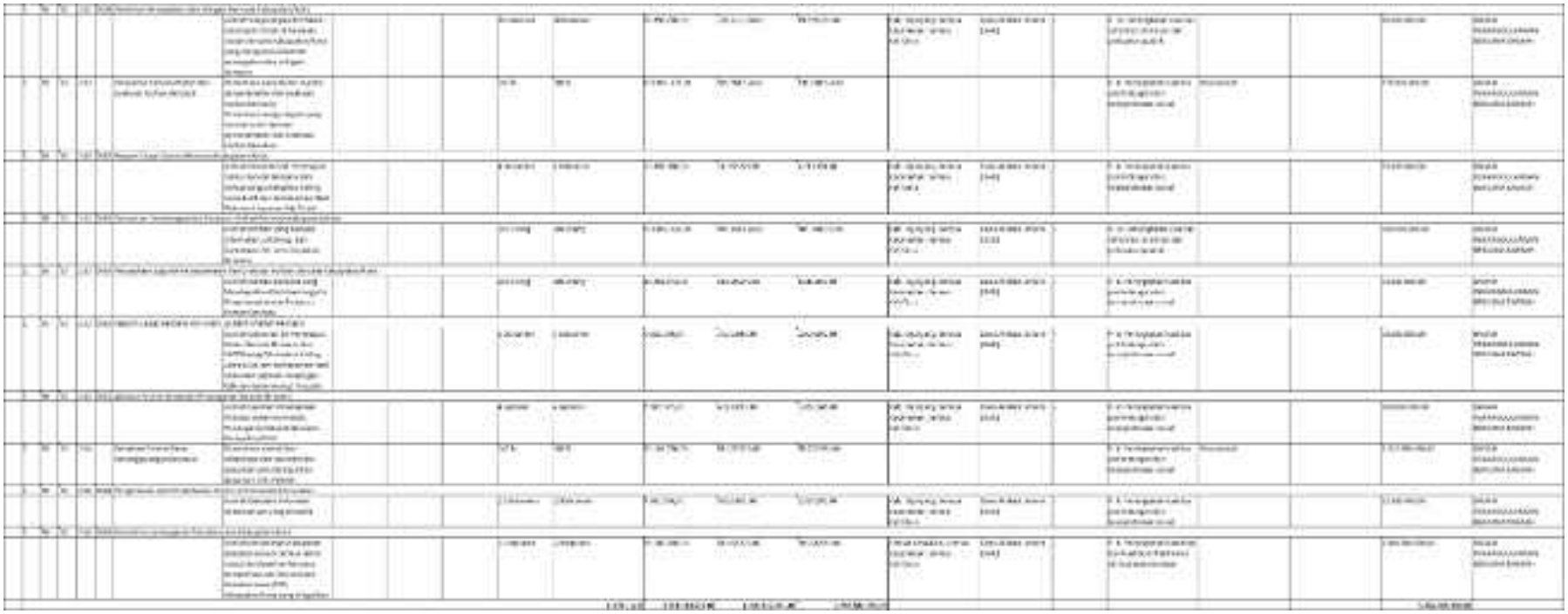

BAB IV
PENUTUP

Untuk optimalisasi pelaksanaan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Sijunjung, harus ada perhatian khusus dan prioritas Pemerintah Kabupaten Sijunjung serta penambahan anggaran pada perubahan renja Tahun 2026 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Didalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, ***"belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal"***. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional.
2. Urusan bencana daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Penanggulangan bencana harus disiapkan dengan terencana dan terpadu melalui regulasi, kelembagaan dan sumber daya.
4. Penangangan bencana tidak dapat ditunda atau diundur harus ditangani dengan segera.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 kami susun sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran BPBD Tahun 2026.

Muaro Sijunjung, Agustus 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD

Ir. YULIZAR, MP

NIP. 19660717 199303 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, evaluasi, analisa kinerja pelayanan, serta penelaahan usulan program/ kegiatan serta pendanaan terhadap program dan kegiatan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung. Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini mempedomani kepada sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ke-lima Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025.

Sebagai komitmen dalam proses pencapaian Indikator, target kinerja di Tahun 2025 hendaknya Perubahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam penetapan Program/ Kegiatan yang akan dituangkan kedalam penetapan DPA Perubahan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 sehingga diharapkan tugas pokok dan fungsi serta indikator dan target kinerja bisa dicapai sebagaimana mestinya.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah, kami berharap tujan, sasaran, capaian kinerja serta target kinerja yang telah ditergetkan di Tahun 2025 dapat tercapai.

Muaro Sijunjung, September 2025

KEPALA DINAS,

HASMIZON, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19671202 199308 1 001

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DAGPERINKOP UKM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dagperinkop UKM Sampai Triwulan II	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Dagperinkop UKM	24
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Dagperinkop UKM	27
	2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	30
BAB IV	PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Sampai Triwulan II Tahun 2025	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Sijunjung	10
Table 2.3	Anggaran dan Realisasi per Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025	18
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegaiatan Dinas Dagperinkop UKM Tahun 2025	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang nagari dan kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD, serta Keputusan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya surat Bupati Sijunjung Nomor 050/121/Bapppeda-2025 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan surat Sekretaris Daerah Nomor 912/566/ANG-BKAD-2025, tanggal 10 Juli 2025 tentang Pagu Indikatif Perubahan PPAS TA 2025, maka perlu dilakukan penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025.

Kegiatan penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025,dengan tujuan antara lain :

a. Meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menghasilkan produk perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur, serta aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten/kota, dan pusat) dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan (Pusat dan Propinsi Sumatera Barat).
b. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai triwulan II Tahun 2025.
c. Rasionalisasi anggaran.

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas Perdagangan perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah merupakan

rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026.

1.1.2 **Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Rancangan akhir rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Rencana Kerja – PD) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 merupakan dokumen yang berikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada RPJMD ke–lima (2021-2025). Dokumen berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005 – 2025.

1.1.3 **Keterkaitan antara rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD.**

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja sampai rancangan akhir rencana kerja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD. Pada penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra perangkat daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam

rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan. Rencana Kerja Perangkat Daerah kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja. Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dilakukan dengan melandaskan pada sejumlah aturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-UndangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317

Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019 – 2039;
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha kecil dan Menengah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II.
2. Penyesuaian tehadap target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

3. Penyesuaian terhadap pagu indikatif Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha kecil dan Menengah sesuai dengan surat Bupati Sijunjung Nomor 050/121/Bapppeda-2025 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan surat Sekretaris Daerah Nomor 912/566/ANG-BKAD-2025, tanggal 10 Juli 2025 tentang Pagu Indikatif Perubahan PPAS TA 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DAGPERINKOP UKM SAMPAI TRIWULAN II
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dagperinkop UKM sampai Triwulan II
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Dagperinkop UKM
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SAMPAI DENGAN TRIWUAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung memiliki kewenangan menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yang terdiri dari satu urusan wajib yaitu urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan dua urusan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian.

Perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung berdasarkan program dan kegiatan pada Tahun 2025 secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan yang penilaiannya berorientasi pada input output.

Untuk realisasi keuangan sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui 14 program, 20 kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan wajib dan pilihan adalah sebesar **Rp5.284.644.793**,- dengan realisasi sebesar **Rp1.136.214.561**,- atau sebesar **21,20%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi per jenis belanja Sampai Triwulan II
Tahun 2025

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi – BelanjaPegawai – Belanja Barang dan jasa – Belanja Hibah	**5.283.844.793** 4.023.198.924 1.260.645.869 0	**2.059.556.711** 1.642.036.764 417.519.947 0	**38,97** 40,81 33,12 0
2	Belanja Modal a. BelanjaModal Peralatan dan Mesin	**800.000** 800.000	**0** 0	**0** 0
	Jumlah(1+2)	**5.284.644.793**	**2.059.556.711**	**38,97**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Dagperinkop UKM sampai triwulan II dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Dagperinkop UKM ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Dagperinkop UKM dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja rencana kerja dan Restra Dinas Dagperinkop UKM tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO.	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																					
1.						PROGRAM PENUNJANG																					
	2	**17**	**01**			**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**	**11,00 persen**	**36.262.135.350**	**3,28 persen**	**4.221.782.718**	**1,38 persen**	**4.456.718.830**	-	**949.348.894**	-	**828.582.595**	**1,36**	-	-	-	**1,36**	**1.777.931.489**	**1,36**	**5.999.714.207**	**41,33**	**142,11**
	2	**17**	**01**	**2.01**		**1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**1. Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran**	**100 persen**	**912.899.600**	**Maks 100 persen**	**24.906.435**	**Maks 100 persen**	**19.114.000**	**39,13**	**3.626.316**	**26,09**	**1.323.000**	**0,00**	-	**0,00**	-	**65,22**	**4.949.316**	**165,22**	**29.855.751**	**165,22**	**119,87**
							2. Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang disampaikan tepat waktu	**106 Dokumen**		**23**		**23 Dok/Lap**		**9**		**6**		**0**		**0**		**15**		**38**		**165,22**	**-**
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	237.899.600	4 Dokumen	3.656.000	4 Dokumen	1.176.000	2	-	2	-	0	-	0	-	4	-	8	3.656.000	200,00	100,00
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyususnan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	455.000.000	3 Laporan	20.002.435	3 Laporan	16.838.000	3	3.626.316	0	1.323.000	0	-	0	-	3	4.949.316	6	24.951.751	200,00	124,74
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71 Dokumen	220.000.000	16 Laporan	1.248.000	16 Laporan	1.100.000	4	-	4	-	0	-	0	-	8	-	24	1.248.000	150,00	100,00
	2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1. Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**100 persen**	**26.665.941.500**	**100 persen**	**3.739.730.185**	**100 persen**	**4.078.542.924**	**25,00**	**869.067.045**	**25,00**	**792.500.719**	**0,00**	-	**0,00**	-	**50,00**	**1.661.567.764**	**150,00**	**5.401.297.949**	**150,00**	**144,43**
							2. Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**25,00**		**25,00**		**0,00**		**0,00**		**50,00**					
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 orang	26.284.198.212	33 orang	3.718.253.196	29 orang/ bulan	4.057.398.924	29	860.079.045	29	791.177.719	0	-	0	-	14,50	1.651.256.764	47,50	5.369.509.960	143,94	144,41
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan penguji /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	225 dok	90.000.000	Dok											-					
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	85.000.000	0 laporan	-	1 laporan	-		-		-					-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 laporan	206.743.288	18 laporan	21.476.989	18 laporan	21.144.000	4	8.988.000	4	1.323.000	0	-	0	-	8	10.311.000	26	31.787.989	144,44	148,01
	2	**17**	**01**	**2.03**		**3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**70.000.000**	**0 persen**	**-**	**0 persen**	**-**	**0**	**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		5 dokumen	70.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen		0	-	0	-				-	-	-	-	-	-
	2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses tepat waktu**	**100 persen**	**374.500.000**	**100 persen**	**-**	**100,00 persen**	**-**	**0,00**	**-**		**-**					**-**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**

NO.	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025			REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2					3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	6	paket	249.500.000	1	paket	-	1	paket	-	0	-	0	-					-	-	1	-	100,00	-
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	24	orang	125.000.000	-	org	-	0	orang	-	0	-	0	-					-	-	-	-	-	-
	2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**100**	**persen**	**2.584.315.740**	**100,00**	**persen**	**114.348.037**	**100,00**	**persen**	**42.483.000**	**25,00**	**8.242.010**	**25,00**	**3.466.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**50,00**	**11.708.010**	**150,00**	**126.056.047**	**150,00**	**110,24**
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	paket	80.033.900	0	paket	-	1	paket	966.400	0	-	0	-	0		0		-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	90.000.000	0	paket	-	1	paket	-	0	-	0	-					-	-				
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	paket	80.000.000	0	paket	-	1	paket	-	0	-		-					-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	paket	340.419.840	1	paket	28.126.500	1	paket	9.230.200	0	-	0,25	300.000	0	-	0	-	0	300.000	1,25	28.426.500	125,00	101,07
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	125.999.600	0	paket	-	1	paket	-	0	-	0	-					-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	paket	45.000.000	-	dok	-	1	paket	-	0	-	0	-					-	-		-		-
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	laporan	65.000.000	0	laporan	-	12	Laporan	-	0	-	0	-	0		0		-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	laporan	1.757.862.400	12	laporan	86.221.537	12	Laporan	32.286.400	3	8.242.010	3	3.166.000	0	-	0	-	6	11.408.010	18	97.629.547	150,00	113,23
	2	**17**	**01**	**2.07**		**6. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100**	**persen**	**1.090.000.000**	**100**	**persen**	**-**	**100**	**persen**	**-**		**-**	**0,00**	**-**					**-**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16	unit	600.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	-		-					-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	paket	240.000.000				0	unit	-	0	-		-						-				
	2	17	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	unit		0	unit	-	1	unit	-	0	-	0,0	-					-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan bamgunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun							0	paket	-														
	2	17	01	2.07	11	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor							0	paket	-														
	2	17	01	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor dan bamgunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	200.000.000	-	Unit	0	0	Unit	-	0	-	0,0	-										
	2	17	01	2.07	0011	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg disediakan	5	unit	50.000.000	-	Unit	0					-		-										
	2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	**2.015.709.645**	**100**	**persen**	**243.051.961**	**100**	**persen**	**238.921.256**	**25,00**	**66.539.223**	**25,00**	**27.977.776**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**50,00**	**94.516.999**	**150,00**	**337.568.960**	**150,00**	**138,89**
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	laporan	259.445.076	0	laporan	-	0	Laporan	-		-		-					-	-	-	-	-	-
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	1.274.074.000	12	Laporan	103.820.071	12	Laporan	96.341.256	3	34.929.769	3	17.152.627	0	-	0	-	6	52.082.396	18	155.902.467	150,00	150,17

NO.	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	2	17	01	2.08	0003	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 laporan	104.968.569	19 laporan	10.464.700	12 Laporan	10.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	19	10.464.700	100,00	100,00
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	377.222.000	12 Laporan	128.767.190	12 Laporan	132.480.000	3	31.609.454	3	10.825.149	0	-	0	-	6	42.434.603	18	171.201.793	150,00	132,95
	2	**17**	**01**	**2.09**		**8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan daerah**	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik**	**100 persen**	**2.548.768.865**	**100 persen**	**99.746.100**	**100 persen**	**77.657.650**	**25,00**	**1.874.300**	**25,00**	**3.315.100**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**50,00**	**5.189.400**	**150,00**	**104.935.500**	**150,00**	**105,20**
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160 unit	1.760.968.000	26 unit	88.696.600	26 unit	64.250.000	6	1.874.300	10	3.315.100	0	-	0	-	16	5.189.400	42	93.886.000	161,54	105,85
	2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel					0 paket	-														
	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 paket	55.000.000	- unit	-	0 Laporan	-		-		-						-				
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	19 unit	230.898.865	1 unit	1.169.500	2 unit	7.307.650	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	1.169.500	100,00	100,00
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Paket	250.000.000	- unit	-	0 Laporan	-		-		-						-				
	2	17	01	2.09	0011	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat ruah tangga, alat pendingin	unit	251.902.000	12 unit	9.880.000	10 unit	6.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	12	9.880.000	100,00	100,00
									-			**Rata-rata capaian kinerja (%)**		**27,36**		**25,18**		-		-		**52,54**	**222.241.436**	**144,20**	**749.964.276**		
												Predikat Kinerja										**SR**		**ST**			
2.						**URUSAN KOPERASI**	**1. Persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi**		**3.253.998.080**	**1,58**	**511.159.182**	**3,50**	**106.882.719**	**4,55**	**20.351.054**	**9,09**	**4.798.408**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,64**	**25.149.462**	**15,22**	**536.308.644**	963,06	**104,92**
							2. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas			**13,78**		**42,5**															
	2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang berkualitas**	81,57 persen	-	0 Persen	-	61,48 Persen	-	-		-											
	2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi sehat**	68,00 persen	-	0 Persen	-	40 Persen	-	-		-											
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 unit	-	- unit	-	0 Unit	-	-	-	-	-										
	2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persenstase koperasi yang berkualitas**	**81,57 persen**	**329.000.000**	**46,30 persen 28 Koperasi**	**14.271.236**	**61,48 persen**	**21.758.350**	**13,64**	**6.047.353**	**27,27**	**1.239.243**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,91**	**7.286.596**	**102,39**	**21.557.832**	**-**	**151,06**
	2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi sehat**	**68,00 persen**	**329.000.000**	**18,18 22 persen KSP/USP**	**14.271.236**	**40 persen**	**21.758.350**	**13,64**	**6.047.353**	**27,27**	**1.239.243**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,91**	**7.286.596**	**80,91**	**21.557.832**	**-**	**151,06**
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	167,00 unit	329.000.000	28 Unit Usaha	14.271.236	22 Unit Usaha	21.758.350	5	6.047.353	5	1.239.243	-	-	-	-	10	7.286.596	38	21.557.832	135,71	151,06
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**22,73**	**-**	**22,73**	**-**	**-**		**-**		**45,45**	**7.286.596**	**172,73**	**21.557.832**		

NO.	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025			REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025							REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
															I		II		III		IV						
1	2					3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
												Predikat Kinerja											SR		ST			
	2	17	04			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI**	**Persenstase koperasi yang berkualitas**	**81,57 persen**	**412.921.600**	**46,30 28 persen**	**7.564.139**	**61,48 persen**	**22.048.150**		**13,64**	**3.824.943**	**27,27**	**1.330.844**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,91**	**5.155.787**	**#VALUE!**	**12.719.926**	**#VALUE!**	**168,16**
	2	17	04	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi Sehat**	**68,00 persen**	**412.921.600**	**18,18 22 persen**	**7.564.139**	**40 persen**	**22.048.150**		**13,64**	**3.824.943**	**27,27**	**1.330.844**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,91**	**5.155.787**	**#VALUE!**	**12.719.926**	**#VALUE!**	**168,16**
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	195 unit usaha	412.921.600	22 Unit Usaha	7.564.139	22 Unit Usaha	22.048.150		3	3.824.943	6	1.330.844	0	-	0	-	9	5.155.787	31	12.719.926	140,91	168,16
												Rata-rata capaian kinerja (%)			**13,64**		**27,27**		**-**		**-**		**40,91**	**5.155.787**	**140,91**	**12.719.926**		
												Predikat Kinerja											SR		ST			
	2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan**	**62,00 persen**	**723.284.800**	**74,07 persen**	**43.955.250**	**55,55 Persen**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**59,09**	**43.955.250**	**325,02**	**100,00**
	2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi sehat**	**68,00 orang**	**723.284.800**	**18,18 persen**	**43.955.250**	**40,00 Persen**	**-**		**13,64**	**-**	**27,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,91**	**-**	**59,09**	**43.955.250**	**325,02**	**100,00**
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	559 orang	723.284.800	80 orang	43.955.250	80 orang	-		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	80	43.955.250	100	100
												Rata-rata capaian kinerja (%)			**0**		**0**		**-**		**-**		**-**	**-**	**100,00**	**43.955.250**		
												Predikat Kinerja											SR		ST			
	2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan unit usaha koperasi**	**4,50 Persen**	**151.000.000**	**7,81 64 Persen Unit Usaha**	**252.247.252**	**3,93 Persen**	**16.474.100**		0	**2.626.350**	0	-	0	-	**0,00**	-	**-**	**2.626.350**	3,93	**254.873.602**	-	**101,04**
	2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang meningkat Permodalannya**	**6,00 Persen**	**151.000.000**	**3,00 Persen**	**252.247.252**	**3,00 Persen**	**16.474.100**		**0,00**	**2.626.350**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.626.350**	**76,00**	**254.873.602**	**100,00**	**101,04**
	2	17	06	2.01	0001	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	390,00 orang	151.000.000	76 orang	252.247.252	75 Orang	16.474.100		0	2.626.350	0	-	-	-	-	-	-	2.626.350	76	254.873.602	100,00	101,04
												Rata-rata capaian kinerja (%)			**0,00**		**0**		**-**		**-**		**-**	**2.626.350**	**#######**	**254.873.602**		
												Predikat Kinerja											SR		ST			
	2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Penambahan Unit Usaha yang difasilitasi akses pembiayaan melalui investasi dana bergulir**	**28,98 persen**	**589.558.980**	**6,25 Persen**	**67.611.336**	**6,45 Persen**	**24.981.019**		**0,00**	**4.341.517**	**0,00**	**1.019.555**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**5.361.072**	**6,25**	**72.972.408**	**100,00**	**107,93**
	2	17	07	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah penambahan Unit Usaha yang difasilitasi permodalannya dari Dana Bergulir**	**11 unit usaha**	**589.558.980**	**2 Unit Usaha**	**67.611.336**	**2 Unit Usaha**	**24.981.019**		**0**	**4.341.517**	**0**	**1.019.555**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**5.361.072**	**2,00**	**72.972.408**	**100,00**	**107,93**
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	41 unit	589.558.980	32 Unit Usaha	67.611.336	34 Unit Usaha	24.981.019		0	4.341.517	0	1.019.555	0		0	-	-	5.361.072	32	72.972.408	100,00	107,93
												Rata-rata capaian kinerja (%)			**0,00**		**0**		**-**		**-**		**-**	**5.361.072**	**94,12**	**72.972.408**		
												Predikat Kinerja											SR		T			
	2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**1. Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro**	**6,50 persen**	**1.048.232.700**	**6,54 Persen**	**125.509.969**	**5,00 Persen**	**21.621.100**		**0,00**	**3.510.891**	**0,00**	**1.208.766**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**4.719.657**	**40,00**	**130.229.626**	**133,33**	**103,76**
							2. Persentase Peningkatan Asset Usaha Mikro	**4,5 persen**		**4,76 Persen**		**3,20 Persen**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**-**					

NO.	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	2	17	08	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi faktor produksinya**	**350 unit**	**1.048.232.700**	**85**	**125.509.969**	**85 Unit Usaha**	**21.621.100**	**0**	**3.510.891**	**10**	**1.208.766**	**0**	-	**0**	-	**10,00**	**4.719.657**	**40,00**	**130.229.626**	**133,33**	**103,76**
	2	17	08	2.01	0001	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	350 unit usaha	1.048.232.700	85 Unit Usaha	125.509.969	85 Unit Usaha	21.621.100	0	3.510.891	10	1.208.766	0	-	0	-	10	4.719.657	60	130.229.626	70,59	103,76
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**0**		**11,765**		**-**		**-**		**11,76**	**4.719.657**	**133,33**	**130.229.626**		
												Predikat Kinerja										**SR**		**ST**			
3.	**3**	**30**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**	**1. Persentase Kenaikan Omset Perdagangan**		**5.021.912.228**	**6,13**	**1.119.301.972**	**6,5**	**460.260.394**	**0,0**	**73.844.343**		**51.649.965**		-	-	-	-	**125.494.308**	**3,92**	**1.244.796.280**	**100,00**	**111,21**
							2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan			**146,51**		**50**														
	3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana**	**41,16 persen**	**3.027.517.640**	**32,82 Persen**	**917.880.476**	**33,32 Persen**	**325.351.463**	**0,0**	**19.247.500**	**0,00**	**6.399.915**	**0,00**	-	**0,00**	-	-	**25.647.415**	**3,92**	**943.527.891**	**100,00**	**102,79**
							2. Persentase Pengelola Pasar yang dibina			**58,82**		**58,00 Persen**		**10,34**		**20,68**		**0,00**		-		**31,02**					
	3	**30**	**03**	**2.01**		**1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Sarana Perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi**	**32,00 persen**	**2.837.517.640**	**3,92 Persen**	**910.060.776**	**8,00 Persen**	**323.331.290**	**0,00**	**18.097.500**	**0,00**	**6.399.915**	-	-	-	-	-	**24.497.415**	**3,92**	**934.558.191**	**100,00**	**102,69**
							2. Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan	**26,00 persen**		**5,00 Persen**		**5,00 Persen**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		-		-					
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	102 unit	2.402.028.340	4 Unit	804.730.751	4 Unit	243.010.840	0	712.500	0	340.000	-	-	0	-	-	1.052.500	4	805.783.251	100,00	100,13
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengeloaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	435.489.300	2 Unit	105.330.025	2 unit	80.320.450	0,5	17.385.000	0,5	6.059.915	0	-	0	-	1	23.444.915	3,00	128.774.940	150,00	122,26
	3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase peningkatan Pengelola Pasar yang dibina dan diawasi**	**44,00 persen**	**190.000.000**	**70 Persen**	**7.819.700**	**11 Persen**	**2.020.173**	**10,34**	**1.150.000**	**10,34**	**-**	**0,00**	-	**0,00**	-	**20,68**	**1.150.000**	**40,00**	**8.969.700**	**117,65**	**114,71**
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	101 dokumen	190.000.000	34 Dok	7.819.700	30 Dok	2.020.173	3	1.150.000	3	-	-	-	0	-	6	1.150.000	40	8.969.700	117,65	114,71
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**9,72**		**9,72**		**-**		**-**		**19,44**	**12.823.708**	**100,00**	**471.763.946**		
												Predikat Kinerja										**SR**		**ST**			
	3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**1. Persentase Gejolak Harga Bapokting yang di monitoring**	**100 persen**	**579.807.100**	**100 persen**	**80.393.396**	**100 persen**	**28.000.681**	**100,00**	**5.421.080**	**0**	**1.924.850**	-	-		-	**100,00**	**7.345.930**	200,00	**87.739.326**	200,00	109,14
							2. Persentase Pengawasan Pupuk Bersubsidi Lini 3 dan 4	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**6,67**		**63,34**		-		-		**70,01**		170,01		170,01	
	3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**1. Jumlah pasar yang di monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting**	**93 unit**	**103.000.000**	**10 Pasar**	**5.814.652**	**10 Pasar**	**1.568.100**	**10**	**220.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**220.000**	**15,00**	**6.034.652**	**150,00**	**103,78**
							2. Jumlah operasi pasar/pasar murah	**50 kali**		**10 Kali**		**10 Kali**		**10**		**-**		-		-		**10**					
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	60 laporan	103.000.000	10 laporan	5.814.652	10 laporan	1.568.100	2	220.000	3	-	0	-	0	-	5	220.000	15	6.034.652	150,00	103,78
	3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk pasar**	**1. Jumlah pasar yang di monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting**	**93 unit**	**325.781.900**	**10 pasar**	**60.160.744**	**10 pasar**	**22.475.031**	**10**	**5.201.080**	**0**	**1.924.850**	**0**	-	**0**	-	10	**7.125.930**	**292**	**67.286.674**	**323,08**	**222,86**
							2. Jumlah operasi pasar/pasar murah	**50 kali**		**10 Kali**		**10 Kali**		**10**		**0**		**0**		**0**		10					

NO.	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	888 laporan	275.781.900	221 laporan	38.350.194	208 laporan	18.650.200	51	3.596.080	-	1.365.850	0,00	-	0	-	51	4.961.930	272	43.312.124	123,08	112,94
	3	30	04	2.02	0002	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	45 laporan	50.000.000	10 laporan	21.810.550	10 laporan	3.824.831	10	1.605.000	0	559.000	0	-	0	-	10	2.164.000	20	23.974.550	200,00	109,92
	3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Lini 3 dan 4**	**120 kali**	**151.025.200**	**30 kali**	**14.418.000**	**30 Kali**	**3.957.550**	**2**	**0**	**17**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	19	**-**	**49**	**14.418.000**	**163,33**	**100,00**
	3	30	04	**2.03**	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	194 laporan	151.025.200	30 laporan	14.418.000	30 laporan	3.957.550	2	-	**17**	-	-	-	-	-	19	-	49	14.418.000	163,33	100,00
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**25,19**		**7,75**		**-**		**-**		**32,95**	**7.345.930**	**131,37**	**78.127.326**		
												Predikat Kinerja										**SR**		**ST**			
	3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**1. Persentase penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai ketentuan**	**37,02 persen**	**1.102.767.488**	**100,59 persen**	**45.299.600**	**75 persen**	**20.727.250**	**12,35**	**2.656.908**	**21,76**	**4.825.200**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**34,12**	**7.482.108**	**48,69**	**52.781.708**	**128,29**	**116,52**
							2. Persentase BDKT yang Beredar sesuai aturan	**persen**		**68,1 persen**		**50 persen**		**5,14**		**34,29**		**0,00**		**0,00**		**39,43**					
	3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**1. Persentase UTTP wajib tera yang ditera/Tera Ulang**	**37,02 persen**	**1.102.767.488**	**37,95 persen**	**45.299.600**	**37,02 persen**	**20.727.250**	**3,89**	**2.656.908**	**6,85**	**4.825.200**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**10,74**	**7.482.108**	**48,69**	**52.781.708**	**128,29**	**116,52**
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2050 unit	556.846.100	1025 UTTTP	18.893.150	850 UTTP	6.460.550	105	-	185	2.574.150	0	-	0	-	290	2.574.150	1.315	21.467.300	128,29	113,62
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	545.921.388	689 0rang	26.406.450	350 0rang	14.266.700	18	2.656.908	120	2.251.050	0	-	0	-	138	4.907.958	827	31.314.408	120,03	118,59
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**10,25**		**25,42**		**-**		**-**		**35,67**	**7.482.108**	**124,97**	**52.781.708**		
												Predikat Kinerja										**SR**		**ST**			
	3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan omset Pelaku usaha yang difasilitasi Promosinya**	**3,00 persen**	**311.820.000**	**2,48** persen	**75.728.500**	**2,50 persen**	**86.181.000**	**30,00**	**46.518.855**	**0,00**	**38.500.000**		**-**	**0,00**	**-**	**30,00**	**85.018.855**	**102,00**	**160.747.355**		**212,27**
	3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Promosi**	**200 orang**	**311.820.000**	**52 orang**	**75.728.500**	**50 orang**	**86.181.000**	**50**	**46.518.855**	**0**	**38.500.000**	**0**	**-**		**-**	**50**	**85.018.855**	**102**	**160.747.355**		**212,27**
							2. Jumlah produk yang dipromosikan	**245 produk**		**54 Produk**		**50 produk**		**50**		**0**		**0**				**50**					
	3	30	07	2.01	0001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksnakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota	200 UMKM	311.820.000	142 UMKM	75.728.500	50 UMKM	86.181.000	50	46.518.855	0	38.500.000	0	-	0	-	50	85.018.855	192	160.747.355	135,21	212,27
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**100,00**		**-**		**-**		**-**	**100**	**100,00**	**85.018.855**	**135,21**	**85.018.855**		
												Predikat Kinerja										**ST**		**ST**			
4.	**3**	**31**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**	**1. Persentase Peningkatan Pelaku IKM**		**4.701.455.430**	**4,22**	**526.294.451**	**5,00**	**260.782.850**	0,40%	**92.670.270**	1,60%	**38.311.182**		-		-		**130.981.452**		**657.275.903**		**124,89**
							2. Persentase Kenaikan Omset IKM			**2,14**		**2,5**		0,30%		0,20%										
	3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**1. Persentase pengembangan sentra**	**67,00 persen**	**3.520.413.430**	**25,00 persen**	**511.675.101**	**25,00 Persen**	**244.039.850**	**0,00**	**87.932.524**	**0,13**	**37.152.306**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,13**	**125.084.830**	**3,00**	**636.759.931**	**100,00**	**124,45**
							2. Persentase ketersediaan produk unggulan	**45 persen**		**17 persen**		**15,00 Persen**		**0,04**		**0,05**		**-**		**-**		**0,09**					
							3. Persentase Produk yang bersertifikasi	**45 persen**		**77 persen**		**64,00 Persen**		**13,00**		**0,13**				**-**		**-**					
							4. Persentase Peningkatan Informasi Pelaku Usaha di SIINas			**6,3**		**6,00 Persen**		**0,00**		**0,00**											

NO.	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
														I		II		III		IV							
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**1. Jumlah Sarana Prasarana sentra IKM yang diadakan**	**17 paket**	**3.520.413.430**	**3 paket**	**511.675.101**	**2 paket**	**244.039.850**	**0**	**87.932.524**	**0**	**37.152.306**	-	-	-	-	-	**125.084.830**	**3**	**636.759.931**	**100,00**	**124,45**
							2. Jumlah Kelembagaan sentra yang dibentuk	**18 unit**		**2 Unit**		**2 sentra**		**0**	-	**0**	-	-		-		-		**2**		**100,00**	-
							3. Jumlah Industri Kecil Menengah Sentra yang dibina	**26 unit**		**5 Unit**		**5 sentra**		**2**	**2**	**0**		-		-		**2,0**		**7**		**140,00**	-
							4. Jumlah Produk Industri Kecil Menengah yg dikembangkan	**70 unit**		**10 Unit**		**10 produk**		**2**	**2**	**1**		-		-		**3**		**13**		**130,00**	-
							5. Jumlah IKM produk unggulan yang dibina	**230 unit**		**50 IKM**		**50 IKM**		**15**	**15**	**10**		-		-		**25**		**75**		**150,00**	-
							6. Jumlah produk tersertifikasi	**115 unit**		**43 Unit**		**15 produk**		**7**	**7**	**2**		-		-		**9**		**52**		**120,93**	-
							7. Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah mengikuti pelatihan	**180 orang**		**40 orang**		**30 IKM**		**1**		**0**				-		**1**		**41**		**102,50**	-
	3	31	**02**	2.01	0003	Koordinasi Singkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 dokumen	140.000.000	2 dokumen	34.356.401	2 dokumen	23.145.600	0	4.281.156	1	1.501.614		-	-	-	1	5.782.770	3	40.139.171	150,00	116,83
	3	31	**02**	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 dokumen	2.326.120.330	2 dokumen	115.145.950	2 dokumen	16.085.000	0	3.801.250	1	1.048.000		-	0	-	1	4.849.250	3	119.995.200	150,00	104,21
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 dokumen	1.054.293.100	2 dokumen	362.172.750	2 dokumen	204.809.250	0	79.850.118	1	34.602.692		-	0	-	1	114.452.810	3	476.625.560	150,00	131,60
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**18,18**		**27,27**		-		-		**45,45**	**125.084.830**	**144,44**	**636.759.931**		
												Predikat Kinerja										**SR**		**ST**			
	3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/ KOTA**	**Persentase IKM yang memenuhi komitmen standar usaha industri**	**32,00 persen**	**333.000.000**	**0,00 Persen**	-	**0,00 Persen**	-	**0,00**	-	**0,00**	-		-				-	-	-	-	-	-
	3	**31**	**03**	**2.01**		**1. Penerbitan Izin Usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI) izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kab / Kota**	**Jumlah Industri Kecil Menengah yang Menerapkan Pengendalian Mutu Terpadu**	**230 unit**	**333.000.000**	**0 IKM**	-	**0 IKM**	-	**0,00**	-	**0,00**	-		-				-	-	-	-	-	-
	3	31	03	2.01	0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten Kota dalam SIINAS yg terintegrasi dg Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	5 Dokumen	167.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0	-		-						-	-	-	-	-	-

NO.	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR POGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025		REALISASI KINERJA TRIWULAN PADA TAHUN 2025								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD s/d TAHUN 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/6*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	166.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0	-	0	-					-	-	-	-	-	-
								Rata-rata capaian kinerja (%)			-		-						-		-		
								Predikat Kinerja															
	3 31 04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Industri Kecil Menengah yang Memiliki Izin.**	**45,00 persen**	**848.042.000**	**27,4 Persen**	**14.619.350**	**30 Persen**	**16.743.000**	**8,57**	**4.737.746**	**2,86**	**1.158.876**		**-**	**0**	**-**	**11,43**	**5.896.622**	**150,00**	**20.515.972**	**105,63**	**140,33**
	3 31 04 2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Industri Kecil Menengah yang difasilitasi perizinannya**	**unit**	**848.042.000**	**142 IKM**	**14.619.350**	**70 IKM**	**16.743.000**	**6**	**4.737.746**	**2**	**1.158.876**	**0**	**-**	**0**	**-**	**8**	**5.896.622**	**150,00**	**20.515.972**	**105,63**	**140,33**
			Persentase IKM yang update data di SIINas	**65,00 persen**		**55 Persen**		**55 Persen**				**0**											
	3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi pengumpulan , pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kab / kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15 dokumen	430.000.000	3 dokumen	14.619.350	3 dokumen	16.743.000	1	4.737.746	1	1.158.876	0	-	0	-	2	5.896.622	5	20.515.972	166,67	140,33
	3 31 04 2.01 0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 dokumen	418.042.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0	-	0	-					-	-	-	-	-	-
	3 31 04 2.01 0003	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan kawasan industri lingkup kab/kota dalam penyampaian data SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0		0	-					-	-	-	-	-	-
								Rata-rata capaian kinerja (%)		**33,33**		**33,33**			**-**		**-**		**66,67**	**5.896.622**	**105,63**	**20.515.972**		
								Predikat Kinerja											**SR**		**ST**		
		Total			**49.239.501.088**		**6.378.538.323**		**5.284.644.793**		**1.136.214.561**		**923.342.150**		**-**		**-**		**2.059.556.711**		**8.438.095.034**		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								**20,03**		**14,65**			**-**		**-**		**34,68**		**312,33**		
		Predikat Kinerja								**SR**		**SR**		**SR**		**SR**			**SR**		**ST**		

Untuk realisasi anggaran per program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	SETELAH PERGESERAN	REALISASI	
				(Rp)	(%)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.656.551.194**	**4.456.718.830**	**1.777.931.489**	**38,89**
1.	**Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**28.357.400**	**19.114.000**	**4.949.316**	**18,97**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.392.400	1.176.000	-	0,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.488.000	16.838.000	4.949.316	29,39
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.477.000	1.100.000	-	0,00
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.080.325.424**	**4.078.542.924**	**1.661.567.764**	**40,74**
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.057.398.924	4.057.398.924	1.651.256.764	40,70
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22.926.500	21.144.000	10.311.000	4,88
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**106.380.800**	**42.483.000**	**11.708.010**	**27,56**
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.958.000	966.400	-	0,00
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.488.100	9.230.200	300.000	3,25

8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.934.700	32.286.400	11.408.010	35,33
4.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**324.233.044**	**238.921.256**	**94.516.999**	**39,56**
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.583.044	96.341.256	52.082.396	54,06
10.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.670.000	10.100.000	-	0,00
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.980.000	132.480.000	42.434.603	32,03
5.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan daerah**	**117.254.526**	**77.657.650**	**5.189.400**	**6,68**
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.898.600	64.250.000	5.189.400	8,08
13.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.035.926	7.307.650	-	0,00
14.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	6.100.000	-	0,00
	URUSAN KOPERASI	**229.601.900**	**106.882.719**	**25.149.462**	**23,53**
II.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**28.701.150**	**21.758.350**	**7.286.596**	**33,49**
6.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**28.701.150**	**21.758.350**	**7.286.596**	**33,49**

15.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	28.701.150	21.758.350	7.286.596	33,49
III.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI**	**29.298.700**	**22.048.150**	**5.155.787**	**23,38**
7.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**29.298.700**	**22.048.150**	**5.155.787**	**23,38**
16.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	29.298.700	22.048.150	5.155.787	23,38
IV.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**99.878.150**	**16.474.100**	**2.626.350**	**15,94**
8.	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasiyang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**99.878.150**	**16.474.100**	**2.626.350**	**15,94**
17.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.878.150	16.474.100	2.626.350	15,94
V.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**41.136.800**	**24.981.019**	**5.361.072**	**21,46**

9.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**41.136.800**	**24.981.019**	**5.361.072**	**21,46**
18.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	41.136.800	24.981.019	5.361.072	21,46
VI	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**30.587.100**	**21.621.100**	**4.719.657**	**21,83**
10.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**30.587.100**	**21.621.100**	**4.719.657**	**21,83**
19.	Pengembangan Usaha Mikro	30.587.100	21.621.100	4.719.657	21,83
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	**731.432.481**	**460.260.394**	**125.494.308**	**27,27**
VII.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**552.115.256**	**325.351.463**	**25.647.415**	**7,88**
11.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**547.799.825**	**323.331.290**	**24.497.415**	**7,58**
20.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	448.879.375	243.010.840	1.052.500	**0,43**
21.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	98.920.450	80.320.450	23.444.915	**29,19**
12.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**4.315.431**	**2.020.173**	**1.150.000**	**56,93**
22.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	4.315.431	2.020.173	1.150.000	**56,93**

	Perdagangan				
VIII.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**51.373.050**	**28.000.681**	**7.345.930**	**26,23**
13.	**Menjamin Ketersediaan Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**3.565.723**	**1.568.100**	**220.000**	**14,03**
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.565.723	1.568.100	220.000	14,03
14.	**Pengendalian Harga, dan stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk pasar**	**39.126.027**	**22.475.031**	**7.125.930**	**31,71**
24.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	27.146.450	18.650.200	4.961.930	26,61
25.	PelaksanaanOperasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampakdalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	11.979.577	3.824.831	2.164.000	56,58
15.	**PengawasanPupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**8.681.300**	**3.957.550**	**-**	**0,00**
26.	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	8.681.300	3.957.550	-	0,00
IX.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**37.820.100**	**20.727.250**	**7.482.108**	**36,10**

16.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**37.820.100**	**20.727.250**	**2.574.150**	**12,42**
27.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	21.978.850	6.460.550	2.574.150	39,84
28.	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	15.841.250	14.266.700	4.907.958	34,40
X.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**90.124.075**	**86.181.000**	**85.018.855**	**98,65**
17.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**90.124.075**	**86.181.000**	**85.018.855**	**98,65**
29.	Pelaksanaan Promosi PenggunaanProduk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	90.124.075	86.181.000	85.018.855	98,65
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN	**499.478.700**	**260.782.850**	**92.670.270**	**35,54**
XI.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**481.500.700**	**244.039.850**	**125.084.830**	**51,26**
18.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**481.500.700**	**244.039.850**	**125.084.830**	**51,26**
30.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	27.866.600	23.145.600	5.782.770	24,98
31.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	21.012.000	16.085.000	4.849.250	30,15

32.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	432.622.100	204.809.250	114.452.810	55,89
XII.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**17.978.000**	**16.743.000**	**5.896.622**	**35,22**
19.	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**17.978.000**	**16.743.000**	**5.896.622**	**35,22**
33.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	17.978.000	16.743.000	5.896.622	35,22
	JUMLAH	**6.117.064.275**	**5.284.644.793**	**2.059.556.711**	**38,97**

2.2. Analisis kinerja pelayanan DINAS DAGPERINKOP UKM

Analisis kinerja pelayanan Dinas Dagperinkop UKM merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Dagperinkop UKM berdasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentng pedoman umum penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah dan keputusan Bupati Sijunjung nomor 188.45/482/KPTS-BPT-2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2016.

Untuk capaian asing-masing indikator kinerja sasaran digunakan formula berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data**

Kelompok". Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

Capaian sasaran

$$= \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai mean setiap kategori ditetaapkan sebagai berikut :

- Sangat berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak berhasil : 27,5

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Dagperinkop UKM tahun 2025 berdasarkan sasaran dari misi "meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonoomi kerakyatan dan pariwisata". Urusan Dinas Dagperinkop UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Dagperinkop UKM

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Trasaksi Pedagangan						
Indorikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori Capaian	Target akhir Renstra	% capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra
Persentase kenaikan Omset perdagangan	5,50	5,62	102,18	Sangat tinggi	7,00	80,28
Rata-Rata Capaian			102,18	Sangat tinggi		

Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Produk IKM						
Indorikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori Capaian	Target akhir Renstra	% capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra
Persentase Kenaikan Omset IKM	1,75	1,76	100,57	Sangat tinggi	2,50	70,40
Rata-Rata Capaian			100,57	Sangat tinggi		
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Koperasi						
Indorikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori Capaian	Target akhir Renstra	% capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra
Persentase Kenaikan SHU Koperasi	7	7,57	108,14	Sangat tinggi	N/A	N/A
Rata-Rata Capaian			108,14	Sangat tinggi		
Sasaran 4 : Meningkatnya Usaha Mikro yang berkualitas						
Indorikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori Capaian	Target akhir Renstra	% capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	25,00	27,60	110,40	Sangat tinggi	0,40 (Revisi)	N/A
Rata-Rata Capaian			110,40	Sangat tinggi		
Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi						
Indorikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori Capaian	Target akhir Renstra	% capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73	77,30	105,89	Sangat tinggi	80	75,55
Persentase penyerapan anggaran	90,00	93,08	96,69	Sangat tinggi	N/A	N/A
Rata-Rata Capaian			101,29	Sangat tinggi		
Rata-Rata Capaian kinerja Dinas Dagperinkop UKM			103,98	Sangat tinggi		

Dari tabel diatas dapat diketahui ke 5 (lima) indikator kinerja sasaran Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung dapat dilakasanakan dengan predikat atau kategori “sangat tinggi” dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 103,98.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAGPERINKOP UKM

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Urusan wajib Koperasi dan UKM

a. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif.
b. Masih lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
c. Masih rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik, hal ini ditandai sedikitnya koperasi yang aktif.
d. Rendahnya semangat kewirausahaan yang ditandai dengan relative kecilnya jumlah UMKM.
e. Belum terbangunnya kemitraan antar UMKM.
f. Daya saing produk UMKM masih rendah.

g. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi.
h. Masih kurangnya para pelaku usaha/wirausaha baru yang melakukan promosi melalui platform e-comerce/ marketplace.

Urusan Pilihan Perdagangan

a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan aktivitas perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (barang yang telah kadaluarsa, SNI, tera ulang, dll)
b. Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi sebagai penera
c. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
d. Belum terbangunnya system informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata.
e. Belum optimalnya penerapan pelaksanaan subsidi seperti minyak tanah dan pupuk.

Urusan Pilihan Perindustrian

a. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri, baik kecil maupun menengah karena belum ada standardisasi mutu hasil industri, sehingga daya saing masih rendah dibandingkan daerah lain.
b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri.
c. Belum optimalnya perkembangan sentra-sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas.
d. Belum berkembangnya industri kecil menengah yang dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dagperinkop UKM.

Penelahaan usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Dagperinkop UKM dan juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Adapun usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sijunjung

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN/ VOLUME	CATATAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.Persentase Pasar yang dibangun dan direvitaliasi 2.Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang dibina		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1.Persentase Pasar yang dibangun dan direvitaliasi 2.Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang dibina		
1	Rehab Los Pasar Koto Baru	Koto Baru		1 unit	
2	Belanja Modal Gerobak Etalase			20 Unit	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan rencana kerja pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah, tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah akan diwujudkan melalui beberapa target :

a. Meningkatkan jumlah koperasi aktif.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang kompeten untuk mengelola sektor koperasi, metrologi legal, dan industri.
c. Meningkatnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
d. Meningkatnya persentase koperasi yang sehat.
e. Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.
f. Meningkatnya SHU koperasi.
g. Meningkatnya Produk IKM yang bersertifikasi.
h. Terikutinya event- event dalam rangka promosi produk daerah.
i. Meningkatnya pengetahuan Wirausaha pemula, IKM, UKM.
j. Meningkatnya KUKM yang terlayani dalam hal bantuan dana bergulir.
k. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.
l. Meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah.
m. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan.
n. Meningkatnya IKM yang memanfaatkan TTG.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut diatas tidaklah mudah, namun berdasarkan kinerja OPD selama 5 (lima)

tahun terakhir dan dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai, apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Kerjasama antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi, dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya di bawah wewenang Dinas Dagperinkop UKM. Oleh karena itu penanganan pembangunan sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mau tidak mau membutuhkan kerjasama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya dilapangan.

Dari program-program seperti yang telah dijabarkan sebelumnya diimplementasikan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN TA 2025

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Meningkatnya tata kelola organisasi					**77**	**77**				
Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	**Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**	**2 17 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**		**2,74 Persen**	**1,38 Persen**	**Rp 4.326.386.625**	**Rp 4.656.551.194**	**Rp 4.456.718.830**	**(Rp199.832.364)**
	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran OPD	**2 17 01 2.01**	**Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**1. Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran**		**Maksimal 100 %**	**Maksimal 100 %**	**Rp 37.000.000**	**Rp 28.357.400**	**Rp 19.114.000**	**(Rp9.243.400)**
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja			**2. Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang disampaikan tepat waktu**		**23 Dokumen**	**23 Dokumen**				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 17 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaro Sijunjung	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	5.392.400	Rp 1.176.000	(Rp4.216.400)
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 17 01 2.01 0006	Koordinasi dan penyususnan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muaro Sijunjung	3 Dokumen	3 Dokumen	27.000.000	18.488.000	Rp 16.838.000	(Rp1.650.000)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 17 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muaro Sijunjung	16 Laporan	16 Laporan	5.000.000	4.477.000	Rp 1.100.000	(Rp3.377.000)
	1.Meningkatnya kualitas layanan penatausahaan keuangan	**2 17 01 2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1. Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**		**100 persen**	**100 persen**	**Rp 3.695.458.217**	**Rp 4.080.325.424**	**Rp 4.078.542.924**	**(Rp1.782.500)**
	2. Meningkatnya pengawasan internal organisasi			**2. Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi**		**100 persen**	**100 persen**				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2 17 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muaro Sijunjung	29 orang	29 orang	3.673.958.217,00	4.057.398.924	Rp 4.057.398.924	Rp0
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 17 01 2.02 0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	0			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2 17 01 2.02 0003	Pelaksanaan penatausahaan dan penguji /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		0	0			Rp -	Rp -

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
										TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3					4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Tersedianya Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Muaro Sijunjung	18 laporan	18 laporan	21.500.000,00	22.926.500	Rp 21.144.000	(Rp1.782.500)
	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	**2**	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses tepat waktu**		**0**	**0**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Muaro Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Muaro Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Muaro Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Muaro Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	17	01	2.05	0011	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Muaro Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	1.Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	**2**	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**		**100 persen**	**100 persen**	**Rp 138.000.000**	**Rp 106.380.800**	**Rp 42.483.000**	**(Rp63.897.800)**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Muaro Sijunjung	1 paket	1 paket	3.000.000	1.958.000	Rp 966.400	(Rp991.600)
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Peralatan rumah Tangga	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0	0			Rp -	Rp -

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Muaro Sijunjung	1 paket	1 paket	30.000.000	22.488.100	Rp 9.230.200	(Rp13.257.900)
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 17 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	0			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 17 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muaro Sijunjung	12 laporan	0	5.000.000		Rp -	Rp -
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	2 17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Muaro Sijunjung	12 laporan	12 laporan	100.000.000	81.934.700	Rp 32.286.400	(Rp49.648.300)
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 17 01 2.06 0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 17 01 2.06 0011	Dukungan pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0			Rp -	Rp -
	Meningkatnya pengelolaan Aset OPD	**2 17 01 2.07**	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**		**0**	**0**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 17 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	2 17 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Mebel	2 17 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 17 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor dan bamgunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 17 01 2.07 0011	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg disediakan		0	0			Rp -	Rp -
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	**2 17 01 2.08**	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100 persen**	**100 persen**	**Rp 312.604.000**	**Rp 324.233.044**	**Rp 238.921.256**	**(Rp85.311.788)**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0			Rp -	Rp -
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muaro Sijunjung	12 laporan	12 laporan	166.500.000	176.583.044	Rp 96.341.256	(Rp80.241.788)
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 17 01 2.08 0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	12 laporan	12 laporan	10.000.000	13.670.000	Rp 10.100.000	(Rp3.570.000)
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 17 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	12 laporan	12 laporan	136.104.000	133.980.000	Rp 132.480.000	(Rp1.500.000)
	Meningkatnya pengelolaan Aset OPD	**2 17 01 2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan daerah**	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik**	Muaro Sijunjung	**100 persen**	**100 persen**	**Rp 143.324.408**	**Rp 117.254.526**	**Rp 77.657.650**	**Rp (39.596.876)**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 17 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Muaro Sijunjung	29 unit	29 unit	133.336.850	94.898.600	Rp 64.250.000	(Rp30.648.600)
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	2 17 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 17 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Muaro Sijunjung	2 unit	2 unit	5.107.558	15.035.926	Rp 7.307.650	(Rp7.728.276)
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 17 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 17 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit			Rp -	Rp -
	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 17 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Muaro Sijunjung	28 unit	10 unit	4.880.000	7.320.000	Rp 6.100.000	(Rp1.220.000)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
			URUSAN KOPERASI DAN UKM	**1. Persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi**		**3,50**	**3,50**	**Rp 268.265.839**	**Rp 229.601.900**	**Rp 106.882.719**	**(Rp122.719.181)**
	Meningkatnya Pendapatan Koperasi			**2. Persentase Usaha Mikro yang naik kelas**		**42,50**	**42,50**	**Rp 82.706.539**	**Rp 157.878.000**	**Rp 60.280.600**	**(Rp97.597.400)**
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Meningkatnya koperasi yang berkualitas**	**2 17 02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang berkualitas**		**0,00**	**0,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Meningkatnya koperasi sehat	**2 17 02 2.01**	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi sehat**		**0,00**	**0,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Unit	Unit			Rp -	Rp -
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	**2 17 03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persenstase koperasi yang berkualitas**		**61,48**	**61,48**	**Rp 17.186.550**	**Rp 28.701.150**	**Rp 21.758.350**	**(Rp6.942.800)**
	Meningkatnya koperasi sehat	**2 17 03 2.01**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi sehat**		**40,00**	**40,00**	**Rp 17.186.550**	**Rp 28.701.150**	**Rp 21.758.350**	**(Rp6.942.800)**
	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 17 03 2.01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	17.186.550,00	28.701.150	Rp 21.758.350	(Rp6.942.800)
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	**2 17 04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas**		**61,48**	**61,48**	**Rp 11.815.139**	**Rp 29.298.700**	**Rp 22.048.150**	**(Rp7.250.550)**
	Meningkatnya koperasi sehat	**2 17 04 2.01**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi sehat**	**100**	**40,00**	**40,00**	**Rp 11.815.139**	**Rp 29.298.700**	**Rp 22.048.150**	**(Rp7.250.550)**

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
										TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3					4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Sijunjung	22 Unit Usaha	22 Unit Usaha	11.815.139,00	29.298.700	Rp 22.048.150	(Rp7.250.550)
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	**2**	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan**		**0,00**	**0,00**	**Rp 20.282.208**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Meningkatnya koperasi sehat	**2**	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi sehat**	Kab. Sijunjung	**0,00**	**0,00**	**Rp 20.282.208**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Sijunjung	85 orang	85 orang	20.282.208		Rp -	Rp -
	Berkembangnya usaha koperasi	**2**	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan unit usaha koperasi**		**3,93**	**3,93**	**Rp 33.422.642**	**Rp 99.878.150**	**Rp 16.474.100**	**(Rp83.404.050)**
	Meningkatnya permodalan koperasi	**2**	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.Persentase koperasi yang meningkat Permodalannya. 2. Persentase terbentuknya KDMP**		**3%**	**3% 100%**	**Rp 33.422.642**	**Rp 99.878.150**	**Rp 16.474.100**	**(Rp83.404.050)**
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan	2	17	06	2.01	0001	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1. Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan. 2. Jumlah koperasi baru yang terbentuk	Kab. Sijunjung	75 Orang	531 orang	33.422.642	99.878.150	Rp 16.474.100	(Rp83.404.050)
		2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		0	62 unit			Rp -	Rp -
	Meningkatnya Usaha Mikro yang Naik Kelas						**Urusan UKM**					**Rp 185.559.300**	**Rp 71.723.900**	**Rp 46.602.119**	**(Rp25.121.781)**
	Meningkatnya akses pembiayaan usaha mikro dan koperasi dari investasi dana bergulir	**2**	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Penambahan Unit Usaha yang difasilitasi akses pembiayaan melalui investasi dana bergulir**		**6,45**	**6,45**	**Rp 155.000.000**	**Rp 41.136.800**	**Rp 24.981.019**	**(Rp16.155.781)**

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
										TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3					4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui investasi dana bergulir	**2**	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah penambahan Unit Usaha yang difasilitasi permodalannya dari Dana Bergulir**		**2 Unit Usaha**	**2 Unit Usaha**	**Rp 155.000.000**	**Rp 41.136.800**	**Rp 24.981.019**	**(Rp16.155.781)**
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kemitraan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Sijunjung	34 Unit Usaha	34 Unit Usaha	155.000.000	41.136.800	Rp 24.981.019	(Rp16.155.781)
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	**2**	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**1. Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro**		**5,5 Persen**	**5 Persen**	**Rp 30.559.300**	**Rp 30.587.100**	**Rp 21.621.100**	**(Rp8.966.000)**
								2. Persentase Peningkatan Asset Usaha Mikro		**3,5 Persen**	**3 Persen**				
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	**2**	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi faktor produksinya**		**85 Unit Usaha**	**50 Unit Usaha**	**Rp 30.559.300**	**Rp 30.587.100**	**Rp 21.621.100**	**(Rp8.966.000)**
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2	17	08	2.01	0001	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi faktor produksinya	Kab. Sijunjung	85 Unit usaha	50 Unit usaha	30.559.300	30.587.100	Rp 21.621.100	(Rp8.966.000)
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	**Meningkatnya Nilai Transaksi Perdagangan**	**3**	**30**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**	**1. Persentase Kenaikan Omset Perdagangan**		**6,50**	**6,50**	**Rp 1.026.479.500**	**Rp 731.432.481**	**Rp 460.260.394**	**(Rp271.172.087)**
								2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha perdagangan		**50,00**	**50,00**				
	Meningkatnya Fasilitasi Usaha Perdagangan	**3**	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana**		**33,32**	**25**	**Rp 735.630.000**	**Rp 552.115.256**	**Rp 325.351.463**	**(Rp226.763.793)**
								2. Persentase Pengelola Pasar yang dibina		**58**	**30**				
	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	**3**	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1. Persentase Sarana Perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi**		**8**	**2**	**Rp 725.630.000**	**Rp 547.799.825**	**Rp 323.331.290**	**(Rp224.468.535)**
								2. Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Sarana		**5**	**3,5**				
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sijunjung	1 Unit	1 Unit	608.630.000	Rp 448.879.375	Rp 243.010.840	(Rp205.868.535)
								2. Jumlah Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sijunjung	72 Unit	20 Unit				
							- Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Los Pasar Koto Baru			*1 unit*	*1 unit*		Rp 9.813.375	Rp 7.500.000	(Rp2.313.375)
							- Rehab Los Pasar Koto Baru			*1 unit*	*1 unit*		Rp 181.320.000	Rp 153.987.680	(Rp27.332.320)

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
										TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3					4	5	6	7	9	10	11	12	13
							- Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Los Pasar Koto Baru			*1 unit*	*1 unit*		Rp 9.650.000	Rp 9.650.000	Rp0
							- Belanja Modal Gerobok Etalase			*72 unit*	*20 unit*		*Rp 230.400.000*	*Rp 64.000.000*	(Rp166.400.000)
	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengeloaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sijunjung	2 unit	2 unit	117.000.000	Rp 98.920.450	Rp 80.320.450	(Rp18.600.000)
	Meningkatnya Kualitas Pengelola Pasar	**3**	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase peningkatan Pengelola Pasar yang dibina dan diawasi**		**11**	**5**	**Rp 10.000.000**	**Rp 4.315.431**	**Rp 2.020.173**	**(Rp2.295.258)**
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada penegelola sarana Distribusi Perdagangan	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Sijunjung	30 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000	4.315.431	Rp 2.020.173	(Rp2.295.258)
	Meningkatnya Stabilitas Harga Bapokting	**3**	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**1. Persentase Gejolak Harga Bapokting yang di monitoring**		**100,00**	**100,00**	**Rp 97.908.100**	**Rp 51.373.050**	**Rp 28.000.681**	**(Rp23.372.369)**
								2. Persentase Pengawasan Pupuk Bersubsidi Lini 3 dan 4		**100,00**	**100,00**				
	Meningkatnya monitoring harga bapokting, operasi pasar/pasar murah	**3**	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**1. Jumlah pasar yang di monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting**		**10 pasar**	**10 pasar**	**Rp 8.562.650**	**Rp 3.565.723**	**Rp 1.568.100**	**(Rp1.997.623)**
								2. Jumlah operasi pasar/pasar murah		**10 Kali**	**10 Kali**				
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sijunjung	10 laporan	10 laporan	8.562.650	3.565.723	Rp 1.568.100	(Rp1.997.623)
	Meningkatnya monitoring harga bapokting, operasi pasar/pasar murah	**3**	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk pasar**	**1. Jumlah pasar yang di monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting**		**10 pasar**	**10 pasar**	**Rp 72.908.050**	**Rp 39.126.027**	**Rp 22.475.031**	**(Rp16.650.996)**
								2. Jumlah operasi pasar/pasar murah		**10 Kali**	**10 Kali**				
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Sijunjung	208 laporan	208 laporan	44.615.300	27.146.450	Rp 18.650.200	(Rp8.496.250)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota	30 04 02 0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Jumlah Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	10 laporan	10 laporan	28.292.750	11.979.577	Rp 3.824.831	(Rp8.154.746)
	Meningkatnya Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	**3 30 04 2.03**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Lini 3 dan 4**	Kab. Sijunjung	**15 kali**	**15 kali**	**Rp 16.437.400**	**Rp 8.681.300**	**Rp 3.957.550**	**(Rp4.723.750)**
	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3 30 04 **2.03** 0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		30 laporan	30 laporan	16.437.400	8.681.300	Rp 3.957.550	(Rp4.723.750)
	Meningkatnya Kepercayaan Konsumen	**3 30 06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**1. Persentase penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai ketentuan**		**75**	**75**	**Rp 53.159.900**	**Rp 37.820.100**	**Rp 20.727.250**	**(Rp17.092.850)**
				2. Persentase BDKT yang Beredar sesuai aturan		**50**	**50**				
	Meningkatnya PelayananTera / Tera Ulang	**3 30 06 2.01**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**1. Persentase UTTP wajib tera yang ditera/Tera Ulang**		**37,02**	**37,02**	**Rp 53.159.900**	**Rp 37.820.100**	**Rp 20.727.250**	**(Rp17.092.850)**
	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pemilik UTTP			**2. Persentase Pemilik UTTP yang diawasi**		**100**	**100**				
				3. Persentase Pemilik UTTP yang dibina		**100**	**100**				
	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan dan Pelaku Usaha BDKT			**4. Persentase Pelaku usaha BDKT yang di awasi**		**100**	**100**				
				5. Persentase Pelaku Usaha BDKT yang dibina		**100**	**100**				
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang ditera dan tera Ulang	Kab. Sijunjung	850 Unit	600 Unit	25.558.400	21.978.850	Rp 6.460.550	(Rp15.518.300)
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Sijunjung	350 orang	350 orang	27.601.500	15.841.250	Rp 14.266.700	(Rp1.574.550)
	Meningkatnya Promosi Dagang	**3 30 07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan omset Pelaku usaha yang difasilitasi Promosinya**		**2,50 Persen**	**2,50 Persen**	**Rp 139.781.500**	**Rp 90.124.075**	**Rp 86.181.000**	**(Rp3.943.075)**
	Meningkatnya Event yang Diikuti	**3 30 07 2.01**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Promosi**		**50 unit**	**50 unit**	**Rp 139.781.500**	**Rp 90.124.075**	**Rp 86.181.000**	**(Rp3.943.075)**
				2. Jumlah produk yang dipromosikan		**50 Orang**	**50 Orang**			**Rp -**	**Rp0**

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
										TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3					4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Luar dan Dalam Propinsi	**50 Unit usaha**	**50 Unit usaha**	139.781.500	90.124.075	Rp 86.181.000	(Rp3.943.075)
		3	**31**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**	**1. Persentase Peningkatan Pelaku IKM**		**5**	**5**	**Rp 257.820.900**	**Rp 499.478.700**	**Rp 260.782.850**	**(Rp238.695.850)**
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor perindutrian	**Meningkatnya daya saing Produk Industri Kecil Menengah**							**2. Persentase Kenaikan Omset IKM**		**2,50**	**2,50**				
	1. Meningkatnya Sentra IKM	**3**	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**1. Persentase pengembangan sentra**		**25,00**	**25,00**	**Rp 237.660.900**	**Rp 481.500.700**	**Rp 244.039.850**	**(Rp237.460.850)**
								2. Persentase ketersediaan produk unggulan		**15,00**	**15,00**				
	3. Meningkatnya mutu produk IKM							**3. Persentase Produk yang bersertifikasi**		**64,00**	**64,00**				
								4. Persentase peningkatan informasi pelaku usaha di SIINas		**6,00**	**6,00**				
	Meningkatnya sarana dan prasarana Sentra IKM	**3**	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**1.Jumlah Sarana Prasarana sentra IKM yang diadakan**		**2 Paket**	**0 Paket**	**Rp 237.660.900**	**Rp 481.500.700**	**Rp 244.039.850**	**(Rp237.460.850)**
	Meningkatnya Kelembagaan Sentra IKM							**2. Jumlah Kelembagaan sentra yang dibentuk**		**2 Sentra**	**1 Sentra**				
	Meningkatnya Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah di Sentra							**3. Jumlah Industri Kecil Menengah Sentra yang dibina**		**5 Sentra**	**2 Sentra**				
	Meningkatnya Pengembangan Produk Unggulan Daerah							**4. Jumlah Produk Industri Kecil Menengah yg dikembangkan**		**10 Produk**	**10 Produk**				
	Meningkatnya Pembinaan IKM Produk Unggulan Daerah							**5. Jumlah IKM produk unggulan yang dibina**		**50 IKM**	**40 IKM**				
	Meningkatnya Produk IKM yang tersertifikasi							**6. Jumlah produk tersertifikasi**		**15 Produk**	**15 Produk**				
	Meningkatnya kualitas SDM Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah							**7. Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah mengikuti pelatihan**		**30 IKM**	**10 IKM**				
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi Singkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Sijunjung	2 dokumen	2 dokumen	23.898.000	27.866.600	Rp 23.145.600	(Rp4.721.000)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sijunjung	2 dokumen	2 dokumen	23.200.000	21.012.000	Rp 16.085.000	(Rp4.927.000)
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sijunjung	2 dokumen	2 dokumen	190.562.900	432.622.100	Rp 204.809.250	(Rp227.812.850)
	Meningkatnya Kepatuhan pemenuhan komitmen IKM	**3 31 03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/ KOTA**	**Persentase IKM yang memenuhi komitmen standar usaha industri**		**0,00**	**0,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Meningkatnya Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	**3 31 03 2.01**	**Penerbitan Izin Usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI) izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten / Kota**	**Jumlah Industri Kecil Menengah yang Menerapkan Pengendalian Mutu Terpadu**		**0**	**0**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	3 31 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI< IPUI< IUKIdan IPKI kewenangan kab/kota	Kab. Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	Terfasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	3 31 03 2.01 0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Sijunjung	0	0			Rp -	Rp -
	Meningkatnya Perizinan Industri Kecil Menengah	**3 31 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase peningkatan informasi pelaku usaha di SIINas**		**6,00**	**6,00**	**Rp 20.160.000**	**Rp 17.978.000**	**Rp 16.743.000**	**(Rp1.235.000)**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KURUSAN/ BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						TAGRGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APDB TAHUN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Fasilitasi perizinan IKM	**3 31 04 2.01**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Industri Kecil Menengah yang difasilitasi perizinannya**		**80 IKM**	**30 IKM**	**Rp 20.160.000**	**Rp 17.978.000**	**Rp 16.743.000**	**(Rp1.235.000)**
	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri IKM			**Persentase IKM yang update data di SIINas**		**58 Persen**	**58 Persen**				
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen	20.160.000	17.978.000	Rp 16.743.000	(Rp1.235.000)
	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	3 31 04 2.01 0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Dokumen	Dokumen			Rp -	Rp -
	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3 31 04 2.01 0002	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan kawasan industri lingkup kab/kota dalam penyampaian data SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dokumen	Dokumen			Rp -	Rp -
			Total					**Rp 5.878.952.864**	**Rp 6.117.064.275**	**Rp 5.284.644.793**	**(Rp832.419.482)**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung yang di dalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah. Adanya Perubahan Rencana Kerja ini dan dengan dirasionalisasikannya anggaran diharapkan agar Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung serta seluruh aparaturnya tetap dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,akurat, transparan dan adil.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja aparatur Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kearah yang lebih baik dimasa akan datang

Muaro Sijunjung, September 2025

KEPALA DINAS DAGPERINKOP UKM

HASMIZON, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19671202 199308 1 001

Pemerintah Daerah
Kabupaten Sijunjung

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Tahun 2025

DPMN

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa kepala organisasi perangkat daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2025 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan serta perubahan akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis dan Program serta Kegiatan yang akan dijalankan pada Tahun 2025.

Sebagai lembaga teknis di bidang urusan pemberdayaan Masyarakat dan nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan kualitas di bidang urusan pemberdayaan Masyarakat dan nagari di Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, April 2025
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19760507 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 5
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMN sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 19
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 20
BAB III PENUTUP 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 5
Tabel 2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra DPMN 6
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) 12
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) 12
Tabel 2.5. Pengukuran IDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 13
Tabel 2.6. Peringkat Provinsi Sumatera Barat IDM Status Mandiri Tahun 2024 13
Tabel 2.7. Rekapitulasi Status IDM Tahun 2020-2024 14
Tabel 2.8. Isu-isu Strategis DPMN 14
Tabel 2.9. Permasalahan/Hambatan DPMN 15
Tabel 2.10. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 16
Tabel 2.11. Daftar BUMNAG yang Sudah Berbadan Hukum 16
Tabel 2.12. Daftar Kecamatan dan BUMDESMA yang Berbadan Hukum 17
Tabel 2.13. Status Jumlah Nagari per Kecamatan Tahun 2024 17
Tabel 2.14. Daftar Lembaga KAN yang Aktif dan Sangat Aktif Tahun 2024 17
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Startegis dan Arah Kebijakan DPMN 19
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMN Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 21
Tabel 3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan Rencana Strategis (Renstra). Komponen-komponen yang terkandung di dalam Renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Oleh karena itu, target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja ini dikaitkan dengan kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung yang dijabarkan dalam usulan kegiatan dan administrasi umum. Usulan tersebut kemudian dievaluasi dari aspek anggaran yang ada, selanjutnya usulan kegiatan teknis dan administrasi umum yang mendapat alokasi anggaran kemudian digabungkan menjadi satu rencana kegiatan tahunan.

Dengan demikian rencana kegiatan tahunan adalah suatu rencana kinerja yang telah tersedia anggarannya yaitu anggaran untuk membiayai kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dalam rangka mencapai sasaran dengan dukungan dana baik dari APBD maupun APBN melalui dana dekonsentrasi.

Komponen-komponen yang terkandung didalam Rencana Kerja Tahun 2025 meliputi sasaran strategis dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Setiap sasaran strategis kemudian diuraikan lebih rinci ke dalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target-target untuk kegiatan dirinci ke dalam indikator input, output dan outcome.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan)* tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung selama tahun 2025 tersebut. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran. Pada akhirnya target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefinisikan dalam rencana kinerja dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Nagari kabupaten Sijunjung.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 30 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
15. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketetapan strategis dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan Rencana Kerja ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagarai Kabupaten Sijunjung disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam rangka pencapaian target kinerja.

2. Tujuan

   Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta memberikan pedoman bagi seluruh bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDATAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2025 serta program/kegiatan dan kebutuhan dana indikatif dan sumber dana tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung tahun 2025

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025, salah satu faktor yang menjadi masukan, pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan I tahun 2025 yang menjadi dasar masukan bagi perencanaan tahun berikutnya dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta kaitannya dengan rencana strategis yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Sijunjung.

Capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai barikut :

Tabel 2.1.
Target dan Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
				Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	78,36	79,00	79,00
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	66%	69%	69%
3.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat	Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif	16%	-	-

Untuk indikator kinerja persentase peningkatan lembaga adat yang aktif tahun 2025 tidak dibuatkan lagi target kinerjanya karena sudah tercapai, semua Lembaga KAN yang ada sudah berstatus aktif dan sangkat aktif.

Tabel 2.2.
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten sijunjung sampai Triwulan I

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2025)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11		13=12/4*100	
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai indeks pelayanan publik perangkat daerah**	**95**	**18.962.000.000**	**100**	**12.346.272.082**	**95**	**2.928.446.733**		**736.011.684**	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	**736.011.684**	**100**	**12.987.755.504**	**100**	**68,49**
						Nilai indeks profesional ASN perangkat daerah	**80**		**85%**		**80**				**0**		**0**		**0**		**0**					
						Nilai indeks kepatuhan arsip	**46**		**45%**		**46**				**0**		**0**		**0**		**0**					
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP perangkat daerah	**100%**		**100 %**		**100 %**				**0**		**0**		**0**		**0**					
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu**	**95%**	**316.000.000**	**95%**	**158.684.300**	**95%**	**17.942.000**	**95%**	**7.326.000**	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**1**	**7.326.000**	**95%**	**161.957.300**	**95%**	**51,25**
						Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**										**100%**		**100%**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	182.000.000	3	142.784.300	3	16.848.000	3	6.244.000	0	-	0	-	0	-	3	6.244.000	3	149.028.300		81,88
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	62.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikgtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	72.000.000	3	11.847.000	3	1.094.000	3	1.082.000	0	-	0	-	0	-	3	1.082.000	3	12.929.000		17,96
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	40.000.000	1	4.053.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	4.053.000		10,13
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel**	**100%**	**14.858.000.000**	**100%**	**9.152.595.863**	**100%**	**2.545.315.655**	**100**	**618.458.112**	0	-	0	-	0	-	100	**618.458.112**	**100**	**9.771.053.975**		**65,76**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	14.476.000.000	23	8.950.668.463	23	2.528.782.655	23	611.197.112	0	-	0	-	0	-	23	611.197.112	23	9.561.865.575		66,05
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	268.000.000	3	130.177.600	3	13.893.000	3	4.650.000	0	-	0	-	0	-	3	4.650.000	3	134.827.600		50,31
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	60.000.000	1	24.729.000	1	2.640.000	1	2.611.000	0	-	0	-	0	-	1	2.611.000	1	27.340.000		45,57

2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	54.000.000	13	47.020.800	13	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13	47.020.800		87,08
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangakat Daerah**	**Persentase aset OPD dalam keadaan baik**	**80%**	**26.000.000**	**100**	-	**100**	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-
2	13	01	**2.03**	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	26.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**148.000.000**	**49**	**24.000.000**	**100**	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	**49**	**24.000.000**		**16,22**
2	13	01	**2.05**	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	148.000.000	49	24.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	49	24.000.000		16,22
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi**	**95%**	**961.000.000**	**100%**	**647.618.857**	**95%**	**87.720.200**		**36.150.450**	0	-	0	-	0	-	0	**36.150.450**	**100**	**683.769.307**		**71,15**
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	34.000.000	2	23.042.200	1	23.042.200	2	1.998.150	0	-	0	-	0	-	2	1.998.150	1	25.040.350		73,65
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	1	34.000.000	0	10.416.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	10.416.000		30,64
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	52.000.000	2	115.895.800	1	15.731.700	2	8.850.800	0	-	0	-	0	-	2	8.850.800	2	124.746.600		239,90
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	62.000.000	2	56.914.950	2	4.551.900	2	2.417.400	0	-	0	-	0	-	2	2.417.400	2	59.332.350		95,70
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	36.000.000	3	19.836.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	19.836.000		55,10
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	130.000.000	1	89.803.450	1	10.576.400	1	5.395.000	0	-	0	-	0	-	1	5.395.000	1	95.198.450		73,23
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198	613.000.000	13	331.710.457	50	33.818.000	1	17.489.100	0	-	0	-	0	-	1	17.489.100	1	349.199.557		56,97
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan**	**100**	**642.000.000**	**100**	**447.519.800**		-		-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	-		**447.519.800**		**69,71**
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6	179.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-		-
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	140	131.000.000	12	61.058.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		61.058.000		46,61
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6	511.000.000	9	386.461.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		386.461.800		75,63
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi**	**95%**	**1.174.000.000**	**100%**	**1.201.775.958**	**95%**	**155.153.528**	**100**	**41.084.394**	**0**	-	**0**	-	**0**	-	**100**	**41.084.394**	**100**	**1.239.680.352**		**105,59**

2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.000.000	1	3.180.000	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	3.180.000		79,50
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik, air dan telefon/fax yang dibayarkan	3	396.000.000	5	322.019.673	3	48.167.528	3	16.759.894	0	-	0	-	0	-	3	16.759.894	3	338.779.567		85,55
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	34.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	1	740.000.000	2	876.576.285	2	106.986.000	2	24.324.500	0	-	0	-	0	-	2	24.324.500	2	900.900.785		121,74
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset OPD dalam kondisi baik**	**85%**	**863.000.000**	**100%**	**714.077.304**	**85%**	**122.315.350**		**32.992.728**	0	-	0	-	0	-	0	**32.992.728**	**100**	**659.774.770**		**76,45**
2	13	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	106.040.000	1	87.295.262	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15	87.295.262		82,32
2	13	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	671.960.000	14	430.955.342	15	76.018.350	15	23.772.728	0	-	0	-	0	-	15	23.772.728	15	454.728.070		67,67
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	21.000.000	50	122.320.000	50	34.075.000	11	9.220.000	0	-	0	-	0	-	11	9.220.000	11	131.540.000		626,38
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	64.000.000	1	73.506.700	1	12.222.000	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	73.506.700		114,85
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Perentase Nagari yang dilaksanakan penataan nagarinya**	**10**	**979.000.000**		**274.342.225**	**10%**	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	**10**	**274.342.225**		**28,02**
						Jumlah desa mandiri	**9 nag**				**9 nag**				0		0		0		0					
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase nagari yang ditata sesuai peraturan perundangan**	**100**	**979.000.000**	**100**	**274.342.225**	**100**	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-		**274.342.225**		**28,02**
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa		221.000.000	0	48.832.085		-		-	0	-	0	-	0	-	0		0	48.832.085		22,10
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana		979.000.000	61	225.510.140	61	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	61	225.510.140		23,03
						Jumlah Tenaga Pelaksana Kegiatan yang dibina			61		61				0	-	0	-	0	-	0	-	61			
						Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam bulan bhakti TNI			-						0		0		0		0					
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase peningkatan kerja sama desa**	**5%**	**100.000.000**	**5%**	**46.591.500**	**5%**	**1.986.450**		**366.000**	0	-	0	-	0	-	0	**366.000**	**1**	**46.957.500**		**46,96**

2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Persentase kerjasana desa yang difasilitasi**	**10%**	**100.000.000**	**33%**	**46.591.500**	**10%**	**1.986.450**	**1**	**366.000**	0	-	0	-	0	-	1	**366.000**	1	**46.957.500**		**46,96**
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari yang melaksanakan kerjasama antar desa	1	100.000.000	1	46.591.500	1	1.986.450	1	366.000	0	-	0	-	0	-	1	366.000	1	46.957.500		46,96
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase administrasi pemerintahan desa yang berkinerja baik**	**45%**		**45%**		**45%**		**10**		0		0		0		10		**10**			
						Indeks transparansi dana desa	**84**	**12.062.000.000**	**82**	**8.670.877.239**	**84**	**1.345.724.820**		**349.841.169**	0	-	0	-	0	-	0	**349.841.169**	0	**9.020.718.408**		**74,79**
						Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi terhadap PAN	**62,29 %**		**59%**		**62,29 %**				0		0		0		0		0			
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**35%**		**50%**		**35%**				0		0		0		0					
						Persentase desa yang memiliki nilai evaluasi pemerintahan desa dengan skor 90	**100%**		**100%**		**100%**				0		0		0		0					
						Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang dibina	**62,29%**		**59%**		**62,29%**				0		0		0		0					
						Persentase desa yang menyampaikan laporan aset tepat waktu	**95%**		**90%**		**95%**				0		0		0		0					
						Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa		**12.062.000.000**	**15%**	**8.670.877.239**		**1.345.724.820**		**349.841.169**	0	-	0	-	0	-	0	**349.841.169**		**9.020.718.408**		**74,79**
						Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	**50%**		**70%**		**50%**				0		0		0		0					
						Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	**95%**		**90%**		**95%**				0		0		0		0					
						Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi perkembangan desa dengan kategori berkembang	**50%**		**80%**		**50%**				0		0		0		0					
						Persentase dokumen perencanaan desa yang sesuai aturan	**81%**		**73%**		**81%**				0		0		0		0					
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi penyelenggaraan administrasi nagarinya	186	285.000.000	62	228.865.514	62	64.127.400	61	16.226.400	0	-	0	-	0	-	61	16.226.400	122	245.091.914		86,00
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	5	120.000.000	1	4.177.400	1	1.842.400	61	-	0	-	0	-	0	-	61	-	122	4.177.400		3,48
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	62	598.000.000	62	371.117.610	62	37.727.550	61	9.031.200	0	-	0	-	0	-	61	9.031.200	122	380.148.810		63,57
						Jumlah tenaga penyusun dokumen perencanaan yang dibina	62		62		62				0		0		0		0					
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari yang dibina dalam pengelolaan Keuangan Nagari	62	5.970.000.000	62	4.928.921.990	62	1.150.455.970	61	303.383.819	0	-	0	-	0	-	61	303.383.819	122	5.232.305.809		87,64
						Jumlah nagari yang difasilitasi pembayaran BPJS Kesehatan	62		62		62		61		0		0		0		61		122			

2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah walinagari nagari yang meningkat kompetensinya		115.000.000	0	1.097.429.473	0	31.293.800	17	7.549.800	0	-	0	-	0	-	17	7.549.800	34	1.104.979.273		960,85
						Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang meningkat kompetensinya	93		143		0				0		0		0		0				
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam proses musyawarah pembangunan Nagari	62	220.000.000	1	63.713.250	12	3.138.600		-	0	-	0	-	0	-	0	-	112	63.713.250		28,96
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari yang dibina	2	871.000.000	22	539.471.430	3	41.337.750		13.649.950	0	-	0	-	0	-	0	13.649.950	122	553.121.380		63,50
						Jumlah Bumnag yang dinilai									0		0		0		0					
						Jumlah badan kerjasama antar Nagari yang dibina									0		0		0		0					
						Jumlah ex PNPM yang dibina									0		0		0		0					
						Jumlah produk hukum nagari yang ditetapkan									0		0		0		0					
						Jumlah produk hukum nagari yang di evaluasi									0		0		0		0					
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah nagari yang melaksanakan pilwana	6	1.889.000.000	1	584.031.664	1	2.188.000		-	0	-	0	-	0	-	0	-	16	584.031.664		30,92
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	110.000.000	1	2.369.000	1	1.028.600	61	-	0	-	0	-	0	-	61	-	122	2.369.000		2,15
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan pendayagunaan aset Nagari	124	419.000.000	61	118.581.150	62	4.099.650	61	-	0	-	0	-	0	-	61	-	122	118.581.150		28,30
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPN yang meningkat kompetensinya	35	323.000.000	30	280.437.330	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	61	280.437.330		86,82
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase tahapan penetapan dan penegasan batas administrasi nagari	30	715.000.000	10	432.960.128	2	5.461.150		-	0	-	0	-	0	-	0	-	20	432.960.128		60,55
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	124	85.000.000	1	3.949.350	62	1.001.850		-	0	-	0	-	0	-	0	-	61	3.949.350		4,65
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	2	342.000.000	1	14.851.950	1	2.022.100		-	0	-	0	-	0	-	0	-	20	14.851.950		4,34
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase lembaga adat yang aktif**	**84%**		**84%**		**84%**				0		0		0		0					
					LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	**Persentase usaha ekonomi masyarakat yang aktif**	**59%**	**5.320.000.000**	**50%**	**5.602.650.576**	**59%**	**372.827.095**		**63.828.790**		-		-		-		**63.828.790**		**5.666.479.366**		**106,51**
					LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif**	**74%**		**65%**		**74%**				0		0		0		0					
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang**	**Jumlah lembaga adat yang dibina**	**49**		**49**		**49**				0	-	0	-	0	-	0					
					Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina**	**74%**	**5.320.000.000**	**65%**	**5.602.650.576**	**74%**	**372.827.095**		**63.828.790**								**63.828.790**		**5.666.479.366**		106,51

					Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	**Persentase usaha ekonomi masyarakat yang dibina**	**59%**		**50%**		**59%**																		
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Jorong, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lemabga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang difasilitasi			62		2		2		0		0		0		2		4			
						2. Jumlah posyandu yang difasilitasi dalam penilaian posyandu tingkat Kabupaten dan Provinsi		665.000.000		415.987.400	16	34.253.245		10.384.545	0	-	0	-	0	-	0	10.384.545	32	426.371.945		64,12
						3. Jumlah LPM yang difasilitasi dalam penilaian LPM tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi					-				0		0		0		0					
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah Pemangku Adat yang mengikuti pelatihan			128						0		0		0		0		128			
						2. Jumlah kader posyandu yang mengikuti pelatihan SIP Posyandu									0		0		0		0					
						3. Jumlah Kader PKK yang mengikuti pelatihan		1.387.000.000		1.663.071.950		53.454.450		-	0	-	0	-	0	-	0	-		1.663.071.950		119,90
						4. Jumlah anggota karang taruna yang mengikuti pelatihan									0		0		0		0					
2	13	05	2.01	07	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Nagari yang berpartisipasi dalam Terselenggaranya BBGRM dan Penilaian BBGRM serta Short	1	130.000.000	1	106.831.050	1	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	20	106.831.050		82,18
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah penilaian yang difasilitasi			8		8				0		0		0		0		16			
						2. Jumlah fasilitasi Jambore PKK yang dilaksanakan			2		3		1		0		0		0		1		5			
						3. Jumlah fasilitasi untuk kader stunting		3.138.000.000	62	3.416.760.176	62	285.119.400	62	53.444.245	0	-	0	-	0	-	62	53.444.245	122	3.470.204.421		110,59
						4. Jumlah fasilitasi untuk pelaksanaan pembinaan terhadap TP-PKK			70		70		70		0		0		0		70		140			
						5. Jumlah BOP PPK Kab. Sijunjung			1		1				0		0		0		0		2			
T O T A L								37.423.000.000	-	26.940.733.622		4.648.985.098		1.150.047.643		-		-		-		1.150.047.643		27.996.253.003		74,81

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa terdapat Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome)* dan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output)* yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Kunci Hasil (*IKK Outcome*)

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024
	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,00	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*IKK Output*)

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama desa	53	Peraturan bersama walinagari
	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	-	Peraturan bersama walinagari
	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang terfasilitasi dalam peningkatan dan diberdayakan	465	Dokumentasi kegiatan
	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	61	Jumlah BUMNAG yang terbentuk

Tabel 2.5.
Pengukuran IDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

KABUPATEN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	TOTAL
AGAM	0	0	9	41	42	92
DHARMASRAYA	0	0	8	20	24	52
KEP. MENTAWAI	0	6	24	10	3	43
KOTA PARIAMAN	0	0	0	30	25	55
KOTA SAWAHLUNTO	0	0	1	19	7	27
LIMA PULUH KOTA	0	1	1	33	44	79
PADANG PARIAMAN	0	0	37	45	21	103
PASAMAN	0	0	23	25	14	62
PASAMAN BARAT	0	1	46	35	8	90
PESISIR SELATAN	0	0	31	95	56	182
SIJUNJUNG	0	0	0	21	41	62
SOLOK	0	2	25	28	19	74
SOLOK SELATAN	0	0	5	19	15	39
TANAH DATAR	0	0	2	24	49	75
JUMLAH DESA/NAGARI	**0**	**10**	**212**	**445**	**368**	**1035**

Tabel 2.6.
Peringkat Provinsi Sumatera Barat IDM Status Mandiri Tahun 2024

KAB/KOTA	Desa/Nagari	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
Lima Puluh Kota	Sarilamak	0,9714	0,9667	1	0,9794	Mandiri
Tanah Datar	Baringin	0,9714	0,9833	0,93333	0,9627	Mandiri
Lima Puluh Kota	Situjuah Batua	0,9543	1	0,9333	0,9625	Mandiri
Dharmasraya	Sungai Rumbai Timur	0,98290	0,9667	0,9333	0,961	Mandiri
Lima puluh Kota	Mungo	0,9657	0,9833	0,9333	0,9608	Mandiri
Kota Sawahlunto	Silungkang Tigo	0,8686	1	1	0,9562	Mandiri
Sijunjung	Muaro	0,9829	1	0,8667	0,9498	Mandiri
Solok	Cupak	0,96	0,95	0,9333	0,9478	Mandiri
Agam	Lubuk Basung	0,9657	1	0,8667	0,9441	Mandiri
Solok	Muaro Paneh	0,8914	0,9333	1	0,9416	Mandiri

Tabel 2.7.
Rekapitulasi Status IDM Tahun 2020-2024

STATUS	2020		2021		2022		2023		2024	
MANDIRI	4	6,56%	9	14,75%	9	14,75%	21	33,87%	41	66,13%
MAJU	18	29,51%	24	39,34%	24	39,34%	27	43,55%	21	33,87%
BERKEMBANG	39	63,93%	28	45,90%	28	45,90%	14	22,58%	0	0,00%
TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung tetap mempertimbangkan isu-isu penting dan strategis sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, secara garis besar isu-isu strategis yang perlu diperhatikan terhadap penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Isu-isu Strategis DPMN

Aspek	Isu-isu Strategis
Ekonomi dan Investasi	➢ Kurang berkembangnya usaha BUMNag dan Bumdesa Bersama ➢ Rendahnya akses modal untuk usaha di nagari/desa ➢ Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan di nagari/desa ➢ Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi
Sosial, Budaya dan Lingkungan	➢ Belum optimalnya penanganan stunting di nagari/desa ➢ Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM nagari/desa ➢ Potensi konflik pertanahan/batas nagari ➢ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat di nagari/desa ➢ Memudarnya nilai-nilai kearipan lokal, gotong royong, dan modal sosial
Sarana dan Prasarana	➢ Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi (nagari/desa online) ➢ Terbatasnya sarana dan prasarana nagari/desa (transportasi, telekomunilasi, air bersih) ➢ Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar nagari/desa dalam Kawasan dan antar Kawasan ➢ Belum tersedianya peta batas administrasi nagari/desa

Tata kelola (Manajemen)	➢ Belum optimalnya peran pemerintah nagari/desa dalam membangun wilayah secara mandiri ➢ Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja organisasi ➢ Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan nagari/desa, baik administrasi pemerintahan maupun administrasi keuangan

Berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam penyelenggaran tugas dan fungsi urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Permasalahan / Hambatan DPMN

PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi Nagari/Desa (Manajemen Usaha);	• Penyusunan laporan keuangan BUMNag yang belum tertib; • Kurangnya kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi nagari/desa terkait kerjasama nagari/desa, mengelola administrasi pemerintahan nagari/desa yang baik, menyusun/ membuat peraturan-peraturan nagari/desa, masih kurang pengetahuan dalam pengisian aplikasi dan penginputan Siskeudes, sipades, profil desa, IDM; • Jaringan pendukung/akses internet yang terbatas/belum terjangkau dan kurangnya pengetahuan aparatur nagari/desa tentang IT;
Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan;	• Kurangnya perhatian lembaga kemasyarakatan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Belum optimalnya tingkat perkembangan nagari/desa	• Masih adanya aparatur nagari/ desa yang tidak ingin nagari/desanya naik status karna terkait Dana Desa; • Proporsi penggunaan dana desa berdasarkan dana desa dan jumlah dana yang diterima masyarakat menjadi permasalahan baru, kecemburuan sosial antar warga nagari/desa, kepercayaan terhadap pemerintah desa, serta permasalahan sosial lainnya.

Selanjutnya, identifikasi SWOT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang mencakup Strenghts (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman) dapat dijelaskan sebagai baerikut :

Tabel 2.10.
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL			
Strenghts (Kekuatan)		*Weaknesses* (Kelemahan)	
S1	Tersedianya regulasi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	W1	Sumber daya aparatur yang terbatas dalam pelaksanaan program kegiatan
S2	Indikator kinerja yang selaras dari level pelaksana hingga kepala dinas dalam upaya mencapai peningkatan status nagari/desa	W2	Sarana Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang masih belum menunjang pencapaian kinerja secara maksimal
S3	Tersedianya dukungan dokumen perencanaan		
IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL			
Opportunities (Peluang)		*Threats* (Ancaman)	
O1	Adanya dukungan dari SKPD lain terhadap pencapaian kinerja	T1	Belum semua nagari/desa yang berstatus mandiri
O2	Adanya kebijakan kab/kota yang mendukung pencapaian nagari/desa mandiri (data RPJMD kab, peraturan kab)	T2	Regulasi Pemerintah Pusat yang tidak konsisten maupun saling bertentangan

Dari analisis, situasi dan kecendrungan diatas dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir, maka isu strategis yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai berikut :

a. Rendahnya Tingkat perkembangan nagari/desa
b. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan nagari/desa
c. Masih rendahnya kapasitas perekonomian Masyarakat nagari/desa
d. Belum optimalnya SDM pengelolaan BUMNag

Tabel 2.11.
Daftar BUMNAG yang sudah berbadan hukum:

No	Kecamatan	Nagari	Bumnag/Bumdes	Ket
1.	Kamang Baru	1. Kamang	Baringin Gadang	
2.	Tanjung Gadang	2. Tanjung Gadang	Batang Kulampi	
3.	IV Nagari	3. Koto Baru	Ambacang Bakamba	
		4. Mundam Sakti	Kaboelatan	
4.	Sumpur Kudus	5. Kumanis	Batu Jonggi	
		6. TBA Selatan	Koto Gadang Jaya	

Tabel 2.12.
Daftar Kecamatan dan BUMDESMA yang berbadan hukum

No	Kecamatan	BUMDESMA	ket
1.	Kamang Baru	1. Bumdesma Kamang	
2.	Koto VII	2. Basambilan Koto	

Tabel 2.13.
Status Jumlah Nagari Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Nagari/Desa
1	IV Nagari	5	-	-	-	-	5
2	Kamang Baru	2	9	-	-	-	11
3	Koto VII	5	2	-	-	-	7
4	Kupitan	4	-	-	-	-	4
5	Lubuk Tarok	6	-	-	-	-	6
6	Sijunjung	5	4	-	-	-	9
7	Sumpur Kudus	10	1	-	-	-	11
8	Tanjung Gadang	4	5	-	-	-	9
T O T A L		**41**	**21**	**-**	**-**	**-**	**62**

Tabel 2.14.
Daftar Lembaga KAN yang Aktif dan Sangat Aktif Tahun 2024

NO	KECAMATAN	NAGARI	SKOR	KET
1	SIJUNJUNG	SILOKEK	94	Sangat Aktif
		SOLOK AMBAH	74	Aktif
		AIE ANGEK	94	Sangat Aktif
		SIJUNJUNG	87	Aktif
		DURIAN GADANG	95	Sangat Aktif
		PEMATANG PANJANG	87	Aktif
		KANDANG BARU	78	Aktif
		MUARO	74	Aktif
		PARU	75	Aktif
2	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG	87	Aktif
		LANGKI	86	Aktif
		TARATAK BARU DAN TARATAK BARU UTARA	76	Aktif
		PULASAN	94	Sangat Aktif
		SIBAKUR	73	Aktif
		TANJUNG LOLO	74	Aktif
		TIMBULUN DAN SINYAMU	79	Aktif

3	KAMANG BARU	LUBUK TARANTANG	89	Aktif
		PADANG TAROK	76	Aktif
		AIA AMO, TANJUNG KALIANG DAN MALORO	75	Aktif
		KUNPAR	71	Aktif
		SUNGAI BETUNG	90	Sangat Aktif
		MUARO TAKUANG	110	Sangat Aktif
		SUNGAI LANSEK DAN SIAUR	98	Sangat Aktif
		KAMANG	70	Aktif
4	IV NAGARI	MUNDAM SAKTI	98	Sangat Aktif
		PALANGKI	80	Aktif
		KOTO TUO	86	Aktif
		MUARO BODI	84	Aktif
		KOTO BARU	96	Sangat Aktif
5	LUBUK TAROK	BULUH KASOK DAN SILONGO	76	Aktif
		KAMPUNG DALAM	73	Aktif
		LUBUK TAROK DAN LATANG	90	Sangat Aktif
		LALAN	82	Aktif
6	SUMPUR KUDUS	KUMANIS	92	Sangat Aktif
		TBA dan TBA SELATAN	78	Aktif
		MANGANTI	94	Sangat Aktif
		TAMPARUNGO dan TANJUNG LABUAH	86	Aktif
		SILANTAI	100	Sangat Aktif
		UNGGAN	95	Sangat Aktif
		SISAWAH	83	Aktif
		SUMPUR KUDUS dan SUMPUR KUDUS SELATAN	80	Aktif
7	KUPITAN	PAMUATAN	107	Sangat Aktif
		PADANG SIBUSUK DAN KAMPUNG BARU	95	Sangat Aktif
		BATU MANJULUR	90	Sangat Aktif
8	KOTO VII	PALALUAR	78	Aktif
		GUGUAK	77	Aktif
		LIMO KOTO DAN BUKIT BUAL	70	Aktif
		TANNJUNG	74	Aktif
		PADANG LAWEH DAN PADANG LAWEH SELATAN	90	Sangat Aktif
	T O T A L			**41**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Demi mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menetapkan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang kemudian menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas organisasi	1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional dan berintegritas 2. Meningkatkan sarana dan prasarana	1. Peningkatan kualitas nilai SAKIP 2. Peningkatan kualitas SPIP 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	1. Mengoptimalkan perkembangan BumNag 2. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian nagari dalam meningkatkan perekonomian nagari 3. Mengoptimalkan kerjasama nagari 4. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa/Nagari 5. Meningkatkan Penataan Desa/Nagari 6. Mengoptimalkan Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola BumNag 2. Peningkatan Fasilitasi, pembinaan serta monitoring perkembangan BumNag 3. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari 4. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari dengan pihak ketiga 5. Fasilitasi tata wilayah desa/nagari 6. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana nagari 7. Fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan desa

3.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah didasari pada evaluasi rencana kerja tahun lalu dan tahun berjalan agar rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal rencana kerja merupakan optimalisasi pencapaian sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokokdan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD serta target Indikator Kinerja Kepala Daerah (IKD).

Untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melaksanakan 4 program (3 program Pembangunan dan 1 program rutin), 8 kegiatan (3 kegiatan Pembangunan dan 5 kegiatan rutin) dan 33 sub kegiatan (14 sub kegiatan Pembangunan dan 19 sub kegiatan rutin). Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel perubahan Renja perangkat daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja Tahun 2025	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah**	**Kab. Sijunjung**	**95**	**2.919.308.883**			**95**	**4.794.775.943**
						Nilai Indeks Profesional ASN Perangkat Daera	**Kab. Sijunjung**	**80**				**80**	
						Nilai Indeks Kepatuhan Arsip	**Kab. Sijunjung**	**46**				**46**	
						Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP Perangkat Daerah	**Kab. Sijunjung**	**100%**				**100%**	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan penanggaran yang diselesaikan tepat waktu**	**Kab. Sijunjung**	**95%**	**17.942.000**			**95%**	**49.755.000**
						Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu	**Kab. Sijunjung**	**100%**				**100%**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	16.848.000	APBD		2 Dokumen	40.275.000
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Daerah	Kab. Sijunjung	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	5.000.000

2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung	3 Laporan	1.094.000	APBD			3 Laporan	4.480.000
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel**	**Kab. Sijunjung**	**100%**	**2.545.315.655**				**100%**	**2.658.132.943**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	23 Orang	2.528.782.655	APBD			24 Orang	2.587.459.943
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	13.893.000	APBD			1360 Dokumen	40.325.000
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sijunjung	1 Laporan	2.640.000	APBD			1 Laporan	12.848.000
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung	13 Laporan	-	APBD			13 Laporan	17.500.000
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset OPD dalam Keadaan Baik**	**Kab. Sijunjung**	**80%**	**-**				**80%**	**12.848.000**
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sijunjung	-	-				2 Laporan	12.848.000
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Kab. Sijunjung**	**90%**	**-**				**90%**	**50.000.000**
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sijunjung	-	-				100 Paket	50.000.000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat Kepuasan yang diberikan oleh Layanan Organisasi**	**Kab. Sijunjung**	**90%**	**78.582.350**				**90%**	**598.726.000**

2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Paket	13.904.350			1 Paket	17.186.000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Paket	-			1 Paket	15.000.000
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Paket	-			1 Paket	30.000.000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Sijunjung	1 Paket	15.731.700	APBD		1 Paket	100.000.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pkt barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Sijunjung	2 Paket	4.551.900	APBD		2 Paket	36.500.000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kab. Sijunjung	3 Dokumen		APBD		3 Dokumen	5.040.000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kinjungan tamu	Kab. Sijunjung	1 Laporan	10.576.400	APBD		1 Laporan	45.000.000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kab. Sijunjung	50 laporan	33.818.000	APBD		198 laporan	350.000.000
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan**	**Kab. Sijunjung**	**100**	**-**			**100**	**836.000.000**
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sijunjung	-		APBD		15 Unit	375.000.000
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sijunjung	-		APBD		35 Unit	151.000.000
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung	-		APBD		11 Unit	310.000.000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tingkat Kepuasan yang diberikan oleh Layanan Organisasi**	**Kab. Sijunjung**	**95%**	**155.153.528**			**95%**	**288.274.000**

2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Laporan	48.167.528	APBD		12 Laporan	103.800.000
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	35.000.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Laporan	106.986.000	APBD		12 Laporan	149.474.000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Aset OPD dalam Keadaan Baik**	**Kab. Sijunjung**	**85%**	**122.315.350**			**85%**	**301.040.000**
2	13	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sijunjung	15 unit	76.018.350	APBD		15 unit	106.040.000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	54 unit	34.075.000	APBD		54 unit	45.000.000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	1 unit	12.222.000	APBD		1 unit	150.000.000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase peningkatan kerja sama desa**	**Kab. Sijunjung**	**5%**	**1.986.450**	APBD		**5%**	**35.000.000**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Persentase kerja sama desa yang difasilitasi**	**Kab. Sijunjung**	**10%**	**1.986.450**	APBD		**48%**	**35.000.000**
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1.986.450	APBD		1 Dokumen	35.000.000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase administrasi pemerintahan desa yang berkinerja baik**	**Kab. Sijunjung**	**45%**				**65%**	
						Indeks transparansi dana desa	**Kab. Sijunjung**	**84**	**1.345.724.820**			**86**	**3.362.675.000**

						Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi terhadap PAN	**Kab. Sijunjung**	**62,29%**				**66%**	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**	**Kab. Sijunjung**	**35%**				**60%**	
						Persentase desa yang memiliki nilai evaluasi pemerintahan desa dengan skor 90	**Kab. Sijunjung**	**100%**				**100%**	
						Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang dibina	**Kab. Sijunjung**	**62,29%**	**1.345.724.820**			**66%**	**3.362.675.000**
						Persentase desa yang menyampaikan laporan aset tepat waktu	**Kab. Sijunjung**	**95%**				**100%**	
						Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa	**Kab. Sijunjung**	**-**				**18%**	
						Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	**Kab. Sijunjung**	**50%**				**100%**	
						Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	**Kab. Sijunjung**	**95%**				**100%**	
						Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi perkembangan desa dengan kategori berkembang	**Kab. Sijunjung**	**50%**				**90%**	
						Persentase dokumen perencanaan desa yang sesuai aturan	**Kab. Sijunjung**	**81%**				**89%**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	64.127.400	APBD		62 Dokumen	94.025.000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1.842.400	APBD		1 Dokumen	35.000.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	37.727.550	APBD		62 Dokumen	150.225.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	1.150.455.970	APBD		126 Dokumen	1.170.700.000

2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Sijunjung	10 Orang	31.293.800	APBD		93 Orang	357.725.000
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Sijunjung	12 Laporan	3.138.600	APBD		12 Laporan	45.000.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	41.337.750	APBD		1 Dokumen	350.000.000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sijunjung	1 Laporan	2.188.000	APBD		1 Laporan	650.000.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1.028.600	APBD		1 Dokumen	15.000.000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	4.099.650	APBD		63 Dokumen	45.000.000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Sijunjung	32 org	-	APBD		35 org	350.000.000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sijunjung	2 Nagari	5.461.150	APBD		30 Nagari	35.000.000
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sijunjung	62 Laporan	1.001.850	APBD		62 Laporan	20.000.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Keluaran	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	2.022.100	APBD		1 Dokumen	45.000.000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga adat yang aktif**	**Kab. Sijunjung**	**84%**	**372.827.095**			**84%**	**1.944.549.057**
						Persentase usaha ekonomi masyarakat yang aktif	**Kab. Sijunjung**	**59%**				**59%**	
						Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	**Kab. Sijunjung**	**74%**				**74%**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan**	**Jumlah lembaga adat yang dibina**	**Kab. Sijunjung**	**49 KAN**	**372.827.095**			**49 KAN**	**1.944.549.057**
						Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	**Kab. Sijunjung**	**74%**				**74%**	

					Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	**Persentase usaha ekonomi masyarakat yang dibina**	**Kab. Sijunjung**	**59%**				**59%**	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Jorong, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lemabga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	34.253.245	APBD		1 Dokumen	115.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Msyarakat Hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sijunjung	100 Orang	53.454.450	APBD		300 Orang	594.549.057
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	-	APBD		1 laporan	50.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	285.119.400	APBD		1 Dokumen	1.185.000.000
T O T A L									**4.639.847.248**				**10.137.000.000**

Program Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas ini didasarkan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Dalam perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung merencanakan untuk melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan (berkurang 3 sub kegiatan dari 36 sub kegiatan karena terjadi instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Transfer ke Daerah dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Total Pagu Anggaran Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar 4.639.847.248,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi	Target			Pagu Indikatif		
								Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/ berkurang
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks pelayanan publik perangkat daerah	Kab Sijunjung	95	95		3.145.097.396	2.919.308.883	(225.788.513)
						Nilai indeks profesional ASN perangkat daerah		80	80				
						Nilai indeks kepatuhan arsip		46	46				
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP perangkat daerah		100%	100%				
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu		95%	95%		26.443.000	17.942.000	(8.501.000)
						Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu		100%	100%				

2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja awal, Renja Perubahan)	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	3 Dokumen		23.483.000	16.848.000	(6.635.000)
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJiP, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja)	Kab. Sijunjung	3 Laporan	3 Laporan		2.960.000	1.094.000	(1.866.000)
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel**	**Kab. Sijunjung**	**100%**	**100%**		**2.564.247.665**	**2.545.315.665**	**(18.932.000)**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	23 Org	23 Org		2.528.782.655	2.528.782.655	-
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (SPP, SPM dan Pengesahan SPJ)	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	3 Dokumen		22.608.000	13.893.000	(8.715.000)
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan		6.048.000	2.640.000	(3.408.000)

2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung	13 Laporan	13 Laporan		6.809.000	-	(6.809.000)
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi**	**Kab. Sijunjung**	**90%**	**90%**		**211.759.775**	**78.582.350**	**(133.177.425)**
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Pkt	1 Pkt		27.809.400	13.904.350	(13.905.050)
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Sijunjung	1 Pkt	1 Pkt		7.845.400	-	(7.845.400)
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Sijunjung	1 Pkt	1 Pkt		36.993.350	15731.700	(21.261.650)
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pkt barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Sijunjung	2 Pkt	2 Pkt		12.544.900	4.551.900	(7.993.000)
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sijunjung	1 laporan	1 laporan		35.260.225	10.576.400	(24.683.825)
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	50 Laporan	50 Laporan		84.967.500	33.818.000	(51.149.500)
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		6.339.000	-	(6.339.000)

2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi**	Kab. Sijunjung	**95%**	**95%**		**199.233.616**	**155.153.528**	**(44.080.088)**
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Sijunjung	12 laporan	12 laporan		92.247.616	48.167.528	(44.080.088)
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Sijunjung	12 laporan	12 laporan		106.986.000	106.986.000	-
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset OPD dalam kondisi baik**		**85%**	**85%**		**194.223.050**	**160.903.050**	**(33.320.000)**
2	13	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sijunjung	15 unit	14 unit	1 unit	92.018.350	76.018.350	(16.000.000)
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sijunjung	54 unit	48 unit	6 unit	37.815.000	34.075.000	(3.740.000)
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Sijunjung	1 unit	1 unit		13.580.000	12.222.000	(1.358.000)
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase peningkatan Kerja sama desa**	**Kab. Sijunjung**	**5%**	**5%**		**4.500.150**	**1.986.450**	**(2.513.700)**

2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Persentase kerjasama desa yang difasilitasi**	**Kab. Sijunjung**	**10%**	**10%**		**4.500.150**	**1.986.450**	**(2.513.700)**
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		4.500.150	1.986.450	(2.513.700)
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase administrasi pemerintahan desa yang berkinerja baik**		**45%**	**45%**		**1.464.180.070**	**1.345.724.820**	**(118.455.250)**
						Indeks transparansi dana desa		**84**	**84**				
						Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi terhadap PAN		**62,29%**	**62,29%**				
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa**		**35%**	**35%**		**1.464.180.070**	**1.345.724.820**	**(118.455.250)**
						Persentase desa yang memiliki nilai evaluasi pemerintahan desa dengan skor 90		**100%**	**100%**				
						Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang dibina		**62,29%**	**62,29%**				
						Persentase desa yang menyampaikan laporan aset tepat waktu		**95%**	**95%**				
						Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa		**-**	**-**				

						Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu		**50%**	**50%**				
						Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		**95%**	**95%**				
						Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi perkembangan desa dengan kategori berkembang		**50%**	**50%**				
						Persentase dokumen perencanaan desa yang sesuai aturan		**81%**	**81%**				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	62 Dokumen		70.795.850	64.127.400	(6.668.450)
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		4.451.400	1.842.400	(2.609.000)
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	62 Dokumen		54.390.750	37.727.550	(16.663.200)
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	62 Dokumen		1.198.911.220	1.150.455.970	(48.455.250)
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Sijunjung	10 Orang	10 Orang		35.412.300	31.293.800	(4.118.500)

2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah desa	Kab. Sijunjung	12 laporan	12 laporan		6.783.800	3.138.600	(3.645.200)
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		54.446.900	41.337.750	(13.109.150)
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan		5.000.250	2.188.000	(2.812.250)
2	13	04	2.01	011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		2.334.600	1.028.600	(1.306.000)
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	62 Dokumen		11.303.450	4.099.650	(7.203.800)
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sijunjung	10 Nagari	2 Nagari	8 nagari	13.491.900	5.461.150	(8.030.750)
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Kab. Sijunjung	62 Laporan	62 Laporan		2.266.850	1.001.850	(1.265.000)
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		4.590.800	2.022.100	(2.568.700)
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase lembaga adat yang aktif**	**Kab. Sijunjung**	**84%**	**84%**		**838.766.850**	**372.827.095**	**(465.939.755)**

					LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase usaha ekonomi masyarakat yang aktif**		**59%**	**59%**				
						Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif		**74%**	**74%**				
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum**	**Jumlah lembaga adat yang dibina**		**49 KAN**	**49 KAN**		**838.766.850**	**372.827.095**	**(465.939.755)**
						Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina		**74%**	**74%**				
						Persentase usaha ekonomi masyarakat yang dibina		**59%**	**59%**				
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Jorong, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lemabga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		39.214.350	34.253.245	(4.961.105)

3	13	05	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sijunjung	100 Orang	100 Orang		130.988.350	53.454.450	(77.533.900)
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalam Penyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	1 Dokumen		668.564.150	285.119.400	(383.444.750)
T O T A L											**5.452.544.466**	**4.639.847.248**	**(812.697.218)**

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya perubahan Rancangan Kerja (Renja SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya dalam sisa rentang waktu yang tersedia selama tahun 2025.

Dengan Rencana Kerja ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan rencana program/kegiatan pada tahun 2025 sampai triwulan I tahun 2025, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian tentu saja dalam pelaksanaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelummnya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat didayagunakan secara optimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Muaro Sijunjung, April 2025
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi sekarang. Agar pembangunan tersebut tercapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-P memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Dengan demikian, Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penganggaran Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan; dan
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah sebagai :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023
- 2.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2024
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Strategi

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 4.1. Program
- 4.2. Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2023.

Renja-P Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023 alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Rp.10.445.427.132,- untuk pelaksanaan 3 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi Rp.9.881.770.606,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan 94,60%. Adapun rincian capaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.887.217.082,- sebesar dengan realisasi sebesar Rp. 5.359.507.883,- (91,04%). Target kinerja adalah 100% dan realisasi 100%. Kegiatannya adalah :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.33.844.800,- untuk penyusunan dokumen perencanaan, RKA dan RKA-P, Dokumen Evaluasi Kinerja tahunan, triwulanan, bulanan dan dokumen perencanaan/pelaporan lainnya. Realisasi anggaran sebesar Rp.33.691.458,- (99,55%). Target kinerja adalah 100% dan realisasi 100%.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.5.362.808.182,- untuk pelaksanaan administrasi keuangan OPD. Realisasi anggaran sebesar Rp.4.846.531.300,- (90,37%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.257.072.210,- untuk pelaksanaan administrasi umum OPD. Realisasi anggaran Rp.252.824.093,- (98,35%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.

d. Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.103.410.100,- untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah di OPD. Realisasi anggaran sebesar Rp.96.411.154,- (93,23%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.130.081.790,- untuk pemeliharaan kendaraan dinas. Realisasi anggaran Rp.130.049.878,- (99,98%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum disediakan anggaran sebesar Rp. 1.749.352.400,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.1.741.235.037,- (99,54%). Target kinerja 100% dengan realisasi 100%.
   a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.1.616.502.400,- untuk pencegahan dan penindakan gangguan tramtibmas. Realisasi anggaran Rp.1.608.606.687,- (99,51%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.
   b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.132.850.000,- untuk sosialisasi penegakan Perda/Perkada, pengawasan atas kepatuhan terhadap Perda/Perkada, dan penanganan pelanggaran Perda/Perkada. Realisasi anggaran Rp.132.628.350,- (99,83%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan, Dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran disediakan anggaran sebesar Rp.2.808.857.650,-. Realisasi sebesar Rp.2.781.027.686,- (99,01%). Kegiatannya adalah:
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota.
   Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.2.726.614.750,- yang dipergunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran. Realisasi anggaran sebesar Rp.2.707.574.186,- (99,30%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.
   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
   Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.19.999.900,- untuk memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Realisasi anggaran Rp.18.134.800,- (90,67%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.
   c. Penyelenggaraan Operasi Pencairan dan Pertoongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
   Kegiatan ini disediakan anggaran Rp.62.243.000,- yang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelamatan (rescue). Realisasi anggaran Rp.55.318.700,- (88,88%). Target kinerja 100% dan realisasi 100%.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM - KELUARAN KEGIATAN S.D. 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI TAHUN BERJALAN	
					TARGET RKPD TAHUN 2023	REALISASI RKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM - KEGIATAN S.D. 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D 2024
	URUSAN WAJIB KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
10502	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%						
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1000 penduduk	100% (3,5 : 1.000)	100% (3,5 : 1.000)						
		Persentase menurunnya gangguan ketentraman & ketertiban umum	100% (8 dari 8 kec)	100% (8 dari 8 kec)						
		Persentase gangguan tramtibum yg dapat diselesaikan			100%	100%	100%	100 %	100 %	
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada			2,5%	2,5%	100%	2,5 %	2,5 %	
		Persentase Satlinmas Nagari yang telah dilibatkan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			50%	50%	50%	25 %	70 %	
10502201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Persentase gangguan/potensi gangguan tramtibum yang ditangani								
		Persentase nagari yang mendapat layanan pencegahan gangguan tramtibum			100%	100%	100%	100 %		
		Persentase Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	70 %		

		Persentase Satlinmas terlatih			50%	5 0%	100%	70 %		
		Persentase nagari dengan data perlindungan masyarakat yang termutakhirkan.			50%	50%	50%	100 %		
		Persentase nagari yang telah membentuk Satlinmas			100%	100%	100%	100 %		
10502201 .01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			400 kali	400 kali	100%	400 kali		
10502201 .02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			0	0		18 dok		
10502201 .03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			0	0		62 dok		
10502201 .04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			62 dok	62 dok	100%	62 dok		
10502201 .05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya			0	0		225 orang		

10502201.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			0	0		2 dok		
10502201.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			0	0		14 unit		
10502201.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			0	0		1 dok		
10502201.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			0	0		0		
10502202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati	Jumlah perda dan perkada yang ditegakan		100% (6 buah)						
		Persentase nagari yang mendapatkan layanan pencegahan pelanggaran Perda/Perkada			100%	100%	100%	100 %		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan			100%	100%	100%	100 %		
10502202.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/			0	0		8 dok		
10502202.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perbup	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			0	0		62 dok		
10502202.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan		24 dok	50 dok	30 dok	100%	50 dok		

		Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP								
10502203	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	Persentase ketersediaan PPNS								
		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya			0	0		1 orang		
10502203.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			0	0	0	1 dok		
10504	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (menit)	12	13,57						
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%						
		Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani			100%	100%	100%	100 %	100 %	
		Persentase keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia			10%	10%	100%	100 %	100 %	
10504201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Persentase penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran		100%						
		Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (menit)			15 menit	12,68 menit	100%	15 menit		
		Persentase ketersediaan sarpras pemadam kebakaran sesuai standar			62,50%	62,50%	100%	5 paket		
		Persentase ketersediaan personel pemadam			75%	75%	100%	72 orang		

		kebakaran sesuai standar								
10504201.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			0	0		1 dok		
10504201.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100% (365 dok)	365 dok	365 dok	100%	365 dok		
10504201.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		100% (4 WMK)	0	0		50 dok		
10504201.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0		0 dok		
10504201.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			0	0		1 dok		
10504201.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			0	0		3 unit		
10504201.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam			0	0				

		Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran									
10504201.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya			0	0		1	nagari		
10504201.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			0	0		10	dok		
10504202	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Peningkatan persentase entitas dengan peralatan proteksi kebakaran yang siap digunakan			0	0					
		Persentase bangunan dengan sarana prasarana proteksi kebakaran yang sesuai standar			0	0		1	%		
10504202.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			0	0		50	dok		
10504202.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			0	0		50	Dok		

10504203	Investigasi Kejadian Kebakaran	Peningkatan persentase penuntasan investigasi kejadian kebakaran		50%						
		Persentase kejadian kebakaran yang tuntas diinvestigasi			0	0		100 %		
10504203.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian			0	0		50 dok		
10504204	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase peningkatan jumlah nagari yang siap mencegah kebakaran		3,23%						
		Persentase nagari yang telah mempunyai relawan pemadam kebakaran			100%	98,39%	98,39%	100 %		
10504204.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			0	0		100 orang		
10504204.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			62 regu	61 regu	98,39%	61 nagari		
10504204.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar			0	0		0		
10504205	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Peningkatan persentase keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan								
		Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan			10%	10%	100%	100 %		
		Persentase ketersediaan sarpras penyelamatan sesuai			10%	10%	100%	50 %		

		standar								
		Persentase ketersediaan personel penyelamat sesuai standar			10%	10%	100%	50 %		
10504205.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			50 dok	50 dok	100%	50 laporan		
10504205.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar			1 dok	1 dok	100%	1 dok		
10504205.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			4 paket	4 paket	100%	4 unit		
10504205.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal			4 dok	4 dok	100%	1 dok		

Catt: Tulisan Merah adalah Indikator Lama (2021-2022)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Tingkat pencapaian indikator sasaran diperoleh melalui perbandingan rencana dengan realisasi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menjelaskan tentang tata cara penghitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu:

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana.
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Trantibum.
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran.
- Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas.

Dari keempat indeks di atas, Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas sub urusan Bencana berada di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan 3 (tiga) indeks lainnya berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dalam menghitung nilai indeks-indeks tersebut ditetapkanlah Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Berikut Bobot masing-masing. Nilai tertimbang (Nilai dikali bobot) dari sekelompok Indicator akan membentuk nilai Sub Dimensi. Nilai tertimbang sekelompok Sub Dimensi akan membentuk nilai Dimensi. Terakhir, nilai tertimbang sekelompok Dimensi membentuk nilai indeks.

Setelah nilai Indeks didapat, barulah bisa dilakukan pengkategorian sehingga bisa dilihat apakah kinerja yang dicapai tergolong baik atau buruk.

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian
Indeks Penyelenggaraan Tramtibum

RENTANG NILAI	KATEGORI
00,00 – 20,00	Buruk
20,01 – 40,00	Kurang Baik
40,01 – 60,00	Cukup Baik
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100,0	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 100.4.3-669 Tahun 2022

Dengan memasukan nilai-nilai bagi setiap indikator, maka didapatlah Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinas tahun 2023 untuk 3 (tiga) Indeks Komposit (dengan nilai maximal 75) beserta persentase kenaikannya dibanding tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas Tahun 2020-2024

INDEKS	BOBOT	2020		2021		2022		2023		2024	
		NILAI	TERTIMBANG (Max 75)	NILAI	TERTIMBANG (Max 75)	NILAI	TER TIMBANG (Max 75)	NILAI	TERTIMBANG (Max 75)	NILAI	TERTIMBANG (Max 75)
Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas sub urusan Tramtibum	0,25	41,96	10,49	42,84	10,71	43,86	10,96	44,93	11,23	46,02	11,50
Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	0,25	8,20	2,05	8,42	2,10	8,63	2,16	8,85	2,21	9,06	2,26
Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas sub urusan Kebakaran	0,25	75	18,75	75,00	18,75	85,00	21,25	90,00	22,50	90,00	22,50
NILAI					31,56 (42,08% dari 75)		34,37 (45,83% dari 75)		35,94 (47,92% dari 75)		36,28 (48,37% dari 75)
KATEGORI			CUKUP BAIK		CUKUP BAIK		CUKUP BAIK		CUKUP BAIK		CUKUP BAIK

Sumber: Subbag Perencanaan & Pelaporan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkategori **Cukup Baik**. Untuk capaian kinerja, sesuai hasil pembahasan Renstra dan untuk lebih mudahnya penghitungan, maka persentase kenaikan Indeks dijadikan acuan untuk melihat kinerja organisasi.

Pada level dibawahnya, kinerja pelayanan dapat diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
IKK Outcome pada Matriks Rencana Strategis 2021-2026 tersebar pada level program dan kegiatan.
Adapun keempat IKK Outcome tersebut adalah :

1. Persentase gangguan tramtibum yang dapat diselesaikan.
   Merupakan persentase dari jumlah pengaduan yang ditangani per jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk.
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan.
   Merupakan persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan per jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi.
3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
   Merupakan persentase dari jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelemat atau Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah per jumlah kejadian kebakaran di kota.
4. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (target=15 menit)
   Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran

Pengukuran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.

T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung

IKK	SPM	IK (BERADA DALAM PROGRAM / KEGIATAN)			TARGET RENSTRA PD						REALISASI			PROYEKSI			CAT. ANALISIS
		IK	Program	Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Tramtibum					10,75	10,98	11,24	11,51			10,71	10,96	11,23	11,50			
Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas					2,10	2,16	2,21	2,27			2,10	2,16	2,21	2,26			
	YA	Persentase Gangguan Tramtibum Yang Dapat Diselesaikan		Persentase gangguan/ potensi gangguan tramtibum yang ditangani	100%	100%					100%	100%					
			Persentase gangguan tramtibum yg dapat diselesaikan				100%	100%	100%	100%			100%				
		Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		100%	100%					100%	100%					
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan			100%	100%	100%	100%			100%				
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran					19,21	19,22	21,78	22,50			18,75	21,25	22,50	22,50			
	YA	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%					100%	100%					
			Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani				100%	100%	100%	100%			100%				
	YA	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran		15 menit	15 menit					14,90 menit	13,57 menit					
				Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran			15 menit	15 menit	15 menit	15 menit			12,68 menit				

Cat: Tulisan merah adalah indicator lama (2021-2022)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Sarana prasarana.
3. Anggaran.
4. Peran serta masyarakat.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh isu-isu penting di atas. Dalam pengukuran Indeks Tramtibumlinmas, nilai keempat isu ini adalah komponen pembentuk indeks. Dengan demikian, perlu dilakukan peningkatan/penguatan sehingga nilai indeks yang merupakan cerminan kinerja, bisa meningkat.

Permasalahan dan Dampaknya

Jika isu-isu sebagaimana tersebut di atas dianggap belum memadai, maka isu-isu tersebut adalah hambatan dalam pelaksanaan tugas. Secara umum, permasalahan yang ditemui, tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ditemui pada sasaran I.

1. Faktor Penghambat Internal
   Secara internal ada 3 faktor klasik yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian kinerja:
   a. Keterbatasan kompetensi personel disebabkan belum mencukupinya pendidikan yang diterima, baik dalam hal peningkatan kompetensi umum Maupun Pendidikan kompetesi khusus.
   b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini. Secara umum, masih diperlukan peningkatan-peningkatan lagi, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, terutama untuk Pemadam Kebakaran.
   c. Keterbatasan Anggaran untuk keperluan operasional.
2. Faktor Penghambat Eksternal
   Adapun faktor penghambat eksternal adalah:
   a. Kondisi geografi dan demografi Kabupaten Sijunjung yang cukup luas dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan, bentang alam yang berbukit-bukit, dan konsentrasi daerah hunian masyarakat yang terpecah-pecah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas.
   b. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari Instansi terkait.
   c. Belum adanya prosedur baku terkait hubungan dengan instansi lain.
   d. Anggapan masyarakat mengenai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sempit sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala akibat persepsi masyarakat yang kurang tepat.

Dampak dari permasalahan ini, adalah tersendatnya upaya pencapaian kinerja dan dengan sendirinya akan berpengaruh langsung kepada pencapaian visi/misi kepala daerah maupun Sustainabel Development Goals.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pemelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di tingkat Kabupaten, Satuan Polisi

pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung menghadapi tantangan sebagai berikut :

Ada sejumlah tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas.

1. Faktor Internal
   Secara internal ada 3 faktor klasik yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian kinerja:
   a. Keterbatasan kompetensi personel disebabkan belum mencukupinya pendidikan yang diterima, baik dalam hal peningkatan kompetensi umum (pendidikan diksar Pol PP, beladiri, PBB, dll) maupun pendidikan kompetensi khusus (PPNS, Diklat Lanjutan Damkar, dll).
   b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, masih diperlukan peningkatan-peningkatan lagi, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, terutama untuk Barisan Pemadam Kebakaran.
   c. Keterbatasan Anggaran baik untuk keperluan operasional maupun untuk insentif bagi personel sebagai kompensasi dalam menjalankan tugas di luar jam kerja standar.
2. Faktor Eksternal
   a. Kondisi geografi dan demografi Kabupaten Sijunjung yang cukup luas dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan, bentang alam yang berbukit-bukit, dan konsentrasi daerah hunian masyarakat yang terpecah-pecah dan terkelompok-kelompok menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas.
   b. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung dari Instansi terkait.
   c. Belum tersusunnya prosedur yang baku dalam berhubungan dengan instansi lain.
   d. Anggapan masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sempit sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala akibat persepsi masyarakat yang kurang tepat.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong bagi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1. Faktor Internal
   Faktor internal meliputi:
   a. Sudah adanya landasan hukum yang cukup kuat mulai dari pembentukan institusi sampai pelaksanaan kegiatan.
   b. Ketersediaan personel yang sudah cukup banyak, walaupun belum memenuhi jumlah standar.
   c. Sarana prasarana, walau kondisinya belum memadai, sudah tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Faktor Eksternal
   a. Keinginan masyarakat yang mayoritas beragama Islam untuk menegakan syariat dengan menghapuskan berbagai bentuk pekat.
   b. Sudah adanya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan perlindungan seperti dalam peristiwa bencana kebakaran atau layanan pengamanan dalam acara-acara masyarakat.
   c. Tersedianya sarana komunikasi dalam berbagai bentuk, sehingga komunikasi ke kecamatan-kecamatan maupun ke sebahagian besar nagari dapat dilaksanakan dengan lancar.

Masih cukup kuatnya adat istiadat di wilayah Kabupaten Sijunjung, dimana tokoh-tokoh masyarakat (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai) masih dipercayai masyarakat. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan tugas, terutama terkait penyampaian informasi atau sosialisasi.

Risiko Operasional

Dalam menyusun perencanaan, perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang sudah diikhtisarkan, baik rasio strategis maupun rasio operasional. Rasio Operasional yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Risiko Operasional Satpol PP & Damkar 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	Dampak Risiko	Pihak yang Terkena
Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif, dan berintegritas							
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Tramtibum	Penurunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Tramtibum	Kepala OPD	Penurunan Indeks Sub Dimensi Pencapaian Kinerja Penegakan Perda (mencerminkan Pencapaian Kinerja Penegakan Perda yang rendah).	Internal/ Eksternal	Banyaknya pelanggaran Perda/Perkada sehingga masyarakat merasa tidak nyaman	OPD. Masyarakat
				Penurunan Indeks Sub Dimensi Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Tibumtranmas (mencerminkan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Tramtibum rendah).	Internal/ Eksternal	Banyaknnya gangguan tibumtranmas sehingga masyarakat tidak nyaman	OPD. Masyarakat
				Penurunan Indeks Sub Dimensi Pemberdayaan SDM dan Indeks Sub Dimensi Peningkatan Kapasitas SDM (mencerminkan Manajemen SDM yang tidak bagus).	Internal	Pelayanan yang tidak optimal akibat rendahnya kompetensi/kapasitas SDM personel	OPD.
				Penurunan Indeks Sub Dimensi Sarana Prasarana (mencerminkan Manajemen Sarpras yang tidak bagus).	Internal	Tidak optimalnya pelaksanaan tugas akibat keterbatasan sarpras	OPD.
				Penurunan Indeks Sub Dimensi Perencanaan & Anggaran (mencerminkan Perencanaan & Anggaran yang tidak optimal).	Internal	Tidak sinkronnya perencanaan/ penganggaran dengan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan/ sasaran	OPD.
				Penurunan Indeks Sub Dimensi Akuntabilitas (mencerminkan rendahnya Akuntabilitas).	Internal	Tidak tercapainya target kinerja	OPD.

	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Penurunan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Kepala OPD	Penurunan Indeks Sub Dimensi Pelaksanaan Fungsi Satlinmas dan Indeks Sub Dimensi Kebijakan Satlinmas (mencerminkan lemahnya Manajemen Strategi).	Internal	Tidak berfungsinya Satlinmas	OPD.
				Penurunan Indeks Sub Dimensi Inovasi peningkatan kapasitas Satlinmas (mencerminkan Manajemen SDM yang tidak bagus).	Internal	Rendahnya kapasitas/ kompetensi personel Satlinmas	OPD.
				Penurunan Indeks Sub Dimensi Pemberdayaan Satlinmas dan Indeks Sub Dimensi Sarpras Satlinmas (mencerminkan Sistem yang tidak bagus).	Internal	Tidak adanya pengendalian terhadap Satlinmas.	OPD.
Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran	Penurunan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran	Kepala OPD	Belum adanya Dinas Pemadam Kebakaran yang berdiri sendiri.	Internal	Tidak fokus karena beragamnya urusan yang ditangani.	OPD. Masyarakat
				Capaian SPM tidak terpenuhi.	Internal/ Eksternal	Kasus kebakaran/non kebakaran yang tidak tertanggulangi	OPD. Masyarakat
				Pos Damkar Kecamatan tidak ada.	Internal	Penanganan kebakaran/non kebakaran tidak memenuhi "time response" (terlambat).	OPD. Masyarakat
				Jumlah SDM tersertifikasi tidak mencukupi.	Internal	Pelayanan yang tidak optimal akibat rendahnya kompetensi/ kapasitas SDM personel	OPD. Masyarakat
				Redkar Nagari tidak ada.	Internal/ Eksternal	Tidak tersedianya layanan pertama pada kasus kebakaran/non kebakaran	OPD. Masyarakat

Sumber: Subbag Perencanaan 2025

Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjutnya

Berikut dapat dilihat kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2023.

Tabel 2.6.
Rekomendasi DPRD Tahun 2024 dan TIndak Lanjutnya

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum.	1. Pelibatan institusi-institusi terkaidt dalam pelaksanaan tugas (TNI/Polri, dll).	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum menjadi lebih baik dan terarah.
		2. Komunikasi langsung dengan pihak nagari secara berkala.	Pertukaran informasi yang diperlukan sehingga Satpol PP & Damkar bisa lebih presisi dalam mencapai target pekerjaan
		3. Peningkatan kapasitas Satlinmas nagari	Satlinmas nagari memperoleh *update* informasi sehingga diharapkan pelaksanaan tugas Satlinmas bisa berpedoman pada informasi terkini.
2	Penambahan Pos Pemadam Kebakaran.	Pada tahun 2023 telah dilakukan penambahan Pos Damkar sebanyak 1 (satu) unit di Kecamatan IV Nagari.	Meningkatnya capaian SPM dimana kondisi ideal adalah tersedianya 1 (satu) pos di 1 (satu) kecamatan. Dengan berdirinya Pos Damkar IV Nagari, maka saat ini telah tersedia pos di 5 (lima) dari 8 (delapan) kecamatan.

Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun 2024 diakomodir di semua Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terkait.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

RKPD tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2022. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021–2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021–2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

Tabel 2.6 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET 2025	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET 2025	PAGU
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	6.158.995.532	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	5.870.916.457,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kab. Sijunjung	100%	37.238.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kab. Sijunjung	100 %	38.363.400,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	4.758.750,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	. 3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	3.6 94.650,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	3.6 30.250,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung	2 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung	2 Laporan	4.6 44.750,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	12 Laporan	23.238.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	12 Laporan	22.323.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kab. Sijunjung	100%	5.305.152.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kab. Sijunjung	100 %	5.347.565.891,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	59 Orang/bulan	5.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	48 Orang/bulan	5.252.562.703,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sijunjung	12 Dokumen	79.152.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sijunjung	12 Dokumen	75.628.200,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sijunjung	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sijunjung	1 Laporan	5.487.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung	18 Laporan	18.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Sijunjung	14 Laporan	10.975.050,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	100%	17.112.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	100 %	21.305.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sijunjung	1 Unit		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sijunjung	1 Unit	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sijunjung	200 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sijunjung	10 Orang	17.112.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sijunjung	47 Orang	21.980.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	100%	505.883.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	100 %	254.915.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	7 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	6 Paket	6.300.400,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Paket	146.162.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Paket	82.891.300,00
Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung	12 Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00

Penggandaan	yang Disediakan				Penggandaan	yang Disediakan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	20 Laporan	359.721.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	20 Laporan	115.278.100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kab. Sijunjung			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kab. Sijunjung	100 %	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sijunjung	10 Unit		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung	100%	108.610.532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung	100 %	114.103.404,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Laporan	108.610.532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Laporan	114.103.404,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	6 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kab. Sijunjung	100%	185.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kab. Sijunjung	100 %	145.238.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sijunjung	27 Unit	146.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sijunjung	17 Unit	116.000.000,00

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	30 Unit		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	20 Unit	24.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	22 Unit	14.620.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	7 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	6 Unit	16.038.000,00
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada Persentase Satlinmas Nagari yang telah dilibatkan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persentase gangguan tramtibum yg dapat diselesaikan		2,5 % 100 % 100 %	2.794.210.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan tramtibum yg dapat diselesaikan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada Persentase Satlinmas Nagari yang telah dilibatkan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 2,5 90 %	1.739.543.250,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang mendapat layanan pencegahan gangguan tramtibum Persentase Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Satlinmas terlatih Persentase nagari dengan data perlindungan masyarakat yang termutakhirkan. Persentase nagari yang telah membentuk Satlinmas	Kab. Sijunjung	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.461.880.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari dengan data perlindungan masyarakat yang termutakhirkan Persentase nagari yang mendapat layanan pencegahan gangguan tramtibum Persentase nagari yang telah membentuk Satlinmas Persentase Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Satlinmas terlatih	Kab. Sijunjung	100 % 90 %	1.743.234.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	42.656.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	7.810.900,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	118.354.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	51.741.000,00

rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sijunjung	800 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Sijunjung	3 Dokumen		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Sijunjung	1 Dokumen		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	101.916.900,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Sijunjung	0 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Sijunjung	0 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00

jenjang jabatan					jenjang jabatan				
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab. Sijunjung	0 Orang	125.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Sijunjung	0 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Sijunjung	450 laporan	2.078.290.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Sijunjung	400 laporan	1.325.893.250,00
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Sijunjung	20 Laporan	51.280.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Sijunjung	10 Laporan	9.349.350,00
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Sijunjung	1 Laporan		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Sijunjung	9 Unit	46.300.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Sijunjung	32 Unit	40.848.000,00

Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase nagari yang mendapatkan layanan pencegahan pelanggaran Perda/Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung	100% 100%	172.330.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase nagari yang mendapatkan layanan pencegahan pelanggaran Perda/Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung	100 %	96.584.450,00
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 laporan		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 laporan	0,00
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 dokumen		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 dokumen	0,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 unit		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 unit	0,00
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kab. Sijunjung	0 laporan		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kab. Sijunjung	0 laporan	0,00
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	62 Laporan	18.702.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	62 Laporan	0,00
Penanganan Atas	Jumlah Laporan	Kab.	70 Laporan		Penanganan Atas	Jumlah Laporan	Kab.	70 Laporan	193.524.450,00

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Sijunjung		136.428.000	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Sijunjung		
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	62 Laporan	17.200.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sijunjung	1 orang	160.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sijunjung	1 orang	9.094.400,00
Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	8.459.400,00
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kab. Sijunjung	0 Laporan		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Sijunjung	1 Laporan	160.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Sijunjung	1 Laporan	0,00
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani Persentase keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		100 % 100 %	4.101.409.875	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		100 %	2.840.978.443,00

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (menit) Persentase ketersediaan sarpras pemadam kebakaran sesuai standar Persentase ketersediaan personel pemadam kebakaran sesuai standar	Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung	15 menit 100% 100%	3.887.559.875	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan personel pemadam kebakaran sesuai standar Persentase ketersediaan sarpras pemadam kebakaran sesuai standar Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (menit)	Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung	15 menit 62,50 % 91,67 %	3.157.343.618,00
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	1 Dokumen		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	365 Laporan	3.072.059.875	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	365 Laporan	2.706.945.700,00
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sijunjung	70 Dokumen		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	15 Dokumen		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun),	Kab. Sijunjung	1 Dokumen		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun),	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00

	Sah, dan Legal					Sah, dan Legal			
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Sijunjung	88 Orang	120.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	62 Desa/Kelurahan		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	0 Desa/Kelurahan	0,00
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Kab. Sijunjung	0 laporan		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Kab. Sijunjung	0 laporan	0,00
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00

Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Sijunjung	7 Unit	695.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Sijunjung	36 Unit	106.426.343,00
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sijunjung	3 Dokumen		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kab. Sijunjung	0 Keluarga		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kab. Sijunjung	0 Keluarga	0,00
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan dengan sarana prasarana proteksi kebakaran yang sesuai standar	Kab. Sijunjung	100,00%		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan dengan sarana prasarana proteksi kebakaran yang sesuai standar	Kab. Sijunjung	100 %	4.255.300,00
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Sijunjung	1 Dokumen		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	3.175.300,00
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Sijunjung	1 Dokumen		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	0,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tuntas	Kab. Sijunjung	100,00%		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase nagari yang telah mempunyai relawan	Kab. Sijunjung	100 %	5.875.300,00

	diinvestigasi					pemadam kebakaran			
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kab. Sijunjung	50 Dokumen		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kab. Sijunjung	25 Dokumen	3.985.300,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase nagari yang telah mempunyai relawan pemadam kebakaran	Kab. Sijunjung	100,00%	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase nagari yang telah mempunyai relawan pemadam kebakaran	Kab. Sijunjung	100 %	19.283.450,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	100 Orang		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	62 Desa/Kelurahan	30.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	3 Desa/Kelurahan	4.642.250,00
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kab. Sijunjung	17 Dokumen		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan Persentase ketersediaan sarpras penyelamatan sesuai standar Persentase ketersediaan personel penyelamat sesuai standar	Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung	100% 100% 100%	183.850.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase ketersediaan personel penyelamat sesuai standar Persentase ketersediaan sarpras penyelamatan sesuai standar Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan	Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung Kab. Sijunjung	100 %	93.943.175,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Sijunjung	50 Laporan	33.850.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Sijunjung	50 Laporan	3.902.350,00

Keselamatan Manusia					Keselamatan Manusia				
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Kab. Sijunjung	1 Dokumen		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Kab. Sijunjung	4 Laporan	120.000.000	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kab. Sijunjung	4 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kab. Sijunjung	2 Unit	11.901.200,00
				13.054.615.407					10.451.438.150,00

2.6. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM dan lainnya yang langsung ditujukan kepada SKPD, dan juga hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu – isu strategis dari SKPD.

Secara umum, penyampaian aspirasi dari para pemangku kepentingan tidak diformulasikan dalam satu program atau kegiatan. Usulan-usulan tersebut lebih banyak dalam bentuk komponen, penyempurnaan, dan/atau peningkatan dari program/kegiatan/sub kegiatan yang ada.
Secara umum, aspirasi pemangku kepentingan berkisar pada:

- Penguatan fungsi Satpol PP & Damkar dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Tramtibumlinmas dan Penanggulangan Kebakaran/ Penyelamatan.
- Pelibatan dan pemberian dukungan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan tramtibumlinmas dan penanggulangan kebakaran/ penyelamatan.
- Penguatan koordinasi/kerjasama antara Satpol PP & Damkar dengan institusi lain dan masyarakat.

Selain itu, Satpol PP & Damkar juga mempunyai 1 (satu) inovasi yang diharapkan bisa memperlancar pelaksanaan tugas. Inovasi tersebut adalah "Poldam goes to Geopark" yang mendukung terselenggaranya tramtibumlinmas dan penyelamatan di area Geopark Ranah Minang Silokek.

Tabel 2.7
T-C.32 Usulan Program / Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	PAGU	SUMBER USULAN
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Satlinmas Nagari yang telah dilibatkan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Sjj	90%	125.000.000	Masyarakat / Nagari
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Persentase Satlinmas terlatih	Kab. Sjj	90%	125.000.000	
	Persentase nagari dengan data perlindungan masyarakat yang termutakhirkan.		90%		
	Persentase nagari yang telah membentuk Satlinmas		100%		
Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas	Jumlah SDM Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sjj	62 Orang	125.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme.

Terkait berbagai masalah tersebut di atas, peran Kementerian Dalam Negeri sangat strategis, karena Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan Masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung ditujukan untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahtaraan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan masyarakat sadar hukum dan keadilan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan umum pembangunan daerah yang telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun komitmen ini perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga perlu disusun prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan ;

a. Isu-isu strategis yang memiliki dampak signifikan dalam pencapaian sasaran pembangunan.
b. Potensi dan peluang yang dimiliki, dan
c. Hal-hal yang mendesak dan penting. Prioritas pembangunan tersebut bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Sejalan dengan maksud tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diprioritaskan pada sasaran-sasaran stratejik yang berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung yang telah dituangkan dalam Renstra tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai tahun 2025 ada 2 (dua) yaitu:

1. ***Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif, dan berintegritas***

   Sasaran yang ingin dicapai ada 2 (dua) yaitu:
   - Meningkatnyan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
   - Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan

2. ***Meningkatnya kualitas birokrasi yang berkinerja***

   Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Selengkapnya, tujuan dan sasaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BOBOT	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas birokrasi yang berkinerja	**Peningkatan peringkat akuntabilitas kinerja organisasi**			**25**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**A**
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi	100	71	73	75	77	79	81
Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif, dan berintegritas *Meningkatnya pelayanan Trantibum dan pemadam kebakaran*	**Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat**			**75**	**78,71** (naik 2,5%)	**80,67** (naik 2,5%)	**82,69** (naik 2,5%)	**84,76** (naik 2,5%)	**86,88** (naik 2,5%)	**89,05** (naik 2,5%)
		Meningkatnyan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Tramtibum	25	10,75 (naik 2,5%)	11,02 (naik 2,5%)	11,30 (naik 2,5%)	11,58 (naik 2,5%)	11,87 (naik 2,5%)	12,17 (naik 2,5%)
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	25	2,10	2,15	2,21	2,26	2,32	2,38
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	*Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada*	*25*	*2,50%*	*2,50%*				
			Peningkatan Indeks Kenyamanan	*25*	*2,50%*	*2,50%*				
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran	25	19,22 (naik 2,5%)	19,70 (naik 2,5%)	20,19 (naik 2,5%)	20,70 (naik 2,5%)	21,21 (naik 2,5%)	21,74 (naik 2,5%)
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	*Persentase penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran*	*40*	*2,50%*	*2,50%*				
			Persentase penurunan korban kebakaran	*10*	*2,50%*	*2,50%*				

Catt: Tulisan merah adalah Tujuan/ Sasaran/ Indikator/ Target Lama

3.3. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada
2. Meningkatkan penanganan gangguan tramtibum
3. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan kebakaran
5. Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung sebagai wujud untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang direncanakan berjumlah 3 (tiga) buah sebagai berikut:

1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
3) Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program yang direncanakan berjumlah 3 (tiga) buah sebagai berikut:

1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
   Program ini bertujuan untuk penyediaan segala kebutuhan penunjang dalam pelaksanaan tugas dengan anggaran sebesar Rp.6,311 milyar untuk tahun pertama, Rp.7,654 milyar untuk tahun kedua, Rp.7,827 milyar untuk tahun ketiga, Rp.8,093 milyar untuk tahun keempat, dan Rp.8,341 milyar untuk tahun kelima.
2) Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
   Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Anggaran untuk program ini direncanakan Rp2,300 milyar untuk tahun pertama, Rp.4,875 milyar untuk tahun kedua, Rp.5,025 milyar untuk tahun ketiga, Rp.5,200 milyar untuk tahun keempat, dan Rp.5,275 milyar untuk tahun kelima.
3) Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
   Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat. Direncanakan alokasi dana sebesar Rp.2,605 milyar untuk tahun pertama, Rp.4,025 milyar untuk tahun kedua Rp.4,450 milyar untuk tahun ketiga, Rp.4,800 milyar untuk tahun keempat, dan Rp.5,125 milyar untuk tahun kelima.

4.2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan program dan kegiatan:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
   Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu Misi 1 : "Meningkatkan kualitas layanan public yang efektif, efisien, dan responsive berbasis reformasi birokrasi", Tujuan 1 : "Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif, dan berintegritas" dengan Sasaran 1 : "Meningkatnyan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat", dengan indikator : "Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Tramtibum dan

Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas". Sasaran 2 : "Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan", dengan indikator: "Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas sub urusan Kebakaran".

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran memiliki 5 (lima) kegiatan yaitu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

b. Percapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pasal 9 ayat (3), terdapat 2 SPM yang terkait langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
   Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten / Kota, pasal 3, standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum ada 4 (empat) yaitu :
   - Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
   - Standar Sarana dan Prasarana Satpol PP;
   - Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
   - Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum

   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Program Penegakan Perda dan Perkada ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) standar mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
   Standar teknis mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota, dimana SPM memuat :
   - Layanan Respon Cepat (Respone Time);
   - Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
   - Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
   - Layanan Pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran; dan
   - Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Program Penanggulangan Bencana Kebakaran ditujukan untuk untuk memenuhi 5 (lima) standar mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran.

c. Pencapaian Tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).

Sekurangnya, terdapat 2 (dua) Tujuan SDGs yang terkait dengan program dan kegiatan pada Satpol PP dan Damkar yaitu :

1. Tujuan SDGs Nomor 11 : "Menciptakan Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan" terutama pada target:
   11.1 menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh.
   11.3 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara.
   11.4 memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan alam dan budaya dunia.
   11.5 mengurangi jumlah kematian, korban, dan pengurangan kerugian ekonomi relative terhadap pdb yang diakibatkan oleh bencana, temrasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan.
   11.7. menyediakan akses universal terhadap ruang terbuka hijau dan publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, manula, dan penyandang disabilitas.
2. Tujuan SDGs Nomor 17 : "Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi kemitraan Global Untuk Pembangunan berkelanjutan". terutama target:
   17.3 Pemberdayaan sumber pendapatan tambahan untuk negara dari sumber-sumber lainnya.
   17.7 Mendorong dan mendukung kerjasama efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dipupuk dari pengalaman dan strategi dalam bekerjasama.

Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dengan mempedomani Standar Pelayanan Minimal dan Pencapaian Tujuan SDGs, pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung akan melaksanakan **3** program, **15** kegiatan, dan **83** sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
11 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

12 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20 Pengadaan Mebel
21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26 Pemeliharaan Mebel
27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

8 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

29 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
30 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
31 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
32 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
33 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
34 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
35 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
36 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
37 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
38 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
39 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
40 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
41 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

42 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
43 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota

9 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

44 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
45 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
46 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
47 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
48 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
49 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
50 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
51 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
52 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

10 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

53 Pembentukan Sekretariat PPNS
54 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
55 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
56 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
57 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

11 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

58 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
59 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
60 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
61 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
62 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
63 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
64 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
65 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
66 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
67 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
68 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
69 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
70 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
71 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
72 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
73 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga

12 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

74 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
75 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

13 Investigasi Kejadian Kebakaran

76 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

14 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

77 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
78 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
79 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

15 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

80 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
81 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
82 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
83 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Dengan mempertimbangkan pagu sementara yang tersedia, program dan kegiatan dengan tujuan OPD dan kegiatan yang direncanakan dapat diuraikan dengan Tabel Berikut:

Tabel 3.2 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET 2025	PAGU	CAT	LOKASI	TARGET 2026	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sijunjung	100 %	5.870.916.457,00		Kab. Sijunjung		8.678.500.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kab. Sijunjung	100 %	38.363.400,00		Kab. Sijunjung		50.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	4.758.750,00		Kab. Sijunjung		5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	3.694.650,00		Kab. Sijunjung		5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	3.630.250,00		Kab. Sijunjung		5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sijunjung	2 Laporan	4.644.750,00		Kab. Sijunjung		5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	12 Laporan	22.323.300,00		Kab. Sijunjung		30.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kab. Sijunjung	100 %	5.347.565.891,00		Kab. Sijunjung		5.914.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	48 Orang/bulan	5.252.562.703,00		Kab. Sijunjung		5.700.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sijunjung	12 Dokumen	75.628.200,00		Kab. Sijunjung		130.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sijunjung	1 Laporan	5.487.600,00		Kab. Sijunjung		28.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung	14 Laporan	10.975.050,00		Kab. Sijunjung		56.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	100 %	21.305.000,00		Kab. Sijunjung		530.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sijunjung	1 Unit	0,00		Kab. Sijunjung		50.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00		Kab. Sijunjung		200.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sijunjung	47 Orang	21.980.000,00		Kab. Sijunjung		280.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	100 %	254.915.400,00		Kab. Sijunjung		657.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	6 Paket	6.300.400,00		Kab. Sijunjung		13.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00		Kab. Sijunjung		150.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00		Kab. Sijunjung		65.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Paket	82.891.300,00		Kab. Sijunjung		156.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Paket	0,00		Kab. Sijunjung		8.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	20 Laporan	115.278.100,00		Kab. Sijunjung		265.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kab. Sijunjung	100 %	0,00		Kab. Sijunjung		330.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00		Kab. Sijunjung		100.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00		Kab. Sijunjung		65.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00		Kab. Sijunjung		100.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00		Kab. Sijunjung		65.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung	100 %	114.103.404,00		Kab. Sijunjung		290.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12 Laporan	114.103.404,00		Kab. Sijunjung		115.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		175.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kab. Sijunjung	100 %	145.238.000,00		Kab. Sijunjung		907.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sijunjung	17 Unit	116.000.000,00		Kab. Sijunjung		800.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	0 Unit	0,00		Kab. Sijunjung		17.500.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	22 Unit	14.620.000,00		Kab. Sijunjung		50.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	6 Unit	16.038.000,00		Kab. Sijunjung		40.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan tramtibum yg dapat diselesaikan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada Persentase Satlinmas Nagari yang telah dilibatkan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Sijunjung	100 2,5 90 %	1.739.543.250,00		Kab. Sijunjung		4.405.000.000,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari dengan data perlindungan masyarakat yang termutakhirkan Persentase nagari yang mendapat layanan pencegahan gangguan tramtibum Persentase nagari yang telah membentuk Satlinmas Persentase Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Satlinmas terlatih	Kab. Sijunjung	100 % 90 %	1.743.234.000,00		Kab. Sijunjung		3.705.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	7.810.900,00		Kab. Sijunjung		75.000.000,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sijunjung	62 Dokumen	51.741.000,00		Kab. Sijunjung		250.000.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00		Kab. Sijunjung		430.000.000,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		40.000.000,00
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	101.916.900,00		Kab. Sijunjung		25.000.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00		Kab. Sijunjung		10.000.000,00
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		10.000.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00		Kab. Sijunjung		0,00

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Sijunjung	400 laporan	1.325.893.250,00		Kab. Sijunjung		2.800.000.000,00
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Sijunjung	10 Laporan	9.349.350,00		Kab. Sijunjung		50.000.000,00
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		5.000.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Sijunjung	32 Unit	40.848.000,00		Kab. Sijunjung		10.000.000,00
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase nagari yang mendapatkan layanan pencegahan pelanggaran Perda/Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kab. Sijunjung	100 %	96.584.450,00		Kab. Sijunjung		600.000.000,00
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 laporan	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 unit	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kab. Sijunjung	0 laporan	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	62 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		200.000.000,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kab. Sijunjung	70 Laporan	193.524.450,00		Kab. Sijunjung		200.000.000,00

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		200.000.000,00
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sijunjung	1 orang	9.094.400,00		Kab. Sijunjung		100.000.000,00
Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	8.459.400,00		Kab. Sijunjung		0,00
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Sijunjung	1 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		100.000.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Kab. Sijunjung	100 %	2.840.978.443,00		Kab. Sijunjung		4.925.000.000,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan personel pemadam kebakaran sesuai standar Persentase ketersediaan sarpras pemadam kebakaran sesuai standar Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (menit)	Kab. Sijunjung	15 menit 62,50 % 91,67 %	3.157.343.618,00		Kab. Sijunjung		3.725.000.000,00
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		25.000.000,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	365 Laporan	2.706.945.700,00		Kab. Sijunjung		2.800.000.000,00
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		160.000.000,00
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		40.000.000,00
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		50.000.000,00

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00		Kab. Sijunjung		250.000.000,00
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	0 Desa/Kelurahan	0,00		Kab. Sijunjung		50.000.000,00
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Kab. Sijunjung	0 laporan	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Sijunjung	36 Unit	106.426.343,00		Kab. Sijunjung		200.000.000,00
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		150.000.000,00
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kab. Sijunjung	0 Keluarga	0,00		Kab. Sijunjung		0,00
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan dengan sarana prasarana proteksi kebakaran yang sesuai standar	Kab. Sijunjung	100 %	4.255.300,00		Kab. Sijunjung		120.000.000,00
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	3.175.300,00		Kab. Sijunjung		60.000.000,00
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		60.000.000,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase nagari yang telah mempunyai relawan	Kab.	100 %	5.875.300,00		Kab.		80.000.000,00

	pemadam kebakaran	Sijunjung				Sijunjung		
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kab. Sijunjung	25 Dokumen	3.985.300,00		Kab. Sijunjung		80.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase nagari yang telah mempunyai relawan pemadam kebakaran	Kab. Sijunjung	100 %	19.283.450,00		Kab. Sijunjung		400.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	0 Orang	0,00		Kab. Sijunjung		175.000.000,00
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Sijunjung	3 Desa/Kelurahan	4.642.250,00		Kab. Sijunjung		175.000.000,00
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		50.000.000,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase ketersediaan personel penyelamat sesuai standar Persentase ketersediaan sarpras penyelamatan sesuai standar Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan	Kab. Sijunjung	100 %	93.943.175,00		Kab. Sijunjung		600.000.000,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Sijunjung	50 Laporan	3.902.350,00		Kab. Sijunjung		175.000.000,00
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Kab. Sijunjung	0 Dokumen	0,00		Kab. Sijunjung		75.000.000,00
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Kab. Sijunjung	0 Laporan	0,00		Kab. Sijunjung		175.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kab. Sijunjung	2 Unit	11.901.200,00		Kab. Sijunjung		175.000.000,00
				10.451.438.150,00				18.008.500.000

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja-P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja-P juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Renja-P juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Muaro Sijunjung, 8 Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

SYAMSURIJAL, S.T., M.Eng.
NIP. 197211092005011008

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia dan berkat-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.

Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2025 merupakan persyaratan bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung, diharapkan sebagai acuan bagi pimpinan/pejabat di jajaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program pembangunan di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai OPD sehingga dapat memberikan arah yang jelas, sitematis dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung dan terselenggaranya tata kelola Pemerintah yang baik.

Untuk lebih berhasilnya pencapaian tujuan kami merasa perlu adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam Menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini.

Muaro Sijunjung, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

YOFRITAS, ST, MT
Nip. 19690405 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I **PENDAHULUAN** 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN**..... 6
2.1. Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan 1 6
2.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23
2.3. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** 26
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27
3.3. Program dan Kegiatan 28

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** 30
BAB V **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** 44
BAB VI **PENUTUP** 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Balakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dengan Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005 – 2025, Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun–tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan, Sasaran dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2025;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tahapan Penyusunan Renja OPD:

1. Mempelajari Kebijakan dan Program prioritas dalam RPJPD.
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelanggaran Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang kesejahteraan sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja perubahan ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun berjalan (tahun 2025), dengan memadukan Rancangan perubahan RKPD tahun 2025 dengan Renstra OPD yang memuat rancangan dalam urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, program prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung tahun 2025 adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung tahun 2025 untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung pada semester II Tahun 2025
2. Menyusun Rencana Kerja tahun 2025 untuk menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami. Bab ini berisikan:

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Triwulan I.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan I. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksud mengacu pada hasil laporan kinerja Perangkat Daerah dan realisasi triwulan APBD

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Maayarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Berisikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan Renja Perangkat Daerah dan Uraian garis besar mengenai rekapitulas program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian tentang rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung serta pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025.

BAB V KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan capaian kinerja bidang urusan yang merupakan gambaran dari keberhasilan Perangkat Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan bidang yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Capaian kinerja bidang urusan memuat data dan/infornasi kinerja setiap bidang urusan sesuai dengan indikator masing-masing bidang urusan Perangkat Daerah. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan disajiakan dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci Utama dan Indikator Kinerja Kunci Hasil

BAB VI PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Sampai Triwulan II

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025 melaksanakan 10 (sepuluh) program, 22 kegiatan dan 51 sub. kegiatan yang pelaksanaannya didasarkan pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja triwulan I tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung untuk triwulan I tahun 2025 telah mencapai realisasi sebesar 16,85%,

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku.

Ukuran keberhasilan program atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan diatas, diperoleh dari laporan program masing-masing bidang dan bagian yang melaksanakan program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih berorientasi pada Peningkatan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 diluar kendali Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengakibatkan capaian kinerja belum maksimal adalah sebagai berikut:

a. Jumlah SDM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kurang memadai.
b. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sijunjung yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai Tahun Berjalan (2025) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
						URUSAN SOSIAL			31.806.185.032		36.392.323.511		3.819.081.193		819.997.251		819.997.251		21,47		37.212.320.762		
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan PD	100%	24.601.025.032	89,87%	29.771.091.357	100%	3.539.296.943	18,69%	747.925.866	18,69%	747.925.866	18,69%	21,13	54,28%	30.519.017.223	54,28	124,06
	1	06	01	201		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	488.260.000	85%	87.487.750	85%	24.556.850	14,17%	3.585.000	14,17%	3.585.000	14,17%	14,60	99,17%	91.072.750	116,67	18,65
	1	06	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja yang disusun	3 dok	488.260.000	3 dok	87.487.750	3 dok	24.556.850	28,34%	3.585.000	28,34%	3.585.000	28,34%	14,60	128,34%	91.072.750	128,34	18,65
	1	06	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Keuangan PD	100%	19.763.345.032	100%	27.083.249.762	100%	3.229.347.659	26,47%	670.590.420	26,47%	670.590.420	26,47%	20,77	126,47%	27.753.840.182	126,47	140,43
	1	06	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	26 orang	19.470.385.032	26 orang	26.940.521.012	26 orang	3.219.934.409	24,59%	666.476.670	24,59%	666.476.670	24,59%	20,70	124,59%	27.606.997.682	124,59	141,79
	1	06	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	14 dok	292.960.000		142.728.750	14 dok	9.413.250	28,34%	4.113.750	28,34%	4.113.750	28,34%	43,70	28,34%	146.842.500	28,34	50,12
	1	06	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum PD	100%	1.557.620.000	100%	843.894.468	100%	73.936.289	17,14%	20.425.350	17,14%	20.425.350	17,14%	27,63	117,14%	864.319.818	117,14	55,49
	1	06	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Unit	355.600.000		15.337.800	2 Unit	4.517.400		-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	15.337.800	100,00	4,31
	1	06	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	1 paket	413.260.000		51.891.200	1 paket	9.524.550	19,00%	4.906.000	19,00%	4.906.000	19,00%	51,51	119,00%	56.797.200	119,00	13,74

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	1	06	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 unit	130.200.000	1 unit	93.713.925	2 unit	2.715.650	35,92%	-	35,92%	0	35,92%	0,00	135,92%	93.713.925	135,92	71,98
	1	06	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 unit	147.760.000	2 unit	19.880.000	2 unit	1.440.000	31,25%	540.000	31,25%	540.000	31,25%	37,50	131,25%	20.420.000	131,25	13,82
	1	06	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	12 orang	125.200.000	12 orang	117.971.300	12 orang	4.795.750	24,55%	2.547.000	24,55%	2.547.000	24,55%	53,11	124,55%	120.518.300	124,55	96,26
	1	06	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil kooridnasi dan konsultasi	12 dok	385.600.000	12 dok	545.100.243	12 dok	50.942.939	26,40%	12.432.350	26,40%	12.432.350	26,40%	24,40	126,40%	557.532.593	126,40	144,59
	1	06	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.327.040.000	100%	654.381.148	100%	108.196.795	31,63%	19.520.996	31,63%	19.520.996	31,63%	18,04	131,63%	673.902.144	131,63	50,78
	1	06	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kapasitas Tagihan Internet yang dibayarkan Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang di bayarkan Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan	12 mbps;12 surat;12 meter kubik	324.500.000	12 mbps;12 surat;12 meter kubik	238.003.000	12 mbps;12 surat;12 meter kubik	8.870.795	28,25%	1.016.996	28,25%	1.016.996	28,25%	11,46	128,25%	239.019.996	128,25	73,66
	1	06	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	3 orang	1.002.540.000		416.378.148	6 orang	99.326.000	35,00%	18.504.000	35,00%	18.504.000	35,00%	18,63	135,00%	434.882.148	135,00	43,38
	1	06	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	1.464.760.000	100%	1.102.078.229	100%	103.259.350	22,71%	33.804.100	22,71%	33.804.100	22,71%	32,74	122,71%	1.135.882.329	122,71	77,55
	1	06	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	36 unit	1.409.760.000	36 unit	1.021.440.229	1 unit	29.929.350	25,42%	8.690.000	25,42%	8.690.000	25,42%	29,04	125,42%	1.030.130.229	125,42	73,07
	1	06	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0			41 Unit	70.000.000		23.144.100	0,00%	23.144.100	0,00%	33,06	100,00%	23.144.100	100,00	100,00
	1	06	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	55.000.000	4 unit	80.638.000	10 unit	3.330.000	20,00%	1.970.000	20,00%	1.970.000	20,00%	59,16	120,00%	82.608.000	120,00	150,20
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	10%	2.074.240.000	8,70%	2.384.561.817	10%	137.732.500	21,00%	31.672.150	21,00%	31.672.150	21,00%	23,00	29,70%	2.416.233.967	29,70	116,49

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	1	06	02	203		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	100%	2.074.240.000	87%	2.384.561.817	100%	137.732.500	21,00%	31.672.150	21,00%	31.672.150	21,00%	23,00	108,00%	2.416.233.967	108,00	116,49
	1	06	02	203	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	`	813.740.000		686.996.623	10 orang	32.679.000	27,24%	8.169.650	27,24%	8.169.650	27,24%	25,00	27,24%	695.166.273	27,24	85,43
	1	06	02	203	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	28 orang	935.000.000	28 orang	1.458.589.414	28 orang	103.956.500	27,69%	23.502.500	27,69%	23.502.500	27,69%	22,61	116,69%	1.482.091.914	116,69	158,51
	1	06	02	203	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 lembaga	325.500.000	5 lembaga	238.975.780	5 lembaga	1.097.000	29,08%	-	29,08%	0	29,08%	0,00	109,08%	238.975.780	109,08	73,42
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial;	7,87%;	1.782.420.000	7,87%	1.139.814.840	7,87%	44.576.650	1,35%	6.808.650	1,35%	6.808.650	1,35%	15,27	9,22%	1.146.623.490	9,22	64,33
	1	06	04	201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	100%	1.179.820.000	100%	1.018.914.136	100%	39.654.250	15%	5.294.650	15,00%	5.294.650	15,00%	13,35	115,00%	1.024.208.786	115,00	86,81
						Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	660 orang	488.500.000	466 orang	539.389.384	200 orang	13.553.000		3.075.000	0,00%	3.075.000	0,00%	22,69	100,00%	542.464.384	100,00	111,05
	1	06	04	201	05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	137.760.000	5 orang	43.956.550	5 orang	1.989.750	28,00%	1.370.000	28,00%	1.370.000	28,00%	68,85	128,00%	45.326.550	128,00	32,90

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	1	06	04	201	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	85.000.000	10 orang	227.808.487	10 orang	15.981.000	27,50%	-	27,50%	0	27,50%	0,00	127,50%	227.808.487	127,50	268,01
	1	06	04	201	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	157.760.000	5 orang	103.962.805	5 orang	4.633.000	11,50%	849.650	11,50%	849.650	11,50%	18,34	111,50%	104.812.455	111,50	66,44
	1	06	04	201	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 orang	200.300.000	12 orang	103.796.910	12 orang	2.065.000	23,00%	-	23,00%	0	23,00%	0,00	123,00%	103.796.910	123,00	51,82
	1	06	04	201	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	110.500.000		0	5 orang	1.432.500		-	0,00%	0		0,00	100,00%	0	100,00	0,00
	1	06	04	202		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	20%	602.600.000	20%	120.900.704	20%	4.922.400	2,19%	1.514.000	2,19%	1.514.000	2,19%	30,76	102,19%	122.414.704	510,93	20,31
	1	06	04	202	07	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	182.100.000	10 orang	51.663.204	10 orang	3.187.900	27,30%	1.514.000	27,30%	1.514.000	27,30%	47,49	127,30%	53.177.204	127,30	29,20
	1	06	04	202	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	umlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	420.500.000	10 orang	69.237.500	10 orang	1.734.500	5,50%	-	5,50%	0	5,50%	0,00	105,50%	69.237.500	105,50	16,47
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosia	100%	630.500.000	100,00%	724.719.135	100%	4.132.400	9,65%	3.679.250	9,65%	3.679.250	9,65%	89,03	109,65%	728.398.385	109,65	115,53

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	1	06	05	202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	630.500.000	100%	724.719.135	100%	4.132.400	9,65%	3.679.250	9,65%	3.679.250	9,65%	89,03	109,65%	728.398.385	109,65	115,53
	1	06	05	202	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4 kali	630.500.000	4 kali	724.719.135	123.282 orang	4.132.400	28,95%	3.679.250	28,95%	3.679.250	28,95%	89,03	128,95%	728.398.385	128,95	115,53
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	2.494.000.000	100%	1.957.436.919	100%	91.066.200	17,98%	29.677.835	17,98%	29.677.835	17,98%	32,59	117,98%	1.987.114.754	117,98	79,68
	1	06	06	201		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan sosial	100%	1.632.000.000	100%	697.191.009	100%	52.439.500	12,20%	15.844.900	12,20%	15.844.900	12,20%	30,22	112,20%	713.035.909	112,20	43,69
	1	06	06	201	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	671.000.000	1 paket	613.105.409	50 orang	33.216.200	26,00%	7.264.150	26,00%	7.264.150	26,00%	21,87	126,00%	620.369.559	126,00	92,45
	1	06	06	201	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan sandang bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	1 paket	466.000.000		58.783.000	1 paket	13.262.800	10,00%	7.330.000	10,00%	7.330.000	10,00%	55,27	110,00%	66.113.000	110,00	14,19
	1	06	06	201	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	1 paket	165.000.000		8.226.600	1 paket	1.629.750	10,00%	-	10,00%	0	10,00%	0,00	110,00%	8.226.600	110,00	4,99
	1	06	06	201	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1 kegiat an	165.000.000		9.093.900	1 kegiat an	1.792.000		-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	9.093.900	100,00	5,51
	1	06	06	201	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	1 kegiat an	165.000.000		7.982.100	1 kegiat an	2.538.750	15,00%	1.250.750	15,00%	1.250.750	15,00%	49,27	115,00%	9.232.850	115,00	5,60
	1	06	06	202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	862.000.000	100%	1.260.245.910	100%	38.626.700	23,75%	13.832.935	23,75%	13.832.935	23,75%	35,81	123,75%	1.274.078.845	123,75	147,80

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	1	06	06	202	01	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	umlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 KSB	640.000.000	4 KSB	734.086.656	4 KSB	22.173.200	5,00%	9.510.435	5,00%	9.510.435	5,00%	42,89	105,00%	743.597.091	105,00	116,19
	1	06	06	202	02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	222.000.000	40 orang	526.159.254	40 orang	16.453.500	42,50%	4.322.500	42,50%	4.322.500	42,50%	26,27	142,50%	530.481.754	142,50	238,96
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	100%	224.000.000	100%	414.699.443	100%	2.276.500	35,40%	233.500	35,40%	233.500	35,40%	10,26	135,40%	414.932.943	135,40	185,24
	1	06	07	201		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Puspa Bangsa yang dipelihara	100%	224.000.000	100%	414.699.443	1 Unit	2.276.500	35,40%	233.500	35,40%	233.500	35,40%	10,26	135,40%	414.932.943	135,40	185,24
	1	06	07	201	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 paket	224.000.000	1 paket	414.699.443	50 unit	2.276.500	35,40%	233.500	35,40%	233.500	35,40%	10,26	135,40%	414.932.943	135,40	185,24
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.414.033.025		4.792.242.351		5.758.646.100		31.438.000		31.438.000		0,55				
7	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	18%	607.000.000	17%	1.302.408.631	18%	43.224.700	22,18%	7.100.000	22,18%	7.100.000	22,18%	16,43	39,18%	1.309.508.631	39,18	215,73
	2	08	02	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	100%	316.000.000	100%	517.094.656	100%	16.519.000	22,25%	3.900.000	22,25%	3.900.000	22,25%	23,61	122,25%	520.994.656	122,25	164,87
	2	08	02	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 RAD	316.000.000	1 RAD	517.094.656	1 Dok	16.519.000	22,25%	3.900.000	22,25%	3.900.000	22,25%	23,61	122,25%	520.994.656	122,25	164,87

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	2	08	02	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	15%	130.000.000	15%	351.703.595	15%	14.824.250	30,25%	3.200.000	30,25%	3.200.000	30,25%	21,59	45,25%	354.903.595	301,67	273,00
	2	08	02	202	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	11 org. perempuan	130.000.000	11 org. perempuan	351.703.595	11 org.	14.824.250	30,25%	3.200.000	30,25%	3.200.000	30,25%	21,59	130,25%	354.903.595	130,25	273,00
	2	08	02	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	70%	161.000.000	70%	433.610.380	70%	11.881.450	14,05%	-	14,05%	0	14,05%	0,00	84,05%	433.610.380	120,07	269,32
	2	08	02	203	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Keg.	161.000.000	15 Keg.	433.610.380	10 orang	11.881.450	14,05%	-	14,05%	0	14,05%	0,00	114,05%	433.610.380	114,05	269,32
8	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	1.130.000.000	100%	306.186.574	100%	189.478.000	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	306.186.574	100,00	27,10
	2	08	03	201		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	100%	128.000.000	100%	121.651.400	100%	58.451.300	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	121.651.400	100,00	95,04
	2	08	03	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	90 orang	128.000.000	90 orang	121.651.400	1 dok	58.451.300	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	121.651.400	100,00	95,04

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	2	08	03	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang diberikan rujukan lanjutan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab./Kota	100%	702.000.000	100%	184.535.174	100%	98.234.000	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	184.535.174	100,00	26,29
	2	08	03	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	702.000.000	3 orang	184.535.174	2 layanan	98.234.000		-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	184.535.174	1,00	26,29
	2	8	03	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang aktif	100 %	300.000.000		-		32.792.700		-	0,00%	0		0,00				
	2	8	03	203	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 orang	300.000.000		-		32.792.700		-	0,00%	0		0,00				
9	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100%	140.000.000	96%	429.532.985	100%	3.063.400	26,25%	-	26,25%	0	26,25%	0,00	122,25%	429.532.985	122,25	306,81
	2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	140.000.000	100%	429.532.985	100%	3.063.400	26,25%	-	26,25%	0	26,25%	0,00	126,25%	429.532.985	126,25	306,81
	2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kec.	66.000.000	2 kec.	269.617.835	5 orang	1.526.800	28,25%	-	28,25%	0	28,25%	0,00	128,25%	269.617.835	128,25	408,51

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	2	08	06	202	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 lembaga	74.000.000	4 lembaga	159.915.150	1 dok	1.536.600	24,25%	-	24,25%	0	24,25%	0,00	124,25%	159.915.150	124,25	216,10
10	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	2.537.033.025	100%	2.754.114.161	100%	5.522.880.000	5,78%	24.338.000	5,78%	24.338.000	5,78%	0,44	105,78%	2.778.452.161	105,78	109,52
	2	08	07	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban Kekerasan yang ditangani	100%	365.000.000	100%	891.800.804	100%	87.286.700	5,21%	17.200.000	5,21%	17.200.000	5,21%	19,71	105,21%	909.000.804	105,21	249,04
	2	08	07	201	02	Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Dan DRPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 kasus	165.000.000	3 kasus	891.800.804	1 Dok	15.738.000	10,42%	3.900.000	10,42%	3.900.000	10,42%	24,78	110,42%	895.700.804	110,42	542,85
	2	08	07	201	04	Adovokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 orang	200.000.000		0	5 orang	71.548.700	11,00%	13.300.000	11,00%	13.300.000		18,59	111,00%	13.300.000	111,00	6,65
	2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100%	1.499.727.025	100%	1.347.599.917	100%	5.379.986.000	12,12%	7.138.000	12,12%	7.138.000	12,12%	0,13	112,12%	1.354.737.917	112,12	90,33
	2	08	07	202	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 keg.	886.000.000	1 keg.	863.653.177	50 orang	115.738.000	24,24%	6.578.000	24,24%	6.578.000	24,24%	5,68	124,24%	870.231.177	124,24	98,22
	2	08	07	202	02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	613.727.025	1 paket	483.946.740	1 layanan	5.264.248.000		560.000	0,00%	560.000	0,00%	0,01	100,00%	484.506.740	100,00	78,94

No.	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome) Sub. Kegiatan (output)	Target Renstra pada tahun 2021 s/d 2024 (akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9= 8+9+10+11*		*10=12/7 x 100%*		*11=6+12*		*12=14/5 x 100*	
								k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.	k	Rp.
	2	08	07	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase kegiatan Penguatan dan engembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	672.306.000	100%	514.713.440	100%	55.607.300	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	514.713.440	100,00	76,56
	2	08	07	203	02	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah/kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 orang	672.306.000	4 orang	514.713.440	1 dok	55.607.300		-	0,00%	0	0,00%	0,00	100,00%	514.713.440	100,00	76,56

2.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan ditangani pada periode Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan
   Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sijunjung per Maret 2025 sebanyak 125.902 Jiwa, dimana angka tersebut akan mengalami perubahan setiap periode verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya.
b. Anak Terlantar
   Jumlah Anak terlantar masih tinggi pada tingkat anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memilki kewenangan atas panti rehabilitasi.
c. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan
   Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.
d. Lanjut Usia Terlantar
   Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Sijunjung, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.
e. Kesetaraan Gender
   Pemahaman keseteraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.
f. Perlindungan Perempuan dan Anak
   Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk penelahaan usulan program/kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam rancangan awal RKPD dan sudah termasuk dalam Renstra dan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kegiatan yang ada di Kabupaten sudah terakumulasi dalam Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sijunjung. Adapun usulan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah penyesuaian indikator program/kegiatan dengan Kepmendagri 1317 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Usulan program/kegiatan masyarakat pada semester II ini yang akan dilaksanakan dan sudah termasuk dalam renstra dan Renja awal tahun 2025 ini adalah kegiatan terkait dengan pemberian bantuan lansia terlantar, disabilitas terlantar dan program penanggulangan bencana.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Catatan
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	32,58 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	562 orang	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80 %	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data fakir miskin yang dikelola	100 %	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	123282 orang	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sijunjung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40601 Keluarga	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan sosial	100 %	
	Penyediaan Makanan	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Catatan
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;

f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya;
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.1.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah perempuan dan perlindungan anak dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu yang hangat dibicarakan tidak hanya ditingkat pusat saja tetapi sampai ke daerah. Kondisi yang demikian juga terjadi di Kabupaten Sijunjung. Selama periode 2016-2021 ternyata masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak tampaknya belum optimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya terjadi masalah KDRT serta masih banyaknya anak yang *drop-out* dari sekolah terutama untuk siswa SMP. Sedangkan disisi lain kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung periode 2021-2026 hanya sedikit mengalami peningkatan. hal ini terlihat dari adanya peningkatan 4 (empat) orang perempuan sebagai anggota parlemen. Kondisi yang demikian perlu mendapat perhatian yang serius dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sijunjung.

Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung adalah :

1. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif
2. Terwujudnya Pelayanan Sosial, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Sedangkan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung adalah:

1. Meningkatnya tata Kelola organisasi
2. Meningkatnya Pelayanan Sosial
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

3.3. Program dan Kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung tahun 2025 terbagi 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Urusan Sosial dan Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. Program dan Kegiatan Urusan Sosial:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
4. Program Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
   b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

6. Program Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan sebagai berikut:
    a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

B. Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*:*

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
    a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
    b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan
    a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
    a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan Khusus Anak
    a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program Bidang Sosial

Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung dengan Program Prioritas untuk Bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Pendanaan Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya program Pembangunan Nasional dan program pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana serta biaya sehingga untuk mewujudkan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah tersebut harus dilakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dan standar dari setiap program atau kegiatan tersebut dilaksanakan.

Agar pelaksanaan program pembangunan nasional dan pembangunan daerah tersebut dapat terwujud dengan baik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat program dan rencana serta biaya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk tahun 2025 Triwulan II ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai akhir tahun, dimana pada awal tahun anggaran 2025 dana yang tersedia sebesar Rp. 10.201.522.486,- (Sepuluh milyar dua ratus satu juta lima taur dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Jumlah ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan dengan mengubah/menggeser rekening kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.401.095.509	3.459.571.167	(941.524.342)
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.401.095.509	3.459.571.167	(941.524.342)
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan PD	100%	100%			3.741.917.959	3.223.561.217	(518.356.742)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%			29.600.600	20.510.739	(9.089.861)
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.600.600	20.510.739	(9.089.861)
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Keuangan PD	100%	100%			3.240.806.409	2.936.152.633	(304.653.776)
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.219.934.409	2.926.739.383	(293.195.026)
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.872.000	9.413.250	(11.458.750)
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi kepegawaian PD	100%	100%					-
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	55 Paket	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Sumber Dana	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	6	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum PD	100%	100%			223.852.400	73.880.200	(149.972.200)
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		-
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.163.650	4.517.400	(4.646.250)
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.250	9.524.550	(5.474.700)
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.965.550	2.715.650	(12.249.900)
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000	1.440.000	(1.560.000)
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.998.700	4.795.750	(7.202.950)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.725.250	50.886.850	(118.838.400)
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaaan baik	100 %	100 %			-	-	-
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%			120.749.200	89.758.295	(30.990.905)
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.459.200	8.870.795	(8.588.405)
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.290.000	80.887.500	(22.402.500)
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%			126.909.350	103.259.350	(23.650.000)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	47 Unit	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.929.350	29.929.350	-
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.500.000	70.000.000	(21.500.000)
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.480.000	3.330.000	(2.150.000)
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	10%	10%			140.528.000	104.162.500	(36.365.500)
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	100%	100%			140.528.000	104.162.500	(36.365.500)
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.475.900	24.810.000	(8.665.900)
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.803.900	78.255.500	(26.548.400)
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	0	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	10 Lembaga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.248.200	1.097.000	(1.151.200)
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1. 7,87%; 100%	1. 7,87%; 100%			59.368.350	37.532.150	(21.836.200)
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	562 orang	562 orang			48.399.500	32.609.750	(15.789.750)
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	330 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.748.000	10.583.500	(4.164.500)
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	0	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu				- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.412.500	940.500	(1.472.000)
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.225.000	1.989.750	(2.235.250)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	322 Orang	322 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.525.500	12.046.500	(5.479.000)
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.705.000	4.760.000	55.000
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.783.500	2.289.500	(2.494.000)
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	16 orang	16 orang			10.968.850	4.922.400	(6.046.450)
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.207.350	3.187.900	(4.019.450)
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.761.500	1.734.500	(2.027.000)
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terdata dan terintegrasi	100%	100%			8.136.250	4.132.400	(4.003.850)
1	6	5	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang mendapat pelayanan sosial	25%	25%					-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang menerima bantuan	55,00%	55,00%			8.136.250	4.132.400	(4.003.850)
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	124.867 Jiwa	124.867 Jiwa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.136.250	4.132.400	(4.003.850)
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	42.152 Keluarga	42.152 Keluarga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22.894 KPM	22.894 KPM	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22.894 KPM	22.894 KPM	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	100%	100%			446.144.950	87.906.400	(358.238.550)
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 orang	100 orang			77.708.050	48.867.750	(28.840.300)
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.623.100	33.216.200	(8.406.900)
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.742.450	13.262.800	(17.479.650)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.629.750	381.750	(1.248.000)
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.792.000	756.250	(1.035.750)
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.750	1.250.750	(670.000)
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan bencana	20 orang	20 orang			368.436.900	39.038.650	(329.398.250)
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	4 Kampung	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.528.150	25.694.650	(328.833.500)
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.908.750	13.344.000	(564.750)
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	100%	100%			5.000.000	2.276.500	(2.723.500)
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	100%			5.000.000	2.276.500	(2.723.500)
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	50 Makam	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000	2.276.500	(2.723.500)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.800.426.977	5.746.842.600	(53.584.377)
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.800.426.977	5.746.842.600	(53.584.377)
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	18%	18%			82.027.977	39.290.200	(42.737.777)
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	100%	100%			18.338.000	12.584.500	(5.753.500)
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.338.000	12.584.500	(5.753.500)
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota				- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		-
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	15%	15%			26.604.467	14.824.250	(11.780.217)
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Organisasi	18 Organisasi	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.604.467	14.824.250	(11.780.217)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Sumber Dana	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	70%	70%			37.085.510	11.881.450	(25.204.060)
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.085.510	11.881.450	(25.204.060)
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%			189.478.000	189.478.000	-
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	100%	100%			58.451.300	58.451.300	-
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.451.300	58.451.300	-
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang diberikan rujukan lanjutan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab./Kota	100%	100%			98.234.000	98.234.000	-
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.234.000	98.234.000	-
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang aktif	100%	100%			32.792.700	32.792.700	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.792.700	32.792.700	-
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						-	-	-
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang dikelola	100%	100%			-	-	-
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100%	100%			6.041.000	3.063.400	(2.977.600)
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	100%	100%				-	-
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1 Organisasi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	100%			6.041.000	3.063.400	(2.977.600)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000	1.526.800	(1.473.200)
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.041.000	1.536.600	(1.504.400)
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	100%			5.522.880.000	5.515.011.000	(7.869.000)
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban Kekerasan yang ditangani	100%	100%			87.286.700	83.352.200	(3.934.500)
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.738.000	11.803.500	(3.934.500)
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 Orang	5 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.548.700	71.548.700	-
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100%	100%			5.379.986.000	5.376.051.500	(3.934.500)
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.738.000	111.803.500	(3.934.500)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	50 Layanan	50 Layanan	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.264.248.000	5.264.248.000	-
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	100%			55.607.300	55.607.300	-
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	1 Orang	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.607.300	55.607.300	-
Jumlah											**10.201.522.486**	**9.206.413.767**	**(995.108.719)**

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 5.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang Urusan	Satuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
					Target Awal	Target Perubahan
1	Urusan Sosial	point	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	79,61	74	74
		%	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan sosial	55,50	50	50
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Persentase pelaksanaan Pengarustamaan Gender	100	60	60
		%	Persentase keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan	100	100	100
		%	Persentase pemenuhan prasyarat KLA	90,36	80	80

V.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Table 5. 2.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	bidang Urusan	Satuan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
					Target Awal	Target Perubahan
1	Urusan Sosial	%	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	32,58	25	25
		%	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	1,02	1,5	1,5
		%	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100	100	100
		%	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,41/100.000 orang	11	11

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Rencana Kerja Perubahan yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut:

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja Perubahan ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Tujuan, sasaran dan Tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

YOFRITAS, ST, MT
Nip. 19690405 199403 1 009

S

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra OPD. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja Dinas Perhubungan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil Dinas Perhubungan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tahun 2025..

Muaro Sijunjung, April 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

BOBBY ROESPANDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
Nip. 19740715 199311 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 2 Latar Belakang 1

1. 4 Landasan Hukum 2

1. 3 Maksud dan Tujuan 3

1. 1 Sistematika Penulisan.....4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA.....5

2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan 1 Tahun 2025 ..5

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan 10

2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14

BAB V PENUTUP.....14

BAB I
PENDAHULUAN

1. 2 Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan efektivtas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu ditingkatkan dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar Pemerintah dengan Pemda, potensi dan keanekaragaman daerah peluang dan tantangan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan disertai pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah.

Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan Perhubungan perlu diselenggarakan secara profesional terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penjabaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan faktor utama pelayanan disektor Perhubungan Darat. Disamping faktor lain seperti kesiapan sumber daya aparatur, sistem kelembagaan dan prosedur serta peralatan/sarana pendukung. Pelimpahan kewenangan urusan Pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dgn potensi yang ada merupakan aspek penentu agar pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan baik dibidang personil, organisasi dan finansial.

Dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Perhubungan tahun tahun 2026 sangatlah penting sebagai kerangka acuan yang menjamin pembangunan Perhubungan tetap dalam koridor pencapaian visi misi yang telah ditetapkan, dengan disusunnya rencana awal rencana kerja setiap tahun secara sistematis diharapkan akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam penjabaran program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan setiap tahunnya. Dalam rancangan awal rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tahun 2026 ini dapat direalisasikan secara maksimal dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, Propinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari Tingkat Pusat hingga Daerah, setiap Kabupaten/Kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Rencana Kerja(renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dibidang Perhubungan berdasarkan azas Otonomi dan tugas perbantuan.

1. 4 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 secara yuridis berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penganggaran Pemerintah Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 64 tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan.

1. 3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai sasaran, program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2025.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025
2. Merumuskan agar program dan kegiatan yang telah disusun terfokus dan tepat sasaran;

1. 1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan 1 Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA

2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan 1 Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 58 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan orgnisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung selama tahun 2025.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Guna mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan dana melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dengan jumlah anggaran Rp. 14.183.016.775 dengan realisasi sebesar Rp.3.355.403.288,- (99,93%) di Triwulan I. Hasil evaluasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung selama triwulan I disajikan dalam bentuk tabel.

NO	URAIAN	REALISASI BELANJA 2024		
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3,891,602,383**	**870,290,855**	**22.36**
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38,848,000**	**14,738,000**	**37.94**
1	Sub Kegiatan penyusunanan dokumen perencanaan perangkat daerah	38,848,000	14,738,000	37.94
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,630,992,555**	**793,649,009**	**21.86**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,626,024,555	789,521,009	21.77
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4,968,000	4,128,000	83.09
III	**Kegiatan ADM umum perangkat daerah**	**17,612,300**	**5,970,113**	**33.90**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	840,000	-	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	821,750	-	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,161,350	570,000	18.03
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	6,459,200	-	-

	Cetakan dan Penggandaan			
5	Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	-	-	#DIV/0!
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6,330,000	5,400,113	85.31
IV	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**181,489,528**	**51,913,733**	**28.60**
1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,141,528	25,860,233	31.48
2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	99,348,000	26,053,500	26.22
V	**Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**22,660,000**	**4,020,000**	**17.74**
1	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	19,250,000	1,710,000	8.88
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,410,000	2,310,000	67.74
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**10,291,414,392**	**2,485,112,433**	**24.15**
I	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-
II	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan**	**9,636,909,324**	**2,346,385,933**	**24.35**

	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
1	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota	32,016,100	5,168,250	16.14
2	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,643,534,306	30,152,750	1.83
3	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana jalan	19,599,100	3,086,500	15.75
4	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan jalan	7,941,759,818	2,307,978,433	29.06
III	**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**231,382,350**	**57,530,000**	**24.86**
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	231,382,350	57,530,000	24.86
IV	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**143,158,000**	**12,723,750**	**8.89**
1	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala Kendaraan bermotor	53,690,900	11,417,000	21.26
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2,024,100	-	-
3	Sub kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	504,000	-	-
4	Sub kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	79,000,000	-	-
5	Sub kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala	7,939,000	1,306,750	16.46

	kendaraan bermotor			
V	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**68,470,608**	**21,976,000**	**32.10**
1	Sub kegiatan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	68,470,608	21,976,000	32.10
VI	**Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**15,859,400**	**3,086,500**	**19.46**
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15,859,400	3,086,500	19.46
VII	**Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.**	**195,634,710**	**43,410,250**	**22.19**
1	Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	14,560,690	3,086,500	21.20
2	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	181,074,020	40,323,750	22.27
TOTAL		**14,183,016,775**	**3,355,403,288**	**23.66**

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari 3 aspek yaitu :

1. Kelembagaan

   Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perhubungan. Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.

2. Fungsi Perhubungan

   Sejalan dengan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan, Prasarana dan Keselamatan;

   b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan, Prasarana dan Keselamatan;

   c. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang lalu Lintas dan Angkutan, Prasaran dan Keselamatan;

   d. Pembinaan terhadap UPTD Dinas; dan

   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Sumber Daya Manusia

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya.

   Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan

GAMBARAN UMUM KEPEGAWAIAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIJUNJUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	Jumlah (Orang)
1.	**Jumlah ASN**	36
	PNS	35
	PPPK	1
	Jumlah Non PNS:	59
	THL	31
	K3 Penjaga Kantor	4
	Petugas Rest Area Kiliran Jao	28
	Petugas K3 Rest Area Kiliran Jao	2
2.	**Kualifikasi Pendidikan (ASN)**	36
	S2	3
	S1/D4	14
	D1/DII/DIII	9
	SLTA	10
	SLTP	0
	SD	0
3.	**Pejabat Struktural**	10
	Eselon II.b	1
	Eselon III.a	1

	Eselon III.b	2
	Eselon IV.a	5
	Eselon IV.b	1

Tabel 2.3

Pencapaian kinerja pelayanan

Dinas perhubungan Kabupaten Sijunjung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya kinerja manajemen organisasi urusan perhubungan	Nilai Evaluasi akuntabilita kinerja	74	74,26	100,35%	Sangat Baik
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	20%	36%	180%	Sangat Baik

2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana Prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang Perhubungan, sehingga dapat dihasilkan aparatur Perhubungan yang kreatif dan inovatif.
2. Penyelenggaraan Transportasi yang tertib, lancar dan aman.
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan.
4. Usulan program kegiatan belum sepenuhnya mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan bidang Perhubungan
5. Menyediakan perangkat hukum/peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan dan LPJU.
6. Potensi SDM Perhubungan yang tersedia tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Perhubungan di tingkat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung menghadapi tantangan sebagai berikut :

a. Mampu Menyediakan Transportasi yang tertib, lancar dan aman.
b. Mampu menyediakan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan.
c. Pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatan realisasi penerimaan daerah.

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap dan profesional di bidang Perhubungan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan OPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang Perhubungan Kedepan diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung memiliki tenaga fungsional di bidang Perhubungan yang akan berperan di bidang Perhubungan di Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu :

1. Upaya peningkatan kemampuan teknis, terutama di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan di bidang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
2. Meningkatkan prasarana dan fasilitas LLAJ
3. Meningkatkan kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas angkutan jalan.
4. Meningkatkan ruang parkir dalam melayani jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan masyarakat.
6. Kantor yang belum memadai dalam pelayanan masyarakat.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RKPD Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2024. Skala prioritas dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Matriks Renja Perubahan PD Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIJUNJUNG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**12.836.042.265,00**	**15.041.024.327,00**	**14.183.016.775,00**	**1.346.974.510,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.836.042.265,00**	**15.041.024.327,00**	**14.183.016.775,00**	**1.346.974.510,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**12.836.042.265,00**	**15.041.024.327,00**	**14.183.016.775,00**	**1.346.974.510,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**				**10 %**	**10 %**	**3.788.384.964,00**	**3.969.256.984,00**	**3.891.602.383,00**	**-3.788.384.964,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keselarasan dokumen perencanaan*				100 %	100 %	56.633.850,00	43.428.325,00	38.848.000,00	-17.785.850,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				28 Dokumen	28 Dokumen	56.633.850,00	43.428.325,00	38.848.000,00	-17.785.850,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	3.340.792.697,00	3.639.860.155,00	3.630.992.555,00	290.199.858,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.321.029.597,00	3.626.024.555,00	3.626.024.555,00	304.994.958,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	14 Laporan	14.763.100,00	6.873.200,00	0,00	-14.763.100,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	5.000.000,00	6.962.400,00	4.968.000,00	-32.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*				6 %	6 %	74.206.025,00	40.309.100,00	17.612.300,00	-56.593.725,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.144.800,00	938.000,00	840.000,00	-1.304.800,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.182.300,00	2.333.650,00	821.750,00	-4.360.550,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.220.200,00	9.624.600,00	3.161.350,00	-16.058.850,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.928.000,00	7.680.500,00	6.459.200,00	-10.468.800,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				800 orang Laporan	800 orang Laporan	8.880.975,00	3.980.550,00	0,00	-8.880.975,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	21.849.750,00	15.751.800,00	6.330.000,00	-15.519.750,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*				6 %	6 %	231.993.492,00	203.823.404,00	181.489.528,00	-50.503.964,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	118.019.992,00	98.886.704,00	82.141.528,00	-35.878.464,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	113.973.500,00	104.936.700,00	99.348.000,00	-14.625.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase aset OPD dalam keadaaan baik*				7 %	7 %	84.758.900,00	41.836.000,00	22.660.000,00	-62.098.900,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	71.500.000,00	35.250.000,00	19.250.000,00	-52.250.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	11.940.000,00	5.970.000,00	3.410.000,00	-8.530.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.318.900,00	616.000,00	0,00	-1.318.900,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**V/C Rasio di jalan kabupaten Persentase Kendaraan Umum Penumpang/Barang yang Laik Jalan Persentase ketersediaan rasarana keselamatan lalu lintas**				**0,35 83 93 Poin % %**	**0,35 83 93 Poin % %**	**9.047.657.301,00**	**11.071.767.343,00**	**10.291.414.392,00**	**-9.047.657.301,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan daerah yang dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas*				93 %	93 %	928.050,00	0,00	0,00	-928.050,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	928.050,00	0,00	0,00	-928.050,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase tersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten*				93 %	93 %	7.803.392.251,00	10.053.685.868,00	9.636.909.324,00	1.833.517.073,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				200 Unit	3 Unit	49.658.258,00	38.148.400,00	32.016.100,00	-17.642.158,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				126 Unit	126 Unit	952.965.100,00	2.047.849.000,00	1.643.534.306,00	690.569.206,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	23.416.050,00	25.928.650,00	19.599.100,00	-3.816.950,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				400 Unit	400 Unit	6.777.352.843,00	7.941.759.818,00	7.941.759.818,00	1.164.406.975,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Fasilitas parkir yang memiliki izin penyelenggaraan*				83 %	83 %	252.068.350,00	239.350.350,00	231.382.350,00	-20.686.000,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	252.068.350,00	239.350.350,00	231.382.350,00	-20.686.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				83 %	83 %	224.912.400,00	192.967.250,00	143.158.000,00	-81.754.400,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				11 Unit	11 Unit	78.660.400,00	62.390.250,00	53.690.900,00	-24.969.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				40000 Dokumen	40000 Dokumen	62.790.000,00	17.540.000,00	2.024.100,00	-60.765.900,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			JumlahLaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	1.008.000,00	1.008.000,00	504.000,00	-504.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	54.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				60 Laporan	60 Laporan	28.454.000,00	33.029.000,00	7.939.000,00	-20.515.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan daerah yang dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas*				93 %	93 %	181.335.000,00	150.678.500,00	68.470.608,00	-112.864.392,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	181.335.000,00	150.678.500,00	68.470.608,00	-112.864.392,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Rekomendasi Andalalin yang dipatuhi*				90 %	90 %	29.444.650,00	20.047.600,00	15.859.400,00	-13.585.250,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	29.444.650,00	20.047.600,00	15.859.400,00	-13.585.250,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase angkutan anak sekolah dan angkutan tidak dalam trayek dalam 1 daerah Kabupaten yang tersedia*				93 %	93 %	555.576.600,00	415.037.775,00	195.634.710,00	-359.941.890,00			-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	Perangkat Daerah DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				8 Laporan	8 Laporan	21.881.450,00	17.159.725,00	14.560.690,00	-7.320.760,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	533.695.150,00	397.878.050,00	181.074.020,00	-352.621.130,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar P- 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**12.836.042.265,00**	**15.041.024.327,00**	**14.183.016.775,00**	**1.346.974.510,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung. Rancangan awal Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pemangku kepentingan dan Pengelola Program dan Kegiatan di Kabupaten Sijunjung yang bertujuan untuk memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Muaro Sijunjung, April 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

BOBBY ROESPANDI, AP.M.Si
Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 19740715 199311 1 001

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2025

MUARO SIJUNJUNG 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan kewajiban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Perubahan disusun sebagai pegangan bagi setiap OPD dalam mengelola keuangan guna melaksanakan program/ kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 maka segala program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada Renja Perubahan tersebut.

Kami menyadari Renja Perubahan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 01 September 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Kabupaten Sijunjung

dr. Edwin Suprayogi, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196909071999031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025

Tabel 2.3 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal KPD tahun 2025

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Sijunjung

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahunan (Renja) Perubahan OPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra yang memuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang ada dalam rancangan awal RPJMD sebagai input RKPD yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman penyusunan APBD.

Renja Perubahan OPD sangat terkait dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan visi dan misi yang memuat sasaran kinerja, pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Renja OPD merupakan penjabaran tahunan yang jika dikumpulkan akan disusun dalam Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
   a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
   b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
e. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);
i. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan bidang Perpustakaan dan Kearsipan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi dan misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perubahan serta Sistematika Penyusunan Renja Perubahan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung melaksanakan kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menjalankan 2 (dua) urusan wajib guna memberikan pelayanan prima kepada publik yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

Program / kegiatan yang tertuang dalam Renja Perubahan dan terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 adalah sebanyak 5 (Lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan usulan sumber biaya berasal dari APBD Kabupaten Sijunjung pada awal tahun sebesar Rp. 4.791.595.445,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah),

anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Pagu
5	**Belanja Daerah**	**4.791.595.445**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**4.791.595.445**
2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.472.844.985**
2 23 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.541.850**
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.541.850
2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.934.464.004**
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.886.654
2 23 01 2.02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	20.121.500
2 23 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.455.850
2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**195.933.254**
2 23 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.905.000
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.799.250
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.943.504
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.930.000
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.355.500
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**197.105.877**

2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.879.648
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.226.229
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.800.000**
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.200.000
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14.440.000
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.920.000
2 23 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.240.000
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**671.493.247**
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**321.493.247**
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	70.000.000
2 23 02 2.01 11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.493.247
2 23 02 2.01 18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	50.000.000
2 23 02 2.01 20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	100.000.000
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**350.000.000**
2 23 02 2.02 07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	280.000.000
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi budaya baca dan literalisasi pada satauan pendidikan dasar dan masyarakat	70.000.000
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**26.449.400**
2 23 03 2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000**
2 23 03 2.01 04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25.000.000
2 24.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**227.419.430**
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**152.419.200**

2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	87.419.200
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**54.999.871**
2 24 02 2.02 04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	54.999.871

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 telah melaksanakan 4 (empat) program 10 (sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.**791.595.445.**

Secara umum pencapaian target kinerja sasaran berdasarkan realisasi anggaran APBD untuk 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dapat mencapai rata-rata diatas 90%. Sedangkan capaian kinerja untuk realisasi program / kegiatan berdasarkan keluaran dan hasil, pada tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target kinerja yang direncanakan.

Beberapa program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persantase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Parsentase tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan oleh organisasi	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100%
2.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan yang sudah SNP	5 %	5 %	5 %
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	3 %	3 %	3 %
3.	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**				
	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian naskah kuno milik daerah	1 naskah	1 naskah	1 naskah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
4	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dibuatkan daftar arsip	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis daerah	12 arsip	12 arsip	12 arsip

Seluruh program / kegiatan tersebut diatas telah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tercapai dan terpenuhinya target yang telah direncanakan, sehingga capaian kinerja keluaran dan hasil untuk kegiatan tersebut diatas mencapai 100%.

Untuk rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut 2.2.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Sijunjung

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
		Urusan Perpustakaan									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**								
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Rensra dan Renja PD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	3	3	100%
01		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	22	22	100%	25	25	100%
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100%	12	12	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	14	14	14	14	100%	14	14	100%

			/Semesteran SKPD								
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tingkat Kepuasan yang diberikan oleh Organisasi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Peggadaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tingkat Kepuasan yang diberikan oleh Layanan Organisasi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Aset OPD dalam Keadaan Baik	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100	100	100%
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	50 Perpustakaan	40 Perpustakaan	20 Perpustakaan	40 Perpustakaan	100%	50 Perpustakaan	40 Perpustakaan	100%
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	15 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	90%	20 Perpustakaan	15 Perpustakaan	100%
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	.30 Perpustakaan	15 Perpustakaan	13 Perpustakaan	100 %	30 Perpustakaan	.30 Perpustakaan	100%
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaaan	300 Exsemplar	300 Exsemplar	200 Exsemplar	200 Exsemplar	100%	300 Exsemplar	300 Exsemplar	100%
		Penyusunan data dan informasi perpustakaan , tenaga perpustakaan dan pustakwan tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan , tenaga perpustakaan dan pustakwan tingkat daerah kabupaten kota	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Sosialisasi budaya baca dan literalisasi pada satauan pendidikan dasar dan masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literaasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100 Lotus	100 Lotus	100 Lotus	100 Lotus	100%	100 Lotus	100 Lotus	100%
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100%	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100%
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO									
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota									
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh	Jumlah Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat	2 Exsemplar	2 Exsemplar	2 Exsemplar	2 Exsemplar	100%	2 Exsemplar	2 Exsemplar	100%

		Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	untuk Dilestarikan dan Didayagunakan								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	90 Berkas	90 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	100%	100 Berkas	100 Berkas	100%
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	100%	150 Arsip	150 Arsip	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Struktur Organisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung

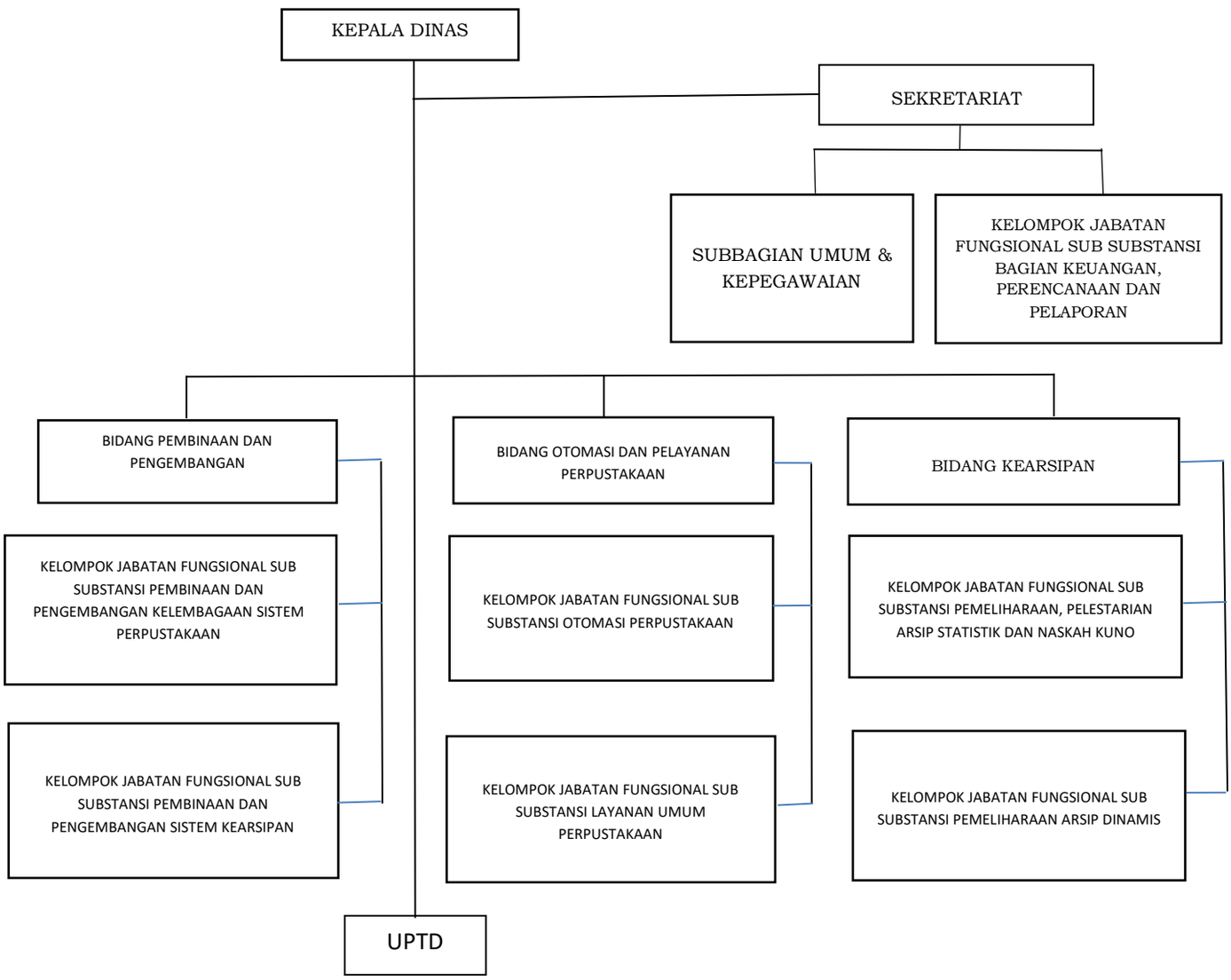

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan pemerintah pembinaan dan pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
b. Menyelenggarakan tugas dalam pembinaan dan pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
c. Mengatur dan merumuskan program dan kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
d. Melaksanakan evaluasi, supervisi dan pengawasan program kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan;
b. Menyelenggarakan fasilitas urusan pemerintah, pelayanan dalam pembinaan dan pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah;
d. Pembinaan, supervisi dan pelaksanaan tugas dalam pembinaan dan pengembangan, bidang perpustakaan, bidang kearsipan;
e. Pengawasan dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang rencana program, keuangan, umum, kepegawaian dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan perencanaan kegiatan, anggaran, tata kelola, administrasi, aset dan kepegawaian dinas;
b. Penyelenggaraan tugas program, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. Mengatur dan mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan dan laporan bidang bidang pembinaan dan pengembangan, bidang perpustakaan, bidang kearsipan.
d. Melaksanakan evaluasi, supervisi dan pengawasan program, kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan, bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pengakajian serta koordinasi perencanaan dan program dinas;
b. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan;
c. Menyelenggarakan pengelolaan adiministrasi keuangan;
d. Menyelenggarakan pengkajian administrasi keuangan dan pelaporan;

e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanakan;
h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang- undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan;
m. Menyelenggrakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
n. Menyelenggarakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait; dan
o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Subag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
b. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
c. Melaksanakan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan dan kerarsipan;
d. Melaksanakan tugas kehumasan dinas.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program sub bagian umum dan kepegawaian;
b. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian;
c. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ ijin belajar, pendidikan / pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja dilingkungan dinas;
g. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;

h. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
i. Melaksanakan pengadaan naskah dinas;
j. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, skp, duk, bezetting, laporan pajak pajak pribadi (LP2P), pensin, kartu pegawai, kartu istri (karir)/ kartu suami (karsu), taspen, askes, dan pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai;
k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan meyiapkan rapat- rapat;
l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
n. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
o. Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian, pengembangan karier dan disiplin pegawai;
p. Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan produktivitas kerja serta pengembangan karier;
q. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian atas persetujuan/ sepengetahuan sekretaris;
r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya;

s. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. Jf. Analis Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Jf. Analis Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, verifikasi pembukuan, akuntansi, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jf. Analis Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas;
b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan teknis administrasi keuangan dinas;
c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja sekretariat Jf. Analis perencanaan dan palaporan;
d. Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pembinaan dan pengembangan, otomasi dan layanan perpustakaan dan kearsipan;
e. Melaksanakan dan menyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pembinaan dan pengembangan, otomasi dan layanan perpustakaan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Jf. Analis Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja administrasi di Jf. Analis keungan, perencanaan dan pelaporan;
b. Melaksanakan kegiatan administrasi keungan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
e. Melakukan verifikasi SPP;
f. Menyiapkan SPM;
g. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
h. Menyelenggarakan akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
i. Menyusun laporan realisasi anggaran setiap bulan, triwulan;
j. Menyusun laporan neraca setiap semester dan akhir tahun;
k. Manyusun laporan keugan SKPD;
l. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di lingkup dinas;
m. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dari masing- masing bidang;
n. Mengumpulkan bahan sebagai dasar penyusunan Renstra dan Renja di lingkungan dinas;
o. Mengumpulkan bahan sebagai dasar penyusunan RPJP dan RPJMD dan RKPD di lingkungan dinas;
p. Mengumpulkan bahan sebagai dasar penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan akhir masa jabatan Bupati;

q. Mengumpulkan bahan sebagai dasar penyusunan LAKIP dan perjanjian kinerja dinas;
r. Membuat indikator kinerja utama (IKU);
s. Membuat standar operasional prosedur (SOP) dinas;
t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan sistem perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis;
b. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sistem perpustakaan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan dan pengembangan;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan;
d. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan;

e. Menyelenggarakan koodinasi, fasilitasi pembinaan dan pengembangan;
f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan;
h. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan nagari/desa serta instansi lainnya;
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

6. Jf. Pustakawan Muda di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Jf. Pustakawan muda di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sistim Perpustakaan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan meliputi : pengembangan SDM, perpustakaan umum daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, OPD, perpustakaan khusus, perpustakaan nagari, perpustakaan komunitas, dan persorangan dalam pengembangan SDM kepustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sistem Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistim perpustakaan;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pembinaan serta pengembangan kelembagaan sistim perpustakaan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Sistem Perpustakaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistem perpustakaan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistem perpustakaan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistem perpustakaan;
d. Melaksanakan pengelolaan data pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistem perpustakaan;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistem perpustakaan;
f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistem perpustakaan;
g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan sistem perpustakaan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi pemerintah daerah terkait; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

7. Jf. Arsiparis Ahli Muda di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Jf.Arsiparis Ahli Muda di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistim Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan sistim kearsipan, meliputi : Pengembangan SDM, Arsip sekolah, arsip masjid, arsip OPD, arsip khusus, arsip nagari, arsip komunikasi, arsip perseorangan, arsip SDM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Jf.Arsiparis Muda di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistim Kearsipan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan dan menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pembinaan dan pengembangan sistim kearsipan;
b. Melaksanakan dan pelayanan administrasi teknis pengembangan dan fasilitasi pembinaan SDM dan sistim kearsipan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sistim Kearsipan, mempunyai uraian tugas antara lain :

a. Melaksanakan dan menyusun program kerja Jf.Arsiparis Ahli Muda di bidang pembinaan dan pengembangan sistim kearsipan;
b. Melaksanakan dan menyusun bahan kebijakan teknis Jf.Arsiparis Ahli Muda bidang pembinaan dan pengembangan sistim kearsipan;
c. Melaksanakan dan menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pembangunan sistim kearsipan;
d. Melaksanakan dan mengelola data pembinaan dan pengembangan sistim kearsipan;
e. Melaksanakan dan penyulihan permasyarakatan kearsipan, bimbingan teknis kearsipan pada organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari /desa serta instansi lainnya;
f. Melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan sistim kearsipan

organisasi perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan nagari / desa serta instansi lainnya;

g. Melaksanakan dan menyusnun bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan sistim kearsipan;
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan;
i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bidang pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan;
k. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

8. Bidang Otomasi dan Pelayanan Perpustakaan

Bidang Otomasi dan Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Otomasi dan Pelayanan Perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Otomasi dan Pelayanan Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang otomasi;
b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang layanan perpustakaan

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang otomasi dan layanan perpustakaan;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan otomasi dan layanan perpustakaan;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas otomasi dan layanan perpustakaan;
d. Menyelenggarakan dan menfasilitasi otomasi dan layanan perpustakaan;
e. Menyelenggarakan koordinasi otomasi dan layanan perpustakaan;
f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi otomasi dan layanan perpustakaan;
g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Menyelenggarakan laporan dan evaluasi kegiatan otomasi dan layanan perpustakaan;
i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan nagari / desa, sekolah, masyarakat dan perseorangan;
j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

9. Jf. Pustawakan Ahli Muda di Bidang Otomasi Perpustakaan

Jf. Pustakawan Ahli Muda di bidang Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Otomasi Perpustakaan, meliputi : pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar (sistem otomasi) dan kerja sama serta jaringan perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jf. Pustakawan Ahli Muda di Bidang

Otomasi Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan dan menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dan program otomasi perpustakaan;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi otomasi perpustakaan;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Jf. Pustakawan Ahli Muda di Bidang otomasi perpustakaan mempunyai uraian tugas antara lain :

a. Melaksanakan program kerja Jf. Pustakawan Ahli Muda otomasi perpustakaan.
b. Melaksanakan dan menyusun bahan kebijakan teknis otomasi perpustakaan;
c. Melaksanakan dan menyusun bahan fasilitasi penyelenggarakan otomasi perpustakaan;
d. Melaksanakan dan mengelola data otomasi perpustakaan
e. Mengumpulkan dan mengintegrasikan data bahan pustaka kepangkalan data;
f. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan otomasi koleksi perpustakaan dan kepustakawanan;
g. Meng-update data pada pangkalan data dan website perpustakaan;
h. Memelihara dan mengembangkan pangkalan data dan website perpustakaan;
i. Alih media koleksi dan kegiatan kepustakawanan;
j. Mendistribusikan informasi tentang perpustakaan secara eklektronik;
k. Pengembangan web/multi media instansi, pemeliharaan aplikasi pengelolaan data dan pemeliharaan jaringan internal dan external.
l. Melaksanakan pengelolaan persuratan Jf. Pustakawan Muda otomasi perpustakaan,

pengelolaan bahan perpustakaan dan teknologi informasi.

m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi otomasi perpustakaan;

n. Melaksanakan pelaporan, evaluasi kegiatan Jf. Pustakawan Ahli Muda di Bidang otomasi perpustakaan;

o. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

10. Jf. Pustakawan ahli muda di Bidang Layanan Umum Perpustakaan

Jf. Pustakawan Ahli Muda di Bidang Layanan Umum Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang layanan umum perpustakaan, meliputi pengelolaan perpustakaan sesuai standar (layanan Perpustakaan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Jf. Pustakawan Ahli Muda di Bidang Layanan Umum Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program layanan umum perpustakaan;

b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi layanan umum perpustakaan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Jf. Pustakawan Ahli Muda di Bidang Layanan Umum Perpustakaan, mempunyai uraian tugas antara lain :

a. Melaksanakan program kerja Jf. Pustakawan Ahli Muda di Bidang Layanan Umum Perpustakaan;

b. Melaksanakan dan menyusun bahan kebijakan teknis Layanan Umum Perpustakaan;
c. Melaksanakan dan menyusun bahan fasilitasi penyelenggarakan Layanan Umum Perpustakaan;
d. Melaksanakan dan mengelola data Layanan Umum Perpustakaan;
e. Melaksanakan kerjasama layanan antar perpustakaan;
f. Melaksanakan dan menyusun bahan koordinasi layanan umum perpustakaan;
g. Melaksanakan dan menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemakaian bahan pustaka;
i. Melaksanakan pelayanan jasa perpustakaan;
j. Menjaring informasi kebutuhan masyarakat pemakai jasa perpustakaan;
k. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Layanan Umum Perpustakaan;
m. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

11. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno serta pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan dan pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif).

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Kearsipan memiliki uraian tugas antara lain :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kearsipan;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kearsipan dan naskah kuno;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bidang kearsipan dan naskah kuno;
d. Menyelenggarakan fasilitasi bidang kearsipan dan naskah kuno;
e. Menyelenggarakan koordinasi bidang kearsipan dan naskah kuno;
f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi bidang kearsipan dan naskah kuno;
g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kearsipan dan naskah kuno;
i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan nagari/desa serta instansi lainnya;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

12. Jf. Arsiparis Ahli Muda di Bidang Pemeliharaan, Pelestarian Arsip Statis dan Naskah Kuno

Jf. Arsiparis Ahli Muda di Bidang Pemeliharaan, Pelestarian Arsip Statis dan Naskah Kuno, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan dan pelestarian arsip statis dan naskah kuno, meliputi pemeliharaan dan pelestarian arsip statis dan naskah kuno organisasi perangkat daerah kabupaten, lintas daerah kecamatan dan nagari/desa, badan usaha milik daerah kabupaten serta swasta dan perorangan berskala kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jf. Arsiparis Ahli Muda di Bidang Pemeliharaan, Pelestarian Arsip Statis dan Naskah Kuno menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno.

Untuk melaksanakan fungsi diatas, Jf. Arsiparis Ahli Muda di Bidang Pemeliharaan, Pelestarian Arsip Statis dan Naskah Kuno mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Jf. Arsiparis Ahli Muda di Bidang pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan petunjuk teknis pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
d. Melaksanakan fasilitasi pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;

e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
f. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi penelusuran serta penyusunan sejarah secara lisan daftar naskah kuno arsip dan buku inventaris arsip;
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
h. Melaksanakan penelusuran arsip statis organisasi perangkat daerah, swasta dan perseorangan tingkat kabupaten;
i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pemeliharaan, pelestarian arsip statis dan naskah kuno;
j. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. Jf. Arsiparis Ahli Muda Pemeliharaan Arsip Dinamis

Jf. Arsiparis Ahli Muda Pemeliharaan Arsip Dinamis, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan arsip dinamis, meliputi akuisisi dan pengolahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jf. Arsiparis Ahli Muda Pemeliharaan Arsip Dinamis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif).

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Jf. Arsiparis Ahli Muda Pemeliharaan Arsip Dinamis memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bidang pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
d. Melaksanakan pengolahan data survey dan pengolahan serta pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pemeliharaan arsip dinamis (aktif dan in aktif);
i. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019 adalah Arsiparis.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung didukung oleh 43 (empat puluh tiga) orang pegawai yang terdiri dari :

a. Personil yang melaksanakan Urusan Perpustakaan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Pegawai	41
	PNS	25
	Non PNS	16
2	Kualifikasi Pendidikan	
	- S 2	3
	- S 1 / D 4	16
	- D I / D III	8
	- SLTA	14
	- SLTP	0
	- SD	0
3.	Pejabat Struktural	
	- Eselon II.b	1
	- Eselon III.a	1
	- Eselon III.b	2
	- Eselon IV.a	4
	- Eselon IV.b	-

b. Personil yang melaksanakan Urusan Kearsipan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Pegawai	13
	PNS	8
	PPPK	5
2	Kualifikasi Pendidikan	
	- S 2	1
	- S 1 / D 4	7
	- D I / D III	3
	- SLTA	2
	- SLTP	-
	- SD	-
3	Pejabat Struktural	
	- Eselon II.b	-
	- Eselon III.a	-
	- Eselon III.b	0
	- Eselon IV.a	1
	- Eselon IV.b	-

Sedangkan kajian capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjun dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sijunjung

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024(tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024(tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
I	Urusan Perpustakaan		Jumlah pengunjung / pemustaka selama setahun					7842	28812	30.000	32.000	
			Jumlah anggota perpustakaan	34.000	34.500	35.000	35.500	2087	2269	2500	2750	
			Jumlah perpustakaan	349	351	353	355	472	472	472	472	
			Jumlah perpustakaan terstandar	171	211	241	271	32	61	92	100	
			Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun	19.000	19.500	20.000	20.500	809	1.591	2.000	2.500	
II	Urusan Kearsipan		Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku	45	60	75	90	45	60	75	90	
			Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	275	345	315	385					

			Jumlah dokumen / arsip daerah yang dialih mediakan	0	20	25	120	0	20	25	120	
			Jumlah arsip konvensional / naskah kuno yang dipelihara	20	115 naskah	120 naskah	80		115 naskah	120 naskah	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tingkat kinerja pelayanan perpustakaan dan kearsipan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

   Sedangkan hal kritis terkait dengan pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung adalah belum adanya tenaga ahli fungsional pustakawan dan arsiparis untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang membidangi ilmu perpustakaan dan kearsipan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung.
   - Rendahnya minat baca masyarakat
   - Belum adanya tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis
   - Terbatasnya jumlah mobil pustaka keliling, sehingga tidak seluruhnya sasaran sekolah-sekolah dan nagari/desa yang ada di Kabupaten Sijunjung terlayani.
   - Belum adanya regulasi mengenai denda keterlambatan pengembalian buku, hal ini dirasa perlu untuk mengurangi angka kehilangan asset buku

perpustakaan dan juga menumbuhkan tanggung jawab pemustaka untuk merawat asset buku perpustakaan.

- Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip, hal ini dibuktikan dengan tata kelola arsip yang masih jauh dari standar kearsipan pengelolaan arsip secara baku.
- Dalam pelaksanaan palayanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung sudah menerapkan system *inlist-lite*, namun dalam perkembangannya masih diperlukan pengembangan untuk dapat memenuhi kebutuhan petugas maupun pemustaka, sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung belum memiliki aplikasi kearsipan seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis/Statis (SIKD/SIKS), Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip, dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) serta peralatan pendukungnya.
- Belum ada kesadaran mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam di masyarakat ke perpustakaan daerah sebagai bentuk pelestarian bahan pustaka untuk dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk pemacu pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain untuk keperluan penyebaran informasi.
- Belum ada tunjangan khusus bagi pengelola arsip terkait dengan resiko pekerjaan yang mengancam, terutama dalam perawatan dan pemeliharaan arsip-arsip yang sudah “berumur”.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Suistanable Development Goals*).

Dengan tertatanya administrasi perpustakaan dan tersedianya koleksi bahan pustaka yang memadai, akan dapat lebih mengoptimalkan layanan perpustakaan sehingga berdampak terhadap peningkatan minat dan budaya baca masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat yang kompeten berdaya saing tinggi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sedangkan untuk Urusan Kearsipan diperlukan pelayanan dan penataan kearsipan yang baik dan benar sehingga sangat membantu kelancaran proses pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sijunjung mulai dari tingkat Nagari/Desa sampai ke di tingkat Kabupaten.

Melalui penyelenggaraan pengelolaan arsip yang baku dan gerakan sadar arsip sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

   Dalam rangka layanan perpustakaan dan pelayanan kearsipan dengan semakin luasnya sasaran pelayanan maka dengan sendirinya diperlukan adanya peningkatan kemampuan SDM dibidang perpustakaan dan kearsipan baik dalam segi kualitas maupun segi kuantitas, serta diperlukan adanya peningkatan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan.

   Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat digambarkan sebagai berikut :

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

No	KEKUATAN	KELEMAHAN
1.	Adanya potensi dan sumber daya aparatur (tenaga administrasi dan tenaga teknis)	- Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. - Kurangnya jumlah fungsional (pustakawan). - Rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi.
2.	Adanya Sumber Dana (APBD)	Terbatasnya anggaran APBD, sehingga sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan masih belum optimal.
3.	Adanya Undang-undang tentang Perpustakaan dan Kearsipan serta peraturan perundangan-undangan.	Kurangnya pemahaman personil di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sijunjung tentang perpustakaan dan kearsipan.

PELUANG DAN TANTANGAN

No	PELUANG	TANTANGAN
1.	Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat pemustaka	Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian masyarakat, serta kurangnya sadar arsip oleh masyarakat.
2.	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan baca dan informasi serta arsip	Kurangnya pelayanan prima terhadap masyarakat dalam layanan perpustakaan dan kearsipan
3.	Adanya kesiapan masyarakat mengakses teknologi informasi dan komunikasi	Terbatasnya akses teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam ketersediaan aplikasi maupun sumber daya manusia yang mengoperasikannya.
4.	Adanya kesadaran OPD lain akan pentingnya penataan arsip OPD	Kurangnya pemahaman dan penghargaan dari beberapa OPD terhadap peran penting arsip dan penataan arsip.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dan berkesinambungan untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi setiap kebijakan baru dibidang perpustakaan dan kearsipan serta tetap mengupayakan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan secara berkala.

Dengan tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan OPD terkait, seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk urusan Perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk urusan Kearsipan dalam rangka pencapaian pelaksanaan program-program baik program pusat maupun program daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan Rancangan Awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada table 2.5.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Sijunjung	Prosentase peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	80%	5.064.400.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Sijunjung	Prosentase peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	80%	5.064.400.000	
1	Perencaanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sijunjung	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Rensra dan Renja PD	100	2.619.066	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Rensra dan Renja PD	100	2.619.066	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2.619.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2.619.066	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.166.459.171	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12	3.166.459.171	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3.163.146.921	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3.163.146.921	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	0	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	12	3.312.250	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12	3.312.250	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	Persentase tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan oleh organisasi	100	48.536.765	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	Persentase tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan oleh	100	48.536.765	

								organisasi			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.750.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.543.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.543.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.095.940	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.095.940	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.663.025	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sijunjung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.663.025	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.484.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.484.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	162.759.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	162.759.824	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	60.959.824	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	60.959.824	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	101.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	101.800.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %	63.927.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sijunjung	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %	63.927.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sijunjung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sijunjung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sijunjung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	34.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sijunjung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	34.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.060.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.060.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.383.800	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.383.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.484.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sijunjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.484.000	
II	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Kab. Sijunjung	Rasio ketercukupan keleksi perpustakaan	1,8	722.945.398	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Kab. Sijunjung	Rasio ketercukupan keleksi perpustakaan	1,8	722.945.398	
6	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Prosentasi perpustakaan yang sudah SNP	5	544.955.698	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Prosentasi perpustakaan yang sudah SNP	5	544.955.698	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Sijunjung	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	30 Perpustakaan	54.096.200	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Sijunjung	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam	30 Perpustakaan	54.096.200	

			Perpustakaan					Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 Perpustakaan	215.743.598	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 Perpustakaan	215.743.598	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kab. Sijunjung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	177.916.900	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	177.916.900	

	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Sijunjung	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	50 Perpustakaan	97.199.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Sijunjung	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	50 Perpustakaan	97.199.000	
7	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	3	177.989.700	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Persentase peningkatan kerlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	3	177.989.700	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Sijunjung	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpustakaan	145.887.200	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Sijunjung	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpustakaan	145.887.200	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Sijunjung	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100 Lotus	32.102.500	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Sijunjung	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100 Lotus	32.102.500	
III	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Kab. Sijunjung	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1	19.798.000	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Kab. Sijunjung	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1	19.798.000	

8	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	1	19.798.000	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1	19.798.000	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Sijunjung	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2	19.798.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Sijunjung	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaa n untuk dilestarikan dan didayagunakan	2	19.798.000	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Kab. Sijunjung	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	85	106.638.610	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Kab. Sijunjung	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	85	106.638.610	
9	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Arsip yang dibuatkan daftar arsip	5	82.714.460	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Arsip yang dibuatkan daftar arsip	5	82.714.460	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Sijunjung	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100	42.904.160	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Sijunjung	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	12	42.904.160	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35	39.810.300	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35	39.810.300	

10	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	12	23.924.150	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	12	23.924.150	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Sijunjung	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100	23.924.150	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Sijunjung	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100	23.924.150	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan diperoleh dari rapat internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Perpustakaan Nasional RI, dan Arsip Nasional RI.

Penelaahan usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan ke dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**				
	Diklat Penulisan Sastra	Kab. Sijunjung	Jumlah Guru SLTP dan SD Peserta Diklat	50 orang	
2	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**				
	Lomba Peduli Arsip	Kab. Sijunjung	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Lomba Pengelolaan Arsip	8 Kecamatan	
3	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**				
	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Secara Digital	Kab. Sijunjung	Jumlah Dokumen Arsip/ Buku Induk Siswa Yang Di Alih Mediakan	250 buku induk sekolah	
	Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penataan dan Pemeliharaan Arsip Naskah Kuno	Kab. Sijunjung	Jumlah Arsip Naskah Kuno Yang Dipelihara	30 naskah	
4	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**				
	Bimbingan Teknis Kearsipan Srikandi	Kab. Sijunjung	Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan	35 Pengelola Arsip OPD 20 pengelola arsip Dispusip 9 Pengelola Arsip Bagian Setda 8 Pengelola Arsip Kecamatan 61 Pengelola Arsip Nagari	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung sebagai institusi perpustakaan dan kearsipan di daerah telah menentukan arah kebijakan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjabarkan visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) sebagai institusi Kearsipan dan Perpustakaan di tingkat pusat.

Disamping itu, arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung menyangkut program dan kegiatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arah kebijakan yang ditempuh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan adalah :

- Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan
- Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, dan restorasi
- Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian/pengadaan buku, hibah/sumbangan, dan yang akan dilakukan adalah serah simpan karya cetak
- Membangun system administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi
- Mengoptimalkan akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna
- Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan dan kearsipan

- Melestarikan arsip melalui fumigasi dan pemilahan, penyiangan serta pemberkasan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi perpustakaan dan kearsipan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung antara lain :

1. Meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Sijunjung.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah.
3. Meningkatkan tata kelola manajemen kearsipan daerah dan kualitas pelayanan kearsipan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sesuai dengan target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025-2030 adalah :

1. Meningkatnya jumlah pengunjung / pemustaka perpustakaan
2. Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan
3. Meningkatnya jumlah perpustakaan
4. Meningkatnya jumlah perpustakaan terstandar
5. Meningkatnya persentase SKPD yang menerapkan system pengelolaan arsip secara baku
6. Meningkatnya jumlah arsip / naskah / dokumen yang diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 4 (Empat) program

dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 5 (lima) kegiatan yaitu :

   1.1Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Rencana anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2.619.066,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kelancaran jalannya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama satu Tahun Anggaran (12 bulan) antara lain untuk sub kegiatan :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

   1.2Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Rencana anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.3.166.459.171,- yang digunakan untuk biaya rutin Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama satu tahun (12 bulan) antara lain untuk sub kegiatan :

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

   1.3Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Rencana anggaran Kegiatan untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.48.536.765,- yang

dipergunakan selama satu tahun anggaran (12 bulan) untuk :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor .
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 162.759.824,-yang digunakan selama tahun anggaran (12 Bulan) untuk:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.63.927.800,-yang digunakan selama tahun anggaran (12 Bulan) untuk:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana anggaran Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.544.955.698,- yang digunakan untuk :

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2.2 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana anggaran Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.177.989.700,- yang digunakan untuk :

- Sosialisasi budaya baca dan literalisasi pada satauan pendidikan dasar dan masyarakat.
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

3.1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota

Rencana anggaran Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.19.798.000,- yang digunakan :

- Pengembangan, Pengolaahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

4.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana anggaran Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.82.714.460 ,-yang digunakan untuk :

- Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis.
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

4.2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Rencana anggaran Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.23.924.150,- digunakan untuk

- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Tabel 3.1.
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
Kabupaten Sijunjung

KODE	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU	SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU
TOTAL PAGU					**4.791.595.445**			**10.027.600.000**
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**				**4.791.595.445**			**10.027.600.000**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persantase nilai evaluasi akuntabilitaas kinerja**	**Muaro Sijunjung**	**80 %**	**3.444.302.626**	**APBD II**	**80 %**	**7.865.600.000**
2.23.01.2.01	Perencaanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Muaro Sijunjung	100 %	2.619.086	APBD II	100 %	14.000.000
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaro Sijunjung	2 Dokumen	2.619.086	APBD II	3 Dokumen	14.000.000
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persantase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Muaro Sijunjung	100 %	3.156.459.171		100 %	3.299.800.000
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Muaro Sijunjung	12 Bulan	3.153.146.921	APBD II & DAK	12 Bulan	3.258.800.000
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muaro Sijunjung	21 Orang/Bulan	0	APBD II	25 Orang/Bulan	22.500.000
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ semerter SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuaangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Muaro Sijunjung	12 Laporan	3.312.250	APBD II	12 Laporan	18.500.000

2.23.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Parsentase tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan oleh organisasi	Muaro Sijunjung	100 %	48.536.765	APBD II	100 %	217.000.000
2.23.01.02.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1.750.000	APBD II	1 Paket	31.000.000
2.23.01.02.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	7.543.800	APBD II	1 Paket	23.000.000
2.23.01.02.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	11.095.940	APBD II	1 Paket	42.000.000
2.23.01.02.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Paket	1.663.025	APBD II	1 Paket	35.000.000
2.23.01.02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muaro Sijunjung	12 Laporan	26.484.000	APBD II	12 Laporan	86.000.000
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Muaro Sijunjung	100 %	162.759.824	APBD II	100 %	235.000.000
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muaro Sijunjung	12 Laporan	60.959.824	APBD II	12 Laporan	170.000.000
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Laporan	101.800.000	APBD II	1 Laporan	65.000.000
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Muaro Sijunjung	100 %	63.927.800	APBD II	100 %	167.000.000
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Muaro Sijunjung	1 Unit	10.000.000	APBD II	1 Unit	25.000.000
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muaro Sijunjung	11 Unit	34.000.000	APBD II	11 Unit	80.000.000
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muaro Sijunjung	2 Unit	10.060.000	APBD II	2 Unit	17.000.000
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muaro Sijunjung	1 Unit	5.383.800	APBD II	1 Unit	20.000.000
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Muaro Sijunjung	1 Unit	4.484.000	APBD II	1 Unit	25.000.000

		Dipelihara/Direhabilitasi						
2.23.02.2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan**	**Muaro Sijunjung**	**1,8 poin**	**722.945.398**	**APBD II**	**1,8 poin**	**1.496.000.000**
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan yang sudah SNP	Muaro Sijunjung	5 %	544.955.698	APBD II	5 %	340.000.000
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Muaro Sijunjung	30 Perpustakaan	54.096.200	APBD II	30 Perpustakaan	80.000.000
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Muaro Sijunjung	20 Perpustakaan	215.743.598	APBD II	20 Perpustakaan	121.000.000
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Muaro Sijunjung	300 Eksemplar	177.916.900	APBD II	300 Eksemplar	60.000.000
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Muaro Sijunjung	50 Perpustakaan	97.199.000	APBD II	50 Perpustakaan	115.000.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	Muaro Sijunjung	3 %	177.989.700	APBD II	3 %	400.000.000
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Muaro Sijunjung	20 Perpustakaan	145.887.200	APBD II	20 Perpustakaan	300.000.000
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Muaro Sijunjung	100 Lokus	32.102.500	APBD II	100 Lokus	80.000.000
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno**	Muaro Sijunjung	**1%**	**19.798.000**	APBD II	**1%**	**27.000.000**
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian naskah kuno milik daerah	Muaro Sijunjung	1 naskah	19.798.000	APBD II	1 naskah	27.000.000

2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Muaro Sijunjung	2 Eksemplar	19.798.000	APBD II	2 Eksemplar	27.000.000
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		**Muaro Sijunjung**		**106.638.610**	**APBD II**		**639.000.000**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas	Muaro Sijunjung	85 %	106.638.610	APBD II	85 %	210.000.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dibuatkan daftar arsip	Muaro Sijunjung	5 Dokumen	82.714.460	APBD I	5 Dokumen	160.000.000
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Muaro Sijunjung	100 Berkas	42.904.160	APBD I	100 Berkas	90.000.000
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Muaro Sijunjung	0 Laporan	39.810.300	APBD I	0 Laporan	67.000.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis daerah	Muaro Sijunjung	12 arsip	23.924.150	APBD I	12 arsip	56.000.000
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Muaro Sijunjung	150 Arsip	23.924.150	APBD I	150 Arsip	56.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan antar daerah dan antar tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi seluruh kalangan, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung, berpedoman dan mengacu kepada RKPD, RPJMD, visi dan misi Kepala Daerah dan juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh instansi pembina pusat yaitu Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk pendanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 bersumber pada APBD Kabupaten Sijunjung (APBD II) dan DAK.

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 merupakan intisari dari program / kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam menyusun pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program/kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 dan juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun Anggaran 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renja Tahun Anggaran 2025.

Dalam kaitan itu, maka perlu dukungan masyarakat sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, karena keberhasilan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 sangat

tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan keinginan untuk maju dari semua pihak.

Muaro Sijunjung, 01 September 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sijunjung

dr. Edwin Suprayogi, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196090071999031007

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIJUNJUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud danTujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN BERJALAN 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I sampai Triwulan II 10

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 18

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 24

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 24

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 26

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 28

3.4. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 38

3.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 44

BAB IV PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Tahun Berjalan	12
TABEL 2.3.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sijunjung	23
TABEL 3.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	27
TABEL 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sijunjung	33
TABEL 3.4.	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung	39
TABEL 3.5.	Capaian Indikator Kunci Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	44
TABEL 3.6.	Capaian Indikator Kunci Hasil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder).*

Salah satu dokumen perencanaan tahunan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dalam rangka konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kondisi ekonomi, keuagan daerah kebijakan pemerintah pusat yang dapat berubah setiap saat serta isu-isu aktual pembangunan yang berkembang dalam tahun

rencana berjalan. Oleh sebab itu, dillakukan perubahan RKPD, sehingga tujuan dan sasaran serta kinerja pembangunan daerah tetap tercapai diakahir tahun rencana.

Perubahan RKPD tahun rencana berjalan dapat dilakukan berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 264 ayat (5) dinyatakan bahwa, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Dokumen Perubahan Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, dan mempedomani hasil Evaluasi Renja-PD Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 juga berpedoman pada Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya mengingat Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung merupakan komitmen bersama yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Renscana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perbaikan dari hasil evaluasi ditahun berjalan karena menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan, ekonomi, dan keuangan daerah saat ini.

Selain daripada itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Adapun maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan dilaksanakan secara konsisten sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik;

2. Melakukan penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Anggaran 2025;
4. Menyikapi capaian kinerja pembangunan tahun 2025 sampai Triwulan I;
5. Menyesuaikan kebijakan pembangunan dan prognosis keuangan daerah serta target kinerja pembangunan.

Sementara tujuan dari disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja-PD;
2. Pedoman penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)) Tahun Anggaran 2025.

1.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan

antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, dengan K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja PD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN BERJALAN

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I sampai Triwulan II;

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3.4. PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Triwulan I sampai dengan Triwulan II.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran *(Output)*, merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c. Indikator Hasil *(Outcome),* merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II Tahun 2025 Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSASANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SIJUNJUNG

PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan pada Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	
														I		II							
1						2	3	4		5		6		7		8		9 = (7+8)		10=5+9		11=10/5 x 100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**14**					**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**4.919.000.000,00**		**6.483.478.977,00**		**11.247.573.508,00**		**896.819.230,00**		**676.620.357,00**		**1.573.439.587,00**		**8.056.918.564,00**		**1.104,15**
2	**14**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100,00**	**3.760.000.000,00**	**100,00**	**2.578.204.769,00**	**100,00**	**2.695.305.641,00**	**22,92**	**617.775.480,00**	**11,90**	**320.626.257,00**	**34,82**	**938.401.737,00**	**134,82**	**3.516.606.506,00**	**134,82**	**730,57**
2	**14**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran**	**100,00**	**40.000.000,00**	**100,00**	**6.202.900,00**	**100,00**	**1.551.100,00**	**56,99**	**884.000,00**	**27,83**	**431.600,00**	**84,82**	**1.315.600,00**	**184,82**	**7.518.500,00**	**184,82**	**243,92**
2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	20.000.000,00	4,00	4.446.450,00	4,00	901.600,00	2,1	468.000,00	1,91	431.600,00	3,99	899.600,00	7,99	5.346.050,00	199,78	120,23
2	14	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00	20.000.000,00	2,00	1.756.450,00	2,00	649.500,00	1,3	416.000,00	-	-	1,28	416.000,00	3,28	2.172.450,00	164,05	123,68
2	**14**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**3.000.000.000,00**	**100,00**	**2.185.391.619,00**	**100,00**	**2.486.415.755,00**	**22,81**	**567.229.302,00**	**12,53**	**311.603.657,00**	**35,35**	**878.832.959,00**	**135,35**	**3.064.224.578,00**	**135,35**	**140,21**
2	14	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20,00	2.900.000.000,00	19,00	2.156.758.519,00	19,00	2.437.429.705,00	19,00	558.798.144,00	19,00	308.324.507,00	19,00	867.122.651,00	38,00	3.023.881.170,00	200,00	140,20
2	14	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	20.000.000,00	1,00	1.408.750,00	1,00	587.150,00	-	-	1,00	587.150,00	1,00	587.150,00	2,00	1.995.900,00	200,00	141,68
2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18,00	80.000.000,00	18,00	27.224.350,00	18,00	48.398.900,00	3,14	8.431.158,00	1,00	2.692.000,00	4,14	11.123.158,00	22,14	38.347.508,00	122,98	140,86
2	**14**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**355.000.000,00**	**100,00**	**175.141.355,00**	**100,00**	**49.207.156,00**	**34,88**	**17.162.500,00**	**3,35**	**1.650.000,00**	**38,23**	**18.812.500,00**	**138,23**	**193.953.855,00**	**138,23**	**110,74**
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00	10.000.000,00	12,00	3.883.850,00	12,00	874.350,00	11,78	858.200,00	-	-	11,78	858.200,00	23,78	4.742.050,00	198,15	122,10
2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	100.000.000,00	12,00	38.414.650,00	12,00	9.580.800,00	9,92	7.919.700,00	-	-	9,92	7.919.700,00	21,92	46.334.350,00	182,66	120,62
2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	85.000.000,00	12,00	6.238.450,00	12,00	3.107.400,00	-	-	-	-	-	-	12,00	6.238.450,00	100,00	100,00
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	160.000.000,00	1,00	126.604.405,00	1,00	35.644.606,00	0,24	8.384.600,00	0,05	1.650.000,00	0,28	10.034.600,00	1,28	136.639.005,00	128,15	107,93
2	**14**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**55.000.000,00**	**100,00**	**59.548.250,00**	**100,00**	**84.762.330,00**	**8,46**	**7.167.500,00**	**2,80**	**2.370.000,00**	**11,25**	**9.537.500,00**	**111,25**	**69.085.750,00**	111,25	116,02
2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00	25.000.000,00	2,00	31.992.250,00	3,00	4.896.330	0,45	742.500	0,12	203.000	0,58	945.500,00	2,58	32.937.750,00	128,97	102,96
2	14	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	15.000.000,00	1,00	27.556.000,00	1,00	79.866.000	0,08	6.425.000	0,03	2.167.000	0,11	8.592.000,00	1,11	36.148.000,00	110,76	131,18

2	**14**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**100,00**	**310.000.000,00**	**100,00**	**151.920.645,00**	**100,00**	**73.369.300,00**	**34,53**	**25.332.178,00**	**6,23**	**4.571.000,00**	**40,76**	**29.903.178,00**	**140,76**	**181.823.823,00**	**140,76**	**119,68**
2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38,00	260.000.000,00	38,00	142.720.645,00	38,00	61.809.300	12,18	19.807.178	2,81	4.571.000	14,99	24.378.178,00	52,99	167.098.823,00	139,44	117,08
2	14	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53,00	50.000.000,00	53,00	9.200.000,00	53,00	11.560.000	25,33	5.525.000	-	-	25,33	5.525.000,00	78,33	14.725.000,00	147,79	160,05
												Rata-rata capaian kinerja (%)			**22,92**		**11,90**		**34,82**		**66,68**		**93,53**
												Predikat kinerja			**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Rendah**		**Sangat Tinggi**
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif**	**70,50**	**368.000.000,00**	**-**	**230.032.600,00**	**70,50**	**284.962.200,00**		**13.847.550,00**		**18.898.750,00**	**-**	**32.746.300,00**	**-**	**262.778.900,00**	**-**	**114,24**
							Persentase bayi yang dilahirkan oleh ibu usia 15-19 tahun	**19,70**		-		**19,70**						-		-		-	
							Persentase Keluarga Sejahtera	**19,00**		-		**19,00**						-		-		-	
							Persentase Nagari Kampung KB	**100,00**		-		**100,00**						-		-		-	
2	**14**	**02**	**2**	**01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**	**12,96**	**35.000.000,00**	**-**	**15.754.850,00**	**12,96**	**18.134.240,00**	**0**	**2.726.300,00**	**6,02**	**1.091.250,00**	**6,02**	**3.817.550,00**	**6,02**	**19.572.400,00**	**-**	**124,23**
2	14	02	2	01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	12,00	35.000.000,00	3,00	15.754.850,00	3,00	18.134.240,00	0,45	2.726.300,00	0,18	1.091.250,00	0,63	3.817.550,00	3,63	19.572.400,00	121,05	124,23
2	**14**	**02**	**2**	**02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**	**77,00**	**333.000.000,00**	**-**	**214.277.750,00**	**77,00**	**266.827.960,00**	**-**	**11.121.250,00**	**-**	**17.807.500,00**	**-**	**28.928.750,00**	**-**	**243.206.500,00**	**-**	**113,50**
							Persentase Unmet Need	**11,00**		**8,38**		**11,00**		-		-		-		**8,38**		-	
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur masyarakat	**20,00**		-		**20,00**		-		-		-		-		-	
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting	**65,00**		-		**65,00**		-		-		-		-		-	
							Persentase nagari yang memiliki Rumah Data Kependudukan (RDK)	**60,00**		-		**60,00**		-		-		-		-		-	
2	14	02	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	8,00	25.000.000,00	-	-	1,00	60.000.000,00	-	-	0,05	2.840.500,00	0,05	2.840.500,00	0,05	2.840.500,00	-	-
2	14	02	2	02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1,00	253.000.000,00	1,00	106.798.450,00	1,00	90.276.000,00	0,08	7.425.000,00	0,04	3.967.000,00	0,13	11.392.000,00	1,13	118.190.450,00	112,62	110,67
2	14	02	2	02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1,00	55.000.000,00	1,00	107.479.300,00	1,00	116.551.960,00	0,03	3.696.250,00	0,09	11.000.000,00	0,13	14.696.250,00	1,13	122.175.550,00	112,61	113,67
												Rata-rata capaian kinerja (%)			**4,86**		**6,63**		**11,49**		**51,03**		**71,41**
												Predikat kinerja			**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Rendah**
2	**14**	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif**	**70,50**	**500.000.000,00**	**-**	**2.169.818.818,00**	**70,50**	**6.966.288.569,00**	**-**	**220.067.200,00**	**-**	**211.271.450,00**	**-**	**431.338.650,00**	**-**	**2.601.157.468,00**	**-**	**119,88**
							Persentase bayi yang dilahirkan oleh ibu usia 15-19 tahun	**19,70**		-		**19,70**		-		-		-		-		-	
							Persentase Keluarga Sejahtera	**19,00**		-		**19,00**		-		-		-		-		-	
							Persentase Nagari Kampung KB	**100,00**		-		**100,00**		-		-		-				-	

2	**14**	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**	**77,00**	**173.000.000,00**	**-**	**941.581.142,00**	**77,00**	**924.120.158,00**	**-**	**71.961.250,00**	**-**	**71.711.300,00**	**-**	**143.672.550,00**	**-**	**1.085.253.692,00**	**-**	**115,26**
							Persentase Unmet Need	**11,00**		**8,38**		**11,00**		**-**		**-**		**-**		**8**		**-**	
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur masyarakat	**20,00**		**-**		**20,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting	**65,00**		**-**		**65,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Cakupan Pokja Kampung KB yang dibina	**82,00**		**-**		**82,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1,00	35.000.000,00	3,00	105.857.450,00	3,00	5.925.359,00	-	-	-	-	-	-	3,00	105.857.450,00	100,00	100,00
2	14	03	2	01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8,00	85.000.000,00	8,00	491.655.600,00	8,00	391.991.000,00	1,01	49.343.100,00	1,07	52.423.300,00	2,08	101.766.400,00	10,08	593.422.000,00	125,96	120,70
2	14	03	2	01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	8,00	24.000.000,00	8,00	132.142.762,00	8,00	187.045.600,00	0,97	22.618.150,00	0,48	11.212.300,00	1,45	33.830.450,00	9,45	165.973.212,00	118,09	125,60
2	14	03	2	01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1,00	20.000.000,00	2,00	142.356.250,00	2,00	126.422.090,00	-	-	0,13	8.075.700,00	0,13	8.075.700,00	2,13	150.431.950,00	106,39	105,67
2	14	03	2	01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3,00	9.000.000,00	3,00	69.569.080,00	3,00	212.736.109,00	-	-	-	-	-	-	3,00	69.569.080,00	100,00	100,00
2	**14**	**03**	**2**	**02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive**	**77,00**	**98.000.000,00**	**-**	**188.232.150,00**	**77,00**	**3.337.144.289,00**	**0,37**	**16.085.550,00**	**-**	**77.914.000,00**	**0,37**	**93.999.550,00**	**0,37**	**282.231.700,00**	**-**	**-**
							Persentase Unmet Need	**11,00**		**8,38**		**11,00**		**-**		**-**		**-**		**8,38**		**-**	
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur masyarakat	**20,00**		**-**		**20,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting	**66,00**		**-**		**66,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	40,00	70.000.000,00	70,00	188.232.150,00	70,00	509.344.239,00	2,21	16.085.550,00	10,71	77.914.000,00	12,92	93.999.550,00	82,92	282.231.700,00	118,46	149,94
2	14	03	2	02	06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6,00	28.000.000,00	-	-	1,00	2.827.800.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**14**	**03**	**2**	**03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**	**77,00**	**129.000.000,00**	**-**	**546.231.066,00**	**77,00**	**2.125.995.788,00**	**-**	**105.927.900,00**	**-**	**40.139.000,00**	**-**	**146.066.900,00**	**-**	**692.297.966,00**	**-**	**126,74**
							Persentase Unmet Need	**11,00**		**8,38**		**11,00**		**-**		**-**		**-**		**8,38**		**-**	

2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18,00	50.000.000,00	18,00	65.282.060,00	18,00	41.814.098,00	2,24	5.209.100,00	-	-	2,24	5.209.100,00	20,24	70.491.160,00	112,46	107,98
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.385,00	75.000.000,00	1.385,00	450.196.556,00	1.385,00	2.052.055.000,00	63,66	94.313.650,00	27,09	40.139.000,00	91	134.452.650,00	1.475,75	584.649.206,00	106,55	129,87
2	14	03	2	03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18,00	4.000.000,00	18,00	30.752.450,00	18,00	32.126.690,00	3,59	6.405.150,00	-	-	3,59	6.405.150,00	21,59	37.157.600,00	119,94	120,83
2	**14**	**03**	**2**	**04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**	**77,00**	**100.000.000,00**	**-**	**493.774.460,00**	**77,00**	**579.028.334,00**	**-**	**26.092.500,00**	**-**	**21.507.150,00**	**-**	**47.599.650,00**	**-**	**541.374.110,00**	**-**	**109,64**
							Persentase Unmet Need	**11,00**		**8,38**		**11,00**		**-**		**-**		**-**		**8,38**		**-**	
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur masyarakat	**20,00**		**-**		**20,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting	**65,00**		**-**		**65,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Cakupan Pokja Kampung KB yang dibina	**82,00**		**-**		**82,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
2	14	03	2	04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8,00	25.000.000,00	26,00	12.848.400,00	26,00	5.648.446,00	21,42	4.653.000,00	-	-	21,42	4.653.000,00	47,42	17.501.400,00	182,38	136,21
2	14	03	2	04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	3,00	5.000.000,00	-	-	26,00	341.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	03	2	04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26,00	70.000.000,00	26,00	480.926.060,00	26,00	232.379.888,00	2,40	21.439.500,00	2,41	21.507.150,00	4,81	42.946.650,00	30,81	523.872.710,00	118,48	108,93
												Rata-rata capaian kinerja (%)			**3,16**		**3,03**		**6,19**		**28,47**		**520,23**
												Predikat kinerja			**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**
2	**14**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga Sejahtera**	**19,00**	**291.000.000,00**	**-**	**1.505.422.790,00**	**19,00**	**1.301.017.098,00**	**-**	**45.129.000,00**	**-**	**125.823.900,00**	**-**	**170.952.900,00**	**-**	**1.676.375.690,00**	**-**	**139,46**
							Persentase Nagari Kampung KB	**100,00**		**-**		**100,00**											
2	**14**	**04**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Sekolah yang memiliki PIK R**	**70,00**	**241.000.000,00**	**-**	**504.353.140,00**	**70,00**	**259.348.800,00**	**-**	**1.065.000,00**	**-**	**2.199.900,00**	**-**	**3.264.900,00**	**-**	**507.618.040,00**	**-**	**100,65**
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting	**65,00**		**-**		**65,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Persentase Kelompok Kegiatan yang dibina	**10,00**		**-**		**10,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Cakupan Poktan Kampung KB yang dibina	**82,00**		**-**		**82,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1,00	90.000.000,00	1,00	83.054.950,00	1,00	18.360.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	83.054.950,00	100,00	100,00
2	14	04	2	01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1,00	10.000.000,00	-	-	1,00	79.532.500,00	-	-	0,02	1.250.000,00	0,02	1.250.000,00	0,02	1.250.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!

2	14	04	2	01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1,00	65.000.000,00	1,00	31.429.050,00	1,00	10.998.600,00	-	-	-	-	-	-	1,00	31.429.050,00	100,00	100,00
2	14	04	2	01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20,00	11.000.000,00	25,00	307.326.770,00	25,00	135.103.500,00	-	-		-	-	-	25,00	307.326.770,00	100,00	100,00
2	14	04	2	01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	240,00	35.000.000,00	90,00	43.530.000,00	90,00	2.694.000,00	-	-	11,80	353.150,00	11,80	353.150,00	101,80	43.883.150,00	113,11	100,81
2	14	04	2	01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	35,00	30.000.000,00	15,00	39.012.370,00	15,00	12.660.200,00	1,26	1.065.000,00	0,71	596.750,00	1,97	1.661.750,00	16,97	40.674.120,00	113,13	104,26
2	**14**	**04**	**2**	**02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur masyarakat**	**20,00**	**50.000.000,00**	**-**	**1.001.069.650,00**	**20,00**	**1.041.668.298,00**	**-**	**44.064.000,00**	**-**	**123.624.000,00**	**-**	**167.688.000,00**	**-**	**1.168.757.650,00**	**-**	116,75
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting	**65,00**		**-**		**65,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
							Persentase Kelompok Kegiatan yang dibina	**10,00**		**-**		**10,00**		**-**		**-**		**-**		**-**	
2	14	04	2	**02**	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1,00	20.000.000,00	1,00	10.936.650,00	1,00	5.287.500,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.936.650,00	100,00	100,00
2	14	04	2	**02**	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	1,00	20.000.000,00	1,00	475.333.000,00	1,00	474.780.798,00	0,09	44.064.000,00	0,02	11.304.000,00	0,12	55.368.000,00	1,12	530.701.000,00	111,66	111,65
2	14	04	2	**02**	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	1,00	10.000.000,00	1,00	514.800.000,00	1,00	561.600.000,00	-	-	0,20	112.320.000,00	0,20	112.320.000,00	1,20	627.120.000,00	120,00	121,82
												Rata-rata capaian kinerja (%)		**3,47**		**9,67**		**13,14**		**59,73**		**576,07**
												Predikat kinerja		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**
						Rata-rata capaian kinerja (%)								**7,97**		**6,02**		**13,99**		**45,44**		**163,79**
						Predikat kinerja								**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**

Tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan melaksanakan 1 (satu) urusan pelaksana yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam pelaksanaan Urusan Pelaksana Pemerintahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung melaksanakan 4 program, 13 kegiatan, dan 40 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.247.573.508,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 1.573.439.587,- atau 13,99%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Sub Kegiatan yang sama sekali belum direalisasikan keuangannya yaitu, Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub kegiatan Pengendalian Program KKBPK, Sub kegiatan, Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas, Sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), Sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. Ke 7 (tujuh) sub kegiatan ini belum dilaksanakan karena direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Dan secara umum program/kegiatan/sub kegiatan lainnya masih rendah karena kegiatan lebih banyak lebih banyak dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 dengan jelas disebutkan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung adalah melaksanakan pengelolaan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan, pengelolaan bidang Keluarga Berencana dan pengelolaan bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.

Pelayanan pemerintah dibidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini belum berjalan secara optimal, dan masih banyak terdapat hambatan-hambatan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lapangan.

Untuk mencapai tujuan Program Bangga Kencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung berusaha memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan KB, penguatan Advokasi dan KIE KB, pembinaan remaja, penguatan regulasi kelembagaan serta data dan informasi dan pembangunan keluarga yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

b) Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Program dan kegiatan saat ini, secara kualitas belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Adanya arahan dari pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak jadi dilaksanakan sehingga target dari masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan tidak tercapai, hal ini berpengaruh terhadap capaian kinerja;
2. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menjadi peserta KB aktif, data 31 Desember 2024 jumlah PUS adalah sebanyak 37.571 dan yang menjadi peserta KB aktif adalah sebanyak 27.132 Akseptor sedangkan yang belum menjadi peserta KB sebanyak 3.149 PUS;
3. Kurangnya Tenaga Penyuluh KB dilapangan.

   Dalam penyampaian Informasi tentang program Bangga Kencana, ternyata jumlah tenaga penyuluh dilapangan yang ada saat ini sangat tidak memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk dan wilayah yang harus didatangi dan dilakukan penyuluhan. Adapun tenaga penyuluh yang tersedia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung adalah 20 Orang. Dimana jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebanyak **243.710** sedangkan pada Tahun 2024 jumlah penduduk sebanyak **246.780** terjadi kenaikan sebanyak 3.070 penduduk. Dengan jumlah penduduk tersebut ditambah dengan luasnya wilayah yang terdiri dari 8 Kecamatan, 62 Nagari dan 1 Desa tenaga Penyuluh KB dilapangan sangat tidak mencukupi, sehingga penggarapan sasaran di lapangan tidak berjalan optimal dan akseptor yang berada di daerah terpencil tidak terjangkau dengan baik;
4. Kurangnya SDM Kader dalam mengelola Program Bangga Kencana.

   Kalau dilihat dari segi jumlah Kader yang ada di Kabupaten Sijunjung sudah cukup banyak. Namun dari segi kualitas SDM mereka masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena :

   a. Banyaknya Kader yang masih relatif baru menjadi Kader, hal ini disebabkan seringnya penggantian kader oleh wali nagari sehingga mereka belum memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam memberikan penyuluhan dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat;

b. Kurangnya pembinaan dari Penyuluh KB sebagai Pembina wilayah terhadap Kader, hal ini disebabkan karena 1 orang penyuluh memiliki 2 sampai 5 wilayah Nagari binaan:

Data Jumlah Kader KKBPK di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

- Kader PPKBD 243 Orang
- Kader Sub PPKBD 942 Orang
- Kader BKB 1.598 Orang
- Kader BKR 131 Orang
- Kader BKL 192 Orang
- Kader UPPKA 91 Orang

5. Unmeed Need (8,38%) per Desember 2024 yang masih tinggi yaitu PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda tapi belum terjangkau oleh pelayanan KB. Untuk menekan pertumbuhan penduduk dikalangan Pasangan Usia Subur perlu dilakukan motivasi, sehingga timbul keinginan oleh pasangan usia subur untuk ber KB (memakai alat kontrasepsi);
6. Belum berfungsinya secara maksimal Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang sudah dibentuk baik yang dibentuk melalui jalur pendidikan maupun yang dibentuk melalui jalur masyarakat;
7. Masih banyak kelompok UPPKS yang tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya minat dan modal usaha yang mereka miliki;
8. Belum optimalnya pertemuan kelompok BKB, BKR dan BKL;
9. Belum optimalnya peran Toga/Toma dalam pelaksanaan program KB;
10. Belum tergarapnya dengan maksimal wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan;
11. Akibat dari luasnya wilayah dan daerah Kabupaten Sijunjung, mengakibatkan tidak terjangkaunya para akseptor didaerah-daerah terpencil.

c) Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Agenda dan prioritas pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung yang berhubungan dengan visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih terletak pada misi 3 yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)” dan tujuan 1 yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Adapun permasalahan dan hambatan pada poin b diatas jika tidak teratasi, tentunya dapat berdampak terhadap dari sasaran tujuan dari misi 3 yaitu :

1. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Tingginya Prevelansi Stunting.

d) Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan penyelenggaraan tupolsinya antara lain adalah :

a) Tantangan :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga Penyuluh KB dilapangan. Jumlah tenaga Penyuluh KB yang dimiliki saat ini hanya 20 Orang sebagai ujung tombak pelayanan KB yang mencakup 63 Nagari/Desa. Kondisi ini tentunya sangat jauh dari standar rasio ketersediaan Penyuluh KB, dimana 1 Penyuluh KB seharusnya menangani Program Bangga Kencana di 1 atau 2 Nagari/Desa;
2. Alokasi anggaran APBD yang kecil sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun untuk pendampingan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik;

3. Sesuai dengan intruksi Bapak Presiden bahwa angka Pravelansi Stunting pada Tahun 2024 harus mencapai 14 persen, dimana angka Pravelansi Kabupaten Sijunjung saat ini tahun 2025 masih sebesar 28,50 persen;
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana.

b) Peluang :

1. Adanya bantuan DAK Fisik dan Non Fisik yang mendukung program Bangga Kencana;
2. Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang baik dalam mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana;
3. Pendayagunaan Kader PPBKD, Sub PPKBD, BKB, dan BKR di nagari untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana maupun mewujudkan Kehatanan Keluarga.

e) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2025, yaitu :

1. Mengurangi refocusing anggaran pada kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja;
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan program Bangga Kencana;
3. Meningkatkan SDM Penyuluh KB dan Kader dalam memberikan KIE kepada Masyarakat.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan responsivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan, masukan dari masyarakat/stakeholder khususnya berkaitan dengan program dan kegiatan di wilayah diakomodir dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tidak ada usulan masyarakat/pokok pikiran dewan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sijunjung

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2025-2029. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi :
   1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga;
   2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga;
   3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
   4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB;
   5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan;
   6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia;
   7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
b. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
   1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
   2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk;
   3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan;

4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
   1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR;
   2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR;
   3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus;
   4) Peningkatan KB Pria;
   5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP);
   6) Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB.
d. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
   1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah;
   2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
   1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah;
   2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tertera diatas, terutama dalam implemetasinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja ini berpedoman pada RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung periode 2021-2026 sebagai berikut :

TABEL 3.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kinerja Organisasi yang akuntabel	Meningkatnya kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	77,00
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, “Bangga Kencana"	1. Meningkatnya Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	1. Total Fertility Rate (TFR)	2,15
			2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	55,90
		2. Meningkatnya Akses Dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	79,41
			2. Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*)	11,00
			3. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21,75
		3. Meningkatnya Kualitas Keluarga	1. Persentase Remaja, Ibu Hamil, dan Ibu Baduta yang mendapatkan KIE Stunting	39,33

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana Kabupaten Sijunjung sebagai pedoman oprasional program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025 adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Program Prioritas Anggaran Tahun 2025.

Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 diselaraskan dengan agenda pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, mencakup Sasaran 2 dan 3 yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dan Menurunnya Prevelansi Stunting". Dan untuk arah kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, Peningkatan kuantitas & kualitas program Kampung KB, dan Peningkatan kualitas pembangunan keluarga yang produktif secara partisipatif.

Pada Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung mempunyai 4 program, 13 kegiatan, dan 40 sub kegiatan. Dari kegiatan tersebut, ada beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar sub kegiatan, kegiatan, maupun antar program dan perubahan target indikator, yaitu :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari 14 Sub Kegiatan yang ada, semua mengalami perubahan pagu yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari pagu sebesar Rp. 4.244.200,- berkurang menjadi

Rp. 901.600,-, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pagu awal Rp. 1.412.750,- berkurang menjadi Rp. 649.500,- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu awal Rp. 1.497.150,- berkurang menjadi Rp. 587.150,- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu awal Rp. 51.911.250,- berkurang menjadi Rp. 48.398.900,-, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu awal Rp. 1.755.300,- berkurang menjadi Rp. 874.350,- sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu awal Rp. 23.024.850,- turun menjadi Rp. 9.580.800,- sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pagu awal Rp. 7.164.750,- berkurang menjadi Rp. 3.107.400,- sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu awal Rp. 67.605.517,- berubah menjadi Rp. 35.644.606,- sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu awal Rp. 5.250.000,- berubah menjadi Rp. 4.896.330,- sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu awal Rp. 19.388.755,- ditiadakan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu awal Rp. 19.058.000,- turun menjadi Rp. 0,- sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu awal Rp. 93.066.000,- turun menjadi Rp. 79.866.000,- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 74.019.150,- berubah menjadi Rp. 61.809.300,- dan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu awal Rp. 13.020.000,- turun menjadi Rp. 11.560.000,-

2. Di Program Pengendalian Penduduk semua sub kegiatan yang mengalami perubahan yaitu Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal pagu awal Rp. 39.758.100,- turun menjadi Rp. 18.134.240,- dan pada Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan pagu awal Rp. 109.442.250,- naik menjadi Rp. 116.551.960,-.
3. Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana ada 11 sub kegiatan yang mengalami perubahan yaitu : Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK pagu awal Rp. 13.928.400,-

turun menjadi Rp. 5925359,- Sub kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) pagu awal Rp. 187045550,- naik menjadi Rp. 187.045.600,- Sub kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang pagu awal Rp. 128.499.950 turun menjadi Rp. 126.422.090,- Sub kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja pagu awal Rp. 218.020.900,- turun menjadi Rp. 212.736.109,- Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pagu awal Rp. 526.353.100,- turun menjadi Rp. 509.344.239,- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) pagu awal Rp. 2.828.999.810,- turun menjadi Rp. 2.827.800.050,- Sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pagu awal Rp. 70.030.928,- turun menjadi Rp. 41.814.098,- Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pagu awal Rp. 2.091.840.210,- turun menjadi Rp. 2.052.055.000,- Sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pagu awal Rp. 46.469.300,- turun menjadi Rp. 32.126.690,- Sub kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB pagu awal Rp. 13.750.000,- turun menjadi Rp. 5.648.446,- Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas pagu awal Rp. 248.818.972,- turun menjadi Rp. 232.379.888,-.

4. Sedangkan pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ada 7 sub kegiatan yang mengalami perubahan yaitu : sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) pagu awal Rp. 30.914.825,- turun menjadi Rp. 18.360.000,- sub kegiatan Pengelolaan Ketahanan

Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) pagu awal Rp. 81.800.000,- turun menjadi Rp. 79.532.500,- Sub kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) pagu awal Rp. 5.000.000,- turun menjadi Rp. 2.694.000,- Sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) pagu awal Rp. 17.600.000,- turun menjadi Rp. 12.660.200,- Sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja pagu awal Rp. 14.734.900,- turun menjadi Rp. 5.287.500,- dan Sub kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) pagu awal Rp. 468.000.000,- naik menjadi Rp. 474.780.798,-.

Total kebutuhan pagu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung untuk Perubahan Renja Tahun 2025 mengalami pengurangan karena efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SIJUNJUNG

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	14					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**										
2	14	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
2	14	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										
2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung	4	Dokumen	901.600	APBD II	-	4	Dokumen	4.554.450
2	14	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Sijunjung	2	Dokumen	649.500	APBD II	-	2	Dokumen	1.424.450
2	14	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
2	14	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung	19	Orang	2.437.429.705	APBD II		19	Orang	2.144.662.728
2	14	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sijunjung	1	Laporan	587.150	APBD II	-	1	Laporan	4.896.800
2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung	18	Laporan	48.398.900	APBD II	-	18	Laporan	21.193.850
2	14	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12	Paket	874.350	APBD II	-	12	Paket	4.380.500

2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12	Paket	9.580.800	APBD II	-	12	Paket	50.000.000
2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12	Paket	3.107.400	APBD II	-	12	Paket	8.041.200
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung	1	Laporan	35.644.606	APBD II	-	1	Laporan	95.000.000
2	**14**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sijunjung	3	Laporan	4.896.330	APBD II	-	3	Laporan	31.500.000
2	14	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	12	Laporan	-	APBD II	-	1	Laporan	19.388.755
2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung	1	Laporan	79.866.000	APBD II		1	Laporan	27.467.865
2	**14**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sijunjung	38	Unit	61.809.300	APBD II	-	38	Unit	143.000.000
2	14	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	53	Unit	11.560.000	APBD II	-	53	Unit	10.000.000
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**										
2	**14**	**02**	**2**	**01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**										
2	14	02	2	01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kab. Sijunjung	3	Satuan Pendidikan	18.134.240	APBD II	-	3	Satuan Pendidikan	20.413.600
2	**14**	**02**	**2**	**02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**										
2	14	02	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Sijunjung	1	Laporan	60.000.000	APBD II, DAK	-	1	Laporan	110.269.777
2	14	02	2	02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Sijunjung	1	Laporan	90.276.000	APBD II, DAK	-	1	Laporan	110.269.777

2	14	02	2	02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sijunjung	1	Dokumen	116.551.960	APBD II, DAK	-	8	Dokumen	109.442.250
2	**14**	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**										
2	**14**	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**										
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Sijunjung	3	Laporan	5.925.359	APBD II	-	3	Laporan	155.515.950
2	14	03	2	01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Sijunjung	8	Laporan	391.991.000	DAK	-	8	Laporan	531.800.000
2	14	03	2	01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Sijunjung	8	Laporan	187.045.600	APBD II, DAK	-	8	Laporan	143.830.950
2	14	03	2	01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Sijunjung	2	Dokumen	126.422.090	APBD II, DAK	-	2	Dokumen	153.257.400
2	14	03	2	01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Sijunjung	3	Organisasi	212.736.109	APBD II, DAK	-	3	Organisasi	215.697.900
2	**14**	**03**	**2**	**02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**										
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sijunjung	70	Orang	509.344.239	APBD II, DAK	-	70	Orang	189.078.750

2	14	03	2	02	06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Sijunjung	1	Laporan	2.827.800.050	APBD II, DAK	-	1	Laporan	189.078.750
2	**14**	**03**	**2**	**03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**									
2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sijunjung	18	Laporan	41.814.098	APBD II, DAK	-	18	Laporan	68.682.528
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Sijunjung	1385	Orang	2.052.055.000	APBD II, DAK	-	1385	Orang	540.441.202
2	14	03	2	03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sijunjung	18	Laporan	32.126.690	APBD II, DAK	-	18	Laporan	34.924.000
2	**14**	**03**	**2**	**04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**									
2	14	03	2	04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Sijunjung	26	Dokumen	5.648.446	APBD II	-	26	Dokumen	13.750.000
2	14	03	2	04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Sijunjung	26	Unit	341.000.000	DAK	-	26	Unit	13.750.000
2	14	03	2	04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Sijunjung	26	Kampung	232.379.888	APBD II, DAK	-	26	Kampung	419.494.980

2	**14**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**										
2	**14**	**04**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Sijunjung	1	Laporan	18.360.000	APBD II	-	1	Laporan	85.154.200
2	14	04	2	01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Sijunjung	1	Laporan	79.532.500	APBD II, DAK	-	1	Laporan	50.000.000
2	14	04	2	01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Sijunjung	1	Laporan	10.998.600	APBD II	-	1	Laporan	50.000.000
2	14	04	2	01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Sijunjung	25	Unit	135.103.500	APBD II, DAK	-	25	Unit	326.306.750
2	14	04	2	01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Sijunjung	90	Orang	2.694.000	APBD II	-	90	Orang	49.417.100
2	14	04	2	01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional	Kab. Sijunjung	15	Kelompok	12.660.200	APBD II	-	15	Kelompok	30.000.000

2	**14**	**04**	**2**	**02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										
2	14	04	2	02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Sijunjung	1	Laporan	5.287.500	APBD II	-	1	Laporan	15.000.000
2	14	04	2	02	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab. Sijunjung	1	Laporan	474.780.798	APBD II, DAK	-	1	Laporan	528.000.000
2	14	04	2	02	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Sijunjung	1	Laporan	561.600.000	DAK	-	1	Laporan	589.800.000
TOTAL											11.247.573.508					7.009.537.935

3.4. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 didasarkan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung maupun RKPD, dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan alokasi DAK Tahun 2025 dari pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu;
2. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kenerja pelayanan;
3. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan;
4. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD maupun DAK.;
5. Di dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra);
6. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rumusan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SIJUNJUNG TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target						Pagu (rupiah)		
									Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ berkurang		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang
2	**14**					**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**11.555.851.417**	**11.247.573.508**	**(308.257.909)**
2	**14**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100**	**%**	**100**	**%**	**-**	**%**	**2.800.455.622**	**2.695.305.641**	**(105.152.981)**
2	**14**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran**		**100**	**%**	**100**	**%**	**-**	**%**	**5.656.950**	**1.551.100**	(4.105.850)
2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	Dokumen	4	Dokumen	-	Dokumen	4.249.200	901.600	(3.347.600)
2	14	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		2	Dokumen	2	Dokumen	-	Dokumen	1.412.750	649.500	(763.250)
2	**14**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**%**	**100**	**%**	**-**	**%**	**2.490.864.109**	**2.486.419.769**	**(4.422.890)**
2	14	01	2	02	01	Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendrima Gaji dan Tunjangan ASN		19	Orang	19	Orang	-	Orang	1.437.420.705	1.437.420.705	-
2	14	01	2	02	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	1.497.150	587.150	(910.000)
2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		18	Laporan	18	Laporan	-	Laporan	51.911.230	48.598.900	(3.312.350)
2	**14**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**%**	**100**	**%**	**-**	**%**	**99.560.417**	**49.227.156**	**(50.443.261)**
2	14	01	2	06	02	Pemeliharaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	Paket	12	Paket	-	Paket	1.299.300	809.350	(489.950)
2	14	01	2	06	04	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	Paket	12	Paket	-	Paket	23.024.850	9.580.800	(13.444.050)
2	14	01	2	06	05	Pemeliharaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	Paket	12	Paket	-	Paket	7.164.750	3.107.400	(4.057.350)
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	67.805.317	35.844.000	(31.961.911)
2	**14**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**%**	**100**	**%**	**-**	**%**	**117.376.000**	**84.752.330**	**(32.611.670)**
2	14	01	2	08	02	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	Laporan	3	Laporan	-	Laporan	5.250.000	4.896.330	(353.670)
2	14	01	2	08	05	Pemeliharaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan		1	Laporan	12	Laporan	-	Laporan	15.058.000	-	(15.058.000)
2	14	01	2	08	06	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	95.068.000	79.868.000	(15.200.000)
2	**14**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terkondisi baik**		**100**	**%**	**100**	**%**	**-**	**%**	**87.038.150**	**73.589.500**	**(13.448.650)**
2	14	01	2	09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18	Unit	18	Unit	-	Unit	74.038.150	61.808.300	(12.229.850)
2	14	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		53	Paket	53	Paket	-	Paket	13.000.000	11.560.800	(1.439.200)
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase PUS yang mencari peserta KB Aktif**		**71,30**	**%**	**71,00**	**%**	**-**	**%**	**618.426.250**	**264.962.200**	**(353.514.150)**
							Persentase bayi yang diberikan oleh ibu usia 15-19 tahun		**19,40**	**%**	**19,40**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase Keluarga Sejahtera		**18,00**	**%**	**18,00**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase Nagari Kampung KB		**100,00**	**%**	**100,00**	**%**	**-**	**%**			

2	**14**	**02**	**2**	**01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**		**16,67**	**%**	**16,67**	**%**	**-**	**%**	**39.758.100**	**18.134.240**	**(21.623.860)**
2	14	02	2	01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		3	Satuan Pendidikan	3	Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	39.758.100	18.134.240	(21.623.860)
2	**14**	**02**	**2**	**02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**		**77,50**	**%**	**77,50**	**%**	**-**	**%**	**279.718.250**	**266.827.960**	**(12.890.290)**
							Persentase Unmet Need		**10,70**	**%**	**10,70**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur		**27,00**	**%**	**27,00**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting		**70,00**	**%**	**70,00**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase nagari yang memiliki Rumah Data Kependudukan (RDK)		**80,00**	**%**	**80,00**	**%**	**-**	**%**			
2	14	02	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	60.000.000	60.000.000	-
2	14	02	2	02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	90.276.000	90.276.000	-
2	14	02	2	02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		1	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	129.442.250	116.551.960	(12.890.290)
2	**14**	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif**		**71,00**	**%**	**71,00**	**%**	**-**	**%**	**7.106.748.120**	**6.966.288.569**	**(140.459.551)**
							Persentase bayi yang dilahirkan oleh ibu usia 15-19 tahun		**19,40**	**%**	**19,40**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase Keluarga Sejahtera		**18,00**	**%**	**18,00**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase Nagari Kampung KB		**100,00**	**%**	**100,00**	**%**	**-**	**%**			
2	**14**	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**		**77,50**	**%**	**77,50**	**%**	**-**	**%**	**939.485.800**	**924.120.158**	**(15.365.642)**
							Persentase Unmet Need		**10,70**	**%**	**10,70**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur		**27,00**	**%**	**27,00**	**%**	**-**	**%**			
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting		**70,00**	**%**	**70,00**	**%**	**-**	**%**			
							Cakupan Pokja Kampung KB yang dibina		**83,00**	**%**	**83,00**	**%**	**-**	**%**			
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		3	Laporan	3	Laporan	-	Laporan	13.928.400	5.925.359	(8.003.041)
2	14	03	2	01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		8	Laporan	8	Laporan	-	Laporan	391.991.000	391.991.000	-
2	14	03	2	01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		8	Laporan	8	Laporan		Laporan	187.045.550	187.045.600	50

2	14	03	2	01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		2	Dokumen	2	Dokumen	-	Dokumen	128.499.950	126.422.090	(2.077.860)
2	14	03	2	01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		3	Organisasi	3	Organisasi	-	Organisasi	218.020.900	212.736.109	(5.284.791)
2	**14**	**03**	**2**	**02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**		**77,50**	**%**	**77,50**	**%**	-	**%**	**3.355.352.910**	**3.337.144.289**	(18.208.621)
							Persentase Unmet Need		**10,70**	**%**	**10,70**	**%**	-	**%**			-
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur		**27,00**	**%**	**27,00**	**%**	-	**%**			-
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting		**70,00**	**%**	**70,00**	**%**	-	**%**			-
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		70	Orang	70	Orang	-	Orang	526.353.100	509.344.239	(17.008.861)
2	14	03	2	02	06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		-	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2.828.999.810	2.827.800.050	(1.199.760)
2	**14**	**03**	**2**	**03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contaceptive (mCPR)**		**77,50**	**%**	**77,50**	**%**	-	**%**	**2.208.340.438**	**2.125.995.788**	**(82.344.650)**
							Persentase Unmet Need		**10,70**	**%**	**10,70**	**%**	-	**%**			
2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		18	Laporan	18	Laporan	-	Laporan	70.030.928	41.814.098	(28.216.830)
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1.385	Orang	1.385	Orang	-	Orang	2.091.840.210	2.052.055.000	(39.785.210)
2	14	03	2	03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		18	Laporan	18	Laporan	-	Laporan	46.469.300	32.126.690	(14.342.610)
2	**14**	**03**	**2**	**04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contaceptive (mCPR)**		**77,50**	**%**	**77,50**	**%**	-	**%**	**603.568.972**	**579.028.334**	**(24.540.638)**
							Persentase Unmet Need		**10,70**	**%**	**10,70**	**%**	-	**%**			
							Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur		**27,00**	**%**	**27,00**	**%**	-	**%**			
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting		**70,00**	**%**	**70,00**	**%**	-	**%**			
							Cakupan Pokja Kampung KB yang dibina		**83,00**	**%**	**83,00**	**%**	-	**%**			
2	14	03	2	04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		26	Dokumen	26	Dokumen	-	Dokumen	13.750.000	5.648.446	(8.101.554)
2	14	03	2	04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB		-	Unit	26	Unit	26	Unit	341.000.000	341.000.000	-

2	14	03	2	04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		26	Kam pung	26	Kam pung	-	Kam pung	248.818.972	232.379.888	(16.439.084)
2	**14**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga Sejahtera**		**18,00**	**%**	**18,00**	**%**	-	**%**	**1.329.148.325**	**1.301.017.098**	**(28.131.227)**
							Persentase Nagari Kampung KB		**100,00**	**%**	**100,00**	**%**	-	**%**			
2	**14**	**04**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Sekolah yang memiliki PIK R**		**75,00**	**%**	**75,00**	%	-	**%**	**284.813.425**	**259.348.800**	**(25.464.625)**
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting		**70,00**	**%**	**70,00**	%	-	**%**			
							Persentase Kelompok Kegiatan yang dibina		**15,00**	**%**	**15,00**	%	-	**%**			
							Cakupan Poktan Kampung KB yang dibina		**83,00**	**%**	**83,00**	%	-	**%**			
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	30.914.825	18.360.000	(12.554.825)
2	14	04	2	01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		-	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	81.800.000	79.532.500	(2.267.500)
2	14	04	2	01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		1	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	10.998.600	10.998.600	-
2	14	04	2	01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		25	Unit	25	Unit	-	Unit	138.500.000	135.103.500	(3.396.500)
2	14	04	2	01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		90	Orang	90	Orang	-	Orang	5.000.000	2.694.000	(2.306.000)
2	14	04	2	01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		15	Kelom pok	15	Kelom pok	-	Kelom pok	17.600.000	12.660.200	(4.939.800)
2	**14**	**04**	**2**	**02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Nagari yang memiliki PIK R jalur masyarakat**		**27,00**	**%**	**27,00**	**%**	-	**%**	**1.044.334.900**	**1.041.668.298**	**(2.666.602)**
							Persentase pendampingan keluarga beresiko stunting		**70,00**	**%**	**70,00**	**%**	-	**%**			
							Persentase Kelompok Kegiatan yang dibina		**15,00**	**%**	**15,00**	**%**	-	**%**			

2	14	04	2	02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		1 Laporan	1 Laporan	- Laporan	14.734.900	5.287.500	(9.447.400)
2	14	04	2	02	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)		1 Laporan	1 Laporan	- Laporan	468.000.000	474.780.798	6.780.798
2	14	04	2	02	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan		1 Laporan	1 Laporan	- Laporan	561.600.000	561.600.000	-

3.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025 sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, indikator kinjera yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Secara detil indikator kinjerja dan Indikator Kinerja Kunci Hasil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL 3.5
CAPAIAN INDIKATOR KUNCI UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2024	
					TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,83	2,15	2,15
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,64	55,90	55,90

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yaitu : Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dengan rincian target sebagai berikut :

1. Untuk IKK Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) capaian Tahun 2024 adalah 2,83 dan untuk di Tahun 2025 ini Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung masih dengan target Rencana Kerja Awal yaitu 2,15.;
2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) capaian Tahun 2024 adalah 60,64. Dan untuk Rencana Kerja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini adalah 55,90. Untuk perubahan Rencana Kerja tidak mengalami perubahan.

TABEL 3.6
CAPAIAN INDIKATOR KUNCI HASIL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2025	
					TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,83	2,15	2,15
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	71,94	79,41	79,41
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	8,38	11,00	11,00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung memiliki 3 Indikator Kinerja Kunci Hasil yaitu :

1. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR):

   Pada Tahun 2024 capaian kinerja untuk IKKH Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) adalah 2,83, dan untuk target Tahun 2025 yaitu 2,15.

2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR):

   Pada Tahun 2024 capaian kinerja untuk IKKH Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah 71,94, dan untuk target Tahun 2025 yaitu 79,41.

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) :

   Pada Tahun 2024 capaian kinerja untuk IKKH Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) adalah 8,38, dan untuk target Tahun 2025 yaitu 11,00.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 yang menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menterjemahkan visi dan misi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu bahan/pengantar dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

Dalam penyusunan perubahan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan saran dan masukan agar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung menjadi lebih baik.

Semoga laporan perubahan rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 26 Mei 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

RONI SATRIA, S.STP, M.Si
Pembinta Utama Muda
NIP. 19771024 199703 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS KABUPATEN SIJUNJUNG
JLN. RASUNA SAID NO. 47 MUARO SIJUNJUNG Telp. (0754) 20120

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program, Sub Kegiatan dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kantor Kesbang, Politik dan Linmas telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kantor Kesbang, Politik dan Linmas demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas Persatuan dan Kesatuan, Pendidikan Politik dan Stabilitas Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, Mei 2025

KAKAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN SIJUNJUNG

SUKARDI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19730620 200701 1 003

Lampiran : Lampiran

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 12 Tahun 2025

Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Triwulan I

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesbang, Politik dan Linmas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesbang, Politik dan Linmas

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015, diamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok fungsinya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahunan.

Sesuai amanat tersebut maka Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2025 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang yang subtansinya mengacu kepada Renstra OPD dan dan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berjalan, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Renja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 mengacu pada Renja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra tahun 2022-2026.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945, pasal 18;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penganggaran Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana BAB VI ketentuan peralihan Pasal 11 ayat (I), (II) dan (III) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sijunjung tentang Urusan Kesbang dan Politik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 adalah untuk memberikan arah program dan kegiatan untuk Tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 1). Tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 2). Sebagai Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN BERJALAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Triwulan I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III :TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN BERJALAN
- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja KESBANGPOL
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Triwulan I

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana BAB VI ketentuan peralihan Pasal 11 ayat (I), (II) dan (III) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sijunjung tentang Urusan Kesbang dan Politik**,** merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sijunjung, Dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 alokasi anggaran awal untuk Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sebesar Rp.3.922.362.045,- untuk pelaksanaan 5 program, 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Namun setelah adanya Rasionalisasi Anggaran serta Efisiensi dan Efektifitas dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pada Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung adalah sebesar Rp.3.922.362.045,- untuk pelaksanaan 5 program, 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Realisasi anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran serta Efisiensi dan Efektifitas sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp.493.354.995,- dengan capaian kinerja 12.58% dengan rincian capaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi Rp. 936.000,- dari pagu anggaran Rp. 7.467.500,- atau 12.53%
b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi Rp.483.000 dari pagu anggaran Rp. 7.467.500,- atau 6.47%
c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi Rp.1.715.500,- dari pagu anggaran Rp. 5.828.500,- atau 29.43%
d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi Rp.277.704.818,- dari pagu anggaran Rp.1.125.832.633,- atau 24.67%
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi Rp. 4.850.000,- dari pagu anggaran Rp. 6.255.000,- atau 77.54%

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi Rp. 7.131.000,- dari pagu Rp. 24.924.000,- atau 28.61%
g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi Rp. 440.000,- dari pagu Rp. 3.960.000,- atau 11.11%
h. Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan realisasi Rp.5.294.100,- dari pagu Rp.36.360.700,- atau 14.56%
i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi Rp.3.447.000,- dari pagu Rp.13.738.700,- atau 25.09%
j. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi Rp. 700.000,- dari pagu Rp. 1.440.000,- atau 48.61%
k. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi Rp.3.331.700,- dari pagu Rp.19.962.000,- atau 16.69%
l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi Rp. 44.823.052,- dari pagu Rp.147.958.500,- atau 30.29%
m. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi Rp.6.772.525,- dari pagu Rp. 35.046.342,- atau 47.00%
n. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi Rp.440.000,- dari pagu Rp. 5.330.000,- atau 8.26%
o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi Rp.11.650.000,- dari pagu Rp.65.552.000,- atau 17.77%
p. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan Dinas Operasional atau lapangan realisasi Rp.23.389.500,- dari pagu Rp.97.325.950,- atau 24.03
q. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi Rp.1.645.000,- dari pagu Rp.12.480.000,- atau 13.18%

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ikaa dan Sejarah Kebangsaan realisasi Rp.11.328.850,- dari pagu Rp.107.914.400,- atau 10.50%
   b. Pembentukan Paskibraka realisasi Rp.6.402.300,- dari pagu Rp.751.510.000,- atau 0.85%

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah realisasi Rp.0,- dari pagu Rp.945.073.720,- atau 0.00%
   b. Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah realisasi Rp.45.014.900,- dari pagu Rp.169.091.200,- atau 26.62%

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah realisasi Rp.35.855.750,- dari pagu Rp. 162.722.900,- atau 22.03%
   b. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota realisasi Rp.0,- dari pagu Rp.105.060.000,- atau 0.00%

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
   Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah realisasi Rp.0,- dari pagu Rp.64.060.500,- atau 0%

FORMULIR E.81

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS KABUPATEN SIJUNJUNG

No	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15 = 14/5x100%		15	15
I.		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8 01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**																									
1	8 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya pelayanan administasi perkantoran. Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik, persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi tingkat																							Kantor Kesbangpol	
1.1	**8 01 01 2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																								
1.1.1	8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	130,814,870	4 Dok	59,685,950	1 Dok	7,467,500	1	936,000		-		-	-	-	1.00	936,000	100.00	12.53	5.00	60,621,950	83.33	46.34		
1.1.2	8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	26,448,000	8 Dok	14,003,500	2 Dok	7,467,500	1	483,000	-	-		-	-	-	1.00	483,000	50.00	6.47	9.00	14,486,500	75.00	54.77		
1.1.3	8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Dok	15,957,000	16 Dok	12,102,500	4 Dok	5,828,500	1	1,715,500	-	-	-	-	-	-	1.00	1,715,500	25.00	29.43	17.00	13,818,000	53.13	86.60		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		70.49	62.57		
																						Predikat kinerja					
1.2	8 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya pelayanan administasi keuangan perangkat daerah																								
1.2.1	8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	8,150,373,158	48 Orang	3,929,177,513	12 Orang	1,125,832,633	12	277,704,818	-	-		-	-	-	12.00	277,704,818	100.00	24.67	60.00	4,206,882,331	83.33	51.62		
1.2.2	8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 dok	75,424,800	8 dok	36,873,950	2 dok	6,255,000	2	4,850,000		-		-	-	-	2.00	4,850,000	100.00	77.54	10.00	41,723,950	83.33	55.32		
1.2.3	8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78 dok	175,139,870	52 dok	96,759,400	13 dok	24,924,000	3	7,131,000	-	-	-	-	-	-	3.00	7,131,000	23.08	28.61	55.00	103,890,400	70.51	59.32		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		79.06	55.42		
																						Predikat kinerja					
1.3	8 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya pelayanan administasi kepegawaian perangkat daerah																								
1.3.1	8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	126 org	77,156,100	21 Org	9,000,000	- -	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	21.00	9,000,000	16.67	11.66		
1.3.2	8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 org	288,290,800	2 org	6,411,620	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	-	-	-	-						
											-	-	-		-		-	-	-	-	-	Rata-rata capaian kinerja (%)		16.67	11.66		
																						Predikat kinerja					
1.4	8 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya pelayanan administasi umum perangkat daerah																								
1.4.1	8 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	19,398,200	8 paket	10,730,200	2 paket	3,960,000	1	440,000		-		-	-	-	1.00	440,000	50.00	11.11	9.00	11,170,200	75.00	57.58		
1.4.2	8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	24 paket	151,231,100	16 paket	108,607,100	4 paket	36,360,700	1	5,294,100	-	-	-	-	-	-	1.00	5,294,100	25.00	14.56	17.00	113,901,200	70.83	75.32		
1.4.3	8 01 01 2.06 07	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	60,000,000		-				-		-					-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.4	8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	110,057,250	8 paket	58,016,500	2 paket	13,738,700	1	3,447,000		-		-	-	-	1.00	3,447,000	50.00	25.09	9.00	61,463,500	75.00	55.85		
1.4.5	8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30 paket	21,600,000	20 paket	10,070,000	2 paket	1,440,000	2	700,000	-	-	-	-	-	-	2.00	700,000	100.00	48.61	22.00	10,770,000	73.33	49.86		
1.4.7	8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 paket	234,716,520	8 paket	79,539,000	2 paket	19,962,000	1	3,331,700		-		-	-	-	1.00	3,331,700	50.00	16.69	9.00	82,870,700	75.00	35.31		
1.4.8	8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 paket	1,602,206,314	200 paket	781,885,395	50 paket	147,958,500	15	44,823,052	-	-	-	-	-	-	15.00	44,823,052	30.00	30.29	215.00	826,708,447	71.67	51.60		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		73.47	54.25		
																						Predikat kinerja					
1.5	8 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan terhadap pengadaan barang milik daerah																								
1.5.1	8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	52,500,000	-	-	-	-		-																
1.5.2	8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	440,252,190	3 unit	35,696,570	- -	-		-																
1.5.3	8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	47 Unit	606,277,190	-	-	- -	-		-																
1.5.4	8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan terhadap jasa penunjang urusan pemerintah daerah																								
1.5.5	8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	30,075,000	2 Laporan	6,820,000	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	2.00	6,820,000	33.33	22.68		
1.5.6	8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	289,043,600	3 Laporan	182,991,025	1 Laporan	35,046,342	-	6,772,525	-	-		-	-	-	-	6,772,525	-	19.32	3.00	189,763,550	50.00	65.65		
1.5.7	8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	225,358,600	3 Laporan	55,952,400	1 Laporan	5,330,000	-	440,000	-	-		-	-	-	-	440,000	-	8.26	3.00	56,392,400	50.00	25.02		
1.5.8	8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	325,333,996	3 Laporan	340,602,496	1 Laporan	65,552,000	-	11,650,000	-	-		-	-	-	-	11,650,000	-	17.77	3.00	352,252,496	50.00	108.27		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		45.83	55.41		
																						Predikat kinerja					
1.6	8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan terhadap pemeliharaan barang milik daerah																								
1.6.7	8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 unit	512,280,000	43 Unit	327,581,050	13 Unit	97,325,950	3	23,389,500	-	-	-	-	-	-	3.00	23,389,500	23.08	24.03	46.00	350,970,550	76.67	68.51		
1.6.8	8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 unit	110,016,450	72 Unit	52,676,400	18 Unit	12,480,000	4	1,645,000	.	.	.	.	.	.	4.00	1,645,000	22.22	13.18	76.00	54,321,400	70.37	49.38		
1.6.9	8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	155,865,000	4 Unit	40,181,000			-	-	-	-					-	-			4.00	40,181,000	66.67	25.78		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		71.23	47.89		
																						Predikat kinerja					

1.7	8	01	02		**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa**																														
1.7.1	8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsan	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa																														
1.7.2	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	2700 Orang	2,176,662,250	1,800 Orang	412,165,149	450 Orang	107,914,400	50	11,328,850	-	-	-	-	-	-	50.00	11,328,850	11.11	10.50	1,850	423,493,999	68.52	19.46		
1.7.3	8	01	02	2.01	04	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	216 Orang	1,411,859,600	72 orang	573,615,380	72 Orang	751,510,000	-	6,402,300		-		-	-	-	-	6,402,300	-	0.85		6,402,300	-	0.45		
																										Rata-rata capaian kinerja (%)		68.52	9.95		
																										Predikat kinerja					
2	8	01	03		**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**																														
2.1	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan	persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,																														
2.1.1	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Poli	264 orang	815,532,926	12 orang	32,350,361,765					-		-		-	-	-	-				12	32,350,361,765	4.55	3,966.78		
																										Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-		
																										Predikat kinerja					
3	8	01	04		**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi**																														
3.1	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																														
3.1.1	8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Perberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah yang disusun	71 dokumen	5,628,479,616	76 Dok	3,633,837,387	13 Dok	945,073,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00	3,633,837,387	107.04	64.56		
3.1.2	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Orma, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Laporan	1,509,185,604	200 Laporan	832,274,600	50 Laporan	169,091,200	5	45,014,900	-	-	-	-	-	-	5.00	45,014,900	10.00	26.62	205.00	877,289,500	68.33	58.13		
																										Rata-rata capaian kinerja (%)		87.69	61.35		
																										Predikat kinerja					
4	8	01	06		**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi**																														
4.1	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																														
4.1.1	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Kon	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Pe	216 Laporan	4,397,591,390	144 Laporan	1,537,232,271	36 Laporan	162,722,900	4	35,855,750	-	-	-	-	-	-	4.00	35,855,750	11.11	22.03	148.00	1,573,088,021	68.52	35.77		
4.1.2	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	18 dok	1,435,568,000	9 dokumen	550,198,000	3 Dok	105,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	550,198,000	50.00	38.33		
																										Rata-rata capaian kinerja (%)		59.26	37.05		
																										Predikat kinerja					
5	8	01	07		**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan**	**persentase terbinanya ketahanan ekonomi sosial dan budaya**																														
5.1	8	01	07	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik																														
5.1.1	8	01	07	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7560 Orang	2,349,506,250	320 Orang	245,174,350	120 Orang	64,060,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	245,174,350	4.23	10.44		
							Jumlah		33,610,201,644		46,390,222,471		3,922,362,045		493,354,995		-		-		-		493,354,995		12.58	Rata-rata capaian kinerja (%)		4.23	10.44		
																										Predikat kinerja					
																										Rata-rata capaian kinerja (%)		54.07	40.86		
																										Predikat kinerja					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Analisis kinerja pelayanan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari 2 aspek yaitu :

a. Kelembagaan

Kelembagaan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Bagian Keenam Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana BAB VI ketentuan peralihan Pasal 11 ayat (I), (II) dan (III) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sijunjung tentang Urusan Kesbang dan Politik

b. Sumber Daya Manusia

- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Kantor Kesbang, Politik dan Linmas masih terbatas jumlahnya termasuk kualitas, kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan Teknologi terutama dibidang Informasi, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap, dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang Kesbang, Politik dan Linmas, sehingga dapat dihasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif.
2. Belum optimalnya implementasi penyusunan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
3. Penetapan indikator kinerja yang terukur dan tepat sasaran
4. Potensi SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan daerah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pemelihara Stabilitas Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di tingkat Kabupaten, Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung menghadapi tantangan sebagai berikut :

a. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
b. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
c. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih
d. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Sijunjung
e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Dalam menjawab tantangan tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar Seksi maupun eksternal dengan SKPD di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Ke depan diharapkan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung memiliki tenaga profesional di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang akan berperan dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

RKPD tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Tahun 2021–2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Tahun 2021– 2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut di atas, peran Kementerian Dalam Negeri sangat strategis, karena Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan Masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung ditujukan untuk meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahtaraan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan masyarakat sadar hukum dan keadilan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan umum pembangunan daerah yang telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun komitmen ini perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga perlu disusun prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan ;

a. isu-isu strategis memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan,
b. potensi dan peluang yang dimiliki, dan
c. hal hal yang mendesak dan penting untuk dilaksanakan. Prioritas pembangunan tersebut bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Sejalan dengan maksud tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung diprioritaskan pada sasaran-sasaran strategis yang berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesbang, Politik dan Linmas

Berdasarkan Misi Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung yang telah dituangkan dalam renstra tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai tahun 2024 yaitu meningkatkan kualitas demokrasi dan stabilitas daerah, sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas demokrasi dan organisasi kemasyarakatan daerah
b. Meningkatnya stabilitas daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan :

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: "**KABUPATEN SIJUNJUNG YANG SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT MADANI".** Dari visi dan misi tersebut maka ada kesesuaian antara visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD dengan visi dan misi Kantor Kesbangpol Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun ke depan yaitu: **"KABUPATEN SIJUNJUNG YANG SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT MADANI"**, khususnya indikator penjabaran visi Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, terciptanya hubungan antar rakyat Kabupaten Sijunjung yang dinamis, saling menghargai, saling bantu membantu, saling pengertian dan *tepo sliro*.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang efektif, efesien dan responsif berbasis reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata
3. Meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produkrif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK.
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan Sumber Daya Alam berwawasan Lingkungan.

Sedangkan dari penjabaran dari misi, yang sesuai dengan bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah misi yang ke-..... yaitu: kesatu, misi ke-empat, yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif,efesien dan responsif berbasis reformasi Birokrasi, serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan Sumber Daya Alam berwawasan Lingkungan ;

serta misi ke-enam, yaitu: Melakukan Revitalisasi Adat dan Budaya Berlandasan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026 tersebut, yang sesuai dengan pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah :

1. **Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke-satu** yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif, efesien dan responsif berbasis reformasi Birokrasi
   Tujuannya: Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat yang lebih efektif dan Efisien berbasis reformasi Birokrasi
   Sasarannya: Masyarakat
2. **Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke-dua** yaitu: Meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produkrif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK.
   Tujuannya: Meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produkrif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK.
   Sasaran : Pemerintah Daerah

   Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

   Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik memiliki satu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah

   Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memiliki satu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial memiliki satu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

   Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya memiliki satu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

b. Percapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal).
   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pasal 9 ayat (3), terdapat 2 SPM yang terkait langsung dengan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas adalah :
   1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
      Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, pasal 5 ayat (2), menyelenggarakann fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelengaraaan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, ummat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, peneyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan

Program Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

c. Pencapaian Tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).
Terdapat 2 (dua) Tujuan SDGs yang terkait dengan program dan kegiatan pada Kantor Kesbang, Politik dan Linmas yaitu :
1. Tujuan SDGs Nomor 10 : “Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara”, Target : memberdayakan dan mendorong penyertaan social, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenos kelamin, disabilitas, bangsa, suku asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya.
2. Tujuan SDGs Nomor 16 : “ Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membanguan institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inlusif disemua level”.

Program dan kegiatan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas melalui kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik diharapkan berdampak kepada menciptakan lingkungan yang damai, adil dan kuat Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dengan mempedomani Standar Pelayanan Minimal dan Pencapaian Tujuan SDGs, pada tahun 2025 Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung melaksanakan 5 program, 11 Kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   1.2 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   1.3 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
   3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
   4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kon sultasi SKPD
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   5.1 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan
   7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhine Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
   1.2 Pembetukan Paskibraka

3. Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik
   1.1 Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   1.1 Penyusunan Program Kerja dibidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
   1.2 Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**
   1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
      1.1 Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
      1.2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

6. **Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**
   1. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
      1.1 Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

Berdasarkan program dan kegiatan tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah Program dan kegiatan yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi baik di tingkat pusat, propinsi maupun di tingkat Kabupaten dengan merasionalkan atau menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan yang telah disetujui adapun data program dan kegiatan untuk Tahun 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KANTOR KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah·

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta target indikator yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah selain itu dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah juga harus didasari pada evaluasi renja tahun lalu dan tahun berjalan agar rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja merupakan optimalisasi pencapaian sasaran renstra perangkat daerah.

Untuk lebih terincinya program dan kegiatan serta pendanaan yang terdapat pada kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS TAHUN 2025
KABUPATEN SIJUNJUNG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET			PAGU INDIKATIF			KET
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									
8 01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
8 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik, persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi tingkat								
8 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan terhadap Perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**								
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muaro Sijunjung	5 dokumen	5 dokumen		7,467,500	936,000	(6,531,500)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muaro Sijunjung	3 Dokumen	3 Dokumen		7,467,500	483,000	(6,984,500)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan		5,828,500	1,715,500	(4,113,000)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daearah**	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah								
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muaro Sijunjung	10 orang	10 orang		1,125,832,633	1,125,844,175	11,542	
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Lapaoran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muaro Sijunjung	2 Laporan	2 Laporan		6,255,000	4,850,000	(1,405,000)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muaro Sijunjung	13 Laporan	13 Laporan		24,924,000	7,167,000	(17,757,000)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah							-	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muaro Sijunjung						-	
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Muaro Sijunjung						-	
8 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah							-	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	2 paket	2 paket		3,960,000	1,980,000	(1,980,000)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	4 paket	4 paket		36,360,700	17,010,450	(19,350,250)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muaro Sijunjung	2 paket	2 paket		13,738,700	7,172,100	(6,566,600)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Peundang-undangan yang disediakan	Muaro Sijunjung	5 Dokumen	5 Dokumen		1,440,000	1,440,000	-	
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan		19,962,000	12,297,400	(7,664,600)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muaro Sijunjung	50 Laporan	30 Laporan	(20)	147,958,500	82,533,700	(65,424,800)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan terhadap pengadaaan barang milik daerah							-	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Muaro Sijunjung						-	
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Muaro Sijunjung						-	
8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan terhadap jasa penunjang urusan pemerintah daerah							-	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan		35,046,342	22,633,000	(12,413,342)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan		5,330,000	1,950,000	(3,380,000)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muaro Sijunjung	1 Laporan	1 Laporan		65,552,000	65,552,000	-	
8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah**	Persentase pemenuhan terhadap pemeliharaan barang milik daerah							-	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muaro Sijunjung	10 unit	10 unit		97,325,950	81,200,950	(16,125,000)	Efisiensi Anggaran
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muaro Sijunjung	18 Unit	18 Unit		12,480,000	9,010,000	(3,470,000)	Efisiensi Anggaran

8 01 02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa**							-	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa							-	
8 01 02 2.0104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ikaa dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Muaro Sijunjung	445 Orang	200 Orang	(245)	107,914,400	66,951,700	(40,962,700)	Efisiensi Anggaran
8 01 02 2.0108	pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Muaro Sijunjung	72 orang	56 orang	(16)	751,510,000	552,574,850	(198,935,150)	Efisiensi Anggaran
									-	
8 01 04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi**							-	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							-	
8 01 04 2.001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Perberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah yang disusun	Muaro Sijunjung	21 Dokumen	13 Dokumen	(8)	945,073,720	945,073,720	-	
8 01 04 2.005	Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Muaro Sijunjung	50 Laporan	30 Laporan	(20)	169,091,200	107,089,900	(62,001,300)	Efisiensi Anggaran
									-	
8 01 06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi**							-	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							-	
8 01 06 2.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Kon	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Pe	Muaro Sijunjung	36 Laporan	13 Laporan	(13)	162,722,900	116,351,100	(46,371,800)	Efisiensi Anggaran
8 01 06 2.006	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Muaro Sijunjung	3 Dokumen	1 Dokumen	(2)	105,060,000	92,144,000	(12,916,000)	Efisiensi Anggaran
8 01 07	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**	**persentase terbinanya ketahanan ekonomi sosial dan budaya**							-	
8 01 07 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik							-	
8 01 07 2.004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Muaro Sijunjung, Kecamatan dan Nagari	120 Orang	0 Orang	(120)	64,060,500	-	(64,060,500)	Efisiensi Anggaran
						Jumlah	3,922,362,045	3,323,960,545	(598,401,500)	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Renja Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Kesbang, Politik dan Linmas.

Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Sijunjung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Muaro Sijunjung, Mei 2025

KAKAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN SIJUNJUNG

SUKARDI, SH
Pembina
NIP. 19730620 200701 1 003

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung
Nomor : 555/19/Kpts-Diskominfo-2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

JULI
2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbup RKPD Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD 2025, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra OPD dan Pagu Indikatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025 yang mengalami perubahan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika demi mendukung percepatan terwujudnya Visi, Misi, tujuan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026.

Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sijunjung

drg. EZWANDRA, M.Sc
NIP.19750615 200501 1 007

DAFTAR ISI

A.

Surat Keputusan Kepala Dinas		
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Kata Pengantar		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
BAB II.	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFO S.D TRIWULAN II TAHUN 2025	II-1
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
BAB IV.	PENUTUP	IV-1

Lampiran

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor : 555/19/KTPS-DISKOMINFO-2025 Tentang Renja Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

B.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2025 Triwulan II II-8

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 III-2

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, maka perlu ditingkatkan dan lebih memperhatikan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, karena memiliki peran sangat penting terutama untuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Dalam aspek-aspek hubungan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah mempunyai peluang dan tantangan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan disertai pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Saat ini informasi menjadi suatu komoditi yang sangat berharga bagi suatu daerah untuk dikuasai dalam rangka

meningkatkan daya saing suatu organisasi termasuk pemerintah daerah sendiri secara berkelanjutan di era globalisasi.

Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan Komunikasi dan Informatika perlu diselenggarakan secara profesional terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagaimana telah dirubah kembali menjadi Perbup SOTK NO. 50 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung kemudian dirobah kembali menjadi Perbup SOTK NO. 37 Tahun 2023 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjun, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang Kominfo kepada masyakarat sehingga penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyakarat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka mewujudkan smart city di Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (

Renja-PD) berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusun Perubahan Renja-PD Tahun berkenan. Sesuai amanat Permendagri dimaksud, dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 maka penyusunan rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 berpedoman pada :

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
2. Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Surat Edaran Bupati Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Effisiensi Belanja Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Rincian pagu indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan pergeseran anggaran belanjda Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdapat dalam SIPD RI.
7. Rancangan Perubahan .
8. Muatan rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 dapat dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD sampai dengan prognosis triwulan II - 2025, serta memperhatikan visi, misi dan program Bupati

dan Wakil Bupati terpilih dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

9. Perubahan substansi renja-PD Tahun 2025 agar mempertimbangkan isu actual penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK).
10. Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 agar memperhatikan manajemen resiko sebagai bagian yang melekat atau terintegrasi dengan proses bisnis utama dalam upaya meminimalisir resiko terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah serta mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam perumusan dan penetapan target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan.
11. Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 disajikan dengan sistimatika sebagai berikut :
    a. Pendahuluan
    b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
    c. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
    d. Penutup

Untuk itu penyusunan Perubahan rencana kerja tahunan sangatlah penting sebagai kerangka acuan yang menjamin pembangunan Komunikasi dan Informatika tetap dalam koridor pencapaian visi misi yang telah ditetapkan, dengan disusunnya rencana kerja setiap tahun secara sistematis diharapkan akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam penjabaran program dan kegiatan pembangunan Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja untuk Tahun 2025 kali ini memuat evaluasi pelaksanaan program triwulan II Tahun 2025, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, untuk menunjang kebutuhan tahun 2025.

1.2.LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung tahun 2025 secara yuridis berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perbahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penganggaran Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.1.15-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan

inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2014.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Sijunjung Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
20. Perbup Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.
21. Perbup Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.
22. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 Tanggal 10 Juli 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai sasaran, program dan kegiatan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD adalah:

"Untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel "

Sedangkan tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin konsistensi rencana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dengan arahan strategis visi dan misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
3. Sebagai pedoman acuan keberlanjutan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung tahun 2025 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan

keberlanjutan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.

4. Sebagai optimalisasi pelaksanaan pembangunan baik dari aspek penganggaran, maupun kinerja program dan kegiatan;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TRIWULAN II

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Lampiran

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika bidang persandian dan bidang statistik. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung selama Triwulan I dan prognosis Triwulan II Tahun 2025.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Adapun hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Sijunjung sampai Triwulan II pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo

1. **Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.**

   Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian selama tahun anggaran 2025 dapat dilihat dari persentase tingkat keberhasilannya dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dimana ada 5 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara keseluruhannya dari jumlah anggaran yang direncanakan pada awalnya sebesar Rp. .3.581.660.151,-terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.532.593.771,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.049.066.380,-, terealisasi sampai dengan triwulan II ini sebesar Rp.1.701.838.630,- (50,94 %) yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.290.214.773,- (75,81%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.411.623.857,- (24,19%). Dari angka diatas dapat terlihat bahwa jika secara total keseluruhan dari belanja langsung dan belanja tidak langsung maka nilai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai

dengan prognosis triwulan II ini termasuk kategori cukup, hal ini dapat dilihat dari jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang terealisasi.

Selain dari itu, untuk sarana dan prasarana pendukung bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat maupun seluruh SKPD di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung sudah cukup baik sehingga cukup meningkatkan dalam pemberian pelayanan. Namun seiring waktu berjalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung akan selalu meningkatkan penganggaran sarana dan prasarana yang dianggap sangat penting dan mendesak. Selain dari itu beberapa hal ini terkait dengan beberapa sub kegiatan yang seharusnya telah bisa direalisasikan namun terhambat karena beberapa perubahan aturan terutama yang berkaitan dengan pengadaan dan pembelian yang harus dilaksanakan dengan menggunakan e katalog , sehingga berpengaruh terhadap proses pembuatan SPJ dan proses pembayaran.

Selain dari itu ada juga kontrak kerjasama dengan beberapa media yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk triwulan, sehingga untuk triwulan II, baru bisa dilaksanakan pembayarannya pada awal Juli (triwulan III), hal ini juga berimplikasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja Dinas Kominfo.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kekurangan anggaran dan SDM adalah faktor penghambat terbesar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, namun seiring dengan waktu akan tetap selalu diusahakan penambahan anggaran dan pengusulan penambahan dan

peningkatan kualitas SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)

Dari hambatan yang dihadapi diatas otomatis juga berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, begitu juga terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk tahun 2025 ini kedepannya akan lebih diusahakan untuk pencapaian tujuan strategis dan sasaran kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, karena dengan tercapainya tujuan dan sasaran strategis OPD maka otomatis juga akan berpengaruh besar terhadap peningkatan Sasaran Kepala Daerah yaitu Peningkatan Nilai Indeks SPBE.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1. Belum optimalnya pengelolaan sistem data base Kab. Sijunjung yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan

   Dapat ditindak lanjuti dengan :

   1. Meningkatkan penggunaan dan pengisian Web. PPID Kabupaten Sijunjung
   2. Membuat Workshop Penyusunan DIP dan Pengujian konsekwensi informasi publik serta pengaplikasian data/dok informasi publik dengan narasumber dari KI Pusat

2. Belum optimalnya pelayanan pengaduan masyarakat secara online

   Dapat ditindak lanjuti dengan

   1. Melakukan sosialisasi Penggunaan LAPOR SP4N untuk OPD dan ke Kecamatan

2. Mengoptimalkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang masuk dengan OPD terkait

3. Belum optimalnya integrasi aplikasi/sistem informasi layanan aparatur dan layanan publik berbasis web

Dapat ditindak lanjuti dengan

1. Mengintegrasikan berapa aplikasi yang telah dibangun dan dipakai oleh Dinas KOMINFO sendiri dan OPD yang ada di Kab. Sijunjung untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
2. Memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan aplikasi sesuai permintaan dari OPD serta pemeliharaan terhadap aplikasi yang telah ada.

4. Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pengembangan e-government

Dapat ditindak lanjuti dengan

1. Mengirim ASN untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
2. Membuat pelatihan kantor sendiri
3. Memperbanyak mengikuti pelatihan dan seminar seminar secara online.

5. Kurangnya sarana prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan publik serta statistik dan persandian

Dapat ditindak lanjuti dengan

1. Melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap

6. Belum optimalnya penerapan sertifikat digital untuk menjamin terjaganya keamanan administrasi pemerintahan

Dapat ditindak lanjuti dengan

1. Mengoptimalkan pelayanan serta sosialisasi ke OPD-OPD yang belum menerapkan sertifikat digital dengan mendatangi langsung OPD-OPD tersebut
2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana untuk pengamanan data.

7. Pengelolaan satu data pada Kab. Sijunjung

Dapat ditindak lanjuti dengan

1. Melanjutkan sosialisasi dan pembinaan ke nagari-nagari untuk pembentukan nagari statistik, kecamatan statistik hingga kabupaten statistik.
2. Membuat aplikasi untuk pengelolaan statistik.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam menyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu melihat dan menampung aspirasi baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kominfo yang biasanya dilakukan mulai dari tingkat Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu – isu strategis dari SKPD. Namun sampai sejauh ini usulan dan aspirasi yang masuk untuk Dinas Kominfo adalah terkait dengan Daerah Blank Spot yang tersebar di Nagari-Nagari. Maka sesuai dengan kewenangannya, Dinas Kominfo hanya dapat menampung dan menyampaikan usulan tersebut ke Pusat, melalui Bupati Sijunjung untuk permohonan penambahan jaringan telekomunikasi di Nagari-Nagari baik itu berbentuk pendirian tower dan sejenisnya yang memang merupakan kewenangan pemerintahanpusat

TABEL 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo
Tahun 2025 Triwulan II

No.	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Indikator Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran dan Target Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2025				Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun 2025 (yang belum tercapai)	
1	2	3	4		5				6	
			Fisik	Keuangan	Fisik	persentase (%)	Keuangan	persentase (%)	Fisik	Keuangan
1	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah**		**2,943,840,711**			**1,456,273,178**			**1,487,567,533**
1	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**		**6,916,500**			**6,916,500**			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2,487,000	1 laporan	100	2,487,000	100	-	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	4,429,500	4 laporan	66.7	4,429,500	100	2 laporan	-
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan**		**2,605,042,271**			**1,309,878,273**			**1,295,163,998**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 org	2,553,833,771	20 org	100	1,299,314,773	50.88	-	**1,254,518,998**
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 dokumen	15,738,000	372 Dokumen	74.4	6,569,000	41.74	128 dokumen	**9,169,000**
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 laporan	15,738,000			-	-	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	19,732,500	6 Laporan	46.2	3,994,500	20.2	7 laporan	**15,738,000**
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**		**71,758,045**		-	**38,999,560**	-	-	**32,758,485**
7	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	5,460,850	6 paket	85.7	1,409,300	25.8	1 paket	**4,051,550**
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2,350,000			-	-	1 paket	**2,350,000**
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	29,410,225	6 paket	100	12,441,125	42.30	-	**16,969,100**
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	2,052,080	1 paket	6.67	-		14 paket	**2,052,080**
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	32,484,890	30 laporan	100	25,149,135	77.42	-	**7,335,755**
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**197,763,895**			**74,354,832**			**123,409,063**
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	29,202,595	7 laporan	58.3	11,485,132	39.3	5 laporan	**17,717,463**
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	168,561,300	7 laporan	58.3	62,869,700	37.3	5 laporan	**105,691,600**
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**62,360,000**			**26,124,013**			**36,235,987**
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	10,000,000	1 unit	100	9,680,447	96.80	-	**319,553**
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	34,000,000	12 unit	92.3	10,908,566	32.1	-	**23,091,434**
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 unit	18,360,000	10 unit	47.6	5,535,000	30.1	-	**12,825,000**

2	**2**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan sop yang telah ditetapkan**		**319,329,030**			**93,014,588**			**226,314,442**
	6	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1. JUMLAH PEMBERITAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA 2. PERSENTASE ADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI 3. JUMLAH KERJASAMA PEMBERITAAN PEMDA DENGAN MEDIA 4. PERSENTASE PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG TERLAYANI 5. PERSENTASE PENINGKATAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**		**319,329,030**			**93,014,588**			**226,314,442**
	17	Penyusunan Konten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	15 konten	26,744,650	15 konten	100	3,578,238	13.38	-	**23,166,412**
	18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 media	217,313,060	5 media	100	62,078,450	28.57		**155,234,610**
	19	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 permohonan	23,749,950	0 permohonan	0	8,350,500	35.16	1 permohonan	**15,399,450**
	20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5 komunitas	21,484,800	3 komunitas	60	7,506,500	34.94	2 komunitas	**13,978,300**
	21	Relasi Media	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan kegiatan pemerintah	5 laporan	30,036,570	5 laporan	100	11,500,900	38.29	-	**18,535,670**
3	**3**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**1. PERSENTASE OPD YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO 2. PERSENTASE LAYANAN PUBLIC YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI**		**242,579,310**			**126,908,264**			**115,671,046**
	7	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN TERINTEGRASI SESUAI KEBUTUHAN**		**242,579,310**			**126,908,264**			**115,671,046**
	22	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 laporan	3,192,000	3 laporan	87,5	3,192,000	100	1 laporan	-
	23	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 dok	13,911,560	0 dok	0	148,250	1.07	1 dok	**13,763,310**
	24	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	85 aplikasi	68,103,000	82 aplikasi	96.47	65,650,064	96.40	3 aplikasi	**2,452,936**
	25	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	35 perangkat daerah	140,773,550	17 perangkat daerah	48.6	50,487,750	35.9	18 perangkat daerah	**90,285,800**
	26	Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dok	16,599,200	0 dok	0	7,430,200	44.76	1 dok	**9,169,000**
4	**URUSAN STATISTIK**										-
	4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**1. PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIC DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**53,921,800**			**21,966,600**			**31,955,200**
	8	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**1. PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL YANG BERKUALITAS 2. JUMLAH SDM PENGELOLA STATISTIK SEKTORAL YANG BERKUALITAS**		**53,921,800**			**21,966,600**			**31,955,200**
	27	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	jumlah dokumen Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dok	29,166,650	0 dok	0	13,274,350	45.51	4 dok	**15,892,300**
	28	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	97 org	24,755,150	0	0	8,692,250	35.11	97 org	**16,062,900**

5	**URUSAN PERSANDIAN**										**-**
	5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PERSANDIAN**		**21,989,300**			**3,676,000**			**18,313,300**
		9	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**PERSENTASE SISTEM INFORMASI YANG TELAH MENERAPKAN PERSANDIAN**		**21,989,300**			**3,676,000**			**18,313,300**
		29	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang di tetapkan	1 laporan	5,465,900	0 laporan	0	3,378,100	61.80	1 laporan	**2,087,800**
		30	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 dok	16,523,400	1 dok	0	297,900	1.80	1 dok	**16,225,500**
			Jumlah			**3,581,660,151**			**1,701,838,630**			**1,879,821,521**

Disusun oleh :
MUARO SIJUNJUNG, JULI 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

drg. EZWANDRA, M.Sc
NIP.19750615 200501 1 007

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

REncana kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIJUNJUNG

ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			Pagu Indikatif			KETERANGAN
						Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4,111,736,065**	**3,707,080,003**	**-399,590,062**	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**3,993,233,865**	**3,654,775,903**	**-333,391,962**	
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**						**3,194,922,801**	**2,894,362,063**	**-295,494,738**	
2	**16**	**1**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**13,434,500**	**6,916,500**	**(1,452,000)**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	-	3,985,000	-	(3,985,000)	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	-	-	-	-	
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	-	-	-	-	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	-	-	-	-	
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	-	-	-	-	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	-	3,280,500	2,487,000	793,500	

2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	-	6,169,000	4,429,500	1,739,500	
2	**16**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**2,624,585,771**	**2,592,820,623**	**(31,765,148)**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 org	20 org	-	2,553,833,771	2,577,022,623	23,188,852	
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	-	-	-	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2000 Dok	500 Dok		20,337,000	11,803,500	(8,533,500)	
2	16	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	12 dok	-	20,887,000	-	(20,887,000)	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok	-	-	-	-	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	-	29,528,000	3,994,500	(25,533,500)	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat**						**-**	**-**	**-**	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	-	-	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	-	-	

2	**16**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**147,489,830**	**71,758,045**	**(75,731,785)**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	-	6,068,500	5,460,850	(607,650)	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-	2,400,000	2,350,000	(50,000)	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	-	68,921,350	29,410,225	(39,511,125)	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	15 paket	-	5,130,200	2,052,080	(3,078,120)	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	30 laporan		64,969,780	32,484,890	(32,484,890)	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**-**	**-**	**-**	
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			-	-	-	-	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**279,174,350**	**160,506,895**	**-118,667,455**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pererintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				-	-	-	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pererintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan		71,551,750	29,202,595	(42,349,155)	
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pererintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	-	-	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pererintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan		207,622,600	131,304,300	(76,318,300)	

2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**130,238,350**	**62,360,000**	**(67,878,350)**	
8	**16**	**01**	**2.09**	01	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dijaga Kondisinya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit		30,518,350	10,000,000	(20,518,350)	
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dijaga Kondisinya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit		68,000,000	34,000,000	(34,000,000)	
2	16	01	2.03	03	Pemeliharaan Mabel	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dijaga Kondisinya	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	-	-	
2	16	01	2.03	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dijaga Kondisinya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69 unit	21 unit		31,720,000	18,360,000	(13,360,000)	
2	16	01	2.03	18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dijaga Kondisinya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				-	-	-	
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**419,942,214**	**273,055,530**	**-146,886,684**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**419,942,214**	**273,055,530**	**(146,886,684)**	
2	**16**	**02**	**2.01**	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	6 rekomendasi	-		-	-	-	
2	**16**	**02**	**2.01**	0023	Penyusunan Konten	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah Konten Informasi Publik	30 konten	15 konten		33,770,050	11,006,650	(22,763,400)	
2	**16**	**02**	**2.01**	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria	35 media	5 media		285,506,097	200,490,560	(85,015,537)	
2	**16**	**02**	**2.01**	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan		33,414,117	19,815,450	(13,598,667)	
2	**16**	**02**	**2.01**	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah Komunikasi Informasi yang aktif meneseminasi Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	44 komunitas	5 komunitas		33,013,550	18,375,300	(14,638,250)	
2	**16**	**02**	**2.01**	04	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				-	-	-	

2	**16**	**02**	**2.01**	0014	Relasi Media	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah aktivitas Relasi Media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi dewan pers dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media	15 Laporan	5 Laporan		34,238,400	23,367,570	(10,870,830)	
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**						**378,368,850**	**487,358,310**	**108,989,460**	
2	**16**	**03**	**2.02**		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						**378,368,850**	**487,358,310**	**108,989,460**	
2	16	01	**2.02**	'02	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Regulasi Penunjang SPBE Persentase layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik terintegrasi Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Persentase unit kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	47 Dok	1 Dok		27,635,200	12,664,700	(14,970,500)	
2	16	01	2.04	03	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Regulasi Penunjang SPBE Persentase layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik terintegrasi Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Persentase unit kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen keterhubungan Pusat Data Nasional	2 dok	1 dok		33,011,600	13,911,560	(19,100,040)	
2	16	02	2.01	07	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Regulasi Penunjang SPBE Persentase layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik terintegrasi Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Persentase unit kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	87 aplikasi	87 aplikasi		84,891,200	68,103,000	(16,788,200)	
2	16	02	2.01	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Ketersediaan Regulasi Penunjang SPBE Persentase layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik terintegrasi Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Persentase unit kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 dok			-	-	-	

2	16	02	2.01	10	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Persentase Ketersediaan Regulasi Penunjang SPBE Persentase layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik terintegrasi Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Persentase unit kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Laporan hasil fasilitas Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4 laporan	4 laporan		13,476,000	3,192,000	(10,284,000)	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Regulasi Penunjang SPBE Persentase layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik terintegrasi Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Persentase unit kerja Pemerintah Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 unit	35 unit		219,354,850	389,487,050	170,132,200	
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**86,536,600**	**46,052,800**	**-40,483,800**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							**86,536,600**	**46,052,800**	**-40,483,800**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**86,536,600**	**46,052,800**	**(40,483,800)**	
2	**20**	**02**	2.01	01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 dok	4 dok		47,118,550	25,232,150	(21,886,400)	
1q					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan di bidang statistik	90 orang	97 orang		39,418,050	20,820,650	(18,597,400)	

2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**31,965,600**	**6,251,300**	**-25,714,300**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**31,965,600**	**6,251,300**	**-25,714,300**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**31,965,600**	**6,251,300**	**(25,714,300)**	
2	21	02	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang di tetapkan	1 dok	1 dok		17,418,300	785,400	(16,632,900)	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	-	14,547,300	5,465,900	(9,081,400)	

Disusun oleh :
MUARO SIJUNJUNG, JULI 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

drg. EZWANDRA, M.Sc
NIP.19750615 200501 1 007

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.

Selain sebagai bahan lanjutan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja Perubahan tahun 2025 juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan lanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi

seluruh jajaran Kabupaten Sijunjung. Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pemangku kepentingan dan Pengelola Program dan Kegiatan di Kabupaten Sijunjung yang bertujuan untuk memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Muaro Sijunjung, JULI 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drg. EZWANDRA, M.Sc

NIP. 19750615 200501 1 007

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIJUNJUNG
2025

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, evaluasi, analisa kinerja pelayanan, serta penelaahan usulan program/kegiatan serta pendanaan terhadap program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini mempedomani kepada sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ke-lima Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Sebagai komitmen dalam proses pencapaian Indikator, target kinerja di Tahun 2025 hendaknya Rancangan Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam penetapan Program/Kegiatan yang akan dituangkan ke dalam penetapan DPA Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sehingga diharapkan tugas pokok dan fungsi serta indikator dan target kinerja bisa dicapai sebagaimana mestinya. Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pangan dan Perikanan, kami berharap tujuan, sasaran, capaian kinerja serta target kinerja yang telah ditargetkan di Tahun 2025 dapat tercapai.

Muaro Sijunjung, Oktober 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

ADRI, S.Pt

NIP. 19710712 199403 1004

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR..... i

DAFTARISI..... ii

BABI. PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATARBELAKANG 1

1.2 LANDASANHUKUM 1

1.3 MAKSUDDANTUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKAPENULISAN..... 4

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN2024..... 5

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN DAN CAPAIANRENSTRASKPD 5

2.2 ANALISIS KINERJAPELAYANAN DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 17

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DANFUNGSI SKPD 26

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD 37

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 46

BABIII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....

3.2 TUJUAN DANSASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 53

BABIV PENUTUP 67

4.1.CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA 67

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 68

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT 69

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Sampai Triwulan IV Tahun 2025..... 8

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung..... 10

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2025 21

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Peerikanan Kabupaten Sijunjung 25

Tabel2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung 30

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung 40

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu.

Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang nagari dan kecamatan.

Penyusunan Rencana Perubahan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Kegiatan penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025, dengan tujuan antara lain :

a. Meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Pangan dan Perikanan dalam menghasilkan produk perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur, serta aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten/kota, dan pusat) dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan (Pusat dan Propinsi Sumatera Barat).
b. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan tahun-tahun sebelumnya.
c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025.

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada RPJMD ke-lima (2021–2025). Dokumen berpedoman pada Peraturan Daerah Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005–2025.

1.1.3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD. Penyusunan rancangan rencana kerja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Pangan dan Perikanan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan. Rancangan Renja merupakan penyempurnaan dari Rancangan awal Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapppeda Kabupaten Sijunjung untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 dilakukan dengan melandaskan pada sejumlah aturan perundangan, antara lain:

1. KEPPRES Nomor 132 tahun 2001 tentang ”Dewan Ketahanan Pangan”.
2. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Berbasis Sumberdaya Lokal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 51 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pangan dan Perikanan;
8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 39 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Sijunjung ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah Menetapkan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 menyesuaikan kondisi dan keadaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuan: Sebagai pedoman Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025.

Oleh karena itu maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan Dokumen Rencana Teknis Tahun 2025, sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur Tahun 2025.

2. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Perikanan secara terukur.
3. Menetapkan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingindicapai.
4. Mengantisipasi perubahan lingkungan global yang terjadi begitu cepat seperti perkembangan teknologi dan informasi, sementara sumber daya yang tersedia begitu terbatas. Dengan adanya rencana strategis, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan kondisi perubahan yangterjadi.
5. Memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yangtersedia.
6. Mengetahui orientasi organisasi di masa yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
2. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan serta LKjIP/LAKIP dan masukan bagi penyusunan LKjIP Bupati Kabupaten Sijunjung

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Perubahan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 0PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan ll tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pangan dan Perikanan

Secara umum Dinas Pangan Pangan dan Perikanan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab instansi. Pada tahun 2025 pengukuran kinerja yang dilakukan pada tiga sasaran dengan menggunakan 4 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025.

Pada tahun 2025 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung menjalankan 8 Program, 19 Kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp.4.135.262.292. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Uraian Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten SijunjungTahun 2025

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
1	**BELANJA OPERASI**	**4.135.262.292**
	- Belanja Pegawai	3.092.909.759
	- Belanja Barang dan Jasa	1.042.352.533
	- Belanja Hibah	
2	**BELANJA MODAL**	**0**
	Belanja Modal Peralatan dan - Mesin	0
	Belanja Modal Gedung dan - Bangunan	0
	- **JUMLAH BELANJA**	**Rp. 4.135.262.292**

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN
DAN PERIKANAN KAB. SIJUNJUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN							**4.687.423.668,00**	**4.603.966.574,00**	**4.135.262.292,00**	**-552.161.376,00**							**6.016.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.105.755.768,00**	**4.062.176.504,00**	**3.737.077.277,00**	**-368.678.491,00**							**5.232.500.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**4.105.755.768,00**	**4.062.176.504,00**	**3.737.077.277,00**	**-368.678.491,00**							**5.232.500.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi akutabilitas kinerja**				**76.5 nilai**	**76.5 nilai**	**3.565.290.912,00**	**3.657.771.304,00**	**3.455.571.377,00**	**847.709.088,00**							**4.413.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penggunggaran*				100 %	100 %	60.512.150,00	74.445.910,00	46.724.250,00	-13.787.900,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan Kab Sijunjung		75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	31.080.250,00	35.932.500,00	22.017.750,00	-9.062.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	29.431.900,00	38.513.410,00	24.706.500,00	-4.725.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase SPJ dengan administrasi lengkap sesuai aturan*				100 %	100 %	2.976.480.372,00	3.167.315.172,00	3.145.150.009,00	168.669.637,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan Kab Sijunjung		3.757.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.932.445.975,00	3.125.008.935,00	3.125.009.759,00	192.563.784,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			3.700.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.160.150,00	28.504.500,00	16.169.250,00	-13.990.900,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			32.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	13.874.247,00	13.801.737,00	3.971.000,00	-9.903.247,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan aset Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	7.500.000,00	6.597.500,00	2.881.000,00	-4.619.000,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan Kab Sijunjung		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	6.597.500,00	2.881.000,00	-4.619.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi P- 1. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan tekonologi Informasi			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*				100 %	100 %	223.428.390,00	170.592.450,00	62.478.630,00	-160.949.760,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan Kab Sijunjung		267.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.773.000,00	3.774.400,00	1.885.300,00	-1.887.700,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	43.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-43.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			66.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.600.000,00	7.590.300,00	3.795.200,00	-3.804.800,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				18.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	34.430.150,00	24.938.500,00	10.124.900,00	-24.305.250,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.003.963,00	10.016.200,00	4.004.000,00	-5.999.963,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.158.000,00	5.161.900,00	2.037.600,00	-3.120.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	119.463.277,00	77.111.150,00	40.631.630,00	-78.831.647,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				125.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*				100 %	100 %	138.400.000,00	100.100.272,00	99.277.488,00	-39.122.512,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan Kab Sijunjung		129.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.400.000,00	15.000.272,00	14.177.488,00	-17.222.512,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				34.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	107.000.000,00	85.100.000,00	85.100.000,00	-21.900.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				95.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase aset OPD dalam keadaan baik* *Persentase terlaksananya pemeliharaan barang dan aset*				100 %	100 %	138.970.000,00	127.720.000,00	99.060.000,00	-39.910.000,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan Kab Sijunjung		145.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	105.000.000,00	93.750.000,00	73.500.000,00	-31.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				110.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.970.000,00	8.970.000,00	5.560.000,00	-3.410.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH Konsumsi** **Skor PPH ketersediaan pangan**				**85** **86.7 nilai** **nilai**	**85,5** **85 nilai** **nilai**	**182.771.700,00**	**164.805.200,00**	**110.309.530,00**	**228.228.300,00**							**411.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase Penurunan Nagari Rentan Pangan*				2 %	2 %	71.344.200,00	67.558.000,00	46.075.830,00	-25.268.370,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	12 Laporan	20.763.450,00	19.976.800,00	15.910.500,00	-4.852.950,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	12 laporan	13.900.000,00	12.629.200,00	5.764.680,00	-8.135.320,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				14.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				2 Unit	12 Unit	24.945.150,00	24.082.200,00	19.481.900,00	-5.463.250,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.735.600,00	10.869.800,00	4.918.750,00	-6.816.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				12.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Angka konsumsi pangan per kapita per tahun*				2150 kg/kap/th	2.100 Kkal/ Kapita/thn	111.427.500,00	97.247.200,00	64.233.700,00	-47.193.800,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		345.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	6.879.850,00	3.347.050,00	-8.652.950,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				160.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	79.167.500,00	70.895.000,00	44.224.150,00	-34.943.350,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				160.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	20.260.000,00	19.472.350,00	16.662.500,00	-3.597.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan				25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penurunan Nagari Rentan Pangan yang di intervensi**				**10 undefined undefined**	**60 %**	**240.984.756,00**	**137.467.250,00**	**111.914.620,00**	**47.015.244,00**							**288.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah dokumen kerentanan dan kerawanan pangan*				3 dokumen	1 dokumen	8.134.550,00	7.874.550,00	4.610.500,00	-3.524.050,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat di Nagari Rentan pangan		9.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.134.550,00	7.874.550,00	4.610.500,00	-3.524.050,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			9.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah penanganan kerawanan pangan*				20 Kejadian	15 Kejadian	232.850.206,00	129.592.700,00	107.304.120,00	-125.546.086,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		279.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	213.919.156,00	112.080.000,00	100.541.820,00	-113.377.336,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			260.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	12 Laporan	18.931.050,00	17.512.700,00	6.762.300,00	-12.168.750,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			19.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu & keamanan pangan**				**85 %**	**85 %**	**116.708.400,00**	**102.132.750,00**	**59.281.750,00**	**3.791.600,00**							**120.500.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penurunan kasus penggunaan zat terlarang pada pangan asal tumbuhan*				7 %	0,2 %	116.708.400,00	102.132.750,00	59.281.750,00	-57.426.650,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		120.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20 Dokumen	47.738.800,00	59.338.000,00	35.556.250,00	-12.182.550,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	13.594.750,00	5.525.500,00	-9.474.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			15.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 Dokumen Dokumen	3 Dokumen	53.969.600,00	29.200.000,00	18.200.000,00	-35.769.600,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**581.667.900,00**	**541.790.070,00**	**398.185.015,00**	**-183.482.885,00**							**783.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**581.667.900,00**	**541.790.070,00**	**398.185.015,00**	**-183.482.885,00**							**783.500.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)**				**24 24 Ton**	**185 Ton**	**83.750.000,00**	**50.854.480,00**	**35.266.500,00**	**13.250.000,00**							**97.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Data dan Informasi dan Informasi Sumber Daya ikan di perairan*				1 Dokumen	1 Dokumen	83.750.000,00	50.854.480,00	35.266.500,00	-48.483.500,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		97.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000,00	7.941.180,00	3.590.300,00	-5.159.700,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			12.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	42.913.300,00	31.676.200,00	-43.323.800,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			85.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)**				**313 338 Ton**	**338 Ton**	**365.237.500,00**	**364.541.605,00**	**285.107.615,00**	**133.262.500,00**							**498.500.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah produksi benih ikan*				2500000 ekor	4.000.000 ekor	33.738.000,00	48.737.900,00	24.802.160,00	-8.935.840,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		45.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	8 Kelompok	23.738.000,00	23.737.970,00	14.166.688,00	-9.571.312,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			32.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 Kelompok	8 Kelompok	10.000.000,00	24.999.930,00	10.635.472,00	635.472,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			13.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Pembudidaya Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang dibina dan difasilitasi*				5 Pokdakan	5 Pokdakan	331.499.500,00	315.803.705,00	260.305.455,00	-71.194.045,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		453.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	25.259.700,00	5.816.800,00	-683.200,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	86.700.000,00	86.006.825,00	76.657.475,00	-10.042.525,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			90.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				10 Dokumen	1 Dokumen	25.738.000,00	23.611.680,00	9.028.700,00	-16.709.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	184.561.500,00	164.506.800,00	161.261.500,00	-23.300.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			312.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				4 Unit	10 Unit	28.000.000,00	16.418.700,00	7.540.980,00	-20.459.020,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Potensi Perikanan yang diawasi**				**100 %**	**10 %**	**10.000.000,00**	**9.009.170,00**	**4.067.700,00**	**25.000.000,00**							**35.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah potensi Perikanan yang diawasi*				18 Kelompok	5 Kelompok	10.000.000,00	9.009.170,00	4.067.700,00	-5.932.300,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				18 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	10.000.000,00	9.009.170,00	4.067.700,00	-5.932.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Pendapatan pelaku usaha perikanan (Rp juta/thn) Persentase peningkatan Omset pelaku usaha Perikanan**				**12800 Rupiah**	**13.230.000 5 Rupiah %**	**122.680.400,00**	**117.384.815,00**	**73.743.200,00**	**30.319.600,00**							**153.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Data Produksi dan Informasi Pasar Jumlah Pelaku Usaha yang aktif, terdata dan terdaftar*				5 Orang	1 Dokumen 50 orang	10.000.000,00	9.081.000,00	5.694.500,00	-4.305.500,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		13.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.081.000,00	5.694.500,00	-4.305.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			13.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah pelaksanaan pembinaan SKP (standar kelayakan pengolahan) olahan ikan*				2 dokumen	2 dokumen 2 Produk	10.000.000,00	9.099.200,00	5.670.100,00	-4.329.900,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	10.000.000,00	9.099.200,00	5.670.100,00	-4.329.900,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah ketersediaan dan pemberian Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan Jumlah Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan*				1 Paket	1 Paket 2 Paket	102.680.400,00	99.204.615,00	62.378.600,00	-40.301.800,00			-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,7 Ton	0,5 Ton	82.680.400,00	80.130.200,00	48.529.600,00	-34.150.800,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			90.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				50 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	20.000.000,00	19.074.415,00	13.849.000,00	-6.151.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan P- 3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								**4.687.423.668,00**	**4.603.966.574,00**	**4.135.262.292,00**	**-552.161.376,00**							**6.016.000.000,00**	

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja kondisi keuangan sampai dengan 30 Agustus 2025 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Daftar Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Capaian/Realisasi s/d Agustus 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.455.571.377	2.095.746.317	60,65
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.724.250	14.544.921	31,13
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.017.750	12.733.500	57,83
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.706.500	1.811.421	7,33
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.145.150.009	1.916.578.105	60,94
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.125.009.759	1.915.946.805	61,31
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verivikasi keuangan SKPD	16.169.250	0	0,00
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuagan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	3.971.000	631.300	15,90
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.881.000	1.982.850	68,83
1.3.1	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2.881.000	1.982.850	68,83
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.478.630	33.556.750	53,71
1.5.1	Penyediaan Komponen Inflasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.885.300	1.359.000	72,08
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.795.200	1.680.110	44,27
1.5.4	Penyediaan Bahan logistik kantor	10.124.900	7.518.690	74,26
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.004.000	1.860.000	46,45
1.5.6	Fasilitasi kunjungan tamu	2.037.600	2.028.600	99,56
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.631.630	19.110.350	47,03
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.277.488	57.970.391	58,39
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	14.177.488	10.050.391	70,89
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.100.000	47.920.000	56,31
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.060.000	71.113.300	71,79
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	17.594.500	87,97
1.7.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	73.500.000	52.393.800	71,28
1.7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.560.000	1.125.000	20,23
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	110.309.530	56.452.210	51,18
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	46.075.830	13.110.900	28,46

	Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2.1.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	15.910.500	8.749.000	54,99
2.1.2	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	5.764.680	1.754.800	30,44
2.1.3	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	19.481.900	2.211.100	11,35
2.1.4	Penyusunan Neraca Bahan makanan (NBM)	4.918.750	396.000	8,05
2.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	64.233.700	43.341.310	67,47
2.2.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	3.347.050	2.155.860	64,41
2.2.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	44.224.150	32.333.150	73,11
2.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	16.662.500	8.852.300	53,13
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	111.914.620	7.238.400	6,47
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	4.610.500	416.000	9,02
3.1.1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4.610.500	416.000	9,02
3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	107.304.120	6.822.400	6,36
3.2.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan ang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.541.820	3.760.600	3,74
3.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	6.762.300	3.061.800	45,28
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	59.281.750	37.404.010	63,10
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	59.281.750	37.404.010	63,10
4.1.1	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	35.556.250	20.515.310	57,70
4.1.2	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5.525.500	2.238.700	40,52
4.1.3	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	18.200.000	14.650.000	80,49
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.266.500	5.304.400	15,04
5.1	Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota	35.266.500	5.304.400	15,04
5.1.1	Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	3.590.300	1.182.000	32,92
5.1.2	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	31.676.200	4.122.400	13,01
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	285.107.615	144.321.522	50,62
6.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	24.802.160	15.100.517	60,88
6.1.1	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	14.166.688	9.107.094	64,29

6.1.2	Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10.635.472	5.993.423	56,35
6.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	260.305.455	129.221.005	49,64
6.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.816.800	2.398.639	41,24
6.2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.657.475	47.102.100	61,44
6.2.3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.028.700	1.613.600	17,87
6.2.4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161.261.500	74.524.000	46,21
6.2.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	7.540.980	3.582.666	47,51
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.067.700	1.562.650	38,42
7.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	4.067.700	1.562.650	38,42
7.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4.067.700	1.562.650	38,42
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	73.743.200	65.892.300	89,35
8.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.694.500	1.576.100	27,68
8.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.694.500	1.576.100	27,68
8.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.670.100	1.937.600	34,17
8.2.1	Pembinaan terhadap penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.670.100	1.937.600	34,17
8.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	62.378.600	62.378.600	100,00
8.3.1	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	48.529.600,00	21.882.050,00	45,09
8.3.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.849.000	12.306.300	88,86
	Total	4.135.262.292	2.413.921.809	58,37

Dari tabel diatas ini dapat dilihat bahwa Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung pada Triwulan I dan Prognosis Trwiulan II sampai dengan bulan Agustus tahun 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.135.262.292,- Realisasi Keuangan sampai 30 Agustus 2025 sebesar Rp.2.413.921.809,- atau sebesar 58,37%.

Proses penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 sudah berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2021–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan Akhir rencana kerja pemerintah daerah (Ranwal RKPD) tahun 2025, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PAPERI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dengan realisasinya.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Pangan dan Perikanan. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil dan indikator keluaran yang merupakan indikator mikro dalam pencapaian sasaran.

Pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Berdasarkan penetapan Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dengan 3 (tiga) indikator, sasaran/target sebagai tolak ukur dalam hal pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Skor PPH Konsumsi
2. Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 1 Meningkatnya keberagaman konsumsi pangan

Berpedoman pada sasaran WKNPG 2012 target konsumsi energi adalah sebesar 2150 kkal/kap/hari. Pada tahun 2024 tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Sijunjung sebesar 2.077 kkal/kap/hari atau capaian sebesar 85,5%.

Sasaran meningkatnya keberagaman konsumsi pangan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, yaitu skor Pola Pangan Harapan konsumsi. Untuk skor pola pangan harapan jika dibandingkan dengan target 2023 mempunyai tingkat capaian 92,6%. Turun 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir Renstra mencapai 85,5%.

Beberapa aksi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja sasaran meningkatnya keberagaman konsumsi pangan antara lain adalah:

1. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini berupa pemantauan harga pangan pada tingkat produsen, pedagang dan konsumen serta analisis harga pangan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung setiap minggu pada tahun 2025. Serta pelaksanaan pembinaan/pengawalan kepada

kelompok tani dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan memberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok terutama dalam memperkuat permodalan dan mengembangkan sarana dan prasarana lembaga distribusi pangan masyarakat.

Output dari kegiatan ini menghasilkan dokumen data tentang laporan dan analisis harga pangan sebanyak 10 unit, data distribusi dan harga pangan masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.481.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.211.100- atau 11,35%.

2. Pengembangan Ketersediaan Pangan

Kegiatan ini berupa penyusunan kebijakan perencanaan pangan untuk mengukur ketersediaan energi masyarakat yang ditetapkan secara detil sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kap/hari dan melakukan penyusunan buku Neraca Bahan Makanan (NBM) sebanyak 15 buku serta pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah yang bekerjasama dengan Perum Bulog Subdivre Solok yang penyalurannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sijunjung No. ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan tujuan kegiatan untuk mengantisipasi gejolak/stabilitas harga pangan, kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan bencana sosial. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.233.700,- dan terealisasi sebesar Rp 43.341.310,- atau 67,47%.

3. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kegiatan ini berupa pembinaan 5 kelompok penerima Program Desa Mandiri Pangan dan Kelompok Penerima Kegiatan Nagari Mandiri Pangan serta Kegiatan ini berupa rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.304.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.822.400,- atau 6,36%.

4. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Kegiatan ini berupa Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan lokal, Pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan lokal, Pelaksanaan pembinaan pangan lokal, Pelaksanaan event promosi dan pasar kuliner. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.309.530,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.452.210,- atau 51,18%.

5. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Kegiatan ini berupa pelaksanaan Pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui P2L, Pelaksanaan event/promosi/kampanye makan buah dan sayur, Pembinaa pemanfaatan pekarangan, penyaluran benih sayuran, penyaluran bibit jahe merah dan kunyit serta sarana lainnya serta pembinaan pemanfataan pekarangan pangan lestari (P2L), dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.789.697,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.264.800,- atau 99,43%.

6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini berupa Pembinaan/sosialisasi/event promosi pangan segar yang aman di konsumsi. Pelaksanaan pengawasan/pemantauan terhadap pangan segar, pelaksanaan uji labor

terhadap pangan segar yang aman di konsumsi berupa uji sampel pangan masyarakat yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini untuk menjawab keresahan masyarakat saat ini ditengah maraknya pengguna bahan makanan berbahaya, sehingga dapat memantau keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat dan yang sehat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.281.750- dan terealisasi sebesar Rp. 37.404.010,- atau 63,10%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dinas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga kecukupan pangan utama tidak dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

a. Masih rendahnya konsumsi pangan lokal, terutama umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah yang tercermin pada pencapaian skor pola pangan harapan;
b. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman);
c. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan masyarakat, sebagaimana tercermin dari dari kurang aktifnya lumbung pangan dan LDPM/PUPM/TTI;
d. Adanya desa dengan KK miskin diatas 20% sehingga mendesak untuk ditangani;
e. Masih banyak beredarnya bahan pangan yang kurang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan seperti penggunaan bahan tambahan (pewarna, pengawet, pemutih) yang berbahaya, pangan tanpa tanggal kadaluwarsa, belum ada ijin PIRT.

Sasaran 2 Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan

Sasaran Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja Peningkatan Produksi Perikanan dan Pengolahan Ikan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase peningkatan jumlah produksi ikan dan persentase peningkatan pengolahan ikan. Produksi ikan pada tahun 2024 sebanyak 2.383,512 ton; lebih tinggi sebesar 3,89% jika dibanding tahun 2023 sebanyak 2.364,341 ton. Produksi perikanan terbesar adalah pada jenis ikan Nila yaitu sejumlah 137,600 ton; selebihnya berasal dari ikan mas, lele, dan patin. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 0,75% yaitu 78,4 %. Indikator ke 2 adalah peningkatan olahan ikan dengan target sebesar 2%. Pada tahun 2024 konsumsi ikan di Kabupaten Sijunjung sebesar 39,37kg/kapita/tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,28% jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan tingkat capaian sebesar 89,46% yang berarti baik. Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan dari dua indikator diatas jika dirata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 83,94% termasuk kategori sangat baik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung target kinerja tersebut antara lain:

Kegiatannya:

1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul / Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Kegiatan ini berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Unit perbenihan Rakyat (UPR)/Peralatan/Pakan dan Calon, Pembinaan Balai Benih Ikan/BBI dan UPR serta Fasilitasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.166.688,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.107.094,- atau 64,29%

2) Pembinaan Pengembangan Perikanan

Kegiatan ini berupa Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan, Fasilitasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), pengadaan Percontohan Budidaya Lele 5 paket dan nila 11 paket Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.540.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.582.666,- atau 47,51%

Daftar Kelompok Penerima Paket percontohan Budidaya Lele

No	Nama Kelompok	Alamat
1.	Pokdakan Lokuok Muyam Andalas	Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus
2.	Pokdakan Gantiang Serumpun	Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung
3.	Pokdakan Sorban Hijau	Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru
4.	Pokdakan Berkah Senja	Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru
5.	Pokdakan Talang Mina	Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru

Daftar Kelompok Penerima Paket percontohan Budidaya Nila

No	Nama Kelompok	Alamat
1.	Pokdakan Pincuran Galoga	Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok
2.	Pokdakan Suka Damai	Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok
3.	Pokdakan Angkatan Muda Terdidik	Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus
4.	Pokdakan Sawah Balai	Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus
5.	Pokdakan Batu Balang	Nagari Tanjung Labuoh Kecamatan Sumpur Kudus
6.	Pokdakan Palelawan Sakato	Nagari Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus
7.	Pokdakan Family Saiyo	Nagari Silantai Kecamatan Sumpur

		Kudus
8.	Pokdakan Talao Saiyo	Nagari Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus
9.	Pokdakan Bunga Karet	Nagari Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus
10.	Pokdakan Harapan Koto	Nagari Sumpur Kudus Selatan/Tamparungo Kecamatan Sumpur Kudus
11.	Pokdakan Sipuah	Nagari Tanjung Labuah Kecamatan Sumpur Kudus

3) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ikan

Kegiatan ini berupa penyediaan vitamin dan obat ikan, pengwasan peredaran obat dan pakan ikan, pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI), pelaksanaan uji kualitas air (UPR, Pokdakan dan BBI), pembinaan lubuk larangan, penumbuhan POKMASWAS perairan umum. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.028.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.613.600,- atau 17,87%

4) Operasional BBI Sumpur Kudus

Kegiatan ini berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk UPTD Balai Benih Ikan (BBI)/Peralatan/Pakan dan calon induk ikan rehab kolam dan saluran kolam, untuk menghasilkan benih ikan unggul (PAD), ikan konsumsi (PAD), calon induk ikan yang dihasilkan BBI untuk UPTD BBI Sumpur Kudus. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.21.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.524.000,- atau 46,21%.

5) Operasional BBI Latang Operasional BBI Latang

Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana untuk uptd balai benih ikan (BBI)/peralatan/pakan dan calon induk ikan, untuk menghasilkan Benih Ikan Unggul (PAD), ikan konsumsi (PAD), calon induk ikan yang dihasilkan BBI untuk UPTD BBI Latang. dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.657.475,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.102.100,- atau 61,44%

H. Peningkatan Pemasaran dan Agribisnis Perikanan

Capaian Program:

Peningkatan nilai tambah daya saing olahan ikan 30 %

Kegiatannya :

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Perikanan.

Kegiatan ini berupa pembinaan/fasilitasi bimbingan teknis pemasaran, pelaksanaan event/promosi produk perikanan, fasilitasi pemasaran produk olahan perikanan, pertemuan

penumbuhan kelompok. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.849.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.306.300– atau 88,86%.

2) Penguatan kelembagaan Poklahsar.

   Kegiatan ini berupa pelaksanaan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan ikan, fasilitasi kelompok yang menerapkan GMP dan SSOP, Pemberian kudapan olahan ikan pada murid TK/PAUD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.694.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.576.100,- atau 27,68%.

3) Pengembangan Agribisnis Perikanan.

   Kegiatan ini berupa pembinaan permodalan pelaku usaha perikanan, fasilitasi pembentukan kelembagaan FORIKAN tingkat nagari, pelaksanaan lomba GEMARIKAN. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.529.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.882.050,- atau 45,09%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dinas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Usaha budidaya perikanan hanya sebagai usaha sampingan, sehingga kontinuitas produksi tidak bisa stabil;
b. Kurangnya pengetahuan kelompok pembudidaya ikan terhadap budidaya ikan yang baik;
c. Masih kurangnya jenis dan kuantitas benih ikan di daerah;
d. Konsumsi ikan perkapita masih rendah jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota sekitar.

Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas

Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja Peningkatan Nilai akuntabilitas dinas, yaitu Nilai LAKIP dan prosentase realisasai keuangan Tahun 2020 sebanyak 70,50 realisasi sebesar 89,24% jika dibanding tahun 2019. Indikator ke 2 adalah Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan program / kegiatan dengan target sebesar 95%. Pada tahun 2020 sebesar 94,32 mengalami peningkatan sebesar 0,03% jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan tingkat capaian sebesar 99,28% yang berarti baik. Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas dari dua indikator diatas jika dirata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 94% termasuk kategori baik.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung target kinerja tersebut antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Capaian program :

   Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran dengan capaian 96,68%.

   Kegiatannya:

1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

   Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran berupa pengadaan ATK, Alat Listrik, Benda pos/materai, Alat Kebersihan, BBM, Pengadaan pakaian dinas, makan dan minum rapat, Perjalanan dinas dalam dan luar daearah pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.478.630,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.556.750 atau 53,71%.

2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

   Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, Honorarium pegawai honorer/THL, pengadaan surat kabar, plakat/cendramata pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.277.488,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.970.391,- atau 58,39%.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor .

Kegiatannya :

1) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

   Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, pelumas untuk 8 unit roda 4 dan 26 unit roda 2 kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan komputer/laptop 15 unit dan pengadaan 1 unit laptop pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.113.300,- atau 71,79%.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

   Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Berupa Berupa bimbingan/pelatihan teknis, workshop bagi ASN karena refocusing anggaran dirasionalkan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. - - dan terealisasi sebesar Rp. -,- atau -%.

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Capaian Program :

   Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

   Kegiatan ini berupa penyusunan LAKIP, LKPJ, pelaporan bulanan dan laporan lainnya. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ini meliputi belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja penjilidan dan belanja makan minum rapat serta perjalanan dinas dalam daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.881.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.982.850,- atau 68,83%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

A. Urusan Pangan

1. Pengaruh pangan sangat penting untuk menekan angka kemiskinan;
2. Keterjangkauan masih menjadi persoalan utama yang menghambat terwujudnya ketahanan pangan;
3. Lonjakan harga pangan memengaruhi pola konsumsi, sehingga meningkatkan risiko tidak terpenuhinya Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dapat berkontribusi terhadap tingginya risiko malnutrisi dan stunting.
4. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

   Ketahanan pangan pada tatanan nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal.

   Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada:

   1) Produksi dan kapasitas produksi pangan Kabupaten semakin terbatas,karena:
      - Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian;
      - Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
      - Tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
      - Masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penangananhasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
      - Tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
      - Terbatasnya dukungan permodalan dikelurahan;
      - Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
      - Masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani;

- Adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas;serta
- Masih terbatasnya manajemen kelembagaan petani.

1) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.
2) Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energy dan pakan ternak.
3) Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.
4) Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
5) Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
6) Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian.
7) Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
8) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh PemerintahDaerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Tabel 2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung

NO	RANCANGAN AWAL RKPD								RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN							
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				Persentase Skor Pola Pangan Harapan	%			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				Persentase Skor Pola Pangan Harapan	%		
		7 Penyediaaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasai Pasokan dan harga Pangan	12 Penyediaan Informasi Harga pangan dan Neraca Bahan Makanan		Frekuensi ketersediaan data dan informasi harga pangan	kali	56	50.000.000		7 Penyediaaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasai Pasokan dan harga Pangan	12 Penyediaan Informasi Harga pangan dan Neraca Bahan Makanan		Frekuensi ketersediaan data dan informasi harga pangan	kali	52	
			13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya		Frekuensi pelaksanaan pasar pangan murah	kali	13	50.000.000			13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya		Frekuensi pelaksanaan pasar pangan murah	kali	13	
			14 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pembentukan/ Pembinaan LDPM/PUPM	unit	8	100.000.000			14 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pembentukan/ Pembinaan LDPM/PUPM	unit	8	
			15 Pengembangan		Pembinaan pasar komoditi pangan	komoditi	3	25.000.000			15 Pengembangan Kelembagaan		Pembinaan pasar komoditi pangan	komoditi	3	

			Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Pembentukan/ Pembinaan lumbung pangan masyarakat (LPM)	unit	4	25.000.000			dan Jaringan Distribusi Pangan		Pembentukan/ Pembinaan lumbung pangan masyarakat (LPM)	unit	4	
					Ketersediaan data neraca bahan makanan (NBM)	buku	15						Ketersediaan data neraca bahan makanan (NBM)	buku	15	
					Penilaian Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	kategori	5						Penilaian Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	kategori	5	
					Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah/ Masyarakat	ton	28,70						Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah/ Masyarakat	ton	28.70	
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*			*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		8 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	16 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun		Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan lokal	dokumen	4	100.000.000		8 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	16 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun		Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan lokal	dokumen	4	
			17 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber daya lokal		Pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan lokal	Kali	2	500.000.000			17 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber daya lokal		Pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan lokal	Kali	2	
			18 Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per		Pelaksanaan pembinaan pangan lokal	kelompok	12	100.000.000			18 Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per		Pelaksanaan pembinaan pangan lokal	kelompok	36	
					Pelaksanaan event promosi	Kali	1						Pelaksanaan event promosi	Kali	4	

			Kapita Per Tahun		Pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL	kelompok	10				Kapita Per Tahun		Pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL	kelompok	50	
					Pelaksanaan event/promosi /kampanye makan buah dan sayur	kali	4						Pelaksanaan event/promosi /kampanye makan buah dan sayur	kali	8	
					Pembinaan pemanfaatan pekarangan	kelompok	10						Pembinaan pemanfaatan pekarangan	kelompok	80	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	9 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Penanganan Nagari Mandiri Pangan	Nagari	11	50.000.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	9 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Penanganan Nagari Mandiri Pangan	Nagari	11	

	2			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*				*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		10 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota		Penanganan Daerah Rawan Pangan Transien	kali	4	250.000.000		10 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota		Penanganan Daerah Rawan Pangan Transien	kali	3	250.000.000
					Ketersediaan data Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)/ FSVA	Bulan/buku	15	25.000.000					Ketersediaan data Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)/ FSVA	Bulan/buku	12	25.000.000
					Kebijakan Ketahanan/Kerawanan Pangan	Kali	1	25.000.000					Kebijakan Ketahanan/Kerawanan Pangan	Kali	1	25.000.000

	Program Pengawasan Keamanan Pangan	11 Pelaksanaan Pengawasan Kaeamanan Pangan segar daerah Kabupaten/ Kota	21 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daearah Kabupaten / Kota		Pembinaan/ sosialisasi /event promosi pangan segar yang aman di konsumsi	Kali	4	25.000.000	Program Pengawasan Keamanan Pangan	11 Pelaksanaan Pengawasan Kaeamanan Pangan segar daerah Kabupaten/ Kota	21 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daearah Kabupaten / Kota		Pembinaan/ sosialisasi /event promosi pangan segar yang aman di konsumsi	Kali	8	25.000.000
	S				Pelaksanaan Pengawasan/ pemantauan terhadap pangan segar	Kali	4	25.000.000					Pelaksanaan Pengawasan/ pemantauan terhadap pangan segar	Kali	8	25.000.000
					Pelaksanaan Uji labor terhadap pangan segar yang aman di konsumsi	sampel	5	50.000.000					Pelaksanaan Uji labor terhadap pangan segar yang aman di konsumsi	sampel	50	50.000.000
					Jumlah Produksi perikanan budidaya	ton							Jumlah Produksi perikanan budidaya	ton		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12 Pemberdayaan Pembudi daya ikan Kecil	22 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya		Pengadaan Peralatan penetasan BBI/UPR	paket	2	300.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12 Pemberdayaan Pembudi daya ikan Kecil	22 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya		Pengadaan Peralatan penetasan BBI/UPR	paket	30	300.000.000
					Pembangunan kolam induk ikan di BBI Aie Amo	paket	1						Pembangunan kolam induk ikan di BBI Aie Amo	paket	0	
			23 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan		Jumlah Pengadaan pakan untuk BBI/UPR	ton	30	300.000.000			23 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan		Jumlah Pengadaan pakan untuk BBI/UPR	ton	5	300.000.000
					Jumlah pengadaan Calon induk ikan BBI/UPR	Paket	10						Jumlah pengadaan Calon induk ikan BBI/UPR	Paket	30	

			Pelatihan		Jumlah pembinaan BBI dan UPR	unit	2				Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah pembinaan BBI dan UPR	unit	35	
		13 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	24 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 kabupaten/ kota		Produksi benih ikan unggul (PAD)	Ekor	953,535	250.000.000		13 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	24 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 kabupaten/ kota		Produksi benih ikan unggul (PAD)	Ekor	953,535	250.000.000
			25 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Kg	36,66667	500.000.000			25 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Kg	1,556	500.000.000
			26 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	ekor	5000	500.000.000			26 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	ekor	7,95	500.000.000
			27 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya dalam (satu) Kabupaten/ Kota		Penyediaan vitamin dan obat ikan	paket	1	150.000.000			27 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya dalam (satu) Kabupaten/ Kota		Penyediaan vitamin dan obat ikan	paket	1	150.000.000
					Frekuensi pengawasan peredaran obat dan pakan ikan	kali	2						Frekuensi pengawasan peredaran obat dan pakan ikan	kali	4	
					Pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI)	kelompok	4						Pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI)	kelompok	8	
					Pelaksanaan uji kualitas air (UPR, Pokdakan dan BBI)	kali	10						Pelaksanaan uji kualitas air (UPR, Pokdakan dan BBI)	kali	5	

			28	Pembinaan dan Pemantauan Pembudiyaan Ikan di darat		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Paket	5	2.300.000.000			28	Pembinaan dan Pemantauan Pembudiyaan Ikan di darat		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Paket	15	2.300.000.000
						Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Paket	5							Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Paket	30	
						Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Paket	12							Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Paket	10	
						Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Paket	5							Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Paket	25	
						Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Paket	30							Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Paket	15	
	Program Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan							5		Program Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
		14 Pengawasan sumber daya Perikanan di wilayah	29	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,		Pembinaan Lubuk Larangan	Unit	5	500.000.000		14 Pengawasan sumber daya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan	29	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,		Pembinaan Lubuk Larangan	Unit	30	500.000.000

			sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam kabupaten/ kota		Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota		Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Kelompok	9				air lainnya yang dapat di usahakan dalam kabupaten/ kota		Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota		Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Kelompok	30	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala mikro dan Kecil	30	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daearah Kabupaten/ Kota		Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	unit	2	100.000.000	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala mikro dan Kecil	30	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daearah Kabupaten/ Kota		Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	unit		100.000.000
							Pembinaan/ Fasilitasi bimbingan teknis pemasaran	Kali	5								Pembinaan/ Fasilitasi bimbingan teknis pemasaran	Kali	2	

					Pelaksanaan Event/promosi produk perikanan	Kali	4						Pelaksanaan Event/promosi produk perikanan	Kali	5	
					Fasilitasi pemasaran produk olahan perikanan	Paket	1						Fasilitasi pemasaran produk olahan perikanan	Paket	4	
					Pertemuan penumbuhan kelompok	kali	1						Pertemuan penumbuhan kelompok	kali	1	
		16 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	31 Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skal mikro dan kecil		Pelaksanaan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan ikan	Kali	1	100.000.000		16 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	31 Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skal mikro dan kecil		Pelaksanaan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan ikan	Kali	1	100.000.000
					Fasilitasi kelompok yang menerapkan GMP dan SSOP	Kali	2						Fasilitasi kelompok yang menerapkan GMP dan SSOP	Kali	1	
					Pemberian kudapan olahan ikan pada murid TK/PAUD	kali	2						Pemberian kudapan olahan ikan pada murid TK/PAUD	kali	2	
					Pelaksanaan tilik pembelajaran	kali	1						Pelaksanaan tilik pembelajaran	kali	2	
		17 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /	32 Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan Skala mikro dan kecil		Pembinaan Permodalan pelaku usaha perikanan	kali	1	300.000.000		17 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /	32 Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan Skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Kabupaten / kota Daerah		Pembinaan Permodalan pelaku usaha perikanan	kali	1	300.000.000
					Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan FORIKAN tingkat Nagari	Nagari	3						Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan FORIKAN tingkat Nagari	Nagari	1	

		kota	dalam 1 (satu) Kabupaten / kota Daerah		Pelaksanaan Lomba GEMARIKAN	kategori				kota			Pelaksanaan Lomba GEMARIKAN	kategori	3	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	15		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Monitoring	kegiatan	4	50.000.000		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Monitoring	kegiatan	19	50.000.000
			2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pelaksanaan Rapat Evaluasi	kali	15	150.000.000			2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pelaksanaan Rapat Evaluasi	kali	4	150.000.000
					Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan	kali	1						Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan	kali	2	
					Pelaksanaan Pembuatan laporan dinas	laporan	1						Pelaksanaan Pembuatan laporan dinas	laporan	5	
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah	paket	68						Perjalanan Dinas Dalam Daerah	paket	1	

		2	Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah aparatur	orang	68	3.800.000.000		2	Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah aparatur	orang	68	3.800.000.000
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya		Pengadaan Pakaian Daerah	stel	1	50.000.000		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Daerah	stel	68	50.000.000

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum pembangunan nasional yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
7. Mengembangkan dan meratakan pembangunan daerah adapun arah kebijakan Nasional di sektor koperasi secara rinci rencana kerja dan kegiatan sebagaimana RKPD tersebut diatas disajikan dalam lampiran tabel Ringkasan Kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025.

Visi yang ditetapkan merupakan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Visi dalam pembangunan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sijunjung merupakan arah cita-cita yang hendak dicapai dalam pembangunan Perikanan ke depan dalam kerangka meujudkan visi daerah. Adapun visi daerah adalah:

*"*BERKOLABORASI MEWUJUDKAN SIJUNJUNG INOVATIF, DAYA SAING DAN MANDIRI*"*

Visi tersebut akan memberikan arah dan fokus yang jelas bagi seluruh aparatur pemerintah daerah beserta stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di Kab. Sijunjung. Dalam upaya pencapaian visi daerah tersebut, pada prinsipnya seluruh OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah mendapatkan arah yang jelas yang akan diwujudkan 5 tahun yang akan datang (2025–2029).

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan visi tersebut diurai sebagai berikut;

1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital.
4. Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan.
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan.

Adapun misi yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pangan dan Perikanan yang menangani urusan pangan serta kelautan dan perikanan adalah misi 1 dan 3 dengan tujuan yaitu :

1) Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
2) Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat.

Guna pencapaian sasaran strategis, dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam pohon kinerja Dinas Pangan dan Perikanan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk mewujudkan tujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi juga mengarahkan pelayanan OPD dalam bentuk rencana program/kegiatan disertai dengan pengelolaan alokasi sumber daya, strategi & kebijakan, pendanaan indikatif, kelompok sasaran dan indikator kinerja.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Dan Perikanan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan

Sasaran

Sejalan dengan Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030, terdapat sasaran pembangunan yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan, yaitu :

1. Meningkatnya Pemenuhan keragaman konsumsi pangan.
2. Meningkatnya pendapatanpelaku usaha perikanan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan

Sebagaimana Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2030, tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut ;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2027

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE (000)					
						2022	2023	2024	2025	2026	2027
						1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya pemenuhan keragaman konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%						
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Jumlah pendapatan per tahun	Rp/Orang/ Tahun	10.800	11.000	11.800	12.000	12.800	13.000
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	67	70	73	76	79	79
				2. Prosentase capaian realisasi Fisik dan Keuangan program/ kegiatan	%	85	90	90	95	95	95

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2025, merupakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke–4 RPJMD Kabupaten Sijunjung. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiilki kabupaten Sijunjung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Sebagaimana Peraturan Meteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, tentang pelaksanaan program dan kegaitan pada Dinas Pangan dan Perikanan terbagi ke dalam 2 urusan, Urusan wajib Pangan dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Secara rinci rencana program dan Kegiatan sebagaiman RKPD tersebut diatas disajikan dalam lampiran tabel Ringkasan Kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 yang terdiri 8 Program, 19 kegiatan, dan 45 sub kegiatan sebagaimana berikut .

Tabel 5.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER ANGGARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
21	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**				**5.021.866.013**			**214.451.000**
	URUSAN PANGAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**4.135.315.639**			**139.451.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	**3.815.123.369**		100 %	**-**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 satuan	**39.973.900**		4 satuan	
				2 dokumen			2 dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	14.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	25.431.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	**3.467.474.508**		100 %	**-**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua	32 orang/bulan	3.441.827.306	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 orang/bulan	-

			Kelurahan					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Dokumen	22.179.202	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3000 Dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	3.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 dokumen	**4.384.900**		1 dokumen	**-**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4.384.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	**-**		100 %	**-**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59 Paket	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	**73.024.911**		100 %	**-**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3.473.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	-

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	5.978.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	34.430.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	9.209.411	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1.158.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	18.775.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**-**			**-**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**96.295.150**			**-**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	-

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	12.274.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	-
		Belangganan SIPKD		12 Bulan			0 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	84.021.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	-
		Jumlah pegawai THL yang dibayarkan honornya		5 orang			5 orang	
		Jumlah penyewaan tenda untuk pameran hari jadi		1 unit			1 unit	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**133.970.000**			**-**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara		25 unit	128.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	-
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		8 unit			25 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Laptop		8 Unit	5.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	-
		Jumlah Pemeliharaan Printer		2 Unit			2 Unit	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				**177.848.970**		82,50 %	**98.700.000**
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				**68.524.600**		2 kali	**98.700.000**
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	-

			Kelurahan					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20.763.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	-
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/ Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	11.580.400			22.700.000
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	24.945.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	41.000.000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.235.600			35.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				**109.324.370**			**-**
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	9.232.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	68.167.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan,	1 Laporan	31.924.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	-

			Semua Kelurahan					
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan		13 %	**27.065.600**		13 %	**40.751.000**
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan		3 jenis	**8.134.550**		3 jenis	**15.389.000**
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8.134.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.389.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peta kerentanan dan ketahan pangan		1 peta	**18.931.050**		1 peta	**25.362.000**
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		1 dokumen			1 dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	18.931.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25.362.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		85 %	**115.277.700**		85 %	**-**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan		5 komoditi	**115.277.700**		5 komoditi	**-**
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Sertifikat	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Sertifikat	-
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	72.106.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-

			Semua Kelurahan					
	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	43.171.700			-
	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**886.550.374**			**75.000.000**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		18 Ton/tahun	**174.000.000**		18Â Ton/tahun	**-**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pokmaswas yang dikelola		10 Pokmaswas	**174.000.000**		10 Pokmaswas	**-**
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		288 Ton/Tahun	**407.475.374**		288 Ton/Tahun	**75.000.000**

	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidag Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten/kota yang diterbitkan Jumlah Pembididaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan da Pendampingan/Kemitraa Usaha /kemudahan akse Iptek dan Informasi dan penguatan kelembagaan		2 dokumen	**33.738.000**		2 dokumen	**40.000.000**
		Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pemberdayaan		50 orang			50 orang	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kelompok	23.738.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kelompok	25.000.000
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kelompok	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kelompok	15.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar/air payau yang diproduksi		2600000 ekor	**373.737.374**		2600000 ekor	**35.000.000**
		Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan		20 orang			20 orang	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	86.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	-

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	244.299.374	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	-
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	25.738.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	30.000.000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 orang	-
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		0 Orang			0 Orang	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan lahan perikanan yang layak		5 %	**6.000.000**		5 %	**-**
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah lahan perikanan yang diawasi		10 nagari	**6.000.000**		10 nagari	**-**
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 Dokumen			1 Dokumen	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan		12400000 Rp/tahun	**299.075.000**		12400000 Rp/tahun	**-**
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		1 rekomendasi	**10.000.000**		1 rekomendasi	**-**
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		1 rekomendasi	**10.000.000**		1 rekomendasi	**-**
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Usaha	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit Usaha	-
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan		1 paket	**279.075.000**		1 paket	**-**
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ton	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Ton	-
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Pelaku Usaha	279.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Pelaku Usaha	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang Nagari, musrenbang Kecamatan sampai musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung bersama dengan DPRD, seyogyanya memperhatikan konsistensi antara Rancangan Renja tahun 2025 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Kabupaten Sijunjung tahun 2025.

Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar kabupaten, maka perlu di usulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang tahun 2025 yang akan di danai oleh APBD. Untuk itu Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap triwulan kepada Bupati melalui BAPPPEDA Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas dan Perikanan pada tahun 2025 diperlukan perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025 yang merupakan garis-garis besar sebagai acuan operasional pelaksanaan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan.

Akhirnya melalui Rancangan Rencana Kerja Perubahan ini kami berharap agar penyelenggaraan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung umumnya, terutama petani/pembudidaya ikan khususnya.

Muaro Sijunjung, Oktober 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

ADRI, S.Pt

NIP. 19710712 199403 1 004

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin- Nya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tahun 2025 ini merupakan pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan upaya Dinas untuk dapat menyajikan perencanaan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel untuk terwujudnya Good Governance menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada pada tahun berjalan. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan rencana kerja yang telah dibuat, semoga rencana kerja ini berguna bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **ii**

Daftar Isi ..... **iii**

Daftar Tabel ..... **iv**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 5

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 18

3.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 18

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Target Capaia n Tahun Anggaran 2025 .....

4.2 Program/ Kegiatan dan Rumusan Renja Tahun 2025 .....

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama 41

5.2 Indikator Kinerja Kunci 41

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025.....7
Tabel 4.1 : Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 25
Tabel 5.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 dan Target 2025 41
Tabel 5.2 : Capaian Indikator Kinerja Kunci 2024 dan Target 2025.....42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 360 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD).

Perubahan Renja merupakan dokumen yang memuat rencana kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun yang disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan prioritas pembangunan. Renja Perubahan berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih rinci untuk implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah ada. Renja Perubahan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika terjadi perubahan kondisi atau prioritas pembangunan yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, diantaranya penyesuaian dengan prioritas dan agenda pembangunan daerah 2025, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2025 serta penyesuaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD sampai dengan

prognosis Triwulan I-2025 serta beberapa asumsi lain yang mengharusnya adanya perubahan atas Rencana Kerja Dinas Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 memuat perubahan indikator kinerja, terget kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja PD didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan melalui APBD perubahan 2025 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026;
m. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026;
n. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
o. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tahun 2025 sebagai pedoman dalam rangka menyesuaikan perubahan dan penyesuaian program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD 2025 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

2. Tujuan
   a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan perencanaan Tahun 2025 yang akuntabel,

partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

b. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinas tahun anggaran 2025.
c. Memberikan arah yang jelas atas perubahan target kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tahun 2025
d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
BAB II Hasil Evaluasi Renja
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB V Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VI Penutup
LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja dari perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan dimaksud, Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang sedang berjalan dengan kondisi sampai dengan triwulan I. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja meliputi kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berjalan. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025, dengan memperhatikan sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD, konsisten dengan Rencana Strategis, mengacu kepada RKPD serta arah kebijakan pada tahun berjalan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diutamakan, masalah yang ada dan perlu diatasi serta tujuan dan sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ini menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas didasarkan pada penyesuaian Perubahan Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target Renstra-PD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Sampai dengan triwulan I penyerapan anggaran Dinas masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Pada triwulan I realisasi pelaksanaan anggaran baru mencapai angka 6,45% dari total pagu keseluruhan senilai Rp. 34.068.939.467,-. Rendahnya realisasi keuangan pada triwulan I disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang sebagian besar anggaran yang sudah dialokasikan pada DPA mengalami efisiensi lebih dari 50% dari total anggaran Dinas sehingga berdampak pada realisasi belanja Dinas pada Triwulan I 2025 ini.

Pada Tahun 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung mengampu 13 Program, 18 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dijabarkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP													34.068.939.467		2.197.911.683		6,45					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.406.037.992		1.461.516.199		4,81					
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							11.801.652.000		10.978.500		0,09					
1	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan penyediaan air bersih					71,02 %	5.381.090.000	0	7.044.000	0	0,13					
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase peningkatan distribusi air bersih					0,5 %	5.381.090.000	0	7.044.000	0	0,13					
	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					30 Orang	16.355.000	0	-	0	0,00					
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun					1 Dokumen	468.231.000	0	7.044.000	0	1,50					
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun					10 Liter/Detik	4.896.504.000	0	-	0	0,00					
2	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan sanitasi layak					57,8 %	732.617.800	0	-	0	0,00					
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketersediaan sanitasi layak dan aman					0,5 %	732.617.800	0	-	0	0,00					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar					26 Rumah Tangga	285.380.000	0	-	0	0,00					
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun					2 Dokumen	447.237.800	0	-	0	0,00					
3	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang terhubung					51,55 %	5.687.944.200	0	3.934.500	0	0,07					
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan saluran drainase yang dibangun					85 %	5.687.944.200	0	3.934.500	0	0,07					
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					300 M	5.492.047.500	0	-	0	0,00					
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun					1 Dokumen	195.896.700	0	3.934.500	0	2,01					
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							18.604.385.992		1.450.537.699		7,80					
4	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja					1,5 %	4.521.491.842	0	1.014.257.499	0	22,43					
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran					100 %	16.166.400	85%	-	85%	0,00					
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	16.166.400	2 dokumen	-	50%	0,00					
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu					100 %	3.220.957.557	75%	767.863.761	75%	23,84					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/bulan	3.214.934.357	27 org/3 bulan	767.863.761	80%	23,88					
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	6.023.200	0	-	0	0,00					
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi					100 %	248.433.175	65%	43.884.386	65%	17,66					
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12.011.800	1 paket	1.281.100	8,3%	10,67					
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5.795.600	1 paket	5.340.541	100%	92,15					
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	35.526.750	2 paket	6.388.000	16,6%	17,98					
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	20.630.400	1 paket	675.000	8,3%	3,27					
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	6.024.000	1 dokumen	1.280.000	8,3%	21,25					
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	21.757.300	2 bulan	2.963.775	16,6%	13,62					
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	146.687.325	2 Laporan	25.955.970	16,6%	17,69					
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi					85 %	536.018.410	60%	96.754.068	70,5%	18,05					
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	264.230.010	3 bulan	43.758.702	25%	16,56					
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12.164.400	3 laporan	2.421.300	25%	19,90					
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	259.624.000	2 laporan	50.574.066	16,6%	19,48					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset PD dalam keadaan baik					100 %	499.916.300	80%	105.755.284	80%	21,15					
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	32.556.300	1	12.418.829	100%	38,15					
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					55 Unit	400.500.000	8 unit	82.703.886	14,5%	20,65					
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	31.220.000	2 unit	3.957.973	8%	12,68					
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					88 Unit	35.640.000	4 unit	6.674.596	4,5%	18,73					
5	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Penyediaan infrastruktur Pada Perumahan dan Permukiman					75 %	210.491.050	0	-	0	0,00					
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni					100 %	16.971.050	0	-	0	0,00					
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					1 Dokumen	16.971.050	0	-	0	0,00					
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni					100 %	193.520.000	0	-	0	0,00					
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					3 Unit Rumah	193.520.000	0	-	0	0,00					
6	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penyediaan infrastruktur Pada Perumahan dan Permukiman					92%	311.618.400	0	-	0	0,00					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pesentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni					0,90%	311.618.400	0	-	0	0,00					
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					8 Unit Rumah	257.320.000	0	-	0	0,00					
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					3 Laporan	54.298.400	0	-	0	0,00					
7	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan infrastruktur Pada Perumahan dan Permukiman					92%	13.560.784.700	0	436.280.200	0	3,22					
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang dikelola					2 %	13.560.784.700	0	436.280.200	0	3,22					
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian					10 Lokasi	13.537.741.700	0	436.280.200	0	3,22					
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					3 Laporan	23.043.000	0	-	0	0,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.662.901.475		736.395.484		20,10					
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							3.662.901.475		736.395.484		20,10					
8	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen lingkungan hidup					75 %	267.564.250	0	6.015.500	0	2,25					
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun					75 %	267.564.250	0	6.015.500	0	2,25					
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	267.564.250	0	6.015.500	0	2,25					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
9	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium yang Disusun Persentase peningkatan kemitraan lingkungan					20 % 7 %	162.623.740	0	16.608.690	0	10,21					
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dibina Persentase peningkatan dokumen mutu yang disusun					20 % 7 %	162.623.740	0	16.608.690	0	10,21					
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					1 Dokumen	29.334.250	0	4.342.690	0	14,80					
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)					8 Lokasi	46.385.240	0	1.662.500	0	3,58					
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun					1 Dokumen	25.875.550	0	-	0	0,00					
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan					1 Dokumen	61.028.700		10.603.500	0	17,37					
10	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan kualitas ruang terbuka hijau					5%	79.873.650	0	7.956.500	0	9,96					
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas ruang terbuka hijau yang dikelola					1,7 Ha	79.873.650	1,7 ha	7.956.500	50%	9,96					
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					1.7 Ha	79.873.650	1,7 ha	7.956.500	50%	9,96					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
12	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi dan mematuhi unsur-unsur izin lingkungan					80 %	36.297.600	60%	4.440.276	75%	12,23					
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin dalam pengelolaan LH					80 %	36.297.600	15%	4.440.276	18,7%	12,23					
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					1 Dokumen	13.753.100	0	3.042.776	0	22,12					
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					20 Badan Usaha	22.544.500	0	1.397.500	0	6,20					
13	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan					1,60%	97.732.320		3.934.500	0	4,03					
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dibina					9,80%	97.732.320	0,20%	3.934.500	0	4,03					
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					10 Dokumen	97.732.320	1 Dokumen	3.934.500	10%	4,03					
15	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terkelola					44,50%	3.018.809.915	5,80%	697.440.018	13%	23,10					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Tw I 2025 (%)		Ket
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 *100%		10 = 6+8		11 = 10/5 *100%		12
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi Persentase Sampah Yang Ditangani					22,50 % 23,00 %	3.018.809.915	0% 5,7%	697.440.018	18%	23,10					
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					1 Kelompok	13.701.540	0	-	0	0,00					
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan					8000 Ton	2.971.018.450	0	693.505.518	0	23,34					
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah					2 Laporan	34.089.925	0	3.934.500	0	11,54					

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I 2025 diatas, Sebagian besar belum terlihat progress capaian kinerja sebagai akibat dari efisiensi anggaran 2025. Oleh karena itu melalui Perubahan Renja tahun 2025 ini kembali disesuaikan target kinerja sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Evaluasi renja diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan perubahan rencana kerja Dinas Perkim-LH pada Tahun Anggaran 2025 sehingga kinerja dinas dapat secara signifikan mendorong tercapainya target pembangunan daerah pada tahun 2025. Rencana kerja perubahan Dinas Tahun 2025 ini disusun sejalan dengan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten sijunjung tahun 2025. Dalam rangka menyesuaikan target kinerja tahun 2025 ini perlu dilakukan kajian yang sistematis dan mendalam serta perubahan pendanaan sesuai dengan potensi-potensi yang berorientasikan kepada hasil dengan memaksimalkan penganggaran berdasarkan ketersediaan anggaran pada APBD-P tahun 2025.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan, kawasan permukiman serta bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan perumahan dan permukiman, pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman serta lingkungan hidup berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perumahan dan permukiman;
3) pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah perkotaan, dan perdesaan;

4) pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan penyehatan lingkungan dan permukiman;
5) pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan penataan, pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6) pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan limbah B3 serta pengendalian pencemaran lingkungan;
7) pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis dinas; dan
8) pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, program pembangunan, keuangan dan pelaporan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas diatas serta memperhatikan kondisi yang ada di masyarakat, beberapa isu penting tahun 2025 terkait dengan pelaksanaan tuags dan fungsi Dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Masih belum maksimalnya penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten (luasan dibawah 10 ha)
2) Masih terdapat keluarga beresiko stunting dan kelompok masyarakat miskin esktrem yang belum menempati hunian yang layak serta belum menikmati layanan berupa akses air bersih dan sanitasi layak.
3) Belum maksimalnya pengelolaan sampah baik dalam bentuk penanganan maupun pengurangan sampah dari sumber oleh masyarakat. Disamping dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, juga disebabkan oleh kondisi TPA yang masih bersifat *Open dumping* (pembuangan terbuka) sehingga dibutuhkan TPA yang representatif.
4) Perlunya edukasi dan pendampingan kepada masyarakat melalui Nagari terkait bagaimana mengelola sampah dari sumber (rumah tangga) sehingga bisa mendukung program pengurangan sampah di daerah.
5) Meningkatkan Penegakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama terhadap jenis usaha/kegiatan yang telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan oleh masyarakat yang disampaikan melalui Dinas terkait dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD yang disandingkan juga dengan aspirasi DPRD setiap tahunnya. Usulan dari masyarakat ditampung melalui Musrenbang yang diawali dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Daftar usulan masyarakat yang dihasilkan melalui Musrenbang ini diakomodir dalam dokumen Perencanaan Tahunan pada Dinas teknis yang membidangi dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah. Penyusunan Renja-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah dengan berkoordinasi bersama Bapppeda Kabupaten Sijunjung. Tujuan pembahasan Renja-PD adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk melaksanakan tugas guna mencapai target kinerja daerah yang menjadi kewenangan. Hal ini diharapkan perangkat daerah lebih Proaktif dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosakan secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi.

Sehubungan dengan hal diatas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas tahun 2021-2026 yang akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk target kinerja tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan
    1) Meningkatnya birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional;
    2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar;
    3) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.
b. Sasaran
    1) Meningkatnya kinerja manajemen organisasi;
    2) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman;
    3) Meningkatnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    4) Meningkatnya pengelolaan persampahan.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tahun 2025 berdasarkan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan mensinkronkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Dengan memperhatikan arah Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup merumuskan Rencana kerja Tahun Angaran

2025 berdasarkan kepada Sandingan Permendagri 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 melaksanakan dari 13 Program, 18 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.

Berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan I 2025 atas pelaksanaan Renja-PD, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinas untuk menunjang tercapainya target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisa kebutuhan pada APBD-P tahun 2025 yang dilakukan, diperoleh bahwa perlunya perubahan anaggaran berupa penambahan dan pengurangan anggaran pada beberapa sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimuat pada rencana kerja perubahan tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
   Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

B. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
   Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
   - Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
   Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
   - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

G. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

H. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

I. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

J. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

K. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

L. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

M. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

N. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan Pengelolaan Sampah

- Sub KegiatanPeningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan
- Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya penambahan dan pengurangan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan menyesuaikan isu strategis dan kebijakan daerah. Hal ini wujudkan dari jawaban atas isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas serta menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Capaian Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas pada Renja Perubahan 2025 ini menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan target dan capaian kinerja tahunan serta mempedomani capaian kinerja sampai dengan triwulan I 2025. Disamping itu juga memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

4.2 Program/ Kegiatan dan Rumusan Renja Tahun 2025

Secara lengkap program kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.1
MATRIK RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						**34.068.939.467**	**15.429.615.267**	**(18.639.324.200)**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.406.037.992	11.925.404.669	(18.480.633.323)
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						11.801.652.000	1.068.182.620	(10.733.469.380)
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan penyediaan air bersih		71,02 %	70,33 %	-0,69%	5.381.090.000	122.852.000	(5.258.238.000)
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase peningkatan distribusi air bersih		0,5 %	0,01 %	-0,49%	5.381.090.000	122.852.000	(5.258.238.000)
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		30 Orang	0 Orang	-30 Orang	16.355.000	0	(16.355.000)
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	468.231.000	21.769.700	(446.461.300)
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	0 Liter/Detik	4.896.504.000	101.082.300	(4.795.421.700)
					Biaya Operasional						89.004.000	11.082.300	(77.921.700)
					Pekerjaan Fisik						4.807.500.000	90.000.000	(4.717.500.000)
					Pengembangan SPAM Nagari TBA						0	90.000.000	90.000.000
					Rehab Air bersih Dusun 3 Jr Kamang Sejahtera		Nag Kamang				67.500.000	0	(67.500.000)
					Pembangunan SPAM Nagari TBA		Nag TBA				180.000.000	0	(180.000.000)
					Perbaikan SPAM Nagari Aie Amo		Nag Aie Amo				200.000.000	0	(200.000.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					Perbaikan SPAM Nagari Tanjung Kaliang		Nag Tanjung Kaliang				200.000.000	0	(200.000.000)
					Pembangunan Reservoar Galogah		Nag Kamang				200.000.000	0	(200.000.000)
					Perbaikan Pipa Nagari Batu Manjulur		Nag Batu Manjulur				200.000.000	0	(200.000.000)
					SPAM Sungai Betung		Nnag Sungai Batuang				200.000.000	0	(200.000.000)
					Lanjutan SPAM LUBUK TAROK		Nag Lubuk Tarok				3.000.000.000	0	(3.000.000.000)
					Perbaikan SPAM Nagari Siaur		Nag Siaur				180.000.000	0	(180.000.000)
					Perbaikan SPAM Nagari Maloro		Nag Maloro				180.000.000	0	(180.000.000)
					Perbaikan Rehab SPAM Padang Doto		Nag Aie Angek				200.000.000	0	(200.000.000)
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan ketersediaan sarana pengelolaan persampahan		0	70 %	70%	0	0	0
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana pengelolaan persampahan		0	10 %	10%	0	0	0
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi		0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan sanitasi layak		57,8 %	59,76 %	1,96%	732.617.800	925.322.120	192.704.320
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketersediaan sanitasi layak dan aman		0,5 %	0,01 %	-0,49%	732.617.800	925.322.120	192.704.320
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		26 Rumah Tangga	28 Rumah Tangga	2 Rumah Tangga	285.380.000	482.975.000	197.595.000
					Biaya Operasional						33.380.000	41.975.000	8.595.000
					Pekerjaan Fisik						252.000.000	441.000.000	189.000.000
					WC Individu Paket 1						141.750.000	141.750.000	0

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					WC Individu Paket 2						110.250.000	110.250.000	0
					Pembuatan Jamban Individu Nag. Padang Sibusuk		Nag Padang Sibusuk				0	141.750.000	141.750.000
					Jamban Individu Nagari Padang Laweh Selatan		Nag Padang Laweh Selatan				0	47.250.000	47.250.000
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		2 Dokumen	1 Dokumen	-1 Dokumen	447.237.800	442.347.120	(4.890.680)
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang terhubung		51,55 %	49,53 %	-2,02%	5.687.944.200	20.008.500	(5.667.935.700)
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan saluran drainase yang dibangun		85 %	0 %	-85,00%	5.687.944.200	20.008.500	(5.667.935.700)
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		300 M	0 M	-300 M	5.492.047.500	8.205.000	(5.483.842.500)
					Biaya Operasional						156.897.500	8.205.000	(148.692.500)
					Pekerjaan Fisik						5.335.150.000	0	(5.335.150.000)
					Pembangunan tali bandar dari asrama MTSn 1 Sijunjung ke simpang tugu		Nag Palangki				180.000.000	0	(180.000.000)
					pembangunan saluran air limbah koto pulasan		Nag Pulasan				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit jalan dan Drainase guguk tadak silantai		*Nag Silantai*				180.000.000	0	(180.000.000)
					Plat dwiker Mesjid lama Jorong Koto Nagari Sungai Lansek		Nag Sungai Lansek				45.000.000	0	(45.000.000)
					Pengadaan Plat dwiker Eti Bodor Jorong Koto Nagari sungai lansek		Nag Sungai Lansek				45.000.000	0	(45.000.000)
					Drainase Sungai Tambang III nagari Kunpar		Nag Kunpar				90.000.000	0	(90.000.000)
					Drainase Jalan Lingkar, Jr Sungai Tambang I, nagari Kunpar		Nag Kunpar				94.500.000	0	(94.500.000)
					Pembangunan Drainase Jorong Koto nagari Tanjung Lolo		Nag Tanjung Lolo				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rehab Drainase (300 m) Jorong Koto Nagari Tanjung Lolo		Nag Tanjung Lolo				90.000.000	0	(90.000.000)
					Pembangunan Drainase Jalan Permukiman Ranah Sopan (1 paket) Jr Pudak Nag Sijunjung		Nag Sijunjung				90.000.000	0	(90.000.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					Pembangunan Drainase Jalan Permukiman Jalan Guguk Cibodak (1 paket) Jr Tapian Diaro Nag Sijunjung		Nag Sijunjung				90.000.000	0	(90.000.000)
					Pembangunan Drainase Jalan Permukiman Dusun 1 (1 paket) Jr Ganting Nag Sijunjung		Nag Sijunjung				90.000.000	0	(90.000.000)
					Pembangunan Drainase Jalan Permukiman Dusun 3 (1 Paket) Jr ganting Nag Sijunjung		Nag Sijunjung				90.000.000	0	(90.000.000)
					Drainase 1, Jorong Ranah Sigading Nagari padang Laweh Selatan		Nag Padang Laweh Selatan				162.000.000	0	(162.000.000)
					Drainase 2, Jorong Muaro Gambok Nagari Muaro		Nag Muaro				162.000.000	0	(162.000.000)
					Drainase Muaro bodi		Nag Muaro Bodi				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Puskesmas Lubuk Tarok		Nag Lubuk Tarok				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Tamparungo		Nag Tamparungo				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Jr. Duri Nag. Pematang Panjang		Nag Pematang Panjang				135.000.000	0	(135.000.000)
					Drainase Nagari Padang Laweh		Nag Padang Laweh				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Samping Rumah Pak Jorong Tangah Nagari Muaro		Nag Muaro				106.650.000	0	(106.650.000)
					Drainase Logas Nagari Muaro		Nag Muaro				135.000.000	0	(135.000.000)
					Drainase Nagari Sisawah		Nag Sisawah				153.000.000	0	(153.000.000)
					Drainase Sumpur Kudus		Nag Sumpur Kudus				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Pisang Kolek Nagari Taratak Baru Utara		Nag Taratak Baru Utara				180.000.000	0	(180.000.000)
					Drainase Nagari Tanjung Bonai Aur 1		Nag Tanjung Bonai Aur				180.000.000	0	(180.000.000)
					Drainase Sungai Tenang		Nag Kunpar				162.000.000	0	(162.000.000)
					Lanjutan Drainase Jalan Bundo Kandung Jr. Tanjung Alam Nagari Kumanis		Nag Kumanis				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Bukik Sabolah Nagari Tanjung Lolo		Nag Tanjung Lolo				180.000.000	0	(180.000.000)
					Drainase Sungai Batuang		Nag Sungai Batuang				180.000.000	0	(180.000.000)
					Drainase Belakang Pasar Sijunjung		Nag Sijunjung				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Aie Angek Jr Padang Doto		Nag Aie Angek				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Payo Inyiak Sida Nagari TBA		Nag TBA				200.000.000	0	(200.000.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					Drainase Nagari Koto Tuo		Nag Koto Tuo				135.000.000	0	(135.000.000)
					Drainase Tabek Hantu		Nag Muaro				200.000.000	0	(200.000.000)
					Drainase Jr. Pale Nagari Pematang Panjang		Nag Pematang Panjang				200.000.000	0	(200.000.000)
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	195.896.700	11.803.500	(184.093.200)
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						18.604.385.992	10.857.222.049	(7.747.163.943)
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		1,5 %	0,25 %	-1,25%	4.521.491.842	4.139.140.676	(382.351.166)
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran		100 %	100 %	0,00%	16.166.400	3.698.600	(12.467.800)
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	16.166.400	3.698.600	(12.467.800)
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu		100 %	100 %	0	3.220.957.557	3.187.510.597	(33.446.960)
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	0 Orang/ Bulan	3.214.934.357	3.187.510.597	(27.423.760)
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	0 Dokumen	-1 Dokumen	6.023.200	0	(6.023.200)
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi		100 %	87 %	-13%	248.433.175	119.503.140	(128.930.035)
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	0 Paket	12.011.800	5.994.900	(6.016.900)
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	1 Paket	- 1 Paket	5.795.600	5.795.600	0
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	0 Paket	35.526.750	17.326.300	(18.200.450)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	0 Paket	20.630.400	5.927.100	(14.703.300)
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	6.024.000	3.196.000	(2.828.000)
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	21.757.300	8.490.125	(13.267.175)
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	146.687.325	72.773.115	(73.914.210)
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi		85 %	80,50 %	-4,50%	536.018.410	375.012.039	(161.005.971)
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	264.230.010	163.837.139	(100.392.871)
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	12.164.400	6.834.400	(5.330.000)
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	259.624.000	204.340.500	(55.283.500)
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset PD dalam keadaan baik		100 %	100 %	0%	499.916.300	453.416.300	(46.500.000)
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	0 Unit	32.556.300	27.556.300	(5.000.000)
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		55 Unit	55 Unit	0 Unit	400.500.000	359.000.000	(41.500.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	25 Unit	0 Unit	31.220.000	31.220.000	0
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 Unit	50 Unit	0 Unit	35.640.000	35.640.000	0
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Penyediaan infrastruktur Pada Perumahan dan Permukiman		50 %	50 %	0 %	210.491.050	109.337.420	(101.000.000)
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni		100 %	100 %	0%	16.971.050	3.311.420	(13.659.630)
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	16.971.050	3.311.420	(13.659.630)
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni		100 %	100 %	0%	193.520.000	106.026.000	(87.494.000)
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		3 Unit Rumah	2 Unit Rumah	- 1 Unit Rumah	193.520.000	106.026.000	(87.494.000)
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penyediaan infrastruktur Pada Perumahan dan Permukiman		55 %	55 %	0 %	311.618.400	44.767.360	(266.851.040)
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pesentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni		0,9 %	0,1 %	-0,8%	311.618.400	44.767.360	(266.851.040)
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		1 Unit Rumah	0 Unit Rumah	- 1 Unit Rumah	257.320.000	20.252.000	(237.068.000)
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		3 Laporan	1 Laporan	- 2 Laporan	54.298.400	24.515.360	(29.783.040)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan infrastruktur Pada Perumahan dan Permukiman		88,50 %	88,20 %	- 0,3%	13.560.784.700	6.563.976.593	(6.996.808.107)
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang dikelola		2 %	2 %	0%	13.560.784.700	6.563.976.593	(6.996.808.107)
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		10 Lokasi	37 Lokasi	27 Lokasi	13.537.741.700	6.552.647.393	(6.995.658.230)
					Biaya Operasional						928.862.300	758.587.993	(170.274.307)
					Pekerjaan Fisik						12.608.879.400	5.794.059.400	(6.814.820.000)
					Perbaikan dan Rigit beton jalan perkampungan adat Jorong Padang Ranah nagari sijunjung		Nag Sijunjung				180.000.000	0	(180.000.000)
					Peningkatan dan rehab berat jalan As nagari solok ambah Nagari Solok Ambah		Nag Solok Ambah				180.000.000	0	(180.000.000)
					Lanjutan rehab jalan lingkungan kombuik koman Nagari Pematang Panjang		Nag Pmt Panjang				180.000.000	180.000.000	0
					Rigit beton jalan surau pincuran gadang menuju tempat berkaul Nagari Aie Angek		Nag Aie Angek				180.000.000	0	(180.000.000)
					Peningkatan jalan lingkungan permukiman nagari paru (Jr Bukit Buar-Jr Kampung Tarandam) Nagari Paru		Nag Paru				180.000.000	0	(180.000.000)
					Rehab Jalan Lingkung (jorong Imbang Joyo & Taratak) Nagari Latang		Nag Latang				180.000.000	0	(180.000.000)
					Rigit jalan ke TK Sinar Rembulan Jr Batu Ajung Nagari Lalan		Nag Lalan				76.500.000	0	(76.500.000)
					Rigit jalan ke SDN 6 Lalan Lokal Jauh Jr Batang Lalan Nagari Lalan		Nag Lalan				65.700.000	0	(65.700.000)
					Jalan Pemukiman Jr Koto-Jr Muaro Linggo Nagari Langki		Nag Langki				180.000.000	0	(180.000.000)
					Rehab Rigit jalan lingkar koto pulasan Nagari Pulasan		Nag Pulasan				90.000.000	0	(90.000.000)
					Perbaikan Jalan Dan Drainase Permukiman Balai balai - Simogek Nagari Timbulan		Nag Timbulun				180.000.000	0	(180.000.000)
					Cor rigit Jalan Polak Kopi Bangko Nagari Taratak Baru		Nag Taratak Baru				180.000.000	0	(180.000.000)
					Pengerasan jalan pandam ke padang sungkai (jr parit rantang ke kunangan) Nagari Kunpar		Nag Kunpar				180.000.000	0	(180.000.000)
					jalan lingkar sungai bunian jorong muaro buan Nagari Padang Tarok		Nag Padang Tarok				180.000.000	0	(180.000.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					Rigit beton jalan kapalo koto Nagari Guguak		Nag Guguak				135.000.000	0	(135.000.000)
					Rigit beton jalan Gorai-Puaro, Nag. Koto Baru, Kec. IV Nagari		Nag Koto Baru				135.000.000	0	(135.000.000)
					Jalan ke tempat Berkaul Adat Kubu Rajo, Nag Kumanis		Nag Kumanis				180.000.000	180.000.000	0
					Rehabilitasi Jalan Sawah laweh, Nag Kumanis		Nag Kumanis				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit beton jalan ke lapangan sungai Binuang, Jr. Galogah, Nag. Kamang		Nag Kamang				180.000.000	180.000.000	0
					Rigit beton Jalan, Nag. Padang Laweh		Nag Padang Laweh				180.000.000	200.000.000	20.000.000
					Rigit beton Jalan, nag. Padang Laweh Selatan		Nag Padang Laweh Selatan				180.000.000	200.000.000	20.000.000
					Peningkatan jalan permukiman, Nag. Padang Sibusuk		Nag Padang Sibusuk				200.000.000	0	(200.000.000)
					Pengembangan jalan permukiman, Nag. Maloro 2		Nag Maloro				200.000.000	0	(200.000.000)
					Pengembangan Jl. Permukiman Sungai Dingin ke Rumbai Jr. Lubuk Cupak Nag. Taratak baru Utara		Nag Taratak baru Utara				200.000.000	200.000.000	0
					Rigit beton, Nag. Tanjung Kaliang		Nag Tanjung Kaliang				200.000.000	0	(200.000.000)
					Rigit Beton Jalan, Nag. Sungai Batuang		Nag Sungai Batuang				200.000.000	0	(200.000.000)
					Pengembangan Jalan Permukiman, Nag. Taratak baru (Parak Kopi bangko)		Nag Taratak baru				200.000.000	0	(200.000.000)
					Pengembangan Jalan Permukiman, Nag. Taratak baru (Lurah Bomban)		Nag Taratak baru				200.000.000	0	(200.000.000)
					Peningkatan Jalan Sei. Pompang Batu Licin, Nag. Muaro		Nag Muaro				200.000.000	200.000.000	?|0
					Rigit beton Jr. Sipua Nag. Sumpur Kudus ke Nag. Tanjung Labuh		Nag tanjung Labuah				200.000.000	0	(200.000.000)
					Peningkatan jalan, Nag. Bukit Bual		Nag Bukit Bual				200.000.000	200.000.000	0
					Peningkatan jalan Permukiman, Nag. Sumpur Kudus Selatan		Nag Sumpur Kudus Selatan				200.000.000	0	(200.000.000)
					Rigit Beton Perumahan Apernas, Kamang		Nag Kamang				200.000.000	100.000.000	(100.000.000)
					Rigit beton Jalan Perumahan Karya Dharma II		Nag Muaro				200.000.000	150.000.000	(50.000.000)
					Pengembangan jalan Ulak Tanjung Gadang Jr Tanjung Gadang Nagari Kumanis		Nag Kumanis				200.000.000	0	(200.000.000)
					Pengembangan dan Rigit Jalan Surau Kapuak, Nag. Padang Laweh Selatan		Nag Padang Laweh Selatan				200.000.000	0	(200.000.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					Rigit Beton Jln. Lurah Kadan Jr Pisang Kolek Nag. Taratak baru Utara		Nag Taratak Baru Utara				200.000.000	200.000.000	0
					Pengembangan jalan Nagari Sumpur Kudus		Nag Sumpur Kudus				200.000.000	200.000.000	0
					Pengembangan jalan Nagari TBA		Nag TBA				200.000.000	200.000.000	0
					Pengembangan jalan nagari TBA Selatan		Nag TBA Selatan				200.000.000	200.000.000	0
					Pengembangan jalan Nagari Sijunjung 1		Nag Sijunjung				200.000.000	200.000.000	0
					Pengembangan jalan nagari Sijunjung 2		Nag Sijunjung				200.000.000	0	(200.000.000)
					Pemasangan Dam Jalan Lingkungan (Dekat Jln. Lansek Manih), Nag. Muaro		Nag Muaro				180.000.000	180.000.000	0
					Pengembangan jalan Permukiman Nagari Maloro 1		Mag maloro				200.000.000	0	(200.000.000)
					Rigit Beton Jln. Perumahan Mursil Madani, Nag. Muaro		Nag Muaro				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit Beton Jalan Koto Tuo, Jr. Padang Ranah, Nag. Sijunjung		Nag Sijunjung				90.000.000	90.000.000	0
					Rigit Beton Jalan Permukiman, Nag. Padang Laweh Selatan		Nag Padang Laweh Selatan				180.000.000	180.000.000	0
					Rigit Beton Jalan Limau Puruik, Jr. Pondok Jago, Nag. Pematang panjang		Nag Pematang Panjang				135.000.000	135.000.000	0
					Lanjutan Rigit Beton Jalan Lundang, Jr. Limau Sundai, Nag. Pematang Panjang		Nag Pematang Panjang				112.500.000	112.500.000	0
					Rigit Beton Jalan Pondok Pesantren Bismillah, Jr. Pale, Nag. Pematang Panjang		Nag Pematang Panjang				180.000.000	180.000.000	0
					Lanjutan Rabat Beton Jalan Lingkar Biaro Nagari Kumanis		Nag Kumanis				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rabat Beton Jalan Simalantai Nagari TBA		Nag TBA				45.000.000	0	(45.000.000)
					Lanjutan Rigit beton + Plat dwiker Jorong Rumbai Nagari Sisawah		Nag Sisawah				180.000.000	0	(180.000.000)
					Rigit Beton jalan lingkar Perumnas GSI, Nagari Padang Sibusuk		Nag Padang Sibusuk				90.000.000	0	(90.000.000)
					Peningkatan jalan di Jorong Ladang Kapeh nagari Padang Sibusuk		Nag Padang Sibusuk				90.000.000	0	(90.000.000)
					Pengerasan jalan RT 07 Jalur 9 Jorong kamang Bakti Nagari Kamang		Nag Kamang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Pengerasan jalan jalur 9 Jorong kamang Sentosa Nagari kamang		Nag Kamang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Pengecoran jalan kamang, Jalan Mesjid nagari kamang		Nag Kamang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Pengecoran jalan di Jorong Batang Kariang Nagari Kamang		Nag Kamang				90.000.000	0	(90.000.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					Rigit beton jalan Lingkungan Jr. Kurnia Nagari Kamang		Nag Kamang				90.000.000	100.000.000	10.000.000
					Rigit Beton Jr Pasar gambok (panjang 250 m)		Nag Padang Laweh Selatan				180.000.000	0	(180.000.000)
					Rigit Beton Jln perumahan batang Kaloko		Nag Pematang Panjang				126.000.000	0	(126.000.000)
					Rigit beton jalan dan jembatan Jr Koran Nagari pematang Panjang		Nag Pematang Panjang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Jln Mudik Milan Jr Mudik Milan Pasar Tanjung		Nag Tanjung Gadang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit Beton Jln Permukiman Mudik Limbing Jr Guguk Naneh Nagari Tanjung Gadang		Nag Tanjung gadang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit beton Dusun 1 Jr kamang Bakti		Nag Kamang				76.500.000	0	(76.500.000)
					Rigit beton Jalan ke Makam, Jr Sungai Tambang 3		Nag Kamang				85.500.000	0	(85.500.000)
					Rigit beton Dusun 1 Jr Kamang Makmur		Nag Kamang				85.500.000	0	(85.500.000)
					Jalan Lingkar Dusun Tinggi I Nagari Muaro Takung		Nag Muaro Takung				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit Beton 200 m di Dusun Tinggi II nagari Lb tarantang		Nag Lb Tarantang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit Beton Perumahan Maxima 300 m di Sungai Tambang II nagari Kunpar		Nag Kunpar				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit Beton Jalan Dusun Tinggi I Nagari Muaro takung		Nag Muaro Takung				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit Beton Jalan Jr Sungai Tambang II nagari Kunpar		Nag Kunpar				72.000.000	0	(72.000.000)
					Lanjutan Rigit Beton jalan Permukiman (± 200 m), Jorong Taratak Betung nagari Padang Laweh		Nag Padang Laweh				135.000.000	0	(135.000.000)
					Lanjutan Rigit Beton jalan Permukiman (± 200 m), Jorong Bukit Gombak Nagari Padang Laweh		Nag Padang Laweh				135.000.000	0	(135.000.000)
					Rigit Beton Jalan Permukiman (500 m) nagari Tanjung		Nag Tanjung				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit beton ke Makam Jalur 9 Kurnia Kamang (200m)		Nag Kamang				135.000.000	0	(135.000.000)
					Rigit Beton Makam Timpeh IV (150 m)		Nag Kamang				135.000.000	0	(135.000.000)
					Rigit Beton Dusun 2 Jr Kurnia Kamang		Nag Kamang				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rigit Beton Mudiak Tolang, Jr Pasa lamo Nagari Tanjung Lolo		Nag Tj Lolo				90.000.000	100.000.000	10.000.000
					Pengerasan Jalan (3 km) SMA N 12 Sijunjung ke Tigo Korong di Jorong Tigo Korong		Nag Lb Tarok				67.500.000	0	(67.500.000)
					Rigit Beton Jalan Jambu SMK		Nag Padang Sibusuk				112.500.000	0	(112.500.000)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
					Rehab Jalan Simpang Bawah Lowak - Simpang Bawah Ambacang, Jorong kampung Juar Nagari Tanjung		Nag Tanjung				90.000.000	0	(90.000.000)
					Rehab berat rigit beton jalan Mudiak Simpang, Jr Koto Mudiak		Nag Solok Ambah				135.000.000	0	(135.000.000)
					Rehab berat rigit beton jalan Taratak tangah, Jr Koto Mudiak		Nag Solok Ambah				135.000.000	0	(135.000.000)
					Rigit Beton Jalur 3 RT 3 Dusun 1 Jorong Kunia Kamang Timpeh V		Nag Kamang				67.500.000	67.500.000	0
					Rigit Beton Jln. Kampung Pinang Ke Tobek Tonga, Jr. Koto Tangah, Nag.Pematang Panjang		Nag Pematang Panjang				135.000.000	135.000.000	0
					Rigit Beton Tanah Badantuang		Nag Sijunjung				90.000.000	90.000.000	0
					Peningkatan Jalan Nagari Muaro		Nag Muaro				86.179.400	0	(86.179.400)
					Drainase Jr Muaro Gambok Nagari Muaro		Nag Muaro					180.000.000	180.000.000
					Pembangunan Drainase Jorong Duri Pematang Panjang		Nag Pematang Panjang					144.059.400	144.059.400
					Pembangunan Drainase Koto Tuo		Nag Koto Tuo					75.000.000	75.000.000
					Pengembangan Jalan Jr.Batang Salosa, Nagari Muaro		Nag Muaro					165.000.000	165.000.000
					Pengembangan jalan Batang Tayeh Jr Tanjung Gadang Nagari Kumanis		Nag Kumanis					180.000.000	180.000.000
					Pengembangan Jalan Permukiman, Nag. Taratak baru (Lurah Bomban)		Nag Taratak baru					180.000.000	180.000.000
					Rehab Drainase Jr Koto Nagari Tanjung Lolo		Nag Tanjung lolo					100.000.000	100.000.000
					Rigid Beton Jalan Masjid Jr Kamang Nagari Kamang		Nag Kamang					100.000.000	100.000.000
					Rigid Beton Jalan Nagari Pulasan		Nag Pulasan					100.000.000	100.000.000
					Rigid Beton Jr. Pudak Nagari Sijunjung		Nag Sijunjung					130.000.000	130.000.000
					Rigid Beton Perumahan Maxima 4							180.000.000	180.000.000
					Pembangunan Dump Saluran Drainase Utama di Perumahan Karya Dharma II, Jr. Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro		Nagari Muaro				0	0	0
					Rigit beton jalan penghubung dari perumahan ipuh permai dan karya dharma II, Jr. Pematang sari bulan, Nagari Muaro		Nagari Muaro				0	0	0
					Lanjutan pengembangan jalan lingkar kumanis Jorong Tanjung Gadang		Nagari Kumanis				0	50.000.000	50.000.000
					Drainase Karya Dharma I		Nagari Muaro				0	50.000.000	50.000.000

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		3 Laporan	1 Laporan	- 2 Laporan	23.043.000	11.329.200	(11.713.800)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.662.901.475	3.953.987.339	291.085.864
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.662.901.475	3.953.987.339	291.085.864
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen lingkungan hidup		75 %	75 %	0%	267.564.250	227.943.250	(39.621.000)
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun		75 %	75 %	0%	267.564.250	227.943.250	(39.621.000)
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	267.564.250	227.943.250	(39.621.000)
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium yang Disusun Persentase peningkatan kemitraan lingkungan		20 % 7 %	20 % 7 %	0 % 0 %	162.623.740	102.301.816	(60.321.924)
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dibina Persentase peningkatan dokumen mutu yang disusun		20 % 7 %	20 % 7 %	0 % 0 %	162.623.740	102.301.816	(60.321.924)
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	29.334.250	16.853.000	(12.481.250)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		8 Lokasi	8 Lokasi	0 Lokasi	46.385.240	39.128.316	(7.256.924)
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 Dokumen	0 Dokumen	-1 Dokumen	25.875.550	0	(25.875.550)
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	61.028.700	46.320.500	(14.708.200)
2	11	03	2.03		Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan pemulihan lahan yang dilaksanakan		16 ha	16 ha	0	0	0	0
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	JUmlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	0
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan kualitas ruang terbuka hijau		5 %	2 %	-3%	79.873.650	70.522.650	(9.351.000)
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas ruang terbuka hijau yang dikelola		1,7 Ha	1,7 Ha	0 Ha	79.873.650	70.522.650	(9.351.000)
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 Dokumen	0 Dokumen	- 1 Dokumen	0	0	0
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1.7 Ha	1.7 Ha	0 Ha	79.873.650	70.522.650	(9.351.000)
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi dan mematuhi unsur-unsur izin lingkungan		80 %	80 %	0%	36.297.600	22.065.560	(14.232.040)
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin dalam pengelolaan LH		80 %	80 %	0%	36.297.600	22.065.560	(14.232.040)
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	13.753.100	7.850.400	(5.902.700)

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target			Pagu		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	10 Badan Usaha	22.544.500	14.215.160	(8.329.340)
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan		1,6 %	1,1 %	-0,5%	97.732.320	55.508.728	(42.223.592)
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dibina		9,8 %	9,8 %	0%	97.732.320	55.508.728	(42.223.592)
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		10 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	97.732.320	55.508.728	(42.223.592)
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terkelola		45,50 %	45,20 %	-0,30%	3.018.809.915	3.475.645.335	456.835.420
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi Persentase Sampah Yang Ditangani		22,50 % 23,00 %	22,20 % 23,00 %	-0,30 % - 0%	3.018.809.915	3.475.645.335	456.835.420
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		1 Kelompok	1 Kelompok	0 Kelompok	13.701.540	6.273.050	(7.428.490)
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		8000 Ton	8100 Ton	100 Ton	2.971.018.450	3.449.325.585	478.307.135
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	34.089.925	20.046.700	(14.043.225)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat beberapa penyesuaian baik secara indikator, target maupun anggaran pada rencana kerja perubahan tahun 2025. Disamping itu, perubahan juga tidak terbatas kepada jumlah program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada sebelumnya namun juga terdapat penyesuaian beberapa sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Tahun 2025. Selain itu juga terdapat pengurangan anggaran pada beberapa sub kegiatan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung tahun 2025 mengacu kepada perubahan renstra dan cascading dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup tahun 2021-2026, Indikator tersebut pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Capaian IKU 2024 dan Target 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
				Target Awal	Target Perubahan
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	79,25	79,75	79,50
2.	Persentase penanganan kawasan kumuh	Persen	15,82	25	15
3.	Persentase infrastruktur dengan kondisi baik pada perumahan dan kawasan permukiman	Persen	64,05	67	64,30
4.	Indeks Kualitas Air	Nilai	44,85	44,95	44,90
5.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	93,72	93,80	93,80
6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	64,00	64,93	64,50
7.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai	45	47	46

Pada perubahan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 terdapat penyesuaian target kinerja dinas sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Target ini mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dinas serta disepakati oleh Kepala Dinas bersama Bupati Sijunjung yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup tahun 2024 sebagai dasar penetapan target kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 . Capaian IKK 2024 dan Target 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	
				Target Awal	Target Perubahan
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	Persen	70,32	71,02	70,32
2.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	88,47	89,25	88,65
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota1	Persen	100	100	100
4.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/Kota	Persen	0	0	0
5.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	53,54	70	60
6.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	4,94	4,5	4,88
7.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	17,74	18,50	18,20
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Nilai	68,84	69,65	69,00
9.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Persen	44,32	44,50	44,42
10.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	33,33	65	50

Indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan untuk mendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melaksanakan 10 Indikator Kinerja Kunci yang terdiri dari 2 IKK Bidang Urusan Pekerjaan Umum, 5 IKK Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan 3 IKK Bidang urusan Lingkungan Hidup.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada sisa tahun berkenaan dengan memperhatikan capaian.

Perubahan mendasar yang dimuat dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tahun 2025 ini terdiri dari penyesuaian indikator serta target kinerja Tahun 2025 menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada, terutama dari sisi anggaran yang mengalami perubahan signifikan sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Meskipun terjadi pengurangan dari jumlah anggaran sebelumnya, kinerja tahunan tetap menjadi prioritas namun disesuaikan dengan ketersediaan anggara yang ada.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Tahun 2025 ini diharapkan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.

KEPALA DINAS,

ARIF MEIGAYANTO, ST, MM
NIP. 19660505 200212 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

MUARO SIJUNJUNG - 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PERTANIAN
Alamat : Jl. H. Agus Salim No.20 ☎ (0754) 21101 fax (0754) 21004
MUARO SIJUNJUNG – 27511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 521/290/KPTS/DIPERTA-2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Dinas Pertanian merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah pada sektor pertanian yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;

c. bahwa sesuai dalam pasal 356 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian;
10. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja dinas pada tahun anggaran 2025 yang disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan II tahun 2025.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 31 Juli 2025

Kepala Pertanian,

Ir. Ronaldi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680508 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
3. Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
4. Kepala BKAD Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian Tahun 2025. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua dan arah kebijakan Tahun 2025. Beberapa pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025;
2. Penyesuaian/realokasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan karena adanya kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 dan perubahan target kinerja.

Perubahan Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian memuat pendahuluan, hasil evaluasi Renja Tahun 2025 sampai triwulan II tahun berkenaan, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Menteri Pertanian Repubik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung;
12) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian;
13) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian Tahun 2025 dimaksudkan untuk menampung perubahan yang dibutuhkan dalam tahun berjalan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini sangat penting peranannya untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam melaksanakan pembangunan pertanian Kabupaten Sijunjung tahun 2025.

Tujuan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memenuhi kebijakan efisiensi belanja anggaran tahun 2025 pada Surat Edaran Bupati Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisinsi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Melakukan penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah serta target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini adalah :

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d Triwulan II Tahun Berkenaan
2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V. PENUTUP

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2025 menunjukkan capaian yang masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya pergeseran anggaran tahun 2025 pada tahun berjalan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ.

Efisiensi anggaran tersebut menyebabkan pagu anggaran Dinas Pertanian yang awalnya berjumlah Rp. 26.509.308.371,- berkurang menjadi Rp. 20.623.673.332,-. Efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap target kinerja dan berkurangnya jumlah sub kegiatan sehingga perlu penyesuaian kembali dan semuanya baru dapat dilakukan pada penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada tabel 2.1 menunjukkan realisasi target kinerja sampai dengan triwulan II baru dapat ditampilkan untuk sub kegiatan yang bersifat rutin sementara untuk sub-sub kegiatan yang indikatornya berupa output barang ataupun konstruksi belum tersedia datanya karena masih berproses. Untuk capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata baru dapat ditampilkan pada akhir tahun anggaran karena sebagian besar data diukur secara tahunan.

Dari aspek keuangan, capaian kinerja keseluruhan sampai dengan triwulan II tahun 2025 masih berada di bawah angka 40% dan masih didominasi untuk pembayaran gaji ASN dan THL. Hal ini dipengaruhi juga oleh sistem keuangan untuk pengajuan GU yang hanya dapat dilakukan satu kali sebulan dengan jumlah maksimal 75% dari UP sehingga ketersediaan anggaran untuk membayar biaya kegiatan agak tertunda karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada bendahara pengeluaran setiap bulannya.

Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian target indikator kinerja adalah dengan melakukan percepatan proses kegiatan terutama pengadaan fisik berupa barang dan konstruksi yang anggarannya bersifat LS dan masih tersedia setelah pelaksanaan pergeseran anggaran pada efisiensi anggaran. Melakukan perubahan ataupun revisi anggaran dan target kinerja melalui mekanisme perubahan APBD.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Sampai DenganTriwulan Ke- Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi	
										I		II			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	**27**				**DINAS PERTANIAN**			**20,623,673,232**		**4,221,717,085**		**7,918,123,832**		**7,918,123,832**
I	3	27	01			PROGRAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pencapaian Komponen Akuntabilitas Kinerja	76.0	14,582,391,094		3,816,080,395		7,156,071,784		7,156,071,784
	3	27	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran; 2) Persentase dokumen laporan p enyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu	1) 85% 2) 95%	69,264,435		9,411,500		15,133,750		15,133,750
	3	27	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	21,765,685	1 dokumen	1,542,500	2 dokumen	1,995,750	2 dokumen	1,995,750
	3	27	01	2	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	47,498,750	4 laporan	7,869,000	8 laporan	13,138,000	8 laporan	13,138,000
	3	27	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Persentase Pengelolaan Keuangan yang Tertangani Tepat Waktu 2) Persentase Hasil Audit Keuangan yang ditindaklanjuti	1) 95% 2) 95%	13,842,837,146		3,665,600,923		6,894,485,775		6,894,485,775
	3	27	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 orang/bulan	13,781,597,546	125 orang/bulan	3,648,488,923	125 orang/bulan	6,867,935,775	125 orang/bulan	6,867,935,775
	3	27	01	2	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dokumen	61,239,600	18 dokumen	17,112,000	22 dokumen	26,550,000	22 dokumen	26,550,000
	3	27	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan administrasi barang milik daerah pada OPD	100%	15,133,600		3,109,500		5,194,000		5,194,000
	3	27	01	2	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1,248,800		-		-		-
	3	27	01	2	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	13,884,800	1 laporan	3,109,500	1 laporan	5,194,000	1 laporan	5,194,000
	3	27	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi	85%	58,787,800		13,646,150		23,948,794		23,948,794

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	01	2.1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,759,000		-		2,746,000		2,746,000
	3	27	01	2.1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15,515,150	1 paket	200,000	2 paket	1,580,500	2 paket	1,580,500
	3	27	01	2.1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	3,200,000		-		405,000		405,000
	3	27	01	2.1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	1,206,000	2 dokumen	564,000	3 dokumen	846,000	3 dokumen	846,000
	3	27	01	2.1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1,353,400		-		-		-
	3	27	01	2.1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	33,754,250	3 laporan	12,882,150	4 laporan	18,371,294	4 laporan	18,371,294
	3	27	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi	85%	400,673,863		54,795,322		104,029,265		104,029,265
	3	27	01	2.1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	79,477,708	3 laporan	19,679,322	6 laporan	41,387,265	6 laporan	41,387,265
	3	27	01	2.1	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	21,510,000	1 laporan	2,365,000	1 laporan	7,965,000	1 laporan	7,965,000
	3	27	01	2.1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	299,686,155	1 laporan	32,751,000	1 laporan	54,677,000	1 laporan	54,677,000
	3	27	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam kondisi baik	90%	195,694,250		69,517,000		113,280,200		113,280,200
	3	27	01	2.1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	42,774,850	1 unit	4,009,500	1 unit	12,954,000	1 unit	12,954,000
	3	27	01	2.1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 unit	148,438,000	20 unit	65,507,500	35 unit	100,326,200	35 unit	100,326,200
	3	27	01	2.1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	4,481,400		-		-		-

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sesuai standar Persentase peningkatan kualitas produk pertanian	3% 3%	1,552,361,181		89,632,100		140,250,250		140,250,250
	3	27	02	2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menggunakan sarana produksi pertanian sesuai standar	25%	744,670,755		45,497,350		59,673,600		59,673,600
							Persentase penerapan teknologi pasca panen/ pengolahan hasil pertanian	25%							
	3	27	02	2	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 laporan	64,261,537	1 laporan	12,930,900	1 laporan	18,199,900	1 laporan	18,199,900
	3	27	02	2	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 laporan	303,269,990	1 laporan	23,106,950	1 laporan	26,767,200	1 laporan	26,767,200
	3	27	02	2	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk B iji/ Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	18 Ton	259,252,278		6,684,500		10,619,000		10,619,000
	3	27	02	2	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	2000 batang	117,886,950		2,775,000		4,087,500		4,087,500
	3	27	02	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Persentase benih/bibit bermutu yang disediakan (tanaman pangan) 2) Persentase benih/bibit bermutu yang disediakan (tanaman hortikultura) 3) Persentase benih/bibit bermutu yang disediakan (tanaman perkebunan)	20% 10% 20%	470,171,248		11,556,500		32,355,000		32,355,000
	3	27	02	2	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 dokumen	470,171,248	1 dokumen	11,556,500	1 dokumen	32,355,000	1 dokumen	32,355,000
	3	27	02	2		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase benih/bibit ternak dan pakan ternak yang diawasi mutunya	5%	51,805,276		10,049,000		12,683,500		12,683,500

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	02	2	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	2 laporan	51,805,276	1 laporan	10,049,000	1 laporan	12,683,500	1 laporan	12,683,500
	3	27	02	2.1		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan benih/bibit ternak dan pakan ternak	5%	23,169,680		7,168,250		9,802,750		9,802,750
	3	27	02	2.1	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	2 laporan	23,169,680	1 laporan	7,168,250	1 laporan	9,802,750	1 laporan	9,802,750
	3	27	02	2.1		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan populasi ternak	0.10%	262,544,222		15,361,000		25,735,400		25,735,400
	3	27	02	2.1	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	11 ekor	143,769,172		12,406,000		22,780,400		22,780,400
	3	27	02	2.1	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 dosis	118,775,050		2,955,000		2,955,000		2,955,000
III	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Persentase peningkatan prasarana pertanian yang berkondisi baik 2) Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi tingkat usaha tani	1% 66.73	2,967,377,687		62,180,900		181,401,106		181,401,106
	3	27	03	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Persentase penurunan alih fungsi lahan sawah 2) Persentase dokumen pengembangan prasarana pertanian yang terpenuhi	0.20% 33%	191,813,987		45,938,800		78,574,332		78,574,332
	3	27	03	2	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisas Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	41,776,650	1 laporan	8,386,600	1 laporan	13,724,600	1 laporan	13,724,600
	3	27	03	2	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 unit	109,822,337	2 unit	29,683,200	2 unit	49,745,200	2 unit	49,745,200

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	03	2	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	1 dokumen	40,215,000	1 dokumen	7,869,000	1 dokumen	15,104,532	1 dokumen	15,104,532
	3	27	03	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berkondisi baik	70%	2,775,563,700		16,242,100		102,826,774		102,826,774
	3	27	03	2	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 unit	2,629,341,600		15,235,000		101,819,674		101,819,674
	3	27	03	2	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 unit	146,222,100		1,007,100		1,007,100		1,007,100
IV	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular; 2) Persentase peningkatan kualitas produk hewan	2% 2%	285,426,730		58,815,490		113,659,492		113,659,492
	3	27	04	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang mengalami penurunan penyakit hewan	90%	65,670,400		11,817,140		38,156,142		38,156,142
	3	27	04	2	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan *Zoonosis* pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	8 wilayah	18,467,500	1 wilayah	6,268,000	3 wilayah	8,902,500	3 wilayah	8,902,500
	3	27	04	2	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3 laporan	47,202,900	3 laporan	5,549,140	3 laporan	29,253,642	3 laporan	29,253,642
	3	27	04	2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan	100%	2,213,400		-		-		-
	3	27	04	2	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	25 laporan	2,213,400		-		-		-

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	04	2		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan kesehatan hewan sesuai standar	75%	206,133,660		43,794,850		71,779,850		71,779,850
	3	27	04	2	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3 laporan	9,905,260	3 laporan	1,932,850	3 laporan	1,932,850	3 laporan	1,932,850
	3	27	04	2	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 laporan	196,228,400	3 laporan	41,862,000	3 laporan	69,847,000	3 laporan	69,847,000
	3	27	04	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terpenuhi	60%	8,298,470		2,466,000		2,686,000		2,686,000
	3	27	04	2	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 laporan	4,011,000	1 laporan	2,466,000	1 laporan	2,466,000	1 laporan	2,466,000
	3	27	04	2	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	5 unit usaha	4,287,470		-		220,000		220,000
	3	27	04	2.1		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terpenuhi	95%	3,110,800		737,500		1,037,500		1,037,500
	3	27	04	2.1	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	5 unit	3,110,800		737,500		1,037,500		1,037,500
V	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1) Persentase bencana pertanian yang tertangani (tanaman pangan) 2) Persentase bencana pertanian yang tertangani (tanaman hortikultura) 3) Persentase bencana pertanian yang tertangani (tanaman perkebunan)	80% 80% 80%	53,275,950		9,123,300		11,757,800		11,757,800
	3	27	05	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1) Persentase luas serangan OPT yang tertangani (tanaman pangan)	95%	53,275,950		9,123,300		11,757,800		11,757,800
							2) Persentase luas serangan OPT yang tertangani (tanaman hortikultura)	90%							
							3) Persentase luas serangan OPT yang tertangani (tanaman perkebunan)	80%							
							4) Persentase bencana pertanian lainnya yang tertangani	80%							
	3	27	05	2	0001	PengendalianOrganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha	49,268,950		8,417,800		11,052,300		11,052,300

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	05	2	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha	4,007,000		705,500		705,500		705,500
VI	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna	25%	1,182,840,590		185,884,900		314,983,400		314,983,400
	3	27	07	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*1)* Persentase petugas lapangan yang memiliki sertifikat pelatihan *2)* Persentase kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya *3)* Persentase petani yang ditingkatkan kapasitasnya	60% 60% 25%	1,182,840,590		185,884,900		314,983,400		314,983,400
	3	27	07	2	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 unit	832,162,800	8 unit	171,571,400	8 unit	296,730,900	8 unit	296,730,900
	3	27	07	2	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	62 unit	37,199,600	1 unit	4,580,000	2 unit	7,914,000	2 unit	7,914,000
	3	27	07	2	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 unit	52,453,460		4,239,000		4,239,000		4,239,000
	3	27	07	2	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	84 orang	242,706,000		-		-		-
	3	27	07	2	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 unit	7,798,730	1 unit	1,742,500	1 unit	1,742,500	1 unit	1,742,500
	3	27	07	2	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 unit	10,520,000		3,752,000		4,357,000		4,357,000

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan masyarakat yang masuk pada periode penyusunan perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini hampir sama dengan sebelum perubahan yang meliputi : bantuan benih/bibit, ternak, alat mesin pertanian, prasarana pertanian, dan bimbingan teknis/ pelatihan. Usulan yang masuk tersebut disesuaikan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di bidang pertanian dengan memperhatikan kesesuaian wewenang, persyaratan secara administratif dan teknis.

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran tahun 2025, maka usulan kegiatan masyarakat yang masuk sebelum anggaran perubahan tahun 2025 dan sudah dialokasikan pada DPA awal, ada yang diubah dan dibatalkan pelaksanaannya. Semetara untuk usulan yang masuk pada periode perubahan ini akan diakomodir sepanjang ada penambahan alokasi anggaran untuk usulan terkait pada Dinas Pertanian.

Rekap usulan kegiatan masyarakat yang masuk ke Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung untuk penganggaran tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 bertujuan untuk menjawab berbagai isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yang diharapkan dapat mengatasi kendala dan hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sektor pertanian di Kabupaten Sijunjung.

Sasaran utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai dengan isu strategis adalah : 1) Meningkatnya produksi komoditas pertanian, 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, 3) Meningkatnya akuntabilitas organisasi Dinas Pertanian

3.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Dinas dan RPJMD 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Sijunjung terpilih. Visi dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026 adalah : “Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani” dengan rumusan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK).
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Dinas Pertanian merupakan salah satu perangkat daerah yang turut menunjang pencapaian misi 1, 2, dan 4. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, pada tahun 2025 ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 terjadi pengurangan jumlah sub kegiatan dan munculnya sub kegiatan baru. Pengurangan sub kegiatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran sehingga beberapa sub kegiatan dinolkan anggarannya, sementara untuk sub kegiatan yang muncul baru karena adanya alokasi anggaran DAK Non Fisik untuk BOP Penyuluh.

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan pada Perubahan Renja Tahun 2025 adalah : 6 program dan 47 sub kegiatan. Disamping perubahan pagu anggaran, perubahan dalam Renja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2025 juga menyebabkan adanya perubahan indikator dan target kinerja untuk penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.

Anggaran pada Renja Perubahan Tahun 2024 untuk seluruh program adalah sebesar Rp. 20.623.673.332,- sesuai dengan pagu anggaran setelah efisiensi anggaran. Namun demikian dalam prosesnya, pagu masih sangat mungkin berubah sesuai dengan kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD dan hasil evaluasi gubernur.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan capaian renja sampai dengan triwulan II tahun 2025. Perubahan Renja juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, sehingga terdapat perubahan kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggarannya.

Secara lebih rinci, Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL 4.1. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SIJUNJUNG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (7-9)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PERTANIAN				**20.676.217.188,00**	**26.509.038.371,00**	**20.623.673.332,00**	**-52.543.856,00**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**20.676.217.188,00**	**26.509.038.371,00**	**20.623.673.332,00**	**-52.543.856,00**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**20.676.217.188,00**	**26.509.038.371,00**	**20.623.673.332,00**	**-52.543.856,00**
1	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pencapaian Komponen Akuntabilitas Kinerja**	**3.2 Index 71 Index 72 Index 76 Persen**	**76 Persen**	**13.825.041.188,00**	**14.834.679.780,00**	**14.582.391.094,00**	**-145.000.000,00**
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu*	85 Persen	95 Persen	95.476.000,00	123.471.675,00	69.264.435,00	-26.211.565,00
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	95 Persen	85 Persen				
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	56.625.250,00	21.765.685,00	-3.234.315,00
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan	61.476.000,00	66.846.425,00	47.498.750,00	-13.977.250,00
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Hasil Audit Keuangan yang ditindaklanjuti Persentase Pengelolaan Keuangan yang Tertangani Tepat Waktu*	95 Persen	95 Persen 95 Persen	12.650.919.551,00	13.851.386.046,00	13.842.837.146,00	1.191.917.595,00
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 orang/ bulan	125 orang/ bulan	12.575.067.551,00	13.781.597.546,00	13.781.597.546,00	1.206.529.995,00
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	84 Dokumen	49 Dokumen	71.352.000,00	69.788.500,00	61.239.600,00	-10.112.400,00
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan administrasi barang milik daerah pada OPD*	100 Persen	100 Persen	20.938.000,00	18.204.500,00	15.133.600,00	-5.804.400,00
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	2.692.000,00	1.248.800,00	-2.251.200,00
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.938.000,00	15.512.500,00	13.884.800,00	-2.053.200,00
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang terkelola*	100 Persen	0 Persen	3.500.000,00	3.148.000,00	0,00	-3.500.000,00
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	3.148.000,00	0,00	-3.500.000,00
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu*	100 Persen	0 Persen	78.500.000,00	5.000.000,00	0,00	-78.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	64.000.000,00	0,00	0,00	-64.000.000,00
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0 Orang	7.500.000,00	5.000.000,00	0,00	-7.500.000,00
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*	85 Persen	85 Persen	207.252.787,00	132.735.550,00	58.787.800,00	-148.464.987,00
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	7.811.000,00	3.759.000,00	-1.241.000,00
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.809.700,00	15.515.150,00	-19.484.850,00
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	3.200.000,00	-4.800.000,00
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6 Dokumen	3.972.000,00	3.972.000,00	1.206.000,00	-2.766.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.504.600,00	1.353.400,00	-3.646.600,00
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.280.787,00	72.638.250,00	33.754.250,00	-116.526.537,00
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi*	85 Persen	85 Persen	494.742.000,00	478.996.559,00	400.673.863,00	-94.068.137,00
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	153.000.000,00	139.682.404,00	79.477.708,00	-73.522.292,00
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.520.000,00	21.510.000,00	-13.490.000,00
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	306.742.000,00	303.794.155,00	299.686.155,00	-7.055.845,00
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase aset OPD dalam kondisi baik*	90 Persen	90 Persen	273.712.850,00	221.737.450,00	195.694.250,00	-78.018.600,00
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.774.850,00	46.274.850,00	42.774.850,00	0,00
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	61 Unit	210.938.000,00	170.438.000,00	148.438.000,00	-62.500.000,00
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	5.024.600,00	4.481.400,00	-15.518.600,00
2	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan kualitas produk pertanian** **Persentase peningkatan pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sesuai standar**	**1 Persen**	**3 Persen** **3 Persen**	**1.468.014.000,00**	**2.363.055.024,00**	**1.552.361.181,00**	**-104.282.000,00**
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase kelompok tani yang menggunakan sarana produksi pertanian sesuai standar* *Persentase penerapan teknologi pasca panen/pengolahan hasil pertanian*	25 Persen 2 Persen	58.50 Persen 7.2 Persen	676.128.000,00	1.267.767.469,00	744.670.755,00	68.542.755,00
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	3 Laporan	106.476.000,00	89.207.135,00	64.261.537,00	-42.214.463,00
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	3 Laporan	233.176.000,00	717.301.300,00	303.269.990,00	70.093.990,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih							
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	18 Ton	12 Ton	190.738.000,00	292.190.100,00	259.252.278,00	68.514.278,00
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan							
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1 Laporan	0 Laporan	7.500.000,00	6.188.704,00	0,00	-7.500.000,00
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan							
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	8 Laporan	0 Laporan	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.500.000,00
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura							
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	6.299.080,00	0,00	-5.000.000,00
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang							
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	2000 Batang	2000 Batang	115.738.000,00	142.581.150,00	117.886.950,00	2.148.950,00
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang							
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	200 Batang	0 Batang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan							
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	8 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase benih/bibit bermutu yang disediakan (tanaman hortikultura)*	10 Persen	10 Persen	468.914.000,00	677.800.750,00	470.171.248,00	1.257.248,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase benih/bibit bermutu yang disediakan (tanaman pangan) *Persentase benih/bibit bermutu yang disediakan (tanaman perkebunan)*	20 Persen	8.17 Persen 20 Persen				
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	2 Dokumen	458.914.000,00	677.800.750,00	320.171.248,00	138.742.752,00
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman							
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase benih/bibit ternak dan pakan ternak yang diawasi mutunya*	5 Persen	7 Persen	25.738.000,00	85.266.540,00	51.805.276,00	26.067.276,00
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil							
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	21 Laporan	25.738.000,00	85.266.540,00	51.805.276,00	26.067.276,00
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan benih/bibit ternak dan pakan ternak*	5 Persen	5 Persen	88.020.000,00	32.002.200,00	23.169.680,00	-64.850.320,00
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan							
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak							
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	0 Laporan	57.282.000,00	0,00	0,00	-57.282.000,00
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	2 Laporan	14 Laporan	25.738.000,00	32.002.200,00	23.169.680,00	-2.568.320,00
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase peningkatan populasi ternak*	0.1 Persen	5 Persen	209.214.000,00	300.218.065,00	262.544.222,00	53.330.222,00
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	50 Ekor	11 Ekor	57.214.000,00	154.098.065,00	143.769.172,00	86.555.172,00
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Dosis	2080 Dosis	152.000.000,00	146.120.000,00	118.775.050,00	-33.224.950,00
3	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan prasarana pertanian yang berkondisi baik** **Persentase luas sawah yang mendapat layanan irigasi tingkat usaha tani**	**1** **66.73 Persen** **Persen**	**1 Persen** **66.73 Persen**	**3.350.202.000,00**	**7.541.159.342,00**	**2.967.377.687,00**	**0,00**
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase dokumen pengembangan prasarana pertanian yang terpenuhi* *Persentase penurunan alih fungsi lahan sawah*	0.2 Persen 1 Persen	33 Persen -	565.202.000,00	247.159.342,00	191.813.987,00	-373.388.013,00
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	51.476.000,00	49.527.000,00	41.776.650,00	-9.699.350,00
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian							
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	100 Ha	0 Ha	140.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-140.000.000,00
	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan							
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit	167.250.000,00	141.356.342,00	109.822.337,00	-57.427.663,00
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota							
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	12 Dokumen	56.476.000,00	51.276.000,00	40.215.000,00	-16.261.000,00
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian							
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	150000.000,00	00,00
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang berkondisi baik*	70 Persen	70 Persen	2.775.000.000,00	7.294.000.000,00	2.775.563.700,00	563.700,00
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit	16 Unit	2.325.000.000,00	6.949.000.100,00	2.629.341.600,00	304.341.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit							
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya							
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	150.000.000,00	244.999.900,00	146.222.100,00	-3.777.900,00
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan							
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase wilayah sumber bibit dan rumpun/galur ternak yang terkelola*	100 Persen	0 Persen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	*Persentase peningkatan lahan penggembalaan umum yang dikembangkan*	0 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum							
			Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular** **Persentase peningkatan kualitas produk hewan**	**10** **80 Persen Persen**	**2 Prsen** **1.2 Persen**	**464.956.000,00**	**371.365.450,00**	**285.426.730,00**	**-50.000.000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase wilayah yang mengalami penurunan penyakit hewan*	90 Persen	75 Persen	60.676.000,00	82.805.000,00	65.670.400,00	4.994.400,00
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis							
			Jumlah kader zoonosis	50 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan							
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	8 Wilayah	3 Wilayah	25.738.000,00	22.938.000,00	18.467.500,00	-7.270.500,00
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan							
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	3 Kasus	0 Kasus	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3 Laporan	10 Laporan	22.438.000,00	59.867.000,00	47.202.900,00	24.764.900,00
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan*	100 Persen	100 Persen	7.500.000,00	6.750.000,00	2.213.400,00	-5.286.600,00
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)							
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	25 laporan	12 laporan	7.500.000,00	6.750.000,00	2.213.400,00	-5.286.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan sesuai standar*	75 Persen	7 Persen	309.280.000,00	259.227.400,00	206.133.660,00	-103.146.340,00
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium							
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	13.831.400,00	9.905.260,00	-94.740,00
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan	27 Laporan	299.280.000,00	245.396.000,00	196.228.400,00	-103.051.600,00
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terpenuhi*	60 Persen	60 Persen	80.000.000,00	18.006.050,00	8.648.470,00	-71.351.530,00
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	16 laporan	7.500.000,00	11.250.000,00	4.536.900,00	-2.963.100,00
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan							
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	8 Unit Usaha	0 Unit Usaha	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)							
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/ SKPH HPM	5 Dokumen	0 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan							
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	50 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan							
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	5 Unit Usaha	3 Unit Usaha	5.000.000,00	6.756.050,00	4.111.570,00	-888.430,00
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	*Persentase persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terpenuhi*	95 Persen	70 Persen	7.500.000,00	4.577.000,00	2.760.800,00	-4.739.200,00
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha							
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	5 Unit	4 Unit	7.500.000,00	4.577.000,00	2.760.800,00	-4.739.200,00
5	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase bencana pertanian yang tertangani (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura)**	**80 Persen**	**80 Persen**	**179.738.000,00**	**141.734.950,00**	**53.276.050,00**	**0,00**
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*1) Persentase luas serangan OPT yang tertangani (tanaman perkebunan)*	80 Persen	80 Persen	179.738.000,00	141.734.950,00	53.276.050,00	-126.461.950,00
			2) Persentase luas serangan OPT yang tertangani (tanaman pangan)	95 Persen	95 Persen				
			3) Persentase bencana pertanian lainnya yang tertangani						
			4) Persentase luas serangan OPT yang tertangani (tanaman hortikultura)	90 Persen	90 Persen				
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha	300 Ha	105.738.000,00	85.532.150,00	49.269.050,00	-56.468.950,00
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha	100 Ha	20.000.000,00	9.042.800,00	4.007.000,00	-15.993.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	8 Laporan	0 Laporan	54.000.000,00	47.160.000,00	0,00	-54.000.000,00
6	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna**	**25 Persen**	**25 Persen**	**1.388.266.000,00**	**1.257.043.825,00**	**1.182.840.590,00**	**0,00**
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*1) Persentase petani yang ditingkatkan kapasitasnya* *2) Persentase kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya* *3) Persentase petugas lapangan yang memiliki sertifikat pelatihan teknis*	25 Persen 60 Persen	25 Persen 37.50 Persen 37.50 Persen	1.388.266.000,00	1.257.043.825,00	1.182.840.590,00	-205.425.410,00
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	8 Unit	1.088.766.000,00	1.031.670.500,00	832.162.800,00	-256.603.200,00
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	62 Unit	35 Unit	147.000.000,00	82.381.500,00	37.199.600,00	-109.800.400,00
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit	0 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota							
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	2 Unit	45.000.000,00	100.000.000,00	52.453.460,00	7.453.460,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian							
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	84 Orang	80 Orang	21.500.000,00	0,00	242.706.000,00	221.206.000,00
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota							
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	17.991.825,00	7.798.730,00	-27.201.270,00
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani							
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	10.520.000,00	-14.480.000,00
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian							
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	8 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
	J U M L A H					**20.676.217.188,00**	**26.509.038.371,00**	**20.623.673.332,00**	**32.789.731.017,30**

V. PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan demikian secara substansial, Renja bersinergis dengan ketentuan pokok yang termuat dalam kedua dokumen tersebut.

Perubahan Renja ini memuat tentang upaya pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

Catatan penting dalam penyusunan rencana tindak lanjut penjabaran perubahan renja adalah terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (Perubahan RKA). Dalam penyusunan Perubahan RKA, yang perlu diperhatikan adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas dalam pencapaian target strategis pemda maupun dinas.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 menjadi dokumen acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan/penganggaran selanjutnya serta dalam pelaksanaan program/kegiatan.
2. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dalam pelaksanaannya diarahkan capaian indikatornya secara sinergis melalui pembiayaan dari berbagai sumber, baik dana APBN, APBD provinsi, serta APBD kabupaten.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan, maka pada tahapan selanjutnya Perubahan Renja ini dijabarkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (Perubahan RKA).

Pencapaian target kinerja secara optimal dapat dilakukan dengan memperhatikan setiap langkah pelaksanaan melalui persiapan dan perencanaan yang matang, serta memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dari semua pemangku kepentingan terkait.

Muaro Sijunjung, 31 Juli 2025
Dinas Pertanian/
Kabupaten Sijunjung,

Ir. Ronaldi
NIP. 19680508 199303 1 006

V. PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan demikian secara substansial, Renja bersinergis dengan ketentuan pokok yang termuat dalam kedua dokumen tersebut.

Perubahan Renja ini memuat tentang upaya pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

Catatan penting dalam penyusunan rencana tindak lanjut penjabaran perubahan renja adalah terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (Perubahan RKA). Dalam penyusunan Perubahan RKA, yang perlu diperhatikan adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas dalam pencapaian target strategis pemda maupun dinas.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 menjadi dokumen acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan/penganggaran selanjutnya serta dalam pelaksanaan program/kegiatan.
2. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dalam pelaksanaannya diarahkan capaian indikatornya secara sinergis melalui pembiayaan dari berbagai sumber, baik dana APBN, APBD provinsi, serta APBD kabupaten.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan, maka pada tahapan selanjutnya Perubahan Renja ini dijabarkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (Perubahan RKA).

Pencapaian target kinerja secara optimal dapat dilakukan dengan memperhatikan setiap langkah pelaksanaan melalui persiapan dan perencanaan yang matang, serta memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dari semua pemangku kepentingan terkait.

Muaro Sijunjung, 31 Juli 2025
Dinas Pertanian/
Kabupaten Sijunjung,

Ir. Ronaldi
19680508 199303 1 006

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.

Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 memuat penjabaran program dan

kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Renja Perubahan yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 30 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sijunjung

PUJI BASUKI, SP, MMA
NIP 19731206 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang ……. 1
1.2 Landasan Hukum…….. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ……. 5
1.4 Sistematika Penulisan …….. 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensra perangkat daerah …….. 11
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …….. 63
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …….. 66

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……. 71
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …….. 71
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah …….…… 74
3.3 Program dan Kegiatan ……... 82

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAKAT DAERAH ……..…. 84
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN…… 102
5.1 Indikator Kinerja Utama ……. 102
5.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil……. …….…… 105

BAB V PENUTUP …… 110

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD dibuat berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perubahan SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 telah diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

Proses penyusunan Renja Perubahan SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan Perubahan RKPD.

Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan Perubahan RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perubahan SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
c. Penyusunan Renja Perubahan SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perubahan SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

Keterkaitan Renja Perubahan SKPD dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perubahan SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan anggaran yaitu disusun berdasarkan pada RKPD Perubahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang kemudian diturunkan menjadi KUA-PPAS Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Kemendikbud Tahun 2020-2024, RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026, diharapkan penyusunan Renja Perubahan 2025 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan ini mampu menyelesaikan persoalan pendidikan kebudayaan secara bertahap di Kabupaten Sijunjung.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

r. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Sijunjung;

s. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangtkat Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program - program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten Sijunjung, APBN dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung adalah :

a) Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung;

b) Memberikan pedoman, acuan dan referensi dalam menyusun program kerja pembangunan di bidang

pendidikan dan Kebudayaan yang lebih rinci dan berjangka pendek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.

c) Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025 bagi bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikuthya dapat dipahami dengtan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB ll HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Triwulan I Sampai Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan I sampai triwulan IV. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksud mengacu pada hasil laporan kinerja Prangkat Daerah dan/atau realisasi triwulan APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai akhir tahun 2024.
2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4) Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs *(Suistananle Development Goals)*.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB lll. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelsan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menajadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah misal :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian SDGs,
   c. Pengentasan kemiskinan,
   d. Pencapaian NSPK dan SPM,
   e. Penanggulangan Pandemi Covid-19,
   f. Penguatan terhadap sector pertanian, pariwisata, UMKM dan perdagangan,
   g. Dsb.
2. Uraian tugas besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, sub kegiatan antara lain meliputi :
   a. Jumlah program, kegiatan/sub kegiatan.
   b. Jumlah target Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan.
   c. Jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan baru
   d. Jumlah program dan jumlah kegiatan/sub kegiatan yang mendukung untuk pemulihan ekonomi, Pandemi Covid-19.
   e. Jumlah program dan jumlah kegiatan/sub kegiatan yang mendukung sekrot pertanian, pariwisata, UMKM dan perdagangan.

f. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja bidang urusan yang merupakan gambaran dari keberhasilan Perangkat Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan bidang yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Capaian kinerja dengan indikator masing-masing bidang urusan Perangkat Daerah. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan disajikan dalam bentuk indikator kinerja kunci utama dan kinerja kunci hasil.

BAB VI PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c) Rencana tindak lanjut.
d) Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I sampai Triwulan II

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung telah merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 7 Program, 19 Kegiatan dan 84 Sub Kegiatan.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung sampai dengan triwulan II Tahun 2025, Pagu anggaran mengalami pergeseran dari pagu awal sebesar Rp. 389.035.965.271,- menjadi sebesar Rp. 391.171.507.859,-. Penambahan anggaran berasal dari DAU Peruntukan Bidang Pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan pada triwulan kedua sehingga total capaian kinerja fisik Triwulan Kedua (TW-II) Tahun 2025 sebesar 77,70%.

Secara rinci alokasi perubahan anggaran tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dibawah ini :

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI BULAN JULI 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan (intermediate outcome), sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra PD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang di evaluasi		Realisasi Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	
									I		II							
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10=5+6		11=10/5x100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase kondisi bangunan baik satuan pendidikan SD**	75,00	**135.941.418.643**	60,00	**36.320.194.684**	65,00	**16.460.496.750**		**111.336.511**		**419.306.960**	0	**530.643.471**	**00:00**	**52.780.691.434**	**208,33**	**145,32**
		Persentase kondisi bangunan baik satuan pendidikan SMP	85,00		75,00		80,00						0		**00:00**		**206,67**	

		Persentase kondisi bangunan Baik satuan pendidikan PAUD	98,90		88,64		90,41						0		**01:12**		202,00	
		Persentase kondisi bangunan baik satuan pendidikan non formal/kesetaraan	100		92,31		100						0		**192**		208,33	
		Persentase Satuan Pendidikan SD yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	75		62		65						0		**127**		204,84	
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	100		90		95						0		**185**		205,56	
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	100		100		100						0		**200**		200,00	
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga	100		84,62		92,31											

		Kependidikan															
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase SD yang terpenuhi sarpras sesuai standar**	45,00	**85.291.080.573**	30,37	**17.251.006.906**	35,00	**5.702.590.100**		**38.027.550**		**366.354.260**	0	**404.381.810**	**65**	**22.953.597.006**	215,25	**133,06**
		Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terpenuhi kebutuhan GTK	133		127		129						0		**256**		201,57	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	47	5.512.490.316	2	103.934.500	1	35.000.000	0	0	1	323.304.260	1	323.304.260	3	5.616.424.816	150,00	**5403,81**
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	14	4.820.014.279	2	240.034.300	1	-	0		0		0	-	3	5.060.048.579	150,00	**2108,05**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	93	16.103.217.323	34	5.250.451.309	36	2.806.278.000	0	12.821.950	0		0	12.821.950	70	21.353.668.632	205,88	**406,70**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	5	642.032.855	2	173.940.250	4	-	0	0	0		0	-	6	815.973.105	300,00	**469,11**

	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	72	2.801.940.500	14	1.522.810.000	11	293.250.000	0		0		0	-	25	4.324.750.500	178,57	**284,00**
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	283	35.981.742.600	14	845.364.100	13	316.062.100	0	0	0		0	-	27	36.827.106.700	192,86	**4356,36**
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13380	19.429.642.700	2230	753.800.397	6	827.000.000	0	25.205.600	0	43.050.000	0	68.255.600	2.236	20.183.443.097	100,27	**2677,56**
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun	44	12.800.380.640	4	655.728.050	0	-	0	0	0		0	-	4	13.456.108.690	100,00	**2052,09**
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16	4.518.044.237	5	1.089.064.000	3	260.000.000										
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhab Sedang/Berat	19	1.723.578.730	15	1.348.033.750	19	560.000.000										

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	60	7.416.357.233	48	5.267.846.250	15	605.000.000										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Rasio Sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah jenjang SMP**	**1:200**	**28.532.442.370**	**1:172**	**9.512.235.628**	**1:200**	**2.495.441.800**		**31.844.900**		**-**	0	**31.844.900**	**0**	**12.007.677.428**	212,07	**126,23**
		Persentase kondisi bangunan sekolah baik jenjang SMP	**75,00**		**87**		**75,00**						0		**162**		186,21	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	3.300.598.720	3	596.442.430	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	0	**-**	**3**	596.442.430	100,00	**100,00**
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	1.900.000.000	1	251.418.334	3	-	0	0	0	-	0	-	4	251.418.334	400,00	**100,00**
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	3.120.000.000,00	1	210.796.346	3	-	0	0	0	-	0	-	4	210.796.346	400,00	**100,00**
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	1.900.000.000	3	1.086.132.805	1	-	0	0	0	-	0	-	4	1.086.132.805	133,33	**100,00**
	pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun			1	187.870.000						-						

	Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	4.702.212.300,00	4	2.640.281.171	9	443.330.500	0	5.819.900	0	-	0	5.819.900	13	3.083.611.671	325,00	**116,79**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	7.874.475.350,00	8	933.468.194	1	208.760.800	0	0	0	-	0	-	9	1.142.228.994	112,50	**122,36**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	383.232.100,00	1	185.212.732	1	-	0	0	0	-	0	-	2	185.212.732	200,00	**100,00**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	421.356.100,00	1	251.310.394	1	-	0	0	0	-	0	-	2	251.310.394	200,00	**100,00**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	2.770.567.800,00	3	957.123.364	4	94.563.000	0	0	0	-	0	-	7	1.051.686.364	233,33	**109,88**
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	2.160.000.000,00	28	913.093.000	1	259.128.000	0	0	0	-	0	-	29	1.172.221.000	103,57	**128,38**
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	17	2.655.000.000,00	17	435.897.100	2	612.207.500	0	0	0	-	24	-	19	1.048.104.600	111,76	**240,45**

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama			769	863.189.758	5	877.452.000		26.025.000		-						
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Rasio Sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah PAUD**	**1:23**	**20.820.167.600**	1:22	**8.795.294.850**	**1:23**	**7.650.264.850**		**29.864.061**		**36.034.700**	0	**65.898.761**	**0**	**16.445.559.700**	100,00	**186,98**
		Persentase kondisi bangunan sekolah baik PAUD	**80**		75,5		**80**						0		**76**		100,00	**#DIV/0!**
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	15	11.610.426.200					0		0		0	-	-	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	15	5.673.813.400	12	1.344.568.280	19	872.000.000	0	10.864.850	0	21.581.040	0	32.445.890	31	2.216.568.280	258,33	**164,85**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4	529.440.300												

	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	21	600.000.000	32	99.979.000			**0**		0		0	-	32	99.979.000	100,00	**100,00**
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			6	981.475.520												
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	30	2.935.928.000	**3**	241.500.000	6	649.944.000	**0**		4		4	-	9	891.444.000	300,00	**369,13**
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1335	33.473.259.600	669	5.598.331.750	**681**	5.740.320.850	**296**	18.999.211	**296**	57.500	**296**	19.056.711	1.350	11.338.652.600	201,79	**202,54**
	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					**4**	388.000.000				14.396.160		14.396.160				
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Rasio Lembaga terhadap jumlah usia anak sekolah Non Formal/Kesetaraan**	**1:128**	**1.297.728.100**	**1:225**	**761.657.300**	**1:128**	**612.200.000**		**11.600.000**		**16.918.000**	0	**28.518.000**	**0**	**1.373.857.300**	100,00	**180,38**

		Persentase kondisi bangunan sekolah baik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**45**		**40**		**45**						0		**85**		212,50	
		Persentase peningkatan sarpras pendidikan non formal/kesetaraan	**50**		**50**		**50**						0		**100**	-	200,00	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3	1.297.728.100	1	157.678.200	**0**	0	0	0	0	-	0	-	1	157.678.200	100,00	**100,00**
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada satuan pendidikan non formal/kesetaraan	145	300.000.000	164	228.200.000	648	262.200.000	0	11.600.000	0	4.400.000	0	16.000.000	164	244.200.000	100,00	**107,01**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab			3	276.156.100								-				
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan			**1**	99.623.000	**1**	20.000.000						-				

	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Nonformal	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas pendidikan non formal yang telah dibangun					**3**	330.000.000				12.518.000		12.518.000				
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD**	**20**	**226.597.691.900**	**1,8**	**51.099.388.989**	**20**	**50.807.832.100**		**224.609.199**		**49.399.125**	0	**274.008.324**	**22**	**101.907.221.089**	1211,11	**199,43**
		Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	**65**		**1,86**		**65**						0		**67**		3594,62	
		Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	**20**		**1,58**		**20**						0		**22**		1365,82	
		Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	**65**		**1,7**		**65**						0		**67**		3923,53	

		Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik jenjang SD	**20**		**2,12**		**20**						0		**22**		1043,40	
		Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik jenjang SMP	**75**		**2,08**		**75**						0		**77**		3705,77	
		Jumlah sekolah terakreditasi jenjang SD	**208**		**206**		**208**						0		**414**		200,97	
		Jumlah sekolah terakreditasi jenjang SMP	**54**		**52**		**54**						0		**106**		203,85	
		Jumlah sekolah terakreditasi jenjang PAUD	**294**		**331**		**294**						0		**625**		188,82	
		Jumlah sekolah yang memenuhi SNP jenjang SD	**80**		**76**		**80**						0		**156**		205,26	
		Jumlah sekolah yang memenuhi SNP jenjang SMP	**15**		**10**		**15**						0		**25**		250,00	
		Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi SD	**67**		**37**		**67**						0		**104**		281,08	

		Jumlah Sekolag yang menerapkan teknologi Informasi SMP	**5**		**4**		**5**						0		**9**		225,00	
		Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**35**				**35**						0		**35**		#DIV/0!	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD**	**20**	**147.172.166.600**	**1,8**	**29.614.921.536**	**20**	**28.432.250.000**		**22.424.220**		**8.441.800**	0	**26.034.800**	**22**	**58.047.171.536**	1211,11	**196,01**
		Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	**20**		**1,58**		**20**						0		**22**	-	1365,82	
		Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	**75**		**2,12**		**75**				-		0		**77**	-	3637,74	
		Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	**208**		**206**		**208**						0		**414**	-	200,97	

		Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	**80**		**76**		**80**						0		**156**	-	205,26	
		Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	**67**		**37**		**67**						0		**104**	-	281,08	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	5.550.000.000	3040	811.310.700	**3040**	833.000.000	0	0	0	1.677.500	0	1.677.500	**6.080**		200,00	**0,00**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	211	869.500.000	2000	803.107.600	2000	832.700.000	0	400.000	0	-	0	400.000	**4.000**	803.507.600	200,00	**100,05**
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	203	1.817.826.600	217	30.046.050	217	55.517.500	212		212		424	-	434	85.563.550	200,00	**284,77**
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	8	4.045.000.000	123	325.868.720	243	284.300.000	0	1.636.750	0	1.921.250	0	3.558.000	366	610.168.720	297,56	**187,24**

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	45	7.750.000.000	570	704.704.475	157	395.250.950		1.615.000		2.664.300	0	4.279.300	727	1.099.955.425	127,54	**156,09**
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah			217	117.103.500	75	150.300.000		990.000		1.908.750						
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	203	126.229.840.000	217	26.530.544.972	217	25.479.740.000					0	-	434	52.010.284.972	200,00	**196,04**
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	203	910.000.000	0	60.014.869	217	89.792.350		15.850.000		270.000	0	16.120.000	217	149.807.219	#DIV/0!	**249,62**
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan			50	91.653.800	75	96.377.700										

	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi			4	77.222.450	8	122.659.200		1.932.470								
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			1	63.344.400	1	92.612.300										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP**	60	**33.252.375.300**	1,86	**12.742.008.160**	60	**13.402.259.150**		**29.135.979**		**-**	0	**24.953.479**	**62**	**26.144.267.310**	3325,81	**205,18**
		Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	65		1,7		65						0		**67**	**-**	3923,53	
		Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	75		2,08		75						0		**77**	**-**	3705,77	

		Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	54		52		54						0		**106**	-	203,85	
		Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	15		10		15						0		**25**	-	250,00	
		Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	5		4		5						0		**9**	-	225,00	
	Pengadaan Perlengkapan Didik	Jumlah Perlengkapan Didik yang Tersedia	200	1.258.000.000,00	640	217.348.100	1583	600.000.000	0	0	0		0	-	2.223	817.348.100	347,34	**376,05**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	67	100.000.000	878	439.000.000	896	449.179.000	0	0	0		0	-	1.774	888.179.000	202,05	**202,32**
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1500	5.187.575.300	9130	30.138.200	9192	85.000.000	720	1.879.000	720		720	1.879.000	18.322	115.138.200	200,68	**382,03**
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10	1.560.000.000	95	303.878.310	20	269.707.350	0	3.017.150	0		0	3.017.150	115	573.585.660	121,05	**188,76**

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	528	4.000.000.000	55	225.834.310	168	315.000.100		18.288.079			0	18.288.079	223	540.834.410	405,45	**239,48**
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pembinaan			55	87.016.625	56	95.000.200										
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54	10.573.400.000	55	11.104.706.415	56	11.121.800.000	54	0	54		54	-	111	22.226.506.415	201,82	**200,15**
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54	10.573.400.000	56	66.711.700	56	87.925.000	54	1.769.250	54		108	1.769.250	112	154.636.700	200,00	**231,80**
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan			56	89.009.750	56	98.047.500										

	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi			15	89.310.700	23	150.000.000		4.182.500								
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			1	89.054.050	1	130.600.000										
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase PAUD terakreditasi**	**60,12**	**35.461.400.000**	**66,6**	**6.114.985.635**	**60,12**	**5.855.506.500**		**101.504.350**		**19.792.325**	0	**108.029.350**	**127**	**11.970.492.135**	190,27	**195,76**
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik			200	99.550.850	300	150.000.250		**3.037.500**		3.102.050		6.139.550				
	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75	3.900.000.000	750	860.682.840	125	334.993.300	1328	5.801.100	1328		1328	5.801.100	875	1.195.676.140	116,67	**138,92**

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen			20	45.153.650	354	75.000.000		6.745.550		6.521.775						
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	**301**	7.561.400.000			1000	40.043.500	0	11.272.000	0	3.813.750	0	15.085.750	1.000	40.043.500	#DIV/0!	**#DIV/0!**
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	362	24.000.000.000	354	5.009.703.745		5.017.200.000	354		354		354	-	354	10.026.903.745	100,00	**200,15**
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi					16	46.035.800				2.493.450		2.493.450				
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					2	42.233.450		24.830.200		725.000		25.555.200				
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				450	99.894.550	570	150.000.200	######	49.818.000		3.136.300		52.954.300				
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	35	**10.711.750.000**		**2.627.473.658**	35	**3.117.816.450**	0	**71.544.650**		**21.165.000**	0	**92.709.650**	**35**	**5.745.290.108**	#DIV/0!	**218,66**

		Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	81,82		**64**		81,82		0				0		**146**		227,84	**#DIV/0!**
	Penyelenggaraan Proses belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	9	5.031.750.000	11	172.073.758	0	133.830.550	2695	16.116.550	2695	5.455.000	2695	21.571.550	2.706	193.645.308	246000,00	**112,54**
	Penyediaan Biaya Personil peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik nonformal/kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik			164	100.000.000	212	124.000.000										
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9	100.000.000	11	103.486.500	11	153.704.400	0	910.000	5	4.500.000	5	5.410.000	16	108.896.500	145,45	**105,23**
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90	1.680.000.000	128	164.380.400	130	147.881.400	0	-	0	-	0	-	128	164.380.400	100,00	**100,00**

	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12	3.900.000.000	11	1.989.387.000	145	2.205.700.000	145				145	-	156	1.989.387.000	1418,18	**100,00**
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan					24	43.382.600		6.299.400				6.299.400				
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					2	48.279.400		18.605.600		1.710.000		20.315.600				
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			500	98.146.000	335	261.038.100		29.613.100		9.500.000		39.113.100				
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase PTK bersertifikat Profesi**	40,00	**1.393.755.424**		**52.504.790**	40,00	**59.999.900**		**1.055.050**		**-**	0	**1.055.050**	**40**	**112.504.690**	#DIV/0!	**214,28**
		Rasio Guru Terhadap Murid	01:15		01:25		01:15		0	0			0		**0**		188,24	

		Rasio Guru Terhadap Rombel	1:1		1:1		1:1		0	0			0		**0**		200,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	**Persentase Kebutuhan PTK**	60	**1.393.755.424**		**52.504.790**	60	**59.999.900**	0	**1.055.050**		**-**	0	**1.055.050**	**60**	**112.504.690**	#DIV/0!	**214,28**
	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1.393.755.424	1	52.504.790	1	59.999.900	0	1.055.050	2	-	2	1.055.050	**3**	53.559.840	300,00	**102,01**
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase warisan budaya yang dikelola**	97,59	**2.830.000.000**	0	**1.068.152.029**	85,58	**2.962.092.900**		**142.186.000**		**181.995.000**	0	**324.181.000**	-	1.392.333.029	#DIV/0!	**130,35**

	Pengelolaan Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		10	**830.000.000**	0	**219.509.329**	10	**120.239.900**		**1.495.000**		**-**	0	**1.495.000**	-	221.004.329	#DIV/0!	**100,68**
	Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebuayaam		100	830.000.000	10	219.509.329	275	120.239.900	0	1.495.000	50	-	50	1.495.000	**285**	339.749.229	2850,00	**154,78**
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	10	**830.000.000**	0	**280.596.650**	10	**150.000.000**		**-**		**-**	0	**-**	-	280.596.650	#DIV/0!	**100,00**
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100	830.000.000	1	280.596.650	1	150.000.000	0		50	-	50	-	**2**	430.596.650	200,00	**153,46**

	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	10	**830.000.000**	0	**568.046.050**	10	**2.691.853.000**		**140.691.000**		**181.995.000**	0	**322.686.000**	-	890.732.050	#DIV/0!	**156,81**
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100	830.000.000	150	568.046.050	4621	2.691.853.000	0	140.691.000	50	181.995.000	50	322.686.000	**4.771**	3.259.899.050	3180,67	**573,88**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Jumlah Lembaga Seni budaya yang dikembangkan**	6	1.100.000.000	0	**486.078.100**	6	**250.000.000**		**19.890.000**		**-**	0	**19.890.000**	**6**	736.078.100	#DIV/0!	**151,43**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kesenian tradisional yang dibina**	1	**1.100.000.000**	0	**486.078.100**	1	**250.000.000**		**19.890.000**	1	**-**	1	**19.890.000**	**1**	736.078.100	#DIV/0!	**151,43**
	Peningkatan Kapasitas Tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	29	1.100.000.000	35	486.078.100	5	250.000.000	0	19.890.000	1	-	1	19.890.000	**40**	736.078.100	114,29	**151,43**

	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase sejarah yang didokumentasikan**	55	**900.000.000**	0	**65.000.550**	55	**208.147.000**		**-**		**50.755.000**	0	**50.755.000**	**55**	273.147.550	#DIV/0!	**420,22**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sejarah Lokal yang dibina**	1	**900.000.000**	0	**65.000.550**	1	**208.147.000**		**-**		**50.755.000**	0	**50.755.000**	**1**	273.147.550	#DIV/0!	**420,22**
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal di yang berdayakan	20	900.000.000	40	65.000.550	50	208.147.000				50.755.000	0	50.755.000	**90**	273.147.550	225,00	**420,22**
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	343	**1.261.974.300**	343	**656.063.961**	343	**304.760.750**		**17.157.500**		**28.500.000**	0	**45.657.500**	**686**	960.824.711	200,00	**146,45**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	20	**1.239.761.628**	18	**119.491.105**	20	**103.632.550**		**662.000**		**-**	0	**662.000**	**38**	223.123.655	211,11	**186,73**
	Penetapan Cagar Budaya		25	1.239.761.628	110	119.491.105	7	103.632.550		662.000		-	0	662.000	**117**	223.123.655	106,36	**186,73**

	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	20	**1.261.974.300**	343	**536.572.856**	20	**201.128.200**		**16.495.500**		**28.500.000**	0	**44.995.500**	**363**	737.701.056	105,83	**137,48**
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	124	1.261.974.300	145	536.572.856	159	201.128.200		16.495.500		28.500.000	0	44.995.500	**304**	737.701.056	209,66	**137,48**
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten**	100	**228.779.761.517**	100	**268.470.591.601**	100	**317.982.635.871**		**59.466.044.880**		**13.461.719.451**	0	**72.927.764.331**	**200**	586.453.227.472	200,00	**218,44**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	95	**215.000.000**	95	**137.706.097**	95	**225.620.300**		**18.712.408**		**4.310.500**	0	**23.022.908**	**190**	363.326.397	200,00	**263,84**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	170.000.000	8	115.131.897	11	196.465.800	3	16.944.908	3	-	6	16.944.908	**19**	311.597.697	237,50	**270,64**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5	25.000.000	2	12.962.600	0	22.769.500	0	889.000	0	1.420.000	0	2.309.000	**2**	35.732.100	100,00	**275,66**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	20.000.000	3	9.611.600	1	6.385.000	1	878.500	0	2.890.500	1	3.769.000	**4**	15.996.600	133,33	**166,43**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**100 %**	**218.122.845.481**	100	**266.639.333.584**	**100%**	**316.009.979.663**		**59.135.617.213**		**13.425.245.212**	0	**72.560.862.425**	**101**	582.649.313.247	101,00	**218,52**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1953	217.287.845.481	1953	266.430.176.646	1790	315.790.584.063	1790	59.100.866.530	1790	13.423.975.212	3580	72.524.841.742	**3.743**	582.220.760.709	191,65	**218,53**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	835.000.000	6	209.156.938	12	219.395.600	12	34.750.683	12	1.270.000	24	36.020.683	**18**	428.552.538	300,00	**204,90**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**	100	**580.050.900**	100	**135.824.195**	100	**153.314.800**		**21.197.500**		**4.375.500**	0	**25.573.000**	**200**	289.138.995	200,00	**212,88**
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	80.050.900	1	86.144.850	0	96.377.900	0	10.594.000	0	4.375.500	0	**14.969.500**	**1**	182.522.750	100,00	**211,88**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Hasil pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	500.000.000	1	49.679.345	1	56.936.900	0	10.603.500	0	-	0	10.603.500	**2**	106.616.245	200,00	**214,61**

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**270.000.000**	100	**60.207.667**	**100**	**105.133.350**	0	**13.258.255**	0	**-**	0	**13.258.255**	**200**	165.341.017	200,00	**274,62**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	125.000.000	1	60.207.667	1	105.133.350	0	13.258.255	0	-	0	13.258.255	**2**	165.341.017	200,00	**274,62**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	145.000.000	0		4		0	0	4	-	4	-	**4**	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	**4.367.990.700**	100	**424.088.075**	100	**539.268.975**		**56.059.225**		**3.484.500**	0	**59.543.725**	**200**	963.357.050	200,00	**227,16**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	125.000.000	1	9.893.200	1	16.997.600	0	7.155.000	0	-	0	7.155.000	**2**	26.890.800	200,00	**271,81**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1.039.930.000	1	152.819.150	1	129.274.600	0	32.737.100	0	-	0	32.737.100	**2**	282.093.750	200,00	**184,59**

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1.079.714.300	1	92.164.050	1	113.861.200	0		0	-	0	-	**2**	206.025.250	200,00	**223,54**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	165.000.000	3	9.500.000	2	18.000.000	1	960.000	1	140.000	2	1.100.000	**5**	27.500.000	166,67	**289,47**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	1	150.000.000	1	29.836.250	1	28.887.925	0	3.607.375	0	-	0	3.607.375	**2**	58.724.175	200,00	**196,82**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	6	1.808.346.400	4	129.875.425	2	187.941.000	5	10.956.750	5	3.344.500	10	14.301.250	**6**	317.816.425	150,00	**244,71**
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							44.306.650		643.000		-						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	100	**275.000.000**	0	**23.160.000**	100	**-**		**-**		**-**	0	**-**	**100**	23.160.000	#DIV/0!	**100,00**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	3	275.000.000	0		8	-	0		4		4	-	8	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					23.160.000												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	**3.356.495.536**	0	**546.844.799**	100	**524.923.772**		**129.851.494**		**6.335.449**	0	**136.186.943**	**100**	1.071.768.571	#DIV/0!	**195,99**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	2100	1.162.415.536	2	228.948.530	2100	174.380.772		48.053.033		6.335.449	0	54.388.482	**2.102**	403.329.302	105100,00	**176,17**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	2.194.080.000	2	317.896.269	13	350.543.000	3	81.798.461	1	-	4	81.798.461	**15**	668.439.269	750,00	**210,27**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	100	**1.592.378.900**	100	**503.427.184**	100	**424.395.011**	0	**91.348.785**		**17.968.290**	0	**109.317.075**	**200**	927.822.195	200,00	**184,30**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	42	283.915.000	268	317.890.184	28	278.192.500	28	47.834.785	28	12.955.290	56	**60.790.075**	**296**	596.082.684	110,45	**187,51**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	500.000.000	132	61.495.000	4	99.990.000	4	22.355.000	0	-	4	**22.355.000**	**136**	161.485.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	2	808.463.900	3	124.042.000	1	46.212.511	1	21.159.000	1	5.013.000	2	**26.172.000**	**4**	170.254.511	133,33	**137,26**
				598.804.601.784		**358.217.974.704**		**389.035.965.271**		**59.982.279.140**		**14.191.675.536**		**74.173.954.676**		**747.253.939.975**		**208,60**

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi Target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai akhir tahun 2025.

   Pada tahun 2025 ini diperkiran tidak ada Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang direncanakan tidak memenuhi target, seluruh target yang direncanakan dapat direalisasikan.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil.keluaran yang direncanakan.

   Untuk Program dan Kegiatan adalah indicator outcome yang realisasinya dapat dihitung pada akhir tahun. Sementara untuk sub kegiatan belum ada yang memenuhi target sampai triwulan 2 ini.

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Sampai Triwulan 2 tahun 2025 ini belum ada realisasi kinerja yang melebih target yang direncanakan.

4. Faktor-Faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

   Evaluasi kinerja masih dilaksanakan sampai Triwulan II, hambatan dalam pencapaian target ada beberapa yaitu :

   - Data yang disampaikan oleh masing-masing sekolah masih ada yang kurang lengkap.
   - Keterlambatan pengiriman data dar sekolah
   - Menunggu hasil proses tender
   - Kondisi Geografis sekolah yang jauh serta kondisi jalan membuat proses pengantaran barang oleh penyedia ke sekolah menjadi lama.
   - Adanya Efesiensi dan Refocusing Anggaran tahun 2025.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dari 38 Indikator Program, masih belum bisa diukur sampai triwulan II, karena perhitungannnya akhir tahun, sehingga belum ada implikasi yang timbul terhadap target

capaian program renstra.

6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

   Tindak Lanjut yang telah dilakukan adalah :

   - Melakukan koordinasi dengan Pengawas dan Ketua K3S untuk menyampaikan informasi ke sekolah untuk pendataan
   - Telah Mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan operator sekolah
   - Telah membuat SK Guru Honor
   - Telah melakukan pembayaran Honor Guru sampai bulan April
   - Telah melaksanakan Monev

2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan saat ini antara lain :

1) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Yang Belum Optimal Predikat SAKIP Dinas Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Dari rekomendasi yang berikan oleh Inspektorat Daerah maka ada beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya :
   a. Dokumen Perencanaan Kine{a berupa Renja dipublikasikan pada Website Pemda tepat waktu (paling lambat 1 bulan setelah dokumen disahkan).
   b. Menyusun Laporan monev pertriwulan agar Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis dan capaian kinerja terpantau secara berkala.
   c. Menyusun SOP pengukuran kinerja dan SOP Pengumpulan data Kinerja.
   d. Setiap Bidang melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala.
   e. Melakukan koordinasi dengan Bapppeda terkait Aplikasi e-SAKIP untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
   f. Pada penyusunan Laporan Kineia Instansi Pemerintah pada tahun selanjutnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra).

Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan satu persatu mulai ditindaklanjuti guna perbaikan manajemen Kinerja dalam Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sijunjung.

2) Belum meratanya mutu pelayanan Pendidikan dan kualitas pendidik dan tenaga pendidik.

Salah satu indikator mutu layanan pendidikan adalah terakreditasinya lembaga pendidikan baik jalur formal maupun non formal, yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan baik jalur pendidikan formal dan non formal. Lembaga pendidikan yang memperhatikan standar nasional pendidikan, maka akan berpengaruh ada kualitas pendidikan. Di Kabupaten Sijunjung, masih ditemukan lembaga pendidikan yang belum terakreaditasi, terlebih pada lembaga non formal. Hal-hal yang menyebabkan belum terakreditasinya lembaga pendidikan dikarenakan belum terbitnya izin operasional, kualitas pendidik yang belum semuanya berijazah S1. Maka menjadi tugas bersama, agar lembaga pendidikan segera mengurus izin operasional dan mendorong tenaga pendidik agar dapat melanjutkan ke jenjang S1.

Pendidik yang berijazah S1, Tenaga Pendidik yakni kepala sekolah yang berijazah S1 serta tenaga penunjang lain yang berijazah paling rendah adalah SMA juga menjadi indikator dalam kualitas layanan pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidik dengan kualifikasi S1 serta tenaga penunjang dengan kualifikasi paling rendah SMA juga menjadi Standar Teknis Dalam Pemenuhan SPM Pendidikan. Kondisi saat ini belum semua Pendidik dan Tenaga Pendidik berijazah S1.

3) Belum meratanya akses layanan pendidikan khususnya bagi siswa miskin.

Memberikan kesempatan yang sama bagi siswa miskin untuk mengenyam pendidikan merupakan salah satu

upaya dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan pendidikan yang merata. Masih ditemukannya siswa yang kesulitan dalam memenuhi perlengkapan sekolah, pakaian seragam sekolah. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat membantu dalam hal bantuan peralatan pendidikan. Kegiatan Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi siswa miskin merupakan salah satu upaya dalam pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi siswa miskin. Kegiatan pemberian alat tulis maupun buku pelajaran bagi siswa miskin juga telah dilakukan di Kabupaten Sijunjung, walaupun kondisi saat ini pemberian alat tulis maupun pemenuhan buku pelajaran baru dilakukan di Sekolah Negeri dan masih dalam satu semester saja. Kedepannya mendorong sekolah swasta untuk melakukan pemenuhan alat tulis dan buku pelajaran. Pemenuhan alat tulis dan buku pelajaran ini menjadi Standar Teknis dalam Pemenuhan SPM Pendidikan.

Dari data diatas dapat diketahui Isu-Isu Strategis yang ada pada Kabupaten Sijunjung adalah :

1. Masih rendahnya kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan menyangkut penerapan teknologi, komunikasi dan informasi. Hal ini akan menjadi kendala dalam penerapan Digitalisasi Pendidikan Satuan pendidikan diseluruh Indonesia.
2. Pemerataan mutu dan akses pendidikan, masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana mutu dan akses pendidikan tersebar secara merata pada seluruh wilayah di Kabupaten Sijunjung. Tidak ada kesenjangan mutu dan akses antar sekolah maupun antar wilayah. Seluruh Satuan Pendidikan mampu memberikan pelayanan dan mutu dengan standar yang terukur.
3. Belum meratanya akses layanan pendidikan khususnya

bagi siswa miskin

4. Peningkatan APK PAUD dan memperjelas jenis layanan PAUD untuk mendukung pendidikan bermutu 1 tahun pra SD.
5. Pelestarian Kekayaan Warisan Budaya dan Nilai-nilai Kearifan Lokal
6. Peningkatan Pembinaan group Kesenian
7. Peningkatan pengembangan media kreatifitas kebudayaan masyarakat.
8. Penguatan Kebudayaan dan nilai-nilai budaya local melalui bergagai kegiatan untuk memperkuat jatidiri bangsa

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah. Dengan kata lain, pelayanan dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan di bidang pendidikan semakin lama semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Beberapa masukan terkait program dan kegiatan untuk program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dapat dilihat di Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sijunjung

NO	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	Pagar dan gerbang SDN 29 Kamang (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
2	Pembangunan paving block SDN 24 Nag Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
3	Rehab Ruang Kelas SDN Nag Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Aspirasi
4	Pembangunan pagar SDN 12 Nag Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)			Musrenbang
5	Pembangunan pagar SDN 6 Padang Tarok Kec. Kamang Baru (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Musrenbang
6	Lanjutan pagar SDN 4 Pmt Panjang (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
7	Lanjutan musholla SDN 12 Solok Ambah (pemasangan keramik) (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
8	Pembangunan pagar permanen SDN 39 Solok Ambah (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
9	Pemasangan paving block SDN 6 Kumanis (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
10	Pagar SDN 14 Padang Laweh (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
11	Paving block SDN 24 Limo Koto (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
12	Pagar SDN 7 Limo Koto (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
13	Pembuatan WC SDN 4 Latang (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
14	Pagar SDN 4 Latang (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Musrenbang
15	Pembuatan pengaman tebing (beronjong) SDN 6 Lalan (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Musrenbang
16	Pembuatan pagar sekolah SDN 9 Koto Tuo (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
17	DAM dan pagar SDN 5 Silantai (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Musrenbang
18	Lanjutan pembangunan musholla SDN 9 Padang Sibusuk (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
19	Pagar SDN 10 Tanjung (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi

20	Pembangunan Pagar SDN 15 Sijunjung (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
21	Pembangunan Pagar SDN 31 Timpeh (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
22	Pagar dan gapura SDN 9 Padang Sibusuk (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
23	Pembangunan pagar SDN 2 Koto Baru (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
24	DAM SDN 16 Limo Koto (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
25	Mobiler SDN 12 Nag Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumalh mobiler yang diadakan	1 paket	Musrenbang
26	Pengadaan mobiler SDN 37 Durian Gadang (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumalh mobiler yang diadakan	1 paket	Aspirasi
27	Mobiler SDN 1 Padang Sibusuk (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumalh mobiler yang diadakan	1 paket	Aspirasi
29	Rehab mushola SDN 31 Muaro (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
30	Rehab mushola SDN 11 Silokek (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
31	Pemasangan Rolling door SDN 18 Kumanis (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
32	Rehab ruang perpustakaan SDN 10 Pamuatan (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Pustaka yang direhab	1 ruang	Aspirasi
33	Rehab gedung kelas SDN 24 Nag Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Aspirasi
34	Rehab gedung kelas SDN 6 Nag Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Musrenbang
35	Rehab gedung kelas SDN 13 Sungai Betung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Musrenbang
36	Rehab gedung kelas SDN 8 Sungai Betung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Musrenbang
37	Rehab ruang kelas SDN 34 Durian Gadang (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Aspirasi
38	Rehab Ruang belajar SD 20 Kumanis (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Aspirasi
39	Rehab Ruang Kelas SDN 22 Sisawah (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Aspirasi
40	Rehab Ruang kelas SDN 18 Aie Amo (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Aspirasi
41	Pengadaan alat drumband SDN 15 Muaro Takung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 ruang	Aspirasi
42	Pengadaan alat drumband SDN 37 Kunpar DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 ruang	Aspirasi

43	Pengadaan Alat drumband SDN 13 Sungai Betung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 ruang	Musrenbang
44	Pengadaan Alat drumband SDN 8 Sungai Betung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 ruang	Musrenbang
45	Pengadaan Chromebook SDN 28 Durian Gadang (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 ruang	Aspirasi
46	Rigit beton halaman SMPN 5 Tanjung Gadang (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
47	Pagar SMP 15 Sijunjung (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
48	Paving block SMPN 8 Sijunjung (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
49	Gapura SMPN 33 Sijunjung (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
50	Pagar SMPN 14 Sijunjung (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi
51	Rehab Ruang Majelis Guru SMPN 7 Muaro (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang guru yang direhab	1 ruang	Aspirasi
52	Rehab Laboratorium komputer SMPN 17 Nag. Sei. Betung, Kec. Km. Baru (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah lab komputer yang direhab	1 ruang	Musrenbang
53	Rehab kantor SMPN 18 Sijunjung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang guru yang direhab	1 ruang	Aspirasi
54	RKB PAUD Sekapur Sirih Jr. Kunangan (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang kelas yang dibangun	1 ruang	Aspirasi
55	Pembangunan WC PAUD Permata Bundo Jr. Bukik Gombak, Padang Laweh (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
56	Pembangunan pagar TK DW Jr. Bukik Sabalah Nag. Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
57	Pembangunan pagar permanen TKN 6 Solok Ambah (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
58	Paving Block KB Harapan Bunda Baru Jr. Tandikek Nag Timbulun (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
59	Paving block KB Kamboja Jr Timbulun (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
60	Paving block KB Kasih Bundo Jr. Gg Naneh Nag. Timbulun (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
61	Pembangunan gedung TK Insan Kamil Aie Amo (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang kelas yang dibangun	1 ruang	Aspirasi
62	Pagar TK Karya Bundo Jr. Kamang Sejahtera Nag. Kamang (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
63	Pembuatan pagar TKN 1 Koto VII (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi

64	Pemasangan paving block TKN 1 Koto VII (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
65	Pagar KB Embun Pagi Jr. Koto Tuo Nag. Aie Amo (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
66	Paving Block TK Lalo Ceria Jr Simpang Kamang (DAU SG Bidang Pendidikan)	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 unit	Aspirasi
67	Rehab gedung TK Dharmawanita Jr. Koto, Nag. Tanjung Lolo (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 ruang	Aspirasi
68	APE TK Sekapur Sirih Jr. Kunangan (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 paket	Aspirasi
69	APE TK Insan Rabbani Jr. Batang Talang, Muaro Takung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 paket	Aspirasi
70	APE TK Al-Jihad II, Jr. Dusun Tinggi I, Muaro Takung (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 paket	Aspirasi
71	APE TKN II, Kunpar (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 paket	Aspirasi
72	APE PAUD Lapiak Pandan Sungai Gemuruh (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 paket	Aspirasi
73	APE TK Al Ikhlas MKD (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat prakter yang diadakan	1 paket	Aspirasi
74	Alat kesenian sound system dan pakaian randai kelompok Baringin sakti	Jumlah alat kesenian tradisional yang diadakan	1 paket	Aspirasi
75	Perlengkapan grup randai bulian sati (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat kesenian tradisional yang diadakan	1 paket	Aspirasi
76	Perlengkapan grup randai siti johari dakti (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat kesenian tradisional yang diadakan	1 paket	Aspirasi
77	Penyediaan sarpras kesenian rakyat jr parik rantang nag kunpar (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat kesenian tradisional yang diadakan	1 paket	Aspirasi
78	Penyediaan sarpras kesenian rakyat dusun 1 jr kamang bakti nag kamang (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat kesenian tradisional yang diadakan	1 paket	Aspirasi
79	Penyediaan sarpras kesenian rakyat nag maloro (DAU SG Bidang Pendidikan)	Jumlah alat kesenian tradisional yang diadakan	1 paket	Aspirasi
80	Rehab Pagar dan gerbang SDN 22 Sei Lansek	JUmlah Sarana Utilitas yang dibangun	1 Unit	Aspirasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020- 2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusun oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori :

1) Ekosistem pendidikan;
2) Guru;
3) Pedagogi;
4) Kurikulum; dan
5) Sistem penilaian

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standarnisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan

disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio.

Gambar 3.1

Kebijakan Merdeka Belajar

Sumber : Renstra Kemendikbud 2020-2024

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional R.I. 2019-2024 serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026 ditujukan untuk lebih meningkatkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sijunjung di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi semua Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tingkat satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pendidikan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.

Program pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga

diharapkan seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara formal. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang.

Selanjutnya tujuan dari Rencana Kerja (Renja) OPD/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung diselaraskan dengan arah dan kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Sijunjung.

Visi : **Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani**			
Misi 3 : **Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK**			
Tujuan : **Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas**			
Sasaran : **Meningkatnya Kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis karakter dan Teknologi Informasi	**1. Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Akses Pendidikan**	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana SD dan SMP	1. Penyediaan sarana prasarana SD dan SMP yang berkualitas
			2. Peningkatan pemenuhan satuan pendidikan yang memenuhi SPM dan SNP
			3. Mengembangkan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan
		2. Meningkatkan sinergisitas dengan berbagai pihak dan perbaikan tata kelola	1. Peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder pendidikan kesetaraan

		pendidikan kesetaraan	
			2. Peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan
		3. Melakukan sinergisitas dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses PAUD	1. Peningkatan Kualitas Layanan PAUD
			2. Peningkatan Kompetensi Guru PAUD
	2. Meningkatnya Mutu Pendidikan berbasis karakter dan teknologi Informasi	1. Meningkatkan Kompetensi Guru dalam pembelajaran berbasis IT	1. Peningkatan Kompetensi Guru dalam pembelajaran berbasis IT
			2. Pengembangan Satuan Pendidikan berbasis Digitalisasi
			3. Peningkatan Kompetensi guru melalui workshop, bimtek, pelatihan dan kegiatan lomba-

			lomba kependidikan
		2. Peningkatan Pemetaan dan Penataan Pendidik dan tenaga Kependidikan	1. Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
			2. Melaksanakan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		3. Meningkatkan pengembangan pendidikan karakter	1. Pengembangan literasi dan penguatan karakter peserta didik dalam pembelajaran
			2. Peningkatan kualitas satuan pendidikan yang menerapkan budaya karakter dan sekolah sehat
			3. Melaksanakan peningkatan program lulusan berbasis Iman dan Tagwa
			4. Pelaksanaan program *boarding school* jenjang pendidikan SLTP
			5. Mendorong siswa dalam pelaksanan Tahfidz Quran

		4. Pelaksanaan Pengendalian Perizinan Pendidikan	1. Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat
			2. Melaksanakan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
		5. Pengembangan Kurikulum Berbasis kearifan lokal	1. Mendorong penetapan dokumen kurikulum mauatan local pendidikan SD dan SMP
		6. Pelaksanaan Sekolah Merdeka Belajar	1. Melaksanakan program sekolah merdeka belajar

Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani			
Misi 3 : : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK			
Tujuan : Terwujudnya nilai-nilai social budaya masyarakat berlandaskan ABS SBK			
Sasaran : Meningkatnya kualitas nilai-nilai social budaya masyarakat berbasis kearifan lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelestarian dan pengembangan warisan budaya	1. Peningkatan Pengembangan Kebudayaan	1. Melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten
			2. Melaksanakan Peningkatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten
		2. Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	1. Melaksanakan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten
		3. Peningkatan Pembinaan	1. Melaksanakan Pembinaan

		Sejarah	Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
		4. Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1. Melaksanakan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
			2. Melaksanakan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan public yang efektif, efesien dan responsive berbasis reformasi birokrasi			
Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas birokrasi yang efektif, efesien, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudaya

3.3 Program dan Kegiatan

Didasarkan kepada analisa kondisi umum pendidikan Kabupaten Sijunjung serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan untuk jangka lima tahun kedepan. Oleh sebab itu perlu dibuat rumusan kebijakan stregis, program strategis bahkan sampai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran kinerja yang realistis.

Untuk mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung di bidang pendidikan serta tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diciptakan program dan kegiatan yang mendukung. Salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung bidang pendidikan adalah peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Selain Program Unggulan Kepala Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung juga memiliki target pencapaian SPM bidang pendidikan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 100 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 32 Tahun 2023 telah dimasukkan kedalam perencanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung yang terdiri atas 2 Urusan, 7 Program, 20 Kegiatan dan 96 Sub Kegiatan, termasuk DAK Fisik. Anggaran Perubahan Tahun 2025 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan anggaran sebanyak Rp. 391.171.507.859,- dari anggaran sebelumnya Rp. 389.035.965.271,- bertambah Rp. 2.135.542.588,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIJUNJUNG

Pada Bab ini disajikan program dan kegiatan per urusan berikut pagu indikatif pendanaan masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan tahun 2025 ini mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan dikelompokkan berdasarkan Urusan.

Untuk menidaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 telah dipetakan (Mapping) ke kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019. Program dan Kegiatan yang telah dipetakan (Mapping) menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 diklasifikasikan berdasarkan urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun Anggaran 2025 pagu indikatif seperti terlihat dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SIJUNJUNG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025			Pagu Indikatif		
								Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang	Sebelum	Setelah	Bertambah/Berkurang
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**389.035.965.271,17**	**391.171.507.858,17**	**2.135.542.587,00**
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**385.310.964.621,17**	**388.388.953.708,17**	**3.077.989.087,00**
	1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**385.310.964.621,17**	**388.388.953.708,17**	**3.077.989.087,00**
1	1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah** **Indeks Kepatuhan Arsip** **Prosentase Pencapaian Komponen Akuntabilitas Kinerja**	**3,15** **75** **80 %** **%** **%**	**3,15** **75** **80 %** **%** **%**		**317.982.635.871,17**	**317.181.749.031,17**	**- 800.886.840,00**
	1	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran** **Persetase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu**	**90 %** **95 %**	**90 %** **95 %**		**225.620.300**	**94.090.071**	**- 131.530.229,00**

	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0	196.465.800	81.380.071	- 115.085.729,00
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	0	22.769.500	7.309.000	- 15.460.500,00
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0	6.385.000	5.401.000	- 984.000,00
	1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**95 % 98 %**	**95 % 98 %**		**316.009.979.663, 17**	**315.876.318.163, 17**	**- 133.661.500,00**
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1953 Orang/bulan	1953 Orang/bulan	0	315.790.584.063, 17	315.790.584.063, 17	-
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0	219.395.600	85.734.100	- 133.661.500,00
	1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase aset OPD dalam keadaaan baik**	**98 %**	**98 %**		**153.314.800**	**89.146.700**	**- 64.168.100,00**
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	96.377.900	40.923.550	- 55.454.350,00

						SKPD							
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	56.936.900	48.223.150	- 8.713.750,00
	1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan urusan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu**	**60 %**	**60 %**		**105.133.350**	**66.314.750**	**- 38.818.600,00**
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	0	105.133.350	66.314.750	- 38.818.600,00
	1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**90 %**	**90 %**		**539.268.975**	**233.660.000**	**- 305.608.975,00**
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	16.997.600	8.498.400	- 8.499.200,00
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	129.274.600	59.167.025	- 70.107.575,00
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	113.861.200	50.577.300	- 63.283.900,00
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	18.000.000	7.358.000	- 10.642.000,00

	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	0	28.887.925	8.665.475	- 20.222.450,00
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	187.941.000	88.587.800	- 99.353.200,00
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	44.306.650	10.806.000	- 33.500.650,00
	1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**90 %**	**90 %**		**524.923.772**	**446.904.636**	**- 78.019.136,00**
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	0	174.380.772	100.830.636	- 73.550.136,00
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0	350.543.000	346.074.000	- 4.469.000,00
	1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset OPD dalam keadaaan baik**	**98 %**	**98 %**		**424.395.011**	**375.314.711**	**- 49.080.300,00**
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit	0	278.192.500	244.191.000	- 34.001.500,00

	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	0	99.990.000	89.800.000	- 10.190.000,00
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	46.212.511	41.323.711	- 4.888.800,00
2	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase kondisi bangunan baik satuan pendidikan non formal/kesetaraan Persentase Capaian Layanan Pendiidkan PAUD Persentase Satuan Pendidikan SMP dengan Kualitas pembelajaran optimal Persentase kondisi bangunan baik satuan pendidikan SD Persentase kondisi bangunan baik satuan pendidikan SMP Persentase kondisi bangunan Baik satuan pendidikan PAUD Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan**	**100 119,1 50 70 85 97.26 98 % % % % % %**	**100 119,1 50 70 85 97.26 98 % % % % % %**		**67.268.328.850**	**71.183.959.555**	**3.915.630.705,00**

	1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD yang berkualifikasi S1/D4 Jumlah Satuan Pendidikan SD yang iklim keamanan dengan kriteria aman Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terpenuhi kebutuhan GTK Jumlah Siswa SD yang memiliki nilai karakter minimal baik Nilai Indek Kemampuan Numerasi Jenjang SD Persentase Peserta Didik SD yang menerima Biaya Personil Persentase SD yang terpenuhi sarpras sesuai standar**	**131 sekolah 1,60 % 1795 Orang 25030 Siswa 40 % 80 Satuan Pendidikan 86 %**	**131 sekolah 1,60 % 1795 Orang 25030 Siswa 40 % 80 Satuan Pendidikan 86 %**		**34.134.840.100**	**37.138.800.360**	**3.003.960.260,00**
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1 Ruang	-9	35.000.000	35.000.000	-
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	37 Unit	25	2.806.278.000	4.658.812.240	1.852.534.240,00
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	11 Paket	6	293.250.000	522.525.000	229.275.000,00
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	145 Peserta Didik	243 Peserta Didik	98	284.300.000	210.870.050	- 73.429.950,00

	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3350 Orang	6 Orang	-3344	827.000.000	555.304.380	- 271.695.620,00
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang	157 Orang	87	395.250.950	191.613.100	- 203.637.850,00
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	209 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	-134	150.300.000	33.326.700	- 116.973.300,00
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	215 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	2	25.479.740.000	25.479.740.000	-
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	215 Orang	217 Orang	2	89.792.350	37.635.940	- 52.156.410,00
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	75 Orang	35	96.377.700	22.191.900	- 74.185.800,00
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	8 Komunitas	7	122.659.200	52.701.500	- 69.957.700,00

	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	92.612.300	42.695.700	- 49.916.600,00
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3800 Paket	3040 Paket	-760	833.000.000	802.445.370	- 30.554.630,00
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	3 Ruang	-1	260.000.000	260.000.000	-
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	19 Unit	16	560.000.000	1.525.000.000	965.000.000,00
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	215 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	2	55.517.500	25.321.380	- 30.196.120,00
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	15 Ruang	10	605.000.000	1.382.000.000	777.000.000,00
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	211 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	1789	832.700.000	800.400.000	- 32.300.000,00
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	13 Paket	3	316.062.100	501.217.100	185.155.000,00

	1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Persentase SMP yang terpenuhi sarpras sesuai standar**	**50 % 52 sekolah**	**50 % 52 sekolah**		**15.897.700.950**	**16.162.414.250**	**264.713.300,00**
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	9 Unit	3	443.330.500	1.072.975.500	629.645.000,00
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	0	208.760.800	203.980.800	- 4.780.000,00
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	4 Unit	-4	94.563.000	467.838.000	373.275.000,00
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1 Paket	-9	259.128.000	259.128.000	-
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	67 Peserta Didik	896 Peserta Didik	829	449.179.000	449.179.000	-
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	0	269.707.350	215.460.650	- 54.246.700,00
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	950 Orang	5 Orang	-945	877.452.000	223.040.000	- 654.412.000,00

						Pertama							
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	928 Orang	168 Orang	-760	315.000.100	317.037.600	2.037.500,00
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	1	95.000.200	90.115.200	- 4.885.000,00
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	1	11.121.800.000	11.121.800.000	-
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	55 Orang	56 Orang	1	87.925.000	73.855.000	- 14.070.000,00
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	56 Orang	16	98.047.500	62.057.500	- 35.990.000,00
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	23 Komunitas	21	150.000.000	143.565.000	- 6.435.000,00

	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	130.600.000	127.325.000	- 3.275.000,00
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2000 Satuan Pendidikan	9192 Satuan Pendidikan		85.000.000	122.849.500	37.849.500,00
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2000 Paket	1583 Paket		600.000.000	600.000.000	-
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	2 Paket		612.207.500	612.207.500	-
	1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Persentase PAUD yang terpenuhi sarpras sesuai standar**	**3 Satuan Pendidikan 97,26 %**	**3 Satuan Pendidikan 97,26 %**		**13.505.771.350**	**14.483.066.245**	**977.294.895,00**
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	20 Unit	19 Unit		872.000.000	1.982.199.945	1.110.199.945,00
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20 Peserta Didik	300 Peserta Didik		150.000.250	134.797.050	- 15.203.200,00
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1350 Orang	681 Orang		5.740.320.850	5.739.456.000	- 864.850,00

	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	125 Orang		334.993.300	152.875.950	- 182.117.350,00
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	22 Satuan Pendidikan	354 Satuan Pendidikan		75.000.000	34.218.050	- 40.781.950,00
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	368 Satuan Pendidikan	354 Satuan Pendidikan		5.017.200.000	5.017.200.000	-
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	16 Komunitas		46.035.800	17.482.200	- 28.553.600,00
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	2 Kegiatan		42.233.450	28.561.800	- 13.671.650,00
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket	570 Paket		150.000.200	102.772.300	- 47.227.900,00
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	4 Unit		388.000.000	435.500.000	47.500.000,00

	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	40 Paket	7 Paket		649.944.000	819.944.000	170.000.000,00
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	316 Satuan Pendidikan	1000 Satuan Pendidikan		40.043.500	18.058.950	- 21.984.550,00
	1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terpenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sarprasnya terpenuhi**	**100 % 13 lembaga**	**100 % 13 lembaga**		**3.730.016.450**	**3.399.678.700**	**- 330.337.750,00**
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	212 Peserta Didik		124.000.000	124.000.000	-
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Orang	648 Orang		262.200.000	262.200.000	-
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	130 Orang		147.881.400	44.198.300	- 103.683.100,00

	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan		153.704.400	70.912.750	- 82.791.650,00
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan		2.205.700.000	2.205.700.000	-
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24 Orang	24 Orang		43.382.600	23.347.600	- 20.035.000,00
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	40 Kegiatan	2 Kegiatan		48.279.400	26.819.400	- 21.460.000,00
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	400 Paket	335 Paket		261.038.100	212.288.100	- 48.750.000,00
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2030 Peserta Didik	11 Peserta Didik		133.830.550	80.212.550	- 53.618.000,00
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit		20.000.000	20.000.000	-
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah	1 unit	1 unit		330.000.000	330.000.000	-

						Pendidikan Non Formal	Dibangun						
3	**1**	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase PTK bersertifikat profesi**	**55 %**	**55 %**		**59.999.900**	**23.245.122**	**- 36.754.778,00**
	1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah PTK Kesetaraan bersertifikat profesi Jumlah PTK PAUD bersertifikat profesi Jumlah PTK SD bersertifikat profesi Jumlah PTK SMP bersertifikat profesi**	**0 Orang 187 orang 425 Orang 975 orang**	**0 Orang 187 orang 425 Orang 975 orang**		**59.999.900**	**23.245.122**	**- 36.754.778,00**
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen		59.999.900	23.245.122	- 36.754.778,00
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.725.000.650**	**2.782.554.150**	**- 942.446.500,00**
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**3.725.000.650**	**2.782.554.150**	**- 942.446.500,00**
4	**2**	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Warisan Budaya yang dikelola Persentase adat istiadat yang dikembangkan**	**15 30 % %**	**15 30 % %**		**2.962.092.900**	**2.167.177.750**	**- 794.915.150,00**

	2	**2 2**	**0 2**	**2.0 1**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dipublikasikan**	**15 Objek**	**15 Objek**		**120.239.900**	**61.418.500**	**- 58.821.400,00**
	2	2 2	0 2	2.0 1	000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	300 Objek		120.239.900	61.418.500	- 58.821.400,00
	2	**2 2**	**0 2**	**2.0 2**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Tradisional yang didaftarkan**	**25 kelompok**	**25 kelompok**		**150.000.000**	**50.956.000**	**- 99.044.000,00**
	2	2 2	0 2	2.0 2	000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan		150.000.000	50.956.000	- 99.044.000,00
	2	**2 2**	**0 2**	**2.0 3**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Adat Istiadat yang didaftarkan**	**28 buah**	**28 buah**		**2.691.853.000**	**2.054.803.250**	**- 637.049.750,00**
	2	2 2	0 2	2.0 3	000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2 Orang	4621 Orang		2.691.853.000	2.054.803.250	- 637.049.750,00
5	**2**	**2 2**	**0 3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah Lembaga Seni Budaya yang dikembangkan**	**45 lembaga**	**45 lembaga**		**250.000.000**	**279.017.400**	**29.017.400,00**

	2	**2 2**	**0 3**	**2.0 1**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Seni Budaya yang dikembangkan**	**35 Lembaga**	**35 Lembaga**		**250.000.000**	**279.017.400**	**29.017.400,00**
	2	2 2	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	5 Lembaga		250.000.000	279.017.400	29.017.400,00
6	**2**	**2 2**	**0 4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Sejarah yang didokumentasikan**	**90 %**	**90 %**		**208.147.000**	**89.048.600**	**- 119.098.400,00**
	2	**2 2**	**0 4**	**2.0 1**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah yang didokumentasikan**	**27 Dokumen**	**27 Dokumen**		**208.147.000**	**89.048.600**	**- 119.098.400,00**
	2	2 2	0 4	2.0 1	000 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	40 Orang	50 Orang		208.147.000	89.048.600	- 119.098.400,00
7	**2**	**2 2**	**0 5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya bersifat kebendaan yang ditetapkan sebagai cagar budaya**	**135 35 Cagar budaya % **	**135 35 Cagar budaya % **		**304.760.750**	**247.310.400**	**- 57.450.350,00**
	2	**2 2**	**0 5**	**2.0 1**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan**	**15 Cagar Budaya**	**15 Cagar Budaya**		**103.632.550**	**47.088.600**	**- 56.543.950,00**
	2	2 2	0 5	2.0 1	000 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	35 Objek	7 Objek		103.632.550	47.088.600	- 56.543.950,00

	2	**2 2**	**0 5**	**2.0 2**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya yang dikelola**	**135 Cagar budaya**	**135 Cagar budaya**		**201.128.200**	**200.221.800**	**- 906.400,00**
	2	2 2	0 5	2.0 2	000 1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	155 Objek	110 Objek		201.128.200	200.221.800	- 906.400,00
	J U M L A H										**389.035.965.271**	**391.171.507.858**	**2.135.542.587,00**

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung setiap bidang urusan dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci Utama dan Indikator Kinerja Kunci Hasil dapat disajikan sebagai berikut :

5.1 Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator Kinerja Kunci Utama dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				
				Alasan	Formulasi /Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	Target 2025
1	Meningkatnya Aksesbilitas Pendidikan	APM SD/MI/Paket A	%	Untuk memenuhi Permendikbud No. 32 Tahun 2022 ten-tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Jumlah siswa usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD/MI/Pake A : Anak usia 7-12 Tahun X 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya	99,96
		APM SMP/MTs/ Paket B	%	Untuk memenuhi Permendikbud No. 32 Tahun 2022 ten-tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP/MTs /Pake B : Anak usia 13-15 Tahun X 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut	84,75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				
				Alasan	**Formulasi /Cara Pengukuran**	**Sumber Data**	**Keterangan/ Kriteria**	**Target 2025**
		Tingkat Partisipasi warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	Untuk memenuhi Permendikbud No. 32 Tahun 2022 ten-tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.	50,00
		Tingkat Partisipasi warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Untuk memenuhi Permendikbud No. 32 Tahun 2022 ten-tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan (ATS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.	55,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				
				Alasan	Formulasi /Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	Target 2025
		Tingkat Partisipasi warga Negara usia 18 tahun keatas yang mengikuti pendidikan non formal/kesetaraan	%	Untuk memenuhi Permendikbud No. 32 Tahun 2022 ten-tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Jumlah anak usia 18-25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- ----- x 100 % Jumlah anak usia 18-25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.	54,40
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki akreditasi minimal B	%	Untuk memenuhi Permendikbud No. 32 Tahun 2022 ten-tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan SD, SMP, TK yang memiliki Akreditasi A dan B / Jumlah Satuan Pendidikan SD, SMP, TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan kualitas dan mutu satuan Pendidikan yang memenuhi Akreditasi minimal B.	80,20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				
				Alasan	Formulasi /Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	Target 2025
3	Terlestarikannya Warisan Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	Untuk memenuhi Permendikbud No. 32 Tahun 2022 ten-tang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	jumlah warisan budaya yang dilestarikan/ jumlah warisan budaya yang terdata x 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan warisan budaya yang dilestarikan.	76,00

5.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil dapat dilihat pada table 5.2 dibawah :

No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
1	Pendidikan			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	354	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	480	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	755	
		Jumlah pendidik pada PAUD	661	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Ijazah D-IV = 221 Serdik = 87	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal	Kepsek Ijazah S1 = 159 Serdik = 65 Cakep punya STTPL	

		atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	= 18	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 206 SMP = 48	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3034	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	640	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	25.540	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.558	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.900	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	706	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.006	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	772	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	828	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	236	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	481	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	213	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik S1 = 1.958 Serdik = 992	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik S1 = 767 Serdik = 476	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepsek Ijazah S1 = 217 Serdik = 207	

			Cakep punya STTPL = 46	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepsek Ijazah S1 = 56 Serdik = 48 Cakep punya STTPL = 33	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	207	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	49	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah satuan Pendidikan kesetaraan terakreditasi	11	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	500	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.165	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	198	
		Jumlah pendidik pada satuan Pendidikan kesetaraan	154	
		Jumlah pendidik pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	154	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Ijazah S1 = 10 Serdik = 7 STTPL = 0	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	10	
2	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Inventarisasi = 449 Pelihara = 449 Diselamatkan = 251 Publikasi = 296	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Disebarluaskan = 251 Dikaji = 108 Keberagaman = 251	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun Karakter	251	

		bangsa,meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM = 333 Peningkatan kompetensi = 40 Sertifikasi = 4	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Penetapan = 110	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	diselamatkan = 2 Diamankan = 2 Zonasi = 2 Dipelihara = 2 Dipugar = 0	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Diteliti = 5 Revitalisasi = 10 DiAdaptasi = 0	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	10	
		Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	4	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	4	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	59	
		Penyediaan sarana dan prasarana	0	

		pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	

BAB VI
PENUTUP

Pembangunan sumber daya manusia sebagai insan manusia dan sumber daya pembangunan merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan tercapai apabila pendidikan yang baik dan benar dilaksanakan sejak dini dan mampu membentuk karakter sumber daya manusia itu sendiri yang kreatif serta seimbang antara kemampuan intelektual, emosional serta spiritual. Sehingga pendidikan dalam konteks ini, harus membuat seimbang antara pembentukan dan pembinaan karakter dan pendidikan yang menekankan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Bahwa selama Triwulan I dan II tahun anggaran 2025 Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung masih Rp. 74.173.954.676,- dari pagu setelah pergeseran Rp. 391.171.507.859,- (19,00%) dan realisasi fisik sebesar 77,70%. Hal ini disebabkan pekerjaan fisk masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan, dan realisasi akan meningkat pada Triwulan III Tahun 2025 ini. Maka dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 ini akan memperhatikan program kerja yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dan kesinambungan guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan akses pendidikan.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung dijalankan dengan memperhatikan pemerataan mutu dan relevansi pendidikan, pemerataan dan perluasan akses pelayanan, daya saing, manajemen dan pengelolaan serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sijunjung.

Demikian Perubahan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek bidang pendidikan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan menjadi isu strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 30 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sijunjung

PUJI BASUKI, SP, MMA
NIP 19731206 199903 1 003

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG
No. 188.45/ 24 /KPTS-PUPR-2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG TAHUN 2025

Jl. Ir. Juanda No.24, Telp (0754) 20090 Fax (0754) 20299
Muaro Sijunjung 27511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/29/KPTS-PUPR-2025

T E N T A N G
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang :

a. Bahwa perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sijunjung merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sijunjung;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nompr: 900.1.1./640/SJ tentang Perubahan Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PUPR adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan Renja tahun 2025 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja PD; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta Rancangan perubahan PPAS.

Pasal 3

Rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Kepala Dinas kepada Bupati untuk dibahas

sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
   c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
   d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V memuat Kinerja dan Penyelenggaraan Bidang urusan; dan
   f. bab VI memuat penutup.

(2) Perubahan Renja Dinas PUPR Kab.Sijunjung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 April 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab.Sijunjung

SYAHRIWAN, ST
Nip. 19750730 200804 1 001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB.SIJUNJUNG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review terhadap Rencana Kerja RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

5.2. Indikator Kinerja Hasil

BAB VI. PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan PD yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini dibuat untuk melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan perumusan rancangan Perubahan Renja PD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2025, disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan berpedoman kepada Renstra Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Kabupaten Sijunjung tahun 2025. Perubahan Renja Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2025 memuat kebijakan, program dan prioritas kegiatan pembangunan daerah di bidang pekerjaaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas. Adapun alokasi anggaran indikatif, serta usulan kegiatan, pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, serta DAK dan sumber pendanaan lainnya. Perubahan Renja Dinas PUPR disusun secara partisipatif di bawah koordinasi Kepala Dinas dan diharapkan program yang diprioritaskan dapat direalisasikan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan sesuai kemampuan daerah dalam rangka mendukung visi dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Sijunjung.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
15. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah irigasi
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP), dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Mutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
36. Peraturan Bupati Sijunjung No. 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Menyingkapi permasalahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai Triwulan I.
3. Menyesuaikan kebijakan pembangunan dan prognosis keuangan daerah serta target kinerja pembangunan.

Sementara tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pedoman Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan dari tiap-tiap Bidang di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
2. Pedoman Penyusunan Anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
3. Sebagai Dasar penilaian kinerja Dinas dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja, Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Sijunjung, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam Rencana Kerja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat mengenai Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Hasil

BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindaklanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada Bab ini menggambarkan evaluasi terhadap realisasi kinerja Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Triwulan I Tahun 2025. Realisasi kinerja Perubahahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 tersebut, meliputi Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2025. Penghitungan capaian kinerja tersebut dengan membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target tahun rencana berjalan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sijunjung
Triwulan I Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	
						FISIK/ KEU	(%)
1	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten**	**95,00**	**45,00**	**47,37**
				JUMLAH DANA	***9.629.902.055***	***2.240.655.087***	**23,27**
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran**	**95,00**	**25,00**	**26,32**
				JUMLAH DANA	***130.778.800***	***14.266.000***	**10,91**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	1,00	25,00
				JUMLAH DANA	*62.734.800*	*3.574.000*	5,70
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	*3,00*	*1,00*	33,33
				JUMLAH DANA	*8.300.700*	*3.648.000*	43,95

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,00	3,00	23,08
				JUMLAH DANA	*59.743.300*	*7.044.000*	11,79
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**95,00**	**65,00**	**68,42**
				JUMLAH DANA	***6.308.619.635***	***1.509.037.778***	**23,92**
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57,00	57,00	100,00
				JUMLAH DANA	*6.204.431.635*	*1.492.710.528*	24,06
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,00	1,00	33,33
				JUMLAH DANA	*95.166.450*	*16.327.250*	17,16
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	*2,00*	*0,00*	-
				JUMLAH DANA	*9.021.550*	-	0,00
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Aset Pemda yang terpelihara**	**95,00**	**0,00**	**-**
				JUMLAH DANA	***11.335.600***	***0,00***	**0,00**

			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	0,00	-
				JUMLAH DANA	*11.335.600*	*0,00*	0,00
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian yang di proses Tepat Waktu**	**95,00**	**0,00**	**-**
				JUMLAH DANA	***9.000.000***	***0***	**0,00**
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,00	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	*9.000.000*	*0,00*	0,00
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**95,00**	**11,42**	**12,02**
				JUMLAH DANA	***351.703.300***	***20.630.005***	**5,87**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	*16.887.850*	*0,00*	0,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5,00	1,00	20,00
				JUMLAH DANA	*64.650.000*	*2.268.000*	3,51

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	*22.732.400*	*0,00*	0,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	1,00	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	*10.030.200*	*1.130.000*	11,27
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,00	3,00	12,50
				JUMLAH DANA	*237.402.850*	*17.232.005*	7,26
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik**	**85,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***52.461.400***	***0***	**0,00**
			Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	6,00	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	7.500.000	*0,00*	0,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	*44.961.400*	*0,00*	0,00

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Terhadap Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95,00**	**12,50**	**13,16**
				JUMLAH DANA	***1.227.168.450***	***318.502.304***	**25,95**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	#DIV/0!
				JUMLAH DANA	*0*	*0*	#DIV/0!
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00	3,00	8,33
				JUMLAH DANA	*856.857.450,00*	*264.176.804*	30,83
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12,00	3,00	8,33
				JUMLAH DANA	*370.311.000*	*54.325.500*	14,67
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Terhadap Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**95,00**	**9,27**	**9,76**
				JUMLAH DANA	***1.538.834.870***	***378.219.000***	**24,58**

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	1,00	8,33
				JUMLAH DANA	*32.732.950*	7.451.800	8,33
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46,00	6,00	13,04
				JUMLAH DANA	*136.800.000*	*53.291.850*	38,96
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	*5,00*	*1,00*	20,00
				JUMLAH DANA	*769.510.200*	*175.845.020*	22,85
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5,00	1,00	20,00
				JUMLAH DANA	*161.580.000*	*34.073.500*	21,09
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	12,00	2,00	16,67
				JUMLAH DANA	*279.735.520*	*105.926.830*	37,87

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28,00	1,00	3,57
				JUMLAH DANA	*158.476.200*	*1.630.000*	1,03
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi**	**63,30**	**0**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***3.307.307.215***	***16.978.750***	**0,51**
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Irigasi (KPI)**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***126.441.971***	***3.007.000***	**2,38**
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	20	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	*126.441.971*	*3.007.000*	2,38

			Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**Panjang saluran dan bangunan irigasi dg kondisi baik**	**28,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***3.180.865.244***	***13.971.750***	**0,44**
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2	0	0,00
				JUMLAH DANA	*222.674.176*	*6.927.750*	3,11
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,5	-	0,00
				JUMLAH DANA	*2.733.191.092*	*7.044.000*	0,26
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0	0	#DIV/0!
				JUMLAH DANA	*0*	*0*	#DIV/0!
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	-	0,00
				JUMLAH DANA	*224.999.976,0*	*0*	0,00

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Gedung Pemerintah sesuai standar**	**95,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***1.118.507.350***	***17.197.500***	**1,54**
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase Rekomendasi IMB /SLF yang Diterbitkan**	**95,00**	**25,00**	**26,32**
				JUMLAH DANA	***1.118.507.350***	***17.197.500***	**1,54**
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	170	42	24,71
				JUMLAH DANA	*120.246.000*	*7.044.000*	5,86

			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3,00	-	0,00
				JUMLAH DANA	*879.250.000*	*0,00*	0,00
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	75,00	18,00	24,00
				JUMLAH DANA	*96.106.100*	*10.153.500*	10,56
			Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1,00	-	0,00
				JUMLAH DANA	*13.814.800*	*0,00*	0,00
			Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*1,00*		0,00
				JUMLAH DANA	*9.090.450*	*0,00*	0,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan**	**60,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***166.422.400***	***3.934.500***	**2,36**

			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan RTBL**	**60,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***166.422.400***	***3.934.500***	**2,36**
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2,00	0,00	0,00
				JUMLAH DANA	*166.422.400*	*3.934.500*	2,36
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**62,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***58.890.378.920***	***16.891.250***	**0,03**
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang jalan yang dibangun, dipelihara, direhabilitasi**	**62,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***58.890.378.920***	***16.891.250***	**0,03**
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4,00	-	*0,00*

				JUMLAH DANA	*626.399.775*	*0,00*	*0,00*
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	829,42	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*74.999.000*	*0,00*	*0,00*
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10,14	-	0,00
				JUMLAH DANA	*36.899.627.775,94*	*9.912.250*	*0,03*
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	99,18	-	0,00
				JUMLAH DANA	*14.457.080.641*	*6.979.000*	*0,05*
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	267,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*1.381.819.478*	*0*	*0,00*
			Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	6,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*5.450.452.250*	*0*	*0,00*
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat**	**26,55**	**-**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***371.988.050***	***3.046.750***	***0,82***

			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yg bersertifikat**	**100,00**	**-**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***273.883.450***	***3.046.750***	***1,11***
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	25,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*49.491.600*	*0,00*	*0,00*
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	75,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*224.391.850*	*3.046.750*	*1,36*
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data dan informasi terkait jasa konstruksi yg tersedia**	**85,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***8.875.300***	***0,00***	***0,00***
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	1,00	-	**0,00**
				JUMLAH DANA	*8.875.300*	*0,00*	*0,00*

			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**85,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***89.229.300***	***0***	***0,00***
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	60,00	-	0,00
				JUMLAH DANA	*30.254.050*	*0,00*	*0,00*
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*42.853.400*	*0,00*	*0,00*
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Di evaluasi Tertib Usaha	*25,00*	*0,00*	*0,00*
				JUMLAH DANA	16.121.850	*0,00*	*0,00*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Nilai Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah**	**50,00**	**-**	**-**
				JUMLAH DANA	***520.976.400***	***27.038.736***	***5,19***

			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Nilai aspek Perencanaan Tata Ruang**	**50,00**	**-**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***236.371.975***	***14.166.236***	***5,99***
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*117.005.775*	*14.166.236*	*12,11*
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	*1,00*		*0,00*
				JUMLAH DANA	*99.949.200*		*0,00*
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	*50,00*		*0,00*
				JUMLAH DANA	*19.417.000*		
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai aspek Pemanfaatan Tata Ruang**	**50,00**	**-**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***228.096.650***	***10.041.500***	***4,40***

			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	60,00	5	*8,33*
				JUMLAH DANA	*166.003.600*	*7.993.000*	*4,81*
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*62.093.050*	*2.048.500*	*3,30*
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai aspek Pengendalian Tata Ruang**	**50,00**	**-**	**0,00**
				JUMLAH DANA	***56.507.775***	***2.831.000***	***5,01***
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3,00	-	*0,00*
				JUMLAH DANA	*22.678.600*	*2.831.000*	*12,48*
			Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	1,00	0	*0,00*
				JUMLAH DANA	*33.829.175*	*0*	*0,00*
2	**URUSAN PERTANAHAN**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**25,00**	**0,00**	***0,00***
				JUMLAH DANA	**72.661.800**	**695.000**	***0,96***

			Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan daerah Kab/Kota**	**25,00**	**0,00**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***72.661.800***	***695.000***	***0,96***
			Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	0,00	*0,00*
				JUMLAH DANA	*27.190.250*	*0,00*	*0,00*
			Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	0,00	*0,00*
				JUMLAH DANA	*45.471.550*	*695.000*	*1,53*
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DANGANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	**Persentase ketersediaan tanah objek landreform yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	***45,00***	***0,00***	***0,00***
				JUMLAH DANA	***69.687.800***	***7.489.065***	***10,75***

			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**8,00**	**0,00**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***69.687.800***	***7.489.065***	***10,75***
			Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	8,00	0,00	*0,00*
				JUMLAH DANA	*69.687.800*	*7.489.065*	*10,75*
			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	**Persentase mediasi penanganan sengketa tanah ulayat**	**25,00**	**20,00**	***80,00***
				JUMLAH DANA	***22.684.600***	***2.873.500***	***12,67***
			Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penetapan tanah ulayat dalam daerah kab/kota**	**25,00**	**0,00**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***22.684.600***	***2.873.500***	***12,67***
			Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,00	0,00	*0,00*
				JUMLAH DANA	*18.138.600*	*2.873.500*	*15,84*

			Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1,00	1,00	*100,00*
				JUMLAH DANA	*4.546.000*	*0,00*	*0,00*
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase penatagunaan tanah**	**80,00**	**0,00**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***115.613.350***	***20.174.550***	***17,45***
			Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Objek tanah dengan Penatagunaan Tanah**	**80,00**	**0,00**	***0,00***
				JUMLAH DANA	***115.613.350***	***20.174.550***	***17,45***
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00	0,00	*0,00*
				JUMLAH DANA	*115.613.350*	*20.174.550*	*17,45*
	JUMLAH				**74.286.129.940**	**2.356.974.688**	**3,17**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Triwulan I Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Meningkatnya kuantitas & kualitas infrastruktur wilayah	1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan	%	62,00	55,86	90,10	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Dasar	2	Meningkatnya Pengelolaan Daerah Irigasi	Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	60,00	53,76	89,60	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Kinerja Layanan Publik yang berkualitas, inovatif & berintegrasi	3	Meningkatnya Gedung Pemerintah Yang sesuai standar	Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah yang sesuai standar	%	10,00	5,02	50,20	Cukup
4	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel & Profesional	4	Meningkatnya kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	%	80,22	78,36	97,68	Sangat Berhasil

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pekerjaan umum kian meningkat seiring dalam upaya pengembangan daerah wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk konektifitas antar daerah guna mengakselerasi peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah. Untuk menciptakan kondisi infrastruktur pekerjaan umum yang handal, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung harus mempertimbangkan permasalahan berikut :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan Jalan beserta sarana pelengkap untuk mewujudkan konektivitas antar wilayan dan produktifitas masyarakat	Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur	1. Pagu Anggaran tidak sesuai dengan panjang infrastruktur yang ditangani
		Implementasi pengelolaan Infrastruktur belum optimal	1. Belum adanya kajian dan kebijakan (internal) terkait:
			- Jaringan jalan kota masih memerlukan penanganan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
			2. Jalan Kabupaten yang ada memerlukan penanganan dan pemeliharaan yang baik tiap tahunnya
			3. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam memecahkan berbagai permasalahan yang menjadi tupoksi OPD
			4. Belum adanya database drainase
			5. Masih kurangnya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat
2	Pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam menunjang pertanian	Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur sumber daya air	1. Pagu Anggaran tidak sesuai dengan panjang infrastruktur sumber daya air yang ditangani
		Implementasi pengelolaan Infrastruktur sumber daya air belum optimal	1. Belum adanya neraca air
			2. Belum adanya RTTG (Rencana Tata Tanam Global)

			3.	Belum adanya sistem informasi database irigasi
3	Pemanfaatan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya	Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	1.	Minimnya bangunan yang sesuai dengan RTRW
			2.	Belum tersedianya perubahan RTRW dan RDTR
4	Belum optimalnya pelayanan prima	Penyelesaian Pengaduan masyarakat terkait pemeliharaan jalan masih rendah	1.	Minimnya pengadaan material pemeliharaan jalan
			2.	Minimnya fasilitas penunjang alat berat

Selain dari permasalahan diatas, permasalahan terhadap penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Bidang	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang	1. Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan. 2. Masih rendahnya ketersediaansarana dan prasaranapendukung jalan. 3. Masih rendahnya cakupanlayanan irigasi. 4. Masih rendahnya kualitas jaringan irigasi. 5. Cukup rendahnya akses airbersih bagi masyarakat. 6. Cukup rendahya rumah yang bersanitasi yang layak 7. Masih rendahnya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan standar 8. Masih rendahnya ketaatan terhadap RTRW 9. Belum optimalnya capaianStandar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum	1. Kondisi topografi daerah yang berbukit-bukit dan lahan yang terbatas 2. Belum tersedianya revisi RTRW Kabupaten sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan berdimensi kewilayahan saat ini. 3. Belum sepenuhnya masyarakat memahami terkait lingkungan sehat karena faktor kebiasaan atau tradisi

2	Pertanahan	Belum optimalnya penyelesaian kasus tanah untuk kepentingan pembangunan	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyediaan tanah untuk kepentingan publik

Tabel 2.5
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten dan Peningkatan Jalan Nagari	
2			Peningkatan Jembatan pada Jalan Kabupaten	
3			Pemeliharaan Jalan Kabupaten	
4			Preservasi Jalan	
5			Preservasi Jembatan	
6			Pembangunan Irigasi	
7			Pembangunan Embung	
8			Pembangunan Tebing Sungai	

Dengan melihat isu-isu strategis di atas, Analisa Critical Success Factor (CSF) dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (identifikasi dan mengenali aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan) pada lingkungan internal dan eksternal yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dalam rangka pencapaian tujuan dan misinya secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan rangking penilaian terhadap keterkaitannya dengan visi, misi faktor-faktor keberhasilan disusun sebagai berikut :

a. Manfaatkan tupoksi untuk mendapatkan dana pekerjaan sarana dan prasarana kabupatendi bidang pekerjaan umum;
b. Manfaatkan komitmen antara pimpinan dan staf untuk menangani sarana dan prasarana kabupaten di bidang pekerjaan umum;
c. Gunakan perda tupoksi untuk penanganan sarana dan prasarana Kabupaten di bidang pekerjaan umum;
d. Tingkatkan kualitas aparat dinas dengan memanfaatkan peluang dana dan peraturan tentang otonomi daerah;
e. Manfaatkan peluang dana untuk melengkapi sarana dan prasarana Kabupaten;
f. Manfaatkan tupoksi untuk membina mitra kerja dan masyarakat;
g. Manfaatkan komitmen pimpinan dan staf untuk membangun etos kerja baru dalam rangka memenuhi tuntutan good governance;
h. Tingkatkan kualitas SDM untuk mengimbangi pesatnya minat peran swasta dalam pembangunan serta untuk memenuhi tuntutan good governance.

Berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Program, kegiatan dan Sub Kegiatan maka pada Perubahan Renja Tahun 2024 ini, yang menjadi isu-su strategis adalah :

1. Masih banyaknya jalan kabupaten dalam kondisi rusak, dengan kualitas dan kapasitas jalan yang belum memenuhi standar
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan SDM pengelola untuk mendukung pengelolaan dan ketersediaan air irigasi bagi sawah masyarakat
3. Belum optimalnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan
4. Masih kurangnya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Sijunjung dan Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)
5. Masih banyaknya aset tanah Pemda yang belum bersertipikat, belum terpetakannya tanah ulayat serta belum optimalnya penyelesaian sengketa tanah Pemda
6. Masih kurangnya tenaga teknis/terampil konstruksi yang tersertifikasi

2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah kan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 adalah tahapan selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2012-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021 – 2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan dari atas – bawah serta bawah – atas (topdown – bottom up).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya. Untuk itulah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 – 2026 untuk menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Review terhadap Rencana Kerja SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahwa program dan kegiatan sesuai dengan rancangan Rencana kerja RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya sudah sesuai dengan rancangan rencana kerja RKPD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.6

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA SKPD KABUPATEN SIJUNJUNG

RENCANA KERJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Anggaran**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu Anggaran**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		**DPUPR**		**50.868.316.839**	**URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**DPUPR**		**50.868.316.839**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya urusan penunjang perkantoran**	**DPUPR**	**95%**	**9.814.793.049**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya urusan penunjang perkantoran**	**DPUPR**	**95%**	**9.814.793.049**
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran**	**DPUPR**	**95%**	**177.714.339**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran**	**DPUPR**	**95%**	**177.714.339**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPR	4 Dokumen	66.440.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPR	4 Dokumen	66.440.600

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	DPUPR	3 Laporan	27.528.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	DPUPR	3 Laporan	27.528.400
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPR	4 Laporan	83.745.339	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPR	4 Laporan	83.745.339
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**DPUPR**	**95%**	**5.708.355.115**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**DPUPR**	**95%**	**5.708.355.115**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPR	57 Orang	5.599.439.615	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPUPR	57 Orang	5.599.439.615
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPUPR	1 okumen	30.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPUPR	1 Dokumen	30.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPUPR	4 Dokumen	68.915.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPUPR	4 Dokumen	68.915.500

7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPUPR	2 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPUPR	2 Dokumen	10.000.000
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset Pemda yang terpelihara**	**DPUPR**	**85,00%**	**18.065.511**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset Pemda yang terpelihara**	**DPUPR**	**85,00%**	**18.065.511**
8	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPUPR	1 Dokumen	18.065.511	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPUPR	1 Dokumen	18.065.511
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian yang di proses Tepat Waktu**	**DPUPR**	**90,00%**	**128.261.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian yang di proses Tepat Waktu**	**DPUPR**	**90,00%**	**128.261.000,00**
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPUPR	126 Paket	64.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPUPR	126 Paket	64.000.000,00
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPUPR	3 orang	41.761.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPUPR	3 orang	41.761.000,00

11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPUPR	5 Orang	22.500.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPUPR	5 Orang	22.500.000,00
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**DPUPR**	**90,00%**	**456.007.207,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**DPUPR**	**90,00%**	**456.007.207,00**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPUPR	11 Paket	25.994.670,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPUPR	11 Paket	25.994.670,00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPUPR	0%	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPUPR	0%	-
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPUPR	40 Paket	134.325.623,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPUPR	40 Paket	134.325.623,00
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPUPR	7 Paket	43.616.400,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPUPR	7 Paket	43.616.400,00
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPUPR	1 Laporan	22.036.800,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPUPR	1 Laporan	22.036.800,00

17	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUPR	24 Laporan	230.033.714,00	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUPR	24 Laporan	230.033.714,00
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik**	**DPUPR**	**85%**	**135.341.400,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik**	**DPUPR**	**85%**	**135.341.400,00**
16	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPUPR	6 Paket	49.830.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPUPR	6 Paket	49.830.000,00
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPUPR	4 Paket	85.511.400,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPUPR	4 Paket	85.511.400,00
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Terhadap Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPUPR**	**95,00%**	**1.422.934.450,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Terhadap Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPUPR**	**95,00%**	**1.422.934.450,00**
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPUPR	2 Laporan	66.145.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPUPR	2 Laporan	66.145.500,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPUPR	36 Laporan	1.019.263.950,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPUPR	36 Laporan	1.019.263.950,00

20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPUPR	12 Laporan	337.525.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPUPR	12 Laporan	337.525.000,00
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Terhadap Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**DPUPR**	**95,00%**	**1.768.114.027,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Terhadap Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**DPUPR**	**95,00%**	**1.768.114.027,00**
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPUPR	1 Unit	32.732.950,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPUPR	1 Unit	32.732.950,00
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPUPR	46 Unit	136.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPUPR	46 Unit	136.800.000,00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	DPUPR	5 Unit	774.727.100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	DPUPR	5 Unit	774.727.100,00
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPUPR	5 unit	183.297.377,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPUPR	5 unit	183.297.377,00

25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPUPR	12 unit	339.460.400,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPUPR	12 unit	339.460.400,00
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPUPR	28 Unit	301.096.200,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPUPR	28 Unit	301.096.200,00
B	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)**	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi**	**DPUPR**	**64,45%**	**4.671.689.750,00**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)**	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi**	**DPUPR**	**64,45%**	**4.671.689.750,00**
IX	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KPI yang di Bina**	**DPUPR**	**174 P3A**	**148.032.935,00**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KPI yang di Bina**	**DPUPR**	**174 P3A**	**148.032.935,00**
26	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	DPUPR	50 Lembaga	148.032.935,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	DPUPR	50 Lembaga	148.032.935,00

X	**Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang saluran dan bangunan irigasi dg kondisi baik**	**DPUPR**	**28 KM**	**4.523.656.815**	**Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang saluran dan bangunan irigasi dg kondisi baik**	**DPUPR**	**28 KM**	**4.523.656.815**
27	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	DPUPR	3 Dokumen	228.970.714	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	DPUPR	3 Dokumen	228.970.714
28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR	2,5 KM	2.358.301.251	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR	2,5 KM	2.358.301.251
29	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	DPUPR	1 Unit	436.384.850	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	DPUPR	1 Unit	436.384.850
30	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	DPUPR	2 KM	1.500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	DPUPR	2 KM	1.500.000.000

C	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah sesuai standar**	**DPUPR**	**10,00%**	**1.617.868.570**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah sesuai standar**	**DPUPR**	**10,00%**	**1.617.868.570**
XI	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Rekomendasi IMB /SLF yang Diterbitkan**	**DPUPR**	**95,00%**	**1.617.868.570**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Rekomendasi IMB /SLF yang Diterbitkan**	**DPUPR**	**95,00%**	**1.617.868.570**
31	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	DPUPR	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.000.000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	DPUPR	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.000.000

31	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi,Insentif dan Disinsentif	DPUPR	1 Orang	10.000.000	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi,Insentif dan Disinsentif	DPUPR	1 Orang	10.000.000
32	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	DPUPR	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	DPUPR	1 Dokumen	10.000.000
33	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot	DPUPR	30 Bantuan Teknis	58.742.100	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	DPUPR	30 Bantuan Teknis	58.742.100
34	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	3 Dokumen	1.408.880.470	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	3 Dokumen	1.408.880.470

35	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	DPUPR	1 Dokumen	120.246.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	DPUPR	1 Dokumen	120.246.000
D	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan**	**DPUPR**	**60,00%**	**1.470.437.975**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan**	**DPUPR**	**60,00%**	**1.470.437.975**
XII	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan RTBL**	**DPUPR**	**65%**	**1.470.437.975**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Utilitas dan Pemeliharaan Gedung yang dilaksanakan Tepat Waktu**	**DPUPR**	**65%**	**1.470.437.975**

36	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	DPUPR	2 Kawasan	1.470.437.975	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	DPUPR	2 Kawasan	1.470.437.975
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**DPUPR**	**64,00%**	**32.172.672.909,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**DPUPR**	**64,00%**	**32.172.672.909,00**
XIII	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jalan yang dibangun, dipelihara, direhabilitasi**	**DPUPR**	**9,487 KM**	**32.172.672.909,00**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jalan yang dibangun, dipelihara, direhabilitasi**	**DPUPR**	**9,487 KM**	**32.172.672.909,00**
37	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	DPUPR	4 Dokumen	344.999.800	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	DPUPR	4 Dokumen	344.999.800
38	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	DPUPR	6 Jembatan	2.827.073.000	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	DPUPR	6 Jembatan	2.827.073.000
39	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	DPUPR	3,87 KM	19.121.517.750	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	DPUPR	3,87 KM	19.121.517.750

40	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	DPUPR	829,42 KM	649.999.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	DPUPR	829,42 KM	649.999.000
41	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	99,18 KM	2.738.999.900	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	99,18 KM	2.738.999.900
42	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	DPUPR	267 KM	6.490.083.459	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	DPUPR	267 KM	6.490.083.459
F	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat**	**DPUPR**	**26,55%**	**458.602.100**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat**	**DPUPR**	**26,55%**	**458.602.100**
XIV	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yg bersertifikat**	**DPUPR**	**100 Orang**	**305.807.200**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yg bersertifikat**	**DPUPR**	**100 Orang**	**305.807.200**
43	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	DPUPR	25 Orang	57.571.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	DPUPR	25 Orang	57.571.000
44	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	DPUPR	100 Orang	248.236.200	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	DPUPR	100 Orang	248.236.200

XV	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan informasi terkait jasa konstruksi yg tersedia**	**DPUPR**	**1 Dokumen**	**17.926.400**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan informasi terkait jasa konstruksi yg tersedia**	**DPUPR**	**1 Dokumen**	**17.926.400**
45	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	DPUPR	1 Dokumen	17.926.400	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	DPUPR	1 Dokumen	17.926.400
XVI	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**DPUPR**	**60 Dokumen**	**134.868.500**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**DPUPR**	**60 Dokumen**	**134.868.500**
46	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	DPUPR	60 Paket Pekerjaan	38.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	DPUPR	60 Paket Pekerjaan	38.000.000
47	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruks	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	DPUPR	5 Lembaga	73.933.200	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruks	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	DPUPR	5 Lembaga	73.933.200

48	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Di evaluasi Tertib Usaha	DPUPR	25 Badan Usaha	22.935.300	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Di evaluasi Tertib Usaha	DPUPR	25 Badan Usaha	22.935.300
G	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten**	**DPUPR**	**95,00%**	**662.252.486**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten**	**DPUPR**	**95,00%**	**662.252.486**
XVIII	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase rencana tata ruang sesuai dengan dinamika pembangunan yang berkelanjutan**	**DPUPR**	**25,00%**	**286.626.425**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase rencana tata ruang sesuai dengan dinamika pembangunan yang berkelanjutan**	**DPUPR**	**25,00%**	**286.626.425**
59	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dolumen	127.549.725	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dolumen	127.549.725
60	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	DPUPR	3 Dolumen	135.340.150	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dolumen	135.340.150
61	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	DPUPR	1 Dolumen	23.736.550	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	DPUPR	50 Orang	23.736.550

XIX	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang**	**DPUPR**	**50,00%**	**304.807.111**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang**	**DPUPR**	**50,00%**	**304.807.111**
62	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	DPUPR	60 Dokumen	170.088.375	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	DPUPR	60 Dokumen	170.088.375
63	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		1 Dolumen	72.340.436	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		1 Dolumen	72.340.436
64	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	DPUPR	1 Sistem Informasi	62.378.300	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	DPUPR	1 Sistem Informasi	62.378.300
XX	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah monitoring dan pemantauan pemanfaatan ruang**	**DPUPR**	**160 Kali**	**70.818.950**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah monitoring dan pemantauan pemanfaatan ruang**	**DPUPR**	**160 Kali**	**70.818.950**
65	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	DPUPR	3 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	DPUPR	3 Dokumen	35.000.000

66	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	DPUPR	1 Berita Acara	35.818.950	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	DPUPR	1 Berita Acara	35.818.950
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**189.362.750**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**189.362.750**
H	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**DPUPR**	**25,00%**	**80.000.000,00**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**DPUPR**	**25,00%**	**80.000.000,00**
XXI	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan daerah Kab/Kota**	**DPUPR**	**25,00%**	**80.000.000,00**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan daerah Kab/Kota**	**DPUPR**	**25,00%**	**80.000.000,00**
66	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	30.000.000,00	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	30.000.000,00
67	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Berita Acara	50.000.000,00	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Berita Acara	50.000.000,00

I	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**DPUPR**	**25,00%**	**46.668.750**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**DPUPR**	**25,00%**	**46.668.750**
XXII	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda kab/Kota**	**DPUPR**	**25,00%**	**46.668.750**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda kab/Kota**	**DPUPR**	**25,00%**	**46.668.750**
68	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	DPUPR	1 Dokumen	15.000.000	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	DPUPR	1 Dokumen	15.000.000
69	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	31.668.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	31.668.750

J	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DANGANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE**	**Persentase ketersediaan tanah objek landreform yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**DPUPR**	**45,00%**	**12.354.000**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DANGANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE**	**Persentase ketersediaan tanah objek landreform yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**DPUPR**	**45,00%**	**12.354.000**
XXIII	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot**	**Jumlah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**DPUPR**	**8 Dokumen**	**12.354.000**	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**DPUPR**	**8 Dokumen**	**12.354.000**
70	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		8 Dokumen	12.354.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		8 Dokumen	12.354.000
J	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase mediasi penanganan sengketa tanah ulayat**	**DPUPR**	**25,00%**	**25.800.000**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase mediasi penanganan sengketa tanah ulayat**	**DPUPR**	**25,00%**	**25.800.000**
XXII	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan tanah ulayat dalam daerah kab/kota**	**DPUPR**	**25,00%**	**25.800.000**	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan tanah ulayat dalam daerah kab/kota**	**DPUPR**	**25,00%**	**25.800.000**

70	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	2 Laporan	20.800.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	2 Laporan	20.800.000
71	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	DPUPR	1 Dokumen	5.000.000	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	DPUPR	1 Dokumen	5.000.000
K	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah**	**DPUPR**	**80,00%**	**36.894.000**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah**	**DPUPR**	**80,00%**	**36.894.000**
XX	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUPR**	**80,00%**	**36.894.000**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUPR**	**80,00%**	**36.894.000**
72	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	36.894.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	36.894.000
	JUMLAH				**51.057.679.589**					**51.057.679.589**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung mempertimbangkan berbagai kebijakan baik ditingkat nasional maupun propinsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan antar berbagai level pemerintahan.

Tabel 3.1
Identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi
Kabupaten Sijunjung

No	Kebijakan Nasional	Propinsi	Kabupaten
A.	Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan (lanjutan Direktif Presiden)	Pembangunan, Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah
1.	Koneksitas yang Menjamin tumbuh nya pusat-pusat perdagangan dan industri lanjutan direktif Presiden)	Program pembangunan jalan dan jembatan	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
2.	Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar Wilayah	Program rehabilitasi/ PemeliharaanJalan dan Jembatan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.	Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi		Program peningkatan Sarana dan prasarana pekerjaan umum
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
			Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
			Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan Nasional dan Propinsi beberapa ada yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Sijunjung. Kebijakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, jika dikaitkan dengan tema issue strategis kebijakan nasional dan

dalam kerangka sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, maka secara tidak langsung dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 setidaknya harus menselaraskan dengan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat. Dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, yang berisi 11 program , 25 kegiatan dan 56 Sub Kegiatan, setidaknya terdapat 1 (satu) program/kegiatan yang baik secara langsung/tidak berkaitan dengan issue penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektifitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, satu program/kegiatan tersebut yaitu Program Penyelenggaraan Jalan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SIJUNJUNG

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Penetapan Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan turunan dari Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Tahun 2021-2026. Dimana pada tahun 2025 terdapat 11 Program, 25 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang diusulkan dalam RKPD tahun 2025. Dari 11 Program, 25 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan tersebut, secara umum mencakup tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

1. Tujuan :
    a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Wilayah.
    b. Meningkatnya Kuantitas & Kualitas sarana prasarana dasar.
    c. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional
    d. Meningkatnya Kinerja Layanan Publik yang berkualitas, Inovatif & Integritas

2. Sasaran :
    a. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jalan
    b. Meningkatnya Pengelolaan Daerah Irigasi

c. Meningkatnya Kinerja Manajemen Organisasi
d. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung dan Lingkungannya

3. Program dan Kegiatan :

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung mempertimbangkan beberapa faktor penting, Faktor tersebut diantaranya adalah pencapaian terhadap SPM, yang paling utama di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan pencapaian MDGS di bidang infrastruktur.

Uraian rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun berikutnya.

Berdasarkan Tabel 3.2 ini, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah sesuai dengan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung. Pada Renja kebutuhan dana sebesar Rp. 51.057.679.589,- yang tersebar dengan kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan pencapaian SDGs, serta tersebar ke seluruh kecamatan dan nagari Kabupaten Sijunjung.

TABEL.3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Anggaran tahun 2025				Catatan	RENCANA PAGU TH.2026
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**51.070.033.589,00**			**111.285.381.115,63**
1.03	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**50.868.316.839,00**			**109.815.381.115,63**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah**	Kab.Sijunjung	**95%**	**9.814.793.049,00**	**APBD II**		**9.976.799.765,00**
1.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**177.714.339,00**	**APBD II**		**185.000.000,00**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sijunjung	4 Dokumen	66.440.600	APBD II		70.000.000,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kab.Sijunjung	3 Laporan	27.528.400	APBD II		30.000.000,00
1.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sijunjung	4 Laporan	83.745.339	APBD II		85.000.000,00

1.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**5.708.355.115,00**	APBD II		**5.689.439.615,00**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sijunjung	57 Orang	5.599.439.615,00	APBD II		5.599.439.615,00
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Sijunjung	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD II		-
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sijunjung	4 Dokumen	68.915.500,00	APBD II		70.000.000,00
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab.Sijunjung	2 Dokumen	10.000.000,00	APBD II		20.000.000,00
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset Pemda yang terpelihara**	**Kab.Sijunjung**	**85%**	**18.065.511,00**	**APBD II**		**20.000.000,00**
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sijunjung	1 Dokumen	18.065.511,00	APBD II		20.000.000,00
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian yang di proses Tepat Waktu**	Kab.Sijunjung	**90%**	**128.261.000,00**	APBD II		**140.000.000,00**
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Sijunjung	126 Paket	64.000.000,00	APBD II		70.000.000,00
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Sijunjung	3 orang	41.761.000,00	APBD II		45.000.000,00
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Sijunjung	5 Orang	22.500.000,00	APBD II		25.000.000,00

1.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**456.007.207,00**	**APBD II**		**540.000.000,00**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sijunjung	11 Paket	25.994.670,00	APBD II		30.000.000,00
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Sijunjung	-	-	APBD II		-
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Sijunjung	40 Paket	134.325.623,00	APBD II		140.000.000,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Sijunjung	7 Paket	43.616.400,00	APBD II		45.000.000,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Sijunjung	1 Laporan	22.036.800,00	APBD II		25.000.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Sijunjung	24 Laporan	230.033.714,00	APBD II		300.000.000,00
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**135.341.400,00**	**APBD II**		**135.000.000,00**
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Sijunjung	6 Paket	49.830.000,00	APBD II		50.000.000,00
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Sijunjung	4 Paket	85.511.400,00	APBD II		85.000.000,00
1.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**1.422.934.450,00**	APBD II		**1.436.263.950,00**
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sijunjung	2 Laporan	66.145.500,00	APBD II		67.000.000,00

1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sijunjung	36 Laporan	1.019.263.950,00	APBD II		1.019.263.950,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sijunjung	12 Laporan	337.525.000,00	APBD II		350.000.000,00
1.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik.**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**1.768.114.027,00**	**APBD II**		**1.831.096.200,00**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Sijunjung	1 Unit	32.732.950,00	APBD II		35.000.000,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sijunjung	46 Unit	136.800.000,00	APBD II		140.000.000,00
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab.Sijunjung	5 Unit	774.727.100,00	APBD II		800.000.000,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Sijunjung	5 unit	183.297.377,00	APBD II		185.000.000,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Sijunjung	12 unit	339.460.400,00	APBD II		350.000.000,00
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Sijunjung	28 Unit	301.096.200,00	APBD II		321.096.200,00
1.03.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi**	*Kab.Sijunjung*	**64,45%**	**4.671.689.750,00**	APBD II		**22.800.000.000,00**
1.03.02.2.01.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KPI yang di Bina**		174 P3A	**148.032.935,00**	APBD II		**200.000.000,00**

1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota\	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	*Kab.Sijunjung*	50 Lembaga	148.032.935,00	APBD II		200.000.000,00
1.03.02.2.02.	**Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang saluran dan bangunan irigasi dg kondisi baik**		**28 KM**	**4.523.656.815,00**	**APBD II**		**22.600.000.000,00**
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Kab. Sijunjung			APBD II		5.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Kab. Sijunjung			APBD II		2.500.000.000,00
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Sijunjung			APBD II		3.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Kab. Sijunjung		-	APBD II		3.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	2,5 KM	2.358.301.251,00	APBD II		3.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	1 Unit	436.384.850,00	APBD II		1.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Sijunjung	2 KM	1.500.000.000,00	APBD II		2.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Sijunjung			APBD II		2.500.000.000,00
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	228.970.714,00	APBD II		600.000.000,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah sesuai standar**	**Kabupaten Sijunjung**	**10,00%**	**1.617.868.570,00**	**APBD II**		**2.288.742.100,00**

1.03.08.2.01.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Rekomendasi IMB /SLF yang Diterbitkan**	**Kabupaten Sijunjung**	**95%**	**1.617.868.570,00**	**APBD II**		**2.288.742.100,00**
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Kabupaten Sijunjung	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.000.000,00	APBD II		10.000.000,00
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi,Insentif dan Disinsentif	Kabupaten Sijunjung	1 Orang	10.000.000,00	APBD II		10.000.000,00
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD II		10.000.000,00
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot	Kabupaten Sijunjung	30 Bantuan Teknis	58.742.100,00	APBD II		58.742.100,00
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	1.408.880.470,00	APBD II		2.000.000.000,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	120.246.000,00	APBD II		200.000.000,00

1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan**	***Kabupaten Sijunjung***	**60,00%**	**1.470.437.975,00**	**APBD II**		**2.200.000.000,00**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan RTBL**		**60,00%**	**1.470.437.975,00**	**APBD II**		**2.200.000.000,00**
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kabupaten Sijunjung	2 Kawasan	1.470.437.975,00	APBD II		2.000.000.000,00
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung			APBD II		200.000.000,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**		**64,00%**	**32.172.672.909,00**	**APBD II**		**70.979.839.250,63**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jalan yang dibangun, dipelihara, direhabilitasi**	**Kabupaten Sijunjung**	**9,487KM**	**32.172.672.909,00**	**APBD II**		**70.979.839.250,63**
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Kabupaten Sijunjung		-	APBD II		50.000.000,00
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kabupaten Sijunjung	4 Dokumen	344.999.800,00	APBD II		400.000.000,00
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Kabupaten Sijunjung	6 Jembatan	2.827.073.000,00	APBD II		3.000.000.000,00

1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kabupaten Sijunjung	3,87 KM	19.121.517.750,00	APBD II		40.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kabupaten Sijunjung			APBD II		1.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kabupaten Sijunjung			APBD II		600.000.000,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kabupaten Sijunjung	829,42 KM	649.999.000,00	APBD II		700.000.000,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kabupaten Sijunjung	99,18 KM	2.738.999.900,00	APBD II		12.953.351.840,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kabupaten Sijunjung	267 KM	6.490.083.459,00	APBD II		12.276.487.410,63
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat**		**26,55%**	**458.602.100,00**	**APBD II**		**610.000.000,00**
1.03.11.2.01.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yg bersertifikat**	**Kabupaten Sijunjung**	**100 Orang**	**305.807.200,00**	**APBD II**		**450.000.000,00**
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kabupaten Sijunjung	25 Orang	57.571.000,00	APBD II		100.000.000,00
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Sijunjung	25 Lembaga	-	APBD II		100.000.000,00
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kabupaten Sijunjung	100 Orang	248.236.200,00	APBD II		250.000.000,00
1.03.11.2.02.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan informasi terkait jasa konstruksi yg tersedia**	**Kabupaten Sijunjung**	**1 Dokumen**	**17.926.400,00**	**APBD II**		**20.000.000,00**

1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	17.926.400,00	APBD II		20.000.000,00
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kabupaten Sijunjung	1 Layanan				20.000.000,00
1.03.11.2.04.	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Kabupaten Sijunjung**	**60 Dokumen**	**134.868.500,00**	APBD II		**140.000.000,00**
1.03.11.2.04.004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kabupaten Sijunjung	60 Paket Pekerjaan	38.000.000,00	APBD II		40.000.000,00
1.03.11.2.04.006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruks	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kabupaten Sijunjung	5 Lembaga	73.933.200,00	APBD II		100.000.000,00
1.03.11.2.04.007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Di evaluasi Tertib Usaha	Kabupaten Sijunjung	25 Badan Usaha	22.935.300,00	APBD II		30.000.000,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten**	**Kabupaten Sijunjung**	**95,00%**	**662.252.486,00**	**APBD II**		**960.000.000,00**
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase rencana tata ruang sesuai dengan dinamika pembangunan yang berkelanjutan**	**Kabupaten Sijunjung**	**25,00%**	**286.626.425,00**	**APBD II**		**325.000.000,00**
1.03.12.2.01.005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dolumen	127.549.725,00	APBD II		150.000.000,00

1.03.12.2.01.006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dolumen	135.340.150,00	APBD II		150.000.000,00
1.03.12.2.01.013	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kabupaten Sijunjung	50 Orang	23.736.550,00	APBD II		25.000.000,00
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pendukung rencana tata ruang**	**Kabupaten Sijunjung**	-	**-**			**140.000.000,00**
1.03.12.2.02.005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota	Kabupaten Sijunjung		-			140.000.000,00
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang**	**Kabupaten Sijunjung**	**50,00%**	**304.807.111,00**	**APBD II**		**415.000.000,00**
1.03.12.2.03.003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kabupaten Sijunjung	-	-	APBD II		75.000.000,00
1.03.12.2.03.004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kabupaten Sijunjung	60 Dokumen	170.088.375,00	APBD II		200.000.000,00
1.03.12.2.03.005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kabupaten Sijunjung	1 Dolumen	72.340.436,00	APBD II		75.000.000,00
1.03.12.2.03.007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kabupaten Sijunjung	1 Sistem Informasi	62.378.300,00	APBD II		65.000.000,00
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah monitoring dan pemantauan pemanfaatan ruang**	**Kabupaten Sijunjung**	**160 Kali**	**70.818.950,00**	**APBD II**		**80.000.000,00**
1.03.12.2.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	35.000.000,00	APBD II		40.000.000,00

1.03.12.2.04.013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	35.818.950,00	APBD II		40.000.000,00
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**201.716.750,00**	**APBD II**		**1.470.000.000,00**
2.10.04.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**		**25,00%**	**80.000.000,00**	APBD II		**50.000.000,00**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan daerah Kab/Kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**25,00%**	**80.000.000,00**	**APBD II**		**50.000.000,00**
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD II		50.000.000,00
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD II		80.000.000,00
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Kabupaten Sijunjung**	**25,00%**	**46.668.750,00**	**APBD II**		**120.000.000,00**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda kab/Kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**25,00%**	**46.668.750,00**	**APBD II**		**120.000.000,00**
2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD II		50.000.000,00

2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	31.668.750,00	APBD II		70.000.000,00
02.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DANGANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE**	**Persentase ketersediaan tanah objek landreform yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**Kabupaten Sijunjung**	**45,00%**	**12.354.000,00**	**APBD II**		**200.000.000,00**
02.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot**	**Jumlah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**Kabupaten Sijunjung**	**8 Dokumen**	**12.354.000**	**APBD II**		**200.000.000,00**
02.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung					
02.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kabupaten Sijunjung	8 Dokumen	12.354.000	APBD II		200.000.000
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase mediasi penanganan sengketa tanah ulayat**		**25,00%**	**25.800.000,00**	**APBD II**		**100.000.000,00**
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan tanah ulayat dalam daerah kab/kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**25,00%**	**25.800.000,00**	**APBD II**		**100.000.000,00**
2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	2 Laporan	20.800.000,00	APBD II		50.000.000,00

2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD II		50.000.000,00
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah**		**80%**	**36.894.000,00**	**APBD II**		**1.000.000.000,00**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kab/Kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**80%**	**36.894.000,00**	**APBD II**		**1.000.000.000,00**
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	36.894.000,00	APBD II		1.000.000.000,00
				JUMLAH	**51.070.033.589,00**			**111.285.381.115,63**

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah, dan untuk pencapaian SDGs serta NSPK Tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp. 51.070.033.589,00,- yang terurai pada 11 program, 25 Kegiatan dan 56 sub Kegiatan, seperti yang tercantum pada pada table.4.1 dibawah ini :

TABEL.4.1

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB.SIJUNJUNG

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU	SUMBER DANA	RENCANA PAGU TH.2026
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**51.070.033.589,00**		**111.285.381.115,63**
1.03	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**50.868.316.839,00**		**109.815.381.115,63**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**9.814.793.049,00**	**APBD II**	**9.976.799.765,00**
1.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**177.714.339,00**	**APBD II**	**185.000.000,00**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sijunjung	4 Dokumen	66.440.600	APBD II	70.000.000,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kab.Sijunjung	3 Laporan	27.528.400	APBD II	30.000.000,00
1.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sijunjung	4 Laporan	83.745.339	APBD II	85.000.000,00

1.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**5.708.355.115,00**	APBD II	**5.689.439.615,00**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sijunjung	57 Orang	5.599.439.615,00	APBD II	5.599.439.615,00
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Sijunjung	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD II	-
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sijunjung	4 Dokumen	68.915.500,00	APBD II	70.000.000,00
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab.Sijunjung	2 Dokumen	10.000.000,00	APBD II	20.000.000,00
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset Pemda yang terpelihara**	**Kab.Sijunjung**	**85%**	**18.065.511,00**	**APBD II**	**20.000.000,00**
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sijunjung	1 Dokumen	18.065.511,00	APBD II	20.000.000,00
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian yang di proses Tepat Waktu**	Kab.Sijunjung	**90%**	**128.261.000,00**	APBD II	**140.000.000,00**
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Sijunjung	126 Paket	64.000.000,00	APBD II	70.000.000,00

1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Sijunjung	3 orang	41.761.000,00	APBD II	45.000.000,00
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Sijunjung	5 Orang	22.500.000,00	APBD II	25.000.000,00
1.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**456.007.207,00**	**APBD II**	**540.000.000,00**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sijunjung	11 Paket	25.994.670,00	APBD II	30.000.000,00
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Sijunjung	-	-	APBD II	-
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Sijunjung	40 Paket	134.325.623,00	APBD II	140.000.000,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Sijunjung	7 Paket	43.616.400,00	APBD II	45.000.000,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Sijunjung	1 Laporan	22.036.800,00	APBD II	25.000.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Sijunjung	24 Laporan	230.033.714,00	APBD II	300.000.000,00

1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**135.341.400,00**	**APBD II**	**135.000.000,00**
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Sijunjung	6 Paket	49.830.000,00	APBD II	50.000.000,00
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Sijunjung	4 Paket	85.511.400,00	APBD II	85.000.000,00
1.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**1.422.934.450,00**	APBD II	**1.436.263.950,00**
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sijunjung	2 Laporan	66.145.500,00	APBD II	67.000.000,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sijunjung	36 Laporan	1.019.263.950,00	APBD II	1.019.263.950,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sijunjung	12 Laporan	337.525.000,00	APBD II	350.000.000,00
1.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Aset OPD dalam keadaan baik.**	**Kab.Sijunjung**	**95%**	**1.768.114.027,00**	**APBD II**	**1.831.096.200,00**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Sijunjung	1 Unit	32.732.950,00	APBD II	35.000.000,00

1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sijunjung	46 Unit	136.800.000,00	APBD II	140.000.000,00
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab.Sijunjung	5 Unit	774.727.100,00	APBD II	800.000.000,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Sijunjung	5 unit	183.297.377,00	APBD II	185.000.000,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Sijunjung	12 unit	339.460.400,00	APBD II	350.000.000,00
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Sijunjung	28 Unit	301.096.200,00	APBD II	321.096.200,00
1.03.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi**	**Kab.Sijunjung**	**64,45%**	**4.671.689.750,00**	APBD II	**22.800.000.000,00**
1.03.02.2.01.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KPI yang di Bina**		174 P3A	**148.032.935,00**	APBD II	**200.000.000,00**
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota\	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kab.Sijunjung	50 Lembaga	148.032.935,00	APBD II	200.000.000,00
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kab.Sijunjung	KM			

1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	*Kab.Sijunjung*	0	-		-
1.03.02.2.02.	**Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang saluran dan bangunan irigasi dg kondisi baik**		**28 KM**	**4.523.656.815,00**	**APBD II**	**22.600.000.000,00**
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Kab. Sijunjung			APBD II	5.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Kab. Sijunjung			APBD II	2.500.000.000,00
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Sijunjung			APBD II	3.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Kab. Sijunjung		-	APBD II	3.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	2,5 KM	***2.358.301.251,00***	APBD II	3.000.000.000,00
	Biaya Umum				*163.301.251,00*	APBD II	
	D.I Sungai Bage		Nagari Padang Laweh Selatan Kec.Koto VII		*150.000.000,00*	APBD II	
	D.I Batu Kapur		Nagari Kunpar Kec.Kamang Baru		*150.000.000,00*	APBD II	
	D.I Batang Samek		Nagari Sungai Betung Kec.Kamang Baru		*100.000.000,00*	APBD II	
	D.I Batang Sampek		Nagari Aia Angek Kec.Sijunjung		*100.000.000,00*	APBD II	

	D.I Agang Besar		Nagari Bukit Bual Kec.Koto VII		*150.000.000,00*	APBD II	
	D.I Batang Paliki		Nagari TBA Selatan Kec. Sumpur Kudus		*100.000.000,00*	APBD II	
	D.I Sei. Malutu		Nagari Sisawah Kec.Sumpur Kudus		*120.000.000,00*	APBD II	
	D.I Bandar Koto Tuo		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus		*125.000.000,00*	APBD II	
	D.I Bandar IX Lurah		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus		*500.000.000,00*	APBD II	
	D.I Palakuik		Nagari Buluh Kasok Kec.Lubuk Tarok		*150.000.000,00*	APBD II	
	D.I Tabek Lolo		Nagari Buluh Kasok Kec.Lubuk Tarok		*100.000.000,00*	APBD II	
	D.I Mudik Air		Nagari Lalan Kec.Lubuk Tarok		*100.000.000,00*	APBD II	
	D.I Sungai Tanjung		Nagari Langki Kec.Tanjung Gadang		*200.000.000,00*	APBD II	
	D.I Cabe		Nagari TBA Selatan Kec.Sumpur Kudus		*150.000.000,00*	APBD II	
	D.I Bandar Kampung		Nagari Sungai Betung Kec.Kamang Baru				
	D.I Mudik Paru		Nagari Paru Kec.Sijunjung				
	D.I Lubuk Rumbio		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus				

	Rehab Saluran Irigasi Amparu		Nagari Paru Kec.Sijunjung				
	Rehab Tali Bandar Godang Jorong Pintu Rayo		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sawah Lawas (DAK)		Nag. Kumanis Kec. Sumpur Kudus				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lubuk Paraku (DAK)		Nag. Pamuatan Kec.Kupitan				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lubuk Rimbo (DAK)		Nag. Pulasan Kec. Tanjung Gadang				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Lawas Kupitan (DAK)		Nag. Batu Manjulur Kec. Kupitan				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aie Amo (DAK)		Nag. Aie Amo Kec. Kamang Baru				
	Pembuatan tali bandar dari naka aie ke bawah bungo		Nagari Pamuatan Kec.Kupitan				
	D.I Ambatan		Nagari Koto Baru Kec. IV Nagari				
	D.I Padang Bariang		Nagari lubuk Tarok Kec.Lubuk tarok				
	D.I Muaro Kaluai		Nagari Langki Kec.Tanjung Gadang				
	D.I Tobek Kociak		Nagari Tamparungo Kec.Sumpur Kudus				

	D.I Sawah Manongah		Nagari Silantai Kec.Sumpur Kudus				
	D.I Palukuik (DI lurah batu kudo)		Nagari Mundam Sakti Kec.IV Nagari				
	D.I Sikumbu		Nagari Paru Kec.Sijunjung				
	D.I Sungai Napar		Nagari Timbulun Kec.Tanjung Gadang				
	D.I Kurayo		Nagari Limo Koto Kec.Koto VII				
	D.I Tabek Penti		Nagari Tanjung Labuah Kec.Sumpur Kudus				
	D.I Batang Mingkudu		Nagari Lubuk Tarantang Kec.Kamang Baru				
	D.I Tabek Potai		Nagari Buluh Kasok Kec.\				
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Sijunjung	1 Unit	**436.384.850,00**	APBD II	1.000.000.000,00
	Biaya Umum				36.384.850,00		
	D.I Mudiak Alahan		Nagari Paru Kec.Sijunjung				
	D.I Kalang Batang		Nagari Kampung Dalam Kec.Lubuk Tarok		400.000.000,00		

	D.I Tabek Taratak		Nagari. Aia Amo Kec.Kamang Baru				
	Rehab Berat D.I Siminai I Jorong Unggan Bukik		Nagari Unggan Kec.Sumpur Kudus				
	Rehab Irigasi Sawah Subarang Jorong Tapi Balai		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus				
	D.I Bawah Rumah SP		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus				
	D.I Bandar Gadang Silantai		Nagari Silantai Kec.Sumpur Kudus				
	D.I Lubuk Hijau		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus				
	D.I Lubuk Kumpai		Nagari Kandang Baru Kec.Sijunjung				
	D.I Batu Gadang		Nagari Paru Kec.Sijunjung				
	D.I Batu Harimau		Nagari MundamKec.IV Nagari				
	D.I Lubuk Batu Licin		Nagari Sibakur Kec.Kamang Baru				
	D. I Sungai Sariek		Nagari Langki Kec.Tanjung Gadang				
	D.I Sungai Tanjung		Nagari Langki Kec.Tanjung Gadang				

	D.I Tandikek		Desa Kampung Baru Kec.Kupitan				
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Sijunjung	2 KM	**1.500.000.000,00**	APBD II	2.000.000.000,00
	Biaya Umum				100.000.000,00		
1.03.02.2.02.0022	Pengembalian Fungsi Jaringan irigasi (10 D.I) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Sijunjung		1.400.000.000,00	APBD II	2.500.000.000,00
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	**228.970.714,00**	APBD II	600.000.000,00
	Biaya Umum				78.970.714,00		
	Perencanaan APBD I		Kab. Sijunjung	2 Dokumen	100.000.000,00		
	Perencanaan DAK		Kab. Sijunjung	1 Dokumen	50.000.000,00		
	Perencanaan APBD II		Kab. Sijunjung	2 Dokumen			

1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah sesuai standar**	**Kabupaten Sijunjung**	**10,00%**	**1.617.868.570,00**	**APBD II**	**2.288.742.100,00**
1.03.08.2.01.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Rekomendasi IMB /SLF yang Diterbitkan**	**Kabupaten Sijunjung**	**95%**	**1.617.868.570,00**	**APBD II**	**2.288.742.100,00**
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Kabupaten Sijunjung	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.000.000,00	APBD II	10.000.000,00
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi,Insentif dan Disinsentif	Kabupaten Sijunjung	1 Orang	10.000.000,00	APBD II	10.000.000,00
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD II	10.000.000,00
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	30 Bantuan Teknis	58.742.100,00	APBD II	58.742.100,00

1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	**1.408.880.470,00**	APBD II	2.000.000.000,00
	Lanjutan rehab masjid istiqlal		Muaro Sijunjung				
	Landscape kantor bapppeda		Muaro Sijunjung		1.000.000.000,00		
	Pengawasan landscape kantor bapppeda		Muaro Sijunjung		-		
	Landscape kantor bupati		Muaro Sijunjung				
	Rehab Gedung Kantor Inspektorat		Muaro Sijunjung				
	Pengawasan Rehab Gedung Kantor Inspektorat		Muaro Sijunjung				
	Perencanaan Paket I		Muaro Sijunjung		100.000.000,00		
	Perencanaan Paket II		Muaro Sijunjung		100.000.000,00		
	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Muaro Sijunjung				
	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas Perkim-LH		Muaro Sijunjung				
	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan DPMN		Muaro Sijunjung				
	Biaya Operasional				208.880.470,00		

1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	120.246.000,00	APBD II	200.000.000,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan**	***Kabupaten Sijunjung***	**60%**	**1.470.437.975,00**	**APBD II**	**2.200.000.000,00**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan RTBL**		**60%**	**1.470.437.975,00**	**APBD II**	**2.200.000.000,00**
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kabupaten Sijunjung	2 Kawasan	1.470.437.975,00	APBD II	2.000.000.000,00
	Pembangunan gerbang batas Kabupaten Sijunjung - Kota Sawahlunto		Kabupaten Sijunjung				
	Pengawasan Pembangunan gerbang batas kabupaten sijunjung - kota sawahlunto		Kabupaten Sijunjung				

	Pembangunan DAM Belakang Kantor Wali Mundam Sakti		Nagari Mundam Sakti Kec.IV Nagari				
	Master Plan Sport Center		Muaro Sijunjung				
	Perencanaan kawasan gerbang geosite nagari silokek		Muaro Sijunjung				
	Pembangunan Kawasan Gerbang Geosite Nagari Silokek		Nagari Silokek Kec.Sijunjung				
	Parkir RTH		Muaro Sijunjung				
	RTP Lansek Manih		Muaro Sijunjung				
	Perencanaan Landscape dan Dinding Penahan Tebing Hotel Bukik Gadang		Muaro Sijunjung		-		
	Landscape dan Dinding Penahan Tebing Hotel Bukik Gadang		Muaro Sijunjung		1.290.000.000,00		
	Pengawasan Landscape dan Dinding Penahan Tebing Hotel Bukik Gadang		Muaro Sijunjung		-		
	Biaya Operasional				180.437.975,00		
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung			APBD II	200.000.000,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**		**64,00%**	**32.172.672.909,00**	**APBD II**	**70.979.839.250,63**

1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jalan yang dibangun, dipelihara, direhabilitasi**	**Kabupaten Sijunjung**	**9,487KM**	**32.172.672.909,00**	**APBD II**	**70.979.839.250,63**
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Kabupaten Sijunjung		-	APBD II	50.000.000,00
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	*Kabupaten Sijunjung*	4 Dokumen	**344.999.800,00**	APBD II	400.000.000,00
	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Paket I				75.000.000,00		
	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Paket II				75.000.000,00		
	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Paket III				75.000.000,00		
	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Paket IV				75.000.000,00		
	Biaya Umum				44.999.800,00		
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Kabupaten Sijunjung	6 Jembatan	2.827.073.000,00	APBD II	3.000.000.000,00
	Jembatan beton sungai batang lawung jorong lembah gunung		Nagari Siaur Kec.Kamang Baru		200.000.000,00		
	Jembatan Polo Duo jorong solok badak		Nagari Limo Koto Kec.Kamang Baru		100.000.000,00		
	Pembangunan Jembatan Paru		Nagari Paru Kec Sijunjung		200.000.000,00		

	Pembangunan Bangunan Bawah Jembatan Tigo Korong Lubuk Tarok (bangunan bawah)		Nagari Lubuk Tarok Kec.Lubuk Tarok		1.500.000.000,00		
	Pembangunan Jembatan Permanen Buluh Rotan - Guguk		Nagari Guguk Kec.Koto VII				
	Pembangunan Jembatan Permanen Pasar Durian Gadang		Nagari Durian Gadang Kec.Sijunjung				
	Pembangunan Jembatan Masjid Basrah Desa Kampung Baru		Nagari Kampung Baru Kec.Kupitan				
	Pembangunan Jembatan Permanen Batu Tadoda Pematang Panjang		Nagari Pematang Panjang Kec.Sijunjung		327.073.000,00		
	Pembangunan Jembatan Mudik Takung Nagari Siaur		Nagari Siaur Kec.Kamang Baru		350.000.000,00		
	Penggantian Jembatan Padang Ranah ke Tinggolang Sijunjung		Nagari Sijunjung Kec.Sijunjung				
	Jembatan Batang Sinamar - Monumen/ Tugu Hari Jadi Kabupaten TBA		Nagari Kumanis Kec.Sumpur Kudus				
	Pembangunan Jembatan Jorong Tanjung Gadang Utara Nagari Kumanis		Nagari Kumanis Kec.Sumpur Kudus				
	Pembangunan Jembatan Gantung ke Jembatan Permanen di Batu Palimauan Batu Manjulur		Nagari batu Manjulur Kec.Kupitan				
	Biaya Umum				150.000.000,00		

1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kabupaten Sijunjung	3,87 KM	**19.121.517.750,00**	APBD II	40.000.000.000,00
	Rehab/ Rigit Beton Jalan Kabupaten Lintas Sumatera-Simpang Tiga (LPN)		Nagari Kandang Baru Kec.Sijunjung		200.000.000,00		
	Lanjutan Rigit Beton Jalan Lubuk Sungai Pandan-ke Palintangan		Nagari Kampung Dalam Kec.Lubuk Tarok		200.000.000,00		
	Lanjutan Peningkatan Jalan Tigo Korong ke SMA N 12 Sijunjung		Nagari Lubuk Tarok Kec.Lubuk Tarok		200.000.000,00		
	Rigit Beton Jalan Koto Salo Simaru + Plat dwiker		Nagari Sumpur Kudus Selatan Kec.Sumpur Kudus		200.000.000,00		
	Lanjutan Rigit Beton Jalan Sisawah-Padang Laweh		Nagari Sisawah Kec.Sumpur Kudus		200.000.000,00		
	Peningkatan Jalan Samping Kantor Wali ke Batas Tanah Datar (rigit beton dan jembatan)		Nagari Kumanis Kec.Sumpur Kudus		200.000.000,00		
	Lanjutan Rigit Beton Jalan Batang Lawas Jorong Guguk Tinggi		Nagari Padang Sibusuk Kec. Kupitan		200.000.000,00		
	Lanjutan Rigit beton jalan SDN 20 Padang Laweh ke Bukit Pincuran Jorong pasar gambok		Nagari Padang Laweh Selatan Kec. Koto VII		200.000.000,00		
	Perbaikan Jalan Padang Galomo Jorong Batu Gandang		Nagari Limo Koto Kec.Koto VII		100.000.000,00		
	Peningkatan Ruas Jalan Tanah Bedantung - Lalan		Nagari Sijunjung - Nagari Lalan		1.000.000.000,00		

	Peningkatan Jalan Padang Sibusuk - Kampung Baru - Batu Manjulur		Nagari Padang Sibusuk-Kampung Baru-Batu Manjulur		3.119.453.750,00		
	Peningkatan Jalan Simpang Kamang - Aie Amo		Nagari Kamang-Nagari Air Amo Kec.kamang Baru				
	Peningkatan Jalan Aie Amo - Sei. Betung		Nagari Air Amo Kec.kamang Baru				
	Lanjutan Peningkatan Jalan Banjar Tangah - Lubuk Kapiek		Nagari Air Amo Kec.kamang Baru		3.000.000.000,00		
	Rigit Beton Jalan Mudik Takung		Nagari Muaro Takung Kec.Kamang Baru				
	Pembangunan Rigit Beton dan Tali Bandar Jalan Jorong Batu Balang ke Solok Badak		Nagari Limo Koto kec.Koto VII				
	Peningkatan Jalan dari Jembatan Menuju Balai Benih Ikan (BBI)						
	Pembangunan/ Pengerasan Jalan Padang Ranah ke Tinggolang						
	Pembangunan Jalan Simpang IV - Jorong Koto Tinggi						
	Pembangunan Jalan Simpang IV - Jorong Pauh						
	Biaya Umum				200.000.000,00		

	Penanganan Koridor Ruas Jalan DAK				10.102.064.000,00		
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	*Kabupaten Sijunjung*			APBD II	1.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	*Kabupaten Sijunjung*			APBD II	600.000.000,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	*Kabupaten Sijunjung*	829,42 KM	649.999.000,00	APBD II	700.000.000,00
	Survey Kondisi Jembatan				175.000.000,00		
	Survey Kondisi Jalan				400.000.000,00		
	Biaya Umum				74.999.000,00		
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kabupaten Sijunjung	99,18 KM	2.738.999.900,00	APBD II	12.953.351.840,00
	Pembangunan Drainase & Plat Dwiker Depan Paud Latanza (Ruas Jalan Koto Tuo-Muaro)		Nagari Koto Tuo Kec.IV Nagari		200.000.000,00		
	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Muaro- Koto Tuo (sisingamangaraja di jorong Pematang Anjuang)		Nagari Muaro Kec.Sijunjung		200.000.000,00		
	Drainase Jalan Simpang Mangga ke Tombang (Jalan Kabupaten)		Nagari Sumpur Kudus Kec.Sumpur Kudus		200.000.000,00		

	Pembangunan Saluran Drainase Tamparungo-Sumpur Kudus		Nagari Tanjuang Labuah Kec.Sumpur Kudus		200.000.000,00		
	Drainase jalan perintis Sungai Lansek		Nagari Sungai Lansek Kec.Kamang Baru		200.000.000,00		
	Drainase jalan kabupaten Simpang Kamang-Aie Amo (depan kantor wali nagari maloro)		Nagari Maloro Kec.Kamang Baru		200.000.000,00		
	Lanjutan pembuatan drianase jalan kabupaten Aie Amo-Sungai Betung (Jr koto dan Jr Bandar Pematang)		Nagari Sungai Betung Kec.Kamang Baru		200.000.000,00		
	Peningkatan jalan kabupaten (nag.tj kaliang-PT. SMP) jorong Mudaik Imuak (drainase Jalan Kabupaten)		Nagari Tanjuang Kaliang Kec.Kamang Baru		200.000.000,00		
	Drainase jalan jorong Koto Palaluar		Nagari Palaluar Kec. Koto VII		200.000.000,00		
	Rehab Jalan Tanah Badantung - Pudak		Nagari Sijunjung Kec.Sijunjung		-		
	Drainase Jalan Muaro - Koto Tuo		Nagari Muaro -Nagari Koto Tuo		200.000.000,00		
	Drainase/ Saluran Simpang IV TBA - Payo Gaek						
	Rehab Jalan Jorong Kayu Gadih						
	Drainase/ Saluran Air Jorong Tanjung Raya						

	Rigit Beton Jalan Kabupaten Ruas Sisawah - Rumbai						
	Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan Utama Kab. Sijunjung						
	Lanjutan Rigit Beton Jalan Bukit Pincuran ke Batu Baniang						
	Rigit Beton Jalan Ekor Koto Tuo - Pulai						
	Rigit Beton Jalan Solok Manggis ke SDN 12 Padang Laweh						
	Rehab Jembatan Gantung Ujung Padang Limbaru						
	Lanjutan Rehab/ Pemeliharaaan Jalan Kelok Riak - Tanjung Beringin						
	Lanjutan Rigit Jalan Batu Gandang ke Batu Balang						
	Penanganan Tanggap Darurat Bencana				588.999.900,00		
	Biaya Umum				150.000.000,00		
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	*Kabupaten Sijunjung*	267 KM	6.490.083.459,00	APBD II	12.276.487.410,63
	Pemeliharaan Rutin Jembatan				850.000.000,00		

	Patching Aspal Badan Jalan				3.000.083.459,00		
	Pemeliharaan Struktur Badan Jalan dan Rumija				2.500.000.000,00		
	Biaya Umum				140.000.000,00		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat**		**26,55%**	**458.602.100,00**	**APBD II**	**610.000.000,00**
1.03.11.2.01.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yg bersertifikat**	**Kabupaten Sijunjung**	**100 Orang**	**305.807.200,00**	**APBD II**	**450.000.000,00**
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kabupaten Sijunjung	25 Orang	57.571.000,00	APBD II	100.000.000,00
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Sijunjung	25 Lembaga	-	APBD II	100.000.000,00
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kabupaten Sijunjung	100 Orang	248.236.200,00	APBD II	250.000.000,00
1.03.11.2.02.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan informasi terkait jasa konstruksi yg tersedia**	**Kabupaten Sijunjung**	**1 Dokumen**	**17.926.400,00**	APBD II	**20.000.000,00**

1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	17.926.400,00	APBD II	20.000.000,00
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kabupaten Sijunjung	1 Layanan			20.000.000,00
1.03.11.2.04.	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Kabupaten Sijunjung**	**60 Dokumen**	**134.868.500,00**	APBD II	**140.000.000,00**
1.03.11.2.04.004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kabupaten Sijunjung	60 Paket Pekerjaan	38.000.000,00	APBD II	40.000.000,00
1.03.11.2.04.006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruks	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kabupaten Sijunjung	5 Lembaga	73.933.200,00	APBD II	100.000.000,00
1.03.11.2.04.007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Di evaluasi Tertib Usaha	Kabupaten Sijunjung	25 Badan Usaha	22.935.300,00	APBD II	30.000.000,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten**	**Kabupaten Sijunjung**	**95%**	**662.252.486,00**	**APBD II**	**960.000.000,00**

1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase rencana tata ruang sesuai dengan dinamika pembangunan yang berkelanjutan**	**Kabupaten Sijunjung**	**25,00%**	**286.626.425,00**	**APBD II**	**325.000.000,00**
1.03.12.2.01.005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dolumen	127.549.725,00	APBD II	150.000.000,00
1.03.12.2.01.006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dolumen	135.340.150,00	APBD II	150.000.000,00
1.03.12.2.01.013	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kabupaten Sijunjung	50 Orang	23.736.550,00	APBD II	25.000.000,00
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pendukung rencana tata ruang**	**Kabupaten Sijunjung**	-	**-**		**140.000.000,00**
1.03.12.2.02.005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota	Kabupaten Sijunjung		-		140.000.000,00
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang**	**Kabupaten Sijunjung**	**50%**	**304.807.111,00**	**APBD II**	**415.000.000,00**
1.03.12.2.03.003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kabupaten Sijunjung	-	-	APBD II	75.000.000,00

1.03.12.2.03.004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kabupaten Sijunjung	60 Dokumen	170.088.375,00	APBD II	200.000.000,00
1.03.12.2.03.005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kabupaten Sijunjung	1 Dolumen	72.340.436,00	APBD II	75.000.000,00
1.03.12.2.03.007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kabupaten Sijunjung	1 Sistem Informasi	62.378.300,00	APBD II	65.000.000,00
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah monitoring dan pemantauan pemanfaatan ruang**	**Kabupaten Sijunjung**	**160 Kali**	**70.818.950,00**	**APBD II**	**80.000.000,00**
1.03.12.2.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	35.000.000,00	APBD II	40.000.000,00
1.03.12.2.04.013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	35.818.950,00	APBD II	40.000.000,00
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**201.716.750,00**	**APBD II**	**1.470.000.000,00**
2.10.04.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**		**25%**	**80.000.000,00**	APBD II	**50.000.000,00**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan daerah Kab/Kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**25%**	**80.000.000,00**	**APBD II**	**50.000.000,00**

2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD II	50.000.000,00
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD II	80.000.000,00
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Kabupaten Sijunjung**	**25%**	**46.668.750,00**	**APBD II**	**120.000.000,00**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda kab/Kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**25%**	**46.668.750,00**	**APBD II**	**120.000.000,00**
2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD II	50.000.000,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	31.668.750,00	APBD II	70.000.000,00
02.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DANGANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE**	**Persentase ketersediaan tanah objek landreform yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**Kabupaten Sijunjung**	**45%**	**12.354.000,00**	**APBD II**	**200.000.000,00**

02.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**Kabupaten Sijunjung**	**8 Dokumen**	**12.354.000**	**APBD II**	**200.000.000,00**
02.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung				
02.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kabupaten Sijunjung	8 Dokumen	12.354.000	APBD II	200.000.000
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase mediasi penanganan sengketa tanah ulayat**		**25%**	**25.800.000,00**	**APBD II**	**100.000.000,00**
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan tanah ulayat dalam daerah kab/kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**25%**	**25.800.000,00**	**APBD II**	**100.000.000,00**
2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	2 Laporan	20.800.000,00	APBD II	50.000.000,00
2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD II	50.000.000,00

2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah**		**80%**	**36.894.000,00**	**APBD II**	**1.000.000.000,00**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kab/Kota**	**Kabupaten Sijunjung**	**80%**	**36.894.000,00**	**APBD II**	**1.000.000.000,00**
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	36.894.000,00	APBD II	1.000.000.000,00
				JUMLAH	**51.070.033.589,00**		**111.285.381.115,63**

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Capaian Indikator Kinerja Kunci Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
					Target Awal
1	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan	%	62,00	62,00
		Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	60,00	60,00
		Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah yang sesuai standar	%	5,00	10,00
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		73,25	80,22

Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat bahwa pada Renja Tahun 2025 ada peningkatan target dari target tahun lalu serta ada yang tetap targetnya , hal ini dikarenakan dengan mempertimbangkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun sebelumnya.

5.2. Indikator Kinerja Hasil

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung mempunyai 12 (dua belas) Indikator Kinerja Hasil yang merupakan tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Hasil	Sat	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2025
1	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kemantapan Jalan	%	49,52	62,00
		Rata-rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	68,66	60,00
		Persentase tenaga kerja konstruksi yg bersertifikat	%	27,65	29,58
		Indeks Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah		0	50,00
		Persentase Gedung Pemerintah sesuai standar	%	84,50	87,56
		Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	%	35,00	50,00
		Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	%	85,00	85,00
2	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	15,00	45,00
		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	25,00	20,00
		Persentase ketersediaan tanah objek landreform yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0,00	15,00
		Persentase Penanganan Sengketa Tanah Ulayat melalui Mediasi	%	10,00	20,00
		Persentase penatagunaan tanah	%	75,00	75,00

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk satu (1) tahun periode, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara umum dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian secara kualitatif masih dapat kekurangan yang disebabkan adanya beberapa kendala atau hambatan.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target akan tercapai, demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja selanjutnya kami akan menyusun program dan kegiatan serta anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan diharapkan mampu memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

Muaro Sijunjung, 02 Juli 2024